PEMERINTAH KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA

# PERATURAN BUPATI
# LIMA PULUH KOTA

NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

## TAHUN 2026



Bersama Mewujudkan
Lima Puluh Kota Bermartabat,
Maju, Sejahtera dan
Berkelanjutan



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang :

a. bahwa rencana kerja Pemerintah Daerah merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Pemerintah Daerah menunjukkan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi proses pembangunan Daerah, kerangka ekonomi dan keadaaan keuangan Daerah, serta rencana program dan kegiatan sehingga perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan Pasal 354 dan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Rancangan Akhir perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dijadikan bahan penyempurnaan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dari perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya

ditetapkan sebagai Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1);

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan, Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2026 merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi sampai triwulan II tahun 2026, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijadikan:
   a. dasar penetapan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah; dan
   b. pedoman penyusunan perubahan KUA serta Perubahan PPAS.

(2) Perubahan KUA serta perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD Tahun 2026.

Pasal 4

(1) Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
   a. bab I memuat pendahuluan;
   b. bab II memuat evaluasi RKPD triwulan II tahun 2026;
   c. bab III memuat kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah;
   d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
   e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
   f. bab VI memuat penutup.

(2) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 4 Agustus 2026

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFNI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 4 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

HERMAN AZMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2026 NOMOR 26

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DAFTAR ISI ..... i
DAFTAR TABEL ..... ii
DAFTAR GRAFIK ..... iii
DAFTAR GAMBAR ..... iv

BAB I : PENDAHULUAN ..... I
1.1 Latar Belakang ..... I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan ..... I-4
1.3 Hubungan Antar Dokumen ..... I-7
1.4 Maksud dan Tujuan ..... I-8
1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD ..... I-9

BAB II : EVALUASI RKPD TRIWULAN II TAHUN 2026 ..... II
2.1 Evaluasi Capaian Indikator Makro Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2026 ..... II-1
2.2 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 ..... II-7
2.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 ..... II-16
2.4 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Triwulan II Tahun 2026 ..... II-46

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH ..... III
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... III-1
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..... III-8

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan ..... IV-1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026 ..... IV-8
4.3 Program Pembangunan Daerah dan Alokasi Anggaran Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 ..... IV-13
4.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2026 ..... IV-25
4.5 Program Daerah Mendukung Mandatori Nasional ..... IV-31
4.6 Program Prioritas Pendukungan Perubahan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah ..... IV-46
4.7 Kinerja Penyelenggaraan Pemeritahan Daerah ..... IV-88

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ..... V-I

BAB VI : PENUTUP ..... VI-I

**DAFTAR TABEL**


| | | Halaman |
|---|---|---|
| Tabel 2.1 | Capaian, Target, dan Revisi Target Indikator Makro Ekonomi | II-1 |
| Tabel 2.2 | Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdasarkan Indikator Tujuan dan Sasaran Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2026 | II-8 |
| Tabel 2.3 | Indikator Utama Pembangunan Provinsi dan Kabupaten | II-12 |
| Tabel 2.4 | Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025-2026 | II-17 |
| Tabel 2.5 | Rekap Konsistensi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pada RKPD Dan APBD Tahun 2026 | II-48 |
| Tabel 2.6 | Realisasi Program/Kegiatan/Subkegiatan Bidang Urusan pada RKPD 2026 | II-52 |
| Tabel 2.7 | Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan | II-70 |
| Tabel 3.1 | Indikator Makro Ekonomi Indonesia Triwulan II Tahun 2026 | III-1 |
| Tabel 3.2 | Distribusi dan Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran Triwulan II Tahun 2026 | III-2 |
| Tabel 3.3 | Proyeksi Indikator Kinerja Makro pada RPJMD, RKPD 2026 | III-7 |
| Tabel 3.4 | Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025 | III-8 |
| Tabel 3.5 | Rencana Pendapatan dan Belanja Tahun 2026 | III-10 |
| Tabel 3.6 | Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021-2025 | III-11 |
| Tabel 3.7 | Realisasi, dan Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2026 (Rupiah) | III-13 |
| Tabel 3.8 | Rincian Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2025 | III-17 |
| Tabel 3.9 | Realisasi dan Rencana Perubahan Belanja Daerah kabupaten LimaPuluh Kota | III-17 |
| Tabel 3.10 | Realisasi dan Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota | III-19 |
| Tabel 4.1 | Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah | IV-4 |
| Tabel 4.2 | Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 | IV-8 |
| Tabel 4.3 | Target Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 | IV-9 |
| Tabel 4.4 | Matrik Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Daerah | IV-10 |
| Tabel 4.5 | Program- Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 (Perubahan) dan Prakiraan Maju 2027 | IV-13 |
| Tabel 4.6 | Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan | IV-25 |
| Tabel 4.7 | Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Pendukungan PKK Tahun 2026 | IV-33 |
| Tabel 4.8 | Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukungan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 | IV-37 |
| Tabel 4.9 | Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukungan Pengarus Utamaan Gender (PUG) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 | IV-42 |
| Tabel 4.10 | Daftar Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian SPM di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 | IV-47 |
| Tabel 4.11 | Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Tahun 2021 – 2025 (Rupiah/kapita/bulan) | IV-57 |
| Tabel 4.12 | Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam Penanganan Kemiskinan | IV-59 |
| Tabel 4.13 | Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam Penanganan Stunting Tahun 2026 | IV-62 |
| Tabel 4.14 | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pengendalian Inflasi di Daerah | IV-66 |
| Tabel 4.15 | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit Tahun 2026 | IV-70 |
| Tabel 4.16 | Rencana Program/Kegiatan Penanggulangan Bencana | IV-71 |
| Tabel 4.17 | Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2026 | IV-89 |
| Tabel 4.18 | Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota | IV-91 |
| Tabel 5.1 | Alokasi Anggaran Masing-Masing OPD Tahun 2022 – 2025 | V-2 |
| Tabel 5.2 | Rekapitulasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif RKPD Tahun 2026 APBD Tahun 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 | V-6 |

**DAFTAR GRAFIK**

Halaman


| | | |
|---|---|---|
| Grafik 2.1 | Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025(%)…… | II-2 |
| Grafik 2.2 | PDRB per Kapita (ADHB) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2025 (juta rupiah)…… | II-3 |
| Grafik 2.3 | Angka Kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi dan Nasional Tahun 2021 – 2025…… | II-4 |
| Grafik 2.4 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025 (%)…… | II-5 |
| Grafik 2.5 | Gini Ratio Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025…… | II-6 |
| Grafik 4.1 | Angka Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2024 (%)…… | IV-58 |

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan terdiri dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan, yang mana perencanaan ini dilakukan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yaitu tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa perencanaan pembangunan tingkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 merupakan dokumen yang disusun setiap tahunnya oleh Pemerintah Daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2026 merupakan penyesuaian program kegiatan dalam rencana kerja pembangunan daerah yang dilakukan atas dasar evaluasi atau kebijakan baru. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi diantara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS), serta Perubahan Rancangan Kerja dan Anggaran (Perubahan RKA) Perangkat Daerah. Perubahan RKPD juga merupakan instrumen untuk menjaga konsistensi pencapaian target RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029, sehingga perubahan bukan hanya penyesuaian anggaran tetapi juga penyesuaian target kinerja daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2026 dapat mengalami perubahan di tahun berjalan sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Permendagri 86 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD Tahun 2026 dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD Tahun 2026 berkenaan; dan/atau

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, merupakan dokumen wajib yang harus disusun dan disediakan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya.

Pada ayat (4) pasal 343 dinyatakan bahwa Perubahan RKPD Tahun 2026 juga dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan. Dasar perubahan RPKP 2026 ini juga merujuk pada hasil evaluasi capaian indikator makro, IKU dan indikator kinerja daerah sampai Triwulan II.

Dalam hal pelaksanaan Perubahan RKPD ini alasan dilakukan perubahan adalah sebagai berikut :

A. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah.

Hal ini bisa terjadi karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi seperti perubahan asumsi Ekonomi Makro yang perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, di mana kerangka ekonomi dan kerangka keuangan yang komprehensif serta akurat dapat merepresentasikan kondisi dan prospek daerah dari perspektif ekonomi. Rancangan kerangka ekonomi daerah yang baik harus melalui tahapan sinkronisasi dan integrasi dengan kerangka ekonomi regional dan nasional. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional dan regional serta kebijakan ekonomi di tingkat nasional dan regional. Rancangan kerangka ekonomi dan kerangka keuangan daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 mendeskripsikan kondisi perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota serta arah kebijakan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Rancangan ini akan memberikan kontribusi dalam upaya memproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah secara akurat.

B. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan

Beberapa aspek yang mempengaruhi ketidaksesuaian adalah perubahan asumsi ekonomi makro dan dukungan pemerintah. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) merupakan salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah, yang diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kesinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan oleh bagaimana kemandirian dan kemampuan pembiayaan yang tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah.

Dari sisi belanja RKPD Tahun 2026, total pendapatan direncanakan sebesar Rp 1.360.521.575.144,00. Sedangkan pada APBD Tahun 2026, target pendapatan turun menjadi sebesar Rp 1.162.703.570.173,00 karena penyesuaian alokasi dana transfer. Pada perubahan RKPD 2026, pendapatan direncanakan sebesar Rp 1.273.070.244.126,00. Target pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp 110.366.673.953,00 dibandingkan APBD Tahun 2026, sebagai akibat penyesuaian alokasi Pendapatan Transfer berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus dan Penyaluran Kurang Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2024 bagi daerah termasuk Provinsi Sumatera Barat dan penyesuiaan pagu Dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

C. Perkembangan yang tidak sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan

Sebagai salah satu entitas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kebijakan belanja dalam APBD dipengaruhi pula oleh kebijakan yang berskala nasional dari pemerintah pusat dan kebijakan yang masuk dalam prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2026 perlu mengacu pada Tema RKP Tahun 2026. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2026 “Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif” dan untuk mewujudkan Tema RKP tersebut ditetapkan melalui sasaran

makro pembangunan nasional.

D. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

Perumusan arah kebijakan keuangan daerah untuk Perubahan RKPD Tahun 2026 ini, juga memperhatikan hasil pemeriksaan BPK RI terkait SILPA audited untuk tahun 2025. Ada perbedaan asumsi SILPA pada APBD awal dengan SILPA audited setelah pemeriksaan BPK RI, di mana SILPA yang diperkirakan sebesar Rp 92.021.185.000,00, sedangkan SILPA rill audited pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebesar Rp 50.449.554.115,17. Dengan demikian ada selisih antara proyeksi SILPA di APBD 2026 dengan SILPA riil sebesar Rp 41.572.045.069,83 yang akan ditutup dengan rasionalisasi belanja dan peningkatan proyeksi pendapatan Transfer Antar Daerah.

Di sisi lain berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Pengelolaan Dana Desa, pagu Dana Desa untuk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 adalah sebesar Rp 27.823.425.000, artinya terdapat pengurangan pagu sebesar Rp 46.346.032.000. Secara total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami kenaikan sebesar Rp 89.288.765.000,00

E. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Menyikapi perubahan alokasi Dana Transfer sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus dan Penyaluran Kurang Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2024 bagi daerah Tertentu di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat. Keputusan Menteri Keuangan merinci tambahan Transfer ke Daerah untuk masing-masing daerah di tiga provinsi tersebut diatas sebagai dukungan dana dari pemerintah pusat untuk daerah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera Bagian Utara, di mana untuk Kabupaten Lima Puluh Kota ada penambahan Transfer ke Daerah dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil sebesar Rp 135.634.797.000.

Berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900.1.1/4277/SJ Tanggal 21 Mei 2026 hal Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Terdampak Bencana, Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk daerah penerima Bantuan Keuangan dari Kota Payakumbuh sebesar Rp 1.000.000.000 sehingga ada Pendapatan Bantuan Keuangan. Total penambahan Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah Rp 21.077.908.953,00

F. Kebijakan nasional dan peraturan yang lebih tinggi

Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2026 perlu mengacu pada Tema RKP Tahun 2026. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2026 “Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif” dengan sasaran makro pembangunan nasional pada tahun 2026, yaitu: 1). Laju Pertumbuhan Ekonomi; 2). PDRB per kapita (juta); 3). Kontribusi PDRB Provinsi; 4). Tingkat Kemiskinan; 5). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); 6). Indeks Rasio Gini; 7). Indeks Modal Manusia; 8). Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK dan 9). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.

Berdasarkan SEB Menkeu Dan Mendagri Nomor: SE-3/MK.08/2025 dan 900.1.1/9902/SJ terkait pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat pada APBD 2026, wajib mendukung program prioritas pusat yaitu Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih dan lainnya.

Perubahan RKPD Tahun 2026 disusun mulai dari tahapan penyusunan rancangan perubahan RKPD Tahun 2026, selanjutnya rancangan akhir perubahan RKPD Tahun 2026 dan terakhir penetapan perubahan RKPD Tahun 2026. Penyusunan perubahan RKPD Tahun 2026 berdasarkan kepada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2026 sampai triwulan II tahun berjalan yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai dan untuk mengidentifikasi kendala serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Di samping itu, Perubahan RKPD tahun 2026 juga memperhatikan capaian indikator dan target pembangunan daerah yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045.

Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah yang dimuat dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 juga berfungsi untuk memastikan isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional mulai dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada tahun 2026 ini, agar target dan tujuan nasional yang ingin dicapai dapat terealisasi, antara lain : Penguatan Sumber Daya Manusia, pendidikan, dan kesehatan; Program Makan Bergizi Gratis (MBG); Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim; Pengendalian Inflasi Daerah; Peningkatan Pertumbuhan perekonomian daerah; Dukungan Swasembada Pangan; dan Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Perubahan RKPD tahun 2026 Kabupaten Lima Puluh Kota pada prinsipnya mengacu kepada prioritas RKPD tahun 2026 terutama menyangkut kepada Tema RKPD tahun 2026 Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Peningkatan Kualitas SDM dan Infrastruktur Untuk Mendukung Transformasi Sosial Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing"

Memperhatikan hal-hal sebagaimana di atas, maka menjadi sangat penting untuk segera dilakukan perubahan RKPD Tahun 2026 dan mengingat posisi strategis dokumen perubahan RKPD Tahun 2026 dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan perhatian dan daya upaya optimal sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen perubahan RKPD Tahun 2026 agar dapat menghasilkan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026 yang berkualitas.

Sesuai dengan pasal 356 ayat 1 dan 2 Permendagri 86 Tahun 2017 bahwa Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2026 akan dijadikan sebagai Dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

## 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Beberapa landasan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 ini di antaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undag-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Mejdi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1419);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 185);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 80);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 59);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 127);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana bagi Hasil (DBH), DAU, Otsus Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Tahun 2026 Nomor 59);

29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 79)
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);
35. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 41 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

## 1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Perubahan RKPD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang terkait erat dengan dokumen perencanaan lainnya serta dokumen penganggaran, mulai dari Dokumen RTRW, RPJPD, RPJMD sampai KUA dan PPAS serta APBD.

Adapun hubungan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026 dengan dokumen terkait lainnya adalah:

1. Perubahan RKPD Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RPJPD dan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota serta hasil evaluasi RKPD Tahun 2026 Triwulan II tahun berjalan.
2. Perubahan RKPD Tahun 2026 disusun dengan mengacu secara tidak langsung kepada RPJP Nasional dan RPJMN terutama untuk pencapaian program Asta Cita Nasional.
3. Perubahan RKPD Tahun 2026 disusun dengan mengacu secara tidak langsung kepada RPJPD dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat.
4. Dalam perumusan rancangan perubahan RKPD Tahun 2026, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran kepada Kepala Daerah berdasarkan hasil reses/ penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

5. Perubahan RKPD Tahun 2026 juga tetap memperhatikan masukan usulan-usulan masyarakat melalui Musrenbang RKPD yang telah diakomodir sebelumnya pada RKPD.
6. Perubahan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan menjadi pedoman dalam penyempurnaan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
7. Perubahan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan, selanjutnya juga menjadi dasar dalam keseluruhan proses penyusunan perubahan APBD Tahun 2026, termasuk dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026.

## 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan perubahan RKPD Tahun 2026 ini adalah untuk menyediakan dokumen rencana pembangunan daerah tahun 2026 yang mana program dan kegiatannya telah disesuaikan dengan berbagai kondisi termasuk keuangan dan kebijakan-kebijakan yang berkembang, sehingga menjadi acuan dan arahan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang terkoordinasi, sinergis dan partisipatif serta sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2026 dan juga telah mengakomodir Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta pemutakhiran RKP yang disesuaikan dengan pemutakhiran program strategis nasional sehingga berdampak pada penyesuaian program dan kegiatan sebagaimana dimanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Tujuan penyusunan perubahan RKPD Tahun 2026 adalah untuk menyesuaikan program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2026 dengan perkembangan yang terjadi, baik dikarenakan adanya perubahan kebijakan keuangan maupun arah kebijakan pembangunan yang muncul setelah terpilihnya kepala daerah yang baru, Perubahan RKPD Tahun 2026 juga dilakukan untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang baru.

Tujuan perubahan RKPD Tahun 2026:

1. Menyesuaikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD tahun berjalan
2. Mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah
3. Menjamin program dan kegiatan pemerintah daerah tetap relevan dan efektif dalam mencapai sasaran pembangunan
4. Berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pencapaian target RPJMD, pencapaian target SPM, penguatan daya saing daerah dan percepatan pencapaian indikator makro daerah.
5. Sebagai landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2026 dalam rangka penyusunan perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.
6. Sebagai pedoman penyempurnaan rancangan akhir perubahan Renja PD Tahun 2026.

## 1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD

Perubahan RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

BAB II : EVALUASI RKPD TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi Capaian Indikator Makro sampai dengan Triwulan II Tahun 2026
- 2.2 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026
- 2.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026
- 2.4 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Triwulan II Tahun 2026

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026
- 4.3 Program Pembangunan Daerah dan Alokasi Anggaran Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026
- 4.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2026
- 4.5 Dukungan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Terhadap RKP Tahun 2026
- 4.6 Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai Perencanaan Pembangunan Berbasis THIS (Tematik, Holistik, Integratif, Spasial)
- 4.7 Program Daerah Mendukung Mandatori Nasional
- 4.8 Program Prioritas Pendukungan Perubahan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
- 4.9 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : PENUTUP

# BAB II
# EVALUASI RKPD TRIWULAN II TAHUN 2026

## 2.1. EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR MAKRO SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

Capaian indikator makro Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota sampai tahun 2025, dan target serta realisasi capaian sampai dengan triwulan II tahun berjalan atau tahun 2026 secara umum dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Capaian, Target, dan Revisi Target Indikator Makro Ekonomi

| No | Indikator Makro | Provinsi Sumatera Barat | | | | Kab. Lima Puluh Kota | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target 2025 | Realisasi 2025 | Target 2026 | Realisasi 2026 (TW II) | Target 2025 | Realisasi 2025 | Target 2026 | Realisasi 2026 (TW II |
| 1 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 4,80 | 3,37 | 5,70 | On the track | 4,14 | 3,46 | 5,68 | On the track |
| 2 | PDRB Per Kapita ADHB (Rp. Juta) | 62,53 | 59,55 | 69.59 | On the track | 57,07 | 55,42 | 63,53 | On the track |
| 3 | PDRB Per Kapita ADHK (Rp. Juta) | 35,33 | 206.137.880 | 36.87 | On the track | 33,19 | 13.372.000 | 34,68 | On the track |
| 4 | Indeks Pembangunan Manusia | 76,93 | 77,27 | 77,48 | On the track | 72,69 | 73,43 | 73,05 | On the track |
| 5 | Umur Harapan Hidup (Tahun) | 74,6 | 74,69 | 74,83 | On the track | 73,60 | 73,64 | 73,79 | On the track |
| 6 | Harapan Lama Sekolah (Tahun) | 14,47 | 14,31 | 14,62 | On the track | 13,46 | 13,53 | 13,48 | On the track |
| 7 | Rata-rata lama sekolah | 9,48 | 9,77 | 9,58 | On the track | 8,21 | 8,49 | 8,26 | On the track |
| 8 | Pengeluaran Per Kapita (Rp. Ribu) | 11893 | 12041 | 12074 | On the track | 10807 | 582,377 | 10972 | On the track |
| 9 | Tingkat Kemiskinan (%) | 5,22 | 5,31 | 4,92 | On the track | 6,27 | 6,10 | 5,88 | On the track |
| 10 | Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) | 308444 | 312300 | 294.489 | On the track | 24457 | 24610 | 24141 | On the track |
| 11 | Rasio Gini | 0,282 | 0,28 | 0,281 | On the track | 0,219 | 0,218 | 0,218 | Tercapai |
| 12 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 5,57 | 5,62 | 5,39 | On the track | 3,73 | 3,77 | 3,65 | On the track |

*Sumber: RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026; Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2026*

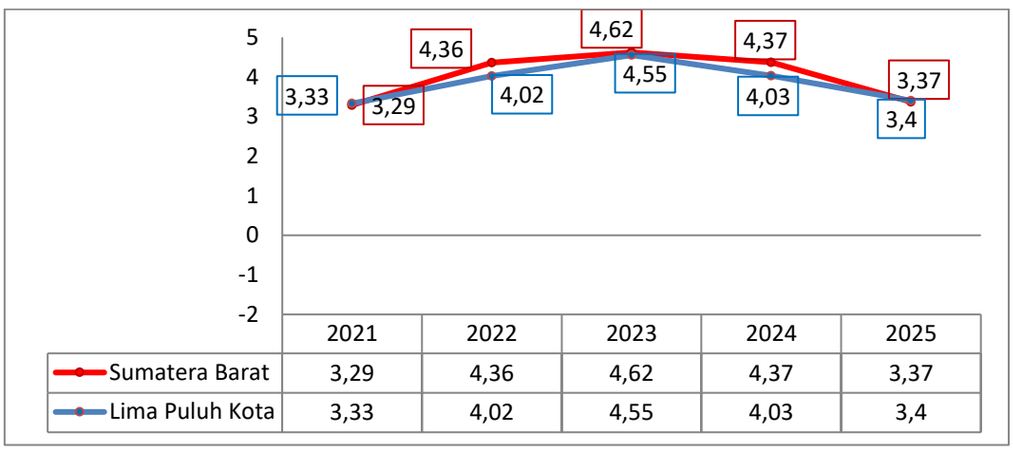
Tabel 2.1 di atas berisi data terkait dengan capaian tahun 2025 dan target serta realisasi triwulan II tahun 2026, atas indikator makro ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Target Provinsi tahun 2026 merupakan target yang tertuang pada RPJMD Provinsi. Penyajian data dalam tabel di atas dan tabel-tabel seterusnya merupakan data capaian terakhir yaitu data pada tahun 2025, sedangkan untuk capaian triwulan II tahun 2026 adalah proyeksi dengan menggunakan 3 klasifikasi yakni, a) Tercapai; b) Dapat tercapai/*On the track*; dan c) Tidak dapat tercapai. Data sebagaimana dimaksud di atas masing-masingnya telah dituangkan pada dokumen RKPD Tahun 2026, namun demikian untuk memperjelas tabel 2.1. tersebut, berikut diuraikan berdasarkan indikator:

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di daerah dapat dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi, Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Grafik 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025(%)




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sumatera Barat | 3,29 | 4,36 | 4,62 | 4,37 | 3,37 |
| Lima Puluh Kota | 3,33 | 4,02 | 4,55 | 4,03 | 3,4 |

*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025*

Secara umum, kurva laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota selama periode 2021–2025 jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota cenderung berada di bawah capaian provinsi pada sebagian besar periode. Pada tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota tercatat sebesar 4,03 persen, sedangkan Provinsi Sumatera Barat mencapai 4,37 persen**.** Capaian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemulihan dan ekspansi ekonomi di tingkat kabupaten berlangsung lebih lambat dibandingkan capaian provinsi secara keseluruhan.

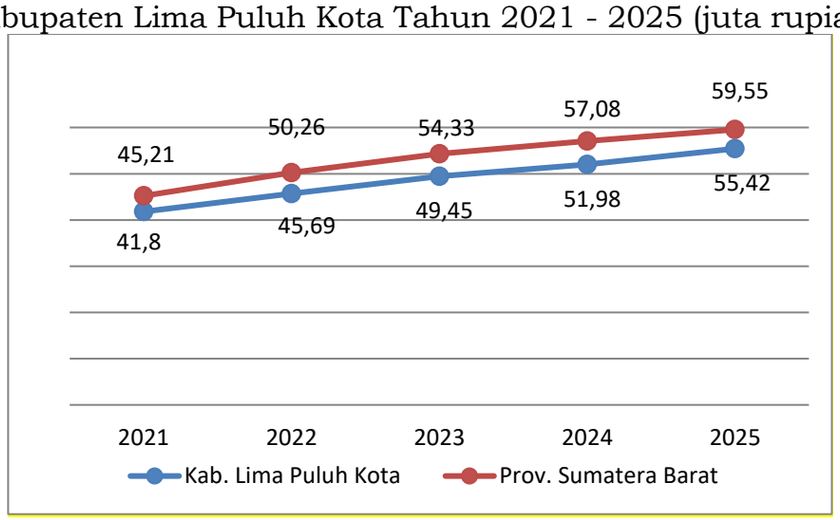
Pada tahun 2025, Kabupaten Lima Puluh Kota menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,14 persen, namun realisasinya mencapai 3,46 persen. Sementara itu, Provinsi Sumatera Barat menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80 persen dengan realisasi 3,37 persen. Meskipun belum mencapai target yang ditetapkan, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2025 sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian Provinsi Sumatera Barat.

B. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi pada seluruh lapangan usaha terhadap jumlah penduduk. PDRB per kapita digunakan untuk melihat sebaran/peta kekuatan ekonomi antar sektor dan untuk mengetahui berapa besar pendapatan per kapita penduduk pada suatu wilayah dan waktu tertentu yang disajikan dalam bentuk PDRB per kapita. Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor–faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Untuk menghitung PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, digunakan data PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha dan jumlah penduduk pada tahun bersangkutan, yang artinya menggambarkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Dalam perhitungannya, PDRB per kapita ADHB mengabaikan inflasi. Selama periode tahun 2021–2025, PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan tren yang terus meningkat. Hal ini mencerminkan peningkatan pendapatan rata-rata dan kesejahteraan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 tahun terakhir. Peningkatan tersebut menandakan bahwa aktivitas perekonomian daerah semakin berkembang seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi pascapandemi, meningkatnya produktivitas sektor-sektor unggulan, serta adanya berbagai program pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah seperti dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.2
PDRB per Kapita (ADHB)
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2025 (juta rupiah)

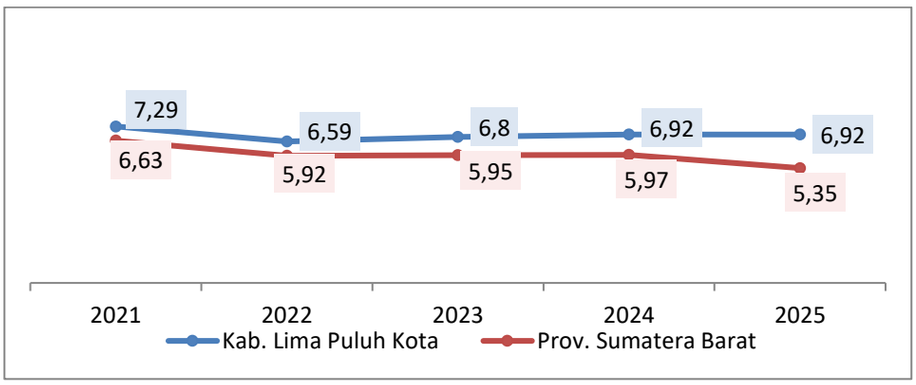



C. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah global yaitu keadaan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Grafik 2.3
Angka Kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota
dan Provinsi dan Nasional Tahun 2021 – 2025




*Sumber: BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat; BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025*

Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota tercatat sebesar 6,92 persen, masih berada di atas target yang telah ditetapkan. Selanjutnya pada tahun 2025, tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 6,10 persen, lebih rendah dibandingkan target sebesar 6,27 persen. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta meningkatnya efektivitas program-program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat, tingkat kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota masih relatif lebih tinggi. Namun demikian, secara umum kurva tingkat kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota selama periode 2021–2025 membentuk pola menurun, yang mencerminkan semakin membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat.

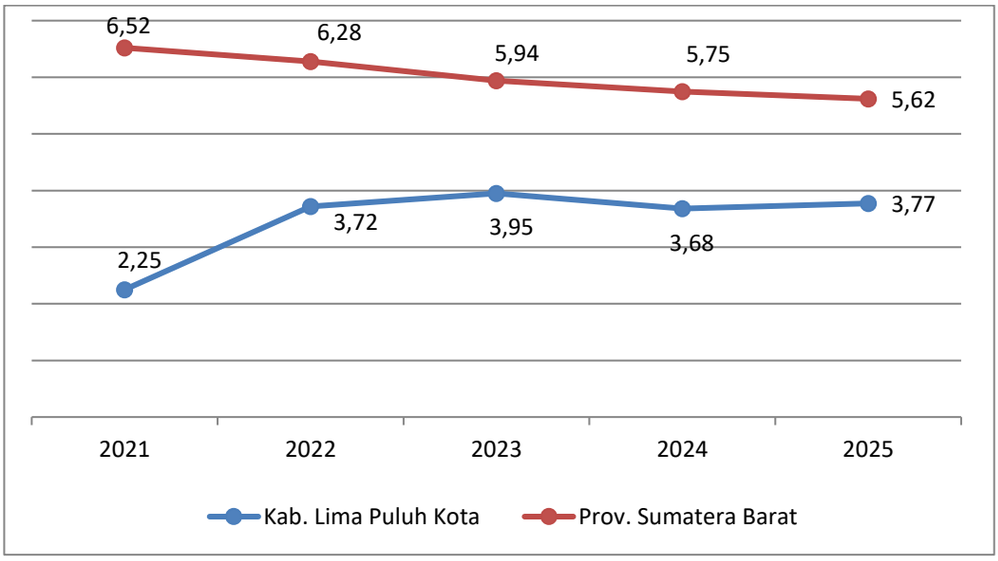
D. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka adalah mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin dapat pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Pada tahun 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada angka 3,77 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 3,73 persen. Meskipun demikian, angka tersebut masih tergolong rendah dan berada jauh di bawah tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 5,62 persen. Secara umum, kurva TPT Kabupaten Lima Puluh Kota selama periode 2021–2025 berfluktuatif namun jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Sumatera Barat, TPT Kabupaten Lima Puluh Kota selalu berada pada posisi di bawah TPT Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menyerap tenaga kerja relatif lebih

baik dibandingkan rata-rata provinsi. Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.4
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025 (%)




*Sumber BPS Provinsi Sumatera Barat; BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025*

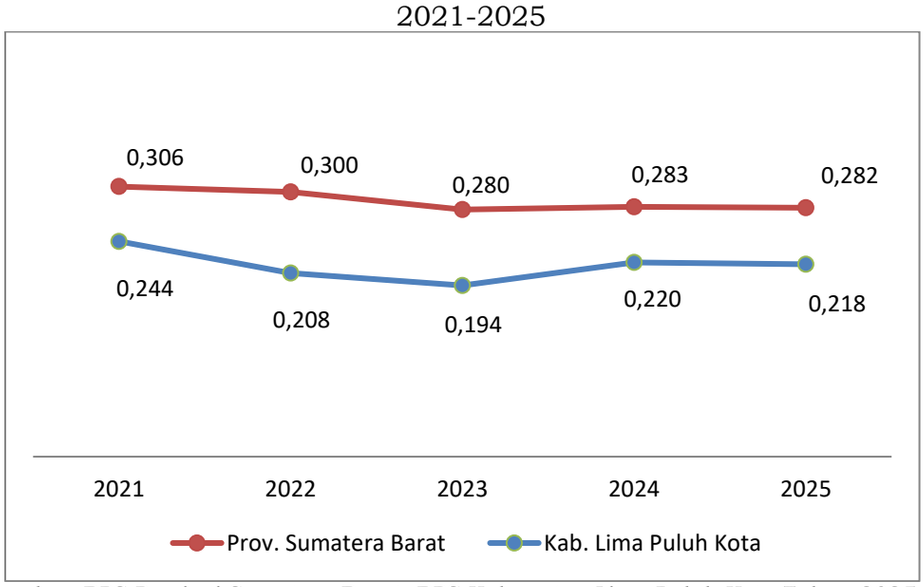
E. Ketimpangan Pendapatan (Gini *Ratio*)

Gini *ratio* adalah salah satu ukuran ketimpangan pendapatan penduduk secara menyeluruh. Gini *Ratio* didasarkan pada kurva Lorenz yang merupakan kurva 2 dimensi antara distribusi penduduk (persentase kumulatif penduduk) dan distribusi pengeluaran per kapita (persentase kumulatif pengeluaran perkapita). Nilai Gini *ratio* berkisar antara 0 dan 1. Jika G<0,3 berarti memiliki ketimpangan yang rendah, 0,3<G<0,5 berarti memiliki ketimpangan yang sedang dan jika G>0,5 berarti memiliki ketimpangan yang tinggi.

Pada tahun 2021 hingga 2023, Gini Rasio Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan fluktuasi yang tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2024, Gini Rasio tercatat sebesar 0,220 selanjutnya pada tahun 2025, Gini Rasio kembali mengalami perbaikan dengan realisasi sebesar 0,218**,** lebih baik dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 0,219. Secara umum Gini Rasio Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang rendah.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat, tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Lima Puluh Kota relatif lebih rendah. Pada tahun 2025, Gini Rasio Provinsi Sumatera Barat tercatat sebesar 0,282 sedangkan Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 0,218. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan hasil pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota lebih baik dibandingkan rata-rata kondisi provinsi.

Grafik 2.5
Gini Ratio Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025




*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025*

F. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

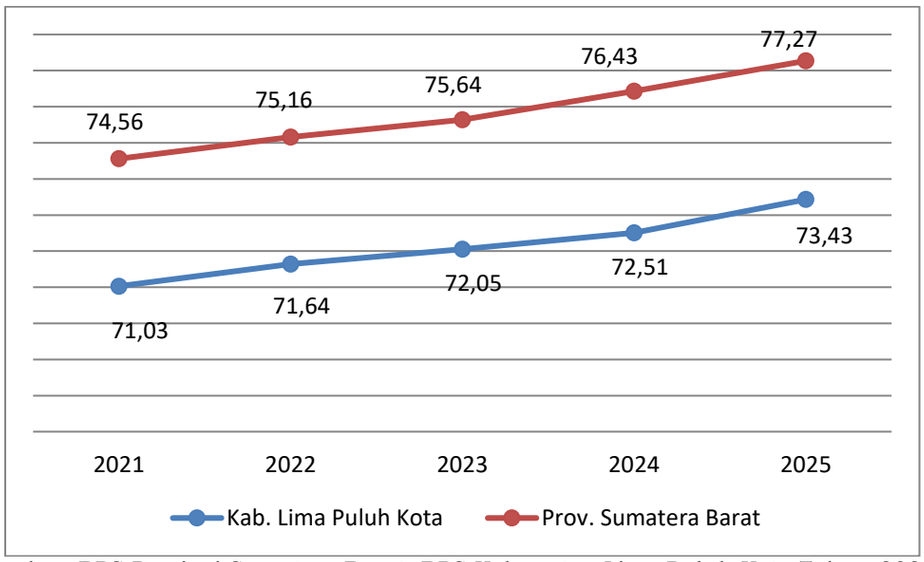
Nilai Indeks Pembangunan Manusia dipengaruhi oleh dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dimensi pendidikan yaitu: Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), dimensi kesehatan yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) dan dimensi ekonomi yaitu pengeluaran per kapita.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 sebesar 73,43 naik 0,92 jika dibandingkan dengan IPM tahun 2024 dan melampaui target yang telah ditetapkan di tahun 2025 yaitu 72,69. Kenaikan IPM ini didorong oleh peningkatan dari seluruh dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Untuk tahun 2026, IPM ditargetkan sebesar 73,05

Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lima Puluh Kota dibentuk oleh tiga dimensi utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak (ekonomi). Pada dimensi pendidikan, capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2025 sebesar 8,49 melampaui target sebesar 8,21 sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) mencapai 13,53, juga melampaui target sebesar 13,46**.** Pada dimensi kesehatan, Angka Harapan Hidup (AHH) mencapai 73,64 sedikit lebih tinggi dibandingkan target 73,60. Sementara itu, dimensi ekonomi diukur melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebagai indikator kemampuan daya beli masyarakat.

Meskipun indikator pembentuk IPM pada dimensi pendidikan dan kesehatan telah mencapai bahkan melampaui target tahun 2025, posisi IPM Kabupaten Lima Puluh Kota masih berada pada peringkat ke-4 terendah di Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian terhadap target tahunan belum sepenuhnya mampu meningkatkan daya saing daerah dibandingkan kabupaten/kota lain, karena peningkatan indikator di daerah lain berlangsung lebih cepat atau memiliki capaian absolut yang lebih tinggi. Rendahnya capaian nilai IPM Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat guna memperkecil kesenjangan tersebut.

Grafik 2.6
Perbandingan Nilai IPM Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025 (Poin)




Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2025 adalah sebesar 77,27 dan untuk tahun 2026 telah ditargetkan sebesar 77,48. Dapat dilihat bahwa indeks pembangunan manusia Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 sudah melebihi target untuk tahun 2026. Adapun Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 yaitu berada pada angka 73,43. Angka ini telah melebihi target pada tahun 2026 yang ditargetkan sebesar 73,05.

## 2.2. EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

Evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah dilakukan untuk mengetahui sejauh mana capaian dari target-target pada Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah yang sudah ditetapkan untuk melihat kendala dan yang dihadapi sehingga dapat diambil langkah-langkah strategis untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 terdapat 33 Indikator Kinerja Utama yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah. Pada 5 Misi Kepala daerah yang ada, terdapat 7 Tujuan dan 18 Sasaran dimana masing-masing tujuan dan sasaran tersebut terdapat Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah. Tingkat capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di halaman berikut ini:

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Berdasarkan Indikator Tujuan dan Sasaran Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2025-2026

| NO | MISI | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2025 | REALISASI 2025 | TARGET 2026 | REALISASI 2026 (TW II)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya<br><br>"SAKATO BERMARTABAT" | **Tujuan 1 :** | | | | | | |
| | | Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara', Syarak Basandi Kitabullah | Indeks ABS-SBK | Indeks | 2.1 | 2,31 | 2.14 | Tercapai |
| | | **Sasaran :**<br>1.1. Meningkatnya peran masyarakat dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya | Indeks ABS-SBK | Indeks | 2.1 | 2,31 | 2.14 | Tercapai |
| | | **Tujuan 2 :** | | | | | | |
| | | Meningkatkan ketahanan dan kontribusi budaya dalam kehidupan masyarakat | Persentase cagar budaya yang dilestarikan | % | 100% | 100% | 100% | Tercapai |
| | | | Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan | % | 100% | 100% | 100% | Tercapai |
| | | **Sasaran :**<br>2.1 Optimalnya pelestarian warisan budaya | Persentase cagar budaya yang dilestarikan | % | 100% | 100% | 100% | Tercapai |
| | | | Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan | % | 100% | 100% | 100% | Tercapai |
| | | **Tujuan 3 :** | | | | | | |
| | | Meningkatkan pembangunan keluarga yang sejahtera, adil, dan inklusif | Indeks Pembangunan Keluarga | Indeks | 60,9 | 66,4 | 62,3 | Tercapai |
| | | **Sasaran :**<br>3.1 Meningkatnya keluarga yang berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif | Indeks Pembangunan Keluarga | Indeks | 60,9 | 66,4 | 62,3 | Tercapai |
| | | | | | | | | |
| 2. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih<br><br>"SAKATO BERINTEGRITAS" | **Tujuan 1 :** | | | | | | |
| | | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, berintegritas dan akuntabel | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Nilai | 3,1 | 1,6001 | 3.12 | On the track |
| | | **Sasaran :**<br>1.1 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | 71,66 | 71,23 | 72.04 | On the track |
| | | 1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Pelayanan Publik | Indeks | 4,28 | 4,21 | 4,29 | On the track |
| | | 1.3 Meningkatnya penegakan hukum dan pemberantasan | Indeks Reformasi Hukum | Indeks | 70 | 98,24 | 72,05 | Tercapai |

| NO | MISI | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2025 | REALISASI 2025 | TARGET 2026 | REALISASI 2026 (TW II)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | korupsi | | | | | | |
| | | **Tujuan 2 :** | | | | | | |
| | | Menegakkan keamanan dan ketertiban daerah | Persentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan | % | 100% | 122% | 100% | Tercapai |
| | | **Sasaran :** 2.1 Optimalnya penegakan keadilan, keamanan dan demokrasi substansial | Persentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan | % | 100% | 122% | 100% | Tercapai |
| | | | | | | | | |
| 3. | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif<br><br>"SAKATO ANDAL" | **Tujuan 1 :** | | | | | | |
| | | Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan standar hidup masyarakat secara inklusif | Indeks Pembangunan Manusia | Indeks | 72,69 | 73,43 | 73,05 | Tercapai |
| | | **Sasaran :** 1.1 Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah | Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 8,21 | 8,49 | 8,26 | Tercapai |
| | | | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 13,46 | 13,53 | 13,48 | Tercapai |
| | | 1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Usia Harapan Hidup | Tahun | 73,60 | 73,64 | 73,79 | On the track |
| | | 1.3 Meningkatnya standar hidup masyarakat | Rasio Gini | Rasio | 0,219 | 0,218 | 0,218 | Tercapai |
| | | **Tujuan 2 :** | | | | | | |
| | | Meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | Rp | Rp61.369.049 | 59.671.964 | Rp62.871.993 | On the track |
| | | **Sasaran :** 2.1 Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja secara inklusif | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | Rp | Rp61.369.049 | 59.671.964 | Rp62.871.993 | On the track |
| | | | | | | | | |
| 4. | Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan<br><br>"SAKATO SEJAHTERA" | **Tujuan 1 :** | | | | | | |
| | | 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 3,73 | 3,77 | 3,65 | On the track |
| | | | Pertumbuhan ekonomi | % | 4,14 | 3,46 | 5,68 | On the track |
| | | **Sasaran :** 1.1 Penguatan UKM dan Kewirausahaan Lokal | Proporsi jumlah IKM | % | 3.43% | 99,95 | 3.51% | Tercapai |
| | | | Rasio Kewirausahaan | % | 6,92 | 3,55 | 7,23 | Tidak tercapai |
| | | | Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB | % | 0,862 | 3,4354 | 0,904 | Tercapai |
| | | | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 3,73 | 3,77 | 3,65 | On the track |
| | | | Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) | % | 38,64 | 47,13 | 39,84 | Tercapai |
| | | | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) | % | 64.30 | 63,31 | 69,3 | On the track |
| | | **Sasaran :** 1.2. Meningkatnya stabilitas ekonomi makro yang terintegrasi dengan ekonomi domestik dan regional | Persentase dan stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok | % | 10.23 | 9,26 | 10.21 | On the track |

| NO | MISI | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2025 | REALISASI 2025 | TARGET 2026 | REALISASI 2026 (TW II)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) | % | 13.57% | 10,63 | 13.84% | On the track |
| | | | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB | % | 0.19 | 0,27 | 0,22 | Tercapai |
| | | | Rasio PDRB Industri Pengolahan | % | 4,45 | 6,85 | 4,925 | Tercapai |
| | | **Tujuan 2 :** | | | | | | |
| | | 2. Menjadikan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota | Rasio PDRB Akomodasi Mamin | % | 0.91 | 0.82 | 0.93 | On the track |
| | | **Sasaran :** 2.1 Mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Lima Puluh Kota | Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (ribu orang) | Ribu orang | 1 | 1,5 | 1.5 | Tercapai |
| | | | Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%) Kabupaten/Kota terhadap PDB Ekonomi Kreatif Provinsi | % | 1.611 | 2.49 | 1.651 | Tercapai |
| | | | | | | | | |
| 5. | Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing<br><br>"SAKATO UNGGUL" | **Tujuan 1 :** | | | | | | |
| | | 1. Menjadikan komoditas pertanian dan perikanan sebagai unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota | Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan( %) | % | 32.52 | 32,08 | 33.24 | On the track |
| | | **Sasaran :** 1.1.Meningkatnya produksi sektor pertanian dan perikanan sesuai penerapan ekonomi hijau | Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan( %) | % | 32.52 | 32,08 | 33.24 | On the track |
| | | | | | | | | |
| 6. | Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan<br><br>"SAKATO KUAT" | **Tujuan 1 :** | | | | | | |
| | | Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan | RT dengan Akses Sanitasi Aman | % | 7,25 | 0,46 | 9,33 | Tidak tercapai |
| | | | Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Perpipaan | % | 14 | 17,37 | 15.5 | Tercapai |
| | | | Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) | % | 35.52 | 11,23 | 36.48 | Tidak tercapai |
| | | **Sasaran :** 1.1 Membangun infrastruktur strategis | Indeks Risiko Bencana Daerah | % | 117,92 | 197,52 | 117,91 - 116,64 | Tidak tercapai |
| | | | Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau | % | 51,15 | 58,66 | 54,04 | Tercapai |

| NO | MISI | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2025 | REALISASI 2025 | TARGET 2026 | REALISASI 2026 (TW II)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **Sasaran :** 1.2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks tutupan lahan | Indeks | 75.39 | 75,07 | 75.46 | On the track |
| | | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | 75,8 | 78,91 | 76,01 | Tercapai |
| | | | Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) | % | 30.69 | 5,13 | 33.66 | Tidak tercapai |
| | | | | | | | | |
| 7. | Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari<br><br>"SAKATO MANDIRI" | **Tujuan 1 :** | | | | | | |
| | | Meningkatkan status nagari | Indeks Desa | Indeks | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Tercapai |
| | | **Sasaran :** 1.1 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian nagari | Persentase Desa Mandiri (%) | % | 87,34% | 88,60% | 88,61% | On the track |

*Sumber: RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029; Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2026*

** Data Realisasi TW II Tahun 2026 adalah capaian proyeksi dengan menggunakan 3 klasifikasi, yakni: a) Tercapai; b) Dapat tercapai/ On the track; dan c) Tidak dapat tercapai*

Keterangan : capaian tahun 2025 dengan perbandingan target dan realisasi 2025

Target < Realisasi = tercapai

Target > Realisasi = belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 40 IKU yang ada, terdapat 21 indikator yang sudah mencapai target dan 18 indikator yang belum mencapai target.

Misi I : Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah yang mendukung Misi I tahun 2025 sudah 100%.

Misi II : Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah yang mendukung Misi II yaitu sebesar 40%. Indikator yang sudah mencapai target yaitu: Indeks Reformasi Hukum, Persentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan. Indikator yang belum tercapai yaitu: Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indeks Reformasi Birokrasi, dan Indeks Pelayanan Publik

Misi III : Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah yang mendukung Misi III yaitu sebesar 60%. Indikator yang sudah mencapai target yaitu: Indeks Pembangunan Manusia, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Rasio Gini. Indikator yang belum tercapai yaitu: Usia Harapan Hidup, dan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja.

Misi IV : Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah yang mendukung Misi IV tahun 2025 adalah sebesar 43%. Indikator yang sudah mencapai target yaitu: Proporsi jumlah IKM, Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB, Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%), Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB, Rasio PDRB Industri Pengolahan, Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (ribu orang), Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%) Kabupaten/Kota terhadap PDB

Ekonomi Kreatif Provinsi. Indikator yang belum tercapai yaitu: Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan ekonomi, Rasio Kewirausahaan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%), Persentase dan stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok, Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB, Rasio PDRB Akomodasi Mamin.

Misi V : Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah yang mendukung Misi V yaitu sebesar 0%. Indikator yang belum mencapai target yaitu: Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan( %).

Misi VI : Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah yang mendukung Misi IV tahun 2025 adalah sebesar 37,5%. Indikator yang sudah mencapai target yaitu: Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Perpipaan, Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indikator yang belum tercapai yaitu: RT dengan Akses Sanitasi Aman, Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%), Indeks Risiko Bencana Daerah, Indeks tutupan lahan, Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT.

Misi VII : Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah yang mendukung Misi IV tahun 2025 adalah sebesar 50%. Indikator yang sudah mencapai target yaitu: Indeks Desa. Indikator yang belum tercapai yaitu: Persentase Desa Mandiri (%). Indikator Persentase Desa Mandiri (%) belum mencapai target yang ditetapkan karena masih terdapat desa yang belum memenuhi indikator Desa Mandiri, terutama pada aspek ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh belum optimalnya kapasitas kelembagaan desa, pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang belum berkembang secara optimal, serta masih terbatasnya pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan potensi desa. Ke depan, percepatan peningkatan status desa akan dilakukan melalui penguatan kelembagaan desa, optimalisasi peran BUMNag, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal untuk mewujudkan desa yang mandiri dan berkelanjutan.

Tabel 2.3
INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN

| NO | PEMUTAKHIRAN RKP 2026 INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN | TARGET | PERUBAHAN RKPD 2026 KABUPATEN INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN | TARGET | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) | 74,68 | Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) | 73,79 | |
| 2 | Kesehatan Ibu dan Anak: | | Kesehatan Ibu dan Anak: | | |
| | Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) | 109 | Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) | 83 | |
| | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) | 17,5 | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) | 22,65 | |
| 3 | Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) | 252 | Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) | | |
| | Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment success rate) (%) | | Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment success rate) (%) | 53 | |
| | Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%) | | Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%) | 89 | |
| 4 | Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%) | 98,7 | Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%) | 98,10% | |

| NO | PEMUTAKHIRAN RKP 2026 INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN | TARGET | PERUBAHAN RKPD 2026 KABUPATEN INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN | TARGET | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Hasil Pembelajaran: | | Hasil Pembelajaran: | | |
| | e)Rata-rata Nilai PISA | | e)Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: | | |
| | a-i Membaca | 396 | Literasi membaca | | |
| | a-ii Matematika | 404 | Numerasi | | |
| | a-iii Sains | 416 | | | |
| | f)Rata-rata nilai asesmen nasional | | f)Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: | | |
| | Literasi membaca | 65,89 | Literasi membaca | 65,89 | |
| | Numerasi | 58,86 | Numerasi | 58,86 | |
| | g)Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) | 9,45 | g)Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) | 8,26 | |
| | h)Harapan Lama Sekolah | 13,36 | h)Harapan Lama Sekolah | 13,48 | |
| 6 | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%) | 65,89<br>58,86 | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) | 12,12 | |
| 7 | Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%) | 68,5 | Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%) | | |
| 8 | Tingkat kemiskinan (%) | 5,49 | Tingkat kemiskinan (%) | 5,88 | |
| 9 | Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) | 43,19 | Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) | 25,99 | |
| 10 | Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%) | 3,00 – 3,50 | Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%), diusulkan untuk menggunakan proksi: | | |
| | | | c)Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan | 26 | |
| | | | d)Proxy: Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi | - | |
| 11 | Produktivitas Industri dan Pertanian | | Produktivitas Industri dan Pertanian | | |
| | c) Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) | | c) Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) | 4,925 | |
| | d) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) | | d) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) | | |
| 12 | Pengembangan Pariwisata | | Pengembangan Pariwisata | | |
| | c) Rasio PDB Pariwisata (%) | 4,6 | c)Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) | 0,93 | |
| | d) Devisa Pariwisata (miliar USD) | 22,1 | d)Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang) | 1,5 | |
| 13 | Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%) | 7,92 | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekraf Nasional (%) | 1,651 | |
| 14 | Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN | | Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN | | |
| | e) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%) | 1,44 | e) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%) | | |
| | | | a-i) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi (%) | | |

| NO | PEMUTAKHIRAN RKP 2026 INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN | TARGET | PERUBAHAN RKPD 2026 KABUPATEN INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN | TARGET | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | a-ii) Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi | | |
| | f) Rasio kewirausahaan (%) | 3,14 | f) Rasio kewirausahaan daerah (%) | 7,23 | |
| | g) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%) | 1,1 | g) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%) | | |
| | h) Return on Asset (ROA) BUMN (%) | 3,4 | h) Return on Asset (ROA) BUMN (%) | | |
| 15 | Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik | 3,00 – 3,50 | Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik | | |
| | c) Tingkat pengangguran terbuka (%) | | c) Tingkat pengangguran terbuka (%) | 3,63 | |
| | d) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) | | d) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) | 40,98 | |
| 16 | Tingkat partisipasi Angkatan kerja Perempuan (%) | 3,00 – 3,50 | Tingkat partisipasi Angkatan kerja Perempuan (%) | 62,89 | |
| 17 | Tingkat penguasaan IPTEK | | Tingkat penguasaan IPTEK | | |
| | c) Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB) | 0,3 | Disesuaikan dengan karakteristik daerah | | |
| | d) Peringkat Indeks Inovasi Global (peringkat) | 60 | | | |
| 18 | Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau | | Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau | | |
| | e) Indeks Ekonomi Hijau | 68,69 | e) Indeks Ekonomi Hijau | | |
| | g) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) | 20 | g) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) | | |
| 19 | Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat) | 45 | Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi | | |
| 20 | Biaya Logistik (% PDB) | 13,5 | Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi | | |
| 21 | Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB) | 30,1-30,1 | Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB) | 31,35 | |
| 22 | Ekspor Barang dan Jasa (% PDB) | 21,0-21,6 | Ekspor Barang dan Jasa (% PDB) | 13,84 | |
| 23 | Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan | | Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan | | |
| | g) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%) | 44,35 | g) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%) | | |
| | i) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) | 67 | i) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) | | |
| | k) Persentase Desa Mandiri (%) | 4 | k) Persentase Desa Mandiri (%) | 88,61 | |
| 24 | Indeks Materi Hukum | 0,51 | Indeks Materi Hukum Proksi di Daerah: Indeks Reformasi Hukum (IRH) | | |
| 25 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 3 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 1,3 | |
| 26 | Indeks Pelayanan Publik | 3,68 | Indeks Pelayanan Publik | 4,29 | |
| 27 | Anti Korupsi | | Anti Korupsi | 98,464 | |
| | ii. Indeks Integritas Nasional | 74,52 | Indeks Integritas Nasional | 71,25 | |
| | iii. Indeks Persepsi Korupsi | 38 | | | |
| 28 | Indeks Pembangunan Hukum | 0,69 | Disesuaikan dengan karakteristik daerah Usulan Proksi: | | |
| | | | c)Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah | | |
| | | | d)Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM | | |
| 29 | Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%) | 63,5 | Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%) | | |
| 30 | Indeks Demokrasi Indonesia | 81,69 – 85,23 | Indeks Demokrasi Indonesia | | |

| NO | PEMUTAKHIRAN RKP 2026 INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN | TARGET | PERUBAHAN RKPD 2026 KABUPATEN INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN | TARGET | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%) | 10,1-10,3 | Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%) | | |
| 32 | Tingkat Inflasi (%) | 2,5±1,0 | Tingkat Inflasi (%) | | |
| 33 | Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan | | Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan | | |
| | f) Aset Perbankan/PDB (%) | 66,9 | e)Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) | 9,79 | |
| | g) Aset Dana Pensiun/PDB (%) | 8 | f)Aset Dana Pensiun/PDRB (%) | | |
| | h) Aset Asuransi/PDB (%) | 9,1 | | | |
| | i) Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%) | 57,8 | Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah) | 951.242 | |
| | j) Total Kredit/PDB (%) | 37,8 | j) Total Kredit/PDB (%) | 11,52 | |
| 34 | Inklusi Keuangan (%) | 3 | Inklusi Keuangan (%) | | |
| 35 | Asia Power Index (Diplomatic Influence) | 61,54 | Disesuaikan dengan karakteristik daerah Usulan Proksi: | | |
| | | | Jumlah kerja sama provinsi/kabupaten/kota kembar/bersaudara (Sister Province/ Sister City) | | |
| 36 | Asia Power Index (Diplomatic Influence) | 12,6 | Disesuaikan dengan karakteristik daerah (Asia Power Indeks – Military Capability) | | |
| 37 | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) | 58,39 | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) | | |
| 38 | Indeks Kerukunan Umat Beragama | 76,77 | Indeks Kerukunan Umat Beragama | | |
| 39 | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga | 70,29 | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga | | |
| 40 | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | 0,424 | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | 0,423 | |
| 41 | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 0,44 | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | | |
| 42 | Kualitas Lingkungan Hidup | 76,49 | Kualitas Lingkungan Hidup | | |
| | a.i. Indeks Kualitas Udara (IKU) | | d)Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | 76,01 | |
| | a.ii. Indeks Kualitas Air (IKA) | | | | |
| | a.iii. Indeks Kualitas Lahan (IKL) | | | | |
| | a.iv. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) | | | | |
| | b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman | 12,5 | e) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman | 9,33 | |
| | c)Timbulan Sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%) | 24 | f) Pengelolaan sampah | | |
| | | | Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah | 36,48 | |
| | | | Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT) | 33,66 | |
| 43 | Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian menuju kedaulatan pangan | | Ketahanan Energi, Air, dan Pangan | | |
| | iv.Ketahanan Energi | | d)Ketahanan energi | | |
| | Indeks Ketahanan Energi | 6,77 | Konsumsi Listrik per kapita (kWh) | 372 | |
| | v.Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (%) | 7,21 | Intensitas energi primer (SBM/ RP milyar) | | |
| | | | e)Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of undernourishment) (%) | 5,73 | |
| | vi.Ketahanan Air | | vi.Ketahanan Air | | |
| | Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita) | 63,4 | Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita) | 0,036 | |
| | Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%) | 41,23 | Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%) | 78,96 | |
| 44 | Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana Relatif terhadap PDB | 0,137 | Indeks Risiko bencana (IRB) (untuk level provinsi) | 117,91-116,64 | |

| NO | PEMUTAKHIRAN RKP 2026 INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN | TARGET | PERUBAHAN RKPD 2026 KABUPATEN INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN | TARGET | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Persentase Penurunan Emisi GRK (%) | | Persentase Penurunan Emisi GRK (%) | | |
| | e)Kumulatif | 28,12 | e)Kumulatif | | |
| | g)Tahunan | 36,65 | g)Tahunan | | |
| | Indeks Zakat Nasional (IZN) | 0,74 | Indeks Zakat Nasional (IZN) | 0,74 | |
| | Indeks Perlindungan Anak | 67,386 | Indeks Perlindungan Anak | 67,386 | |
| | Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) | 3,59 | Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) | 3,59 | |
| | Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan (orang) | 26 orang | Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan (orang) | 26 orang | |
| | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional(%) | 1601 | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional(%) | 1601 | |
| | Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (% PDRB) | 904 | Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (% PDRB) | 904 | |
| | Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) | 2.102 | Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) | 2.102 | |

## 2.3 EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

Pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025-2029 selain mencantumkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah, juga terdapat Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang perlu diukur capaiannya untuk setiap tahun. Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang terdapat pada RPJMD tahun 2025-2029 terdiri dari 2 aspek yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat dan Aspek Pelayanan Umum. Aspek Pelayanan Umum terdiri dari 6 Urusan yaitu Urusan Wajib Pelayanan Dasar dengan 6 bidang urusan; Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dengan 17 bidang urusan; Urusan Pilihan dengan 5 bidang urusan; Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan dengan 1 bidang urusan; Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dengan 4 bidang urusan; dan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan.

Tingkat capaian Indikator Kinerja Daerah pada tabel di bawah ini merupakan tingkat capaian Indikator Kinerja Daerah tahun 2025, sedangkan untuk tingkat capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2026 sampai triwulan II datanya belum tersedia pada saat dokumen ini disusun. Untuk capaian Indikator Kinerja Daerah sampai dengan tahun 2026 triwulan II dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Tahun 2025-2026

| No. | Indikator | Satuan | 2025 | | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi (TW II)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
| I | **ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI** | | | | | |
| 1. | Indeks Ketahanan Pangan | Indeks | 83,09 | 82,37 | 83,59 | On the track |
| 2. | Prevalansi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan | % | 6,11 | 6,57 | 5,73 | On the track |
| 3. | Konsumsi Listrik Per Kapita | kWh/Kapita | 339 | 337,91 | 372 | On the track |
| 4. | Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum | % | 77,56 | 81,78 | 78,96 | Tercapai |
| 5. | Kapasitas Air Baku | m3/detik | 0,030 | 0,14808 | 0,036 | Tercapai |
| 6. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | 75,8 | 78,91 | 76,01 | Tercapai |
| 7. | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman | % | 7,25 | 0,46 | 9,33 | Belum tercapai |
| 8. | Indeks Tutupan Lahan | Indeks | 75,39 | 75,07 | 75,46 | On the track |
| 9. | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) | % | 35,52 | 11,23 | 36,48 | Belum tercapai |
| 10. | Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) | % | 30,69 | 5,13 | 33,66 | Belum tercapai |
| 11. | Indeks Risiko Bencana | Indeks | 117,92 | 197,52 | 117,91 - 116,64 | On the track |
| 12. | Indeks Ketahanan Daerah | Indeks | 0,36 | 0,34 | 0,41 | On the track |
| 13. | Jumlah Penduduk | Ribu Jiwa | 405,71 | 406.228 | 410,33 | Tercapai |
| 14. | Laju Pertumbuhan Penduduk | % | 1,12% | 1,15% | 1,11% | Tercapai |
| 15. | Rasio Penduduk | % | 100,70% | 99,68% | 100,77% | On the track |
| 16. | Kepadatan Penduduk | Jiwa/Km2 | 121,88 | | 121,24 | Tidak tercapai |
| 17. | Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Perpipaan | % | 14 | 17,37 | 15,5 | Tercapai |
| | | | | | | |
| II | **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | | | |
| 1. | Pertumbuhan ekonomi | % | 4,14 | 3,4 | 5,68 | On the track |
| 2. | PDRB per Kapita ADHB (Rp, Juta) | Rp, Juta | 57,07 | 55,42 | 63,53 | On the track |

| No. | Indikator | Satuan | 2025 | | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi (TW II)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
| 3. | Tingkat Kemiskinan (%) | % | 6,27 | 6,1 | 5,88 | Tercapai |
| 4. | Rasio Gini | Rasio | 0,219 | 0,218 | 0,218 | On the track |
| 5. | Indeks Pembangunan Manusia | Indeks | 72,69 | 73,43 | 73,05 | Tercapai |
| 6. | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 3,73 | 3,77 | 3,65 | On the track |
| 7. | Usia Harapan Hidup (tahun) | Tahun | 73,60 | 73,64 | 73,79 | Tercapai |
| 8. | Angka Kematian Ibu (per 100,000 kelahiran hidup) | per 100.000 kelahiran hidup | 83 | 42,79 | 83 | Tercapai |
| 9. | Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) | % | 23,90 | 9,13 | 22,65 | Tercapai |
| 10. | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%) | % | 45 | 46,65 | 53 | Tercapai |
| 11. | Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%) | % | 89 | 80,3 | 89 | On the track |
| 12. | Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%) | % | 98% | 95,08% | 98,10% | On the track |
| 13. | Rata-rata Lama Sekolah (tahun) | Tahun | 8,21 | 8,49 | 8,26 | Tercapai |
| 14. | Harapan Lama Sekolah (tahun) | Tahun | 13,46 | 13,53 | 13,48 | Tercapai |
| 15. | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) | % | 12,00 | 10,37 | 12,12 | Belum tercapai |
| 16. | Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) | % | 69,93 | | 70,41 | Tidak tercapai |
| 17. | Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional | % | L: 54,50%; N: 47,00% | L : 54,29 N:37,74 | L: 54,99% N: 47,49% | On the track |
| 18. | Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | % | 22,71 | 5,9 | 25,99 | Belum tercapai |
| 19. | Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%) | % | 1,03 | 1,1 | 2,32 | Tercapai |
| 20. | Indeks ABS-SBK | Indeks | 2,1 | 2,31 | 2,14 | Tercapai |
| 21. | Persentase cagar budaya yang dilestarikan | % | 100 | 100 | 100 | Tercapai |
| 22. | Indeks Pembangunan Keluarga | Indeks | 60,9 | 66,4 | 62,3 | Tercapai |
| 23. | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | Indeks | 0,438 | 0,401 | 0,423 | On the track |
| 24. | Indeks perlindungan khusus anak | Indeks | 81,6 | 86,410 | 81,7 | Tercapai |
| 25. | Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) | Indeks | 3,55 | 3,72 | 3,59 | Tercapai |
| 26. | Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab | Unit Layanan | - | | - | Tidak tercapai |
| 27. | Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang | Orang | 9 | | 26 | Tidak tercapai |

| No. | Indikator | Satuan | 2025 | | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi (TW II)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
| | ketenagakerjaan | | | | | |
| | | | | | | |
| III | **ASPEK DAYA SAING DAERAH** | | | | | |
| 1. | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | Rp | 61.369.049 | 59.671.964 | 62.871.993 | Belum tercapai |
| 2. | Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/orang) | Juta/orang | 68.788.021 | 45.250.643 | 70.006.474 | Belum tercapai |
| 3. | Rasio PDRB Industri Pengolahan | % | 4,45 | 6,85 | 4,925 | Tercapai |
| 4. | Rasio PDRB Akomodasi Mamin | % | 0,91 | 0,82 | 0,93 | On the track |
| 5. | Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%) terhadap Kabupaten/Kota | % | 1,611 | 2,49 | 1,651 | Tercapai |
| 6. | Rasio Kewirausahaan | % | 6,92 | 3,55 | 7,23 | Belum tercapai |
| 7. | Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) | % | 38,64 | 47,13 | 39,84 | Tercapai |
| 8. | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) | % | 64,30 | 63,31 | 69,3 | On the track |
| 9. | Proporsi jumlah UKM non pertanian | % | 98,21% | 98,21 | 98,22% | Tercapai |
| 10. | Rasio PDRB sektor jasa keuangan | % | 1,95 | 1,73 | 2 | On the track |
| 11. | Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan | % | 32,52% | 32,08 | 33,24% | On the track |
| 12. | Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang) | Ribu orang | 1 | 2 | 1,5 | Tercapai |
| 13. | Indeks digital masyarakat Indonesia | Indeks | 49,75 | 39,45 | 51,57 | Belum tercapai |
| 14. | Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) | % | 31,20% | | 31,35% | Tidak tercapai |
| 15. | Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) | % | 13,57% | 10,63 | 13,84% | Belum tercapai |
| 16. | Persentase Desa Mandiri (%) | % | 87,34% | 88,61% | 88,61% | Tercapai |
| 17. | Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau | % | 51,15 | 58,66 | 54,04 | Tercapai |
| 18. | Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Perpipaan | % | 14 | 17,37 | 15,5 | Tercapai |
| 19. | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB | % | 0,19 | 0,27 | 0,22 | Tercapai |
| 20. | Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB | % | 0,862 | 3,4354 | 0,904 | Tercapai |
| 21. | ROA BUMD | % | 0,001 | -7,88 | 0,002 | Belum tercapai |
| 22. | Proporsi jumlah IKM | % | 3,43 | 99,95 | 3,51 | Tercapai |
| 23. | Indeks Inovasi Daerah | Indeks | 49,91 | 48,34 | 53,04 | On the track |

| No. | Indikator | Satuan | 2025 | | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi (TW II)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
| 24. | Persentase dan stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok | % | 10,23 | 9,26 | 10,21 | On the track |
| 25. | Total Dana Pihak Ketiga / PDRB | % | 7 | 1,07 | 9,79 | Belum tercapai |
| 26. | Nilai Transaksi Saham per Kapita (Rupiah) | Rupiah | 789.608 | 844.442 | 951.242 | Tercapai |
| 27. | Total Kredit/PDRB | % | 10,63 | 11,5 | 11,52 | Tercapai |
| 28. | Persentase Usaha Kecil dan Menengah (UKM) | % | 2.082 | 0 | 2.102 | Belum tercapai |
| | | | | | | |
| **IV** | **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | | | |
| 1. | Indeks Reformasi Hukum | Indeks | 70,00 | 98,24 | 72,05 | Tercapai |
| 2. | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik / Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)* | Indeks | 2,70 | 3,39 | 1,3* | Tercapai |
| 3. | Indeks Persepsi Anti Korupsi | Indeks | 98,41 | | 98,464 | Tidak tercapai |
| 4. | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Nilai | 3,1 | 1,6001* | 3,12 | Belum tercapai |
| 5. | Indeks Pelayanan Publik | Indeks | 4,28 | 4,21 | 4,29 | On the track |
| 6. | Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan | % | 70% | 43% | 76% | Belum tercapai |
| 7. | Survey penilaian integritas (SPI KPK)(nilai) | Nilai | 71,25 (rentan) | 65,8 (Rentan) | 71,25 (rentan) | Belum tercapai |
| 8. | Persentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan | % | 100% | 122 | 100% | Tercapai |
| 9. | Angka Kriminalitas (per 100,000) | per 100.000 | 112 | 121 | 107,4 | On the track |
| 10. | Indeks Kinerja Organisasi Masyarakat | Indeks | 45 | | 47 | Tidak tercapai |
| 11. | Penyelesaian gangguan Kamtibmas | % | 76,73% | 72,27% | 77,30% | On the track |
| 12. | Indeks Zakat Nasional | Indeks | 0,73 | 0,63 | 0,74 | On the track |
| | | | | | | |
| | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | | | |
| **A.** | **PENDIDIKAN** | | | | | |
| 1. | Persentase anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar | % | 88,92 | 86 | 89,33 | On the track |
| 2. | Persentase anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama | % | 80,09 | 75 | 80,67 | On the track |

| No. | Indikator | Satuan | 2025 | | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi (TW II)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
| 3. | Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | % | 66,14 | 49,01 | 70,82 | Belum tercapai |
| 4. | Persentase anak usia usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | % | 97 | 81,54 | 97,05 | Belum tercapai |
| 5. | Persentase Satuan Pendidikan dasar yang mengembangkan kurikulum muatan lokal | % | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mengembangkan kurikulum muatan lokal | % | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Persentase Satuan Pendidikan Non Formal yang mengembangkan kurikulum muatan lokal | % | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Indeks Distribusi Guru | Indeks | 0,64 | 0,7 | 0,66 | Tercapai |
| 9. | Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik | % | 57,9 | 57,2 | 62,75 | On the track |
| 10. | Persentase Usulan izin satuan pendidikan dasar yang diterbitkan/diperbaharui | % | 0 | | 0 | |
| 11. | Persentase Usulan izin satuan pendidikan anak usia dini yang diterbitkan/diperbaharui | % | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Persentase Usulan izin satuan pendidikan kesetaraan yang diterbitkan/diperbaharui | % | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Rata-Rata Lama Sekolah | Tahun | 8,21 | 8,49 | 8,26 | Tercapai |
| 14. | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 13,46 | 13,53 | 13,48 | Tercapai |
| | | | | | | |
| **B.** | **KESEHATAN** | | | | | |
| 1. | Usia Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 73,60 | 73,64 | 73,79 | Tercapai |
| 2. | Jumlah kematian ibu | Orang | 6 | 2 | 6 | Tercapai |
| 3. | Cakupan imunisasi bayi lengkap | Persentase | 80 | 28,2 | 85 | Belum tercapai |
| 4. | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita | (%) | 23,90 | 9,13 | 22,65 | Tercapai |
| 5. | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 | Tercapai |
| 6. | Cakupan kepesertaan aktif jkn | % | 79,5 | 74,30 | 82 | On the track |
| 7. | Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%) | % | 85 | 80,3 | 86 | On the track |
| 8. | Jumlah kematian balita | Orang | 72 | 73 | 72 | On the track |
| 9. | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis | % | 36 | 25,89 | 46 | Belum tercapai |

| No. | Indikator | Satuan | 2025 | | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi (TW II)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
| 10. | Proporsi penduduk dengan aktifitas fisik cukup | % | 64,3 | 45 | 66,1 | Belum tercapai |
| 11. | Persentase depresi pada usia > 15 Tahun | % | 1,4 | 1,9 | 1,4 | On the track |
| 12. | Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis masyarakat | % | 22 | 21,5% | 22,5 | Tercapai |
| 13. | Prevalensi Obesitas >18 Tahun (%) | % | 23.4 | 14,45 | 23.4 | Tercapai |
| 14. | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 52.6 | 9,09 | 59,1 | Belum tercapai |
| 15. | Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan | % | 83.39 | 83,6 | 83,81 | Tercapai |
| 16. | Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat | % | 47.99 | 53,7 | 48,5 | Tercapai |
| 17. | Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional | % | 100 | 100 | 100 | Tercapai |
| 18. | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna | % | 59.1 | 68,1 | 63,4 | Tercapai |
| 19. | Persentase fasilitas kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar | % | 52.65 | 9,09 | 59,1 | Belum tercapai |
| 20. | Persentase lanjut usia yang mandiri | % | 90 | 96,6 | 91 | Tercapai |
| 21. | Persentase merokok penduduk 10-21 tahun | % | 12,4 | 9,25 | 11,4 | Tercapai |
| 22. | Cakupan penemuan kasus TB | % | 40 | 46,65 | 45 | Tercapai |
| 23. | Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi | % | 97 | 26,52 | 100 | Belum tercapai |
| 24. | Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar | % | 99 | 81 | 100 | Belum tercapai |
| 25. | Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 | Tercapai |
| 26. | Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar | % | 62 | 59,8 | 64 | Tercapai |
| 27. | Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu | % | 62 | 96 | 64 | Tercapai |
| 28. | Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan | % | 52 | 50 | 55 | On the track |
| 29. | Persentase apotek dan toko obat yang mampu memenuhi persyaratan perizinan | % | 100 | 100 | 100 | Tercapai |
| 30. | Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah | % | 85 | 85 | 88 | Tercapai |
| 31. | Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan | % | 100% | 45 | 100% | Belum tercapai |
| | | | | | | |
| **C.** | **PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | |
| 1. | Indeks Pembangunan IKK | % | 0 | 0 | 0,91 | On the track |
| 2. | Indeks Pembangunan Infrastruktur | % | 52,85 | 60,65 | 54,16 | Tercapai |
| | | | | | | |

| No. | Indikator | Satuan | 2025 | | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi (TW II)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
| **D.** | **PERUMAHAN RAKYAT** | | | | | |
| 1. | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota kabupaten/kota | % | 100 | 100 | 100 | Tercapai |
| 2. | Fasilitasi penyediaanrumah layak huni bagimasyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota | % | 100 | 100 | 100 | Tercapai |
| 3. | Persentase kawasan kumuh di bawah10 ha di kab/kota yang ditangani | % | 0,83 | 0,66 | 1,66 | On the track |
| 4. | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) | % | 19,02 | 16,30 | 18,74 | Tercapai |
| 5. | Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU | % | 17.5 | 9,89 | 30 | Belum tercapai |
| | | | | | | |
| **E.** | **KETENTERAMAN,KETERTIBAN UMUMDAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | |
| 1. | Persentase Penanganan Pelanggaran Perda Yang Diselesaikan | % | 100 | 122 | 100 | Tercapai |
| 2. | Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas | % | 100 | 100 | 100 | Tercapai |
| 3. | Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana | % | 100 | 100 | 100 | Tercapai |
| 4. | Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana | % | 100 | 100 | 100 | Tercapai |
| 5. | Persentase Penanganan Pasca Bencana | % | 100 | 100 | 100 | Tercapai |
| 6. | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | % | 95 | | 96 | |
| 7. | Waktu Tanggap *(Respone Time)* Penanganan Kebakaran | Menit | 15 menit | 13 menit 16 detik | 15 menit | Tercapai |
| | | | | | | |
| **F.** | **SOSIAL** | | | | | |
| 1. | Indeks Kesejahteraan Sosial | Nilai | 50,50 | 50.05 | 51,50 | On the track |
| 2. | Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial | % | 78 | 78 | 80 | Tercapai |
| 3. | Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial | % | 100 | 100 | 100 | Tercapai |
| 4. | Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial | % | 95 | 95 | 95 | Tercapai |
| 5. | Persentase PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial | % | 100 | 100 | 100 | Tercapai |
| 6. | Persentase PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial bagi PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA | % | 100 | 100 | 100 | Tercapai |
| 7. | Persentase PSKS yang melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 | Tercapai |
| 8. | Persentase PSKS yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial | % | 20 | 20 | 20 | Tercapai |
| 9. | Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial | % | 20 | 20 | 20 | Tercapai |
| 10. | Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | % | 25 | 25 | 25 | Tercapai |
| 11. | Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | % | 25 | 30.92 | 25 | Tercapai |
| 12. | Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | % | 25 | 18.84 | 25 | Belum |

| No. | Indikator | Satuan | 2025 | | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi (TW II)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
| | | | | | | tercapai |
| 13. | Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | % | 25 | 25 | 25 | Tercapai |
| 14. | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | % | 20 | 22.9 | 20 | Tercapai |
| 15. | Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar | % | 100 | 100 | 100 | Tercapai |
| 16. | Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi | % | 0,67 | 0,67 | 0,67 | Tercapai |
| 17. | Persentase Kecamatan yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin | % | 100 | 100 | 100 | Tercapai |
| 18. | Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan | % | 1,34 | 1.39 | 1,34 | Tercapai |
| 19. | Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana | % | 100 | 100 | 100 | Tercapai |
| 20. | Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya | % | 100 | 100 | 100 | Tercapai |
| 21. | Persentase korban bencana yang mendapat layanan pemulihan sosial | % | 100 | 100 | 100 | Tercapai |
| 22. | Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik | % | 95 | 95 | 95 | Tercapai |
| | | | | | | |
| **G.** | **TENAGA KERJA** | | | | | |
| 1. | Proporsi Jumlah IKM | % | 3,43 | 99,95 | 3,51 | Tercapai |
| 2. | Rasio Kewirausahaan | % | 6,92 | 3,55 | 7,23 | Belum tercapai |
| 3. | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 3,73 | 3,77 | 3,65 | On the track |
| 4. | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | % | 64,30 | 63,31 | 69,3 | On the track |
| 5. | Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal | % | 39,06 | 47,13 | 40,98 | Tercapai |
| 6. | Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja | Rp | 61.369.049 | 59.671.964 | 62.871.993 | Belum tercapai |
| 7. | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah | Dokumen | 0 | 0 | 0 | Tercapai |
| 8. | Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang meningkat Produktifitasnya. | % | 55 | 0,95 | 60 | Belum tercapai |
| 9. | Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan Di Dalam Negeri | % | 5,5 | 2,5 | 60 | Belum tercapai |
| 10. | Jumlah Pekerja Pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial | % | 0 | 0 | 0 | Tercapai |
| | | | | | | |
| **H.** | **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | |
| 1. | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | Indeks | 60,9 | 66,4 | 62,3 | Tercapai |
| 2. | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | Indeks | 0,438 | 0,401 | 0,423 | Tercapai |

| No. | Indikator | Satuan | 2025 | | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi (TW II)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
| 3. | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Indeks | 94,87 | 94,87 | 94,88 | Tercapai |
| 4. | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | Indeks | 64,6 | 69,390 | 64,7 | Tercapai |
| 5. | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) | % | 4.48% | 22,22% | 4.78% | Tercapai |
| 6. | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan | % | 64.30% | 64.3% | 69.30% | Tercapai |
| 7. | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | % | 85 | 85 | 85,5 | Tercapai |
| 8. | Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang Berspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar | % | 25 | 25 | 30 | Tercapai |
| 9. | Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan | % | 0 | 50 | 75 | Tercapai |
| 10. | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) | % | 60,2 | 65,680 | 60,6 | Tercapai |
| 11. | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | % | 85 | 100 | 85,5 | Tercapai |
| 12. | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) | % | 81,6 | 86,410 | 81,7 | Tercapai |
| | | | | | | |
| **I.** | **PANGAN** | | | | | |
| 1. | Indeks Ketahanan Pangan (IKP) | Indeks | 83,09 | 82,37 | 83,59 | On the track |
| 2. | Persentase Jumlah Cadangan Pangan | % | 109,11 | 109,11 | 100 | Tercapai |
| 3. | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Skor | 90,9 | 92,9 | 91,4 | Tercapai |
| 4. | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan | % | 8,86 | 1,26 | 7,59 | Belum tercapai |
| 5. | Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan | % | 87 | 63,64 | 89,3 | Belum tercapai |
| | | | | | | |
| **J.** | **PERTANAHAN** | | | | | |
| 1. | Persentase konflik pertanahan yang di fasilitasi melalui mediasi | % | 80 | 100 | 80 | Tercapai |
| | | | | | | |
| **K.** | **LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | |
| 1. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota | Indeks | 75,8 | 78,91 | 76,01 | Tercapai |
| 2. | Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota | % | 28,09 | 19,18 | 31,38 | Belum tercapai |
| 3. | Ketaatan penanggungjawab usaha dan/ataukegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah DaerahKab/Kota | % | 93,75 | 81,81 | 95 | Belum tercapai |
| | | | | | | |
| **L.** | **ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | |
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan | Indeks | 93,96 | 93,96 | 95,96 | Tercapai |
| 2. | Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital. | % | 5% | 6,88% | 10% | Tercapai |

| No. | Indikator | Satuan | 2025 | | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi (TW II)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
| 3. | Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak | % | 50% | 69,58% | 55% | Tercapai |
| 4. | Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan. | % | 100% | 100% | 100% | Tercapai |
| 5. | Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan. | % | 95% | 96,93% | 96% | Tercapai |
| 6. | Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan. | % | 100% | 100% | 100% | Tercapai |
| 7. | Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | % | 100% | 100% | 100% | Tercapai |
| 8. | Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan | % | 100% | 100% | 100% | Tercapai |
| 9. | Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan | % | 100% | 100% | 100% | Tercapai |
| | | | | | | |
| **M.** | **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | |
| 1. | Persentase Desa Mandiri | % | 87,34% | 88,61% | 88,61% | Tercapai |
| 2. | Persentase Fasilitasi Penataan Desa | % | 0% | 0% | 0% | Tercapai |
| 3. | Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa | % | 0% | 0% | 0% | Tercapai |
| 4. | Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkaatkan Kapasitasnya | % | 80% | 100% | 80% | Tercapai |
| 5. | Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa | % | 0% | 0% | 100% | Tercapai |
| 6. | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) | % | 100% | 100% | 90% | Tercapai |
| 7. | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat | % | 0% | 0% | 90% | Tercapai |
| | | | | | | |
| **N.** | **PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | |
| 1. | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) | % | 2.35 | 2,38 | 2.34 | Tercapai |
| 2. | Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19 ) | % | 14.4 | 14,03 | 13.6 | Tercapai |
| 3. | Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) | Indeks | 74.2 | 61 | 79.8 | Belum tercapai |
| 4. | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (MCPR) | % | 63.81% | 61,4% | 65.82% | On the track |
| 5. | Persentase Kebutuhan Ber KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) | % | 13% | 15,3% | 12% | Belum tercapai |
| 6. | Proporsi Kebutuhan KB Yang Terpenuhi Menurut Alat / Cara KB Modern | % | 81.60% | 84,86% | 82.50% | Tercapai |
| 7. | Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri | % | 63.20% | 96,2% | 69.60% | Tercapai |
| 8. | Persentase Kahamilan Tidak Direncanakan (KTD) | % | 14.1% | 13,24% | 13.1% | Tercapai |
| 9. | Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga | % | 65% | 21% | 70% | Belum tercapai |
| 10. | Indeks Lansia Berdaya | % | 61.1 | 69,15 | 62 | Tercapai |
| 11. | Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja | % | 83.7 | 82,1 | 85.1 | On the track |
| | | | | | | |

| No. | Indikator | Satuan | 2025 | | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi (TW II)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
| **O.** | **PERHUBUNGAN** | | | | | |
| 1. | Rasio konektivitas | Rasio | 49 | 100 | 50 | Tercapai |
| | | | | | | |
| **P.** | **KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | |
| 1. | Indeks SPBE (Indeks Pemdi)* | Indeks | 3,29 (Indeks SPBE) | 3,39 | 1,3* (Indeks Pemdi) | Tercapai |
| 2. | Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei) | % | 82,70 | 87,00 | 82,80 | Tercapai |
| | | | | | | |
| **Q.** | **KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH** | | | | | |
| 1. | Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB | % | 0,862 | 3.4354 | 0,953 | Tercapai |
| 2. | Persentase dan Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok | % | 10,23 | 9,26 | 10,21 | On the track |
| 3. | Ekspor Barang dan Jasa (%PDRB) | % | 13,57 | 10,63 | 13,84 | Belum tercapai |
| 4. | Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB | % | 13,57 | 10,63 | 13,84 | Belum tercapai |
| 5. | Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal | % | 2,4 | 13.12 | 2,5 | Belum tercapai |
| 6. | Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor | % | 1,8 | 0.11 | 1,8 | Belum tercapai |
| 7. | Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi | % | 0 | 143,85 | 0 | Tercapai |
| 8. | Presentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | % | 1 | 20,11 | 5 | Tercapai |
| 9. | Presentase Koperasi Aktif | % | 50 | 62,02 | 50 | Tercapai |
| 10. | Presentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan | % | 1 | 22,70 | 1 | Tercapai |
| 11. | Presentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas | % | 0 | 6,48 | 16 | Tercapai |
| 12. | Pertumbuhan Wirausaha | % | 2,4 | 13.12 | 2,5 | Tercapai |
| | | | | | | |
| **R.** | **PENANAMAN MODAL** | | | | | |
| 1. | Persentase Peningkatan Investasi | % | 12 | 89,60 | 12 | Tercapai |
| 2. | Indeks Pelayanan Publik | Indeks | 87 | 86,91 | 87,5 | On the track |
| 3. | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan | % | 96 | 185,6 | 96 | Tercapai |
| 4. | Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal | % | 96 | 185,6 | 96 | Tercapai |
| 5. | Realisasi Total Terhadap Target Investasi | % | 90 | 83 | 90 | On the track |
| 6. | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha | % | 100 | 100 | 100 | Tercapai |

| No. | Indikator | Satuan | 2025 | | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi (TW II)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
| 7. | Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi | % | 15 | 95,60 | 15 | Tercapai |
| | | | | | | |
| **S.** | **KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | |
| 1 | Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri | % | 0,11 | 0,07 | 0,12 | On the track |
| 2 | Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan | % | 27,32 | 31,44 | 31,34 | Tercapai |
| 3 | Peningkatan Prestasi Olahraga | orang | 43 | 57 | 53 | Tercapai |
| 4 | Rasio Wira Usaha Pemuda | % | 12 | 0,07 | 14 | Belum tercapai |
| 5 | Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas | % | 12 | 0 | 15 | Belum tercapai |
| 6 | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan | % | 12 | 23,8 | 14 | Tercapai |
| | | | | | | |
| **T.** | **STATISTIK** | | | | | |
| 1. | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | Indeks | 2,60 | 2,51 | 2,66 | On the track |
| | | | | | | |
| **U.** | **PERSANDIAN** | | | | | |
| 1. | Indeks KAMI | Indeks | 14,5 | 15,33 | 15 | Tercapai |
| 2. | Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah | % | 38,00 | 35,71 | 38,50 | On the track |
| | | | | | | |
| **V.** | **KEBUDAYAAN** | | | | | |
| 1. | Tingkat Partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan | % | 70,15 | 70,15 | 75,35 | Tercapai |
| 2. | Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan | % | 65,35 | 72,52 | 69,59 | Tercapai |
| 3. | Tingkat partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal | % | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Persentase cagar budaya yang dilestarikan | % | 100 | 100 | 100 | Tercapai |
| 5. | Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan | % | 100 | 100 | 100 | Tercapai |
| 6. | Persentase kunjungan Wisatawan ke Museum | % | 65,15 | 65,15 | 69,25 | Tercapai |
| | | | | | | |
| **W.** | **PERPUSTAKAAN** | | | | | |
| 1. | Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat | Nilai | 79,67 | 58,29 | 80,25 | Belum tercapai |
| 2. | Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki | % | 100 | 100 | 100 | Tercapai |
| 3. | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Indeks | 89,72 | 19,87 | 90,6 | Belum tercapai |
| | | | | | | |

| No. | Indikator | Satuan | 2025 | | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi (TW II)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
| **X.** | **KEARSIPAN** | | | | | |
| 1. | Tingkat Ketersediaan Arsip | % | 54,06 | 76,55 | 55,41 | Tercapai |
| 2. | Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | % | 23,97 | 16,67 | 23,97 | Belum tercapai |
| 3. | Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | % | 0 | 0 | 0 | Tidak tercapai |
| 4. | Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah | Indeks | 47,26 | 56,60 | 49,04 | Tercapai |
| 5. | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara kepentingan pemerintahan, untuk negara, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | % | 23,97 | 16,67 | 23,97 | Belum tercapai |
| | | | | | | |
| **Y.** | **KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | |
| 1. | Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | % | 32,52 | 32,08 | 33,24 | On the track |
| 2. | Jumlah Produksi Perikanan | Ton | 43.735,75 | 43.183,36 | 45.034,77 | On the track |
| 3. | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap | Ton | 4.224,59 | 4.305,19 | 4.314,57 | Tercapai |
| 4. | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | Ton | 39.511,16 | 38.878,17 | 40.720,20 | On the track |
| 5. | Luas Kawasan Konservasi | Ha | 0 | 0 | 0 | Tidak tercapai |
| 6. | Angka Konsumsi Makan Ikan | Kg/Kapita/ Tahun | 40,73 | 42,03 | 41,24 | Tercapai |
| 7. | Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan | Ton | 395 | 395,93 | 400 | Tercapai |
| | | | | | | |
| **Z.** | **PARIWISATA** | | | | | |
| 1. | Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara | Ribu orang | 1 | 2 | 1,5 | Tercapai |
| 2. | Rasio PDRB Ekonomi Kreatif Kabupaten Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Provinsi | % | 1,611 | 0 | 1,651 | Belum tercapai |
| 3. | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum | % | 0,91 | 0,82 | 0,95 | On the track |
| 4. | Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan | % | 13 | 2,9 | 15 | Belum tercapai |
| 5. | Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata | % | 0 | 1 | 20 | Tercapai |
| 6. | Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual | % | 0 | 4 | 0 | Tercapai |
| 7. | Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalisasi | % | 15 | 16 | 16 | Tercapai |
| | | | | | | |
| **AA.** | **PERTANIAN** | | | | | |
| | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | | | | | |

| No. | Indikator | Satuan | 2025 | | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi (TW II)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
| 1 | Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | % | 32,52 | 32,08 | 33,24 | On the track |
| 2 | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan | % | 2 | -11,07 | 2 | Belum tercapai |
| 3 | Peningkatan Produksi Hortikultura | % | 2 | -33,425 | 2 | Belum tercapai |
| 4 | Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan | % | 2 | 70,42 | 2 | Tercapai |
| 5 | Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B | Ha | 17.585 Ha | 17.585 Ha | 17.585 Ha | Tercapai |
| 6 | Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian yang Berkualitas | % | 1,2 | NA | 1,2 | Belum tercapai |
| 7 | Persentase Penanganan Bencana Pertanian | % | 95,00 | 95,00 | 95,00 | Tercapai |
| 8 | Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian | % | 95,00 | 95,00 | 95,00 | Tercapai |
| 9 | Persentase Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan | % | 100 | NA | 100 | Belum tercapai |
| 10 | Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan | % | 2 | NA | 2 | Belum tercapai |
| 11 | Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani | % | 3 | NA | 3 | Belum tercapai |
| | | | | | | |
| | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | | | | | |
| 1. | Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | % | 32,52 | 32,08 | 33,24 | On the track |
| 2. | Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan | % | 2 | 7,91 | 7 | Tercapai |
| 3. | Persentase Penyediaan Prasarana Pertenakan yang Berkualitas | % | 0 | 0 | 2 | On the track |
| 4. | Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) | % | 2 | 4,2 | 2 | Tercapai |
| 5. | Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) | % | 0 | 0 | 2 | On the track |
| 6. | Persentase Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan | % | 2 | 97,6 | 2 | Tercapai |
| 7. | Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan | % | 2 | 71,43 | 2 | Tercapai |
| 8. | Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang dibentuk dan beroperasi | % | 2 | 0 | 2 | Belum tercapai |
| | | | | | | |
| **AB.** | **ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL** | | | | | |
| 1. | Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota | % | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |

| No. | Indikator | Satuan | 2025 | | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi (TW II)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
| **AC.** | **PERDAGANGAN** | | | | | |
| 1. | Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi | % | 0 | 100 | 36 | Tercapai |
| 2. | Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya | % | 0 | 0 | 100 | On the track |
| 3. | Presentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | % | 10,23 | 9,26 | 10,21 | On the track |
| 4. | Nilai Ekspor Barang | % | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku | % | 10 | 9,7 | 10,5 | On the track |
| 6. | Presentase Produk Lokal yang Difasilitasi / Dilaksanakan | % | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| **AD.** | **PERINDUSTRIAN** | | | | | |
| 1. | Rasio PDRB Industri Pengelohan | % | 6,63 | 6,85 | 7,01 | Tercapai |
| 2. | Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB | % | 6,63 | 6,85 | 7,01 | Tercapai |
| 3. | Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri | % | 8 | 29,69 | 10 | Tercapai |
| 4. | Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini | % | 100 | 100 | 100 | Tercapai |
| | | | | 6,85 | | |
| **AE.** | **PERENCANAAN** | | | | | |
| 1. | Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD | % | 100 | 100 | 100 | Tercapai |
| 2. | Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD | % | 100 | 100 | 100 | Tercapai |
| 3. | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Koordinasi Perencanaan | % | 100 | 100 | 100 | Tercapai |
| 4. | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah | Indeks | 80 | 90.69 | 81 | Tercapai |
| | | | | | | |
| **AE.** | **KEUANGAN** | | | | | |
| 1. | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB | % | 0,19 | 0,27 | 0,21 | Tercapai |
| 2. | Opini BPK Atas Laporan Keuangan | Opini | WTP | WTP | WTP | Tercapai |
| 3. | Persentase Belanja Pegawai diluar Tunjangan Guru yang Dialokasikan Melalui TKD | % | 47 | 48,25 | 47 | Tercapai |
| 4. | Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik | % | 22 | 26,34 | 22 | Tercapai |
| 5. | Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar | % | 96,7 | 96,83 | 97,3 | Tercapai |
| 6. | Persentase Penurunan SILPA | % | 3,3 | 0,41 | 2,8 | Belum tercapai |
| 7. | Persentase Penyampaian LKPD Tepat Waktu dan Sesuai SAP | % | 100 | 100 | 100 | Tercapai |
| 8. | Persentase Pertambahan Nilai Aset Tetap | % | 5,45 | 5,65 | 5,75 | Tercapai |
| 9. | Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah | % | 10,15 | 10,62 | 11,65 | Tercapai |
| 10. | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan | Nagari | 79 | 79 | 79 | Tercapai |
| 11. | Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital | % | 25 | 25 | 40 | Tercapai |

| No. | Indikator | Satuan | 2025 | | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi (TW II)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
| | | | | | | |
| **AF.** | **PENGADAAN** | | | | | |
| 1. | Persentase jumlah totalproyek konstruksi yangdibawa ke tahunberikutnya yangditandatangani padakuartal pertama | % | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Persentase jumlahpengadaan yangdilakukan denganmetode kompetitif | % | 100 | 100 | 100 | Tercapai |
| 3. | Rasio nilai belanja yangdilakukan melaluipengadaan | % | 17,80 | 9,67 | 21,97 | Belum tercapai |
| | | | | | | |
| **AG.** | **KEPEGAWAIAN** | | | | | |
| 1. | Indeks Profesionalitas ASN | Indeks | 75 | 75,72 | 78 | Tercapai |
| 2. | Indeks Sistem Merit | Indeks | 250 | 234,5 | 260 | On the track |
| | | | | | | |
| **AH.** | **TRANSPARANSI DANPARTISIPASI PUBLIK** | | | | | |
| 1. | Informasi tentangsumber daya yangtersedia untuk pelayanan | % | 98,89 | 98,90 | 98,94 | Tercapai |
| 2. | Akses publik terhadapInformasi keuangandaerah | % | 71,21 | 91,66 | 75,76 | Tercapai |
| | | | | | | |
| **AI.** | **TRANSMIGRASI** | | | | | |
| 1. | Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang. | % | 0 | | 0 | |
| 2. | Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan. | % | 7,8 | 0 | 8 | Belum tercapai |
| | | | | | | |
| **AJ.** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | |
| 1. | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Nilai | 62,98 | 62.09 | 64,28 | On the track |
| 2. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah | Nilai | 90 | 87,01 | 90 | On the track |
| 3. | Indeks Kepuasan Layanan Pimpinan (IKLP) | Nilai | 95 | 95 | 95 | Tercapai |
| 4. | Persentase Capaian Pengendalian dan pelaporan administrasi pembangunan | % | 80 | 85 | 81 | Tercapai |
| 5. | Persentase Kebijakan Pengelolaan Perekonomian yang difasilitasi | % | 100 | 100 | 100 | Tercapai |
| 6. | Indeks Tata Kelola pengadaan | Nilai | 78,6 | 78,02 | 81,5 | On the track |
| 7. | Persentase Terlaksananya Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | % | 100 | 100 | 100 | Tercapai |

| No. | Indikator | Satuan | 2025 | | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi (TW II)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
| 8. | Persentase terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang perekonomian | % | 100 | 100 | 100 | Tercapai |
| | | | | | | |
| **AK.** | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | |
| 1. | Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD | % | 80 | 94,11 | 80 | Tercapai |
| 2. | Ketepatan Penerapan Perda APBD Tahun N | Nilai | 9 | 9 | 9 | Tercapai |
| 3. | Persentase Penetapan Ranperda Tahun N | % | 80 | 29,41 | 80 | Belum tercapai |
| 4. | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | % | 100 | 100 | 100 | Tercapai |
| 5. | Persentase terselenggaranya program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD | % | 100 | 100 | 100 | Tercapai |
| | | | | | | |
| **AL.** | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | |
| 1. | Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi | Indeks | 30 | 26,44 | 32 | On the track |
| | | | | | | |
| **AM.** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | |
| 1. | Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan | % | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Persentase Kebijakan Berbasis Bukti | % | 8 | 13.21 | 10 | Tercapai |
| 3. | Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian/Kajian yang Direkomendasikan sebagai Bahan Masukan Kebijakan Pembangunan Daerah | % | 8 | 13.21 | 10 | Tercapai |
| 4. | Indeks Inovasi Daerah | Angka | 49,91 | 48.34 | 53,04 | On the track |
| | | | | | | |
| **AN.** | **PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | |
| 1. | Persentase Penyelesaian Konflik Sosial yang ditangani | % | 92 | 87 | 93 | On the track |
| 2. | Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | % | 50 | 90 | 55 | Tercapai |
| 3. | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada | % | 65,3 | 65,3 | 65,3 | Tercapai |
| 4. | Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | % | 90 | 100 | 90 | Tercapai |
| 5. | Persentase Pendidikan Politik pada Kader Politik | % | 90 | 100 | 90 | Tercapai |
| 6. | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif | % | 0 | 70 | 90 | Tercapai |
| 7. | Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan | % | 85 | 75 | 85 | On the track |
| | | | | | | |
| **AO.** | **PENGAWASAN** | | | | | |
| 1. | Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Level | Terdefenisi | Terdefenisi | Terdefenisi | Tercapai |
| 2. | Persentase Penyelesaian TLHP Eksternal | % | 85 | 79.9 | 85,55 | On the track |

| No. | Indikator | Satuan | 2025 | | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi (TW II)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
| 3. | Persentase Penyelesaian TLHP Internal | % | 85 | 72.71 | 85,55 | On the track |
| 4. | Opini BPK Atas Laporan Keuangan | Opini | Wajar Tanpa Pengecualian | Wajar Tanpa Pengecualian | Wajar Tanpa Pengecualian | Tercapai |
| 5. | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Level | Terintegrasi (Integrated) | Terintegrasi (Integrated) | Terintegrasi (Integrated) | Tercapai |
| | | | | | | |
| **AP.** | **KECAMATAN BUKIK BARISAN** | | | | | |
| 1. | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Nilai | 60 | 62,4 | 65 | Tercapai |
| 2. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 90 | 90,04 | 91 | Tercapai |
| 3. | Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari | % | 55 | 70 | 60 | Tercapai |
| 4. | Tingkat Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan | % | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan | % | 65 | 100 | 60 | Tercapai |
| 6. | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari | % | 65 | 100 | 0 | Tercapai |
| | | | | | | |
| **AQ.** | **KECAMATAN SULIKI** | | | | | |
| 1. | Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) | Nilai | 80 | 63,52 | 83 | Belum tercapai |
| 2. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 65 | 85 | 66 | Tercapai |
| 3. | Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari | % | 65 | 70 | 65 | Tercapai |
| 4. | Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan | % | 0 | | 0 | |
| 5. | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan | % | 65 | 98,06 | 65 | Tercapai |
| 6. | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari | % | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| **AR.** | **KECAMATAN GUGUAK** | | | | | |
| 1. | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Nilai | 65 | 64,25 | 65 | On the track |
| 2. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 90 | 89.8 | 90 | On the track |
| 3. | Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari | % | 66 | 87 | 66 | Tercapai |
| 4. | Tingkat Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan | % | 0 | | 50 | |
| 5. | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan | % | 90 | 100 | 90 | Tercapai |
| 6. | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari | % | 0 | | 50 | |
| | | | | | | |
| **AS.** | **KECAMATAN MUNGKA** | | | | | |
| 1. | Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) | Nilai | 50 | 60,4 | 50 | Tercapai |
| 2. | Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) | Nilai | 85 | 87 | 85 | Tercapai |
| 3. | Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari | Angka | 72 | 100 | 73 | Tercapai |

| No. | Indikator | Satuan | 2025 | | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi (TW II)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
| 4. | Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan | Angka | 70 | 72,79 | 73 | Tercapai |
| 5. | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan | Angka | 0 | 0 | 50 | Tercapai |
| 6. | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari | Angka | 0 | 0 | 50 | Tercapai |
| | | | | | | |
| **AT.** | **KECAMATAN AKABILURU** | | | | | |
| 1. | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Nilai | 72 | 71,89 | 72,1 | On the track |
| 2. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 89,5 | 89,37 | 89,6 | On the track |
| 3. | Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari | % | 80 | 87,50 | 50 | Tercapai |
| 4. | Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan | % | 0 | | 0 | |
| 5. | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan | % | 89,5 | 100 | 50 | Tercapai |
| 6. | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari | % | 80 | 100 | 50 | Tercapai |
| | | | | | | |
| **AU.** | **KECAMATAN PAYAKUMBUH** | | | | | |
| 1. | Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) | Nilai | 70 | 73,08 | 70 | Tercapai |
| 2. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 80 | 86,84 | 81 | Tercapai |
| 3. | Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari | % | 80 | 90 | 81 | Tercapai |
| 4. | Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan | % | 0 | 0 | 61 | Tercapai |
| 5. | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan | % | 65 | 85 | 65 | Tercapai |
| 6. | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari | % | 65 | 86 | 65 | Tercapai |
| | | | | | | |
| **AV.** | **KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN** | | | | | |
| 1. | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Nilai | 63,31 | 63,31 | 65 | Tercapai |
| 2. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 91 | 92,14 | 91 | Tercapai |
| 3. | Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari | % | 65 | 87,5 | 65 | Tercapai |
| 4. | Tingkat Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan | % | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan | % | 65 | 100 | 65 | Tercapai |
| 6. | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari | % | 65 | 100 | 0 | Tercapai |
| | | | | | | |
| **AW.** | **KECAMATAN HARAU** | | | | | |
| 1. | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Nilai | 70 | 64,56 | 70 | On the track |
| 2. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 95 | 90,95 | 95 | On the track |
| 3. | Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari | % | 70 | 100 | 75 | Tercapai |

| No. | Indikator | Satuan | 2025 | | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi (TW II)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
| 4. | Tingkat Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan | % | 70 | 100 | 75 | Tercapai |
| 5. | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan | % | 70 | 98,38 | 75 | Tercapai |
| 6. | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari | % | 70 | 100 | 75 | Tercapai |
| | | | | | | |
| **AX.** | **KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU** | | | | | |
| 1. | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Nilai | 65,75 | 65,75 | 67 | Tercapai |
| 2. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai | 90,89 | 90,87 | 91,3 | On the track |
| 3. | Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari | Angka | 80 | 100 | 81 | Tercapai |
| 4. | Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan | Angka | 50 | 100 | 60 | Tercapai |
| 5. | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan | Angka | 50 | 100 | 60 | Tercapai |
| 6. | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari | Angka | 50 | 100 | 60 | Tercapai |
| | | | | | | |
| **AY.** | **KECAMATAN KAPUR IX** | | | | | |
| 1. | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Nilai | 55 | 55,35 | 60 | Tercapai |
| 2. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 90 | 91,52 | 90,5 | Tercapai |
| 3. | Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari | % | 50 | 60 | 53 | Tercapai |
| 4. | Tingkat Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan | % | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan | % | 50 | 60 | 53 | Tercapai |
| 6. | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari | % | 50 | 60 | 53 | Tercapai |
| | | | | | | |
| **AZ.** | **KECAMATAN LUAK** | | | | | |
| 1. | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Nilai | 65 | 62,07 | 65 | On the track |
| 2. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 85 | 89,43 | 85 | Tercapai |
| 3. | Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari | % | 85 | 100 | 85 | Tercapai |
| 4. | Tingkat Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan | % | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan | % | 85 | 100 | 85 | Tercapai |
| 6. | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari | % | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| **BA.** | **KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI** | | | | | |
| 1. | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Nilai | 75 | 66,22 | 75 | On the track |
| 2. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 95 | 88,5 | 80 | On the track |
| 3. | Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari | % | 100 | 100 | 60 | Tercapai |
| 4. | Tingkat Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan | % | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan | % | 100 | 100 | 80 | Tercapai |

| No. | Indikator | Satuan | 2025 | | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi (TW II)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
| 6. | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari | % | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| **BB.** | **KECAMATAN GUNUANG OMEH** | | | | | |
| 1. | Nilai Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai | 80 | 89,77 | 81 | Tercapai |
| 2. | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Indeks | 65 | 71,45 | 66 | Tercapai |
| 3. | Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari | % | 75 | 100 | 76 | Tercapai |
| 4. | Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan | % | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan | % | 80 | 100 | 80 | Tercapai |
| 6. | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari | % | 0 | 0 | 0 | |

*Sumber: RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026; Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2023-2025*

** Data Realisasi TW II Tahun 2025 adalah capaian proyeksi dengan menggunakan 3 klasifikasi, yakni: a) Tercapai; b) Dapat tercapai/On the track; dan c) Tidak dapat tercapai*

Penjelasan terhadap rendahnya partisipasi PAUD (49,01%) adalah sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan untuk memenuhi biaya personal merupakan salah satu faktor penyebab utama anak usia 5-6 tahun dari keluarga miskin belum mendapatkan layanan pendidikan di PAUD ataupun di SD/MI;

2. Daya tampung satuan pendidikan bagi anak usia sekolah. Informasi daya tampung yang tersedia dengan aturan standar penting dalam menyusun perencanaan untuk memastikan setiap anak usia 5-6 tahun dapat mengakses layanan pendidikan (PAUD atau SD/MI);

3. Ketercukupan sumber daya manusia di satuan pendidikan untuk menyelenggarakan layanan belum sesuai dengan rasio guru dan siswa yang berlaku dan Pemda perlu memastikan kecukupan tersebut.;

Penjelasan terhadap guru bersertifikat yang belum mencapai target disebabkan oleh ketidaksesuaian antara biaya yang dibutuhkan dengan kompensasi yang diterima oleh pendidik PAUD, serta minimnya perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi guru PAUD.

Rendahnya partisipasi APS Kesetaraan disebabkan oleh biaya personal peserta didik dapat memenuhi segala kebutuhan yang mendukung berpartisipasinya siswa dalam pendidikan, perlu dipastikan biaya dapat dipenuhi. Selain itu, terdapat berbagai pilihan selain pendidikan seperti bekerja, dan lainnya.

Belum tercapainya cakupan imunisasi disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu kurangnya pemahaman orang tua akan pentingnya imunisasi dan kehalalannya. Sedangkan untuk kepesertaan JKN aktif, SDM kesehatan, Puskesmas sesuai standar, serta fasilitas kesehatan sesuai standar disebabkan oleh keterbatasan jumlah dan distribusi sumber daya manusia kesehatan maupun tenaga pengelola program pada beberapa unit pelayanan menyebabkan beban kerja cukup tinggi, masih terdapat keterlambatan penyampaian data dan laporan dari sebagian fasilitas pelayanan kesehatan sehingga memengaruhi ketepatan waktu pengukuran indikator kinerja, rendahnya pemanfaatan layanan kesehatan pada sebagian program akibat masih terbatasnya kesadaran masyarakat terhadap upaya promotif dan preventif, serta pendapatan pada sebagian Puskesmas BLUD belum mencapai target sehingga memengaruhi kemampuan pembiayaan beberapa kegiatan operasional yang bersumber dari pendapatan BLUD. Adapun langkah percepatan pada semester II yaitu akan dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran, penguatan koordinasi lintas program dan lintas sektor, peningkatan monitoring serta evaluasi terhadap capaian indikator, percepatan pengadaan dan penyelesaian administrasi, peningkatan kualitas pelaporan, serta pelaksanaan rencana aksi terhadap indikator yang belum mencapai target. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan capaian kinerja dan realisasi anggaran sesuai target Tahun 2026.

Capaian Prevalensi Stunting sangat baik, untuk mempertahankan capaian tersebut dilakukan intervensi spesifik di antaranya peningkatan capaian TTD pada ibu hamil, remaja putri, pemeriksaan K6 ibu hamil, PMT untuk ibu KEK dan balita, pemenuhan ASI eksklusif serta imunisasi. Intervensi ini didukung oleh sinergitas antar perangkat daerah seperti monitoring dan evaluasi terpadu, budikdamber, bantuan ternak, telur serta rumah bibit.

Belum tercapainya target tingkat produktivitas tenaga kerja disebabkan oleh masih belum optimalnya kompetensi dan keterampilan tenaga kerja, terutama pada aspek teknis dan produktivitas kerja. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam proses produksi dan efisiensi usaha masih perlu ditingkatkan sehingga output yang dihasilkan belum mampu mencapai target produktivitas yang ditetapkan. Untuk mengatasi target yang belum tercapai ini perlu ditingkatkan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi untuk pencari kerja dan penggunaan teknologi dalam proses produksi serta diadakan pelatihan manajemen usaha.

Adapun penjelasan terhadap Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Triwulan II Tahun 2026 pada tabel 2.3 dapat dijabarkan sebagai berikut:

I. Aspek Geografi dan Demografi
Terdapat 17 indikator yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Daerah yang dilihat dari Aspek Geografi dan Demografi. Di antara 17 indikator tersebut terdapat 6 indikator yang mencapai target dan 11 indikator yang belum mencapai target.

II. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Terdapat 27 indikator yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Daerah yang dilihat dari Aspek Kesejahteraan Masyarakat. Di antara 27 indikator tersebut terdapat 3 indikator yang tidak tercapai untuk tahun 2025 yaitu Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi, untuk Indikator Kinerja Daerah yang sudah mencapai target tahun 2025 yaitu sebanyak 13 indikator sedangkan 11 indikator belum mencapai target.

III. Aspek Daya Saing Daerah
Terdapat 28 indikator yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Daerah yang dilihat dari Aspek Daya Saing Daerah. Di antara 28 indikator tersebut terdapat 13 indikator yang mencapai target, 14 indikator yang belum mencapai target, serta 1 indikator tidak tercapai.

IV. Aspek Pelayanan Umum
Terdapat 12 indikator yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Daerah yang dilihat dari Aspek Pelayanan Umum, di antara 12 indikator tersebut terdapat 3 indikator yang mencapai target, 7 indikator yang belum mencapai target dan 2 indikator yang tidak mencapai target.

Penjelasan terhadap capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

A. Pendidikan
Terdapat 14 indikator yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Pendidikan. Sebanyak 3 indikator sudah mencapai target, sebanyak 5 indikator belum mencapai target, serta 6 indikator yang tidak ada target dan capaiannya. Apabila dipersentasekan, capaian indikator kinerja kunci yang sudah mencapai target untuk Urusan Pendidikan yaitu sebesar 21,43%.
Capaian indikator kinerja bidang pendidikan memiliki keterkaitan yang erat dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan. Peningkatan indikator seperti Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan semakin baiknya akses dan keberlangsungan pendidikan masyarakat. Kondisi tersebut merupakan dampak dari terpenuhinya

pelayanan dasar pendidikan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah melalui penyediaan layanan pada jenjang PAUD, SD, dan SMP.

Pemenuhan SPM Pendidikan pada layanan PAUD berkontribusi terhadap meningkatnya akses pendidikan anak usia dini. Pemenuhan SPM pada jenjang SD menjamin seluruh anak usia sekolah dasar memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau. Sementara itu, pemenuhan SPM pada jenjang SMP berperan dalam menjaga keberlanjutan pendidikan hingga pendidikan dasar sembilan tahun, yang pada akhirnya mendukung peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).

B. Kesehatan

Terdapat 31 indikator yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Kesehatan. Sebanyak 18 indikator sudah mencapai target dan sebanyak 13 indikator belum mencapai target. Apabila dipersentasekan, capaian indikator kinerja kunci yang sudah mencapai target untuk Urusan Kesehatan yaitu sebesar 58,06%.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Terdapat 2 indikator yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sebanyak 1 indikator sudah mencapai target dan 1 indikator belum mencapai target. Apabila dipersentasekan, capaian indikator kinerja kunci yang sudah mencapai target untuk Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu sebesar 50%.

D. Perumahan Rakyat

Terdapat 5 indikator yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Perumahan Rakyat. Sebanyak 3 indikator sudah mencapai target dan 2 indikator belum mencapai target. Apabila dipersentasekan, capaian indikator kinerja kunci yang sudah mencapai target untuk Urusan Perumahan Rakyat yaitu sebesar 60%.

E. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Terdapat 7 indikator yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Semua indikator sudah mencapai target, maka capaian indikator kinerja kunci untuk Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah 100%.

F. Sosial

Terdapat 22 indikator yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Sosial. Sebanyak 20 indikator sudah mencapai target dan 2 indikator belum mencapai target. Apabila dipersentasekan, capaian indikator kinerja kunci yang sudah mencapai target untuk Urusan Sosial yaitu sebesar 91%.

Indikator Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya belum mencapai target. Belum tercapainya pelayanan bagi lanjut usia terlantar disebabkan oleh belum optimalnya pendataan sasaran, keterbatasan anggaran dan jangkauan layanan, serta belum optimalnya koordinasi dengan pemerintah nagari/desa dan lembaga kesejahteraan sosial. Untuk meningkatkan capaian indikator, akan dilakukan pemutakhiran data sasaran, penguatan koordinasi dengan pemerintah nagari/desa dan lembaga kesejahteraan sosial, optimalisasi penjangkauan terhadap lanjut usia terlantar, serta perluasan cakupan pelayanan sesuai dengan ketersediaan sumber daya.

G. Tenaga Kerja

Terdapat 10 indikator yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Tenaga Kerja. Sebanyak 4 indikator sudah mencapai target dan 6 indikator belum mencapai target. Apabila dipersentasekan, capaian indikator kinerja kunci yang sudah mencapai target untuk Urusan Tenaga Kerja yaitu sebesar 40%.

Beberapa indikator kinerja bidang ketenagakerjaan, seperti rasio kewirausahaan, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, dan pelatihan tenaga kerja, belum mencapai target pada Semester I. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain masih terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia, belum optimalnya minat dan kapasitas masyarakat untuk berwirausaha, rendahnya kesesuaian antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), keterbatasan kuota serta frekuensi pelatihan berbasis kompetensi, dan belum optimalnya sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan lembaga pelatihan kerja.

Untuk mempercepat pencapaian target pada Semester II, pemerintah daerah perlu meningkatkan pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja, memperluas fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui penyelenggaraan *job fair*, layanan bursa kerja, dan sistem informasi pasar kerja, serta memperkuat program pengembangan kewirausahaan melalui pendampingan usaha, peningkatan kapasitas pelaku UMKM, dan akses terhadap pembiayaan. Selain itu, diperlukan penguatan kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dalam penyusunan kebutuhan kompetensi, penyediaan program magang, rekrutmen tenaga kerja, dan penyerapan lulusan pelatihan. Sinergi dengan Balai Latihan Kerja (BLK), baik milik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah, juga perlu dioptimalkan melalui pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi keterampilan, dan program *upskilling* maupun *reskilling* sehingga kompetensi tenaga kerja semakin sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan rasio kewirausahaan, dan mendorong pencapaian target indikator ketenagakerjaan pada akhir tahun anggaran.

H. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Terdapat 12 indikator yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Semua indikator sudah mencapai target. Apabila dipersentasekan, capaian indikator kinerja kunci yang sudah mencapai target untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah 100%.

Indikator Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar telah mencapai target yang ditetapkan. Ketercapaian indikator tersebut didukung oleh tersedianya dasar hukum pembentukan PUSPAGA, dukungan sarana dan prasarana yang memadai, serta ketersediaan sumber daya manusia yang mendukung penyelenggaraan layanan.

Indikator Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan telah

mencapai target yang ditetapkan. Ketercapaian indikator tersebut didukung oleh ketersediaan data gender dan anak yang telah terpilah, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam proses evaluasi, perencanaan, dan penyusunan kebijakan secara lebih tepat sasaran.

I. Pangan
Terdapat 5 indikator yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Pangan. Sebanyak 2 indikator sudah mencapai target dan 3 indikator belum mencapai target. Apabila dipersentasekan, capaian indikator kinerja kunci yang sudah mencapai target untuk Urusan Pangan adalah 40%.

J. Pertanahan
Terdapat 1 indikator yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Pertanahan. Indikator tersebut sudah mencapai target, maka capaian indikator kinerja kunci yang sudah mencapai target untuk Urusan Pertanahan adalah 100%.

K. Lingkungan Hidup
Terdapat 3 indikator yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Lingkungan Hidup. Sebanyak 1 indikator sudah mencapai target dan 2 indikator belum mencapai target. Apabila dipersentasekan, capaian indikator kinerja kunci yang sudah mencapai target untuk Urusan Lingkungan Hidup adalah 33%.

L. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Terdapat 9 indikator yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Semua indikator sudah mencapai target, maka capaian indikator kinerja kunci yang sudah mencapai target untuk Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 100%.

M. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Terdapat 7 indikator yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Semua indikator sudah mencapai target, maka capaian indikator kinerja kunci yang sudah mencapai target untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah 100%.

N. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Terdapat 11 indikator yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sebanyak 6 indikator sudah mencapai target dan 5 indikator belum mencapai target. Apabila dipersentasekan, capaian indikator kinerja kunci yang sudah mencapai target untuk Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah 55%.

O. Perhubungan
Terdapat 1 indikator yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Perhubungan. Indikator tersebut sudah mencapai target, maka capaian indikator kinerja kunci yang sudah mencapai target untuk Urusan Perhubungan adalah 100%.

P. Komunikasi dan Informatika
Terdapat 2 indikator yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Komunikasi dan Informatika. Indikator-indikator tersebut sudah mencapai target, maka capaian indikator kinerja kunci yang sudah mencapai target untuk Urusan Komunikasi dan Informatika adalah 100%.

Q. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Terdapat 12 indikator yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Sebanyak 7 indikator sudah mencapai target dan 5 indikator belum mencapai

target. Apabila dipersentasekan, capaian indikator kinerja kunci yang sudah mencapai target untuk Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah 58%.

R. Penanaman Modal

Terdapat 7 indikator yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Penanaman Modal. Sebanyak 5 indikator sudah mencapai target dan 2 indikator belum mencapai target. Apabila dipersentasekan, capaian indikator kinerja kunci yang sudah mencapai target untuk Urusan Penanaman Modal adalah 71%.

S. Kepemudaan dan Olahraga

Terdapat 6 indikator yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Kepemudaan dan Olahraga. Sebanyak 3 indikator sudah mencapai target dan 3 indikator belum mencapai target. Apabila dipersentasekan, capaian indikator kinerja kunci yang sudah mencapai target untuk Urusan Kepemudaan dan Olahraga adalah 50%.

T. Statistik

Terdapat 1 indikator yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Statistik. Indikator tersebut belum mencapai target.

U. Persandian

Terdapat 2 indikator yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Persandian. 1 indikator sudah mencapai target dan 1 indikator belum mencapai target. Maka capaian indikator kinerja kunci yang sudah mencapai target untuk Urusan Persandian adalah 50%.

V. Kebudayaan

Terdapat 6 indikator yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Kebudayaan. 5 indikator sudah mencapai target dan 1 indikator tidak mencapai target. Maka capaian indikator kinerja kunci yang sudah mencapai target untuk Urusan kebudayaan adalah 83%.

Persentase cagar budaya yang dilestarikan pada Tahun 2026 telah mencapai target yang ditetapkan, menunjukkan bahwa upaya pelestarian cagar budaya telah terlaksana sesuai rencana. Ke depan, kualitas pelestarian perlu terus ditingkatkan melalui penguatan pemanfaatan cagar budaya sebagai sarana pelestarian nilai-nilai budaya dan penguatan identitas daerah, serta mendorong pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya sehingga keberadaan cagar budaya tidak hanya terjaga kelestariannya, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

W. Perpustakaan

Terdapat 3 indikator yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Perpustakaan. 1 indikator sudah mencapai target dan 2 indikator belum mencapai target. Maka capaian indikator kinerja kunci yang sudah mencapai target untuk Urusan Perpustakaan adalah 33%.

X. Kearsipan

Terdapat 5 indikator yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Kearsipan. 2 indikator sudah mencapai target, 2 indikator belum mencapai target dan 1 indikator tidak mencapai target. Maka capaian indikator kinerja kunci yang sudah mencapai target untuk Urusan Kearsipan adalah 40%.

Y. Kelautan dan Perikanan

Terdapat 7 indikator yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Kelautan dan Perikanan. 3 indikator sudah mencapai target, 3 indikator belum mencapai target dan 1 indikator tidak mencapai target. Maka capaian indikator kinerja kunci yang sudah mencapai target untuk Urusan Kelautan dan Perikanan adalah 43%.

Z. Pariwisata

Terdapat 7 indikator yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Pariwisata. 4 indikator sudah mencapai target dan 3 indikator belum mencapai target. Maka capaian indikator kinerja kunci yang sudah mencapai target untuk Urusan Pariwisata adalah 57%.

AA. Pertanian

Terdapat 19 indikator yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Pertanian. Sebanyak 8 indikator sudah mencapai target dan 11 indikator belum mencapai target. Maka capaian indikator kinerja kunci yang sudah mencapai target untuk Urusan Pertanian adalah 42%.

AB. Energi dan Sumber Daya Mineral

Terdapat 1 indikator yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral. Indikator tersebut tidak tercapai.

AC. Perdagangan

Terdapat 6 indikator yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Perdagangan. Sebanyak 1 indikator sudah mencapai target, 3 indikator belum mencapai target dan 3 indikator tidak mencapai target. Maka capaian indikator kinerja kunci yang sudah mencapai target untuk Urusan Perdagangan adalah 16,67%.

AD. Perindustrian

Terdapat 4 indikator yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Perindustrian. Seluruh indikator tersebut sudah mencapai target, maka capaian indikator kinerja kunci yang sudah mencapai target untuk Urusan Perindustrian adalah 100%.

AE. Perencanaan

Terdapat 4 indikator yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Perencanaan. Seluruh indikator tersebut sudah mencapai target, maka capaian indikator kinerja kunci yang sudah mencapai target untuk Urusan Perencanaan adalah 100%.

AF. Keuangan

Terdapat 11 indikator yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Keuangan. Sebanyak 10 indikator tersebut sudah mencapai target dan 1 indikator belum mencapai target. Maka capaian indikator kinerja kunci yang sudah mencapai target untuk Urusan Keuangan adalah 91%.

AG. Pengadaan

Terdapat 3 indikator yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Pengadaan. Sebanyak 1 indikator sudah mencapai target, 1 indikator belum mencapai target dan 1 indikator tidak mencapai target. Maka capaian indikator kinerja kunci yang sudah mencapai target untuk Urusan Pengadaan adalah 33%.

AH. Kepegawaian

Terdapat 2 indikator yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Kepegawaian. Sebanyak 1 indikator sudah mencapai target dan 1 indikator belum mencapai target, maka capaian indikator kinerja kunci yang sudah mencapai target untuk

Urusan Kepegawaian adalah 50%.

AI. Transparansi dan Partisipasi Publik

Terdapat 2 indikator yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik. Seluruh indikator tersebut sudah mencapai target, maka capaian indikator kinerja kunci yang sudah mencapai target untuk Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik adalah 100%.

AJ. Transmigrasi

Terdapat 2 indikator yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Transmigrasi. Sebanyak 1 indikator belum mencapai target dan 1 indikator tidak mencapai target.

AK. Sekretariat Daerah

Terdapat 8 indikator yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Sekretariat Daerah. Sebanyak 5 indikator sudah mencapai target dan 3 indikator belum mencapai target. Maka capaian indikator kinerja kunci yang sudah mencapai target untuk Urusan Sekretariat Daerah adalah 62,50%.

AL. Sekretariat DPRD

Terdapat 5 indikator yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Sekretariat DPRD. Sebanyak 4 indikator sudah mencapai target dan 1 indikator belum mencapai target. Maka capaian indikator kinerja kunci yang sudah mencapai target untuk Urusan Sekretariat DPRD adalah 80%.

AM. Pendidikan dan Pelatihan

Terdapat 1 indikator yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Pendidikan dan Pelatihan. Indikator tersebut belum mencapai target.

AN. Penelitian dan Pengembangan

Terdapat 4 indikator yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Penelitian dan Pengembangan. Sebanyak 2 indikator sudah mencapai target, 1 indikator belum mencapai target dan 1 indikator tidak mencapai target. Maka capaian indikator kinerja kunci yang sudah mencapai target untuk Urusan Penelitian dan Pengembangan adalah 50%.

AO. Pemerintahan Umum

Terdapat 1 indikator yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Pemerintahan Umum. Indikator tersebut belum mencapai target.

## 2.4 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TRIWULAN II TAHUN 2026

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026.

Prioritas pembangunan Tahun 2026 terdiri atas 10 (sepuluh) prioritas pembangunan, yaitu: 1). Pembinaan agama dan adat serta kerukunan antar umat beragama; 2). Reformasi birokrasi dan optimalisasi pendapatan daerah; 3). Penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 4). Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perlindungan sosial; 5). Penguatan koperasi, usaha mikro dan kecil; 6). Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif; 7). Penguatan kelembagaan, redistribusi lahan, ketersediaan sarana dan prasarana produksi; 8). Pemerataan infrastruktur dasar, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana; 9). Penataan infrastruktur strategis dan

terpadu; 10). Perwujudan kemandirian Nagari berbasis potensi wilayah. Prioritas pembangunan dalam RKPD Tahun 2026 telah selaras dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD Tahun 2026 yaitu sebanyak 224 program, 637 kegiatan dan 1901 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp1.360.521.574.909. Sedangkan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dalam APBD Tahun 2026 Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu sebanyak 227 program, 642 kegiatan dan 1910 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp1.254.725.169.358. Dilihat dari jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada RKPD Tahun 2026 dengan APBD Tahun 2026 maka terdapat perbedaan atau terjadi inkonsistensi jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan.

Tingkat konsistensi antara RKPD Tahun 2026 dan APBD Tahun 2026 dilihat dari jumlah program yaitu sebesar 101,34%, dilihat dari jumlah kegiatan sebesar 100,78%, dilihat dari jumlah sub kegiatan yaitu sebesar 100,47% dan dilihat dari pagu anggaran nilai konsisten yaitu sebesar 91,78%.

Rincian jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dilihat dari tingkat konsistensinya yaitu:

a. Tingkat konsistensi antara RKPD Tahun 2026 dengan APBD Tahun 2026 yang paling tinggi untuk jumlah program yaitu 133% terdapat pada Kecamatan Suliki dan program yang nilai konsistensi 100% antara RKPD Tahun 2026 dengan APBD Tahun 2026 terdapat sebanyak 40 Perangkat Daerah.

b. Tingkat konsistensi antara RKPD Tahun 2026 dengan APBD Tahun 2026 yang paling tinggi untuk jumlah kegiatan yaitu sebesar 114% terdapat pada Kecamatan Suliki dan kegiatan yang konsisten 100% antara RKPD Tahun 2026 dengan APBD Tahun 2026 terdapat sebanyak 38 Perangkat Daerah.

c. Tingkat konsistensi antara RKPD Tahun 2026 dengan APBD Tahun 2026 yang paling tinggi untuk jumlah sub kegiatan yaitu sebesar 113% terdapat pada Kecamatan Suliki dan sub kegiatan yang konsisten 100% antara RKPD Tahun 2026 dengan APBD Tahun 2026 terdapat sebanyak 36 Perangkat Daerah.

Untuk rincian jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan per Perangkat Daerah pada Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di halaman berikut ini.

Tabel 2.5
Rekap Konsistensi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pada RKPD dan APBD Tahun 2026

| NO | PERANGKAT DAERAH | RKPD 2026 | | | | APBD 2026 | | | | KONSISTENSI RKPD TERHADAP APBD (%) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROG | KEG | SUB KEG | PAGU | PROG | KEG | SUB KEG | PAGU | PROG | KEG | SUB KEG | PAGU |
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 7 | 19 | 87 | 558.457.810.870 | 7 | 19 | 87 | 536.963.122.799 | 100% | 100% | 100% | 96% |
| 2 | BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS | 3 | 11 | 22 | 70.281.964.697 | 3 | 11 | 22 | 65.085.454.905 | 100% | 100% | 100% | 93% |
| 3 | DINAS KESEHATAN | 5 | 21 | 74 | 172.671.903.489 | 5 | 21 | 74 | 176.033.715.823 | 100% | 100% | 100% | 102% |
| 4 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 11 | 21 | 51 | 73.015.079.334 | 12 | 22 | 53 | 35.928.682.218 | 109% | 105% | 104% | 49% |
| 5 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 2 | 10 | 38 | 8.373.529.226 | 2 | 10 | 38 | 8.901.120.274 | 100% | 100% | 100% | 106% |
| 6 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 2 | 10 | 31 | 7.570.486.511 | 2 | 10 | 31 | 8.585.322.609 | 100% | 100% | 100% | 113% |
| 7 | DINAS SOSIAL | 6 | 14 | 41 | 7.495.335.832 | 6 | 14 | 41 | 5.373.439.929 | 100% | 100% | 100% | 72% |
| 8 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 6 | 12 | 23 | 6.855.123.504 | 6 | 12 | 23 | 4.138.928.110 | 100% | 100% | 100% | 60% |
| 9 | DINAS PANGAN | 5 | 15 | 59 | 3.144.918.331 | 5 | 15 | 59 | 2.905.591.766 | 100% | 100% | 100% | 92% |
| 10 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | 15 | 26 | 53 | 7.967.882.934 | 15 | 26 | 53 | 8.598.973.132 | 100% | 100% | 100% | 108% |
| 11 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 5 | 19 | 46 | 5.161.227.449 | 5 | 19 | 46 | 4.651.439.563 | 100% | 100% | 100% | 90% |
| 12 | DINAS PEMBERDAYAAN | 4 | 10 | 41 | 6.736.278.860 | 4 | 10 | 41 | 6.248.709.611 | 100% | 100% | 100% | 93% |

| NO | PERANGKAT DAERAH | RKPD 2026 | | | | APBD 2026 | | | | KONSISTENSI RKPD TERHADAP APBD (%) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROG | KEG | SUB KEG | PAGU | PROG | KEG | SUB KEG | PAGU | PROG | KEG | SUB KEG | PAGU |
| | MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI | | | | | | | | | | | | |
| 13 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10 | 27 | 85 | 13.082.160.728 | 10 | 27 | 85 | 9.184.862.145 | 100% | 100% | 100% | 70% |
| 14 | DINAS PERHUBUNGAN | 2 | 17 | 43 | 16.527.683.989 | 2 | 17 | 43 | 15.792.334.625 | 100% | 100% | 100% | 96% |
| 15 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5 | 13 | 42 | 8.014.652.264 | 5 | 13 | 42 | 7.363.997.665 | 100% | 100% | 100% | 92% |
| 16 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 12 | 19 | 38 | 5.471.888.553 | 12 | 19 | 38 | 5.092.487.739 | 100% | 100% | 100% | 93% |
| 17 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6 | 13 | 45 | 4.834.101.588 | 6 | 13 | 45 | 3.540.116.072 | 100% | 100% | 100% | 73% |
| 18 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA | 7 | 21 | 50 | 10.827.636.698 | 7 | 21 | 50 | 6.570.241.927 | 100% | 100% | 100% | 61% |
| 19 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 6 | 19 | 70 | 5.128.564.039 | 6 | 19 | 70 | 4.526.204.859 | 100% | 100% | 100% | 88% |
| 20 | DINAS PERIKANAN | 4 | 10 | 23 | 7.947.166.344 | 4 | 10 | 23 | 5.248.230.753 | 100% | 100% | 100% | 66% |
| 21 | DINAS TANAMAN PANGAN, | 6 | 16 | 45 | 17.698.131.611 | 6 | 16 | 45 | 16.330.357.544 | 100% | 100% | 100% | 92% |

| NO | PERANGKAT DAERAH | RKPD 2026 | | | | APBD 2026 | | | | KONSISTENSI RKPD TERHADAP APBD (%) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROG | KEG | SUB KEG | PAGU | PROG | KEG | SUB KEG | PAGU | PROG | KEG | SUB KEG | PAGU |
| | HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | | | | | | | | | | | | |
| 22 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 6 | 22 | 79 | 11.313.929.976 | 6 | 22 | 79 | 10.204.850.445 | 100% | 100% | 100% | 90% |
| 23 | SEKRETARIAT DAERAH | 3 | 20 | 69 | 38.327.341.595 | 3 | 20 | 69 | 40.252.701.943 | 100% | 100% | 100% | 105% |
| 24 | SEKRETARIAT DPRD | 2 | 17 | 74 | 32.167.776.925 | 2 | 17 | 74 | 35.258.556.711 | 100% | 100% | 100% | 110% |
| 25 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 4 | 17 | 58 | 7.503.194.523 | 4 | 17 | 58 | 5.168.053.809 | 100% | 100% | 100% | 69% |
| 26 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 4 | 14 | 89 | 200.034.652.450 | 4 | 14 | 89 | 172.926.101.410 | 100% | 100% | 100% | 86% |
| 27 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 3 | 12 | 35 | 6.122.440.179 | 3 | 13 | 36 | 6.658.840.429 | 100% | 108% | 103% | 109% |
| 28 | INSPEKTORAT | 3 | 11 | 52 | 12.439.115.885 | 3 | 11 | 52 | 13.096.320.729 | 100% | 100% | 100% | 105% |
| 29 | KECAMATAN GUNUANG OMEH | 4 | 9 | 18 | 1.335.833.783 | 4 | 9 | 19 | 1.370.050.668 | 100% | 100% | 106% | 103% |
| 30 | KECAMATAN BUKIK BARISAN | 4 | 9 | 18 | 1.621.415.530 | 4 | 10 | 19 | 1.525.504.869 | 100% | 111% | 106% | 94% |
| 31 | KECAMATAN SULIKI | 3 | 7 | 15 | 1.840.279.889 | 4 | 8 | 17 | 1.762.051.438 | 133% | 114% | 113% | 96% |
| 32 | KECAMATAN | 6 | 17 | 45 | 1.716.209.464 | 6 | 17 | 45 | 1.702.170.854 | 100% | 100% | 100% | 99% |

| NO | PERANGKAT DAERAH | RKPD 2026 | | | | APBD 2026 | | | | KONSISTENSI RKPD TERHADAP APBD (%) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROG | KEG | SUB KEG | PAGU | PROG | KEG | SUB KEG | PAGU | PROG | KEG | SUB KEG | PAGU |
| | GUGUAK | | | | | | | | | | | | |
| 33 | KECAMATAN MUNGKA | 6 | 13 | 32 | 1.366.826.872 | 6 | 13 | 32 | 1.386.651.134 | 100% | 100% | 100% | 101% |
| 34 | KECAMATAN AKABILURU | 5 | 14 | 30 | 1.818.614.830 | 5 | 14 | 30 | 1.642.654.780 | 100% | 100% | 100% | 90% |
| 35 | KECAMATAN PAYAKUMBUH | 6 | 15 | 42 | 2.314.464.076 | 6 | 15 | 42 | 2.348.788.381 | 100% | 100% | 100% | 101% |
| 36 | KECAMATAN LUAK | 4 | 10 | 19 | 1.876.292.043 | 4 | 10 | 19 | 1.903.724.231 | 100% | 100% | 100% | 101% |
| 37 | KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN | 5 | 12 | 26 | 1.842.689.130 | 6 | 13 | 27 | 1.745.360.269 | 120% | 108% | 104% | 95% |
| 38 | KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI | 4 | 11 | 24 | 1.664.974.065 | 4 | 11 | 24 | 1.624.119.829 | 100% | 100% | 100% | 98% |
| 39 | KECAMATAN HARAU | 6 | 16 | 41 | 1.995.198.471 | 6 | 16 | 41 | 1.921.057.845 | 100% | 100% | 100% | 96% |
| 40 | KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU | 4 | 12 | 25 | 1.812.772.828 | 4 | 12 | 25 | 1.738.770.562 | 100% | 100% | 100% | 96% |
| 41 | KECAMATAN KAPUR IX | 5 | 13 | 29 | 2.088.857.730 | 5 | 13 | 29 | 2.304.172.031 | 100% | 100% | 100% | 110% |
| 42 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 6 | 12 | 35 | 5.307.271.206 | 6 | 12 | 36 | 5.095.028.026 | 100% | 100% | 103% | 96% |
| 43 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 2 | 11 | 39 | 6.747.896.608 | 2 | 11 | 39 | 6.026.304.897 | 100% | 100% | 100% | 89% |
| | | **224** | **637** | **1901** | **1.360.521.574.909** | **227** | **642** | **1910** | **1.254.725.169.358** | **101,34%** | **100,78%** | **100,47%** | **91,78%** |

*Sumber: SIPD RI*

Realisasi capaian kinerja pelaksanaan RKPD seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan Triwulan II* Tahun 2026 mencapai 9,40%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp159.984.311.263,-. Berdasarkan capaian tersebut, baik realisasi kinerja maupun realisasi keuangan masih tergolong sangat rendah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2026 didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II. Oleh karena itu, masih terdapat program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum dapat dilaksanakan karena menunggu pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Pelaksanaan pergeseran anggaran pada Tahun 2026 mengakibatkan proses pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) mengakibatkan keterlambatan, sehingga berdampak pada tertundanya pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah.
3. Pada kegiatan yang bersifat fisik, pelaksanaan pada awal tahun masih difokuskan pada penyusunan dokumen perencanaan, persiapan pengadaan, dan pemenuhan persyaratan administrasi. Oleh karena itu, pelaksanaan fisik sebagian besar baru dilaksanakan pada Triwulan III hingga akhir tahun.
4. Sebagian kegiatan dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa atau pihak ketiga. Sampai dengan Triwulan II, kegiatan tersebut masih berada pada tahap persiapan dan proses pengadaan sehingga pelaksanaan fisik maupun realisasi keuangannya belum optimal.

Rekapitulasi capaian kinerja dan realisasi keuangan untuk masing-masing urusan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 disajikan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
per Bidang Urusan pada RKPD 2026

| NO | BIDANG URUSAN | PROG | KEG | SUB KEG | PAGU | REALISASI | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | Rp | |
| 1 | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan | 3 | 11 | 70 | 540.861.061.646 | 40,83% | 220.813.998.344 | Disdikbud |
| 2 | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan | 73 | 111 | 403 | 251.837.929.234 | 44,74% | 112.676.428.186 | - Dinkes<br>- RSUD Achmad Darwis |
| 3 | Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 10 | 18 | 37 | 112.434.605.723 | 8,21% | 9.232.742.017 | DPUPR |
| 4 | Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman | 4 | 6 | 8 | 5.120.000.000 | 1,94% | 99.409.800 | DLHPKP |
| 5 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | 6 | 27 | 72 | 31.962.993.980 | 35,45% | 11.329.781.899 | - Satpol PP<br>- Damkar<br>- BPBD |
| 6 | Urusan Pemerintahan | 6 | 11 | 27 | 5.373.439.929 | 40,41% | 2.171.472.444 | Dinsos |

| NO | BIDANG URUSAN | PROG | KEG | SUB KEG | PAGU | REALISASI | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | Rp | |
| | Bidang Sosial | | | | | | | |
| 7 | Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | Disperinaker |
| 8 | Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | 4 | 9 | 22 | 673.000.000 | 18,67% | 125.681.126 | DP2KBP3A |
| 9 | Urusan Pemerintahan Bidang Pangan | 4 | 8 | 14 | 3.175.591.666 | 42,97% | 1.364.571.090 | Dinas Pangan |
| 10 | Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan | 1 | 1 | 1 | 50.000.000 | 24,88% | 12.438.000 | DPUPR |
| 11 | Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup | 11 | 15 | 35 | 9.668.473.132 | 34,98% | 3.382.107.427 | DLHPKP |
| 12 | Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | 3 | 7 | 14 | 4.651.439.563 | 47,84% | 2.225.462.813 | Disdukcapil |
| 13 | Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 4 | 7 | 19 | 6.401.243.011 | 44,65% | 2.858.353.899 | DPMDN |
| 14 | Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | 4 | 10 | 21 | 8.511.862.145 | 36,26% | 3.086.225.720 | DP2KBP3A |
| 15 | Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan | 2 | 10 | 20 | 16.570.122.625 | 42,76% | 7.085.978.269 | Dishub |
| 16 | Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika | 3 | 6 | 18 | 7.738.037.665 | 39,54% | 3.059.928.555 | Diskominfo |
| 17 | Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah | 3 | 6 | 12 | 4.970.283.739 | 45,47% | Rp2.259.965.678 | Disperdagkop UKM |
| 18 | Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal | 1 | 4 | 11 | 3.540.116.072 | 46,03% | 1.629.417.331 | DPMPTSP |
| 19 | Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan | 2 | 7 | 17 | 6.975.376.252 | 41,09% | 2.866.526.865 | Disparpora |

| NO | BIDANG URUSAN | PROG | KEG | SUB KEG | PAGU | REALISASI | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | Rp | |
| | Olahraga | | | | | | | |
| 20 | Urusan Pemerintahan Bidang Statistik | 1 | 1 | 2 | 5.960.000 | 0,00% | 0 | Diskominfo |
| 21 | Urusan Pemerintahan Bidang Persandian | 1 | 1 | 1 | 220.000.000 | 0,00% | 0 | Diskominfo |
| 22 | Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan | 2 | 5 | 7 | 1.840.000.000 | 0,98% | 18.000.000 | Disdikbud |
| 23 | Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan | 3 | 10 | 24 | 4.852.205.259 | 39,83% | 1.932.746.981 | Dispusip |
| 24 | Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan | 2 | 4 | 6 | 124.999.600 | 2,03% | 2.539.500 | Dispusip |
| 25 | Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan | 4 | 9 | 19 | 6.564.625.253 | 32,76% | 2.150.322.083 | Diskan |
| 26 | Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata | 1 | 1 | 1 | 294.457.500 | 4,22% | 12.430.100 | Disparpora |
| 27 | Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian | 10 | 22 | 35 | 32.485.207.989 | 21,37% | 6.942.753.219 | Distanhortbun ; Disnakkeswan |
| 28 | Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan | 3 | 4 | 4 | 422.204.000 | 3,64% | 15.355.392 | Disperdagkop UKM |
| 29 | Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian | 3 | 6 | 14 | 4.138.928.110 | 52,32% | 2.165.291.747 | Disperinaker |
| 30 | Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | Disperinaker |
| 31 | Sekretariat Daerah | 3 | 18 | 51 | 40.752.655.943 | 31,10% | 12.673.159.871 | Sekretariat Daerah |
| 32 | Sekretariat DPRD | 2 | 14 | 45 | 35.258.556.711 | 47,10% | 16.605.530.236 | Sekretariat DPRD |
| 33 | Perencanaan | 3 | 10 | 29 | 5.204.080.759 | 46,15% | 2.401.633.736 | Bappelitbangda |
| 34 | Keuangan | 4 | 13 | 71 | 189.841.269.727 | 349,74 % | 663.953.638.051 | BPKPD |
| 35 | Kepegawaian | 2 | 9 | 20 | 5.580.815.429 | 45,65% | 2.547.670.093 | BKPSDM |
| 36 | Pendidikan dan Pelatihan | 1 | 1 | 1 | 1.078.025.000 | 5,98% | 64.486.803 | BKPSDM |
| 37 | Penelitian dan Pengembangan | 1 | 1 | 1 | 13.973.050 | 26,43% | 3.693.000 | Bappelitbangda |
| 38 | Inspektorat Daerah | 3 | 11 | 49 | 13.096.320.729 | 41,68% | 5.458.685.040 | Inspektorat Daerah |
| 39 | Kecamatan | 46 | 108 | 197 | 22.975.076.891 | 44,41% | 10.202.843.992 | 13 Kecamatan |

| NO | BIDANG URUSAN | PROG | KEG | SUB KEG | PAGU | REALISASI | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | Rp | |
| 40 | Kesatuan Bangsa Dan Politik | 6 | 10 | 22 | 5.095.028.026 | 32,60% | 1.661.172.734 | Badan Kesbangpol |
| **JUMLAH** | | **245** | **532** | **1.420** | **1.390.359.966.358** | **80,20%** | **Rp1.115.092.442.041** | |

Evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan bidang urusan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

I. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dimana pada Perubahan RKPD Tahun 2026 terdapat 3 program, 11 kegiatan dan 70 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp540.861.061.646,-. Tingkat realisasi fisiknya yaitu sebesar 40,83% realisasi fisik dan realisasi keuangan sebesar Rp220.813.998.344,-

Adapun Faktor pendorong keberhasilan kinerja urusan pemerintahan bidang pendidikan yaitu komitmen pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung perencanaan yang baik, koordinasi antar bidang yang efektif, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran.

Faktor penghambat pencapaian kinerja urusan pemerintahan bidang pendidikan yaitu adanya kendala teknis dan administrasi yang memengaruhi percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya yaitu perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan yang belum mencapai target, penguatan monitoring dan evaluasi berkala, serta penyelesaian seluruh administrasi dan pelaporan kegiatan.

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD Achmad Darwis dimana pada Perubahan RKPD Tahun 2026 terdapat 73 program, 111 kegiatan dan 403 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp251.837.929.234,-. Realisasi fisik sebesar 44,74% dan realisasi keuangan baru Rp112.676.428.186,-. Adapun Faktor pendorong keberhasilan kinerja urusan pemerintahan bidang kesehatan yaitu pengelolaan Keuangan dengan Pola PPK-BLUD, Sinergi yang baik antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, rumah sakit, pemerintah nagari, serta lintas sektor dalam pelaksanaan program kesehatan, Meningkatnya koordinasi dan monitoring pelaksanaan program melalui rapat evaluasi rutin, supervisi lapangan, serta pemanfaatan aplikasi pelaporan seperti SIPD, ASIK, SIKDA, dan sistem informasi kesehatan lainnya, Dana BOK sudah mulai direalisasikan untuk mendukung kegiatan, Terlaksananya pembinaan dan pendampingan terhadap Puskesmas sehingga kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program semakin baik, Dukungan pendapatan BLUD Puskesmas dalam pembiayaan operasional pelayanan kesehatan.

Faktor penghambat pencapaian kinerja urusan pemerintahan bidang kesehatan yaitu Realisasi anggaran pada beberapa program dan kegiatan belum optimal karena masih terdapat tahapan

administrasi pencairan, kontrak, dan penyelesaian dokumen pertanggungjawaban, Sebagian indikator kinerja merupakan indikator outcome yang pencapaiannya baru dapat diukur secara optimal pada akhir tahun sehingga capaian Triwulan II belum mencerminkan hasil akhir, Keterbatasan jumlah dan distribusi sumber daya manusia kesehatan maupun tenaga pengelola program pada beberapa unit pelayanan menyebabkan beban kerja cukup tinggi, Masih terdapat keterlambatan penyampaian data dan laporan dari sebagian fasilitas pelayanan kesehatan sehingga memengaruhi ketepatan waktu pengukuran indikator kinerja, Rendahnya pemanfaatan layanan kesehatan pada sebagian program akibat masih terbatasnya kesadaran masyarakat terhadap upaya promotif dan preventif, Pendapatan pada sebagian Puskesmas BLUD belum mencapai target sehingga memengaruhi kemampuan pembiayaan beberapa kegiatan operasional yang bersumber dari pendapatan BLUD.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya yaitu Pada Triwulan III akan dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran, penguatan koordinasi lintas program dan lintas sektor, peningkatan monitoring serta evaluasi terhadap capaian indikator, percepatan pengadaan dan penyelesaian administrasi, peningkatan kualitas pelaporan, serta pelaksanaan rencana aksi terhadap indikator yang belum mencapai target. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan capaian kinerja dan realisasi anggaran sesuai target Tahun 2026.

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimana pada Perubahan RKPD Tahun 2026 terdapat 10 program, 18 kegiatan dan 37 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp112.434.605.723,-. Realisasi fisik sampai triwulan II sebesar 8,21% dan realisasi keuangan sebesar Rp9.232.742.017,-.

Adapun Faktor pendorong keberhasilan kinerja urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu Etos kerja aparatur yang baik dalam melaksanakan tugas.

Faktor penghambat pencapaian kinerja urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu Terjadinya 3 kali pergeseran anggaran sehingga proses pelaksanaan kegiatan jadi tertunda.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya yaitu akan melaksanakan kegiatan tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan target yang diberikan.

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman dimana pada Perubahan RKPD Tahun 2026 terdapat 4 program, 6 kegiatan dan 8 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp5.120.000.000,-. Realisasi fisik sampai triwulan II sebesar 1,94% dan realisasi keuangan sebesar Rp99.409.800,-. Dari 8 sub kegiatan, sebanyak 1 sub kegiatan telah mencapai target, dan 7 sub kegiatan belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun Faktor pendorong keberhasilan kinerja urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman yaitu Program dengan capaian kinerja tertinggi sampai dengan triwulan II

adalah Program Penunjang urusan dengan capaian 50,41%, capaian ini didukung dengan perencanaan anggaran yang telah didasarkan tren/kecenderungan pelaksanaan dalam beberapa tahun terakhir dan penempatan anggaran kas yang sesuai.

Faktor penghambat pencapaian kinerja urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman yaitu Beberapa pekerjaan fisik yang bersumber dari Tambahan TKD masuk di awal triwulan II sehingga capaian kinerja dalam tahap persiapan awal dan perencanaan fisik.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya yaitu Mempercepat proses pengadaan dengan penyediaan kelengkapan dokumen pendukung.

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Terdapat 3 (tiga) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat ini yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2026 terdapat 6 program, 27 kegiatan dan 72 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp31.962.993.980,-. Realisasi fisik sampai triwulan II sebesar 35,45% dan realisasi keuangan sebesar Rp11.329.781.899,-.

Adapun Faktor pendorong keberhasilan kinerja urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yaitu Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

Faktor penghambat pencapaian kinerja urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yaitu Proses administrasi pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran masih memerlukan penyesuaian.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya yaitu Mempercepat pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial dimana berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2026 terdapat 6 program, 11 kegiatan dan 27 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp5.373.439.929,-. Realisasi fisik sampai triwulan II sebesar 40,41% dan realisasi keuangan sebesar Rp2.171.472.444,-.

Faktor penghambat pencapaian kinerja urusan pemerintahan bidang sosial yaitu Proses Pengadaan Barang dan Jasa bantuan sosial berupa barang yang diserahkan untuk PPKS mulai dari verval data penerima sampai bantuan diterima oleh PPKS.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya yaitu Segerakan untuk verval data penerima sesuai dengan SK Bupati.

II. URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebanyak 4 program, 9 kegiatan dan 22 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp673.000.000,-. Realisasi fisik sampai

triwulan II sebesar 18,67% dan realisasi keuangan sebesar Rp125.681.126,-.

Adapun Faktor pendorong keberhasilan kinerja urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu Dukungan kebijakan dan komitmen pemerintah daerah, sinergi lintas sektor, ketersediaan SDM dan dukungan anggaran yang memadai.

Faktor penghambat pencapaian kinerja urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu Kompetensi SDM terbatas, Sarana dan Prasarana yang belum memadai, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya yaitu Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan mengoptimalkan penyerapan anggaran.

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pangan terdapat sebanyak 4 program, 8 kegiatan dan 14 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp3.175.591.666,-. Realisasi fisik sampai triwulan II sebesar 42,97% dan realisasi keuangan sebesar Rp1.364.571.090,-.

Adapun Faktor pendorong keberhasilan kinerja urusan pemerintahan bidang pangan yaitu Kompetensi dan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), Dukungan Kebijakan dan Regulasi, Partisipasi dan Dukungan Masyarakat.

Faktor penghambat pencapaian kinerja urusan pemerintahan bidang pangan yaitu Ketersediaan anggaran yang tidak Memadai.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya yaitu Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dan mengoptimalkan pemanfataan sumber pendanaan lainnya.

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang terdapat sebanyak 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp50.000.000,-. Realisasi fisik sampai triwulan II sebesar 24,88% dan realisasi keuangan sebesar Rp12.438.000,-.

Faktor penghambat pencapaian kinerja urusan pemerintahan bidang pertanahan yaitu Terjadinya 3 kali pergeseran anggaran sehingga proses pelaksanaan kegiatan jadi tertunda.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya yaitu akan melaksanakan kegiatan tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan target yang diberikan.

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman terdapat sebanyak 11 program, 15 kegiatan dan 35 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp9.668.473.132,-. Realisasi fisik sampai triwulan II sebesar 34,98% dan realisasi keuangan sebesar Rp3.382.107.427,-.

Adapun Faktor pendorong keberhasilan kinerja urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yaitu Program dengan capaian kinerja tertinggi sampai dengan triwulan II adalah Program Penunjang urusan dengan capaian 50,41%, capaian ini didukung dengan perencanaan anggaran yang telah didasarkan tren/kecenderungan pelaksanaan dalam beberapa tahun terakhir dan penempatan anggaran kas yang sesuai.

Faktor penghambat pencapaian kinerja urusan pemerintahan

bidang lingkungan hidup yaitu Beberapa pekerjaan fisik yang bersumber dari Tambahan TKD masuk di awal triwulan II sehingga capaian kinerja dalam tahap persiapan awal dan perencanaan fisik. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya yaitu Mempercepat proses pengadaan dengan penyediaan kelengkapan dokumen pendukung.

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil terdapat sebanyak 3 program, 7 kegiatan dan 14 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp4.651.439.563,-. Realisasi fisik sampai triwulan II sebesar 47,84% dan realisasi keuangan sebesar Rp2.225.462.813,-.

Adapun Faktor pendorong keberhasilan kinerja urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yaitu Masyarakat antusias untuk mengurus dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, semangat aparatur dalam melayani masyarakat, dukungan sarana dan prasarana yang memadai, serta Inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota.

Faktor penghambat pencapaian kinerja urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yaitu Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Pegawai, Team Work Pegawai, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur regulasi dokumen Kependudukan dan ketaatan masyarakat pengguna layanan terhadap aturan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya yaitu Memaksimalkan pelaksanaan program dan mengoptimalkan penyerapan anggaran sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan.

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari sebanyak 4 program, 7 kegiatan dan 19 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp6.401.243.011,-. Realisasi fisik sampai triwulan II sebesar 44,65% dan realisasi keuangan sebesar Rp2.858.353.899,-. Dari 19 sub kegiatan, sebanyak 2 sub kegiatan telah mencapai target, 2 sub kegiatan melampaui target, dan 15 sub kegiatan belum mencapai target yang telah ditetapkan.

G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak terdapat sebanyak 4 program, 10 kegiatan dan 21 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp8.511.862.145,-. Realisasi fisik sampai triwulan II sebesar 36,26% dan realisasi keuangan sebesar Rp3.086.225.720,-. Dari 21 sub kegiatan, sebanyak 3 sub kegiatan telah mencapai target, 1 sub kegiatan melampaui target, dan 17 sub kegiatan belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun Faktor pendorong keberhasilan kinerja urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yaitu Dukungan kebijakan dan komitmen pemerintah daerah, sinergi lintas sektor, ketersediaan SDM dan dukungan anggaran yang memadai.

Faktor penghambat pencapaian kinerja urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yaitu Kompetensi SDM terbatas, Sarana dan Prasarana yang belum memadai, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya yaitu Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan mengoptimalkan penyerapan anggaran.

H. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan terdapat 2 program, 10 kegiatan dan 20 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp16.570.122.625,-. Realisasi fisik sampai triwulan II sebesar 42,76% dan realisasi keuangan sebesar Rp7.085.978.269,-.

Adapun Faktor pendorong keberhasilan kinerja urusan pemerintahan bidang perhubungan yaitu Tersedianya Sumber Daya Manusia yang Memadai.

Faktor penghambat pencapaian kinerja urusan pemerintahan bidang perhubungan yaitu Secara Umum tidak ada penghambat terhadap pelaksanaan kinerja.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya yaitu Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan fisik dan penyerapan anggaran secara maksimal.

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat sebanyak 3 program, 6 kegiatan dan 18 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp7.738.037.665,-. Realisasi fisik sampai triwulan II sebesar 39,54% dan realisasi keuangan sebesar Rp3.059.928.555,-. Dari 18 sub kegiatan, sebanyak 4 sub kegiatan telah mencapai target, 1 sub kegiatan melampaui target, dan 13 sub kegiatan belum mencapai target yang telah ditetapkan.

J. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah terdapat sebanyak 3 program, 6 kegiatan dan 12 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp4.970.283.739,-. Realisasi fisik sampai triwulan II sebesar 45,47% dan realisasi keuangan sebesar Rp2.259.965.678,-. Dari 12 sub kegiatan, sebanyak 1 sub kegiatan melampaui target, dan 11 sub kegiatan belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun Faktor pendorong keberhasilan kinerja urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah yaitu ASN yang Kompeten, Inovatif dan memahami Tupoksi.

Faktor penghambat pencapaian kinerja urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah yaitu Rencana Anggaran kas yang Tidak sama pada setiap Triwulan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya yaitu Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan.

K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat sebanyak 1 program, 4 kegiatan dan 11 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp3.540.116.072,-. Realisasi fisik sampai triwulan II sebesar 46,03% dan realisasi keuangan sebesar Rp1.629.417.331,-. Dari 11 sub kegiatan,

sebanyak 4 sub kegiatan telah mencapai target, 3 sub kegiatan melampaui target, dan 4 sub kegiatan belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun Faktor pendorong keberhasilan kinerja urusan pemerintahan bidang penanaman modal yaitu Tersedianya SDM dan peralatan yang memadai.

Faktor penghambat pencapaian kinerja urusan pemerintahan bidang penanaman modal yaitu tidak tersedianya anggaran untuk program dan kegiatan urusan penanaman modal.

L. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olah Raga terdapat sebanyak 2 program, 7 kegiatan dan 17 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp6.975.376.252,-. Realisasi fisik sampai triwulan II sebesar 41,09% dan realisasi keuangan sebesar Rp2.866.526.865,-. Dari 17 sub kegiatan, sebanyak 8 sub kegiatan telah mencapai target, 3 sub kegiatan melampaui target, dan 4 sub kegiatan belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun Faktor pendorong keberhasilan kinerja urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yaitu Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan.

Faktor penghambat pencapaian kinerja urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yaitu Ada beberapa sub kegiatan yang mengalami pergeseran rekening belanja sehingga pekerjaan belum bisa dimulai.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya yaitu Telah melaksanakan input RKA Pergeseran dan telah menjadi dokumen pelaksanaan anggaran,sehingga kegiatan sudah bisa dilaksanakan.

M. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika terdapat sebanyak 1 program, 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp5.960.000,-. Belum ada realisasi fisik sampai triwulan II. Dari 2 subkegiatan, seluruhnya belum mencapai target yang telah ditetapkan.

N. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika terdapat sebanyak 1 program, 1 kegiatan, dan 1 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp220.000.000,-. Belum ada realisasi fisik sampai triwulan II. Dari 1 sub kegiatan, sub kegiatan tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan.

O. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat sebanyak 2 program, 5 kegiatan, dan 7 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp1.840.000.000,-. Realisasi fisik sampai triwulan II sebesar 0,98% dan realisasi keuangan sebesar Rp18.000.000,-. Dari 7 sub kegiatan, seluruhnya belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Faktor penghambat pencapaian kinerja: Adanya kendala teknis dan administrasi yang memengaruhi percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

Tindak lanjut: Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan yang belum mencapai target, penguatan monitoring dan evaluasi berkala, serta penyelesaian seluruh administrasi dan pelaporan kegiatan

P. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan terdapat 3 program, 10 kegiatan, dan 24 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp4.852.205.259,-. Realisasi fisik sampai triwulan II sebesar 39,83% dan realisasi keuangan sebesar Rp1.932.746.981,-. Dari 24 sub kegiatan, sebanyak 9 sub kegiatan telah mencapai target, dan 15 sub kegiatan belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun faktor pendorong keberhasilan kinerja yaitu: Adanya DPA Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026, KAK, SDM yang memiliki kualifikasi dan keterampilan sesuai di bidang perpustakaan dan kearsipan, pemanfaatan media sosial, website dalam promosi, publikasi dan sosialisasi program dan kegiatan urusan perpustakaan dan kearsipan.

Faktor penghambat pencapaian kinerja: Ketersediaan anggaran kas

Tindak lanjut: Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dengan memperhatikan rencana anggaran dan program prioritas

Q. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan terdapat sebanyak 2 program, 4 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp124.999.600. Realisasi fisik sampai triwulan II sebesar 2,03% dan realisasi keuangan sebesar Rp2.539.500,-. Dari 6 sub kegiatan, seluruhnya belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Faktor penghambat pencapaian kinerja: Ketersediaan anggaran kas

Tindak lanjut: Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dengan memperhatikan rencana anggaran dan program prioritas

III. URUSAN PILIHAN

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perikanan terdapat 4 program, 9 kegiatan dan 19 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp6.564.625.253,-. Realisasi fisik sampai triwulan II sebesar 32,76% dan realisasi keuangan sebesar Rp2.150.322.083,-. Dari 19 sub kegiatan, sebanyak 3 sub kegiatan telah mencapai target, dan 16 sub kegiatan belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun faktor pendorong keberhasilan kinerja yaitu: adanya dukungan dari berbagai pihak baik pegawai dians perikanan, kelompok perikanan dan instansi terkait lainnya.

Faktor penghambat pencapaian kinerja: Karena aliran kas yang disusun di semester 2 untuk pelaksanaan bantuan hibah teknis perikanan. Dana TKD masuk dibulan juni sehingga realisasi keuangan belum ada.

Tindak lanjut: Akan segera mempercepat pelaksanaan kegiatan

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga terdapat 1 program, 1 kegiatan, dan 1 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp294.457.500,-. Realisasi fisik sampai triwulan II sebesar 4,22% dan realisasi keuangan sebesar Rp12.430.100,-. Dari 1 sub kegiatan, sub kegiatan tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan.

Adapun faktor pendorong keberhasilan kinerja yaitu: Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan.

Tindak lanjut: Telah melaksanakan input RKA Pergeseran dan telah

menjadi dokumen pelaksanaan anggaran,sehingga kegiatan sudah bisa dilaksanakan

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdapat 10 program, 22 kegiatan dan 35 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp32.485.207.989,-. Realisasi fisik sampai triwulan II sebesar 21,37% dan realisasi keuangan sebesar Rp6.942.753.219,-. Dari 35 sub kegiatan, sebanyak 1 sub kegiatan melampaui target, dan 34 sub kegiatan belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun faktor pendorong pencapaian kinerja:

1) Potensi wilayah yang sesuai untuk pengembangan pertanian dan peternakan
2) Dukungan masyarakat dan kelembagaan peternak
3) Komitmen pemerintah di berbagai tingkatan
4) SDM aparatur yang kompeten
5) Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan
6) Pemanfaatan teknologi dan inovasi
7) Tersedianya sarana prasarana pelayanan
8) Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

1) Keterbatasan anggaran;
2) Keterbatasan SDM dan sarana prasarana;
3) Ancaman penyakit hewan menular;
4) Rendahnya produktivitas dan kualitas pakan;
5) Belum optimalnya penerapan teknologi dan biosekuriti;
6) Kelembagaan peternak yang masih perlu diperkuat;
7) Perubahan iklim; serta
8) Belum optimalnya tata kelola data dan pemasaran hasil peternakan.

Tindak lanjut:

1) Mempercepat pelaksanaan kegiatan yang realisasi fisik dan keuangannya masih di bawah target melalui penyusunan jadwal pelaksanaan yang lebih rinci dan penguatan pengendalian internal.
2) Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, pemerintah nagari, kelompok peternak, dan instansi vertikal guna mendukung percepatan pelaksanaan program dan kegiatan.

   Mengoptimalkan pelayanan kesehatan hewan melalui peningkatan kegiatan vaksinasi, surveilans, pengobatan, serta pengendalian penyakit hewan menular strategis.
3) Meningkatkan pelayanan reproduksi ternak melalui percepatan pelaksanaan inseminasi buatan (IB), pemeriksaan kebuntingan (PKB), dan penanganan gangguan reproduksi untuk mendukung peningkatan populasi ternak.
4) Memperkuat pembinaan kelompok peternak melalui penyuluhan, pendampingan, dan pelatihan penerapan Good Farming Practices serta pemanfaatan teknologi peternakan.
5) Meningkatkan pengawasan keamanan pangan asal hewan melalui pembinaan unit usaha, pemeriksaan higiene dan sanitasi, serta percepatan pemenuhan persyaratan Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

6) Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana peternakan yang telah tersedia agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
7) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian indikator kinerja, termasuk identifikasi hambatan serta penyusunan langkah percepatan penyelesaian kegiatan.
8) Mengoptimalkan penyerapan anggaran melalui percepatan proses administrasi, pengadaan barang dan jasa, serta penyelesaian dokumen pertanggungjawaban sesuai ketentuan.
9) Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan melalui pemutakhiran data yang akurat, tepat waktu, dan terintegrasi sebagai dasar pengambilan keputusan

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terdapat 3 program, 4 kegiatan, dan 4 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp422.204.000,-. Realisasi fisik sampai triwulan II sebesar 3,64% dan realisasi keuangan sebesar Rp15.355.392,-. Dari 4 sub kegiatan, sebanyak 1 sub kegiatan telah mencapai target, dan 3 sub kegiatan belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun faktor pendorong pencapaian kinerja: ASN yang Kompeten, Inovatif dan memahami Tupoksi

Faktor penghambat pencapaian kinerja: Rencana Anggaran kas yang Tidak sama pada setiap Triwulan

Tindak lanjut: Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terdapat 3 program, 6 kegiatan dan 14 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp4.138.928.110. Realisasi fisik sampai triwulan II sebesar 52,32% dan realisasi keuangan sebesar Rp2.165.291.747,-. Dari 14 sub kegiatan, sebanyak 1 sub kegiatan telah mencapai target, dan 13 sub kegiatan belum mencapai target yang telah ditetapkan.

IV. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

A. SEKRETARIAT DAERAH

Urusan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah terdapat 3 program, 18 kegiatan dan 51 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp40.752.655.943. Realisasi fisik sampai triwulan II sebesar 31,10% dan realisasi keuangan sebesar Rp12.673.159.871,-. Dari 51 sub kegiatan, sebanyak 3 sub kegiatan telah mencapai target, 2 sub kegiatan melampaui target, dan 46 sub kegiatan belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun faktor pendorong pencapaian kinerja: Dukungan, Koordinasi dan kerjasama yang sangat baik dari unit Kerja, Bagian dan Stakeholder terkait pelaksanaan Program dan Kegiatan

Faktor penghambat pencapaian kinerja: Masih ada pegawai yang kurang memahami target kinerja, kurang inisiatif dan tidak mengikuti perkembangan teknologi

Tindak lanjut: Pimpinan Unit Kerja/ Kepala Bagian agar dapat memberikan pembinaan dan pemahaman tentang target kinerja organisasi kepada pegawai/ pelaksana dibawah pengawasannya

B. SEKRETARIAT DPRD

Urusan ini dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD terdapat sebanyak 2 program, 14 kegiatan dan 45 sub kegiatan dengan pagu anggaran

sebesar Rp35.258.556.711,-. Realisasi fisik sampai triwulan II sebesar 47,10% dan realisasi keuangan sebesar Rp16.605.530.236,-. Dari 45 sub kegiatan, sebanyak 11 sub kegiatan telah mencapai target, 4 sub kegiatan melampaui target, dan 30 sub kegiatan belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun faktor pendorong pencapaian kinerja: Keberhasilan kinerja dipengaruhi oleh Pejabat dan Aparatur yang sudah mempunyai kompetensi serta memahami Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing

Faktor penghambat pencapaian kinerja: Kurangnya disiplin pegawai/ Aparatur dalam pencapaian kinerja, kurangnya motivasi pegawai dan lain- lain

Tindak lanjut: Pimpinan Unit Kerja/ Kepala Bagian/ PPTK agar dapat memberikan pembinaan dan memberikan pemahaman tentang target kinerja kepada pegawai

## V. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

### A. PERENCANAAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Penegmbangan Daerah terdapat 3 program, 10 kegiatan dan 29 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp5.204.080.759,-. Realisasi fisik sampai triwulan II sebesar 46,15% dan realisasi keuangan sebesar Rp2.401.633.736,-. Dari 29 sub kegiatan, sebanyak 6 sub kegiatan telah mencapai target, 1 sub kegiatan melampaui target, dan 22 sub kegiatan belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun faktor pendorong pencapaian kinerja:

1) Koordinasi antara Bappelitbangda dengan Perangkat Daerah berjalan dengan cukup baik sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan program, kegiatan, serta penyusunan dokumen perencanaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
2) Komitmen Perangkat Daerah dalam mengikuti tahapan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan bersama Bappelitbangda cukup baik, sehingga proses fasilitasi, pembahasan, dan penyempurnaan dokumen dapat dilaksanakan secara efektif.
3) Tersedianya landasan kebijakan yang jelas melalui Keputusan Bupati dan Rencana Aksi Daerah (RAD), serta adanya komitmen Kepala Daerah dalam mendukung pelaksanaan program prioritas, memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja.

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

1) Dokumen perencanaan daerah, termasuk RKPD, masih dalam proses pembahasan dan belum ditetapkan sampai dengan akhir Triwulan II sehingga beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan masih menyesuaikan dengan proses penetapan dokumen tersebut.
2) Masih terdapat penyempurnaan data dan dokumen dari Perangkat Daerah sehingga proses verifikasi, sinkronisasi, dan finalisasi dokumen perencanaan memerlukan waktu yang lebih panjang.
3) Dinamika pelaksanaan kegiatan serta koordinasi lintas Perangkat Daerah menyebabkan penyesuaian jadwal pelaksanaan dan penyampaian data sehingga memengaruhi percepatan pencapaian target kinerja.
4) Keterbatasan anggaran, ruang lingkup kewenangan, serta

kompetensi sumber daya manusia pada beberapa bidang masih menjadi kendala dalam mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan.

5) Pelaksanaan beberapa kegiatan masih bergantung pada kebijakan dan persetujuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi sehingga penyelesaian target kinerja belum dapat dilakukan secara optimal.

Tindak lanjut:

1) Meningkatkan intensitas koordinasi dan konsultasi antara Bappelitbangda dengan Perangkat Daerah untuk mempercepat penyelesaian tahapan penyusunan, penetapan, serta pelaksanaan dokumen perencanaan daerah.
2) Melakukan percepatan pengumpulan, verifikasi, dan sinkronisasi data serta dokumen pendukung dari Perangkat Daerah agar proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
3) Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian program dan kegiatan untuk mengidentifikasi kendala serta melakukan langkah-langkah percepatan penyelesaian target kinerja.
4) Memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan instansi terkait dalam rangka mempercepat penyelesaian kegiatan yang masih bergantung pada kebijakan atau persetujuan dari pihak eksternal.
5) Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran, kewenangan, dan sumber daya manusia yang tersedia serta meningkatkan kapasitas aparatur melalui pendampingan dan berbagi pengetahuan sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

B. KEUANGAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terdapat 4 program, 13 kegiatan dan 71 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp189.841.269.727,-. Realisasi fisik sampai triwulan II sebesar 349,74% dan realisasi keuangan sebesar Rp663.953.638.051,-. Dari 71 sub kegiatan, sebanyak 8 sub kegiatan telah mencapai target, 1 sub kegiatan melampaui target, dan 62 sub kegiatan belum mencapai target yang telah ditetapkan.

C. KEPEGAWAIAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdapat 2 program, 9 kegiatan dan 20 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp5.580.815.429,-. Realisasi fisik sampai triwulan II sebesar 45,65% dan realisasi keuangan sebesar Rp2.547.670.093,-. Dari 20 sub kegiatan, sebanyak 9 sub kegiatan telah mencapai target, dan 11 sub kegiatan belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun faktor pendorong pencapaian kinerja: Sumber Daya Aparatur yang Kompeten

Faktor penghambat pencapaian kinerja: Kurangnya dukungan Anggaran

Tindak Lanjut: Agar dapat menyusun rencana penambahan anggaran

D. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdapat 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar

Rp1.078.025.000,-. Realisasi fisik sampai triwulan II 5,98% dan realisasi keuangan sebesar Rp64.486.803,-. Dari 1 sub kegiatan, sub kegiatan tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan.
Adapun faktor pendorong pencapaian kinerja: Sumber Daya Aparatur yang Kompeten
Tindak Lanjut: Agar dapat menyusun rencana penambahan anggaran

E. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah terdapat 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp13.973.050,-. Realisasi fisik sampai triwulan II sebesar 26,43% dan realisasi keuangan sebesar Rp3.693.000,-. Dari 1 sub kegiatan, seluruhnya belum mencapai target yang telah ditetapkan.
Faktor penghambat pencapaian kinerja:

1) Dinamika pelaksanaan kegiatan serta koordinasi lintas Perangkat Daerah menyebabkan penyesuaian jadwal pelaksanaan dan penyampaian data sehingga memengaruhi percepatan pencapaian target kinerja.
2) Keterbatasan anggaran, ruang lingkup kewenangan, serta kompetensi sumber daya manusia pada beberapa bidang masih menjadi kendala dalam mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan.

Tindak lanjut:

1) Meningkatkan intensitas koordinasi dan konsultasi antara Bappelitbangda dengan Perangkat Daerah
2) Melakukan percepatan pengumpulan, verifikasi, dan sinkronisasi data serta dokumen pendukung dari Perangkat Daerah agar proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
3) Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian program dan kegiatan untuk mengidentifikasi kendala serta melakukan langkah-langkah percepatan penyelesaian target kinerja.
4) Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran, kewenangan, dan sumber daya manusia yang tersedia serta meningkatkan kapasitas aparatur melalui pendampingan dan berbagi pengetahuan sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

## VI. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

### A. INSPEKTORAT DAERAH

Urusan ini dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah terdapat 3 program, 11 kegiatan dan 49 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp13.096.320.729,-. Realisasi fisik sampai triwulan II sebesar 41,68% dan realisasi keuangan sebesar Rp5.458.685.040,-. Dari 49 sub kegiatan, sebanyak 11 sub kegiatan telah mencapai target, 1 sub kegiatan melampaui target, dan 37 sub kegiatan belum mencapai target yang telah ditetapkan.
Adapun faktor pendorong pencapaian kinerja:

1) Ketersediaan sumber daya yang memadai,
2) Komitmen dalam mencapai target kinerja setiap Personil
3) Dukungan dari Pimpinan Daerah atas Program/Kegiatan yang direncanakan

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

1) Belum maksimalnya komitmen Perangkat Daerah dalam penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan/pengawasan
2) Belum maksimal kompetensi personil APIP dibidang tertentu
3) Sarana Pra Sarana belum memadai

Tindak Lanjut:

1) Memaksimal komitmen Perangkat Daerah dalam penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan/pengawasan dengan melakukan monitoring tindak lanjut
2) Memaksimalkan kompetensi personil APIP dibidang tertentu melalui diklat, bimtek, dan workshop
3) Melengkapi Sarana Pra Sarana dengan mempercepat pengadaan yang telah dianggarkan

## VII. UNSUR KEWILAYAHAN

### A. KECAMATAN

Urusan ini dilaksanakan oleh 13 Kecamatan terdapat sebanyak 46 program, 108 kegiatan dan 197 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp22.975.076.891,-. Realisasi fisik sampai triwulan II sebesar 44,41% dan realisasi keuangan sebesar Rp10.202.843.992. Dari 197 sub kegiatan, sebanyak 24 sub kegiatan telah mencapai target, 10 sub kegiatan melampaui target, dan 163 sub kegiatan belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun faktor pendorong pencapaian kinerja: Motivasi kerja, disiplin, lingkungan kerja yang suportif, kepemimpinan yang efektif ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai

Faktor penghambat pencapaian kinerja: Keterbatasan Anggaran, sarana dan prasarana yag kurang memadai,

Displin pegawai yang rendah.

Tindak Lanjut: Untuk pelaksanaan kegiatan agar ada menambahan anggran pada sub kegiatan yang ada, tersedianya sarana dan prasarana serta meningkatkan disiplin terhadap pegawai.

## VIII. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

### A. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat 6 program, 10 kegiatan dan 22 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp5.095.028.026,-. Realisasi fisik sampai triwulan II sebesar 32,60% dan realisasi keuangan sebesar Rp1.661.172.734,-. Dari 22 sub kegiatan, sebanyak 2 sub kegiatan telah mencapai target, 1 sub kegiatan melampaui target, dan 19 sub kegiatan belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun faktor pendorong pencapaian kinerja: Motivasi kerja: Faktor Internal (Manajemen dan Apratur) Faktor Exsterbal (Operasional dan Sosial)

Faktor penghambat: Keterbatasan Alokasi Anggaran, Dinamika Sosial Politik yang bergejolak, Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Kompoten

Tindak lanjut: Pencapaian Realisasi Anggaran

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan II terhadap pelaksanaan kegiatan pada urusan wajib pelayanan dasar, urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan, Unsur Pemerintahan Umum

pada 43 perangkat daerah dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi rendah yang disebabkan oleh aliran kas pada Triwulan II lebih difokuskan pada belanja wajib mengikat seperti gaji, air, listrik dan telepon dan belum mengakomodir untuk belanja pada kegiatan perangkat daerah.
2. Beberapa Perangkat Daerah yang telah mencapai realisasi fisik 25% merupakan belanja-belanja yang terdapat pada wajib mengikat sehingga yang baru terealisasi merupakan kegiatan wajib Perangkat Daerah.

Tabel 2.6

**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | **3.340.051.157.300** | | **558.400.987.049** | | **535.523.122.649** | | **84.387.154.022** | **0,00** | **15,76** | | **84.387.154.022** | **0,00** | **2,53** | | |
| **1.** | **1.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **1.646.950.185.085** | | **466.173.894.679** | | **464.712.141.899** | | **84.387.154.022** | **0,00** | **18,16** | | **84.387.154.022** | **0,00** | **5,12** | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%) | 100 | | 98,96 | | 100 | | 18,32 | | 18,32 | | 18,32 | | 18,32 | | | |
| 2. | 1.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 918.514.669 | | 14.253.000 | | 15.020.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 1.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 213.967.796 | | 5.280.000 | | 5.660.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4. | 1.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 103.211.500 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 5. | 1.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 103.211.500 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 6. | 1.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 103.211.500 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 7. | 1.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 103.211.500 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 8. | 1.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 172.421.871 | | 2.875.000 | | 3.350.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 9. | 1.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 119.279.002 | | 6.098.000 | | 6.010.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 10. | 1.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 1.617.712.617.276 | | 465.946.528.012 | | 464.244.981.799 | | 84.381.925.022 | 0,00 | 18,18 | | 84.381.925.022 | 0,00 | 5,22 | | |
| | | Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | 1.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 1.617.403.353.499 | | 465.941.994.012 | | 464.238.985.799 | | 84.381.925.022 | 0,00 | 18,18 | | 84.381.925.022 | 0,00 | 5,22 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 4400 | | 4.300 | | 4300 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 12. | 1.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 190.765.856 | | 4.534.000 | | 5.996.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 13. | 1.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | 118.497.921 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 14. | 1.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 886.635.232 | | 4.843.000 | | 16.350.000 | | 5.229.000 | 0,00 | 31,98 | | 5.229.000 | 0,00 | 0,59 | | |
| | | Terlaksananya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | 1.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 886.635.232 | | 4.843.000 | | 16.350.000 | | 5.229.000 | 0,00 | 31,98 | | 5.229.000 | 0,00 | 0,59 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 16. | 1.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 4.741.152.881 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | 1.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 1.830.697.141 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 18. | 1.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 1.191.268.141 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 45 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 19. | 1.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 1.719.187.599 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 200 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 20. | 1.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 8.371.685.224 | | 30.941.000 | | 118.935.100 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | 1.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 535.968.761 | | 6.901.000 | | 8.205.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 22. | 1.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 2.982.233.054 | | 24.040.000 | | 62.601.400 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 23. | 1.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 1.901.053.899 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 24. | 1.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | - | | - | | 1.167.700 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 25. | 1.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | 1.728.694.069 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 26. | 1.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 1.223.735.441 | | - | | 46.961.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 27. | 1.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 6.222.848.029 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | 1.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 1.824.051.316 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 29. | 1.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 928.021.339 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 30. | 1.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 344.985.903 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 31. | 1.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 619.848.208 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 32. | 1.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 508.398.985 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 33. | 1.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 691.985.903 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 34. | 1.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 1.305.556.375 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 35. | 1.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.960.256.627 | | 161.168.667 | | 191.905.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | 1.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 87.535.724 | | 2.480.000 | | 2.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 37. | 1.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 437.977.013 | | 122.688.667 | | 147.240.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 38. | 1.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 219.848.208 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 39. | 1.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 1.214.895.682 | | 36.000.000 | | 42.165.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 40. | 1.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 6.136.475.147 | | 16.161.000 | | 124.950.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpenuhinya Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41. | 1.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 587.588.945 | | 16.161.000 | | 45.050.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 42. | 1.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 1.360.496.238 | | - | | 60.650.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 43. | 1.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 1.783.775.269 | | - | | 9.350.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 44. | 1.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 468.753.984 | | - | | 9.900.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 45. | 1.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 1.150.216.900 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 46. | 1.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 426.493.339 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 47. | 1.01.01.2.09.0012 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | | | 359.150.472 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **48.** | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **1.688.699.528.315** | | **92.208.995.370** | | **70.748.761.750** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah | Persentase anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar (%) | 90,94 | | 86 | | 89,33 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%) | 89,53 | | 49,01 | | 70,82 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Persentase anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%) | 82,98 | | 75 | | 80,67 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Persentase anak usia usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%) | 100 | | 81,54 | | 97,5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 49. | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | 822.886.677.081 | | 54.965.862.537 | | 39.907.835.700 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50. | 1.01.02.2.01.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | 26.743.875.362 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) | 15 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 51. | 1.01.02.2.01.0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | 32.603.334.162 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 52. | 1.01.02.2.01.0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | 57.342.026.093 | | 3.558.607.400 | | 750.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) | 39 | | 39 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 53. | 1.01.02.2.01.0009 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | 20.533.689.966 | | 209.774.276 | | 500.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 4 | | 4 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 54. | 1.01.02.2.01.0010 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | 19.821.833.788 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 55. | 1.01.02.2.01.0011 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | 22.682.333.913 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 56. | 1.01.02.2.01.0014 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | 52.905.873.117 | | 2.155.799.595 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Mebel Sekolah yang Tersedia | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket) | 5 | | 5 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 57. | 1.01.02.2.01.0016 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | 16.818.297.392 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 58. | 1.01.02.2.01.0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | 8.615.003.114 | | 243.689.949 | | 298.210.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) | 380 | | 270 | | 373 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 59. | 1.01.02.2.01.0026 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | 3.138.123.335 | | 180.003.403 | | 226.449.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang) | 13 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 60. | 1.01.02.2.01.0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | 4.655.040.954 | | 721.694.910 | | 262.828.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) | 450 | | 428 | | 450 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 61. | 1.01.02.2.01.0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | 9.292.133.259 | | 355.840.200 | | 299.293.900 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan) | 380 | | 336 | | 373 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 62. | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | 195.416.875.488 | | 36.470.546.111 | | 34.504.350.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 380 | | 370 | | 373 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 63. | 1.01.02.2.01.0030 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | 2.550.730.614 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang) | 380 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 64. | 1.01.02.2.01.0031 | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | | | 53.746.155.472 | | 1.170.227.940 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun | Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang) | 7 | | 7 | | 7 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 65. | 1.01.02.2.01.0032 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar | | | 35.770.188.207 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 66. | 1.01.02.2.01.0035 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | 3.225.332.376 | | 53.485.000 | | 50.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang) | 380 | | 364 | | 373 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 67. | 1.01.02.2.01.0036 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | 2.977.959.419 | | 9.836.000 | | 31.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 68. | 1.01.02.2.01.0037 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | 2.915.332.376 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | 380 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 69. | 1.01.02.2.01.0038 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | 9.200.552.369 | | 213.930.800 | | 198.305.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 70. | 1.01.02.2.01.0039 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | 1.990.697.102 | | 8.178.000 | | 50.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 71. | 1.01.02.2.01.0041 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | 1.460.632.579 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 72. | 1.01.02.2.01.0042 | Penyediaan infrastruktur TIK | | | 16.752.992.385 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya infrastruktur TIK | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 73. | 1.01.02.2.01.0043 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | 1.490.714.517 | | 47.356.000 | | 50.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) | 3 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 74. | 1.01.02.2.01.0046 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | 3.140.642.852 | | 61.982.400 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 75. | 1.01.02.2.01.0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | 54.509.659.516 | | 2.208.632.995 | | 150.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Ruang Kelas Baru bertambah | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) | 8 | | 8 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 76. | 1.01.02.2.01.0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | 47.746.974.519 | | - | | 500.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 77. | 1.01.02.2.01.0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | 4.698.861.706 | | - | | 36.900.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan) | 380 | | 0 | | 373 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 78. | 1.01.02.2.01.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | 75.843.245.024 | | 5.295.247.741 | | 1.999.999.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 35 | | 32 | | 35 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 79. | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | 4.026.943.108 | | 9.325.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) | 500 | | 75 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 80. | 1.01.02.2.01.0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | 30.270.622.997 | | 1.991.704.817 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket) | 25 | | 25 | | 25 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 81. | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | 496.385.288.103 | | 22.849.875.458 | | 19.099.467.250 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82. | 1.01.02.2.02.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | 22.641.334.597 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 83. | 1.01.02.2.02.0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | 24.340.476.732 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Perpustakaan Sekolah yang Terbangun | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 84. | 1.01.02.2.02.0006 | Pembangunan Laboratorium | | | 32.640.476.732 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Ruang Laboratorium yang Terbangun | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 85. | 1.01.02.2.02.0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | 32.536.689.366 | | 809.941.948 | | 300.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) | 14 | | 14 | | 14 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 86. | 1.01.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | 22.039.335.182 | | 1.386.440.122 | | 1.000.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 14 | | 14 | | 14 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 87. | 1.01.02.2.02.0016 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | 12.400.819.828 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 88. | 1.01.02.2.02.0017 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | 16.005.145.924 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 89. | 1.01.02.2.02.0018 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | | | 15.160.692.101 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 90. | 1.01.02.2.02.0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | 41.600.783.371 | | 866.886.360 | | 200.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) | 7 | | 7 | | 7 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 91. | 1.01.02.2.02.0025 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | 48.870.020.656 | | 1.988.500.087 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Mebel Sekolah yang Tersedia | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket) | 6 | | 6 | | 6 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 92. | 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | 2.718.740.157 | | 43.145.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) | 100 | | 360 | | 500 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 93. | 1.01.02.2.02.0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | 9.779.576.922 | | 347.163.813 | | 179.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) | 67 | | 76 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 94. | 1.01.02.2.02.0039 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | 1.974.723.772 | | 9.900.000 | | 40.014.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang) | 10 | | 4 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 95. | 1.01.02.2.02.0040 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | 3.351.323.613 | | 222.259.480 | | 131.744.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) | 250 | | 239 | | 250 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 96. | 1.01.02.2.02.0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | 4.658.693.937 | | 128.878.000 | | 260.845.250 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan) | 66 | | 39 | | 61 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 97. | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | 89.381.521.502 | | 16.870.418.716 | | 16.691.170.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 66 | | 61 | | 61 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 98. | 1.01.02.2.02.0043 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | 1.261.632.579 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang) | 66 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 99. | 1.01.02.2.02.0048 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | 3.255.199.424 | | 21.342.000 | | 30.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang) | 66 | | 30 | | 51 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 100. | 1.01.02.2.02.0049 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | 1.387.732.662 | | 9.916.000 | | 35.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 101. | 1.01.02.2.02.0050 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | 2.979.336.870 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | 66 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 102. | 1.01.02.2.02.0051 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | 7.438.215.329 | | 118.468.932 | | 161.880.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 103. | 1.01.02.2.02.0052 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | 1.763.028.601 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 104. | 1.01.02.2.02.0054 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | 1.001.632.579 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 105. | 1.01.02.2.02.0055 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | 1.439.732.126 | | 26.615.000 | | 32.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) | 3 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 106. | 1.01.02.2.02.0058 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | 4.661.524.687 | | - | | 36.814.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan) | 66 | | 0 | | 61 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 107. | 1.01.02.2.02.0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | 29.991.764.720 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Ruang Kelas Baru Bertambah | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 108. | 1.01.02.2.02.0062 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | 2.911.152.068 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 109. | 1.01.02.2.02.0064 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | 24.193.359.627 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 110. | 1.01.02.2.02.0067 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | 24.847.630.054 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket) | 25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 111. | 1.01.02.2.02.0068 | Penyediaan infrastruktur TIK | | | 9.152.992.385 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya infrastruktur TIK | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 112. | 1.01.02.2.03 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | 195.407.194.484 | | 8.831.979.519 | | 6.530.480.100 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113. | 1.01.02.2.03.0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | | 18.821.664.301 | | 102.920.879 | | 197.484.100 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit) | 4 | | 4 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 114. | 1.01.02.2.03.0007 | Pengadaan Mebel PAUD | | | 16.575.997.132 | | 147.630.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Mebel PAUD yang Tersedia | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 115. | 1.01.02.2.03.0009 | Pengadaan Perlengkapan PAUD | | | 12.543.246.876 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Perlengkapan PAUD yang Tersedia | Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 116. | 1.01.02.2.03.0011 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | | | 1.767.862.587 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) | 500 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 117. | 1.01.02.2.03.0015 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | | | 1.261.632.579 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 118. | 1.01.02.2.03.0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | | | 3.941.041.201 | | 124.803.339 | | 144.039.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) | 90 | | 86 | | 90 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 119. | 1.01.02.2.03.0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | | | 2.782.041.991 | | 52.778.939 | | 50.945.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan) | 301 | | 86 | | 90 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 120. | 1.01.02.2.03.0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | 28.870.018.707 | | 5.412.230.058 | | 5.133.600.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan) | 301 | | 295 | | 296 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 121. | 1.01.02.2.03.0019 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | 2.123.486.004 | | 32.114.000 | | 85.045.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang) | 301 | | 63 | | 65 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 122. | 1.01.02.2.03.0022 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | 2.800.647.431 | | 30.832.000 | | 18.107.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang) | 301 | | 100 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 123. | 1.01.02.2.03.0023 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | 1.544.465.271 | | 9.785.000 | | 16.222.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 124. | 1.01.02.2.03.0025 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | 2.303.808.234 | | 21.102.705 | | 44.662.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 125. | 1.01.02.2.03.0026 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | 1.857.162.753 | | 9.765.000 | | 28.732.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 126. | 1.01.02.2.03.0028 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | 19.171.176.308 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 127. | 1.01.02.2.03.0030 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | 28.800.821.984 | | 381.576.515 | | 217.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Ruang Kelas Baru bertambah | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) | 4 | | 4 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 128. | 1.01.02.2.03.0034 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik | | | 1.271.514.877 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik) | 50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 129. | 1.01.02.2.03.0037 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | 1.949.756.121 | | 24.980.000 | | 43.235.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) | 3 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 130. | 1.01.02.2.03.0038 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula | | | 5.026.263.033 | | - | | 235.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 131. | 1.01.02.2.03.0041 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | 2.787.216.078 | | 116.184.934 | | 54.590.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) | 50 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 132. | 1.01.02.2.03.0046 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD | | | 18.182.561.681 | | 1.567.020.140 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 133. | 1.01.02.2.03.0047 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | | | 3.733.625.639 | | 334.122.699 | | 261.317.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya Proses Belajar PAUD | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan) | 301 | | 280 | | 296 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 134. | 1.01.02.2.03.0049 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | 8.847.920.440 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi sedang/berat | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 135. | 1.01.02.2.03.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | 8.443.263.256 | | 464.133.311 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 6 | | 6 | | 6 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 136. | 1.01.02.2.04 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | 174.020.368.647 | | 5.561.277.856 | | 5.210.978.700 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137. | 1.01.02.2.04.0010 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan | | | 2.191.939.236 | | 15.300.000 | | 9.360.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik | Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) | 500 | | 900 | | 900 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 138. | 1.01.02.2.04.0014 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | 1.445.100.477 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang) | 13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 139. | 1.01.02.2.04.0015 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | 1.589.171.040 | | 22.195.000 | | 32.707.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) | 30 | | 17 | | 30 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 140. | 1.01.02.2.04.0016 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | 3.291.819.317 | | 115.233.757 | | 270.236.700 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan) | 42 | | 26 | | 38 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 141. | 1.01.02.2.04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | 27.000.674.588 | | 5.013.665.099 | | 4.633.300.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan) | 42 | | 38 | | 38 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 142. | 1.01.02.2.04.0018 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | 1.159.988.435 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang) | 42 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 143. | 1.01.02.2.04.0024 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | 2.875.332.376 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang) | 42 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 144. | 1.01.02.2.04.0025 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | 2.906.459.419 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 145. | 1.01.02.2.04.0027 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | 2.100.471.547 | | 40.369.000 | | 22.750.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 146. | 1.01.02.2.04.0028 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | 1.289.384.580 | | 9.330.000 | | 10.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 147. | 1.01.02.2.04.0031 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | 918.645.299 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 148. | 1.01.02.2.04.0035 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik | | | 875.780.655 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 149. | 1.01.02.2.04.0036 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | 2.603.567.304 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 150. | 1.01.02.2.04.0039 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | 27.410.341.417 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Ruang Kelas Baru bertambah | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 151. | 1.01.02.2.04.0040 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | 14.134.166.925 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 152. | 1.01.02.2.04.0041 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | 15.386.379.392 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 153. | 1.01.02.2.04.0042 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | 3.292.610.647 | | 107.201.000 | | 167.625.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | 120 | | 115 | | 120 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 154. | 1.01.02.2.04.0046 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | 3.817.906.117 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik) | 38 | | 0 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 155. | 1.01.02.2.04.0048 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | 14.620.070.864 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 156. | 1.01.02.2.04.0052 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal | | | 5.247.317.028 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 157. | 1.01.02.2.04.0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan | | | 16.967.701.574 | | 237.984.000 | | 65.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 158. | 1.01.02.2.04.0061 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | 22.895.540.410 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **159.** | **1.01.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | | | **1.684.202.726** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan | Persentase Satuan Pendidikan dasar yang mengembangkan kurikulum muatan lokal (%) | 100 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mengembangkan kurikulum muatan lokal (%) | 80 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Persentase Satuan Pendidikan Non Formal yang mengembangkan kurikulum muatan lokal (%) | 80 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 160. | 1.01.03.2.01 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | 1.436.836.843 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya penetapan kurikulum muatan lokal pada Satuan Pendidikan dasar | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 161. | 1.01.03.2.01.0004 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | 822.101.366 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkat Kompetensinya | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya (Orang) | 446 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 162. | 1.01.03.2.01.0007 | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | 614.735.477 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 163. | 1.01.03.2.02 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | | | 247.365.883 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164. | 1.01.03.2.02.0006 | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | | | 247.365.883 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **165.** | **1.01.04** | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | | | **1.033.038.448** | | **18.097.000** | | **62.219.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan | Indeks Distribusi Guru (Indeks) | 0,77 | | 0,7 | | 0,66 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik (%) | 82,17 | | 57,2 | | 62,75 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 166. | 1.01.04.2.01 | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | 1.033.038.448 | | 18.097.000 | | 62.219.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 167. | 1.01.04.2.01.0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | 732.061.513 | | 18.097.000 | | 62.219.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 168. | 1.01.04.2.01.0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | 300.976.935 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **169.** | **1.01.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN** | | | **1.684.202.726** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan | Persentase Usulan izin satuan pendidikan dasar yang diterbitkan/diperbaharui (%) | 100 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Persentase Usulan izin satuan pendidikan anak usia dini yang diterbitkan/diperbaharui (%) | 100 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Persentase Usulan izin satuan pendidikan kesetaraan yang diterbitkan/diperbaharui (%) | 100 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 170. | 1.01.05.2.01 | Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | 1.061.047.722 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 171. | 1.01.05.2.01.0001 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | 555.786.904 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 172. | 1.01.05.2.01.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | 505.260.818 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 173. | 1.01.05.2.02 | Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | 623.155.004 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 174. | 1.01.05.2.02.0001 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | 286.314.462 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 175. | 1.01.05.2.02.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | 176.841.285 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 176. | 1.01.05.2.02.0003 | Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | 159.999.257 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | **1.435.010.186.427** | | **268.516.730.297** | | **241.119.170.728** | | **26.404.577.497** | **2,12** | **10,95** | | **26.404.577.497** | **0,07** | **1,84** | | |
| **177.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **341.106.182.757** | | **68.374.365.596** | | **63.527.336.905** | | **12.933.005.263** | **0,00** | **20,36** | | **12.933.005.263** | **0,00** | **3,79** | BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%) | 100 | | 99,99 | | 100 | | 20,36 | | 20,36 | | 20,36 | | 20,36 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 178. | 1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 130.662.658.257 | | 26.143.603.914 | | 27.925.827.905 | | 6.906.744.518 | 0,00 | 24,73 | | 6.906.744.518 | 0,00 | 5,29 | | |
| | | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 179. | 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 130.662.658.257 | | 26.143.603.914 | | 27.925.827.905 | | 6.906.744.518 | 0,00 | 24,73 | | 6.906.744.518 | 0,00 | 5,29 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 395 | | 300 | | 360 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 180. | 1.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 2.860.654.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181. | 1.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 2.860.654.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 1740 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 182. | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 4.468.956.500 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183. | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 1.653.365.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 48 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 184. | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 1.192.468.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 96 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 185. | 1.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 20.850.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 186. | 1.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 161.518.500 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 650 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 187. | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 1.440.755.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 700 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 188. | 1.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 750.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189. | 1.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 750.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 190. | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.408.564.000 | | 599.353.105 | | 601.509.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 191. | 1.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 32.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 48 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 192. | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 4.258.590.000 | | 599.353.105 | | 601.509.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 156 | | 12 | | 36 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 193. | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 117.974.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 275 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 194. | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 955.350.000 | | 103.510.075 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195. | 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 955.350.000 | | 103.510.075 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 5 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 196. | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | 197.000.000.000 | | 41.527.898.502 | | 35.000.000.000 | | 6.026.260.745 | 0,00 | 17,22 | | 6.026.260.745 | 0,00 | 3,06 | | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 197. | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | 197.000.000.000 | | 41.527.898.502 | | 35.000.000.000 | | 6.026.260.745 | 0,00 | 17,22 | | 6.026.260.745 | 0,00 | 3,06 | | |
| | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **198.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **105.607.108.920** | | **8.827.963.692** | | **1.558.118.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat | Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (%) | 96,67 | | 97,66 | | 94 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 199. | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | 101.882.108.920 | | 8.477.088.692 | | 1.138.118.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200. | 1.02.02.2.01.0003 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | 23.229.065.480 | | 4.744.403.108 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit) | 15 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 201. | 1.02.02.2.01.0008 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | | | 17.434.131.440 | | 2.770.582.585 | | 1.038.118.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit) | 20 | | 4 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 202. | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | 16.000.000.000 | | 962.102.999 | | 100.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit) | 50 | | 2 | | 28 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 203. | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | 1.745.826.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit) | 1258 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 204. | 1.02.02.2.01.0022 | Pengembangan Rumah Sakit | | | 9.000.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 205. | 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | 34.473.086.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket) | 192 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 206. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.725.000.000 | | 350.875.000 | | 420.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 207. | 1.02.02.2.02.0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | 1.725.000.000 | | 350.875.000 | | 420.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 208. | 1.02.02.2.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.000.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 209. | 1.02.02.2.04.0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | 2.000.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **210.** | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | **3.265.540.000** | | **382.850.000** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS | |
| | | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase) | 95 | | 100 | | 91 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 211. | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 3.265.540.000 | | 382.850.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212. | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | 3.265.540.000 | | 382.850.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 305 | | 61 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **213.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **380.212.500.000** | | **108.938.016.283** | | **116.117.615.976** | | **10.514.066.953** | **6,67** | **9,05** | | **10.514.066.953** | **0,00** | **2,77** | DINAS KESEHATAN | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%) | 500 | | 100 | | 100 | | 25 | | 25,00 | | 25 | | 5,00 | | | |
| 214. | 1.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 759.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215. | 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 759.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 6 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 216. | 1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 375.158.500.000 | | 84.488.288.132 | | 88.291.470.976 | | 7.727.769.805 | 0,00 | 8,75 | | 7.727.769.805 | 0,00 | 2,06 | | |
| | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 217. | 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 374.638.500.000 | | 84.488.288.132 | | 88.226.470.976 | | 7.727.769.805 | 0,00 | 8,76 | | 7.727.769.805 | 0,00 | 2,06 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 900 | | 900 | | 1000 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 218. | 1.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 310.000.000 | | - | | 35.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 219. | 1.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 210.000.000 | | - | | 30.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 220. | 1.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | - | | - | | 25.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221. | 1.02.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | - | | - | | 25.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 222. | 1.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 235.000.000 | | 57.168.100 | | 88.330.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223. | 1.02.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | 235.000.000 | | 57.168.100 | | 88.330.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 224. | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 505.000.000 | | 42.476.731 | | 43.589.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Laporan Kunjungan Tamu Fasilitasi | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 225. | 1.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 70.000.000 | | 10.787.834 | | 10.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | | 6 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 226. | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 435.000.000 | | 31.688.897 | | 33.589.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 227. | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.907.500.000 | | 257.096.266 | | 259.800.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 228. | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 867.500.000 | | 173.636.266 | | 187.800.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 6 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 229. | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 1.040.000.000 | | 83.460.000 | | 72.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 6 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 230. | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.647.500.000 | | 111.538.982 | | 138.426.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | JumlahKendaraanPeroranganDinas atauKendaraanDinasJabatanyang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 231. | 1.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 475.000.000 | | 42.949.933 | | 39.190.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 2 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | umlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 232. | 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 162.500.000 | | 47.817.129 | | 76.100.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 4 | | 4 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233. | 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 450.000.000 | | 10.390.000 | | 9.540.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 50 | | 8 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 234. | 1.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 560.000.000 | | 10.381.920 | | 13.596.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 235. | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | - | | 23.981.448.072 | | 27.271.000.000 | | 2.786.297.148 | 100,00 | 10,22 | | 2.786.297.148 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 236. | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | - | | 23.981.448.072 | | 27.271.000.000 | | 2.786.297.148 | 100,00 | 10,22 | | 2.786.297.148 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 0 | | 22 | | 22 | | 22 | | 100,00 | | 22 | | 0,00 | | | |
| **237.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **399.340.378.779** | | **44.984.620.202** | | **56.880.568.747** | | **-** | **1,57** | **0,00** | | **-** | **0,30** | **0,00** | DINAS KESEHATAN | |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat | Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%) | 1,4 | | 1,9 | | 1,4 | | 0,86 | | 138,57 | | 0,86 | | 138,57 | | | |
| | | | Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%) | 8 | | 9,25 | | 11,4 | | 5,94 | | 147,89 | | 5,94 | | 125,75 | | | |
| | | | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%) | 75,5 | | 68,1 | | 63,4 | | 68 | | 107,26 | | 68 | | 90,07 | | | |
| | | | Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%) | 23,4 | | 14,45 | | 23,4 | | 1,69 | | 192,78 | | 1,69 | | 192,78 | | | |
| | | | Cakupan penemuan kasus TB (%) | 60 | | 46,65 | | 45 | | 9,9 | | 22,00 | | 9,9 | | 16,50 | | | |
| | | | Persentase Pemenuhan Sumber Daya Rumah Sakit sesuai standar (%) | 74 | | 100 | | 70 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%) | 24,5 | | 21,5 | | 22,5 | | 7,59 | | 33,73 | | 7,59 | | 30,98 | | | |
| | | | Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%) | 85,49 | | 83,39 | | 83,81 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Presentase lanjut usia yang mandiri (%) | 95 | | 96,6 | | 91 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target (%) | 92,5 | | 100 | | 90,5 | | 27,23 | | 30,09 | | 27,23 | | 29,44 | | | |
| | | | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%) | 85 | | 9,09 | | 59,1 | | 98,4 | | 166,50 | | 98,4 | | 115,76 | | | |
| | | | Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100,00 | | 100 | | 100,00 | | | |
| | | | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 85 | | 9,09 | | 59,1 | | 9,09 | | 15,38 | | 9,09 | | 10,69 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Persentase Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target (%) | 72 | | 0 | | 70,3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%) | 50,4 | | 53,7 | | 48,5 | | 7,47 | | 15,40 | | 7,47 | | 14,82 | | | |
| 238. | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | 182.306.870.166 | | 13.836.780.532 | | 8.257.135.437 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase RS Pemerintah Daerah dan Puskesmas yang memenuhi ketersediaan Sarana, Prasarana,dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 239. | 1.02.02.2.01.0001 | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | | | 12.500.000.000 | | 325.826.200 | | 2.542.789.557 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 240. | 1.02.02.2.01.0006 | Pengembangan Puskesmas | | | 3.050.000.000 | | 3.398.932.619 | | 157.372.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit) | 6 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 241. | 1.02.02.2.01.0007 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | 110.335.910.848 | | 8.436.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 242. | 1.02.02.2.01.0008 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | | | 1.500.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 243. | 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | | | 3.450.000.000 | | 385.980.660 | | 380.709.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit) | 6 | | 16 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 244. | 1.02.02.2.01.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | 875.000.000 | | 2.213.098.329 | | 300.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit) | 2 | | 3 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 245. | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | 9.560.000.000 | | 697.096.249 | | 112.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit) | 12 | | 16 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 246. | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | 2.225.000.000 | | 191.912.012 | | 755.871.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit) | 23 | | 22 | | 22 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 247. | 1.02.02.2.01.0022 | Pengembangan Rumah Sakit | | | 2.000.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 248. | 1.02.02.2.01.0024 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | | | 600.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga) | 1000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Terpenuhinya obat, BMHP dan vaksin program tepat waktu dan jumlah tepat | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 249. | 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | 34.286.669.318 | | 6.373.985.407 | | 3.706.749.380 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket) | 24 | | 22 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 250. | 1.02.02.2.01.0026 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | | | 1.924.290.000 | | 241.513.056 | | 301.644.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket) | 24 | | 8 | | 22 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 251. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 214.113.508.613 | | 30.672.068.270 | | 48.193.019.310 | | - | 2,11 | 0,00 | | - | 0,40 | 0,00 | | |
| | | tercapainya standa pelayanan minimal bidang kesehatan | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 252. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 1.350.000.000 | | 169.416.850 | | 1.062.580.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 629 | | 615 | | 1230 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 253. | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | 900.000.000 | | 73.267.000 | | 64.450.000 | | - | 2,78 | 0,00 | | - | 0,55 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 3101 | | 612 | | 612 | | 17 | | 2,78 | | 17 | | 0,55 | | | |
| 254. | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | 955.000.000 | | 12.335.000 | | 969.604.800 | | - | 2,97 | 0,00 | | - | 0,54 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 3170 | | 573 | | 573 | | 17 | | 2,97 | | 17 | | 0,54 | | | |
| 255. | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | 1.020.000.000 | | 81.215.300 | | 95.000.000 | | - | 11,14 | 0,00 | | - | 2,05 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 14601 | | 2.694 | | 2694 | | 300 | | 11,14 | | 300 | | 2,05 | | | |
| 256. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 915.000.000 | | 124.600.730 | | 810.830.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 7532 | | 7.883 | | 15766 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 257. | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | 2.350.000.000 | | 123.913.200 | | 350.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 108080 | | 20.978 | | 20978 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 258. | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | 695.000.000 | | 34.160.000 | | 65.000.000 | | - | 23,71 | 0,00 | | - | 4,36 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 10957 | | 2.016 | | 2016 | | 478 | | 23,71 | | 478 | | 4,36 | | | |
| 259. | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | 1.500.000.000 | | 35.900.000 | | 150.000.000 | | - | 5,90 | 0,00 | | - | 1,14 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 16080 | | 3.121 | | 3121 | | 184 | | 5,90 | | 184 | | 1,14 | | | |
| 260. | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | 2.050.000.000 | | 120.653.818 | | 350.000.000 | | - | 7,66 | 0,00 | | - | 1,53 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2092 | | 418 | | 418 | | 32 | | 7,66 | | 32 | | 1,53 | | | |
| 261. | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | 1.175.000.000 | | 32.130.000 | | 263.600.000 | | - | 13,24 | 0,00 | | - | 5,29 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 340 | | 68 | | 136 | | 18 | | 13,24 | | 18 | | 5,29 | | | |
| 262. | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 8.246.561.200 | | 48.206.000 | | 1.710.597.000 | | - | 0,96 | 0,00 | | - | 0,38 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 5727 | | 1.149 | | 2298 | | 22 | | 0,96 | | 22 | | 0,38 | | | |
| 263. | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | 1.100.000.000 | | 84.034.000 | | 275.100.000 | | - | 5,62 | 0,00 | | - | 1,12 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 3653 | | 730 | | 730 | | 41 | | 5,62 | | 41 | | 1,12 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 264. | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | 200.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 265. | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 5.216.414.928 | | 105.558.000 | | 3.728.490.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | | 3 | | 34 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 266. | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | 650.000.000 | | 27.535.250 | | 40.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 1 | | 1 | | 23 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 267. | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 1.130.000.000 | | 73.121.375 | | 749.357.190 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 1 | | 3 | | 23 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 268. | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | 1.325.000.000 | | 379.314.250 | | 115.104.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 269. | 1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | | | 375.000.000 | | 2.860.000 | | 25.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 270. | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | 792.500.000 | | 48.490.000 | | 258.855.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 23 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 271. | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | 400.000.000 | | 15.130.500 | | 169.726.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 200 | | 932 | | 3877 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 272. | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | 2.010.000.000 | | 16.400.000 | | 142.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 55 | | 7 | | 102391 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 273. | 1.02.02.2.02.0024 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | | | 695.000.000 | | 4.765.000 | | 95.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 274. | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 7.959.065.600 | | 320.718.000 | | 876.379.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 1 | | 1 | | 23 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 275. | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | 147.626.466.885 | | 27.002.770.225 | | 30.940.845.600 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 276. | 1.02.02.2.02.0027 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | | | 1.550.000.000 | | 7.900.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Orang) | 89942 | | 215 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 277. | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | 1.615.000.000 | | 8.595.000 | | 319.520.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket) | 100 | | 10 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 278. | 1.02.02.2.02.0029 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | | | 670.000.000 | | 148.394.195 | | 40.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 279. | 1.02.02.2.02.0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | 1.500.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 280. | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 2.550.000.000 | | 345.155.957 | | 2.429.960.300 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 1 | | 1 | | 23 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 281. | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | 840.000.000 | | - | | 40.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) | 2 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 282. | 1.02.02.2.02.0035 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | | | 525.000.000 | | 7.866.458 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit) | 22 | | 22 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 283. | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | 475.000.000 | | 31.310.803 | | 134.317.200 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 284. | 1.02.02.2.02.0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | | 175.000.000 | | 7.505.000 | | 42.650.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 285. | 1.02.02.2.02.0038 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | | | 7.700.000.000 | | 903.718.489 | | 916.526.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 286. | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | 1.650.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 555 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 287. | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | 132.500.000 | | - | | 56.193.620 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 80 | | 0 | | 3772 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 288. | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | 135.000.000 | | - | | 35.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 1 | | 0 | | 23 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 289. | 1.02.02.2.02.0045 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota | | | 1.000.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 290. | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | 1.845.000.000 | | 275.127.870 | | 131.132.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 1 | | 1 | | 23 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 291. | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | 200.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 22 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 292. | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | 315.000.000 | | - | | 740.200.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 1 | | 0 | | 22 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 293. | 1.02.02.2.02.0050 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | | | 600.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 294. | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | | | 1.210.000.000 | | 169.664.400 | | 245.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 295. | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | 1.210.000.000 | | 169.664.400 | | 245.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 296. | 1.02.02.2.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.710.000.000 | | 306.107.000 | | 185.414.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan | Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297. | 1.02.02.2.04.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | | | 1.020.000.000 | | 301.842.000 | | 20.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya | Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit) | 2 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 298. | 1.02.02.2.04.0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | 690.000.000 | | 4.265.000 | | 165.414.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit) | 22 | | 22 | | 22 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **299.** | **1.02.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | | | **3.687.060.000** | | **821.377.813** | | **1.450.222.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS KESEHATAN | |
| | | Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan | Persentase fasilitas kesehatan yang terpenuhi named dan nakes sesuai standar (%) | 100 | | 26,52 | | 90 | | 81,81 | | 90,90 | | 81,81 | | 81,81 | | | |
| 300. | 1.02.03.2.01 | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | | | 730.000.000 | | 15.611.000 | | 28.590.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase puskesmas yang terpenuhi jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301. | 1.02.03.2.01.0001 | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | | | 365.000.000 | | 15.611.000 | | 28.590.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 302. | 1.02.03.2.01.0002 | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | | | 365.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 303. | 1.02.03.2.02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | | | 1.963.500.000 | | 377.999.715 | | 361.588.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase perenanaan kebutuhan named dan nakes di tingkat kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 304. | 1.02.03.2.02.0001 | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | 356.000.000 | | 84.986.220 | | 55.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 305. | 1.02.03.2.02.0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | | | 750.000.000 | | 293.013.495 | | 50.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang) | 425 | | 425 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 306. | 1.02.03.2.02.0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | 857.500.000 | | - | | 256.588.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 307. | 1.02.03.2.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 993.560.000 | | 427.767.098 | | 1.060.044.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 308. | 1.02.03.2.03.0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 993.560.000 | | 427.767.098 | | 1.060.044.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang) | 40 | | 4 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **309.** | **1.02.04** | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | | | **2.152.392.971** | | **416.022.122** | | **365.133.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS KESEHATAN | |
| | | Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman | Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%) | 65 | | 50 | | 55 | | 50 | | 90,91 | | 50 | | 76,92 | | | |
| | | | Persentase apotek dan toko obat yang mampu memenuhi persyaratan perizinan (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100,00 | | 100 | | 100,00 | | | |
| | | | Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRTP sesuai standar (%) | 70 | | 59,8 | | 64 | | 50 | | 78,13 | | 50 | | 71,43 | | | |
| | | | Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (%) | 100 | | 85 | | 88 | | 100 | | 113,64 | | 100 | | 100,00 | | | |
| | | | Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu (%) | 70 | | 96 | | 64 | | 60 | | 93,75 | | 60 | | 85,71 | | | |
| 310. | 1.02.04.2.01 | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | 666.278.971 | | 81.695.000 | | 122.036.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek,Toko Obat,Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 311. | 1.02.04.2.01.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | 666.278.971 | | 81.695.000 | | 122.036.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 312. | 1.02.04.2.03 | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | | 347.100.000 | | 159.836.284 | | 160.392.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 313. | 1.02.04.2.03.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | | 347.100.000 | | 159.836.284 | | 160.392.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 314. | 1.02.04.2.06 | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | | | 1.139.014.000 | | 174.490.838 | | 82.705.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 315. | 1.02.04.2.06.0001 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | | | 1.139.014.000 | | 174.490.838 | | 82.705.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit) | 35 | | 25 | | 25 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **316.** | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | **1.105.320.000** | | **147.875.000** | | **1.220.176.100** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS KESEHATAN | |
| | | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase) | 100 | | 45 | | 100 | | 2,47 | | 2,47 | | 2,47 | | 2,47 | | | |
| 317. | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 226.655.000 | | 54.635.000 | | 480.148.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 318. | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | 226.655.000 | | 54.635.000 | | 480.148.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 217 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 319. | 1.02.05.2.02 | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 449.295.000 | | 93.240.000 | | 199.040.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 320. | 1.02.05.2.02.0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | - | | 68.765.000 | | 118.015.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen) | 0 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 321. | 1.02.05.2.02.0002 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | 449.295.000 | | 24.475.000 | | 81.025.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat (Keluarga) | 50 | | 250 | | 250 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 322. | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 429.370.000 | | - | | 540.988.100 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 323. | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | 429.370.000 | | - | | 540.988.100 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 1 | | 0 | | 23 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **324.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **5.925.000.000** | | **1.119.021.737** | | **-** | | **128.929.845** | **0,00** | **0,00** | | **128.929.845** | **0,00** | **2,18** | Puskesmas Taram | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 325. | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | 5.925.000.000 | | 1.119.021.737 | | - | | 128.929.845 | 0,00 | 0,00 | | 128.929.845 | 0,00 | 2,18 | | |
| | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 326. | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | 5.925.000.000 | | 1.119.021.737 | | - | | 128.929.845 | 0,00 | 0,00 | | 128.929.845 | 0,00 | 2,18 | | |
| | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **327.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **2.140.110.000** | | **455.060.832** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | Puskesmas Taram | |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 328. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.140.110.000 | | 455.060.832 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase pencapaian SPM bidang kesehatan | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 329. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 127.395.000 | | 31.410.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 25 | | 17 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 330. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 123.500.000 | | 32.850.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1157 | | 242 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 331. | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | 32.400.000 | | 6.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 4 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 332. | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 135.000.000 | | 34.500.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 154 | | 32 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 333. | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 675.000.000 | | 75.510.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 334. | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | 26.450.000 | | 4.650.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 335. | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 44.965.000 | | 17.100.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 336. | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | 11.850.000 | | 1.500.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 337. | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | 15.250.000 | | 1.050.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 40 | | 40 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 338. | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 225.000.000 | | 49.931.250 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 339. | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 350.000.000 | | 108.909.582 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 340. | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | 1.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 38 | | 20 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 341. | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | 40.500.000 | | 7.500.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 342. | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | 10.300.000 | | 450.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 343. | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | 141.000.000 | | 34.200.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 344. | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | 180.000.000 | | 49.500.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **345.** | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | **30.500.000** | | **10.095.000** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | Puskesmas Taram | |
| | | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 346. | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 30.500.000 | | 10.095.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 347. | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | 30.500.000 | | 10.095.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **348.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **6.000.000.000** | | **964.131.492** | | **-** | | **107.748.285** | **0,00** | **0,00** | | **107.748.285** | **0,00** | **1,80** | Puskesmas Suliki | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 349. | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | 6.000.000.000 | | 964.131.492 | | - | | 107.748.285 | 0,00 | 0,00 | | 107.748.285 | 0,00 | 1,80 | | |
| | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 350. | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | 6.000.000.000 | | 964.131.492 | | - | | 107.748.285 | 0,00 | 0,00 | | 107.748.285 | 0,00 | 1,80 | | |
| | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **351.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **2.747.350.000** | | **561.272.826** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | Puskesmas Suliki | |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 352. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.747.350.000 | | 561.272.826 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 353. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 325.000.000 | | 90.845.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 155 | | 22 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 354. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 120.000.000 | | 23.325.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1240 | | 260 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 355. | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | 85.050.000 | | 16.200.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 10 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 356. | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 29.100.000 | | 5.550.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 200 | | 40 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 357. | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 925.000.000 | | 156.004.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 358. | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | 126.450.000 | | 10.875.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 359. | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 59.500.000 | | 11.700.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 360. | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | 11.850.000 | | 10.350.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 361. | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | 13.600.000 | | 900.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 287 | | 196 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 362. | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 270.000.000 | | 59.282.200 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 363. | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 490.000.000 | | 104.116.626 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 364. | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | 1.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 32 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 365. | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | 40.500.000 | | 18.500.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 366. | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | 8.000.000 | | 675.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 367. | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | 61.800.000 | | 10.800.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 368. | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | 180.000.000 | | 42.150.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| **369.** | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | **24.100.000** | | **4.165.000** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | Puskesmas Suliki | |
| | | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 370. | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 24.100.000 | | 4.165.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 371. | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | 24.100.000 | | 4.165.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **372.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **6.850.000.000** | | **1.189.444.592** | | **-** | | **157.491.120** | **0,00** | **0,00** | | **157.491.120** | **0,00** | **2,30** | Puskesmas Situjuh | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 373. | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | 6.850.000.000 | | 1.189.444.592 | | - | | 157.491.120 | 0,00 | 0,00 | | 157.491.120 | 0,00 | 2,30 | | |
| | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 374. | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | 6.850.000.000 | | 1.189.444.592 | | - | | 157.491.120 | 0,00 | 0,00 | | 157.491.120 | 0,00 | 2,30 | | |
| | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **375.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **2.797.650.000** | | **528.871.000** | | **-** | | **18.250.000** | **0,00** | **0,00** | | **18.250.000** | **0,50** | **0,65** | Puskesmas Situjuh | |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,50 | | | |
| 376. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.797.650.000 | | 528.871.000 | | - | | 18.250.000 | 0,00 | 0,00 | | 18.250.000 | 0,50 | 0,65 | | |
| | | Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 377. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 260.000.000 | | 54.000.000 | | - | | 3.600.000 | 0,00 | 0,00 | | 3.600.000 | 1,46 | 1,38 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 205 | | 35 | | 0 | | 3 | | 0,00 | | 3 | | 1,46 | | | |
| 378. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 199.500.000 | | 54.675.000 | | - | | 400.000 | 0,00 | 0,00 | | 400.000 | 0,00 | 0,20 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2100 | | 434 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 379. | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | 32.400.000 | | 5.850.000 | | - | | 200.000 | 0,00 | 0,00 | | 200.000 | 5,00 | 0,62 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 20 | | 4 | | 0 | | 1 | | 0,00 | | 1 | | 5,00 | | | |
| 380. | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 65.000.000 | | 12.600.000 | | - | | 800.000 | 0,00 | 0,00 | | 800.000 | 1,59 | 1,23 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 315 | | 65 | | 0 | | 5 | | 0,00 | | 5 | | 1,59 | | | |
| 381. | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 675.000.000 | | 111.920.000 | | - | | 400.000 | 0,00 | 0,00 | | 400.000 | 0,00 | 0,06 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 382. | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | 135.300.000 | | 14.475.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 383. | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 121.850.000 | | 12.150.000 | | - | | 1.400.000 | 0,00 | 0,00 | | 1.400.000 | 0,00 | 1,15 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 384. | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | 25.000.000 | | 2.550.000 | | - | | 2.200.000 | 0,00 | 0,00 | | 2.200.000 | 0,00 | 8,80 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 385. | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | 19.700.000 | | 3.300.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 406 | | 252 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 386. | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 275.000.000 | | 56.755.000 | | - | | 450.000 | 0,00 | 0,00 | | 450.000 | 0,00 | 0,16 | | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 387. | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 510.000.000 | | 106.771.000 | | - | | 2.400.000 | 0,00 | 0,00 | | 2.400.000 | 0,00 | 0,47 | | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 388. | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | 2.250.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 46 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 389. | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | 90.550.000 | | 17.550.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 390. | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | 11.500.000 | | 1.500.000 | | - | | 400.000 | 0,00 | 0,00 | | 400.000 | 0,00 | 3,48 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 391. | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | 69.600.000 | | 12.600.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 392. | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | 305.000.000 | | 62.175.000 | | - | | 6.000.000 | 0,00 | 0,00 | | 6.000.000 | 0,00 | 1,97 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **393.** | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | **31.500.000** | | **4.580.000** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | Puskesmas Situjuh | |
| | | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 394. | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 31.500.000 | | 4.580.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 395. | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | 31.500.000 | | 4.580.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **396.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **1.773.500.000** | | **327.218.869** | | **-** | | **38.151.171** | **0,00** | **0,00** | | **38.151.171** | **0,00** | **2,15** | Puskesmas Rimbo Data | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 397. | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | 1.773.500.000 | | 327.218.869 | | - | | 38.151.171 | 0,00 | 0,00 | | 38.151.171 | 0,00 | 2,15 | | |
| | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 398. | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | 1.773.500.000 | | 327.218.869 | | - | | 38.151.171 | 0,00 | 0,00 | | 38.151.171 | 0,00 | 2,15 | | |
| | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **399.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **2.467.800.000** | | **553.118.376** | | **-** | | **31.096.535** | **0,00** | **0,00** | | **31.096.535** | **0,00** | **1,26** | Puskesmas Rimbo Data | |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 400. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.467.800.000 | | 553.118.376 | | - | | 31.096.535 | 0,00 | 0,00 | | 31.096.535 | 0,00 | 1,26 | | |
| | | Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 150.000.000 | | 37.800.000 | | - | | 31.096.535 | 0,00 | 0,00 | | 31.096.535 | 0,00 | 20,73 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 18 | | 6 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 402. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 30.800.000 | | 5.400.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 450 | | 92 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 403. | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | 20.600.000 | | 3.300.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 5 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 404. | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 73.450.000 | | 13.800.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 50 | | 12 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 405. | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 800.000.000 | | 196.330.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 406. | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | 21.450.000 | | 4.050.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 407. | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 47.500.000 | | 9.150.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 408. | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | 40.700.000 | | 26.700.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 409. | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | 5.700.000 | | 300.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 329 | | 42 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 410. | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 265.000.000 | | 50.025.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 411. | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 610.000.000 | | 140.493.376 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 412. | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | 950.000 | | 150.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 9 | | 11 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 413. | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | 203.000.000 | | 52.870.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 414. | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | 2.850.000 | | 150.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 415. | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | 67.600.000 | | 12.600.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 416. | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | 128.200.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **417.** | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | **24.040.000** | | **300.000** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | Puskesmas Rimbo Data | |
| | | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 418. | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 24.040.000 | | 300.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 419. | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | 24.040.000 | | 300.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **420.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **2.820.000.000** | | **524.689.897** | | **-** | | **67.282.333** | **0,00** | **0,00** | | **67.282.333** | **0,00** | **2,39** | Puskesmas Baruh Gunuang | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 421. | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | 2.820.000.000 | | 524.689.897 | | - | | 67.282.333 | 0,00 | 0,00 | | 67.282.333 | 0,00 | 2,39 | | |
| | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 422. | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | 2.820.000.000 | | 524.689.897 | | - | | 67.282.333 | 0,00 | 0,00 | | 67.282.333 | 0,00 | 2,39 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **423.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **2.427.650.000** | | **396.747.696** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | Puskesmas Baruh Gunuang | |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 424. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.427.650.000 | | 396.747.696 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 425. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 166.000.000 | | 29.145.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 75 | | 9 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 426. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 159.500.000 | | 26.400.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 496 | | 94 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 427. | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | 75.025.000 | | 14.625.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 5 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 428. | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 42.650.000 | | 7.200.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 368 | | 76 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 429. | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 625.000.000 | | 101.718.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 430. | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | 25.950.000 | | 4.350.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 431. | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 39.550.000 | | 7.650.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 432. | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | 21.050.000 | | 2.250.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 433. | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | 47.700.000 | | 8.700.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 584 | | 87 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 434. | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 328.000.000 | | 39.330.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 435. | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 575.000.000 | | 116.484.696 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 436. | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | 7.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 437. | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | 135.600.000 | | 10.920.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 438. | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | 8.125.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 439. | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | 53.000.000 | | 9.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 440. | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | 118.000.000 | | 18.975.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **441.** | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | **50.719.000** | | **9.117.000** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | Puskesmas Baruh Gunuang | |
| | | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 442. | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 50.719.000 | | 9.117.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443. | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | 50.719.000 | | 9.117.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **444.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **7.734.000.000** | | **1.395.305.539** | | **-** | | **167.789.333** | **0,00** | **0,00** | | **167.789.333** | **0,00** | **2,17** | Puskesmas Pangkalan | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 445. | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | 7.734.000.000 | | 1.395.305.539 | | - | | 167.789.333 | 0,00 | 0,00 | | 167.789.333 | 0,00 | 2,17 | | |
| | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 446. | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | 7.734.000.000 | | 1.395.305.539 | | - | | 167.789.333 | 0,00 | 0,00 | | 167.789.333 | 0,00 | 2,17 | | |
| | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **447.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **2.710.700.000** | | **584.942.935** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | Puskesmas Pangkalan | |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 448. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.710.700.000 | | 584.942.935 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 449. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 171.000.000 | | 34.650.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 115 | | 17 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 450. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 138.080.000 | | 28.050.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2444 | | 498 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 451. | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | 114.000.000 | | 17.850.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 25 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 452. | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 93.450.000 | | 17.700.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 374 | | 76 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 453. | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 675.000.000 | | 156.236.418 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 454. | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | 20.500.000 | | 3.750.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 455. | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 26.200.000 | | 4.650.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 456. | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | 15.550.000 | | 3.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 457. | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | 45.100.000 | | 4.800.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 359 | | 223 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 458. | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 375.000.000 | | 91.215.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 459. | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 615.000.000 | | 122.691.517 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 460. | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | 1.200.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 461. | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | 115.420.000 | | 16.650.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 462. | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | 4.200.000 | | 600.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 463. | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | 110.000.000 | | 34.200.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 464. | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | 191.000.000 | | 48.900.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| **465.** | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | **28.700.000** | | **6.500.000** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | Puskesmas Pangkalan | |
| | | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 466. | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 28.700.000 | | 6.500.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 467. | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | 28.700.000 | | 6.500.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **468.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **3.135.000.000** | | **558.932.837** | | **-** | | **261.019.006** | **0,00** | **0,00** | | **261.019.006** | **0,00** | **8,33** | Puskesmas Banja Loweh | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 469. | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | 3.135.000.000 | | 558.932.837 | | - | | 261.019.006 | 0,00 | 0,00 | | 261.019.006 | 0,00 | 8,33 | | |
| | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 470. | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | 3.135.000.000 | | 558.932.837 | | - | | 261.019.006 | 0,00 | 0,00 | | 261.019.006 | 0,00 | 8,33 | | |
| | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **471.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **2.513.700.000** | | **495.236.160** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | Puskesmas Banja Loweh | |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 472. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.513.700.000 | | 495.236.160 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 473. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 163.000.000 | | 34.200.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 128 | | 19 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 474. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 151.500.000 | | 41.400.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 209 | | 221 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 475. | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | 33.500.000 | | 4.050.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 10 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 476. | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 53.000.000 | | 10.200.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 169 | | 35 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 477. | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 625.000.000 | | 100.588.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 478. | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | 44.150.000 | | 7.650.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 479. | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 72.800.000 | | 14.400.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 480. | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | 58.600.000 | | 3.525.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 481. | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | 29.700.000 | | 4.350.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 114 | | 71 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 482. | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 275.000.000 | | 58.200.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 483. | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 650.000.000 | | 145.598.160 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 484. | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | 1.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 485. | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | 108.000.000 | | 26.150.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 486. | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | 10.350.000 | | 225.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 487. | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | 111.600.000 | | 21.600.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 488. | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | 126.000.000 | | 23.100.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **489.** | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | **39.342.000** | | **4.342.000** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | Puskesmas Banja Loweh | |
| | | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 490. | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 39.342.000 | | 4.342.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 491. | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | 39.342.000 | | 4.342.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **492.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **11.050.000.000** | | **1.862.044.597** | | **-** | | **214.142.447** | **0,00** | **0,00** | | **214.142.447** | **0,00** | **1,94** | Puskesmas Tanjung Pati | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 493. | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | 11.050.000.000 | | 1.862.044.597 | | - | | 214.142.447 | 0,00 | 0,00 | | 214.142.447 | 0,00 | 1,94 | | |
| | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 494. | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | 11.050.000.000 | | 1.862.044.597 | | - | | 214.142.447 | 0,00 | 0,00 | | 214.142.447 | 0,00 | 1,94 | | |
| | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **495.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **3.039.016.000** | | **615.264.606** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | Puskesmas Tanjung Pati | |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 496. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 3.039.016.000 | | 615.264.606 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 497. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 341.000.000 | | 66.420.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 240 | | 42 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 498. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 250.000.000 | | 60.675.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2855 | | 589 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 499. | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | 60.200.000 | | 6.850.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 27 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 500. | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 57.239.000 | | 9.450.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 390 | | 78 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 501. | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 745.000.000 | | 167.500.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 502. | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | 50.950.000 | | 9.675.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 503. | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 68.200.000 | | 12.300.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 504. | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | 38.000.000 | | 8.100.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 505. | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | 45.600.000 | | 5.700.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 672 | | 417 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 506. | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 425.000.000 | | 95.520.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 507. | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 630.000.000 | | 124.199.606 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 508. | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | 2.924.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 91 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 509. | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | 82.928.000 | | 4.650.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 510. | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | 18.375.000 | | 1.575.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 511. | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | 69.600.000 | | 12.500.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 512. | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | 154.000.000 | | 30.150.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **513.** | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | **28.030.000** | | **5.094.000** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | Puskesmas Tanjung Pati | |
| | | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 514. | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 28.030.000 | | 5.094.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 515. | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | 28.030.000 | | 5.094.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **516.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **10.215.000.000** | | **1.840.255.670** | | **-** | | **232.521.496** | **0,00** | **0,00** | | **232.521.496** | **0,00** | **2,28** | Puskesmas Mungo | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 517. | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | 10.215.000.000 | | 1.840.255.670 | | - | | 232.521.496 | 0,00 | 0,00 | | 232.521.496 | 0,00 | 2,28 | | |
| | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 518. | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | 10.215.000.000 | | 1.840.255.670 | | - | | 232.521.496 | 0,00 | 0,00 | | 232.521.496 | 0,00 | 2,28 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **519.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **2.731.925.000** | | **551.520.459** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | Puskesmas Mungo | |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 520. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.731.925.000 | | 551.520.459 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 521. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 299.000.000 | | 56.050.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 135 | | 21 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 522. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 123.500.000 | | 28.575.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1885 | | 389 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 523. | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | 38.000.000 | | 7.200.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 10 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 524. | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 100.000.000 | | 21.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 194 | | 40 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 525. | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 725.000.000 | | 113.352.500 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 526. | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | 71.500.000 | | 14.100.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 527. | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 45.500.000 | | 9.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 528. | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | 73.750.000 | | 17.250.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 529. | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | 61.000.000 | | 10.050.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 511 | | 317 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 530. | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 225.000.000 | | 53.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 531. | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 575.000.000 | | 122.442.959 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 532. | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | 4.500.000 | | 900.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 58 | | 65 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 533. | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | 53.050.000 | | 8.975.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 534. | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | 8.125.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 535. | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | 124.000.000 | | 39.600.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 536. | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | 205.000.000 | | 50.025.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **537.** | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | **47.985.000** | | **8.735.500** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | Puskesmas Mungo | |
| | | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 538. | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 47.985.000 | | 8.735.500 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 539. | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | 47.985.000 | | 8.735.500 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **540.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **8.355.000.000** | | **1.482.342.899** | | **-** | | **167.598.198** | **0,00** | **0,00** | | **167.598.198** | **0,00** | **2,01** | Puskesmas Pakan Rabaa | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 541. | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | 8.355.000.000 | | 1.482.342.899 | | - | | 167.598.198 | 0,00 | 0,00 | | 167.598.198 | 0,00 | 2,01 | | |
| | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 542. | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | 8.355.000.000 | | 1.482.342.899 | | - | | 167.598.198 | 0,00 | 0,00 | | 167.598.198 | 0,00 | 2,01 | | |
| | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **543.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **2.589.950.000** | | **602.047.373** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | Puskesmas Pakan Rabaa | |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 544. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.589.950.000 | | 602.047.373 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 545. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 173.500.000 | | 40.800.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 280 | | 50 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 546. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 181.500.000 | | 63.300.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 3030 | | 624 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 547. | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | 47.000.000 | | 9.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 25 | | 55 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 548. | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 100.400.000 | | 18.300.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 469 | | 95 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 549. | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 675.000.000 | | 178.950.500 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 550. | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | 82.550.000 | | 16.350.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 551. | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 80.300.000 | | 15.900.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 552. | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | 15.550.000 | | 750.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 553. | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | 25.200.000 | | 4.800.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 430 | | 267 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 554. | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 225.000.000 | | 52.385.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 555. | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 555.000.000 | | 109.561.873 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 556. | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | 3.750.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 48 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 557. | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | 47.100.000 | | 8.100.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 558. | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | 7.900.000 | | 900.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 559. | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | 40.200.000 | | 7.200.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 560. | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | 330.000.000 | | 75.750.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| **561.** | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | **25.990.000** | | **3.640.000** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | Puskesmas Pakan Rabaa | |
| | | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 562. | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 25.990.000 | | 3.640.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 563. | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | 25.990.000 | | 3.640.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **564.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **5.925.000.000** | | **651.949.049** | | **-** | | **77.695.058** | **0,00** | **0,00** | | **77.695.058** | **0,00** | **1,31** | Puskesmas Piladang | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 565. | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | 5.925.000.000 | | 651.949.049 | | - | | 77.695.058 | 0,00 | 0,00 | | 77.695.058 | 0,00 | 1,31 | | |
| | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 566. | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | 5.925.000.000 | | 651.949.049 | | - | | 77.695.058 | 0,00 | 0,00 | | 77.695.058 | 0,00 | 1,31 | | |
| | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **567.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **2.109.730.000** | | **503.899.388** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | Puskesmas Piladang | |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 568. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.109.730.000 | | 503.899.388 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 569. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 167.395.000 | | 26.400.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 136 | | 20 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 570. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 143.500.000 | | 29.550.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 850 | | 150 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 571. | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | 82.000.000 | | 18.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 5 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 572. | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 88.500.000 | | 23.100.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 63 | | 13 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 573. | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 575.000.000 | | 113.429.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 574. | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | 20.425.000 | | 3.825.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 575. | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 23.200.000 | | 4.500.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 576. | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | 17.750.000 | | 4.950.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 577. | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | 50.150.000 | | 8.700.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 193 | | 120 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 578. | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 325.000.000 | | 61.946.800 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 579. | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 325.000.000 | | 151.988.588 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 580. | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | 1.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 22 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 581. | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | 53.960.000 | | 9.960.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 582. | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | 11.250.000 | | 450.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 583. | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | 68.600.000 | | 12.600.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 584. | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | 156.500.000 | | 34.500.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **585.** | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | **26.780.000** | | **4.530.000** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | Puskesmas Piladang | |
| | | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 586. | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 26.780.000 | | 4.530.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 587. | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | 26.780.000 | | 4.530.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **588.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **6.945.000.000** | | **1.157.809.111** | | **-** | | **111.004.880** | **0,00** | **0,00** | | **111.004.880** | **0,00** | **1,60** | Puskesmas Batu Hampar | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 589. | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | 6.945.000.000 | | 1.157.809.111 | | - | | 111.004.880 | 0,00 | 0,00 | | 111.004.880 | 0,00 | 1,60 | | |
| | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 590. | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | 6.945.000.000 | | 1.157.809.111 | | - | | 111.004.880 | 0,00 | 0,00 | | 111.004.880 | 0,00 | 1,60 | | |
| | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **591.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **2.463.300.000** | | **413.717.999** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | Puskesmas Batu Hampar | |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 592. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.463.300.000 | | 413.717.999 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 593. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 194.000.000 | | 25.130.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 133 | | 26 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 594. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 133.000.000 | | 18.375.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1690 | | 348 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 595. | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | 72.500.000 | | 13.500.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 15 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 596. | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 50.000.000 | | 8.025.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 240 | | 48 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 597. | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 675.000.000 | | 138.433.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 598. | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | 44.500.000 | | 5.400.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 599. | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 37.450.000 | | 7.200.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 600. | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | 11.150.000 | | 1.800.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 601. | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | 24.100.000 | | 3.900.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 314 | | 195 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 602. | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 400.000.000 | | 37.050.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 603. | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 445.000.000 | | 82.154.999 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 604. | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | 1.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 35 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 605. | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | 53.600.000 | | 7.950.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 606. | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | 8.300.000 | | 300.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 607. | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | 85.200.000 | | 14.400.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 608. | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | 228.000.000 | | 50.100.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **609.** | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | **36.930.000** | | **4.439.600** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | Puskesmas Batu Hampar | |
| | | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 610. | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 36.930.000 | | 4.439.600 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 611. | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | 36.930.000 | | 4.439.600 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **612.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **4.850.000.000** | | **828.286.307** | | **-** | | **107.360.094** | **0,00** | **0,00** | | **107.360.094** | **0,00** | **2,21** | Puskesmas Halaban | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 613. | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | 4.850.000.000 | | 828.286.307 | | - | | 107.360.094 | 0,00 | 0,00 | | 107.360.094 | 0,00 | 2,21 | | |
| | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 614. | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | 4.850.000.000 | | 828.286.307 | | - | | 107.360.094 | 0,00 | 0,00 | | 107.360.094 | 0,00 | 2,21 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **615.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **2.567.725.000** | | **448.204.913** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | Puskesmas Halaban | |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 616. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.567.725.000 | | 448.204.913 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 617. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 196.500.000 | | 46.800.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 150 | | 28 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 618. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 125.000.000 | | 18.750.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1665 | | 343 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 619. | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | 75.450.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 15 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 620. | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 137.000.000 | | 17.100.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 253 | | 51 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 621. | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 650.000.000 | | 119.237.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 622. | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | 42.450.000 | | 7.425.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 623. | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 90.800.000 | | 14.550.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 624. | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | 25.200.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 625. | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | 24.100.000 | | 450.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 271 | | 168 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 626. | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 325.000.000 | | 48.599.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 627. | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 485.000.000 | | 116.718.913 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 628. | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | 2.250.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 31 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 629. | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | 53.375.000 | | 5.625.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 630. | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | 12.600.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 631. | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | 118.000.000 | | 7.200.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 632. | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | 205.000.000 | | 45.750.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **633.** | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | **34.930.000** | | **8.065.000** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | Puskesmas Halaban | |
| | | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 634. | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 34.930.000 | | 8.065.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 635. | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | 34.930.000 | | 8.065.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **636.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **6.990.000.000** | | **1.353.085.548** | | **-** | | **43.374.895** | **0,00** | **0,00** | | **43.374.895** | **0,00** | **0,62** | Puskesmas Muaro Paiti | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 637. | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | 6.990.000.000 | | 1.353.085.548 | | - | | 43.374.895 | 0,00 | 0,00 | | 43.374.895 | 0,00 | 0,62 | | |
| | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 638. | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | 6.990.000.000 | | 1.353.085.548 | | - | | 43.374.895 | 0,00 | 0,00 | | 43.374.895 | 0,00 | 0,62 | | |
| | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **639.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **3.135.289.000** | | **642.699.306** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | Puskesmas Muaro Paiti | |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 640. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 3.135.289.000 | | 642.699.306 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 641. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 231.000.000 | | 48.690.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 105 | | 19 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 642. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 223.000.000 | | 52.875.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1010 | | 208 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 643. | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | 63.100.000 | | 8.100.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 10 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 644. | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 192.200.000 | | 37.200.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 171 | | 35 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 645. | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 800.000.000 | | 179.402.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 646. | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | 118.000.000 | | 21.300.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 647. | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 96.400.000 | | 19.200.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 648. | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | 40.800.000 | | 6.750.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 649. | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | 126.000.000 | | 28.800.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 314 | | 195 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 650. | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 315.000.000 | | 59.925.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 651. | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 575.000.000 | | 124.207.306 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 652. | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | 6.009.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 653. | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | 58.140.000 | | 11.100.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 654. | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | 28.240.000 | | 900.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 655. | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | 82.400.000 | | 14.400.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 656. | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | 180.000.000 | | 29.850.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| **657.** | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | **11.510.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | Puskesmas Muaro Paiti | |
| | | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 658. | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 11.510.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 659. | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | 11.510.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **660.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **4.600.000.000** | | **840.499.132** | | **-** | | **122.137.590** | **0,00** | **0,00** | | **122.137.590** | **0,00** | **2,66** | Puskesmas Sialang | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 661. | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | 4.600.000.000 | | 840.499.132 | | - | | 122.137.590 | 0,00 | 0,00 | | 122.137.590 | 0,00 | 2,66 | | |
| | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 662. | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | 4.600.000.000 | | 840.499.132 | | - | | 122.137.590 | 0,00 | 0,00 | | 122.137.590 | 0,00 | 2,66 | | |
| | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **663.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **3.162.469.000** | | **770.213.930** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | Puskesmas Sialang | |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 664. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 3.162.469.000 | | 770.213.930 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 665. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 249.000.000 | | 54.240.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 251 | | 49 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 666. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 266.000.000 | | 72.225.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2695 | | 555 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 667. | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | 60.400.000 | | 11.700.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 25 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 668. | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 209.600.000 | | 25.650.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 453 | | 91 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 669. | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 875.000.000 | | 268.128.400 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 670. | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | 41.500.000 | | 6.600.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 671. | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 103.960.000 | | 31.200.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 672. | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | 36.800.000 | | 4.200.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 673. | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | 24.100.000 | | 4.500.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 240 | | 149 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 674. | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 350.000.000 | | 88.420.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 675. | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 610.000.000 | | 147.900.530 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 676. | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | 1.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 27 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 677. | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | 63.000.000 | | 13.900.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 678. | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | 13.209.000 | | 300.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 679. | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | 76.400.000 | | 8.400.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 680. | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | 182.000.000 | | 32.850.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **681.** | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | **15.710.000** | | **2.610.000** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | Puskesmas Sialang | |
| | | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 682. | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 15.710.000 | | 2.610.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 683. | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | 15.710.000 | | 2.610.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **684.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **12.003.000.000** | | **2.024.014.956** | | **-** | | **216.188.037** | **0,00** | **0,00** | | **216.188.037** | **0,00** | **1,80** | Puskesmas Koto Baru SMLG | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 685. | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | 12.003.000.000 | | 2.024.014.956 | | - | | 216.188.037 | 0,00 | 0,00 | | 216.188.037 | 0,00 | 1,80 | | |
| | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 686. | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | 12.003.000.000 | | 2.024.014.956 | | - | | 216.188.037 | 0,00 | 0,00 | | 216.188.037 | 0,00 | 1,80 | | |
| | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **687.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **2.854.875.000** | | **559.879.184** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | Puskesmas Koto Baru SMLG | |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 688. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.854.875.000 | | 559.879.184 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 689. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 244.000.000 | | 84.900.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 73 | | 73 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 690. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 200.000.000 | | 28.125.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 3265 | | 921 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 691. | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | 37.700.000 | | 5.850.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 40 | | 8 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 692. | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 43.750.000 | | 4.275.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 675 | | 137 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 693. | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 745.000.000 | | 140.857.885 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 694. | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | 73.000.000 | | 11.175.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 695. | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 83.850.000 | | 16.650.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 696. | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | 22.600.000 | | 5.550.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 697. | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | 85.200.000 | | 8.250.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 652 | | 405 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 698. | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 365.000.000 | | 82.645.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 699. | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 525.000.000 | | 116.926.299 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 700. | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | 1.600.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 74 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 701. | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | 118.175.000 | | 8.850.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 702. | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | 19.200.000 | | 1.350.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 703. | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | 85.800.000 | | 13.950.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 704. | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | 205.000.000 | | 30.525.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **705.** | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | **20.300.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | Puskesmas Koto Baru SMLG | |
| | | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 706. | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 20.300.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 707. | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | 20.300.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **708.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **9.495.000.000** | | **1.566.228.703** | | **-** | | **162.552.358** | **0,00** | **0,00** | | **162.552.358** | **0,00** | **1,71** | Puskesmas Dangung-dangung | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 709. | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | 9.495.000.000 | | 1.566.228.703 | | - | | 162.552.358 | 0,00 | 0,00 | | 162.552.358 | 0,00 | 1,71 | | |
| | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 710. | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | 9.495.000.000 | | 1.566.228.703 | | - | | 162.552.358 | 0,00 | 0,00 | | 162.552.358 | 0,00 | 1,71 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **711.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **2.559.080.000** | | **469.112.123** | | **-** | | **26.300.000** | **0,00** | **0,00** | | **26.300.000** | **0,00** | **1,03** | Puskesmas Dangung-dangung | |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 712. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.559.080.000 | | 469.112.123 | | - | | 26.300.000 | 0,00 | 0,00 | | 26.300.000 | 0,00 | 1,03 | | |
| | | Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 713. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 173.000.000 | | 37.155.000 | | - | | 4.800.000 | 0,00 | 0,00 | | 4.800.000 | 0,00 | 2,77 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 48 | | 44 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 714. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 158.000.000 | | 31.050.000 | | - | | 800.000 | 0,00 | 0,00 | | 800.000 | 0,00 | 0,51 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 570 | | 606 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 715. | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | 75.700.000 | | 2.700.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 5 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 716. | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 55.050.000 | | 10.650.000 | | - | | 2.000.000 | 0,00 | 0,00 | | 2.000.000 | 0,00 | 3,63 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 83 | | 83 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 717. | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 725.000.000 | | 155.938.507 | | - | | 6.000.000 | 0,00 | 0,00 | | 6.000.000 | 0,00 | 0,83 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 718. | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | 50.950.000 | | 9.750.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 719. | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 75.150.000 | | 14.850.000 | | - | | 6.000.000 | 0,00 | 0,00 | | 6.000.000 | 0,00 | 7,98 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 720. | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | 17.400.000 | | 2.100.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 721. | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | 39.600.000 | | 7.350.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 498 | | 309 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 722. | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 350.000.000 | | 59.310.000 | | - | | 3.500.000 | 0,00 | 0,00 | | 3.500.000 | 0,00 | 1,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 723. | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 535.000.000 | | 101.108.616 | | - | | 3.000.000 | 0,00 | 0,00 | | 3.000.000 | 0,00 | 0,56 | | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 724. | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | 9.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 725. | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | 65.980.000 | | 9.250.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 726. | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | 35.150.000 | | 1.350.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 727. | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | 30.400.000 | | 5.400.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 728. | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | 163.700.000 | | 21.150.000 | | - | | 200.000 | 0,00 | 0,00 | | 200.000 | 0,00 | 0,12 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **729.** | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | **30.500.000** | | **3.900.000** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | Puskesmas Dangung-dangung | |
| | | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 730. | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 30.500.000 | | 3.900.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 731. | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | 30.500.000 | | 3.900.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **732.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **9.425.000.000** | | **1.711.394.715** | | **-** | | **190.068.694** | **0,00** | **0,00** | | **190.068.694** | **0,00** | **2,02** | Puskesmas Mungka | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 733. | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | 9.425.000.000 | | 1.711.394.715 | | - | | 190.068.694 | 0,00 | 0,00 | | 190.068.694 | 0,00 | 2,02 | | |
| | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 734. | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | 9.425.000.000 | | 1.711.394.715 | | - | | 190.068.694 | 0,00 | 0,00 | | 190.068.694 | 0,00 | 2,02 | | |
| | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **735.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **3.490.425.000** | | **569.434.552** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,02** | **0,00** | Puskesmas Mungka | |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,02 | | | |
| 736. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 3.490.425.000 | | 569.434.552 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,02 | 0,00 | | |
| | | Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 737. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 173.000.000 | | 67.720.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,37 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 271 | | 51 | | 0 | | 1 | | 0,00 | | 1 | | 0,37 | | | |
| 738. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 194.000.000 | | 37.800.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 3070 | | 632 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 739. | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | 50.900.000 | | 6.600.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 25 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 740. | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 105.000.000 | | 21.750.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 482 | | 97 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 741. | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 750.000.000 | | 142.112.552 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 742. | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | 79.525.000 | | 14.625.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 743. | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 108.000.000 | | 22.875.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 744. | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | 30.200.000 | | 5.700.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 745. | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | 58.200.000 | | 6.750.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 504 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 746. | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 350.000.000 | | 84.135.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 747. | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 525.000.000 | | 113.492.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 748. | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | 750.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 57 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 749. | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | 53.250.000 | | 7.175.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 750. | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | 12.850.000 | | 675.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 751. | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | 97.500.000 | | 14.400.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 752. | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | 153.000.000 | | 23.625.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| **753.** | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | **39.980.000** | | **5.630.000** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | Puskesmas Mungka | |
| | | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 754. | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 39.980.000 | | 5.630.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 755. | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | 39.980.000 | | 5.630.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **756.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **2.950.000.000** | | **525.704.655** | | **-** | | **72.755.368** | **0,00** | **0,00** | | **72.755.368** | **0,00** | **2,47** | Puskesmas Padang Kandis | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 757. | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | 2.950.000.000 | | 525.704.655 | | - | | 72.755.368 | 0,00 | 0,00 | | 72.755.368 | 0,00 | 2,47 | | |
| | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 758. | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | 2.950.000.000 | | 525.704.655 | | - | | 72.755.368 | 0,00 | 0,00 | | 72.755.368 | 0,00 | 2,47 | | |
| | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **759.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **2.370.250.000** | | **391.294.551** | | **-** | | **22.004.280** | **0,00** | **0,00** | | **22.004.280** | **0,60** | **0,93** | Puskesmas Padang Kandis | |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,60 | | | |
| 760. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.370.250.000 | | 391.294.551 | | - | | 22.004.280 | 0,00 | 0,00 | | 22.004.280 | 0,60 | 0,93 | | |
| | | Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 761. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 114.350.000 | | 19.320.000 | | - | | 11.002.140 | 0,00 | 0,00 | | 11.002.140 | 4,94 | 9,62 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 81 | | 15 | | 0 | | 4 | | 0,00 | | 4 | | 4,94 | | | |
| 762. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 342.000.000 | | 41.475.000 | | - | | 2.000.000 | 0,00 | 0,00 | | 2.000.000 | 4,74 | 0,58 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 865 | | 177 | | 0 | | 41 | | 0,00 | | 41 | | 4,74 | | | |
| 763. | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | 24.100.000 | | 3.600.000 | | - | | 600.000 | 0,00 | 0,00 | | 600.000 | 0,00 | 2,49 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 764. | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 140.800.000 | | 15.900.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 26 | | 28 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 765. | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 625.000.000 | | 103.168.000 | | - | | 1.400.000 | 0,00 | 0,00 | | 1.400.000 | 0,00 | 0,22 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 766. | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | 47.900.000 | | 6.450.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 767. | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 25.325.000 | | 4.575.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 768. | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | 10.225.000 | | 2.100.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 769. | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | 26.300.000 | | 2.700.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 184 | | 114 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 770. | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 225.000.000 | | 46.750.000 | | - | | 1.500.000 | 0,00 | 0,00 | | 1.500.000 | 0,00 | 0,67 | | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 771. | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 525.000.000 | | 98.156.551 | | - | | 2.902.140 | 0,00 | 0,00 | | 2.902.140 | 0,00 | 0,55 | | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 772. | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | 1.200.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 21 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 773. | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | 38.200.000 | | 6.150.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 774. | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | 6.250.000 | | 600.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 775. | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | 65.600.000 | | 12.450.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 776. | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | 153.000.000 | | 27.900.000 | | - | | 2.600.000 | 0,00 | 0,00 | | 2.600.000 | 0,00 | 1,70 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **777.** | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | **38.945.000** | | **7.345.000** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | Puskesmas Padang Kandis | |
| | | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 778. | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 38.945.000 | | 7.345.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 779. | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | 38.945.000 | | 7.345.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **780.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **4.740.000.000** | | **855.318.998** | | **-** | | **92.964.120** | **0,00** | **0,00** | | **92.964.120** | **0,00** | **1,96** | Puskesmas Koto Tinggi | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 781. | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | 4.740.000.000 | | 855.318.998 | | - | | 92.964.120 | 0,00 | 0,00 | | 92.964.120 | 0,00 | 1,96 | | |
| | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 782. | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | 4.740.000.000 | | 855.318.998 | | - | | 92.964.120 | 0,00 | 0,00 | | 92.964.120 | 0,00 | 1,96 | | |
| | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **783.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **2.541.600.000** | | **520.715.506** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | Puskesmas Koto Tinggi | |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 784. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.541.600.000 | | 520.715.506 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 785. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 252.000.000 | | 74.480.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 115 | | 21 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 786. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 163.500.000 | | 33.600.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1410 | | 290 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 787. | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | 47.000.000 | | 9.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 10 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 788. | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 40.550.000 | | 7.500.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 184 | | 38 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 789. | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 675.000.000 | | 105.090.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 790. | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | 43.050.000 | | 8.400.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 791. | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 75.900.000 | | 15.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 792. | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | 15.200.000 | | 1.200.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 793. | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | 47.700.000 | | 9.300.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 250 | | 155 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 794. | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 252.000.000 | | 46.035.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 795. | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 575.000.000 | | 133.195.506 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 796. | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | 3.750.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 34 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 797. | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | 78.200.000 | | 6.665.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 798. | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | 4.750.000 | | 600.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 799. | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | 63.000.000 | | 12.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 800. | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | 205.000.000 | | 58.650.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **801.** | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | **19.145.000** | | **2.195.000** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | Puskesmas Koto Tinggi | |
| | | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 802. | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 19.145.000 | | 2.195.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 803. | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | 19.145.000 | | 2.195.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **804.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **4.348.000.000** | | **705.797.589** | | **-** | | **77.731.452** | **0,00** | **0,00** | | **77.731.452** | **0,00** | **1,79** | Puskesmas Maek | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 805. | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | 4.348.000.000 | | 705.797.589 | | - | | 77.731.452 | 0,00 | 0,00 | | 77.731.452 | 0,00 | 1,79 | | |
| | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 806. | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | 4.348.000.000 | | 705.797.589 | | - | | 77.731.452 | 0,00 | 0,00 | | 77.731.452 | 0,00 | 1,79 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **807.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **2.620.638.000** | | **480.818.000** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | Puskesmas Maek | |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 808. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.620.638.000 | | 480.818.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 809. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 162.800.000 | | 28.800.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 30 | | 4 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 810. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 170.000.000 | | 37.950.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 210 | | 44 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 811. | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | 109.700.000 | | 21.600.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 5 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 812. | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 110.500.000 | | 21.900.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 40 | | 8 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 813. | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 700.000.000 | | 92.502.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 814. | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | 29.500.000 | | 4.200.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 815. | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 51.600.000 | | 10.200.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 816. | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | 4.200.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 817. | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | 50.300.000 | | 9.900.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 752 | | 112 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 818. | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 225.000.000 | | 49.570.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 819. | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 650.000.000 | | 129.376.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 820. | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | 800.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 821. | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | 63.000.000 | | 12.570.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 822. | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | 16.738.000 | | 1.200.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 823. | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | 96.000.000 | | 21.600.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 824. | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | 180.500.000 | | 39.450.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **825.** | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | **41.350.000** | | **4.800.000** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | Puskesmas Maek | |
| | | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 826. | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 41.350.000 | | 4.800.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 827. | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | 41.350.000 | | 4.800.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **828.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **2.770.000.000** | | **497.971.180** | | **-** | | **43.348.686** | **0,00** | **0,00** | | **43.348.686** | **0,00** | **1,56** | Puskesmas Gunung Malintang | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 829. | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | 2.770.000.000 | | 497.971.180 | | - | | 43.348.686 | 0,00 | 0,00 | | 43.348.686 | 0,00 | 1,56 | | |
| | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 830. | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | 2.770.000.000 | | 497.971.180 | | - | | 43.348.686 | 0,00 | 0,00 | | 43.348.686 | 0,00 | 1,56 | | |
| | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **831.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **2.906.335.000** | | **420.186.703** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | Puskesmas Gunung Malintang | |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 832. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.906.335.000 | | 420.186.703 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 833. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 141.900.000 | | 26.400.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 86 | | 16 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 834. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 200.000.000 | | 33.075.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 995 | | 205 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 835. | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | 91.725.000 | | 7.800.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 10 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 836. | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 102.000.000 | | 20.850.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 147 | | 30 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 837. | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 600.300.000 | | 91.843.500 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 838. | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | 150.300.000 | | 8.700.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 839. | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 36.600.000 | | 7.200.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 840. | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | 4.100.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 841. | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | 38.700.000 | | 6.600.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 550 | | 90 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 842. | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 325.000.000 | | 58.548.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 843. | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 575.000.000 | | 104.345.203 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 844. | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | 750.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 15 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 845. | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | 315.000.000 | | 9.600.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 846. | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | 13.860.000 | | 225.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 847. | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | 130.300.000 | | 16.200.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 848. | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | 180.800.000 | | 28.800.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| **849.** | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | **40.650.000** | | **7.850.000** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | Puskesmas Gunung Malintang | |
| | | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 850. | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 40.650.000 | | 7.850.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 851. | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | 40.650.000 | | 7.850.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **1.03** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | **1.204.216.152.546** | | **13.299.302.617** | | **31.978.682.218** | | **1.073.074.066** | **3,67** | **3,36** | | **1.073.074.066** | **0,33** | **0,09** | | |
| **852.** | **1.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **60.632.579.334** | | **9.180.840.607** | | **13.120.132.153** | | **968.461.966** | **7,64** | **7,38** | | **968.461.966** | **0,82** | **1,60** | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 853. | 1.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 280.000.000 | | 6.629.000 | | 6.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 854. | 1.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 75.000.000 | | 1.860.000 | | 3.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 855. | 1.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 75.000.000 | | 4.769.000 | | 3.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 856. | 1.03.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 65.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 857. | 1.03.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | 65.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 858. | 1.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 50.128.579.334 | | 8.834.725.408 | | 9.630.839.903 | | 871.875.094 | 0,00 | 9,05 | | 871.875.094 | 0,00 | 1,74 | | |
| | | Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan laporan OPD | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 859. | 1.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 49.923.579.334 | | 8.834.725.408 | | 9.630.839.903 | | 871.875.094 | 0,00 | 9,05 | | 871.875.094 | 0,00 | 1,75 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 100 | | 95 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 860. | 1.03.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 75.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 861. | 1.03.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 65.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 862. | 1.03.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | 65.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 863. | 1.03.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 130.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 864. | 1.03.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | 65.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 865. | 1.03.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 65.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 866. | 1.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 360.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 867. | 1.03.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 360.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 868. | 1.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.192.000.000 | | 148.373.596 | | 111.000.000 | | 18.103.200 | 16,67 | 16,31 | | 18.103.200 | 2,22 | 1,52 | | |
| | | Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 869. | 1.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 35.000.000 | | 2.100.000 | | 2.000.000 | | 390.000 | 100,00 | 19,50 | | 390.000 | 20,00 | 1,11 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 870. | 1.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 79.000.000 | | 8.676.028 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 2 | | 4 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 871. | 1.03.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 30.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 872. | 1.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 200.000.000 | | 24.992.000 | | 20.000.000 | | 3.453.000 | 0,00 | 17,27 | | 3.453.000 | 0,00 | 1,73 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 5 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 873. | 1.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 190.000.000 | | 21.908.900 | | 7.000.000 | | 1.400.000 | 0,00 | 20,00 | | 1.400.000 | 0,00 | 0,74 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 874. | 1.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 73.000.000 | | 11.040.000 | | 12.000.000 | | 1.840.000 | 0,00 | 15,33 | | 1.840.000 | 0,00 | 2,52 | | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 4 | | 4 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 875. | 1.03.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 75.000.000 | | 1.702.000 | | 5.000.000 | | 394.000 | 0,00 | 7,88 | | 394.000 | 0,00 | 0,53 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 876. | 1.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 450.000.000 | | 77.954.668 | | 65.000.000 | | 10.626.200 | 0,00 | 16,35 | | 10.626.200 | 0,00 | 2,36 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 5 | | 3 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 877. | 1.03.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | 60.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 878. | 1.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 810.000.000 | | - | | 750.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 879. | 1.03.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 760.000.000 | | - | | 750.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 3 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 880. | 1.03.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 881. | 1.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 5.342.000.000 | | 87.840.803 | | 198.000.000 | | 17.080.127 | 0,00 | 8,63 | | 17.080.127 | 0,00 | 0,32 | | |
| | | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 882. | 1.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 12.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 883. | 1.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 425.000.000 | | 68.223.803 | | 75.000.000 | | 7.876.523 | 0,00 | 10,50 | | 7.876.523 | 0,00 | 1,85 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 5 | | 6 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 884. | 1.03.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 160.000.000 | | 19.617.000 | | 15.000.000 | | 203.604 | 0,00 | 1,36 | | 203.604 | 0,00 | 0,13 | | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5 | | 3 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 885. | 1.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 4.745.000.000 | | - | | 108.000.000 | | 9.000.000 | 0,00 | 8,33 | | 9.000.000 | 0,00 | 0,19 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 886. | 1.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.390.000.000 | | 103.271.800 | | 2.424.292.250 | | 61.403.545 | 5,56 | 2,53 | | 61.403.545 | 0,91 | 2,57 | | |
| | | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 887. | 1.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 400.000.000 | | 56.663.800 | | 104.380.000 | | 11.610.345 | 0,00 | 11,12 | | 11.610.345 | 0,00 | 2,90 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 125 | | 30 | | 20 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 888. | 1.03.01.2.09.0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | | | 975.000.000 | | 43.508.000 | | 2.314.912.250 | | 49.793.200 | 22,22 | 2,15 | | 49.793.200 | 3,64 | 5,11 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) | 55 | | 11 | | 9 | | 2 | | 22,22 | | 2 | | 3,64 | | | |
| 889. | 1.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 375.000.000 | | 3.100.000 | | 5.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 55 | | 11 | | 11 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 890. | 1.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 640.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 2 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **891.** | **1.03.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | | | **161.405.474.712** | | **853.886.625** | | **700.000.000** | | **21.950.400** | **0,00** | **3,14** | | **21.950.400** | **0,00** | **0,01** | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| | | 1. Kapasitas Air Baku (m3/detik), 2. Persentase peningkatan perlindungan kawasan permikiman rawan banjir, 3. Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik (%) | Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik (%) | 55 | | 54,54 | | 51 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Persentase peningkatan perlindungan kawasan permikiman rawan banjir (%) | 46 | | 54,54 | | 41,36 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 892. | 1.03.02.2.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 60.196.474.712 | | - | | 400.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase sumber daya air yang terkelola/ terpelihara | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Bendungan yang Direhabilitasi (Bendungan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 893. | 1.03.02.2.01.0093 | Normalisasi/Restorasi Sungai | | | 31.889.474.712 | | - | | 400.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM) | 48.16 | | 0 | | 0.095 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 894. | 1.03.02.2.01.0101 | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing | | | 8.575.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM) | 0.5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 895. | 1.03.02.2.01.0112 | Rehabilitasi Bendungan | | | 2.250.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terehabilitasinya Bendungan | Jumlah Bendungan yang Direhabilitasi (Bendungan) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 896. | 1.03.02.2.01.0115 | Pembangunan Tanggul Sungai | | | 3.921.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbangunnya Tanggul Sungai | Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM) | 0.7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 897. | 1.03.02.2.01.0120 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai | | | 3.558.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen) | 16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 898. | 1.03.02.2.01.0121 | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | | | 9.603.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit) | 29 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | kapasitas air baku | Jumlah Unit Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 899. | 1.03.02.2.01.0132 | Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku | | | 400.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Beroperasi dan Terpeliharanya Unit Air Baku | Jumlah Unit Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 900. | 1.03.02.2.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 101.209.000.000 | | 853.886.625 | | 300.000.000 | | 21.950.400 | 0,00 | 7,32 | | 21.950.400 | 0,00 | 0,02 | | |
| | | Persentase jaringan irigasi yang terkelola | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya (Lembaga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan (UNIT) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (UNIT) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 901. | 1.03.02.2.02.0008 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | | | 34.091.234.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM) | 5.7 | | 0 | | 0.778 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 902. | 1.03.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | | | 56.253.315.900 | | 668.886.625 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM) | 6.1 | | 0,99 | | 3469 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 903. | 1.03.02.2.02.0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | | | 3.732.731.000 | | 185.000.000 | | 300.000.000 | | 21.950.400 | 0,00 | 7,32 | | 21.950.400 | 0,00 | 0,59 | | |
| | | Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM) | 2.31 | | 0,25 | | 0.367 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 904. | 1.03.02.2.02.0030 | Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 1.350.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penguatan Kapasitas | Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya (Lembaga) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 905. | 1.03.02.2.02.0048 | Peningkatan Bendung Irigasi | | | 2.100.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Bendung Irigasi | Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan (UNIT) | 9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 906. | 1.03.02.2.02.0050 | Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa | | | 2.271.719.100 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa | Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen) | 4 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 907. | 1.03.02.2.02.0053 | Rehabilitasi Bendung Irigasi | | | 1.410.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terehabilitasinya Bendung Irigasi | Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (UNIT) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **908.** | **1.03.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | | | **81.250.000.000** | | **102.352.986** | | **2.550.000.000** | | **7.325.000** | **0,00** | **0,29** | | **7.325.000** | **0,00** | **0,01** | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| | | 1. Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Perpipaan, 2. Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Akses Air Minum | Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Akses Air Minum (%) | 71 | | 81,78 | | 65 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 909. | 1.03.03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | | | 81.250.000.000 | | 102.352.986 | | 2.550.000.000 | | 7.325.000 | 0,00 | 0,29 | | 7.325.000 | 0,00 | 0,01 | | |
| | | Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Akses Air Minum | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 910. | 1.03.03.2.01.0025 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | 600.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 911. | 1.03.03.2.01.0028 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | 29.700.000.000 | | 102.352.986 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik) | 8 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 912. | 1.03.03.2.01.0032 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | 50.950.000.000 | | - | | 2.550.000.000 | | 7.325.000 | 0,00 | 0,29 | | 7.325.000 | 0,00 | 0,01 | | |
| | | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR) | 12510 | | 0 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **913.** | **1.03.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL** | | | **118.200.000.000** | | **-** | | **1.125.000.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| | | Meningkatnya layanan persampahan | Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase) | 3,29 | | 1,13 | | 3,29 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 914. | 1.03.04.2.01 | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | | | 118.200.000.000 | | - | | 1.125.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah sampah yang terkelola | Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 915. | 1.03.04.2.01.0020 | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R | | | 118.200.000.000 | | - | | 1.125.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R | Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari) | 15 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **916.** | **1.03.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | | | **129.000.000.000** | | **883.561.798** | | **1.725.000.000** | | **5.974.200** | **0,00** | **0,35** | | **5.974.200** | **0,00** | **0,00** | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah | Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase) | 76 | | 64,77 | | 68 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 917. | 1.03.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 129.000.000.000 | | 883.561.798 | | 1.725.000.000 | | 5.974.200 | 0,00 | 0,35 | | 5.974.200 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (MÃ³/Hari) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (MÃ³/Hari) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Penyelenggara) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 918. | 1.03.05.2.01.0022 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | | | 51.000.000.000 | | 883.561.798 | | 1.725.000.000 | | 5.974.200 | 0,00 | 0,35 | | 5.974.200 | 0,00 | 0,01 | | |
| | | Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (MÃ³/Hari) | 615 | | 3 | | 20 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 919. | 1.03.05.2.01.0033 | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja | | | 4.750.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga) | 3000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 920. | 1.03.05.2.01.0036 | Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | | | 42.500.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (MÃ³/Hari) | 100 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 921. | 1.03.05.2.01.0037 | Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja | | | 9.250.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja | Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 922. | 1.03.05.2.01.0043 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | 1.000.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang mendapatkan Peningkatan kapasitas | Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Penyelenggara) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 923. | 1.03.05.2.01.0044 | Penyediaan Unit pengolahan setempat | | | 19.000.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Unit pengolahan setempat | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga) | 85 | | 0 | | 250 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 924. | 1.03.05.2.01.0045 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | 1.500.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **925.** | **1.03.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | | | **50.950.000.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| | | Persentase cakupan Drainase dalam kondisi Baik | Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase) | 50 | | 0 | | 46 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 926. | 1.03.06.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 50.950.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Drainase Yang Dibangun | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 927. | 1.03.06.2.01.0029 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | | | 48.950.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan) | 489 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 928. | 1.03.06.2.01.0030 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | | | 2.000.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **929.** | **1.03.07** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN** | | | **16.710.200.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| | | Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam kondisi baik | Persentase cakupan infrastruktur pemukiman dalam kondisi baik (%) | 50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 930. | 1.03.07.2.01 | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | 16.710.200.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Dokumen Cakupan Infrastruktur permukiman dalam kondisi baik | Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi (UNIT) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun (Ton/hari) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 931. | 1.03.07.2.01.0007 | Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | | | 1.007.180.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi (UNIT) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 932. | 1.03.07.2.01.0015 | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | | | 15.703.020.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun (Ton/hari) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **933.** | **1.03.08** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | | | **147.300.000.000** | | **1.779.361.752** | | **1.300.000.000** | | **32.882.500** | **3,40** | **2,53** | | **32.882.500** | **0,42** | **0,02** | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| | | Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik | Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase) | 88 | | 76,09 | | 80 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 934. | 1.03.08.2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | | | 147.300.000.000 | | 1.779.361.752 | | 1.300.000.000 | | 32.882.500 | 3,40 | 2,53 | | 32.882.500 | 0,42 | 0,02 | | |
| | | Jumlah Bangunan Gedung dalam kondisi baik | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | |
| 935. | 1.03.08.2.01.0021 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | 145.250.000.000 | | 1.599.392.252 | | 1.000.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 15 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 936. | 1.03.08.2.01.0023 | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | | | 2.050.000.000 | | 179.969.500 | | 300.000.000 | | 32.882.500 | 6,80 | 10,96 | | 32.882.500 | 0,85 | 1,60 | | |
| | | Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen) | 2000 | | 250 | | 250 | | 17 | | 6,80 | | 17 | | 0,85 | | | |
| **937.** | **1.03.09** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA** | | | **2.011.898.500** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| | | Persentase penataan bangunan dan lingkungan | Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase) | 65 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 938. | 1.03.09.2.01 | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.011.898.500 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Dokumen Bangunan dan Lingkungan yang telah ditata | Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 939. | 1.03.09.2.01.0010 | Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.100.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 940. | 1.03.09.2.01.0012 | Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan | | | 911.898.500 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan penataan dan lingkungan | Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan (Orang) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **941.** | **1.03.10** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | | | **419.458.500.000** | | **-** | | **10.808.550.065** | | **36.480.000** | **6,00** | **0,34** | | **36.480.000** | **0,90** | **0,01** | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| | | Tingkat Kemantapan Jalan | Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase) | 63 | | 58,45 | | 59 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 942. | 1.03.10.2.01 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | | | 419.458.500.000 | | - | | 10.808.550.065 | | 36.480.000 | 6,00 | 0,34 | | 36.480.000 | 0,90 | 0,01 | | |
| | | Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Mantap | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang jembatan yang dibangun (Meter) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 943. | 1.03.10.2.01.0029 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | | | 2.622.000.000 | | - | | 500.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen) | 25 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 944. | 1.03.10.2.01.0051 | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | 15.000.000.000 | | - | | 2.336.470.065 | | 36.480.000 | 36,00 | 1,56 | | 36.480.000 | 7,20 | 0,24 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM) | 750 | | 0 | | 150 | | 54 | | 36,00 | | 54 | | 7,20 | | | |
| 945. | 1.03.10.2.01.0053 | Pembangunan Jalan | | | 7.500.000.000 | | - | | 1.290.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM) | 25 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 946. | 1.03.10.2.01.0056 | Pemeliharaan Berkala Jalan | | | 94.058.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM) | 47 | | 0 | | 7 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 947. | 1.03.10.2.01.0057 | Penggantian Jembatan | | | 21.000.000.000 | | - | | 1.570.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penggantian Jembatan | Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter) | 130 | | 0 | | 30 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 948. | 1.03.10.2.01.0059 | Rekonstruksi Jalan | | | 262.478.000.000 | | - | | 5.112.080.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Rekonstruksi Jalan | Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM) | 92 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 949. | 1.03.10.2.01.0067 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | | | 800.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan) | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 950. | 1.03.10.2.01.0069 | Pembangunan Jembatan | | | 16.000.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembangunan Jembatan | Panjang jembatan yang dibangun (Meter) | 100 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **951.** | **1.03.11** | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | | | **2.522.500.000** | | **134.788.606** | | **200.000.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| | | Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi terampil | Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil (%) | 17 | | 48,47 | | 7 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 952. | 1.03.11.2.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | | | 1.740.462.000 | | 115.023.606 | | 168.449.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah sertifikat keahlian yang diterbitkan (sertifikat) | Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya (Lembaga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 953. | 1.03.11.2.01.0009 | Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | | | 12.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 954. | 1.03.11.2.01.0010 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | | | 1.104.513.500 | | 112.728.606 | | 132.039.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang) | 515 | | 0 | | 60 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 955. | 1.03.11.2.01.0011 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi | | | 148.448.500 | | 2.295.000 | | 36.410.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga) | 186 | | 0 | | 25 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 956. | 1.03.11.2.01.0012 | Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan (Orang) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 957. | 1.03.11.2.01.0013 | Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Teridentifikasinya Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya (Lembaga) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 958. | 1.03.11.2.01.0014 | Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | | | 55.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpantau dan Terevaluasinya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya (Dokumen) | 11 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 959. | 1.03.11.2.01.0015 | Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | | | 40.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan (Dokumen) | 13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 960. | 1.03.11.2.01.0016 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | | | 280.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang) | 330 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 961. | 1.03.11.2.02 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | 225.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Informasi Jasa Konstruksi di Kabupaten Lima Puluh Kota | Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan (Perangkat Pendukung) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 962. | 1.03.11.2.02.0012 | Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi | | | 47.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi | Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan (Perangkat Pendukung) | 5 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 963. | 1.03.11.2.02.0013 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota | | | 106.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen) | 15 | | 0 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 964. | 1.03.11.2.02.0014 | Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI | | | 57.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI | Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang) | 50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 965. | 1.03.11.2.02.0015 | Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi | | | 15.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi | Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 966. | 1.03.11.2.04 | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | | | 557.038.000 | | 19.765.000 | | 31.551.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Monitoring dan evaluasi kegiatan Jasa Konstruksi (%) | Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk (Bangunan Konstruksi) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 967. | 1.03.11.2.04.0004 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | | | 320.963.000 | | 19.765.000 | | 31.551.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan | Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan) | 210 | | 10 | | 15 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 968. | 1.03.11.2.04.0005 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | | | 72.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk | Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk (Bangunan Konstruksi) | 145 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 969. | 1.03.11.2.04.0006 | Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi | | | 10.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga) | 5 | | 0 | | 25 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 970. | 1.03.11.2.04.0007 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | | | 99.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha | Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha) | 66 | | 0 | | 15 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 971. | 1.03.11.2.04.0010 | Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota | | | 54.575.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota | Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **972.** | **1.03.12** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | | | **14.775.000.000** | | **364.510.243** | | **450.000.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| | | Persentase penyelesaian kasus pelanggaraan pemanfaatan ruang di daerah Kabupaten | Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan Ruang di Daerah (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 973. | 1.03.12.2.01 | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | | | 2.675.000.000 | | 364.510.243 | | 375.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Perbup RDTR Yang ditetapkan | Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 974. | 1.03.12.2.01.0006 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota | | | - | | 364.510.243 | | 375.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi | Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 975. | 1.03.12.2.01.0010 | Penetapan RDTR Kabupaten/Kota | | | 1.250.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota | Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 976. | 1.03.12.2.01.0011 | Penetapan RTRW Kabupaten/Kota | | | 350.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota | Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 977. | 1.03.12.2.01.0013 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang | | | 1.075.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. | Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 978. | 1.03.12.2.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | 9.450.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Dokumen Tata Ruang yang Ada | Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 979. | 1.03.12.2.02.0005 | Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota | | | 8.000.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman | Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen) | 8 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 980. | 1.03.12.2.02.0006 | Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang | | | 450.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencana tata ruang | Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang) | 15 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 981. | 1.03.12.2.02.0007 | Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota | | | 1.000.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman | Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 982. | 1.03.12.2.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.350.000.000 | | - | | 75.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah pemanfaatan tata ruang yang telah sesuai (lokasi) | Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 983. | 1.03.12.2.03.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang | | | 450.000.000 | | - | | 75.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan | Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dokumen) | 20 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 984. | 1.03.12.2.03.0004 | Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang | | | 900.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari | Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 985. | 1.03.12.2.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.300.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Jumlah pemanfaatan Ruang yang dapat dikendalikan (lokasi) | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 986. | 1.03.12.2.04.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | | | 850.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen) | 42 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 987. | 1.03.12.2.04.0008 | Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK | | | 450.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang | Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | **115.521.160.000** | | **737.696.792** | | **1.820.000.000** | | **41.044.800** | **0,00** | **2,26** | | **41.044.800** | **0,00** | **0,04** | | |
| **988.** | **1.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | | | **3.853.040.000** | | **158.101.192** | | **300.000.000** | | **18.089.900** | **0,00** | **6,03** | | **18.089.900** | **0,00** | **0,47** | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | |
| | | Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana yang terkena relokasi akibat program pemerintah | Persentase warga negara korban bencana dan atau relokasi program pemerintah yang memperoleh akses rumah layak huni (%) (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 989. | 1.04.02.2.01 | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | 368.000.000 | | - | | 48.000.000 | | 7.209.900 | 0,00 | 15,02 | | 7.209.900 | 0,00 | 1,96 | | |
| | | Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah (dokumen) | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 990. | 1.04.02.2.01.0009 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | | | 368.000.000 | | - | | 48.000.000 | | 7.209.900 | 0,00 | 15,02 | | 7.209.900 | 0,00 | 1,96 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 991. | 1.04.02.2.02 | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | 180.000.000 | | - | | 22.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi progam pemerintah (orang) | Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 992. | 1.04.02.2.02.0001 | Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana | | | 180.000.000 | | - | | 22.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang) | 60 | | 0 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 993. | 1.04.02.2.03 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | 3.255.040.000 | | 158.101.192 | | 230.000.000 | | 10.880.000 | 0,00 | 4,73 | | 10.880.000 | 0,00 | 0,33 | | |
| | | Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten (unit rumah) | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 994. | 1.04.02.2.03.0004 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | | | 3.255.040.000 | | 158.101.192 | | 230.000.000 | | 10.880.000 | 0,00 | 4,73 | | 10.880.000 | 0,00 | 0,33 | | |
| | | Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah) | 3 | | 2 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 995. | 1.04.02.2.05 | Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Laporan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (laporan) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 996. | 1.04.02.2.05.0004 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **997.** | **1.04.03** | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | | | **61.368.120.000** | | **579.595.600** | | **56.000.000** | | **3.595.000** | **0,00** | **6,42** | | **3.595.000** | **0,00** | **0,01** | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | |
| | | Meningkatnya kualitas kawasan permukiman | Persentase Berkurangnya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (%) (%) | 5 | | 16,3 | | 1,66 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 998. | 1.04.03.2.02 | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | 236.000.000 | | - | | 56.000.000 | | 3.595.000 | 0,00 | 6,42 | | 3.595.000 | 0,00 | 1,52 | | |
| | | Luas Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha (hektar) | Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 999. | 1.04.03.2.02.0008 | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | | | 34.000.000 | | - | | 32.000.000 | | 3.595.000 | 0,00 | 11,23 | | 3.595.000 | 0,00 | 10,57 | | |
| | | Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP | Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen) | 0 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1000. | 1.04.03.2.02.0014 | Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | | | 202.000.000 | | - | | 24.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1001. | 1.04.03.2.03 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | 61.132.120.000 | | 579.595.600 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Luas Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha melalui peremajaan kawasan (Hektar) | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1002. | 1.04.03.2.03.0002 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | | | 13.448.840.000 | | 579.595.600 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah) | 174 | | 9 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1003. | 1.04.03.2.03.0009 | Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh | | | 300.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh | Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha) | 9 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1004. | 1.04.03.2.03.0012 | Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | 47.383.280.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit) | 50 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1005.** | **1.04.04** | **PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH** | | | **9.801.010.000** | | **-** | | **1.054.000.000** | | **17.359.900** | **0,00** | **1,65** | | **17.359.900** | **0,00** | **0,18** | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | |
| | | berkurangnya persentase kekumuhan pada perumahan dan kawasan permukiman | Persentase luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani (%) (%) | 5 | | 0,66 | | 1,66 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1006. | 1.04.04.2.01 | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | | | 9.801.010.000 | | - | | 1.054.000.000 | | 17.359.900 | 0,00 | 1,65 | | 17.359.900 | 0,00 | 0,18 | | |
| | | Luas Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota (Hektar) | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1007. | 1.04.04.2.01.0001 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | 301.010.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah) | 1 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1008. | 1.04.04.2.01.0004 | Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru | | | 9.500.000.000 | | - | | 1.054.000.000 | | 17.359.900 | 0,00 | 1,65 | | 17.359.900 | 0,00 | 0,18 | | |
| | | Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh | Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit) | 3 | | 0 | | 15 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1009.** | **1.04.05** | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | | | **39.788.790.000** | | **-** | | **410.000.000** | | **2.000.000** | **0,00** | **0,49** | | **2.000.000** | **0,00** | **0,01** | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | |
| | | Meningkatnya penyediaan PSU Permukiman | Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%) (%) | 100 | | 9,89 | | 30 | | 9,89 | | 32,97 | | 9,89 | | 9,89 | | | |
| 1010. | 1.04.05.2.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | | | 39.788.790.000 | | - | | 410.000.000 | | 2.000.000 | 0,00 | 0,49 | | 2.000.000 | 0,00 | 0,01 | | |
| | | Jumlah satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU perumahan (lokasi) | Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1011. | 1.04.05.2.01.0010 | Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang | | | 130.810.000 | | - | | 18.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang | Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan) | 6 | | 0 | | 6 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1012. | 1.04.05.2.01.0012 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan | | | 39.657.980.000 | | - | | 392.000.000 | | 2.000.000 | 0,00 | 0,51 | | 2.000.000 | 0,00 | 0,01 | | |
| | | Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1013.** | **1.04.06** | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | **710.200.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | |
| | | Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan menengah | Persentase sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan Rumah dan PSU skala kecil (%) (%) | 100 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1014. | 1.04.06.2.01 | Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil | | | 710.200.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil (dokumen) | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1015. | 1.04.06.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil | | | 710.200.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | **569.432.660.773** | | **20.707.722.537** | | **23.598.173.980** | | **4.157.817.995** | **13,93** | **17,62** | | **4.157.817.995** | **3,43** | **0,73** | | |
| **1016.** | **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **61.436.262.138** | | **5.892.451.066** | | **8.024.120.274** | | **1.987.979.045** | **10,18** | **24,78** | | **1.987.979.045** | **4,63** | **3,24** | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%) | 100 | | 25 | | 100 | | 20 | | 20,00 | | 20 | | 20,00 | | | |
| 1017. | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 24.739.910.525 | | 5.567.424.792 | | 7.707.220.274 | | 1.935.739.924 | 12,44 | 25,12 | | 1.935.739.924 | 8,60 | 7,82 | | |
| | | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1018. | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 24.575.560.525 | | 5.555.429.792 | | 7.686.020.274 | | 1.934.763.924 | 28,99 | 25,17 | | 1.934.763.924 | 5,80 | 7,87 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 345 | | 69 | | 69 | | 20 | | 28,99 | | 20 | | 5,80 | | | |
| 1019. | 1.05.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 71.200.000 | | 6.997.000 | | 14.100.000 | | 976.000 | 8,33 | 6,92 | | 976.000 | 20,00 | 1,37 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 5 | | 1 | | 12 | | 1 | | 8,33 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 1020. | 1.05.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | 93.150.000 | | 4.998.000 | | 7.100.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 10 | | 1 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1021. | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 13.226.167.670 | | 80.603.245 | | 100.400.001 | | 16.845.200 | 10,49 | 16,78 | | 16.845.200 | 2,81 | 0,13 | | |
| | | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1022. | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 2.152.820.706 | | 20.027.920 | | 22.917.001 | | 4.430.000 | 22,22 | 19,33 | | 4.430.000 | 4,08 | 0,21 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 49 | | 40 | | 9 | | 2 | | 22,22 | | 2 | | 4,08 | | | |
| 1023. | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 3.161.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 169 | | 0 | | 9 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1024. | 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 4.781.246.964 | | 17.775.000 | | 12.000.000 | | 2.339.000 | 0,00 | 19,49 | | 2.339.000 | 0,00 | 0,05 | | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 169 | | 12 | | 9 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1025. | 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 663.000.000 | | 19.179.000 | | 17.064.000 | | 3.412.700 | 7,14 | 20,00 | | 3.412.700 | 0,57 | 0,51 | | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 174 | | 40 | | 14 | | 1 | | 7,14 | | 1 | | 0,57 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1026. | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 148.100.000 | | 10.000.000 | | 7.501.000 | | 1.151.700 | 40,00 | 15,35 | | 1.151.700 | 9,52 | 0,78 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 21 | | 12 | | 5 | | 2 | | 40,00 | | 2 | | 9,52 | | | |
| 1027. | 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 18.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 5 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1028. | 1.05.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | 637.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 10 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1029. | 1.05.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 109.000.000 | | - | | 4.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 9 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1030. | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 1.555.000.000 | | 13.621.325 | | 36.918.000 | | 5.511.800 | 25,00 | 14,93 | | 5.511.800 | 11,11 | 0,35 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 9 | | 1 | | 4 | | 1 | | 25,00 | | 1 | | 11,11 | | | |
| 1031. | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 18.326.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1032. | 1.05.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 3.567.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 25 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1033. | 1.05.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 14.365.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 41 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1034. | 1.05.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | 394.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) | 21 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1035. | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.649.683.944 | | 156.858.207 | | 113.700.000 | | 22.127.079 | 19,44 | 19,46 | | 22.127.079 | 14,07 | 1,34 | | |
| | | terlaksananya Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1036. | 1.05.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 33.500.000 | | 3.100.000 | | 5.000.000 | | 1.000.000 | 8,33 | 20,00 | | 1.000.000 | 20,00 | 2,99 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 5 | | 1 | | 12 | | 1 | | 8,33 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 1037. | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 845.183.944 | | 58.908.131 | | 69.700.000 | | 9.127.079 | 25,00 | 13,09 | | 9.127.079 | 11,11 | 1,08 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 9 | | 1 | | 4 | | 1 | | 25,00 | | 1 | | 11,11 | | | |
| 1038. | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 771.000.000 | | 94.850.076 | | 39.000.000 | | 12.000.000 | 25,00 | 30,77 | | 12.000.000 | 11,11 | 1,56 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 9 | | 1 | | 4 | | 1 | | 25,00 | | 1 | | 11,11 | | | |
| 1039. | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.493.999.999 | | 87.564.822 | | 102.799.999 | | 13.266.842 | 7,94 | 12,91 | | 13.266.842 | 1,33 | 0,38 | | |
| | | Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1040. | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 1.152.400.000 | | 79.579.822 | | 89.800.000 | | 13.266.842 | 23,81 | 14,77 | | 13.266.842 | 4,00 | 1,15 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 125 | | 15 | | 21 | | 5 | | 23,81 | | 5 | | 4,00 | | | |
| 1041. | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 1.149.699.999 | | 7.985.000 | | 12.999.999 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 5 | | 10 | | 20 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1042. | 1.05.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 1.191.900.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1043.** | **1.05.04** | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | | | **304.627.836.379** | | **2.575.411.291** | | **877.000.000** | | **120.664.236** | **0,63** | **13,76** | | **120.664.236** | **1,20** | **0,04** | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | | 1. Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran, 2. Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kerbakaran | Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran (%) | 100 | | 25 | | 100 | | 21 | | 21,00 | | 21 | | 21,00 | | | |
| 1044. | 1.05.04.2.01 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 302.164.422.376 | | 833.761.983 | | 785.320.000 | | 112.924.236 | 0,00 | 14,38 | | 112.924.236 | 0,00 | 0,04 | | |
| | | Terlaksananya Kegiatan Pencegahan,Pengedalian, Pemadaman,Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Bahaya Beracun Kebakaran Dalam daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1045. | 1.05.04.2.01.0001 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 142.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1046. | 1.05.04.2.01.0002 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 12.700.000.000 | | 274.100.000 | | 390.000.000 | | 48.100.000 | 0,00 | 12,33 | | 48.100.000 | 0,00 | 0,38 | | |
| | | Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1047. | 1.05.04.2.01.0003 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | | | 1.065.000.000 | | 1.460.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1048. | 1.05.04.2.01.0004 | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 208.000.000 | | 445.000 | | 1.200.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1049. | 1.05.04.2.01.0005 | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | | | 136.157.012.303 | | 521.144.483 | | 378.700.000 | | 64.824.236 | 0,00 | 17,12 | | 64.824.236 | 0,00 | 0,05 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1050. | 1.05.04.2.01.0007 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | | | 423.000.000 | | 36.612.500 | | 15.420.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang) | 15 | | 130 | | 500 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1051. | 1.05.04.2.01.0008 | Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) | | | 107.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya | Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan) | 57 | | 0 | | 13 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1052. | 1.05.04.2.01.0017 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | | | 150.556.410.073 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit) | 26 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1053. | 1.05.04.2.01.0018 | Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | | | 141.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1054. | 1.05.04.2.01.0019 | Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga | | | 665.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga (Keluarga) | 245 | | 0 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1055. | 1.05.04.2.02 | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | | | 174.500.000 | | 28.265.000 | | 5.050.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1056. | 1.05.04.2.02.0001 | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | | | 80.000.000 | | 28.265.000 | | 5.050.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen) | 8 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1057. | 1.05.04.2.02.0002 | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | | | 94.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1058. | 1.05.04.2.03 | Investigasi Kejadian Kebakaran | | | 129.100.000 | | 4.685.000 | | 2.400.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1059. | 1.05.04.2.03.0001 | Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran | | | 129.100.000 | | 4.685.000 | | 2.400.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen) | 8 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1060. | 1.05.04.2.04 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | | | 1.912.814.003 | | 1.707.154.308 | | 82.530.000 | | 7.740.000 | 5,00 | 9,38 | | 7.740.000 | 7,19 | 0,40 | | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1061. | 1.05.04.2.04.0001 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | | | 1.587.000.000 | | 1.690.754.308 | | 82.530.000 | | 7.740.000 | 10,00 | 9,38 | | 7.740.000 | 1,56 | 0,49 | | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang) | 3200 | | 500 | | 500 | | 50 | | 10,00 | | 50 | | 1,56 | | | |
| 1062. | 1.05.04.2.04.0002 | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | | | 208.314.003 | | 16.400.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya | Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan) | 45 | | 13 | | 13 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1063. | 1.05.04.2.04.0003 | Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana | | | 117.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 20,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen yang Memuat SKKL Pada Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sarana dan Prasarana | Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 1064. | 1.05.04.2.05 | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia | | | 247.000.000 | | 1.545.000 | | 1.700.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaranaan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1065. | 1.05.04.2.05.0001 | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia | | | 124.500.000 | | 1.545.000 | | 1.700.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1066. | 1.05.04.2.05.0004 | Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | | | 122.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan) | 7 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1067.** | **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **47.409.190.513** | | **5.839.031.862** | | **7.832.267.589** | | **1.822.875.226** | **16,89** | **23,27** | | **1.822.875.226** | **2,62** | **3,84** | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100,00 | | 100 | | 100,00 | | | |
| 1068. | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 988.000.000 | | 8.858.000 | | 14.284.000 | | 4.732.000 | 31,25 | 33,13 | | 4.732.000 | 5,21 | 0,48 | | |
| | | Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1069. | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 155.000.000 | | 8.858.000 | | 14.284.000 | | 4.732.000 | 31,25 | 33,13 | | 4.732.000 | 41,67 | 3,05 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 12 | | 19 | | 16 | | 5 | | 31,25 | | 5 | | 41,67 | | | |
| 1070. | 1.05.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 105.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1071. | 1.05.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 108.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1072. | 1.05.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 105.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1073. | 1.05.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 105.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1074. | 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 105.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 64 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1075. | 1.05.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 150.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1076. | 1.05.01.2.01.0010 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 155.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1077. | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 28.386.694.970 | | 5.657.465.783 | | 7.359.825.589 | | 1.756.840.745 | 50,00 | 23,87 | | 1.756.840.745 | 4,00 | 6,19 | | |
| | | Persentase Tertib Administrasi Keuangan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1078. | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 27.922.434.970 | | 5.652.423.783 | | 7.353.760.589 | | 1.750.775.745 | 0,00 | 23,81 | | 1.750.775.745 | 0,00 | 6,27 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 79 | | 14 | | 129 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1079. | 1.05.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 150.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 28 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1080. | 1.05.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | 93.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | 24 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1081. | 1.05.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 131.260.000 | | 5.042.000 | | 6.065.000 | | 6.065.000 | 100,00 | 100,00 | | 6.065.000 | 20,00 | 4,62 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 90 | | 18 | | 18 | | 18 | | 100,00 | | 18 | | 20,00 | | | |
| 1082. | 1.05.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | 90.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1083. | 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 1.428.003.343 | | 4.991.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1084. | 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 860.503.343 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 625 | | 0 | | 136 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1085. | 1.05.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | 83.500.000 | | 4.991.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 240 | | 4 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1086. | 1.05.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | 77.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) | 308 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1087. | 1.05.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | 77.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 308 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1088. | 1.05.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 330.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1089. | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 4.130.972.200 | | 52.311.000 | | 116.601.000 | | 15.238.199 | 15,37 | 13,07 | | 15.238.199 | 3,10 | 0,37 | | |
| | | Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1090. | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 191.804.000 | | 1.500.000 | | 1.995.000 | | 382.000 | 25,00 | 19,15 | | 382.000 | 3,85 | 0,20 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 26 | | 4 | | 4 | | 1 | | 25,00 | | 1 | | 3,85 | | | |
| 1091. | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 1.483.108.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 63 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1092. | 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 460.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 14 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1093. | 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 503.999.700 | | 14.598.000 | | 15.601.100 | | 3.071.199 | 25,00 | 19,69 | | 3.071.199 | 8,33 | 0,61 | | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | | 4 | | 4 | | 1 | | 25,00 | | 1 | | 8,33 | | | |
| 1094. | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 490.558.800 | | 7.277.100 | | 9.006.600 | | 2.215.000 | 20,00 | 24,59 | | 2.215.000 | 7,69 | 0,45 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 13 | | 5 | | 5 | | 1 | | 20,00 | | 1 | | 7,69 | | | |
| 1095. | 1.05.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 109.200.000 | | 3.990.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1096. | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 892.301.700 | | 24.945.900 | | 89.998.300 | | 9.570.000 | 22,22 | 10,63 | | 9.570.000 | 1,85 | 1,07 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 108 | | 60 | | 9 | | 2 | | 22,22 | | 2 | | 1,85 | | | |
| 1097. | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 7.600.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Ketersedian Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1098. | 1.05.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 500.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1099. | 1.05.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 4.600.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 24 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1100. | 1.05.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 1.350.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 95 | | 0 | | 20 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1101. | 1.05.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 1.150.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 30 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1102. | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.402.100.000 | | 9.593.379 | | 11.500.000 | | 1.914.702 | 8,33 | 16,65 | | 1.914.702 | 1,67 | 0,14 | | |
| | | Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1103. | 1.05.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 105.600.000 | | 600.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1104. | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 326.500.000 | | 8.993.379 | | 11.500.000 | | 1.914.702 | 25,00 | 16,65 | | 1.914.702 | 5,00 | 0,59 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 1105. | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 970.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 48 | | 0 | | 36 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1106. | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.473.420.000 | | 105.812.700 | | 330.057.000 | | 44.149.580 | 27,78 | 13,38 | | 44.149.580 | 1,50 | 1,27 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1107. | 1.05.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 1.020.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 64 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1108. | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 1.140.450.000 | | 102.832.700 | | 271.630.000 | | 43.729.580 | 22,22 | 16,10 | | 43.729.580 | 4,88 | 3,83 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 41 | | 9 | | 9 | | 2 | | 22,22 | | 2 | | 4,88 | | | |
| 1109. | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 562.970.000 | | 2.980.000 | | 58.427.000 | | 420.000 | 33,33 | 0,72 | | 420.000 | 1,14 | 0,07 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 176 | | 6 | | 6 | | 2 | | 33,33 | | 2 | | 1,14 | | | |
| 1110. | 1.05.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 750.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1111.** | **1.05.02** | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | **26.898.627.604** | | **268.895.800** | | **753.055.020** | | **139.212.267** | **28,81** | **18,49** | | **139.212.267** | **2,62** | **0,52** | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| | | 1. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada, 2. Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, 3. Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat, 4. Meningkatnya kapasitas SDM PPNS | Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100,00 | | 100 | | 100,00 | | | |
| 1112. | 1.05.02.2.01 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 21.278.473.104 | | 208.970.800 | | 533.001.900 | | 124.942.267 | 34,94 | 23,44 | | 124.942.267 | 2,50 | 0,59 | | |
| | | Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1113. | 1.05.02.2.01.0008 | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | | | 307.491.600 | | 23.605.000 | | 53.512.300 | | 2.075.000 | 100,00 | 3,88 | | 2.075.000 | 6,25 | 0,67 | | |
| | | Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen) | 16 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 6,25 | | | |
| | | Jumlah pemenuhan peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan Anggota Satlinmas dalam Penegakan Perda/Perkada | Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan. (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1114. | 1.05.02.2.01.0010 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional | | | 2.092.835.359 | | - | | 69.101.000 | | 4.500.000 | 25,00 | 6,51 | | 4.500.000 | 15,04 | 0,22 | | |
| | | Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP bagi Polisi Pamong Praja | Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang) | 226 | | 0 | | 136 | | 34 | | 25,00 | | 34 | | 15,04 | | | |
| 1115. | 1.05.02.2.01.0012 | Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan | | | 250.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | meningkatnya Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Pol PP | Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan. (Orang) | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1116. | 1.05.02.2.01.0013 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat | | | 428.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat | Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya (Orang) | 1555 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1117. | 1.05.02.2.01.0014 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas | | | 335.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas | Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang) | 64 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1118. | 1.05.02.2.01.0025 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja | | | 5.225.053.904 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja | Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang) | 1136 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah Standar Sarana Prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1119. | 1.05.02.2.01.0018 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | 7.719.919.643 | | 15.000.000 | | 18.669.100 | | 13.609.488 | 30,00 | 72,90 | | 13.609.488 | 0,17 | 0,18 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit) | 1724 | | 10 | | 10 | | 3 | | 30,00 | | 3 | | 0,17 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Jumlah pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1120. | 1.05.02.2.01.0017 | Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah | | | 290.155.000 | | 11.675.400 | | 32.664.600 | | 2.450.000 | 23,33 | 7,50 | | 2.450.000 | 3,78 | 0,84 | | |
| | | Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan) | 185 | | 25 | | 30 | | 7 | | 23,33 | | 7 | | 3,78 | | | |
| | | Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1121. | 1.05.02.2.01.0004 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | 467.398.000 | | 3.908.192 | | 52.427.800 | | 1.000.000 | 23,33 | 1,91 | | 1.000.000 | 3,33 | 0,21 | | |
| | | Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) | 210 | | 30 | | 30 | | 7 | | 23,33 | | 7 | | 3,33 | | | |
| 1122. | 1.05.02.2.01.0019 | Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota | | | 225.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbentuknya Satgas Linmas di tingkat Kab/Kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui SK Bupati/Wali Kota | Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen) | 39 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1123. | 1.05.02.2.01.0023 | Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 220.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) | 100 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Persentase Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan<br><br>dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1124. | 1.05.02.2.01.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | | | 674.765.000 | | 19.257.208 | | 52.046.000 | | 2.152.779 | 23,33 | 4,14 | | 2.152.779 | 4,49 | 0,32 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen) | 156 | | 7 | | 30 | | 7 | | 23,33 | | 7 | | 4,49 | | | |
| 1125. | 1.05.02.2.01.0006 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | 680.773.198 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan<br><br>dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen) | 108 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1126. | 1.05.02.2.01.0015 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | | | 1.398.701.100 | | 106.625.000 | | 103.581.100 | | 61.090.000 | 27,27 | 58,98 | | 61.090.000 | 1,04 | 4,37 | | |
| | | Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan) | 577 | | 22 | | 22 | | 6 | | 27,27 | | 6 | | 1,04 | | | |
| 1127. | 1.05.02.2.01.0016 | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | | | 785.195.300 | | 28.900.000 | | 151.000.000 | | 38.065.000 | 27,27 | 25,21 | | 38.065.000 | 5,88 | 4,85 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan) | 102 | | 31 | | 22 | | 6 | | 27,27 | | 6 | | 5,88 | | | |
| 1128. | 1.05.02.2.01.0022 | Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | | | 178.185.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen pemetaan Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal | Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal (Dokumen) | 140 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1129. | 1.05.02.2.02 | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | | | 4.818.426.600 | | 46.090.000 | | 119.276.060 | | 13.200.000 | 25,00 | 11,07 | | 13.200.000 | 0,83 | 0,27 | | |
| | | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1130. | 1.05.02.2.02.0006 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti) | | | 2.705.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (unit) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1131. | 1.05.02.2.02.0007 | Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | 209.040.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) | 100 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1132. | 1.05.02.2.02.0008 | Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah | | | 165.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah | Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan) | 31 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1133. | 1.05.02.2.02.0009 | Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah | | | 140.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda | Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1134. | 1.05.02.2.02.0010 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | 460.421.300 | | 16.640.000 | | 39.481.960 | | 3.250.000 | 25,00 | 8,23 | | 3.250.000 | 1,14 | 0,71 | | |
| | | Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) | 264 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 1,14 | | | |
| 1135. | 1.05.02.2.02.0011 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | | | 666.665.400 | | 25.060.000 | | 64.364.800 | | 7.705.000 | 25,00 | 11,97 | | 7.705.000 | 3,35 | 1,16 | | |
| | | Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan) | 179 | | 10 | | 24 | | 6 | | 25,00 | | 6 | | 3,35 | | | |
| 1136. | 1.05.02.2.02.0012 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | 472.299.900 | | 4.390.000 | | 15.429.300 | | 2.245.000 | 25,00 | 14,55 | | 2.245.000 | 1,30 | 0,48 | | |
| | | TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) | 230 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 1,30 | | | |
| 1137. | 1.05.02.2.03 | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | | | 801.727.900 | | 13.835.000 | | 100.777.060 | | 1.070.000 | 10,00 | 1,06 | | 1.070.000 | 6,25 | 0,13 | | |
| | | Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya | Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1138. | 1.05.02.2.03.0002 | Pembentukan Sekretariat PPNS | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbentuknya Sekretariat PPNS | Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1139. | 1.05.02.2.03.0003 | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah | | | 175.000.000 | | 5.660.000 | | 16.220.060 | | 1.070.000 | 20,00 | 6,60 | | 1.070.000 | 25,00 | 0,61 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen) | 4 | | 2 | | 5 | | 1 | | 20,00 | | 1 | | 25,00 | | | |
| 1140. | 1.05.02.2.03.0004 | Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah | | | 400.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan) | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1141. | 1.05.02.2.03.0006 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | | | 206.727.900 | | 8.175.000 | | 84.557.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan) | 4 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1142. | **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **33.371.309.585** | | **6.118.482.518** | | **5.626.362.897** | | **68.588.653** | **13,00** | **1,22** | | **68.588.653** | **2,65** | **0,21** | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100,00 | | 100 | | 100,00 | | | |
| 1143. | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 363.379.000 | | 3.786.465.807 | | 3.000.000 | | 3.490.000 | 14,29 | 116,33 | | 3.490.000 | 1,67 | 0,96 | | |
| | | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1144. | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 129.682.000 | | 3.786.465.807 | | 3.000.000 | | 3.490.000 | 28,57 | 116,33 | | 3.490.000 | 6,67 | 2,69 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 30 | | 6 | | 7 | | 2 | | 28,57 | | 2 | | 6,67 | | | |
| 1145. | 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 133.697.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 30 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1146. | 1.05.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 53.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1147. | 1.05.01.2.01.0010 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 47.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1148. | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 16.898.368.009 | | 1.963.544.192 | | 5.364.241.897 | | 5.234.000 | 19,58 | 0,10 | | 5.234.000 | 6,56 | 0,03 | | |
| | | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1149. | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 16.620.364.009 | | 1.937.274.192 | | 5.346.124.897 | | - | 33,33 | 0,00 | | - | 1,23 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 325 | | 11 | | 12 | | 4 | | 33,33 | | 4 | | 1,23 | | | |
| 1150. | 1.05.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 156.520.000 | | 26.270.000 | | 15.120.000 | | 3.780.000 | 25,00 | 25,00 | | 3.780.000 | 5,00 | 2,42 | | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 60 | | 10 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 1151. | 1.05.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 68.984.000 | | - | | 2.997.000 | | 1.454.000 | 20,00 | 48,52 | | 1.454.000 | 20,00 | 2,11 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 5 | | 0 | | 5 | | 1 | | 20,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 1152. | 1.05.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | 52.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 5 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1153. | 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 1.052.590.000 | | - | | 3.008.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1154. | 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 570.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 380 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1155. | 1.05.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | 153.476.000 | | - | | 3.008.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1156. | 1.05.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 235.114.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 45 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1157. | 1.05.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 94.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1158. | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.678.544.388 | | 152.864.600 | | 68.321.500 | | 22.076.200 | 7,36 | 32,31 | | 22.076.200 | 3,96 | 1,32 | | |
| | | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1159. | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 76.491.000 | | - | | 490.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 25 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1160. | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 401.727.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 25 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1161. | 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 131.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1162. | 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 231.040.800 | | 65.821.100 | | 23.475.500 | | 4.160.600 | 20,00 | 17,72 | | 4.160.600 | 20,00 | 1,80 | | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 4 | | 5 | | 1 | | 20,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 1163. | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 171.560.000 | | - | | 14.018.000 | | 2.312.400 | 20,00 | 16,50 | | 2.312.400 | 10,00 | 1,35 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 10 | | 0 | | 5 | | 1 | | 20,00 | | 1 | | 10,00 | | | |
| 1164. | 1.05.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 104.150.000 | | 1.323.000 | | 750.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 60 | | 1 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1165. | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 510.475.588 | | 85.720.500 | | 29.588.000 | | 15.603.200 | 4,17 | 52,73 | | 15.603.200 | 1,67 | 3,06 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 60 | | 62 | | 24 | | 1 | | 4,17 | | 1 | | 1,67 | | | |
| 1166. | 1.05.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | 52.100.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1167. | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 11.568.954.688 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1168. | 1.05.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 1.800.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1169. | 1.05.01.2.07.0003 | Pengadaan Alat Besar | | | 3.622.635.688 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Alat Besar | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1170. | 1.05.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 264.266.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 10 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1171. | 1.05.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 212.400.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1172. | 1.05.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 5.500.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1173. | 1.05.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 81.153.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 10 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1174. | 1.05.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 88.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1175. | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 450.800.000 | | 101.394.047 | | 99.480.000 | | 20.484.993 | 15,00 | 20,59 | | 20.484.993 | 2,22 | 4,54 | | |
| | | Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1176. | 1.05.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 7.800.000 | | - | | 500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 60 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1177. | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 249.000.000 | | 68.449.047 | | 62.980.000 | | 14.484.993 | 25,00 | 23,00 | | 14.484.993 | 5,00 | 5,82 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 10 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 1178. | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 194.000.000 | | 32.945.000 | | 36.000.000 | | 6.000.000 | 20,00 | 16,67 | | 6.000.000 | 1,67 | 3,09 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 3 | | 5 | | 1 | | 20,00 | | 1 | | 1,67 | | | |
| 1179. | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.358.673.500 | | 114.213.872 | | 88.311.500 | | 17.303.460 | 30,00 | 19,59 | | 17.303.460 | 4,33 | 1,27 | | |
| | | Meniingkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1180. | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 743.657.500 | | 100.473.628 | | 82.017.500 | | 17.228.460 | 40,00 | 21,01 | | 17.228.460 | 5,00 | 2,32 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 40 | | 7 | | 5 | | 2 | | 40,00 | | 2 | | 5,00 | | | |
| 1181. | 1.05.01.2.09.0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | | | 170.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1182. | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 71.040.000 | | 13.740.244 | | 5.250.000 | | 75.000 | 50,00 | 1,43 | | 75.000 | 16,67 | 0,11 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 6 | | 4 | | 2 | | 1 | | 50,00 | | 1 | | 16,67 | | | |
| 1183. | 1.05.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 217.976.000 | | - | | 1.044.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 5 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1184. | 1.05.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 156.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1185. | **1.05.03** | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | | | **95.689.434.554** | | **13.450.000** | | **485.368.200** | | **18.498.568** | **17,75** | **3,81** | | **18.498.568** | **6,26** | **0,02** | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| | | 1. Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, 2. meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap daeurat, 2. meninfkatnya penanganan bencana pada saat pasca benca | Persentase penanganan tanggap darurat bencana (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100,00 | | 100 | | 100,00 | | | |
| | | | Persentase penanganan pasca bencana (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100,00 | | 100 | | 100,00 | | | |
| | | | Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100,00 | | 100 | | 100,00 | | | |
| 1186. | 1.05.03.2.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | | | 5.854.818.800 | | - | | 65.763.000 | | 12.420.000 | 1,00 | 18,89 | | 12.420.000 | 0,10 | 0,21 | | |
| | | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1187. | 1.05.03.2.01.0007 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | | | 3.779.818.800 | | - | | 65.763.000 | | 12.420.000 | 1,00 | 18,89 | | 12.420.000 | 0,20 | 0,33 | | |
| | | Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang) | 500 | | 0 | | 100 | | 1 | | 1,00 | | 1 | | 0,20 | | | |
| 1188. | 1.05.03.2.01.0008 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | | | 2.075.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal | Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1189. | 1.05.03.2.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | 57.270.958.140 | | - | | 325.575.000 | | 6.078.568 | 37,60 | 1,87 | | 6.078.568 | 18,75 | 0,01 | | |
| | | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1190. | 1.05.03.2.02.0013 | Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota | | | 7.875.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan) | 5 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1191. | 1.05.03.2.02.0015 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | | | 3.975.326.500 | | - | | 41.534.000 | | 449.528 | 10,00 | 1,08 | | 449.528 | 1,25 | 0,01 | | |
| | | Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit) | 80 | | 0 | | 10 | | 1 | | 10,00 | | 1 | | 1,25 | | | |
| 1192. | 1.05.03.2.02.0018 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | | | 2.105.411.096 | | - | | 39.035.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana | Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang) | 750 | | 0 | | 150 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1193. | 1.05.03.2.02.0019 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | | | 1.330.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga) | 250 | | 0 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1194. | 1.05.03.2.02.0020 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | | | 2.387.873.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana | Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1195. | 1.05.03.2.02.0021 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | | | 2.000.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana | Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang) | 200 | | 0 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1196. | 1.05.03.2.02.0022 | Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota | | | 8.950.001.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal | Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1197. | 1.05.03.2.02.0023 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana | | | 12.430.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1198. | 1.05.03.2.02.0026 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | | | 12.123.245.000 | | - | | 199.866.000 | | 5.629.040 | 60,00 | 2,82 | | 5.629.040 | 5,00 | 0,05 | | |
| | | Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan) | 60 | | 0 | | 5 | | 3 | | 60,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 1199. | 1.05.03.2.02.0027 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | | | 2.000.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1200. | 1.05.03.2.02.0028 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | | | 2.094.101.544 | | - | | 45.140.000 | | - | 230,77 | 0,00 | | - | 200,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan) | 15 | | 0 | | 13 | | 30 | | 230,77 | | 30 | | 200,00 | | | |
| 1201. | 1.05.03.2.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | 14.142.199.614 | | 13.450.000 | | 8.604.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1202. | 1.05.03.2.03.0001 | Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas | | | 2.595.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas | Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1203. | 1.05.03.2.03.0002 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | | | 1.800.000.000 | | - | | 2.964.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam | Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen) | 48 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1204. | 1.05.03.2.03.0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | 1.806.407.525 | | - | | 5.640.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang) | 40 | | 0 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1205. | 1.05.03.2.03.0007 | Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota | | | 646.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1206. | 1.05.03.2.03.0008 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota | | | 1.642.479.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota | Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang) | 120 | | 0 | | 89 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1207. | 1.05.03.2.03.0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | 1.640.158.025 | | 13.450.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang) | 200 | | 3 | | 200 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1208. | 1.05.03.2.03.0010 | Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit | | | 2.537.155.064 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam | Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen) | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1209. | 1.05.03.2.03.0012 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | | | 1.475.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan) | 20 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1210. | 1.05.03.2.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | | | 18.421.458.000 | | - | | 85.426.200 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1211. | 1.05.03.2.04.0001 | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | | | 975.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah | Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1212. | 1.05.03.2.04.0003 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | | | 610.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana | Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1213. | 1.05.03.2.04.0004 | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | | | 6.274.693.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan | Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1214. | 1.05.03.2.04.0005 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | | | 2.300.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1215. | 1.05.03.2.04.0007 | Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | | | 757.357.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana) | Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang) | 40 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1216. | 1.05.03.2.04.0008 | Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota | | | 2.492.550.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknnis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) | Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang) | 200 | | 0 | | 30 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1217. | 1.05.03.2.04.0010 | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | | | 1.662.882.500 | | - | | 85.426.200 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota | Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan) | 4 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1218. | 1.05.03.2.04.0011 | Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | | | 1.687.608.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota | Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga) | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1219. | 1.05.03.2.04.0012 | Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota | | | 782.882.500 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan bencana | Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1220. | 1.05.03.2.04.0014 | Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota | | | 454.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal | Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1221. | 1.05.03.2.04.0015 | Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota | | | 394.485.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal | Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1222. | 1.05.03.2.04.0016 | Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota | | | 30.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **1.06** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | **77.924.035.832** | | **6.767.321.997** | | **5.373.439.929** | | **1.008.723.607** | **1,67** | **18,77** | | **1.008.723.607** | **0,13** | **1,29** | | |
| **1223.** | **1.06.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **30.688.415.500** | | **3.921.102.778** | | **4.306.639.929** | | **986.142.429** | **4,17** | **22,90** | | **986.142.429** | **0,25** | **3,21** | DINAS SOSIAL | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 11,6 | | 11,60 | | 11,6 | | 11,60 | | | |
| 1224. | 1.06.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 372.700.000 | | 13.946.700 | | 6.925.000 | | - | 50,00 | 0,00 | | - | 1,43 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1225. | 1.06.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 121.700.000 | | 8.211.900 | | 6.925.000 | | - | 50,00 | 0,00 | | - | 10,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 10 | | 2 | | 2 | | 1 | | 50,00 | | 1 | | 10,00 | | | |
| 1226. | 1.06.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 22.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1227. | 1.06.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 22.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1228. | 1.06.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 22.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1229. | 1.06.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 22.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1230. | 1.06.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 140.000.000 | | 5.734.800 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 75 | | 15 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1231. | 1.06.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 21.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1232. | 1.06.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 18.778.267.876 | | 3.734.401.933 | | 4.063.039.929 | | 961.292.435 | 0,00 | 23,66 | | 961.292.435 | 0,00 | 5,12 | | |
| | | Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan Laporan OPD | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1233. | 1.06.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 18.687.767.876 | | 3.734.401.933 | | 4.063.039.929 | | 961.292.435 | 0,00 | 23,66 | | 961.292.435 | 0,00 | 5,14 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 38 | | 38 | | 59 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1234. | 1.06.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 21.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 36 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1235. | 1.06.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 24.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1236. | 1.06.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 21.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 48 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1237. | 1.06.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | 24.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1238. | 1.06.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 44.479.000 | | 2.246.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1239. | 1.06.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | 21.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1240. | 1.06.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 23.479.000 | | 2.246.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 10 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1241. | 1.06.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 129.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1242. | 1.06.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 77.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 154 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1243. | 1.06.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 52.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 14 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1244. | 1.06.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.174.762.600 | | 51.508.039 | | 62.315.000 | | 14.057.490 | 0,00 | 22,56 | | 14.057.490 | 0,00 | 1,20 | | |
| | | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1245. | 1.06.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 107.081.000 | | 1.500.000 | | 2.847.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1246. | 1.06.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 42.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 48 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1247. | 1.06.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 42.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 48 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1248. | 1.06.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 232.984.900 | | 12.476.000 | | 14.657.700 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1249. | 1.06.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 116.312.700 | | 8.079.200 | | 8.542.300 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1250. | 1.06.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 34.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 48 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1251. | 1.06.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 75.000.000 | | 4.723.430 | | 4.995.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1252. | 1.06.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 525.384.000 | | 24.729.409 | | 31.273.000 | | 14.057.490 | 0,00 | 44,95 | | 14.057.490 | 0,00 | 2,68 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1253. | 1.06.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 6.106.512.000 | | 3.970.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1254. | 1.06.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 1.540.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1255. | 1.06.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 1.070.408.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1256. | 1.06.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 622.043.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 66 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1257. | 1.06.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 727.607.000 | | 3.970.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 28 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1258. | 1.06.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 2.146.454.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1259. | 1.06.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 884.634.530 | | 22.549.326 | | 104.700.000 | | 5.205.254 | 0,00 | 4,97 | | 5.205.254 | 0,00 | 0,59 | | |
| | | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1260. | 1.06.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 9.750.000 | | 500.000 | | 500.000 | | 100.000 | 0,00 | 20,00 | | 100.000 | 0,00 | 1,03 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 60 | | 12 | | 6 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1261. | 1.06.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 216.442.000 | | 22.049.326 | | 25.000.000 | | 5.105.254 | 0,00 | 20,42 | | 5.105.254 | 0,00 | 2,36 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1262. | 1.06.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 24.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 48 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1263. | 1.06.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 634.442.530 | | - | | 79.200.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1264. | 1.06.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.198.059.494 | | 92.480.780 | | 69.660.000 | | 5.587.250 | 0,00 | 8,02 | | 5.587.250 | 0,00 | 0,17 | | |
| | | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1265. | 1.06.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 164.380.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1266. | 1.06.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 1.326.209.800 | | 87.690.780 | | 63.650.000 | | 5.587.250 | 0,00 | 8,78 | | 5.587.250 | 0,00 | 0,42 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 45 | | 5 | | 15 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1267. | 1.06.01.2.09.0004 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | | | 30.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1268. | 1.06.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | 22.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1269. | 1.06.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 128.850.000 | | 4.790.000 | | 6.010.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 54 | | 6 | | 9 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1270. | 1.06.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 1.226.619.694 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1271. | 1.06.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 300.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1272.** | **1.06.02** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | | | **4.737.502.800** | | **-** | | **5.000.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS SOSIAL | |
| | | Meningkatnya pemberdayaan sosial | Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial (%) | 20 | | 20 | | 20 | | 5 | | 25,00 | | 5 | | 25,00 | | | |
| | | | Persentase PSKS yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial (%) | 20 | | 20 | | 20 | | 5 | | 25,00 | | 5 | | 25,00 | | | |
| | | | Persentase PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 25 | | 25,00 | | 25 | | 25,00 | | | |
| | | | Persentase PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial bagi PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 25 | | 25,00 | | 25 | | 25,00 | | | |
| | | | Persentase PSKS yang melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 25 | | 25,00 | | 25 | | 25,00 | | | |
| 1273. | 1.06.02.2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | | | 4.737.502.800 | | - | | 5.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial | Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1274. | 1.06.02.2.03.0003 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 1.322.860.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga) | 80 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1275. | 1.06.02.2.03.0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 1.113.000.000 | | - | | 5.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1276. | 1.06.02.2.03.0012 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | | | 242.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 71 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1277. | 1.06.02.2.03.0014 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 2.059.642.800 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya (Orang) | 469 | | 0 | | 93 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1278.** | **1.06.04** | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | | | **34.135.612.807** | | **2.514.649.781** | | **518.650.000** | | **15.376.174** | **0,00** | **2,96** | | **15.376.174** | **0,00** | **0,05** | DINAS SOSIAL | |
| | | Meningkatnya rehabilitasi sosial | Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%) | 25 | | 25 | | 25 | | 4 | | 16,00 | | 4 | | 16,00 | | | |
| | | | Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%) | 25 | | 25 | | 25 | | 3 | | 12,00 | | 3 | | 12,00 | | | |
| | | | Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%) | 25 | | 25 | | 25 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%) | 25 | | 25 | | 25 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%) | 20 | | 20 | | 20 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1279. | 1.06.04.2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | | | 21.911.329.377 | | 685.492.749 | | 496.850.000 | | 15.376.174 | 0,00 | 3,09 | | 15.376.174 | 0,00 | 0,07 | | |
| | | Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1280. | 1.06.04.2.01.0012 | Pemberian Layanan Rujukan | | | 607.834.000 | | 7.052.000 | | 25.000.000 | | 2.535.000 | 0,00 | 10,14 | | 2.535.000 | 0,00 | 0,42 | | |
| | | Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 210 | | 78 | | 15 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1281. | 1.06.04.2.01.0004 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | 673.302.740 | | - | | 15.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 650 | | 0 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1282. | 1.06.04.2.01.0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | | | 859.185.000 | | 68.075.443 | | 25.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 155 | | 12 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1283. | 1.06.04.2.01.0006 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | | | 411.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 95 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1284. | 1.06.04.2.01.0008 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | 14.899.497.746 | | 544.236.602 | | 35.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 14550 | | 595 | | 30 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1285. | 1.06.04.2.01.0010 | Pemberian Layanan Kedaruratan | | | 140.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1286. | 1.06.04.2.01.0011 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | | | 140.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah warga negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1287. | 1.06.04.2.01.0001 | Penyediaan Permakanan | | | 1.739.898.016 | | 11.221.200 | | 290.750.000 | | 12.141.174 | 0,00 | 4,18 | | 12.141.174 | 0,00 | 0,70 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 1375 | | 10 | | 277 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah Warga Negara/ Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1288. | 1.06.04.2.01.0002 | Penyediaan Sandang | | | 1.058.611.875 | | 10.300.516 | | 56.100.000 | | 700.000 | 0,00 | 1,25 | | 700.000 | 0,00 | 0,07 | | |
| | | Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 665 | | 8 | | 17 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah warga negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1289. | 1.06.04.2.01.0003 | Penyediaan Alat Bantu | | | 1.382.000.000 | | 44.606.988 | | 50.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 690 | | 43 | | 40 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1290. | 1.06.04.2.02 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | | | 12.224.283.430 | | 1.829.157.032 | | 21.800.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1291. | 1.06.04.2.02.0007 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | | | 1.438.552.200 | | 449.846.873 | | 21.800.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 230 | | 99 | | 154 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1292. | 1.06.04.2.02.0008 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | | | 2.881.229.200 | | 1.264.749.309 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlakasananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 529 | | 192 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1293. | 1.06.04.2.02.0010 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | 7.569.502.030 | | 114.560.850 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 326 | | 79 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1294. | 1.06.04.2.02.0012 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | 110.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1295. | 1.06.04.2.02.0014 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | | | 225.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen) | 48 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1296.** | **1.06.05** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | | | **3.058.315.329** | | **-** | | **12.278.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS SOSIAL | |
| | | Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial | Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 25 | | 25,00 | | 25 | | 25,00 | | | |
| | | | Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi (%) | 0,67 | | 0,67 | | 0,67 | | 0,1 | | 14,93 | | 0,1 | | 14,93 | | | |
| | | | Persentase Kecamatan yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 30 | | 30,00 | | 30 | | 30,00 | | | |
| | | | Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%) | 1,34 | | 1,34 | | 1,34 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1297. | 1.06.05.2.01 | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | | | 247.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Pemeliharaan Anak Terlantar | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1298. | 1.06.05.2.01.0001 | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar | | | 83.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 43 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1299. | 1.06.05.2.01.0002 | Rujukan Anak-Anak Terlantar | | | 82.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 41 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1300. | 1.06.05.2.01.0003 | Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar | | | 82.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 41 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1301. | 1.06.05.2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.811.315.329 | | - | | 12.278.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1302. | 1.06.05.2.02.0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | 521.000.000 | | - | | 12.278.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang) | 1371590 | | 0 | | 279510 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1303. | 1.06.05.2.02.0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | | | 806.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 163 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1304. | 1.06.05.2.02.0006 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | | | 1.098.315.329 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 87258 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1305. | 1.06.05.2.02.0008 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | 386.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan) | 3000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1306.** | **1.06.06** | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | | | **4.678.561.896** | | **292.427.028** | | **503.150.000** | | **7.205.004** | **0,00** | **1,43** | | **7.205.004** | **0,00** | **0,15** | DINAS SOSIAL | |
| | | Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana | Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 12 | | 12,00 | | 12 | | 12,00 | | | |
| | | | Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 25 | | 25,00 | | 25 | | 25,00 | | | |
| | | | Persentase korban bencana yang mendapat layanan pemulihan sosial (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 25 | | 25,00 | | 25 | | 25,00 | | | |
| 1307. | 1.06.06.2.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | | | 3.529.861.896 | | 292.427.028 | | 503.150.000 | | 7.205.004 | 0,00 | 1,43 | | 7.205.004 | 0,00 | 0,20 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1308. | 1.06.06.2.01.0001 | Penyediaan Makanan | | | 1.309.713.096 | | 213.731.769 | | 270.850.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 1173 | | 272 | | 228 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Persentase Korban Bencana yang Tertangani | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1309. | 1.06.06.2.01.0002 | Penyediaan Sandang | | | 949.974.600 | | 73.870.259 | | 157.300.000 | | 7.205.004 | 0,00 | 4,58 | | 7.205.004 | 0,00 | 0,76 | | |
| | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 700 | | 41 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1310. | 1.06.06.2.01.0004 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | | | 145.510.000 | | 4.825.000 | | 25.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 53 | | 2 | | 9 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1311. | 1.06.06.2.01.0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial | | | 324.664.200 | | - | | 50.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 250 | | 0 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1312. | 1.06.06.2.01.0007 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | | | 800.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 52 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1313. | 1.06.06.2.02 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | | | 1.148.700.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadapKesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1314. | 1.06.06.2.02.0001 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | | | 748.700.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung) | 180 | | 0 | | 20 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1315. | 1.06.06.2.02.0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | | | 400.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 128 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1316.** | **1.06.07** | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | | | **625.627.500** | | **39.142.410** | | **27.722.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS SOSIAL | |
| | | Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan | Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik (%) | 95 | | 95 | | 95 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1317. | 1.06.07.2.01 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | 625.627.500 | | 39.142.410 | | 27.722.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Makam Pahlawan yang Terkelola dengan Baik | Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1318. | 1.06.07.2.01.0001 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | 252.827.500 | | 39.142.410 | | 27.722.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1319. | 1.06.07.2.01.0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | 200.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1320. | 1.06.07.2.01.0003 | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | 172.800.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **2.07** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | **15.889.450.581** | | **2.083.973.949** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | |
| **1321.** | **2.07.02** | **PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA** | | | **87.000.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terkelolanya informasi tenaga kerja | Jumlah dokumen rencana tenaga kerja daerah (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1322. | 2.07.02.2.01 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | | | 87.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah dokumen RTK Makro | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1323. | 2.07.02.2.01.0001 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | | | 87.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1324.** | **2.07.03** | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | | | **9.863.003.934** | | **2.082.784.049** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | |
| | | Meningkatnya produktivitas tenaga kerja | Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktifitasnya (%) | 100 | | 90,64 | | 60 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1325. | 2.07.03.2.01 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | | | 9.422.430.334 | | 2.082.784.049 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1326. | 2.07.03.2.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | 3.879.166.164 | | 2.082.784.049 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang) | 672 | | 347 | | 32 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas | Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1327. | 2.07.03.2.01.0002 | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | | | 207.737.800 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga) | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1328. | 2.07.03.2.01.0003 | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | | | 5.335.526.370 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1329. | 2.07.03.2.04 | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil | | | 214.473.600 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas | Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1330. | 2.07.03.2.04.0001 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | | | 214.473.600 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan) | 28 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1331. | 2.07.03.2.05 | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 226.100.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1332. | 2.07.03.2.05.0001 | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | | | 226.100.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1333.** | **2.07.04** | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | | | **3.449.446.647** | | **1.189.900** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | |
| | | Meningkatnya penempatan tenaga kerja | persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negri (%) | 100 | | 2,5 | | 60 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1334. | 2.07.04.2.01 | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.449.446.647 | | 1.189.900 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan melalui Bimtrk dan lain lain untuk Peningkatan Kompetensi | Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1335. | 2.07.04.2.01.0001 | Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja | | | 120.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya SDM Pelayanan antar Kerja (Pengantar Kerja dan Petugas antar Kerja) | Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi (Orang) | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan melalui Pelayanan AKAD dan AKL | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1336. | 2.07.04.2.01.0002 | Pelayanan antar Kerja | | | 800.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terwujudnya Pelayanan antar Kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang) | 400 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1337. | 2.07.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | | | 600.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang) | 200 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1338. | 2.07.04.2.01.0005 | Perluasan Kesempatan Kerja | | | 929.446.647 | | 1.189.900 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang) | 520 | | 28 | | 16 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1339. | 2.07.04.2.03 | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | | | 1.000.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1340. | 2.07.04.2.03.0003 | Job Fair/Bursa Kerja | | | 1.000.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang) | 400 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1341.** | **2.07.05** | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | | | **2.490.000.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi | Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (%) | 100 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1342. | 2.07.05.2.01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 930.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan Data LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1343. | 2.07.05.2.01.0003 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | | | 420.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP Online | Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1344. | 2.07.05.2.01.0001 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | | | 310.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online | Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan) | 40 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1345. | 2.07.05.2.01.0002 | Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan | | | 200.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan) | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1346. | 2.07.05.2.02 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.560.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselesaikannya perselisihan HI, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berdampak pada kepentingan di Kab. 50 Kota | Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1347. | 2.07.05.2.02.0002 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 200.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara) | 40 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Terselenggaranya verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi | Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1348. | 2.07.05.2.02.0003 | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | | | 200.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja) | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Terlaksananya operasional lembaga tripartit daerah | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1349. | 2.07.05.2.02.0004 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | | | 160.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga) | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Terlaksananya pengembangan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja | Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1350. | 2.07.05.2.02.0005 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | | | 400.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang) | 400 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Terlaksananya pencegahan perselisihan HI, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berdampak pada kepentingan di Kab. 50 Kota | Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1351. | 2.07.05.2.02.0001 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 600.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara) | 40 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **2.08** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | **11.552.682.385** | | **-** | | **673.000.000** | | **1.400.200** | **0,00** | **0,21** | | **1.400.200** | **0,00** | **0,01** | | |
| **1352.** | **2.08.02** | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | | | **3.580.787.710** | | **-** | | **140.000.000** | | **1.400.200** | **0,00** | **1,00** | | **1.400.200** | **0,00** | **0,04** | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| | | Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase) | 5,98 | | 5,2 | | 4,78 | | 1,01 | | 21,13 | | 1,01 | | 16,89 | | | |
| | | | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%) | 79,3 | | 64,3 | | 69,30 | | 1,01 | | 1,46 | | 1,01 | | 1,27 | | | |
| 1353. | 2.08.02.2.01 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 1.138.036.710 | | - | | 20.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan PUG | Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1354. | 2.08.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG | | | 146.691.620 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 202 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1355. | 2.08.02.2.01.0007 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 149.078.100 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota | Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan) | 202 | | 0 | | 43 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1356. | 2.08.02.2.01.0010 | Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 148.078.100 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi | Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan) | 40 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1357. | 2.08.02.2.01.0011 | Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 148.078.100 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) | 172 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1358. | 2.08.02.2.01.0012 | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota | | | 148.078.100 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1359. | 2.08.02.2.01.0013 | Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota | | | 262.078.100 | | - | | 20.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) | 227 | | 0 | | 43 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1360. | 2.08.02.2.01.0014 | Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 135.954.590 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | terlaksananya bimtek penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang) | 850 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1361. | 2.08.02.2.02 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 1.225.896.100 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Persentase Perempuan yang berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi (Manajerial/Jabatan Pimpinan pratama dan administrator ) pada lembaga pemerintah | Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi (Lembaga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1362. | 2.08.02.2.02.0003 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | | | 142.649.800 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/ kota | Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga) | 120 | | 0 | | 30 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1363. | 2.08.02.2.02.0005 | Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 142.649.800 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi (Lembaga) | 124 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1364. | 2.08.02.2.02.0006 | Pendampinganlembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 142.649.800 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) | 124 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1365. | 2.08.02.2.02.0007 | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 142.649.800 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan) | 37 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1366. | 2.08.02.2.02.0008 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 272.649.800 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang) | 1300 | | 0 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1367. | 2.08.02.2.02.0009 | Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 382.647.100 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang) | 500 | | 0 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1368. | 2.08.02.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 1.216.854.900 | | - | | 120.000.000 | | 1.400.200 | 0,00 | 1,17 | | 1.400.200 | 0,00 | 0,12 | | |
| | | Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan pemberdayaan perempuan | jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (Lembaga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1369. | 2.08.02.2.03.0007 | pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota | | | 382.680.120 | | - | | 120.000.000 | | 1.400.200 | 0,00 | 1,17 | | 1.400.200 | 0,00 | 0,37 | | |
| | | terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) | 168 | | 0 | | 30 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1370. | 2.08.02.2.03.0008 | penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota | | | 208.545.120 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen) | 38 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1371. | 2.08.02.2.03.0009 | monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota | | | 208.545.120 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan) | 38 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1372. | 2.08.02.2.03.0010 | Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi | | | 208.545.120 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi | jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (orang) | 840 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1373. | 2.08.02.2.03.0011 | mengamati, menilai, dan melaporkan efektivitas program dan kegiatan lembaga penyedia layanan dalam memberdayakan perempuan, dengan fokus pada pengumpulan data, analisis pencapaian, identifikasi tantangan, serta penyusunan laporan yang memberikan gambaran tentang dampak dan kinerja lembaga dalam meningkatkan kualitas layanan di tingkat kabupaten/kota. | | | 208.539.420 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (Lembaga) | 172 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1374.** | **2.08.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | | | **1.727.807.687** | | **-** | | **111.884.300** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| | | Menurunnya kekerasan terhadap perempuan | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%) | 100 | | 85 | | 85,50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1375. | 2.08.03.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | 803.519.878 | | - | | 55.044.300 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah lembaga/lintas sektor yang melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi (Kebijakan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1376. | 2.08.03.2.01.0003 | monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 28.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan) | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1377. | 2.08.03.2.01.0004 | Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 283.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 23 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1378. | 2.08.03.2.01.0005 | Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi | | | 28.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP | Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (orang) | 960 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1379. | 2.08.03.2.01.0006 | Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 436.519.878 | | - | | 55.044.300 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga) | 100 | | 0 | | 25 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1380. | 2.08.03.2.01.0007 | Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 28.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi (Kebijakan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1381. | 2.08.03.2.02 | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 410.700.000 | | - | | 36.640.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan komprehensif | Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1382. | 2.08.03.2.02.0003 | &layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota& | | | 85.000.000 | | - | | 7.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | &Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota& | Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang) | 13 | | 0 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1383. | 2.08.03.2.02.0004 | layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | 30.000.000 | | - | | 3.250.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota (Orang) | 101 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1384. | 2.08.03.2.02.0005 | layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | 46.250.000 | | - | | 4.350.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang) | 44 | | 0 | | 15 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1385. | 2.08.03.2.02.0006 | layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | 123.100.000 | | - | | 7.600.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) | 20 | | 0 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1386. | 2.08.03.2.02.0007 | layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota | | | 22.000.000 | | - | | 2.325.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (orang) | 30 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1387. | 2.08.03.2.02.0008 | Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | 47.500.000 | | - | | 6.615.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang) | 68 | | 0 | | 15 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1388. | 2.08.03.2.02.0009 | Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | 56.850.000 | | - | | 5.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang) | 67 | | 0 | | 15 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1389. | 2.08.03.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 513.587.809 | | - | | 20.200.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase lembaga layanan yang terlatih bagi perempuan | Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1390. | 2.08.03.2.03.0005 | Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 24.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1391. | 2.08.03.2.03.0006 | Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota | | | 24.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi (Laporan) | 15 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1392. | 2.08.03.2.03.0007 | pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota | | | 24.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Orang) | 40 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1393. | 2.08.03.2.03.0008 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 264.000.000 | | - | | 20.200.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang) | 1200 | | 0 | | 200 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1394. | 2.08.03.2.03.0009 | Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 177.587.809 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Dokumen) | 20 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1395.** | **2.08.04** | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | | | **582.444.418** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| | | Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak | PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) YANG BERSPEKTIF GENDER DAN HAK ANAK SESUAI STANDAR (Unit) | 80 | | 20 | | 30 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1396. | 2.08.04.2.01 | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 163.244.418 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Jumlah Keluarga yang mendapatkan pembelajaran dalam mewujudakan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat daerah | Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Kebijakan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1397. | 2.08.04.2.01.0004 | Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | | | 40.811.106 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga) | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1398. | 2.08.04.2.01.0005 | Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 40.811.104 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Kebijakan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1399. | 2.08.04.2.01.0006 | Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. | | | 40.811.104 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentinganKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 21 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1400. | 2.08.04.2.01.0007 | monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 40.811.104 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1401. | 2.08.04.2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 269.600.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan yang mendapatkan advokasi dan pendampingan untuk Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten | Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1402. | 2.08.04.2.02.0004 | monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 29.920.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 40 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1403. | 2.08.04.2.02.0005 | pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 149.920.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) | 90 | | 0 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1404. | 2.08.04.2.02.0006 | penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 29.920.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) | 40 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1405. | 2.08.04.2.02.0007 | peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 29.920.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga) | 40 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1406. | 2.08.04.2.02.0008 | Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 29.920.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) | 40 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1407. | 2.08.04.2.03 | Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 149.600.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Keluarga yang mendapat layanan komprehensif dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak | Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1408. | 2.08.04.2.03.0002 | layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota | | | 29.920.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota | Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang) | 80 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1409. | 2.08.04.2.03.0003 | layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota | | | 29.920.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya layanan rujukan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota | Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang) | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1410. | 2.08.04.2.03.0004 | layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota | | | 29.920.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup | Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota (Orang) | 145 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1411. | 2.08.04.2.03.0005 | Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota | | | 29.920.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota | Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang) | 80 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1412. | 2.08.04.2.03.0006 | Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota | | | 29.920.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota | Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota (Orang) | 80 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1413.** | **2.08.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK** | | | **520.764.016** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| | | Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak | TINGKAT PEMANFAATAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM PERENCANAAN,EVALUASI DAN/ATAU PENYUSUNAN KEBIJAKAN (%) | 75 | | 0 | | 75 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1414. | 2.08.05.2.01 | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 520.764.016 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah data gender dan anak yang tersedia | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak (Lembaga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1415. | 2.08.05.2.01.0003 | Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota | | | 97.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen) | 5 | | 0 | | 14 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1416. | 2.08.05.2.01.0004 | Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak | | | 223.764.016 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak | Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak (Lembaga) | 66 | | 0 | | 14 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1417. | 2.08.05.2.01.0005 | Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA | | | 200.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA | Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA (Dokumen) | 48 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1418.** | **2.08.06** | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | | | **1.367.949.438** | | **-** | | **74.728.700** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif | INDEKS PEMENUHAN HAK ANAK (IPHA) (Indeks) | 70,2 | | 65,68 | | 60,6 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1419. | 2.08.06.2.01 | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 1.107.949.438 | | - | | 74.728.700 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah PD/Lembaga/Organisasi yang memahami PHA | Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1420. | 2.08.06.2.01.0003 | Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 862.949.438 | | - | | 74.728.700 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) | 150 | | 0 | | 25 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1421. | 2.08.06.2.01.0004 | Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 120 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1422. | 2.08.06.2.01.0005 | Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 205.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) | 107 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1423. | 2.08.06.2.01.0006 | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) | 30 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1424. | 2.08.06.2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 260.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah lembaga penyedia layanan yang mendapatkan sosialisasi PHA | jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1425. | 2.08.06.2.02.0005 | Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 105.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang) | 280 | | 0 | | 325 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1426. | 2.08.06.2.02.0006 | penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1427. | 2.08.06.2.02.0007 | Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 95.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) | 54 | | 0 | | 14 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1428. | 2.08.06.2.02.0008 | monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) | 40 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1429. | 2.08.06.2.02.0009 | pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) | 23 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1430.** | **2.08.07** | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | | | **3.772.929.116** | | **-** | | **346.387.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| | | Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi , penelantaran, perkawinan dan perlakuan lainnya terhadap anak | INDEKS PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (IPKA) (Indeks) | 82,2 | | 86,41 | | 81,7 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | PERSENTASE ANAK MEMRLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF (%) | 100 | | 100 | | 85,50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1431. | 2.08.07.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.135.000.000 | | - | | 97.227.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah lembaga/lintas sektor yang melakukan pencegahan kekerasan terhadap Anak | jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota (Kebijakan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1432. | 2.08.07.2.01.0006 | koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota | | | 23.320.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota | jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen) | 40 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1433. | 2.08.07.2.01.0007 | Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 1.018.320.000 | | - | | 97.227.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan) | 133 | | 0 | | 8 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1434. | 2.08.07.2.01.0008 | monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 23.320.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Laporan) | 40 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1435. | 2.08.07.2.01.0009 | Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 23.320.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Dokumen) | 23 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1436. | 2.08.07.2.01.0010 | Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 23.320.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA | Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Orang) | 200 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1437. | 2.08.07.2.01.0011 | Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 23.400.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota (Kebijakan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1438. | 2.08.07.2.02 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.862.929.116 | | - | | 200.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan komprehensif | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1439. | 2.08.07.2.02.0008 | Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | 400.854.116 | | - | | 62.435.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) | 410 | | 0 | | 70 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1440. | 2.08.07.2.02.0009 | layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | 347.875.000 | | - | | 35.775.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) | 354 | | 0 | | 70 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1441. | 2.08.07.2.02.0010 | layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | 93.375.000 | | - | | 18.750.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) | 111 | | 0 | | 90 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1442. | 2.08.07.2.02.0011 | layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | 30.000.000 | | - | | 3.300.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) | 125 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1443. | 2.08.07.2.02.0012 | layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | 257.900.000 | | - | | 14.740.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) | 25 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1444. | 2.08.07.2.02.0013 | Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | 507.925.000 | | - | | 40.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) | 400 | | 0 | | 70 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1445. | 2.08.07.2.02.0014 | layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | 150.000.000 | | - | | 15.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang) | 20 | | 0 | | 8 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1446. | 2.08.07.2.02.0015 | layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | 75.000.000 | | - | | 10.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) | 50 | | 0 | | 15 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1447. | 2.08.07.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 775.000.000 | | - | | 49.160.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase lembaga layanan yang terlatih bagi anak yang memerlukan perlindugan khusus | Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1448. | 2.08.07.2.03.0007 | Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota | | | 162.856.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen) | 38 | | 0 | | 8 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1449. | 2.08.07.2.03.0009 | koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota | | | 177.856.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota | jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen) | 41 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1450. | 2.08.07.2.03.0010 | monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 22.856.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) | 29 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1451. | 2.08.07.2.03.0011 | Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 22.856.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) | 80 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1452. | 2.08.07.2.03.0012 | penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 77.856.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 28 | | 0 | | 8 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1453. | 2.08.07.2.03.0013 | Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai | | | 287.856.000 | | - | | 49.160.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang) | 1100 | | 0 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1454. | 2.08.07.2.03.0014 | pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 22.864.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) | 40 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **2.09** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | **23.117.268.855** | | **2.931.858.330** | | **2.955.591.766** | | **680.725.635** | **23,70** | **23,03** | | **680.725.635** | **4,69** | **2,94** | | |
| **1455.** | **2.09.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **14.751.213.155** | | **2.796.718.224** | | **2.630.591.766** | | **648.884.153** | **28,99** | **24,67** | | **648.884.153** | **5,88** | **4,40** | DINAS PANGAN | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%) | 100 | | 400 | | 100 | | 25 | | 25,00 | | 25 | | 25,00 | | | |
| 1456. | 2.09.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 237.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 2,86 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Kinerja Perencanaan Program dan Anggaran | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1457. | 2.09.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 34.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 20,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 1458. | 2.09.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 34.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1459. | 2.09.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 34.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1460. | 2.09.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 34.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1461. | 2.09.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 34.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1462. | 2.09.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 34.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1463. | 2.09.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 33.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 5 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1464. | 2.09.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 9.813.556.993 | | 2.272.557.512 | | 2.444.081.766 | | 607.505.483 | 0,00 | 24,86 | | 607.505.483 | 0,00 | 6,19 | | |
| | | Meningkatnya Kinerja Perencanaan Keuangan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1465. | 2.09.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 9.527.556.993 | | 2.272.557.512 | | 2.444.081.766 | | 607.505.483 | 0,00 | 24,86 | | 607.505.483 | 0,00 | 6,38 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 60 | | 27 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1466. | 2.09.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 57.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 420 | | 0 | | 40 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1467. | 2.09.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 57.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1468. | 2.09.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | 30.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | 5 | | 0 | | 24 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1469. | 2.09.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 38.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1470. | 2.09.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | 30.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1471. | 2.09.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 33.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1472. | 2.09.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | 41.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1473. | 2.09.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 485.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya tingkat Disiplin Aparatur | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1474. | 2.09.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 120.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 240 | | 0 | | 25 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1475. | 2.09.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 320.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 213 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1476. | 2.09.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 45.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 50 | | 0 | | 40 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1477. | 2.09.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.469.061.360 | | 134.606.600 | | 51.880.000 | | 13.443.400 | 70,00 | 25,91 | | 13.443.400 | 14,29 | 0,92 | | |
| | | Terlaksananya Administrasi Umum | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1478. | 2.09.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 59.033.300 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1479. | 2.09.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 264.072.000 | | 65.198.000 | | 7.758.000 | | 6.143.400 | 20,00 | 79,19 | | 6.143.400 | 20,00 | 2,33 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 20 | | 5 | | 1 | | 20,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 1480. | 2.09.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 40.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1481. | 2.09.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 104.952.000 | | 16.850.000 | | 12.997.800 | | 4.000.000 | 100,00 | 30,77 | | 4.000.000 | 20,00 | 3,81 | | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 1482. | 2.09.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 64.287.810 | | 9.993.600 | | 7.682.200 | | 300.000 | 100,00 | 3,91 | | 300.000 | 20,00 | 0,47 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1483. | 2.09.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 87.528.000 | | 3.840.000 | | - | | - | 100,00 | 0,00 | | - | 20,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 1484. | 2.09.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 849.188.250 | | 38.725.000 | | 23.442.000 | | 3.000.000 | 100,00 | 12,80 | | 3.000.000 | 20,00 | 0,35 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 1485. | 2.09.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 725.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlakasananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1486. | 2.09.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 680.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1487. | 2.09.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 45.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1488. | 2.09.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 435.290.000 | | 70.544.504 | | 49.910.000 | | 12.819.508 | 66,67 | 25,69 | | 12.819.508 | 13,33 | 2,95 | | |
| | | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1489. | 2.09.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 33.870.000 | | 612.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 5 | | 4 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1490. | 2.09.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 41.420.000 | | 4.932.504 | | 6.710.000 | | 1.282.044 | 100,00 | 19,11 | | 1.282.044 | 20,00 | 3,10 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 1491. | 2.09.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 360.000.000 | | 65.000.000 | | 43.200.000 | | 11.537.464 | 100,00 | 26,71 | | 11.537.464 | 20,00 | 3,20 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 1492. | 2.09.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.586.304.802 | | 319.009.608 | | 84.720.000 | | 15.115.762 | 5,93 | 17,84 | | 15.115.762 | 10,00 | 0,95 | | |
| | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1493. | 2.09.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 341.000.000 | | 134.404.608 | | 79.590.000 | | 9.985.762 | 11,11 | 12,55 | | 9.985.762 | 20,00 | 2,93 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 5 | | 36 | | 9 | | 1 | | 11,11 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 1494. | 2.09.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 400.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 95 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1495. | 2.09.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 50.000.000 | | - | | 5.130.000 | | 5.130.000 | 6,67 | 100,00 | | 5.130.000 | 20,00 | 10,26 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 5 | | 0 | | 15 | | 1 | | 6,67 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 1496. | 2.09.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 795.304.802 | | 184.605.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 5 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1497.** | **2.09.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN** | | | **740.970.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PANGAN | |
| | | Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan | Persentase Jumlah Cadangan Pangan (%) | 100 | | 0 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1498. | 2.09.02.2.01 | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | 740.970.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Penyediaan Pangan Masyarakat yang didukung dengan adanya Insfrastruktur dan Sarana Pendukung untuk Kemandirian dan Ketahanan Pangan | Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia (unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1499. | 2.09.02.2.01.0003 | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | | | 400.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan | Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1500. | 2.09.02.2.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik | | | 140.970.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1501. | 2.09.02.2.01.0006 | Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | 200.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia (unit) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1502. | 2.09.03 | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | | | **6.373.252.000** | | **99.963.106** | | **265.295.000** | | **30.361.482** | **20,00** | **11,44** | | **30.361.482** | **3,10** | **0,48** | DINAS PANGAN | |
| | | Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Skor) | 93,4 | | 90,9 | | 91,4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1503. | 2.09.03.2.01 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | | | 5.089.370.000 | | 65.529.800 | | 100.000.200 | | 12.580.000 | 14,29 | 12,58 | | 12.580.000 | 2,27 | 0,25 | | |
| | | Meningkatnya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok Masyarakat dalam Menstabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informasi Stok Pangan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1504. | 2.09.03.2.01.0002 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | 95.628.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1505. | 2.09.03.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | | | 148.474.000 | | 65.529.800 | | 100.000.200 | | 12.580.000 | 100,00 | 12,58 | | 12.580.000 | 25,00 | 8,47 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan) | 4 | | 3 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 25,00 | | | |
| 1506. | 2.09.03.2.01.0007 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | 121.228.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 600 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1507. | 2.09.03.2.01.0008 | Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | | | 85.614.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1508. | 2.09.03.2.01.0009 | Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | 78.064.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal | Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1509. | 2.09.03.2.01.0010 | Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota | | | 83.868.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/kota | Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1510. | 2.09.03.2.01.0011 | Pemantauan Stok Pangan | | | 65.614.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Informasi Stok Pangan | Informasi Stok Pangan (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1511. | 2.09.03.2.01.0012 | Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota | | | 68.424.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota | Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1512. | 2.09.03.2.01.0014 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis | | | 4.167.614.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1513. | 2.09.03.2.01.0016 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | | | 65.614.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM) | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen) | 4 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1514. | 2.09.03.2.01.0020 | Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota | | | 109.228.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota | Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1515. | 2.09.03.2.02 | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | | | 626.582.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah | Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (Ton) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara (Ton) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah LPM yang terfasilitasi (kelompok) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1516. | 2.09.03.2.02.0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal | | | 126.228.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal | Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1517. | 2.09.03.2.02.0003 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | 260.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton) | 90 | | 0 | | 48 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1518. | 2.09.03.2.02.0005 | Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota | | | 117.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota | Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (Ton) | 90 | | 0 | | 48 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1519. | 2.09.03.2.02.0006 | Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota | | | 35.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara (Ton) | 210 | | 0 | | 48 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1520. | 2.09.03.2.02.0008 | Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) | | | 88.354.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya kegiatan penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) | Jumlah LPM yang terfasilitasi (kelompok) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1521. | 2.09.03.2.03 | Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi | | | 56.164.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sikronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1522. | 2.09.03.2.03.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal | | | 56.164.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal (Laporan) | 4 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1523. | 2.09.03.2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | | | 601.136.000 | | 34.433.306 | | 165.294.800 | | 17.781.482 | 50,00 | 10,76 | | 17.781.482 | 10,00 | 2,96 | | |
| | | Tercapainya Skor Pola Pangan Harapan (PPh) berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1524. | 2.09.03.2.04.0001 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | | | 190.364.000 | | 1.790.000 | | - | | - | 100,00 | 0,00 | | - | 20,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 1525. | 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | 223.928.000 | | 25.978.464 | | 75.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan) | 5 | | 4 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1526. | 2.09.03.2.04.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | | | 91.230.000 | | 6.664.842 | | 90.294.800 | | 17.781.482 | 100,00 | 19,69 | | 17.781.482 | 20,00 | 19,49 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 1527. | 2.09.03.2.04.0005 | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | 95.614.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen) | 4 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1528.** | **2.09.04** | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | | | **683.664.000** | | **15.617.000** | | **50.000.000** | | **-** | **25,00** | **0,00** | | **-** | **5,56** | **0,00** | DINAS PANGAN | |
| | | Meningkatnya penanganan kerawanan pangan | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%) | 0 | | 8,86 | | 7,59 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1529. | 2.09.04.2.01 | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | | | 79.000.000 | | 15.617.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Teridentifikasinya wilayah Kecamatan yang rawan pangan dan Tahan Pangan | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1530. | 2.09.04.2.01.0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | | | 79.000.000 | | 15.617.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen) | 1 | | 4 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1531. | 2.09.04.2.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 604.664.000 | | - | | 50.000.000 | | - | 33,33 | 0,00 | | - | 6,67 | 0,00 | | |
| | | Teratasinya Kerawanan Pangan Daerah | Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala kabupaten/kota (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1532. | 2.09.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 371.500.000 | | - | | 50.000.000 | | - | 100,00 | 0,00 | | - | 33,33 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 3 | | 0 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 33,33 | | | |
| 1533. | 2.09.04.2.02.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | | | 54.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan) | 4 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1534. | 2.09.04.2.02.0004 | Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi | Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1535. | 2.09.04.2.02.0005 | Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | | | 52.394.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1536. | 2.09.04.2.02.0008 | Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan | | | 76.770.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala kabupaten/kota | Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala kabupaten/kota (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1537.** | **2.09.05** | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | | | **568.169.700** | | **19.560.000** | | **9.705.000** | | **1.480.000** | **25,00** | **15,25** | | **1.480.000** | **5,00** | **0,26** | DINAS PANGAN | |
| | | Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan | Persentase Pangan segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%) | 100 | | 0 | | 89,30 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1538. | 2.09.05.2.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | | | 568.169.700 | | 19.560.000 | | 9.705.000 | | 1.480.000 | 25,00 | 15,25 | | 1.480.000 | 5,00 | 0,26 | | |
| | | Terwujudnya Keamanan Pangan Segar yang Dikonsumsi Masyarakat di Kabupaten | Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1539. | 2.09.05.2.01.0004 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | | | 109.310.000 | | 1.820.000 | | 9.705.000 | | 1.480.000 | 100,00 | 15,25 | | 1.480.000 | 25,00 | 1,35 | | |
| | | Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 4 | | 4 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 25,00 | | | |
| 1540. | 2.09.05.2.01.0006 | Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan | | | 212.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan | Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1541. | 2.09.05.2.01.0007 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | | | 108.000.000 | | 11.571.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen) | 5 | | 4 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1542. | 2.09.05.2.01.0008 | Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | | | 64.800.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1543. | 2.09.05.2.01.0009 | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | | | 73.559.700 | | 6.169.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen) | 5 | | 4 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **2.10** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | **7.114.000.000** | | **-** | | **50.000.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | |
| **1544.** | **2.10.04** | **PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN** | | | **1.550.000.000** | | **-** | | **50.000.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| | | Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan | Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi (%) | 10 | | 100 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1545. | 2.10.04.2.01 | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.550.000.000 | | - | | 50.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Berita acara Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1546. | 2.10.04.2.01.0003 | Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota | | | 785.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselesaikannya sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1547. | 2.10.04.2.01.0004 | Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 465.000.000 | | - | | 50.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1548. | 2.10.04.2.01.0005 | Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 300.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terinventarisasinya Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1549.** | **2.10.05** | **PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN** | | | **670.000.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| | | Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan | Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1550. | 2.10.05.2.01 | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | 670.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jmlah Berita Acara Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1551. | 2.10.05.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | 670.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1552.** | **2.10.06** | **PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE** | | | **670.000.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) | Tersedianya Tanah Objek Landreform (TOL) yang siap diretribusi yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee (%) | 30 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1553. | 2.10.06.2.01 | Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 670.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Dokumen Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang telah diselesaikan | Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1554. | 2.10.06.2.01.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | 670.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah | Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1555.** | **2.10.07** | **PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT** | | | **270.000.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| | | Meningkatnya tata kelola tanah ulayat | Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan (Persentase) | 90 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1556. | 2.10.07.2.01 | Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 270.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Berita Acara Fasilitasi Penetapan Tanah Ulayat | Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1557. | 2.10.07.2.01.0003 | Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku | | | 270.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Ditetapkannya Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Melalui Peraturan Perundang-Undangan yang Ditetapkan oleh Bupati/Walikota | Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1558.** | **2.10.08** | **PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG** | | | **270.000.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| | | Meningkatnya pengelolaan tanah kosong | Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (Persentase) | 30 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1559. | 2.10.08.2.02 | Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong | | | 270.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | jumlah dokumen inventaris tanah kosong | Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota (Berita Acara) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1560. | 2.10.08.2.02.0003 | Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong | | | 270.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya koordinasi pemanfataan Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota (Berita Acara) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1561.** | **2.10.09** | **PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH** | | | **270.000.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| | | Meningkatnya izin membuka tanah yang difasilitasi | Persentase izin membuka tanah yang difasilitasi (%) | 30 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1562. | 2.10.09.2.01 | Penerbitan Izin Membuka Tanah | | | 270.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Izin Membuka Tanah Yang Difasiltasi | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1563. | 2.10.09.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah | | | 270.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1564.** | **2.10.10** | **PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH** | | | **3.414.000.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| | | Meningkatnya luas lokasi konsolidasi tanah | Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase) | 30 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1565. | 2.10.10.2.01 | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | | | 3.414.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase penatagunaan tanah di Kabupaten Lima Puluh Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1566. | 2.10.10.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | | | 1.235.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1567. | 2.10.10.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota | | | 2.179.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **2.11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | **53.517.626.670** | | **5.163.819.428** | | **6.988.973.132** | | **1.542.084.387** | **0,00** | **22,06** | | **1.542.084.387** | **0,00** | **2,88** | | |
| **1568.** | **2.11.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **26.757.579.670** | | **4.318.247.329** | | **5.271.826.132** | | **1.308.281.537** | **0,00** | **24,82** | | **1.308.281.537** | **0,00** | **4,89** | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100,00 | | 100 | | 100,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1569. | 2.11.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 36.950.000 | | 4.333.000 | | 7.390.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perecanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1570. | 2.11.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 36.950.000 | | 4.333.000 | | 7.390.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 12 | | 6 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1571. | 2.11.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 23.867.354.670 | | 4.040.112.647 | | 5.031.205.310 | | 1.267.587.144 | 0,00 | 25,19 | | 1.267.587.144 | 0,00 | 5,31 | | |
| | | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1572. | 2.11.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 23.867.354.670 | | 4.040.112.647 | | 5.031.205.310 | | 1.267.587.144 | 0,00 | 25,19 | | 1.267.587.144 | 0,00 | 5,31 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 45 | | 46 | | 46 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1573. | 2.11.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 37.300.000 | | 6.954.900 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1574. | 2.11.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 37.300.000 | | 6.954.900 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 12 | | 2 | | 6 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1575. | 2.11.01.2.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | 100.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1576. | 2.11.01.2.04.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | | | 100.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan) | 12 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1577. | 2.11.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 110.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1578. | 2.11.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 110.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 45 | | 0 | | 44 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1579. | 2.11.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 692.225.000 | | 129.138.858 | | 94.373.000 | | 6.631.000 | 0,00 | 7,03 | | 6.631.000 | 0,00 | 0,96 | | |
| | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1580. | 2.11.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 62.500.000 | | 12.342.000 | | 2.125.000 | | 998.000 | 0,00 | 46,96 | | 998.000 | 0,00 | 1,60 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 6 | | 2 | | 6 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1581. | 2.11.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 50.000.000 | | 29.624.100 | | 16.462.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 6 | | 1 | | 6 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1582. | 2.11.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 65.000.000 | | 10.399.000 | | 13.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 6 | | 1 | | 6 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1583. | 2.11.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 65.000.000 | | 10.399.800 | | 13.000.000 | | 4.000.000 | 0,00 | 30,77 | | 4.000.000 | 0,00 | 6,15 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 6 | | 1 | | 6 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1584. | 2.11.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 37.500.000 | | 7.483.000 | | 7.500.000 | | 623.000 | 0,00 | 8,31 | | 623.000 | 0,00 | 1,66 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | | 4 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1585. | 2.11.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 412.225.000 | | 58.890.958 | | 42.286.000 | | 1.010.000 | 0,00 | 2,39 | | 1.010.000 | 0,00 | 0,25 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 24 | | 12 | | 24 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1586. | 2.11.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 137.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1587. | 2.11.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 137.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 6 | | 0 | | 6 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1588. | 2.11.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 436.250.000 | | 78.556.749 | | 49.158.822 | | 15.294.839 | 0,00 | 31,11 | | 15.294.839 | 0,00 | 3,51 | | |
| | | Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1589. | 2.11.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 10.000.000 | | 2.000.000 | | 3.000.000 | | 1.500.000 | 0,00 | 50,00 | | 1.500.000 | 0,00 | 15,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1590. | 2.11.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 211.250.000 | | 31.556.749 | | 36.088.822 | | 7.420.439 | 0,00 | 20,56 | | 7.420.439 | 0,00 | 3,51 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1591. | 2.11.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 15.000.000 | | 3.000.000 | | 7.000.000 | | 5.376.000 | 0,00 | 76,80 | | 5.376.000 | 0,00 | 35,84 | | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1592. | 2.11.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 200.000.000 | | 42.000.000 | | 3.070.000 | | 998.400 | 0,00 | 32,52 | | 998.400 | 0,00 | 0,50 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1593. | 2.11.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.340.000.000 | | 59.151.175 | | 89.699.000 | | 18.768.554 | 0,00 | 20,92 | | 18.768.554 | 0,00 | 1,40 | | |
| | | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1594. | 2.11.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 830.000.000 | | - | | 89.699.000 | | 18.768.554 | 0,00 | 20,92 | | 18.768.554 | 0,00 | 2,26 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 12 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1595. | 2.11.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 510.000.000 | | 59.151.175 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 2 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1596.** | **2.11.02** | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | **1.699.720.000** | | **109.919.000** | | **116.450.000** | | **9.063.900** | **0,00** | **7,78** | | **9.063.900** | **0,00** | **0,53** | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | |
| | | Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP | Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (%) (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1597. | 2.11.02.2.01 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | | | 776.770.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang disusun (dokumen) | Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1598. | 2.11.02.2.01.0004 | Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota | | | 776.770.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali | Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1599. | 2.11.02.2.02 | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | | | 922.950.000 | | 109.919.000 | | 116.450.000 | | 9.063.900 | 0,00 | 7,78 | | 9.063.900 | 0,00 | 0,98 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota yang disusun (dokumen) | Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1600. | 2.11.02.2.02.0005 | Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang | | | 922.950.000 | | 109.919.000 | | 116.450.000 | | 9.063.900 | 0,00 | 7,78 | | 9.063.900 | 0,00 | 0,98 | | |
| | | Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1601.** | **2.11.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | **1.846.510.000** | | **134.617.789** | | **179.042.000** | | **5.920.000** | **0,00** | **3,31** | | **5.920.000** | **0,00** | **0,32** | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | |
| | | Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup | Indeks kualitas air (Indeks) | 70,01 | | 76,55 | | 64,30 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1602. | 2.11.03.2.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | 1.526.510.000 | | 134.617.789 | | 179.042.000 | | 5.920.000 | 0,00 | 3,31 | | 5.920.000 | 0,00 | 0,39 | | |
| | | Jumlah Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (laporan) | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1603. | 2.11.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | 157.155.000 | | 11.067.000 | | 13.047.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen) | 6 | | 6 | | 6 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1604. | 2.11.03.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | | | 178.935.000 | | 14.589.000 | | 15.787.000 | | 5.920.000 | 0,00 | 37,50 | | 5.920.000 | 0,00 | 3,31 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen) | 6 | | 6 | | 6 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1605. | 2.11.03.2.01.0011 | Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah | | | 94.040.000 | | - | | 18.808.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun | Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1606. | 2.11.03.2.01.0012 | Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan | | | 330.780.000 | | - | | 15.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan | Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket) | 70 | | 0 | | 36 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1607. | 2.11.03.2.01.0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota | | | 765.600.000 | | 108.961.789 | | 116.400.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen) | 24 | | 24 | | 24 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1608. | 2.11.03.2.02 | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | 190.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (laporan) | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Titik) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1609. | 2.11.03.2.02.0001 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | | | 35.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan) | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1610. | 2.11.03.2.02.0003 | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | | | 100.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan | Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Titik) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1611. | 2.11.03.2.02.0004 | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan | | | 55.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan | Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1612. | 2.11.03.2.03 | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | 130.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (laporan) | luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1613. | 2.11.03.2.03.0009 | Pelaksanaan rehabilitasi | | | 100.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan | luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1614. | 2.11.03.2.03.0014 | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan | | | 30.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan | Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1615.** | **2.11.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | | | **1.887.049.000** | | **-** | | **269.559.000** | | **41.300.000** | **0,00** | **15,32** | | **41.300.000** | **0,00** | **2,19** | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | |
| | | Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati | Persentase ruang terbuka hijau (RTH) kawasan perkotaan (%) (%) | 0,25 | | 1,84 | | 0,25 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1616. | 2.11.04.2.01 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | | | 1.887.049.000 | | - | | 269.559.000 | | 41.300.000 | 0,00 | 15,32 | | 41.300.000 | 0,00 | 2,19 | | |
| | | Luas RTH Kawasan perkotaan dan kawasan Kehati yang dikelola (Hektar) | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1617. | 2.11.04.2.01.0001 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | | | 164.500.000 | | - | | 32.900.000 | | 800.000 | 0,00 | 2,43 | | 800.000 | 0,00 | 0,49 | | |
| | | Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1618. | 2.11.04.2.01.0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | | | 1.722.549.000 | | - | | 236.659.000 | | 40.500.000 | 0,00 | 17,11 | | 40.500.000 | 0,00 | 2,35 | | |
| | | Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha) | 7.01 | | 22,01 | | 7.01 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1619.** | **2.11.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | | | **1.123.400.000** | | **-** | | **12.400.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | |
| | | Meningkatnya penangananbahan berbahaya dan beracun (B3) limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) | Persentase limbah B3 yang terkelola (%) (%) | 100 | | 0 | | 20 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1620. | 2.11.05.2.01 | Penyimpanan sementara Limbah B3 | | | 561.400.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah penyimpanan sementara B3 dan LB3 (ton) | Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1621. | 2.11.05.2.01.0005 | Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) | | | 561.400.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) | Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1622. | 2.11.05.2.02 | Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 562.000.000 | | - | | 12.400.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah pengumpulan B3 dan LB3 (ton) | jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina (Usaha) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1623. | 2.11.05.2.02.0004 | Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota | | | 562.000.000 | | - | | 12.400.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | terlaksananya pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota | jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina (Usaha) | 12 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1624.** | **2.11.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | | | **770.473.000** | | **6.874.000** | | **24.683.000** | | **370.000** | **0,00** | **1,50** | | **370.000** | **0,00** | **0,05** | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | |
| | | Meningkatnya kepatuhan usaha dan / atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan | Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH (%) (%) | 100 | | 81,81 | | 89,70 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1625. | 2.11.06.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | 770.473.000 | | 6.874.000 | | 24.683.000 | | 370.000 | 0,00 | 1,50 | | 370.000 | 0,00 | 0,05 | | |
| | | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah (dokumen berita acara) | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1626. | 2.11.06.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | | | 408.433.000 | | - | | 12.275.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen) | 2 | | 0 | | 6 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1627. | 2.11.06.2.01.0009 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | 362.040.000 | | 6.874.000 | | 12.408.000 | | 370.000 | 0,00 | 2,98 | | 370.000 | 0,00 | 0,10 | | |
| | | Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha) | 12 | | 36 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1628.** | **2.11.07** | **PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH** | | | **644.100.000** | | **-** | | **12.340.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | |
| | | Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH | Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya (%) (%) | 100 | | 0 | | 20 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1629. | 2.11.07.2.01 | Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH | | | 315.345.000 | | - | | 12.340.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH (dokumen) | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1630. | 2.11.07.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | | | 315.345.000 | | - | | 12.340.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1631. | 2.11.07.2.02 | Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH | | | 328.755.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH (dokumen) | Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1632. | 2.11.07.2.02.0001 | Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | | | 328.755.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan | Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1633.** | **2.11.08** | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | | | **590.370.000** | | **594.161.310** | | **36.580.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | |
| | | Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup | Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase) | 100 | | 16,67 | | 35,78 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1634. | 2.11.08.2.01 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 590.370.000 | | 594.161.310 | | 36.580.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (dokumen) | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1635. | 2.11.08.2.01.0002 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | | | 315.370.000 | | 587.938.310 | | 21.580.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen) | 1 | | 12 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1636. | 2.11.08.2.01.0003 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | | | 155.000.000 | | 6.223.000 | | 15.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang) | 10 | | 12 | | 60 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1637. | 2.11.08.2.01.0005 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat | | | 120.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya | Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1638.** | **2.11.09** | **PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | | | **420.302.000** | | **-** | | **10.102.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | |
| | | Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (%) (%) | 50 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1639. | 2.11.09.2.01 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 420.302.000 | | - | | 10.102.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota (penghargaan) | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1640. | 2.11.09.2.01.0001 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | 420.302.000 | | - | | 10.102.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas) | 2 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1641.** | **2.11.10** | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | **428.035.000** | | **-** | | **22.175.000** | | **510.000** | **0,00** | **2,30** | | **510.000** | **0,00** | **0,12** | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | |
| | | Meningkatnya penyelesaian sangketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup | Persentase Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkungan hidup (%) (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100,00 | | 100 | | 100,00 | | | |
| 1642. | 2.11.10.2.01 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | | | 428.035.000 | | - | | 22.175.000 | | 510.000 | 0,00 | 2,30 | | 510.000 | 0,00 | 0,12 | | |
| | | Jumlah penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota (perkara) | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota (Sanksi) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1643. | 2.11.10.2.01.0009 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | | | 64.665.000 | | - | | 9.545.000 | | 510.000 | 0,00 | 5,34 | | 510.000 | 0,00 | 0,79 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan) | 12 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1644. | 2.11.10.2.01.0010 | Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | | | 363.370.000 | | - | | 12.630.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota | Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota (Sanksi) | 12 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1645.** | **2.11.11** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | | | **17.350.088.000** | | **-** | | **1.033.816.000** | | **176.638.950** | **0,00** | **17,09** | | **176.638.950** | **0,00** | **1,02** | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | |
| | | Meningkatnya tata kelola persampahan | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (indeks) (Indeks) | 44,53 | | 40,69 | | 31,38 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1646. | 2.11.11.2.01 | Pengelolaan Sampah | | | 17.350.088.000 | | - | | 1.033.816.000 | | 176.638.950 | 0,00 | 17,09 | | 176.638.950 | 0,00 | 1,02 | | |
| | | Jumlah sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (ton/tahun) | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1647. | 2.11.11.2.01.0004 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | | | 1.175.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok) | 24 | | 0 | | 24 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1648. | 2.11.11.2.01.0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | | | 5.094.225.000 | | - | | 50.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1649. | 2.11.11.2.01.0008 | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota | | | 1.330.520.000 | | - | | 54.435.584 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota | Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen) | 3 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1650. | 2.11.11.2.01.0012 | Penanganan sampah melalui pengangkutan | | | 7.340.000.000 | | - | | 808.000.000 | | 164.967.350 | 0,00 | 20,42 | | 164.967.350 | 0,00 | 2,25 | | |
| | | Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton) | 7482.5 | | 0 | | 7482.5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1651. | 2.11.11.2.01.0016 | Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah | | | 190.000.000 | | - | | 77.311.416 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Luas pelayanan pengumpulan sampah | Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase) | 10.39 | | 0 | | 10.39 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1652. | 2.11.11.2.01.0017 | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | | | 2.220.343.000 | | - | | 44.069.000 | | 11.671.600 | 0,00 | 26,48 | | 11.671.600 | 0,00 | 0,53 | | |
| | | Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton) | 1825 | | 4.955 | | 1825 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **2.12** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | **53.527.606.373** | | **4.947.510.653** | | **4.651.439.563** | | **1.104.823.462** | **6,56** | **23,75** | | **1.104.823.462** | **1,70** | **2,06** | | |
| **1653.** | **2.12.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **41.715.580.477** | | **4.185.614.677** | | **4.441.664.563** | | **1.104.823.462** | **15,83** | **24,87** | | **1.104.823.462** | **3,53** | **2,65** | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 25 | | 25,00 | | 25 | | 25,00 | | | |
| 1654. | 2.12.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 681.045.000 | | 5.366.000 | | - | | - | 8,33 | 0,00 | | - | 1,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1655. | 2.12.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 133.045.000 | | 5.366.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1656. | 2.12.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 128.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1657. | 2.12.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 128.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1658. | 2.12.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 137.000.000 | | - | | - | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 5,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 20 | | 0 | | 4 | | 1 | | 25,00 | | 1 | | 5,00 | | | |
| 1659. | 2.12.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 155.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1660. | 2.12.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 21.309.795.990 | | 3.672.557.267 | | 4.247.798.563 | | 1.068.477.257 | 0,00 | 25,15 | | 1.068.477.257 | 0,00 | 5,01 | | |
| | | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1661. | 2.12.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 21.123.795.990 | | 3.672.557.267 | | 4.247.798.563 | | 1.068.477.257 | 0,00 | 25,15 | | 1.068.477.257 | 0,00 | 5,06 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 89 | | 141 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1662. | 2.12.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 186.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1663. | 2.12.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 67.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1664. | 2.12.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 67.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 45 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1665. | 2.12.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 1.174.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya disiplin aparatur dlm pelaksanaan tugas | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1666. | 2.12.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 384.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 84 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1667. | 2.12.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 280.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 40 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1668. | 2.12.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 230.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 600 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1669. | 2.12.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 280.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1670. | 2.12.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 11.189.703.487 | | 248.091.500 | | 70.623.600 | | 11.019.715 | 20,32 | 15,60 | | 11.019.715 | 8,12 | 0,10 | | |
| | | Jumlah peningkatan Administrasi Umum | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1671. | 2.12.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 70.020.000 | | 3.520.000 | | 2.020.000 | | 397.000 | 14,29 | 19,65 | | 397.000 | 2,86 | 0,57 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 35 | | 7 | | 7 | | 1 | | 14,29 | | 1 | | 2,86 | | | |
| 1672. | 2.12.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 9.787.701.487 | | 219.967.800 | | 34.081.500 | | 6.189.915 | 14,29 | 18,16 | | 6.189.915 | 2,86 | 0,06 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 35 | | 7 | | 7 | | 1 | | 14,29 | | 1 | | 2,86 | | | |
| 1673. | 2.12.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 85.000.000 | | 9.002.000 | | 5.000.100 | | 999.800 | 25,00 | 20,00 | | 999.800 | 15,00 | 1,18 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 20 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 15,00 | | | |
| 1674. | 2.12.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 28.000.000 | | - | | - | | - | 20,00 | 0,00 | | - | 1,33 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 150 | | 0 | | 10 | | 2 | | 20,00 | | 2 | | 1,33 | | | |
| 1675. | 2.12.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 26.440.000 | | 1.626.100 | | 1.500.000 | | 53.000 | 25,00 | 3,53 | | 53.000 | 15,00 | 0,20 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 20 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 15,00 | | | |
| 1676. | 2.12.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 1.192.542.000 | | 13.975.600 | | 28.022.000 | | 3.380.000 | 23,33 | 12,06 | | 3.380.000 | 11,67 | 0,28 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 60 | | 9 | | 30 | | 7 | | 23,33 | | 7 | | 11,67 | | | |
| 1677. | 2.12.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 2.115.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1678. | 2.12.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 1.235.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 18 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1679. | 2.12.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 880.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 64 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1680. | 2.12.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.917.706.000 | | 147.570.799 | | 71.566.000 | | 18.320.690 | 25,00 | 25,60 | | 18.320.690 | 11,67 | 0,96 | | |
| | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1681. | 2.12.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 31.500.000 | | 1.000.000 | | 1.200.000 | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 15,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 20 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 15,00 | | | |
| 1682. | 2.12.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 392.206.000 | | 55.430.799 | | 55.966.000 | | 11.130.690 | 25,00 | 19,89 | | 11.130.690 | 15,00 | 2,84 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 20 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 15,00 | | | |
| 1683. | 2.12.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 1.494.000.000 | | 91.140.000 | | 14.400.000 | | 7.190.000 | 25,00 | 49,93 | | 7.190.000 | 5,00 | 0,48 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 1684. | 2.12.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.261.330.000 | | 112.029.111 | | 51.676.400 | | 7.005.800 | 15,74 | 13,56 | | 7.005.800 | 1,01 | 0,21 | | |
| | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1685. | 2.12.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | | - | | 46.341.998 | | 6.285.800 | 22,22 | 13,56 | | 6.285.800 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 0 | | 0 | | 18 | | 4 | | 22,22 | | 4 | | 0,00 | | | |
| 1686. | 2.12.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 1.154.250.000 | | 104.949.111 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 140 | | 18 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1687. | 2.12.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 307.080.000 | | 7.080.000 | | 5.334.402 | | 720.000 | 25,00 | 13,50 | | 720.000 | 3,03 | 0,23 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 165 | | 20 | | 20 | | 5 | | 25,00 | | 5 | | 3,03 | | | |
| 1688. | 2.12.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 1.800.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1689.** | **2.12.02** | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | | | **4.519.058.200** | | **131.359.000** | | **205.275.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | | Meningkatnya kualitas layanan pendataran penduduk | Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%) | 30 | | 5 | | 10 | | 2 | | 20,00 | | 2 | | 6,67 | | | |
| | | | Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase) | 62 | | 50 | | 55 | | 10 | | 18,18 | | 10 | | 16,13 | | | |
| 1690. | 2.12.02.2.01 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | 1.679.058.200 | | 131.359.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1691. | 2.12.02.2.01.0001 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | | | 496.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen) | 400 | | 0 | | 60 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1692. | 2.12.02.2.01.0002 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | | | 893.058.200 | | 131.359.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen) | 290000 | | 82.843 | | 50000 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1693. | 2.12.02.2.01.0003 | Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk | | | 190.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlasaksananya Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk (Orang) | 350 | | 0 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1694. | 2.12.02.2.01.0004 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | 100.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1695. | 2.12.02.2.02 | Penataan Pendaftaran Penduduk | | | 2.060.000.000 | | - | | 198.275.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1696. | 2.12.02.2.02.0002 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | | | 2.060.000.000 | | - | | 198.275.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen) | 62300 | | 0 | | 22000 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1697. | 2.12.02.2.04 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | | | 780.000.000 | | - | | 7.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1698. | 2.12.02.2.04.0001 | Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | 80.000.000 | | - | | 7.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Dokumen) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1699. | 2.12.02.2.04.0002 | Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk | | | 300.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbinanya dan Terawasinya Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk (Laporan) | 240 | | 0 | | 48 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1700. | 2.12.02.2.04.0003 | Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk | | | 400.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1701.** | **2.12.03** | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | | | **4.080.670.000** | | **350.594.500** | | **4.500.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | | Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil | Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) | 100 | | 100 | | 100 | | 25 | | 25,00 | | 25 | | 25,00 | | | |
| | | | Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) | 100 | | 100 | | 100 | | 25 | | 25,00 | | 25 | | 25,00 | | | |
| | | | Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) | 100 | | 95 | | 96 | | 24 | | 25,00 | | 24 | | 24,00 | | | |
| | | | Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) | 100 | | 100 | | 100 | | 25 | | 25,00 | | 25 | | 25,00 | | | |
| 1702. | 2.12.03.2.01 | Pelayanan Pencatatan Sipil | | | 1.389.470.000 | | 84.070.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1703. | 2.12.03.2.01.0001 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | | | 1.132.470.000 | | 84.070.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen) | 39000 | | 10.569 | | 2550 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1704. | 2.12.03.2.01.0002 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | | | 117.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1705. | 2.12.03.2.01.0003 | Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil | | | 140.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil | Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1706. | 2.12.03.2.02 | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | | | 997.500.000 | | 8.490.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1707. | 2.12.03.2.02.0001 | Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam | | | 450.000.000 | | 8.490.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam (Laporan) | 15 | | 6 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1708. | 2.12.03.2.02.0004 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | | | 77.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan) | 10 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1709. | 2.12.03.2.02.0008 | Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil | | | 470.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersosialisasinya Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan) | 10 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1710. | 2.12.03.2.03 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | | | 1.693.700.000 | | 258.034.500 | | 4.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1711. | 2.12.03.2.03.0001 | Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil | | | 118.000.000 | | - | | 4.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil (Dokumen) | 109000 | | 0 | | 7600 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1712. | 2.12.03.2.03.0002 | Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil | | | 200.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbinanya dan Terawasinya Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan (Laporan) | 20 | | 0 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1713. | 2.12.03.2.03.0003 | Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil | | | 179.200.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1714. | 2.12.03.2.03.0004 | Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil | | | 1.196.500.000 | | 258.034.500 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Laporan) | 14 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1715.** | **2.12.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | | | **2.814.940.000** | | **249.017.476** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | | Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan | Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase) | 100 | | 100 | | 100 | | 25 | | 25,00 | | 25 | | 25,00 | | | |
| 1716. | 2.12.04.2.01 | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | | | 468.940.000 | | 249.017.476 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1717. | 2.12.04.2.01.0001 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | | | 468.940.000 | | 249.017.476 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen) | 25 | | 178 | | 180 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1718. | 2.12.04.2.02 | Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | 1.135.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1719. | 2.12.04.2.02.0001 | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | 1.135.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun (Dokumen) | 10 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1720. | 2.12.04.2.03 | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | 811.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1721. | 2.12.04.2.03.0003 | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | 40.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1722. | 2.12.04.2.03.0004 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | | | 151.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen) | 125 | | 0 | | 15 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1723. | 2.12.04.2.03.0005 | Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | 195.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1724. | 2.12.04.2.03.0006 | Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi | | | 115.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi | Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi (Dokumen) | 20 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1725. | 2.12.04.2.03.0007 | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | | | 310.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat (Laporan) | 15 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1726. | 2.12.04.2.04 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | 400.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1727. | 2.12.04.2.04.0003 | Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | | | 400.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan) | 10 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1728.** | **2.12.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | | | **397.357.696** | | **30.925.000** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | | Meningkatnya kualitas profil kependudukan | Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase) | 100 | | 100 | | 100 | | 25 | | 25,00 | | 25 | | 25,00 | | | |
| 1729. | 2.12.05.2.01 | Penyusunan Profil Kependudukan | | | 397.357.696 | | 30.925.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Penyusunan Profil Kependudukan | Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1730. | 2.12.05.2.01.0001 | Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota | | | 213.359.415 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota | Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1731. | 2.12.05.2.01.0002 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | | | 183.998.281 | | 30.925.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen) | 5 | | 8 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **2.13** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | **44.449.351.900** | | **6.582.548.093** | | **6.248.709.611** | | **1.366.560.034** | **8,00** | **21,87** | | **1.366.560.034** | **0,74** | **3,07** | | |
| **1732.** | **2.13.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **27.253.812.858** | | **5.233.082.288** | | **5.546.042.271** | | **1.336.951.390** | **14,02** | **24,11** | | **1.336.951.390** | **0,90** | **4,91** | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 27,5 | | 27,50 | | 27,5 | | 27,50 | | | |
| 1733. | 2.13.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 239.859.460 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1734. | 2.13.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 36.205.050 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1735. | 2.13.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 33.942.235 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1736. | 2.13.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 33.943.235 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1737. | 2.13.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 33.942.235 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1738. | 2.13.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 33.942.235 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1739. | 2.13.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 33.942.235 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1740. | 2.13.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 33.942.235 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1741. | 2.13.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 22.237.325.494 | | 5.028.852.275 | | 5.393.211.012 | | 1.302.825.622 | 75,00 | 24,16 | | 1.302.825.622 | 0,45 | 5,86 | | |
| | | Persentase tertib administrasi keuangan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1742. | 2.13.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 22.078.928.402 | | 5.028.852.275 | | 5.393.211.012 | | 1.302.825.622 | 75,00 | 24,16 | | 1.302.825.622 | 3,57 | 5,90 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 420 | | 31 | | 40 | | 30 | | 75,00 | | 15 | | 3,57 | | | |
| 1743. | 2.13.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 22.628.156 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1744. | 2.13.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 22.628.156 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 48 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1745. | 2.13.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | 22.628.156 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | 48 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1746. | 2.13.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 22.628.156 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1747. | 2.13.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | 22.628.156 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | 16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1748. | 2.13.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 22.628.156 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 52 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1749. | 2.13.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | 22.628.156 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1750. | 2.13.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 51.721.500 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase tertib administrasi barang milik daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1751. | 2.13.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | 12.930.375 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 8 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1752. | 2.13.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | 12.930.375 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1753. | 2.13.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 12.930.375 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1754. | 2.13.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 12.930.375 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1755. | 2.13.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 184.303.750 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Persentase Tertib administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1756. | 2.13.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | 10.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1757. | 2.13.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 45.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 90 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1758. | 2.13.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | 21.550.625 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1759. | 2.13.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | 21.550.625 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1760. | 2.13.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | 21.550.625 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 4 | | 0 | | 35 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1761. | 2.13.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 21.550.625 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1762. | 2.13.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 21.550.625 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1763. | 2.13.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 21.550.625 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1764. | 2.13.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.092.458.060 | | 5.950.500 | | 50.091.800 | | 11.003.700 | 10,66 | 21,97 | | 11.003.700 | 1,91 | 1,01 | | |
| | | Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1765. | 2.13.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 27.915.156 | | 3.248.000 | | 1.396.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 32 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1766. | 2.13.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 22.628.156 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1767. | 2.13.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 22.628.156 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1768. | 2.13.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 48.891.156 | | - | | 11.352.500 | | 1.953.700 | 25,00 | 17,21 | | 1.953.700 | 9,38 | 4,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 32 | | 0 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 9,38 | | | |
| 1769. | 2.13.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 36.717.156 | | - | | 5.373.300 | | 1.600.000 | 25,00 | 29,78 | | 1.600.000 | 9,38 | 4,36 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 32 | | 0 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 9,38 | | | |
| 1770. | 2.13.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 24.428.156 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 288 | | 0 | | 240 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1771. | 2.13.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | 22.628.156 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1772. | 2.13.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 30.578.156 | | 2.702.500 | | 1.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 60 | | 405 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1773. | 2.13.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 810.788.000 | | - | | 30.470.000 | | 7.450.000 | 13,95 | 24,45 | | 7.450.000 | 2,28 | 0,92 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 1315 | | 0 | | 215 | | 30 | | 13,95 | | 30 | | 2,28 | | | |
| 1774. | 2.13.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | 22.627.656 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1775. | 2.13.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | 22.628.156 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1776. | 2.13.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 831.462.000 | | 29.278.125 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai perencanaan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1777. | 2.13.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 400.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1778. | 2.13.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1779. | 2.13.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 105.000.000 | | 14.962.500 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 30 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1780. | 2.13.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 46.462.000 | | 14.315.625 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 15 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1781. | 2.13.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 210.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1782. | 2.13.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1783. | 2.13.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 921.004.500 | | 12.219.500 | | 26.064.660 | | 3.912.668 | 25,00 | 15,01 | | 3.912.668 | 4,79 | 0,42 | | |
| | | Persentase tersedianya jasa penunjang kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1784. | 2.13.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 20.000.000 | | - | | 900.000 | | 180.000 | 25,00 | 20,00 | | 180.000 | 1,65 | 0,90 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 182 | | 0 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 1,65 | | | |
| 1785. | 2.13.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 82.500.000 | | 12.219.500 | | 11.890.000 | | 2.422.668 | 25,00 | 20,38 | | 2.422.668 | 10,00 | 2,94 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 24 | | 6 | | 25,00 | | 6 | | 10,00 | | | |
| 1786. | 2.13.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 265.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 18 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1787. | 2.13.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 553.504.500 | | - | | 13.274.660 | | 1.310.000 | 25,00 | 9,87 | | 1.310.000 | 7,50 | 0,24 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 40 | | 0 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 7,50 | | | |
| 1788. | 2.13.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.695.678.094 | | 156.781.888 | | 76.674.799 | | 19.209.400 | 12,82 | 25,05 | | 19.209.400 | 0,80 | 1,13 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Persentase terlaksananya pemeliharaan BMD | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1789. | 2.13.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 957.765.469 | | 129.465.388 | | 61.674.799 | | 19.209.400 | 38,46 | 31,15 | | 19.209.400 | 5,62 | 2,01 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 89 | | 19 | | 13 | | 5 | | 38,46 | | 5 | | 5,62 | | | |
| 1790. | 2.13.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 90.512.625 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1791. | 2.13.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | 40.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 40 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1792. | 2.13.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 26.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 34 | | 0 | | 14 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1793. | 2.13.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 206.400.000 | | 27.316.500 | | 15.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1794. | 2.13.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 340.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1795. | 2.13.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 35.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1796.** | **2.13.02** | **PROGRAM PENATAAN DESA** | | | **40.000.000** | | **-** | | **37.549.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI | |
| | | Meningkatnya kualitas penataan desa | Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase) | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1797. | 2.13.02.2.01 | Penyelenggaraan Penataan Desa | | | 40.000.000 | | - | | 37.549.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Nagari yang difasilitasi dalam penataan desa | Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1798. | 2.13.02.2.01.0001 | Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | | | 10.000.000 | | - | | 37.549.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa) | 4 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1799. | 2.13.02.2.01.0002 | Fasilitasi Tata Wilayah Desa | | | 30.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penataan Wilayah Desa | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa) | 16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1800.** | **2.13.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA** | | | **2.500.000.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI | |
| | | Meningkatnya efektivitas kerja sama desa | Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase) | 100 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1801. | 2.13.03.2.01 | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa | | | 2.500.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase nagari yang difasilitasi dalam kerjasama antar Nagari/Desa | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1802. | 2.13.03.2.01.0001 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | | | 450.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen) | 400 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1803. | 2.13.03.2.01.0002 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota | | | 700.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen) | 400 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1804. | 2.13.03.2.01.0003 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | | | 1.350.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen) | 400 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| **1805.** | **2.13.04** | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | | | **4.694.354.642** | | **46.473.000** | | **165.260.000** | | **10.012.000** | **1,58** | **6,06** | | **10.012.000** | **0,29** | **0,21** | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI | |
| | | Meingkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase) | 100 | | 80 | | 80 | | 25 | | 31,25 | | 25 | | 25,00 | | | |
| | | | Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase) | 100 | | 0 | | 100 | | 25 | | 25,00 | | 25 | | 25,00 | | | |
| 1806. | 2.13.04.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | | 4.694.354.642 | | 46.473.000 | | 165.260.000 | | 10.012.000 | 1,58 | 6,06 | | 10.012.000 | 0,29 | 0,21 | | |
| | | Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1807. | 2.13.04.2.01.0001 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | | 377.000.000 | | 46.473.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen) | 370 | | 79 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1808. | 2.13.04.2.01.0002 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | | | 278.450.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen) | 460 | | 0 | | 79 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1809. | 2.13.04.2.01.0003 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | | | 127.900.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen) | 370 | | 0 | | 79 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1810. | 2.13.04.2.01.0004 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | | | 914.864.000 | | - | | 105.819.000 | | 5.112.000 | 6,33 | 4,83 | | 5.112.000 | 1,10 | 0,56 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen) | 455 | | 0 | | 79 | | 5 | | 6,33 | | 5 | | 1,10 | | | |
| 1811. | 2.13.04.2.01.0005 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | | | 73.000.000 | | - | | 59.441.000 | | 4.900.000 | 6,33 | 8,24 | | 4.900.000 | 2,06 | 6,71 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang) | 243 | | 0 | | 79 | | 5 | | 6,33 | | 5 | | 2,06 | | | |
| 1812. | 2.13.04.2.01.0006 | Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | | | 304.300.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan) | 370 | | 0 | | 79 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1813. | 2.13.04.2.01.0007 | Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | | | 687.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen) | 360 | | 0 | | 79 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1814. | 2.13.04.2.01.0008 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | | | 1.001.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen) | 370 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1815. | 2.13.04.2.01.0009 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | | | 380.400.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan) | 190 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1816. | 2.13.04.2.01.0010 | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | | | 192.632.995 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan) | 199 | | 0 | | 79 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1817. | 2.13.04.2.01.0011 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | | | 357.807.647 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen) | 316 | | 0 | | 79 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1818.** | **2.13.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | | | **9.961.184.400** | | **1.302.992.805** | | **499.858.340** | | **19.596.644** | **1,00** | **3,92** | | **19.596.644** | **0,75** | **0,20** | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI | |
| | | Meningkatknya kapasitas lembaga kemasyarakatan , lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase) | 100 | | 100 | | 90 | | 25 | | 27,78 | | 25 | | 25,00 | | | |
| | | | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase) | 100 | | 0 | | 90 | | 25 | | 27,78 | | 25 | | 25,00 | | | |
| 1819. | 2.13.05.2.01 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 9.961.184.400 | | 1.302.992.805 | | 499.858.340 | | 19.596.644 | 1,00 | 3,92 | | 19.596.644 | 0,75 | 0,20 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Nagari Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang difasilitasi Pemberdayaan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1820. | 2.13.05.2.01.0002 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | 1.031.973.200 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen) | 83 | | 0 | | 79 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1821. | 2.13.05.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | 1.694.769.400 | | 1.170.617.566 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga) | 103 | | 65 | | 79 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1822. | 2.13.05.2.01.0004 | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | 935.192.800 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Unit) | 316 | | 0 | | 79 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1823. | 2.13.05.2.01.0005 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | | | 600.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen) | 316 | | 0 | | 79 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1824. | 2.13.05.2.01.0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | 1.128.067.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan) | 13 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1825. | 2.13.05.2.01.0007 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | | | 1.053.002.000 | | 84.667.639 | | 99.858.340 | | 530.144 | 3,80 | 0,53 | | 530.144 | 3,61 | 0,05 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan) | 83 | | 1 | | 79 | | 3 | | 3,80 | | 3 | | 3,61 | | | |
| 1826. | 2.13.05.2.01.0008 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa | | | 1.080.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa (Dokumen) | 316 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1827. | 2.13.05.2.01.0009 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | | | 1.569.180.000 | | 47.707.600 | | 400.000.000 | | 19.066.500 | 3,23 | 4,77 | | 19.066.500 | 3,09 | 1,22 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen) | 97 | | 93 | | 93 | | 3 | | 3,23 | | 3 | | 3,09 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1828. | 2.13.05.2.01.0010 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | | | 869.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga) | 395 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **2.14** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | **59.027.767.424** | | **7.955.562.094** | | **8.511.862.145** | | **1.215.722.393** | **2,71** | **14,28** | | **1.215.722.393** | **0,25** | **2,06** | | |
| **1829.** | **2.14.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **30.141.597.698** | | **4.497.656.923** | | **5.782.477.145** | | **1.215.722.393** | **5,65** | **21,02** | | **1.215.722.393** | **0,81** | **4,03** | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 21,02 | | 21,02 | | 21,02 | | 21,02 | | | |
| 1830. | 2.14.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 346.292.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1831. | 2.14.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 22.292.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 10 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1832. | 2.14.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 13.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 10 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1833. | 2.14.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 97.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 10 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1834. | 2.14.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 13.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 10 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1835. | 2.14.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 13.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 10 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1836. | 2.14.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 18.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 20 | | 0 | | 24 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1837. | 2.14.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 2.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1838. | 2.14.01.2.01.0010 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 168.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1839. | 2.14.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 23.129.076.073 | | 4.214.024.550 | | 5.527.156.745 | | 1.215.722.393 | 65,00 | 22,00 | | 1.215.722.393 | 3,71 | 5,26 | | |
| | | Persentase Tertib Administrasi Keuangan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1840. | 2.14.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 22.617.076.073 | | 4.214.024.550 | | 5.527.156.745 | | 1.215.722.393 | 130,00 | 22,00 | | 1.215.722.393 | 26,00 | 5,38 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 250 | | 49 | | 50 | | 65 | | 130,00 | | 65 | | 26,00 | | | |
| 1841. | 2.14.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 265.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 48 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1842. | 2.14.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 222.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 48 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1843. | 2.14.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 18.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 5 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1844. | 2.14.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | 2.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1845. | 2.14.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 2.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 48 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1846. | 2.14.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | 2.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1847. | 2.14.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 1.882.993.832 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1848. | 2.14.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 424.993.832 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 200 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1849. | 2.14.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 1.458.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 200 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1850. | 2.14.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.744.665.143 | | 33.782.400 | | 34.010.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1851. | 2.14.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 23.000.000 | | 1.800.000 | | 1.800.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 25 | | 3 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1852. | 2.14.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 95.000.000 | | 14.063.000 | | 9.719.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 20 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1853. | 2.14.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 72.000.000 | | 5.349.400 | | 4.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 20 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1854. | 2.14.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 13.800.000 | | 1.125.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 5 | | 24 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1855. | 2.14.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 90.865.143 | | 2.550.000 | | 3.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1856. | 2.14.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 1.450.000.000 | | 8.895.000 | | 15.491.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1857. | 2.14.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.472.333.045 | | 6.750.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1858. | 2.14.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 946.759.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 7 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1859. | 2.14.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 232.333.045 | | 6.750.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 116 | | 10 | | 20 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1860. | 2.14.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 293.241.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 27 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1861. | 2.14.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 544.450.000 | | 151.462.044 | | 128.420.400 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1862. | 2.14.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 9.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 10 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1863. | 2.14.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 160.250.000 | | 16.998.196 | | 48.220.400 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1864. | 2.14.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 375.200.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1865. | 2.14.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | - | | 133.463.848 | | 79.200.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 0 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1866. | 2.14.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.021.787.605 | | 91.637.929 | | 92.890.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1867. | 2.14.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 823.090.000 | | 82.850.629 | | 86.590.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 400 | | 10 | | 15 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1868. | 2.14.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 66.989.605 | | 7.731.300 | | 6.300.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 50 | | 10 | | 25 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1869. | 2.14.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 131.708.000 | | 1.056.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1870.** | **2.14.02** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | | | **1.070.454.613** | | **89.855.000** | | **48.600.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| | | Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk | TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa) | 2,31 | | 2,38 | | 2,34 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks) | 88,2 | | 61 | | 79,8 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR 15-19) (Angka) | 11,3 | | 14,03 | | 13,6 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1871. | 2.14.02.2.01 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | | | 305.862.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase kebijakan pemerintah daerah provinsi yang ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten lima puluh kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk | Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan (Kegiatan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (Kegiatan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Daerah Kabupaten/Kota yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan (Kabupaten/Kota) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah (Perangkat Daerah) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1872. | 2.14.02.2.01.0016 | Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan | | | 55.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan | Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan (Kegiatan) | 25 | | 0 | | 13 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1873. | 2.14.02.2.01.0017 | Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga | Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (Kegiatan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1874. | 2.14.02.2.01.0023 | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana | | | 35.862.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan) | 29 | | 0 | | 13 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1875. | 2.14.02.2.01.0025 | Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1876. | 2.14.02.2.01.0027 | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal | | | 35.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal | Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan) | 22 | | 0 | | 13 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1877. | 2.14.02.2.01.0028 | Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1878. | 2.14.02.2.01.0029 | Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Daerah Kabupaten/Kota yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan (Kabupaten/Kota) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1879. | 2.14.02.2.01.0030 | Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1880. | 2.14.02.2.01.0031 | Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1881. | 2.14.02.2.01.0032 | Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Kepedulian Terhadap Isu Kependudukan (IKIK) | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan | Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1882. | 2.14.02.2.01.0033 | Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1883. | 2.14.02.2.01.0034 | Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah | Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah (Perangkat Daerah) | 120 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1884. | 2.14.02.2.02 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | 764.592.613 | | 89.855.000 | | 48.600.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Jumlah Penduduk Sebagai Sasaran Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Kajian Dampak Kependudukan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mellaui Sistem Informasi Keluarga (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1885. | 2.14.02.2.02.0009 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | | | 176.794.722 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan) | 52 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1886. | 2.14.02.2.02.0010 | Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga | | | 40.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga | Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan (Dokumen) | 52 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1887. | 2.14.02.2.02.0011 | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga | | | 176.794.724 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Data dan Informasi Keluarga | Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen) | 52 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1888. | 2.14.02.2.02.0012 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | | | 68.600.000 | | 44.600.000 | | 48.600.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan) | 130 | | 26 | | 26 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1889. | 2.14.02.2.02.0013 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | | | 80.000.000 | | 45.255.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen) | 208 | | 156 | | 156 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1890. | 2.14.02.2.02.0016 | Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota | Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk (Laporan) | 16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1891. | 2.14.02.2.02.0018 | Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana | | | 52.019.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana (Laporan) | 65 | | 0 | | 13 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1892. | 2.14.02.2.02.0022 | Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan | Jumlah Kajian Dampak Kependudukan (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1893. | 2.14.02.2.02.0023 | Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mealui Sistem Informasi Keluarga | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mellaui Sistem Informasi Keluarga (Dokumen) | 52 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1894. | 2.14.02.2.02.0024 | Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan | Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1895. | 2.14.02.2.02.0025 | Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Perumusan dan Evaluasi Parameter Pengendalian penduduk dan KB | Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1896. | 2.14.02.2.02.0026 | Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain | Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1897. | 2.14.02.2.02.0027 | Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyusunan profil program Bangga Kencana tingkat Kabupaten/Kota provinsi (Termasuk diseminasi dan evaluasi hasil penyusunan profil Pengendalian Penduduk dan KB) | Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen) | 52 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1898. | 2.14.02.2.02.0028 | Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | | | 30.384.167 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| **1899.** | **2.14.03** | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | | | **17.890.415.542** | | **1.886.250.171** | | **1.057.185.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| | | Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB) | Persentase kebutuhan ber KB yang terpenuhi (met need) (%) | 85,8 | | 84,86 | | 82,50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern (proportion of demand satisfied by modern methods) (%) | 85,8 | | 84,86 | | 82,50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase) | 10,5 | | 13,24 | | 13,1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase) | 76,3 | | 61,4 | | 65,82 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%) | 8 | | 15,3 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (Persentase) | 92,34 | | 96,2 | | 69,60 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1900. | 2.14.03.2.01 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | 5.764.054.096 | | 743.020.171 | | 238.300.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Kecamatan yang Mendapatkan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1901. | 2.14.03.2.01.0008 | Pengendalian Program KKBPK | | | 320.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan) | 52 | | 0 | | 13 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1902. | 2.14.03.2.01.0009 | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana | | | 200.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit) | 16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1903. | 2.14.03.2.01.0010 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | | | 2.789.800.000 | | 446.162.671 | | 195.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan) | 676 | | 130 | | 156 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1904. | 2.14.03.2.01.0011 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | | | 1.060.000.000 | | 165.445.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan) | 650 | | 82 | | 130 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1905. | 2.14.03.2.01.0012 | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | | | 625.000.000 | | 65.152.500 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen) | 262 | | 32 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1906. | 2.14.03.2.01.0013 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | 105.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen) | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1907. | 2.14.03.2.01.0014 | Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | | | 664.254.096 | | 66.260.000 | | 43.300.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi) | 270 | | 40 | | 40 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1908. | 2.14.03.2.02 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | | | 3.835.820.553 | | 266.100.000 | | 60.750.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang didayagunakan untuk mendukung program bangga kencana | Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1909. | 2.14.03.2.02.0002 | Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB | | | 834.036.064 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB | Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit) | 80 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1910. | 2.14.03.2.02.0004 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | | | 2.793.168.122 | | 266.100.000 | | 60.750.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang) | 3369 | | 697 | | 719 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1911. | 2.14.03.2.02.0005 | Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | | | 80.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi) | 50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1912. | 2.14.03.2.02.0007 | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | | | 128.616.367 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan) | 65 | | 0 | | 13 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1913. | 2.14.03.2.03 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | | | 6.380.120.893 | | 592.635.000 | | 627.335.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan (Kegiatan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1914. | 2.14.03.2.03.0001 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | 1.401.772.308 | | 14.315.000 | | 23.400.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan) | 130 | | 26 | | 26 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1915. | 2.14.03.2.03.0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | | | 2.122.498.676 | | 471.760.000 | | 603.935.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang) | 11531 | | 1.266 | | 1743 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1916. | 2.14.03.2.03.0004 | Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP | | | 750.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP | Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP (Laporan) | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1917. | 2.14.03.2.03.0005 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB | | | 507.000.000 | | 106.560.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1918. | 2.14.03.2.03.0006 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | | | 800.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit) | 120 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1919. | 2.14.03.2.03.0007 | Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB | | | 64.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB (Orang) | 175 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1920. | 2.14.03.2.03.0008 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | 150.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan) | 1302 | | 0 | | 26 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1921. | 2.14.03.2.03.0010 | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang) | 31 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1922. | 2.14.03.2.03.0011 | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | | | 20.849.909 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1923. | 2.14.03.2.03.0013 | Peningkatan Kesertaan KB Pria | | | 12.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria | Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1924. | 2.14.03.2.03.0015 | Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB | | | 12.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB | Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB (Orang) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1925. | 2.14.03.2.03.0016 | Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan | | | 200.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan | Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan (Orang) | 2900 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1926. | 2.14.03.2.03.0017 | Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan | | | 320.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan | Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan (Kegiatan) | 35568 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1927. | 2.14.03.2.04 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | | | 1.910.420.000 | | 284.495.000 | | 130.800.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten yang berperan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1928. | 2.14.03.2.04.0005 | Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas | | | 229.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas | Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1929. | 2.14.03.2.04.0006 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | | | 1.531.920.000 | | 284.495.000 | | 127.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas | Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung) | 360 | | 58 | | 58 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1930. | 2.14.03.2.04.0007 | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | | | 149.000.000 | | - | | 3.300.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen) | 64 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1931. | **2.14.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | | | **9.925.299.571** | | **1.481.800.000** | | **1.623.600.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| | | Meningkatknya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS) | Indeks Lansia Berdaya (Indeks) | 65,1 | | 69,15 | | 62 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks) | 89,5 | | 82,1 | | 85,1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase) | 90 | | 21 | | 70 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1932. | 2.14.04.2.01 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | 1.462.000.700 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Keluarga yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia (Kegiatan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah laporan Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1933. | 2.14.04.2.01.0014 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | | | 170.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga) | 1460 | | 0 | | 60 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1934. | 2.14.04.2.01.0015 | Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL | | | 70.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya aktifitas lansia sesuai tujuh dimensi lansia tangguh dalam mewujudkan lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif | Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia (Kegiatan) | 23 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1935. | 2.14.04.2.01.0016 | Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen) | 52 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1936. | 2.14.04.2.01.0017 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | | | 145.000.700 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan) | 65 | | 0 | | 13 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1937. | 2.14.04.2.01.0018 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | 292.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit) | 53 | | 0 | | 13 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1938. | 2.14.04.2.01.0019 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang) | 250 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1939. | 2.14.04.2.01.0020 | Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) | | | 86.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga) | Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Orang) | 5195 | | 0 | | 4345 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1940. | 2.14.04.2.01.0021 | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | 100.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) | Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan) | 52 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1941. | 2.14.04.2.01.0023 | Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga | | | 90.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) | Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Dokumen) | 52 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1942. | 2.14.04.2.01.0024 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | 100.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang) | 2000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1943. | 2.14.04.2.01.0025 | Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) | | | 29.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Laporan) | 52 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1944. | 2.14.04.2.01.0026 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | 75.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya biaya operasional bagi bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok) | 39 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1945. | 2.14.04.2.01.0027 | Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) | | | 70.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Dokumen) | 14 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1946. | 2.14.04.2.01.0028 | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | | | 65.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok) | 65 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1947. | 2.14.04.2.01.0029 | Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | | | 70.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | Jumlah laporan Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Laporan) | 52 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1948. | 2.14.04.2.02 | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | 8.463.298.871 | | 1.481.800.000 | | 1.623.600.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kabupaten yang Berperan dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1949. | 2.14.04.2.02.0005 | Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | | | 3.898.548.835 | | 592.600.000 | | 369.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan) | 650 | | 130 | | 130 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1950. | 2.14.04.2.02.0006 | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | | | 4.428.000.000 | | 889.200.000 | | 1.254.600.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan) | 650 | | 130 | | 130 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1951. | 2.14.04.2.02.0007 | Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga | | | 101.550.036 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga | Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan) | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1952. | 2.14.04.2.02.0008 | Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga | | | 35.200.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga (Laporan) | 16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **2.15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | **158.959.270.265** | | **14.942.086.814** | | **15.792.334.625** | | **3.494.143.230** | **13,14** | **22,13** | | **3.494.143.230** | **0,72** | **2,20** | | |
| **1953.** | **2.15.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **123.111.197.265** | | **13.014.140.966** | | **7.868.416.415** | | **2.022.157.944** | **20,14** | **25,70** | | **2.022.157.944** | **1,08** | **1,64** | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%) | 100 | | 98 | | 100 | | 26 | | 26,00 | | 26 | | 26,00 | | | |
| 1954. | 2.15.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 572.686.570 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1955. | 2.15.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 144.984.840 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1956. | 2.15.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 44.924.880 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1957. | 2.15.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 54.114.060 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1958. | 2.15.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 45.436.921 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1959. | 2.15.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 77.597.520 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1960. | 2.15.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 158.685.423 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 15 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1961. | 2.15.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 46.942.926 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1962. | 2.15.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 27.693.493.253 | | 5.450.780.765 | | 7.550.662.415 | | 1.968.340.221 | 0,00 | 26,07 | | 1.968.340.221 | 0,00 | 7,11 | | |
| | | Persentase tertib administrasi keuangan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1963. | 2.15.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 27.348.310.407 | | 5.435.782.765 | | 7.545.334.415 | | 1.968.340.221 | 0,00 | 26,09 | | 1.968.340.221 | 0,00 | 7,20 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 925 | | 77 | | 163 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1964. | 2.15.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 101.690.724 | | 14.998.000 | | 5.328.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 60 | | 1 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1965. | 2.15.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 119.265.639 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1966. | 2.15.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | 32.726.754 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1967. | 2.15.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 40.958.217 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1968. | 2.15.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | 50.541.511 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1969. | 2.15.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 1.812.446.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Peresentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1970. | 2.15.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 1.392.446.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 335 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1971. | 2.15.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 420.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 45 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1972. | 2.15.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 2.965.386.477 | | 118.638.200 | | 53.402.000 | | 10.817.300 | 35,00 | 20,26 | | 10.817.300 | 3,33 | 0,36 | | |
| | | Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1973. | 2.15.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 72.946.000 | | 7.000.000 | | 2.200.000 | | 1.112.000 | 50,00 | 50,55 | | 1.112.000 | 5,00 | 1,52 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 20 | | 4 | | 2 | | 1 | | 50,00 | | 1 | | 5,00 | | | |
| 1974. | 2.15.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 97.656.117 | | 10.000.000 | | 5.000.000 | | 2.439.000 | 50,00 | 48,78 | | 2.439.000 | 5,00 | 2,50 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 20 | | 4 | | 2 | | 1 | | 50,00 | | 1 | | 5,00 | | | |
| 1975. | 2.15.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 408.283.384 | | 33.428.000 | | 14.400.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 20 | | 4 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1976. | 2.15.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 267.785.976 | | 21.996.000 | | 12.000.000 | | 5.031.000 | 50,00 | 41,93 | | 5.031.000 | 5,00 | 1,88 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 60 | | 12 | | 6 | | 3 | | 50,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 1977. | 2.15.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 68.583.000 | | 3.886.800 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 60 | | 12 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1978. | 2.15.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 2.050.132.000 | | 42.327.400 | | 19.802.000 | | 2.235.300 | 25,00 | 11,29 | | 2.235.300 | 5,00 | 0,11 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 1979. | 2.15.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 3.054.149.789 | | 30.174.649 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1980. | 2.15.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 1.445.782.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1981. | 2.15.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 455.530.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 204 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1982. | 2.15.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 1.152.837.789 | | 30.174.649 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 99 | | 4 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1983. | 2.15.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 81.252.258.262 | | 7.152.849.118 | | 156.562.000 | | 33.200.423 | 16,67 | 21,21 | | 33.200.423 | 3,33 | 0,04 | | |
| | | Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1984. | 2.15.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 17.500.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 500.000 | 25,00 | 25,00 | | 500.000 | 5,00 | 2,86 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 20 | | 4 | | 4 | | 1 | | 25,00 | | 1 | | 5,00 | | | |
| 1985. | 2.15.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 43.214.744.867 | | 6.077.645.505 | | 117.142.000 | | 26.700.423 | 25,00 | 22,79 | | 26.700.423 | 5,00 | 0,06 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 1986. | 2.15.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 80.754.883 | | 6.943.613 | | 1.420.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 4 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1987. | 2.15.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 37.939.258.512 | | 1.066.260.000 | | 36.000.000 | | 6.000.000 | 16,67 | 16,67 | | 6.000.000 | 3,33 | 0,02 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 2 | | 16,67 | | 2 | | 3,33 | | | |
| 1988. | 2.15.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 5.760.776.914 | | 261.698.234 | | 107.790.000 | | 9.800.000 | 0,00 | 9,09 | | 9.800.000 | 0,00 | 0,17 | | |
| | | Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1989. | 2.15.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 3.594.276.914 | | 261.698.234 | | 107.790.000 | | 9.800.000 | 0,00 | 9,09 | | 9.800.000 | 0,00 | 0,27 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 125 | | 19 | | 21 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1990. | 2.15.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 1.766.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1991. | 2.15.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 400.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1992.** | **2.15.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | | | **35.848.073.000** | | **1.927.945.848** | | **7.923.918.210** | | **1.471.985.286** | **7,14** | **18,58** | | **1.471.985.286** | **0,36** | **4,11** | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | | Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat | Konektivitas Darat (Persentase) | 15 | | 1,15 | | 11 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase) | 43 | | 54,5 | | 53 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1993. | 2.15.02.2.01 | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | 2.840.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Tercapainya Pelaksanaan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1994. | 2.15.02.2.01.0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | 2.040.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen) | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1995. | 2.15.02.2.01.0002 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | 800.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen) | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1996. | 2.15.02.2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | 15.034.630.000 | | 1.430.589.968 | | 7.548.297.210 | | 1.394.635.286 | 0,00 | 18,48 | | 1.394.635.286 | 0,00 | 9,28 | | |
| | | Persentase sarana keselamatan lalu lintas jalan di jalan yang berfungsi dengan baik | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1997. | 2.15.02.2.02.0001 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | 750.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1998. | 2.15.02.2.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | 4.584.550.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit) | 148 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1999. | 2.15.02.2.02.0003 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | | | 1.200.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit) | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2000. | 2.15.02.2.02.0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | | | 8.500.080.000 | | 1.430.589.968 | | 7.548.297.210 | | 1.394.635.286 | 0,00 | 18,48 | | 1.394.635.286 | 0,00 | 16,41 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit) | 2500 | | 475 | | 600 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2001. | 2.15.02.2.04 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | | | 1.649.920.000 | | 2.880.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase tercapainya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2002. | 2.15.02.2.04.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | 1.249.920.000 | | 2.880.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen) | 5 | | 0 | | 8 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2003. | 2.15.02.2.04.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 400.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2004. | 2.15.02.2.05 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | 2.068.000.000 | | 328.855.980 | | 257.621.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan (%) | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2005. | 2.15.02.2.05.0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | 511.000.000 | | 258.159.500 | | 121.824.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit) | 29 | | 5 | | 5000 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2006. | 2.15.02.2.05.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | 237.436.000 | | 32.135.700 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang) | 10 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2007. | 2.15.02.2.05.0004 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | 667.731.900 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen) | 116200 | | 0 | | 5000 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2008. | 2.15.02.2.05.0007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | 408.926.100 | | 38.560.780 | | 135.797.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit) | 45 | | 9 | | 9 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2009. | 2.15.02.2.05.0008 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | 242.906.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan) | 100 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2010. | 2.15.02.2.06 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | 10.389.442.000 | | 124.344.000 | | 90.000.000 | | 77.350.000 | 50,00 | 85,94 | | 77.350.000 | 1,59 | 0,74 | | |
| | | Persentase tercapainya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah lokasi Rute Aman Sekolah (RASS) yang diidentifikasi dan diawasi (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011. | 2.15.02.2.06.0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | | | 334.644.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2012. | 2.15.02.2.06.0008 | Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) | | | 2.400.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbangunnya Rute Aman Selamat Sekolah | Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun (Unit) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2013. | 2.15.02.2.06.0009 | Monitoring dan evaluasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) | | | 80.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) | Jumlah lokasi Rute Aman Sekolah (RASS) yang diidentifikasi dan diawasi (Laporan) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2014. | 2.15.02.2.06.0010 | Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS) | | | 80.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap zona selamat sekolah (ZOSS) | Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi (Laporan) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2015. | 2.15.02.2.06.0013 | Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) | | | 4.800.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) | Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (Unit) | 32 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2016. | 2.15.02.2.06.0016 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | | | 363.380.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen) | 240 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2017. | 2.15.02.2.06.0017 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | 2.331.418.000 | | 124.344.000 | | 90.000.000 | | 77.350.000 | 100,00 | 85,94 | | 77.350.000 | 11,11 | 3,32 | | |
| | | Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan) | 9 | | 2 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 11,11 | | | |
| 2018. | 2.15.02.2.07 | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | | | 847.859.500 | | 7.755.000 | | 2.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase tercapainya pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019. | 2.15.02.2.07.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | | | 320.581.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan) | 30 | | 0 | | 6 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2020. | 2.15.02.2.07.0005 | Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin | | | 120.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Kompetensi Penilai Andalalin | Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (Orang) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2021. | 2.15.02.2.07.0006 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin | | | 147.278.500 | | 7.755.000 | | 2.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin | Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan) | 45 | | 6 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2022. | 2.15.02.2.07.0008 | Penetapan Dokumen Teknis Andalalin | | | 260.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Ditetapkannya Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin | Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan (Dokumen) | 26 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2023. | 2.15.02.2.08 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | | | 1.072.900.000 | | 19.505.900 | | 6.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang terlaksana | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024. | 2.15.02.2.08.0004 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | | | 401.950.000 | | 19.505.900 | | 6.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (Laporan) | 27 | | 7 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2025. | 2.15.02.2.08.0007 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | | | 150.950.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan) | 15 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2026. | 2.15.02.2.08.0008 | Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | | | 520.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2027. | 2.15.02.2.09 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 600.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase tertibnya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2028. | 2.15.02.2.09.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | 400.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2029. | 2.15.02.2.09.0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 200.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2030. | 2.15.02.2.10 | Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.000.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase terlaksananya Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1 (satu) | Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2031. | 2.15.02.2.10.0001 | Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 1.000.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terciptanya Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2032. | 2.15.02.2.14 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 345.321.500 | | 14.015.000 | | 20.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase tertibnya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2033. | 2.15.02.2.14.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 345.321.500 | | 14.015.000 | | 20.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) | 4 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **2.16** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | **41.825.649.260** | | **7.035.359.873** | | **7.138.037.665** | | **1.291.119.948** | **0,81** | **18,09** | | **1.291.119.948** | **0,64** | **3,09** | | |
| **2034.** | **2.16.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **30.017.352.260** | | **4.854.935.764** | | **5.051.101.665** | | **1.221.444.524** | **0,00** | **24,18** | | **1.221.444.524** | **0,00** | **4,07** | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2035. | 2.16.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 170.767.200 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2036. | 2.16.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 26.602.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKAI SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2037. | 2.16.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 32.200.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2038. | 2.16.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 25.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2039. | 2.16.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 29.883.200 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah dokumen perencanaan | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2040. | 2.16.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 31.802.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2041. | 2.16.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 25.280.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2042. | 2.16.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 23.052.238.489 | | 4.445.825.307 | | 4.803.695.851 | | 1.162.921.617 | 0,00 | 24,21 | | 1.162.921.617 | 0,00 | 5,04 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2043. | 2.16.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 30.280.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2044. | 2.16.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 23.021.958.489 | | 4.445.825.307 | | 4.803.695.851 | | 1.162.921.617 | 0,00 | 24,21 | | 1.162.921.617 | 0,00 | 5,05 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 60 | | 51 | | 52 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2045. | 2.16.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 710.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2046. | 2.16.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 250.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2047. | 2.16.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 210.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2048. | 2.16.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 250.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2049. | 2.16.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.126.802.800 | | 93.642.612 | | 34.937.817 | | 2.277.100 | 0,00 | 6,52 | | 2.277.100 | 0,00 | 0,20 | | |
| | | Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050. | 2.16.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 606.532.000 | | 54.095.704 | | 10.100.000 | | 2.100.000 | 0,00 | 20,79 | | 2.100.000 | 0,00 | 0,35 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 60 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2051. | 2.16.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 22.300.000 | | 1.300.000 | | 1.488.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2052. | 2.16.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 33.999.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 100 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2053. | 2.16.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 304.422.000 | | 30.173.000 | | 9.932.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2054. | 2.16.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 23.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2055. | 2.16.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 20.550.000 | | 2.391.608 | | 1.500.000 | | 177.100 | 0,00 | 11,81 | | 177.100 | 0,00 | 0,86 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2056. | 2.16.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 89.999.800 | | 5.682.300 | | 11.917.817 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah paket peralatan rumah tangga kantor yang disediakan | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2057. | 2.16.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 26.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2058. | 2.16.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.540.670.382 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2059. | 2.16.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 253.670.382 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2060. | 2.16.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 672.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2061. | 2.16.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 380.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 5 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2062. | 2.16.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 235.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 4 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2063. | 2.16.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.656.923.014 | | 237.609.011 | | 176.751.031 | | 52.420.807 | 0,00 | 29,66 | | 52.420.807 | 0,00 | 3,16 | | |
| | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2064. | 2.16.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 12.575.000 | | 1.570.000 | | 500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2065. | 2.16.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 794.325.014 | | 115.465.188 | | 132.868.399 | | 13.019.575 | 0,00 | 9,80 | | 13.019.575 | 0,00 | 1,64 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 3 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2066. | 2.16.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 850.023.000 | | 120.573.823 | | 43.382.632 | | 39.401.232 | 0,00 | 90,82 | | 39.401.232 | 0,00 | 4,64 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 5 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2067. | 2.16.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.759.950.375 | | 77.858.834 | | 35.716.966 | | 3.825.000 | 0,00 | 10,71 | | 3.825.000 | 0,00 | 0,22 | | |
| | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2068. | 2.16.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 424.024.996 | | 15.563.386 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2069. | 2.16.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 65.000.000 | | 21.046.421 | | 2.080.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 24 | | 20 | | 20 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dipelihara/ rehabilitasi | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070. | 2.16.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 588.225.379 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 30 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara yang dibayarkan pajak dan perizinannya | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2071. | 2.16.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 682.700.000 | | 41.249.027 | | 33.636.966 | | 3.825.000 | 0,00 | 11,37 | | 3.825.000 | 0,00 | 0,56 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 5 | | 6 | | 6 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2072.** | **2.16.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | | | **2.107.553.000** | | **371.423.109** | | **260.000.000** | | **69.675.424** | **6,25** | **26,80** | | **69.675.424** | **6,25** | **3,31** | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |
| | | Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah | Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei) (%) | 83,2 | | 87 | | 82,8 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2073. | 2.16.02.2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.107.553.000 | | 371.423.109 | | 260.000.000 | | 69.675.424 | 6,25 | 26,80 | | 69.675.424 | 6,25 | 3,31 | | |
| | | Jumlah aktivitas relasi media kepada media | Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2074. | 2.16.02.2.01.0014 | Relasi Media | | | 1.730.863.000 | | 333.354.509 | | 253.000.000 | | 69.675.424 | 25,00 | 27,54 | | 69.675.424 | 25,00 | 4,03 | | |
| | | Terlaksananya Relasi Media | Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan) | 12 | | 1 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| | | Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik | Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2075. | 2.16.02.2.01.0019 | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik | | | 151.000.000 | | 15.558.600 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik | Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi) | 48 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2076. | 2.16.02.2.01.0017 | Pelayanan Informasi Publik | | | 51.690.000 | | 510.000 | | 7.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pelayanan Informasi Publik | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan) | 16 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah dokumen pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2077. | 2.16.02.2.01.0021 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | | | 174.000.000 | | 22.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media) | 48 | | 5 | | 63 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2078.** | **2.16.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | | | **9.700.744.000** | | **1.809.001.000** | | **1.826.936.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |
| | | Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika | Indeks SPBE (Indeks Pemerintah Digital/Indeks Pemdi) (Indeks) | 1,7 | | 3,39 | | 1,3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2079. | 2.16.03.2.01 | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | 334.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080. | 2.16.03.2.01.0004 | Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | | | 334.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2081. | 2.16.03.2.02 | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | 9.700.410.000 | | 1.809.001.000 | | 1.826.936.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city | Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2082. | 2.16.03.2.02.0038 | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas | | | 90.225.000 | | - | | 600.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas | Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan pusat data nasional | Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2083. | 2.16.03.2.02.0033 | Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah | | | 107.765.000 | | - | | 12.870.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah | Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah Aplikasi khusus yang dibangun dan/ atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (aplikasi) | Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2084. | 2.16.03.2.02.0032 | Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE | | | 250.000 | | - | | 1.765.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE | Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah perangkat daerah dipemerintah kab/ kota yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah kab/ kota | Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2085. | 2.16.03.2.02.0024 | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | | | 9.444.000.000 | | 1.809.001.000 | | 1.809.001.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah) | 43 | | 43 | | 43 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE | Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2086. | 2.16.03.2.02.0019 | Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE | | | 58.170.000 | | - | | 2.700.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE | Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **2.17** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | **34.557.575.745** | | **4.834.339.558** | | **4.970.283.739** | | **1.076.136.362** | **0,92** | **21,65** | | **1.076.136.362** | **0,12** | **3,11** | | |
| **2087.** | **2.17.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **27.050.165.549** | | **4.672.099.866** | | **4.870.283.739** | | **1.076.136.362** | **1,58** | **22,10** | | **1.076.136.362** | **0,21** | **3,98** | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 22,09 | | 22,09 | | 22,09 | | 22,09 | | | |
| 2088. | 2.17.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 81.629.500 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2089. | 2.17.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 42.969.300 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 30 | | 0 | | 6 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2090. | 2.17.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 38.660.200 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 15 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2091. | 2.17.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 21.180.618.078 | | 4.266.900.429 | | 4.707.477.739 | | 1.056.479.916 | 0,00 | 22,44 | | 1.056.479.916 | 0,00 | 4,99 | | |
| | | Persentase tertib administrasi keuangan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2092. | 2.17.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 21.059.279.578 | | 4.266.900.429 | | 4.707.477.739 | | 1.056.479.916 | 0,00 | 22,44 | | 1.056.479.916 | 0,00 | 5,02 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 44 | | 42 | | 44 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2093. | 2.17.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 52.598.500 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2094. | 2.17.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | 37.830.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2095. | 2.17.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 30.910.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2096. | 2.17.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 49.867.400 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase tertib administrasi barang milik daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2097. | 2.17.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | 20.947.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2098. | 2.17.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 28.920.400 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2099. | 2.17.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 227.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100. | 2.17.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 227.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 7 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2101. | 2.17.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.233.994.529 | | 62.640.766 | | 30.770.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2102. | 2.17.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 28.505.000 | | 995.000 | | 1.228.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2103. | 2.17.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 189.600.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2104. | 2.17.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 157.365.729 | | 26.375.000 | | 12.495.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 10 | | 8 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2105. | 2.17.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 118.671.800 | | 9.860.100 | | 8.997.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 10 | | 8 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2106. | 2.17.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 16.200.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2107. | 2.17.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 92.220.000 | | 1.740.000 | | 450.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 60 | | 3 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2108. | 2.17.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 631.432.000 | | 23.670.666 | | 7.600.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 60 | | 3 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2109. | 2.17.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 761.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai perencanaan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2110. | 2.17.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 724.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 11 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2111. | 2.17.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 12.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | | 0 | | 20 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2112. | 2.17.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 25.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2113. | 2.17.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.347.000.000 | | 229.567.261 | | 83.230.000 | | 14.245.446 | 8,33 | 17,12 | | 14.245.446 | 1,67 | 1,06 | | |
| | | Persentase ketersdiaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2114. | 2.17.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 5.000.000 | | 500.000 | | 500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 5 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2115. | 2.17.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 517.000.000 | | 82.583.800 | | 82.730.000 | | 14.245.446 | 25,00 | 17,22 | | 14.245.446 | 5,00 | 2,76 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 3 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 2116. | 2.17.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 825.000.000 | | 146.483.461 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 3 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2117. | 2.17.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.168.556.042 | | 112.991.410 | | 48.806.000 | | 5.411.000 | 1,15 | 11,09 | | 5.411.000 | 0,14 | 0,25 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2118. | 2.17.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 987.800.000 | | 95.526.410 | | 46.500.000 | | 5.411.000 | 3,45 | 11,64 | | 5.411.000 | 0,58 | 0,55 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 173 | | 29 | | 29 | | 1 | | 3,45 | | 1 | | 0,58 | | | |
| 2119. | 2.17.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 120.756.042 | | 17.465.000 | | 2.306.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 91 | | 20 | | 15 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2120. | 2.17.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 155.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2121. | 2.17.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 905.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2122.** | **2.17.02** | **PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM** | | | **450.000.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| | | Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam | Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2123. | 2.17.02.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 300.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terfasilitasinya penerbitan izin usaha koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2124. | 2.17.02.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 300.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha) | 102 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2125. | 2.17.02.2.02 | Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 150.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terfasilitasinya izin penerbitan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2126. | 2.17.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 150.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terfasilitasinya Pemenuhan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha) | 102 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2127.** | **2.17.03** | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | | | **850.000.000** | | **10.771.670** | | **45.400.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| | | Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi | Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase) | 15 | | 20,11 | | 5 | | 23,09 | | 461,80 | | 23,09 | | 153,93 | | | |
| 2128. | 2.17.03.2.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | 850.000.000 | | 10.771.670 | | 45.400.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya proses pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2129. | 2.17.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | | 850.000.000 | | 10.771.670 | | 45.400.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha) | 540 | | 82 | | 79 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2130.** | **2.17.04** | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | | | **320.000.000** | | **6.139.646** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| | | Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi | Persentase Koperasi Aktif (Persentase) | 65 | | 62,02 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2131. | 2.17.04.2.01 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 320.000.000 | | 6.139.646 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2132. | 2.17.04.2.01.0001 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 10.000.000 | | 6.139.646 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha) | 10 | | 71 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2133. | 2.17.04.2.01.0003 | Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan | | | 310.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan | Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha) | 64 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2134.** | **2.17.05** | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | | | **1.545.000.000** | | **80.948.864** | | **54.600.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| | | Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian | Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase) | 10 | | 22,7 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2135. | 2.17.05.2.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.545.000.000 | | 80.948.864 | | 54.600.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2136. | 2.17.05.2.01.0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | | | 1.545.000.000 | | 80.948.864 | | 54.600.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang) | 2570 | | 316 | | 316 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2137.** | **2.17.06** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | | | **645.606.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| | | Meningkatnya produktivitas Koperasi | Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase) | 20 | | 0 | | 16 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2138. | 2.17.06.2.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 645.606.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2139. | 2.17.06.2.01.0002 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | | | 277.406.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga) | 270 | | 0 | | 30 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2140. | 2.17.06.2.01.0004 | Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | | 115.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha) | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2141. | 2.17.06.2.01.0005 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | | | 253.200.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha) | 185 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2142.** | **2.17.07** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | | | **1.509.591.048** | | **45.999.400** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| | | Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri | Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase) | 2,5 | | 13,12 | | 2,5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Pertumbuhan Wirausaha (Persentase) | 2,5 | | 13,12 | | 2,5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2143. | 2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | | | 1.509.591.048 | | 45.999.400 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Para Pemangku Kepentingan | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi (Unit Usaha) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2144. | 2.17.07.2.01.0002 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | | | 72.094.548 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha) | 340 | | 0 | | 80 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2145. | 2.17.07.2.01.0003 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | | | 63.000.200 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha) | 290 | | 0 | | 60 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2146. | 2.17.07.2.01.0007 | Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil | | | 340.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terfasilitasinya Usaha MIkro dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) | 240 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2147. | 2.17.07.2.01.0009 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil | | | 45.499.400 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terfasilitasinya Hak Kekayaan Intelektual Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi (Unit Usaha) | 60 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2148. | 2.17.07.2.01.0011 | Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro | | | 145.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) | 55 | | 0 | | 20 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2149. | 2.17.07.2.01.0013 | Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik | | | 116.998.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) | 110 | | 0 | | 20 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2150. | 2.17.07.2.01.0014 | Penyusunan Basis Data Usaha Mikro | | | 346.998.800 | | 45.999.400 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha) | 420 | | 230 | | 80 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2151. | 2.17.07.2.01.0015 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | | | 380.000.100 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang) | 290 | | 0 | | 60 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2152.** | **2.17.08** | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | | | **2.187.213.148** | | **18.380.112** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| | | Meningkatnya daya sain UMKM | Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase) | 3 | | 0,11 | | 1,8 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2153. | 2.17.08.2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | | | 2.187.213.148 | | 18.380.112 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Lembaga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2154. | 2.17.08.2.01.0002 | Pengembangan Usaha Mikro | | | 156.000.500 | | 18.380.112 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) | 300 | | 84 | | 60 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2155. | 2.17.08.2.01.0004 | Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang | | | 1.229.212.048 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjeniang | Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Lembaga) | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2156. | 2.17.08.2.01.0005 | Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro | | | 600.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Inkubator Wirausaha | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) | 80 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2157. | 2.17.08.2.01.0006 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | | | 202.000.600 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha) | 23 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **2.18** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | **28.918.698.364** | | **4.005.348.110** | | **3.540.116.072** | | **807.640.233** | **12,53** | **22,81** | | **807.640.233** | **3,03** | **2,79** | | |
| **2158.** | **2.18.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **21.599.684.264** | | **3.947.610.810** | | **3.540.116.072** | | **807.640.233** | **19,00** | **22,81** | | **807.640.233** | **3,65** | **3,74** | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 25 | | 25,00 | | 25 | | 25,00 | | | |
| 2159. | 2.18.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 205.000.000 | | 14.912.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2160. | 2.18.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 53.900.000 | | 9.952.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 11 | | 8 | | 8 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2161. | 2.18.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 40.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 10 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2162. | 2.18.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 4 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2163. | 2.18.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2164. | 2.18.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2165. | 2.18.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 31.100.000 | | 4.960.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 5 | | 5 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2166. | 2.18.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 5 | | 0 | | 6 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2167. | 2.18.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 15.909.812.630 | | 3.311.035.133 | | 3.403.482.071 | | 779.823.977 | 0,00 | 22,91 | | 779.823.977 | 0,00 | 4,90 | | |
| | | Jumlah Dokumen dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2168. | 2.18.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 15.644.639.230 | | 3.300.711.133 | | 3.403.482.071 | | 779.823.977 | 0,00 | 22,91 | | 779.823.977 | 0,00 | 4,98 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 174 | | 28 | | 30 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2169. | 2.18.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 110.000.000 | | 4.976.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2170. | 2.18.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 110.000.000 | | 5.348.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 5 | | 19 | | 19 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2171. | 2.18.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | 45.173.400 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2172. | 2.18.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 200.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Dokumen dan Laporan Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2173. | 2.18.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | 200.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2174. | 2.18.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.443.165.951 | | 211.943.577 | | 56.450.001 | | 14.783.900 | 50,00 | 26,19 | | 14.783.900 | 10,00 | 1,02 | | |
| | | Jumlah Administrasi aerah yang Tersediat | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2175. | 2.18.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 25.000.000 | | 3.021.000 | | 5.000.000 | | 1.692.000 | 100,00 | 33,84 | | 1.692.000 | 20,00 | 6,77 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 2176. | 2.18.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 212.000.000 | | 106.464.100 | | 22.791.749 | | 7.499.700 | 50,00 | 32,91 | | 7.499.700 | 10,00 | 3,54 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 10 | | 2 | | 2 | | 1 | | 50,00 | | 1 | | 10,00 | | | |
| 2177. | 2.18.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 177.000.000 | | 6.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2178. | 2.18.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 202.720.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 1.992.400 | 100,00 | 33,21 | | 1.992.400 | 20,00 | 0,98 | | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 2179. | 2.18.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 323.000.000 | | 8.660.400 | | 12.001.252 | | 3.599.800 | 100,00 | 30,00 | | 3.599.800 | 20,00 | 1,11 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 2180. | 2.18.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 50.000.000 | | 7.235.000 | | 300.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2181. | 2.18.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 453.445.951 | | 74.563.077 | | 10.357.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2182. | 2.18.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 845.163.473 | | 129.600.930 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Dokumen dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2183. | 2.18.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 403.263.872 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 30 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2184. | 2.18.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 441.899.601 | | 129.600.930 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 40 | | 29 | | 8 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2185. | 2.18.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.667.393.332 | | 134.480.232 | | 23.234.000 | | 5.530.164 | 33,33 | 23,80 | | 5.530.164 | 6,67 | 0,33 | | |
| | | Jumlah Laporan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2186. | 2.18.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 4.094.488 | | 280.000 | | 280.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2187. | 2.18.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 774.810.844 | | 21.522.952 | | 22.954.000 | | 5.530.164 | 100,00 | 24,09 | | 5.530.164 | 20,00 | 0,71 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 2188. | 2.18.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 888.488.000 | | 112.677.280 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2189. | 2.18.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.329.148.878 | | 145.638.938 | | 56.950.000 | | 7.502.192 | 12,50 | 13,17 | | 7.502.192 | 2,50 | 0,56 | | |
| | | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2190. | 2.18.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 951.179.990 | | 135.638.938 | | 46.950.000 | | 7.502.192 | 25,00 | 15,98 | | 7.502.192 | 5,00 | 0,79 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 100 | | 20 | | 20 | | 5 | | 25,00 | | 5 | | 5,00 | | | |
| 2191. | 2.18.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 377.968.888 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 454 | | 19 | | 19 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2192.** | **2.18.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | | | **1.577.507.100** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | | Meningkatnya kemudahan berinvestasi | Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase) | 90 | | 0 | | 90 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2193. | 2.18.02.2.01 | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | 733.130.100 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | jumlah kebijakan penanaman modal | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2194. | 2.18.02.2.01.0001 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | | | 300.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2195. | 2.18.02.2.01.0003 | Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota | | | 433.130.100 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2196. | 2.18.02.2.02 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | 844.377.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Rancangan Umum Penanaman Modal | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2197. | 2.18.02.2.02.0001 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | 350.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2198. | 2.18.02.2.02.0003 | Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) | | | 174.377.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya data potensi investasi daerah yang termutakhirkan | Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2199. | 2.18.02.2.02.0004 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | 320.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2200.** | **2.18.03** | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | | | **766.287.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | | Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal | Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase) | 15 | | 10 | | 15 | | 10 | | 66,67 | | 10 | | 66,67 | | | |
| 2201. | 2.18.03.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | 766.287.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah dokumen promosi dan strategi promosi penanaman modal | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2202. | 2.18.03.2.01.0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | 356.572.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen) | 13 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2203. | 2.18.03.2.01.0003 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 409.715.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewewenangan kab/kota | Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen) | 18 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2204.** | **2.18.04** | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | | | **1.902.440.000** | | **14.132.000** | | **-** | | **-** | **4,55** | **0,00** | | **-** | **8,77** | **0,00** | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | | Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase) | 96 | | 20 | | 96 | | 25 | | 26,04 | | 25 | | 26,04 | | | |
| 2205. | 2.18.04.2.01 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | | | 1.902.440.000 | | 14.132.000 | | - | | - | 4,55 | 0,00 | | - | 8,77 | 0,00 | | |
| | | jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal kabupaten | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2206. | 2.18.04.2.01.0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | 1.054.440.000 | | 14.132.000 | | - | | - | 13,64 | 0,00 | | - | 26,32 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha) | 570 | | 1.100 | | 1100 | | 150 | | 13,64 | | 150 | | 26,32 | | | |
| 2207. | 2.18.04.2.01.0007 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko | | | 480.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha) | 270 | | 0 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2208. | 2.18.04.2.01.0008 | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko | | | 368.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha) | 250 | | 0 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2209.** | **2.18.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | | | **1.893.600.000** | | **38.475.000** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | | Terkendaliya pelaksanaan penanaman modal | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase) | 100 | | 20 | | 100 | | 25 | | 25,00 | | 25 | | 25,00 | | | |
| 2210. | 2.18.05.2.01 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.893.600.000 | | 38.475.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah pemantauanpembinaan pengawasan investor | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2211. | 2.18.05.2.01.0004 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | | | 480.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.) | 60 | | 6 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2212. | 2.18.05.2.01.0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | | | 798.360.000 | | 4.300.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha) | 2831 | | 0 | | 550 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2213. | 2.18.05.2.01.0006 | Pengawasan Penanaman Modal | | | 615.240.000 | | 34.175.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha) | 701 | | 24 | | 125 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2214.** | **2.18.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | | | **1.179.180.000** | | **5.130.300** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | | Menigkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal | Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase) | 96 | | 10 | | 96 | | 20 | | 20,83 | | 20 | | 20,83 | | | |
| 2215. | 2.18.06.2.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.179.180.000 | | 5.130.300 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah penyajian data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2216. | 2.18.06.2.01.0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | 1.179.180.000 | | 5.130.300 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen) | 112 | | 19 | | 19 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **2.19** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | **51.960.337.414** | | **7.915.342.651** | | **6.570.241.927** | | **1.164.697.061** | **17,72** | **17,73** | | **1.164.697.061** | **2,64** | **2,24** | | |
| **2217.** | **2.19.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **33.380.995.414** | | **4.073.796.422** | | **5.120.241.927** | | **1.164.697.061** | **28,35** | **22,75** | | **1.164.697.061** | **4,25** | **3,49** | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%) | 100 | | 0 | | 100 | | 25 | | 25,00 | | 25 | | 25,00 | | | |
| 2218. | 2.19.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 733.053.046 | | 63.186.001 | | 16.016.000 | | 7.035.000 | 33,33 | 43,92 | | 7.035.000 | 4,90 | 0,96 | | |
| | | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2219. | 2.19.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 126.603.400 | | 21.202.000 | | 5.000.000 | | 4.976.000 | 100,00 | 99,52 | | 4.976.000 | 14,29 | 3,93 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 21 | | 12 | | 3 | | 3 | | 100,00 | | 3 | | 14,29 | | | |
| 2220. | 2.19.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 142.139.446 | | 15.531.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 10 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2221. | 2.19.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 108.517.200 | | 10.828.000 | | 3.894.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2222. | 2.19.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 54.258.600 | | - | | 2.062.000 | | 2.059.000 | 100,00 | 99,85 | | 2.059.000 | 20,00 | 3,79 | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 2223. | 2.19.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 40.000.000 | | 1 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 10 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2224. | 2.19.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 180.146.500 | | 15.625.000 | | 5.060.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 20 | | 6 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2225. | 2.19.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 81.387.900 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 15 | | 0 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2226. | 2.19.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 26.197.678.146 | | 3.701.996.978 | | 4.981.141.927 | | 1.125.371.257 | 0,00 | 22,59 | | 1.125.371.257 | 0,00 | 4,30 | | |
| | | Jumlah Dokumen dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2227. | 2.19.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 26.059.888.146 | | 3.691.860.978 | | 4.981.141.927 | | 1.125.371.257 | 0,00 | 22,59 | | 1.125.371.257 | 0,00 | 4,32 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 275 | | 420 | | 40 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2228. | 2.19.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | 36.900.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | 40 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2229. | 2.19.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 45.000.000 | | 10.136.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 10 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2230. | 2.19.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | 55.890.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2231. | 2.19.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 231.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Dokumen dan Laporan barang milik daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2232. | 2.19.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | 123.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2233. | 2.19.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 48.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 10 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2234. | 2.19.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 60.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2235. | 2.19.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 315.450.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Dokumen dan Laporan Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2236. | 2.19.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 315.450.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 390 | | 0 | | 70 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2237. | 2.19.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 898.992.658 | | 71.005.760 | | 44.433.200 | | 8.018.000 | 42,86 | 18,05 | | 8.018.000 | 5,31 | 0,89 | | |
| | | Jumlah administrasi perangkat daerah yang tersedia | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2238. | 2.19.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 2.500.000 | | 3.400.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2239. | 2.19.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 60.000.000 | | 7.520.000 | | 8.000.000 | | 228.000 | 100,00 | 2,85 | | 228.000 | 20,00 | 0,38 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 2240. | 2.19.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 30.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2241. | 2.19.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 50.086.858 | | 3.964.000 | | 5.996.200 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2242. | 2.19.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 60.000.000 | | 7.334.000 | | 8.000.000 | | 450.000 | 100,00 | 5,63 | | 450.000 | 16,67 | 0,75 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 6 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 16,67 | | | |
| 2243. | 2.19.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 56.405.800 | | 3.900.000 | | 3.990.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 50 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2244. | 2.19.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 640.000.000 | | 44.887.760 | | 18.447.000 | | 7.340.000 | 100,00 | 39,79 | | 7.340.000 | 0,50 | 1,15 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 200 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 0,50 | | | |
| 2245. | 2.19.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.744.411.924 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2246. | 2.19.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 350.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 9 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2247. | 2.19.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 201.204.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2248. | 2.19.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 673.193.864 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 16 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2249. | 2.19.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 520.014.060 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2250. | 2.19.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.092.586.000 | | 106.281.983 | | 27.800.000 | | 4.029.804 | 66,67 | 14,50 | | 4.029.804 | 20,00 | 0,37 | | |
| | | Jumlah laporan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2251. | 2.19.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 20.000.000 | | 1.000.000 | | 500.000 | | 500.000 | 100,00 | 100,00 | | 500.000 | 20,00 | 2,50 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 2252. | 2.19.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 542.586.000 | | 38.281.983 | | 27.300.000 | | 3.529.804 | 100,00 | 12,93 | | 3.529.804 | 40,00 | 0,65 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 5 | | 1 | | 2 | | 2 | | 100,00 | | 2 | | 40,00 | | | |
| 2253. | 2.19.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 530.000.000 | | 67.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2254. | 2.19.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.167.823.640 | | 131.325.700 | | 50.850.800 | | 20.243.000 | 4,42 | 39,81 | | 20.243.000 | 0,11 | 0,93 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Jumlah Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2255. | 2.19.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 1.175.603.000 | | 126.548.700 | | - | | 9.909.000 | 0,00 | 0,00 | | 9.909.000 | 0,00 | 0,84 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 144 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2256. | 2.19.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | | - | | 48.150.000 | | 9.909.000 | 3,85 | 20,58 | | 9.909.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 0 | | 0 | | 26 | | 1 | | 3,85 | | 1 | | 0,00 | | | |
| 2257. | 2.19.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 130.220.640 | | 4.777.000 | | 2.700.800 | | 425.000 | 5,00 | 15,74 | | 425.000 | 0,33 | 0,33 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 300 | | 1 | | 20 | | 1 | | 5,00 | | 1 | | 0,33 | | | |
| 2258. | 2.19.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 862.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2259.** | **2.19.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | | | **7.415.342.000** | | **779.193.200** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | | Meningkatnya daya saing kepemudaan | Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase) | 22 | | 0 | | 14 | | 4 | | 28,57 | | 4 | | 18,18 | | | |
| 2260. | 2.19.02.2.01 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | | | 6.222.572.000 | | 737.533.200 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase pemuda yang ditingkatkan kapasitas SDM nya | Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2261. | 2.19.02.2.01.0011 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota | | | 3.731.250.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota | Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang) | 824 | | 0 | | 40 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2262. | 2.19.02.2.01.0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota | | | 1.150.000.000 | | 524.739.200 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan) | 30 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2263. | 2.19.02.2.01.0014 | Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota | | | 1.100.000.000 | | 106.431.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota | Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi (Orang) | 150 | | 1 | | 60 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2264. | 2.19.02.2.01.0015 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota | | | 241.322.000 | | 106.363.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota | Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang) | 100 | | 30 | | 30 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2265. | 2.19.02.2.02 | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.192.770.000 | | 41.660.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah organisasi kepemudaan yang mendapatkan fasilitasi pembinaan dan pengembangan | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2266. | 2.19.02.2.02.0003 | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | | | 1.192.770.000 | | 41.660.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2267.** | **2.19.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | | | **10.714.000.000** | | **3.062.353.029** | | **1.450.000.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | | Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga | Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase) | 20 | | 0 | | 15 | | 4 | | 26,67 | | 4 | | 20,00 | | | |
| 2268. | 2.19.03.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | 5.024.943.000 | | 2.311.981.329 | | 1.400.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah fasilitas/sarana olahraga yang tersedia dan layak digunakan | Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2269. | 2.19.03.2.01.0005 | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota | | | 4.224.943.000 | | 2.311.981.329 | | 1.400.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota | Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2270. | 2.19.03.2.01.0006 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar | | | 800.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar (Dokumen) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2271. | 2.19.03.2.02 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.757.927.000 | | 612.274.500 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah kejuaraan olahraga tingkat daerah yang diselenggarakan setiap tahun | Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota (Kegiatan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2272. | 2.19.03.2.02.0004 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | | | 2.032.480.000 | | 612.274.500 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan) | 36 | | 1 | | 6 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2273. | 2.19.03.2.02.0005 | Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota | | | 675.447.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota | Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota (Kegiatan) | 5 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2274. | 2.19.03.2.02.0006 | Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota | Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang) | 600 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2275. | 2.19.03.2.03 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | | | 1.343.730.000 | | 53.950.200 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah keikutsertaan atlet daerah dalam event olahraga tingkat provinsi/nasional | Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) (Pelatda) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2276. | 2.19.03.2.03.0008 | Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) | | | 743.730.000 | | 53.950.200 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) (Pelatda) | 5 | | 20 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2277. | 2.19.03.2.03.0009 | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota | | | 450.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota | Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang) | 220 | | 0 | | 30 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2278. | 2.19.03.2.03.0010 | pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota | | | 150.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota | Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen) | 3 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2279. | 2.19.03.2.04 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | | | 587.400.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah organisasi olahraga yang dibina atau difasilitasi pemerintah daerah | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2280. | 2.19.03.2.04.0006 | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait | | | 587.400.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2281. | 2.19.03.2.05 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | | | 1.000.000.000 | | 34.147.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah event/festival olahraga rekreasi yang diselenggarakan | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2282. | 2.19.03.2.05.0006 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | | | 400.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan) | 10 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2283. | 2.19.03.2.05.0007 | Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan | | | 250.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan | Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan (Laporan) | 11 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2284. | 2.19.03.2.05.0008 | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat | | | 200.000.000 | | 34.147.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen) | 5 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2285. | 2.19.03.2.05.0010 | Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional | | | 150.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2286.** | **2.19.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | | | **450.000.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | | Meningkatnya kualitas kepramukaan | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase) | 22 | | 0 | | 14 | | 4 | | 28,57 | | 4 | | 18,18 | | | |
| 2287. | 2.19.04.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | | | 450.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah kegiatan pembinaan kepramukaan yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2288. | 2.19.04.2.01.0002 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | | | 450.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi ) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **2.20** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | **208.067.400** | | **-** | | **5.960.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | |
| **2289.** | **2.20.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | | | **208.067.400** | | **-** | | **5.960.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |
| | | Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasioal (SSN) | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Indeks) | 2,9 | | 2,51 | | 2,66 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2290. | 2.20.02.2.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | 208.067.400 | | - | | 5.960.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu | Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2291. | 2.20.02.2.01.0019 | Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral | | | 49.897.400 | | - | | 5.117.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral | Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%) | 90 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data satistik untuk perencanaan, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan/ atau penyusunan kebijakan | Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2292. | 2.20.02.2.01.0017 | Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional | Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%) | 100 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata | Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2293. | 2.20.02.2.01.0018 | Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia | | | 25.000.000 | | - | | 843.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia | Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%) | 20 | | 0 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah statistik sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari pembina data statistik | Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2294. | 2.20.02.2.01.0021 | Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar | | | 25.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar | Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%) | 13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan dibidang statistik | Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2295. | 2.20.02.2.01.0020 | Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | | | 58.170.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **2.21** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | **1.456.410.000** | | **-** | | **220.000.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | |
| **2296.** | **2.21.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | | | **1.456.410.000** | | **-** | | **220.000.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |
| | | Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah | Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah (%) | 45 | | 35,71 | | 38,5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2297. | 2.21.02.2.01 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.456.410.000 | | - | | 220.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2298. | 2.21.02.2.01.0007 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | | | 1.456.410.000 | | - | | 220.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah) | 43 | | 0 | | 43 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **2.22** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | **148.828.391.370** | | **2.839.371.461** | | **1.840.000.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | |
| **2299.** | **2.22.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | | | **113.954.135.751** | | **1.991.787.831** | | **1.426.700.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan | Tingkat Partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan (%) | 89,85 | | 70,15 | | 73,35 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2300. | 2.22.02.2.01 | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 19.673.047.151 | | 165.310.305 | | 241.640.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina (Lembaga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2301. | 2.22.02.2.01.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | | | 7.591.883.105 | | 165.310.305 | | 241.640.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek) | 4 | | 4 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2302. | 2.22.02.2.01.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | | | 5.567.941.066 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2303. | 2.22.02.2.01.0003 | Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota | | | 4.011.684.244 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota | Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2304. | 2.22.02.2.01.0005 | Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan | | | 2.501.538.736 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan | Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina (Lembaga) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2305. | 2.22.02.2.02 | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 46.521.084.464 | | 270.543.078 | | 695.060.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2306. | 2.22.02.2.02.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | | | 30.501.270.321 | | 122.000.000 | | 500.358.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2307. | 2.22.02.2.02.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | | | 16.019.814.143 | | 148.543.078 | | 194.702.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2308. | 2.22.02.2.03 | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 47.760.004.136 | | 1.555.934.448 | | 490.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2309. | 2.22.02.2.03.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat | | | 7.363.951.512 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat | Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek) | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2310. | 2.22.02.2.03.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat | | | 25.961.057.164 | | 608.758.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat | Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang) | 220 | | 210 | | 220 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2311. | 2.22.02.2.03.0003 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat | | | 14.434.995.460 | | 947.176.448 | | 490.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi (Unit) | 4 | | 4 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2312.** | **2.22.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | | | **10.987.422.124** | | **467.969.440** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenia tradisional | Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan (%) | 90,45 | | 72,52 | | 69,59 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2313. | 2.22.03.2.01 | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 10.987.422.124 | | 467.969.440 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2314. | 2.22.03.2.01.0001 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | | | 4.257.748.812 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang) | 13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2315. | 2.22.03.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | | | 6.729.673.312 | | 467.969.440 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga) | 7 | | 7 | | 7 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2316.** | **2.22.04** | **PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH** | | | **2.315.497.622** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah | Tingkat partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal (%) | 80,65 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2317. | 2.22.04.2.01 | Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.315.497.622 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2318. | 2.22.04.2.01.0001 | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota | | | 1.157.748.812 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang) | 13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2319. | 2.22.04.2.01.0002 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah | | | 625.184.357 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2320. | 2.22.04.2.01.0003 | Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah | | | 532.564.453 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2321.** | **2.22.05** | **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | | | **16.615.601.641** | | **304.889.190** | | **413.300.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan | Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Persentase cagar budaya yang dilestarikan (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2322. | 2.22.05.2.01 | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | | | 6.535.673.910 | | 162.922.190 | | 302.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan (Objek) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2323. | 2.22.05.2.01.0001 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | | | 508.076.839 | | 27.605.000 | | 115.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek) | 5 | | 14 | | 20 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2324. | 2.22.05.2.01.0002 | Penetapan Cagar Budaya | | | 4.551.387.420 | | 135.317.190 | | 187.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek) | 5 | | 11 | | 15 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2325. | 2.22.05.2.01.0003 | Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda | | | 1.476.209.651 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda | Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan (Objek) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2326. | 2.22.05.2.02 | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | | | 10.079.927.731 | | 141.967.000 | | 111.300.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi (Objek) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2327. | 2.22.05.2.02.0001 | Pelindungan Cagar Budaya | | | 1.050.025.456 | | 26.682.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek) | 26 | | 20 | | 20 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2328. | 2.22.05.2.02.0002 | Pengembangan Cagar Budaya | | | 2.822.297.732 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek) | 26 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2329. | 2.22.05.2.02.0003 | Pemanfaatan Cagar Budaya | | | 4.954.808.849 | | 115.285.000 | | 111.300.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek) | 26 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2330. | 2.22.05.2.02.0004 | Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan | | | 1.252.795.694 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi (Objek) | 26 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2331.** | **2.22.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN** | | | **4.955.734.232** | | **74.725.000** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | Meningkatnya atta kelola pengelolaan museum | Persentase kunjungan Wisatawan ke Museum (%) | 88,75 | | 65,15 | | 69,25 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2332. | 2.22.06.2.01 | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | | | 4.955.734.232 | | 74.725.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2333. | 2.22.06.2.01.0002 | Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman | | | 1.379.181.539 | | 74.725.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman | Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang) | 40 | | 27 | | 40 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2334. | 2.22.06.2.01.0003 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum | | | 1.065.181.530 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum | Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2335. | 2.22.06.2.01.0004 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | | | 1.155.685.582 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2336. | 2.22.06.2.01.0005 | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum | | | 871.512.159 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2337. | 2.22.06.2.01.0013 | Pengelolaan Koleksi Museum | | | 484.173.422 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Koleksi Museum | Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **2.23** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | **27.607.570.195** | | **4.827.866.405** | | **4.501.205.259** | | **844.332.475** | **25,66** | **18,76** | | **844.332.475** | **3,95** | **3,06** | | |
| **2338.** | **2.23.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **20.217.820.195** | | **3.358.948.196** | | **3.678.705.259** | | **844.332.475** | **39,48** | **22,95** | | **844.332.475** | **5,42** | **4,18** | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 32,13 | | 32,13 | | 32,13 | | 32,13 | | | |
| 2339. | 2.23.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 114.818.000 | | 2.762.400 | | 1.139.000 | | - | 54,17 | 0,00 | | - | 10,83 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2340. | 2.23.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 38.576.000 | | 1.277.000 | | 800.000 | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 5,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 20 | | 4 | | 4 | | 1 | | 25,00 | | 1 | | 5,00 | | | |
| 2341. | 2.23.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 11.900.000 | | - | | - | | - | 100,00 | 0,00 | | - | 20,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 2342. | 2.23.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 10.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2343. | 2.23.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 7.830.000 | | - | | - | | - | 100,00 | 0,00 | | - | 20,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 2344. | 2.23.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 8.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2345. | 2.23.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 38.512.000 | | 1.485.400 | | 339.000 | | - | 100,00 | 0,00 | | - | 20,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2346. | 2.23.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 15.749.664.195 | | 3.089.964.133 | | 3.422.628.689 | | 844.332.475 | 53,78 | 24,67 | | 844.332.475 | 13,99 | 5,36 | | |
| | | Persentase Tertib Administrasi Keuangan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2347. | 2.23.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 15.697.864.195 | | 3.086.466.933 | | 3.421.555.689 | | 844.332.475 | 28,35 | 24,68 | | 844.332.475 | 28,35 | 5,38 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 448 | | 422 | | 448 | | 127 | | 28,35 | | 127 | | 28,35 | | | |
| 2348. | 2.23.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 25.700.000 | | 3.497.200 | | 1.073.000 | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 5,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 2349. | 2.23.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | 4.600.000 | | - | | - | | - | 100,00 | 0,00 | | - | 20,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | 20 | | 4 | | 4 | | 4 | | 100,00 | | 4 | | 20,00 | | | |
| 2350. | 2.23.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 6.000.000 | | - | | - | | - | 100,00 | 0,00 | | - | 20,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 2351. | 2.23.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | 3.800.000 | | - | | - | | - | 100,00 | 0,00 | | - | 20,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 2352. | 2.23.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 7.200.000 | | - | | - | | - | 23,08 | 0,00 | | - | 4,62 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 65 | | 13 | | 13 | | 3 | | 23,08 | | 3 | | 4,62 | | | |
| 2353. | 2.23.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | 4.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2354. | 2.23.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 16.673.000 | | - | | 388.000 | | - | 100,00 | 0,00 | | - | 22,50 | 0,00 | | |
| | | Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2355. | 2.23.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | 4.750.000 | | - | | - | | - | 100,00 | 0,00 | | - | 25,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 25,00 | | | |
| 2356. | 2.23.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 11.923.000 | | - | | 388.000 | | - | 100,00 | 0,00 | | - | 20,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 2357. | 2.23.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 262.550.000 | | 650.000 | | 454.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2358. | 2.23.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | 26.400.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2359. | 2.23.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 51.600.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2360. | 2.23.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | 7.650.000 | | 650.000 | | 454.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 15 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2361. | 2.23.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 68.900.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 17 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2362. | 2.23.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 108.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 14 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2363. | 2.23.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 687.000.000 | | 18.421.800 | | 7.813.400 | | - | 10,00 | 0,00 | | - | 1,11 | 0,00 | | |
| | | Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2364. | 2.23.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 16.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2365. | 2.23.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 74.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2366. | 2.23.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 305.400.000 | | 1.440.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 4 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2367. | 2.23.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 68.200.000 | | 10.209.000 | | 6.140.400 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2368. | 2.23.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 26.100.000 | | 2.241.800 | | 1.153.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2369. | 2.23.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 55.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2370. | 2.23.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 17.700.000 | | 1.500.000 | | - | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 5,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 2371. | 2.23.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 113.000.000 | | 2.315.000 | | - | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 5,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 2372. | 2.23.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | 11.100.000 | | 716.000 | | 520.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2373. | 2.23.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.238.285.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2374. | 2.23.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 750.900.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2375. | 2.23.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 40.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2376. | 2.23.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 159.385.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 11 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2377. | 2.23.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 163.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2378. | 2.23.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 125.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2379. | 2.23.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.300.980.000 | | 233.786.903 | | 236.109.170 | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 5,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2380. | 2.23.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 4.000.000 | | 500.000 | | 160.000 | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 5,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 2381. | 2.23.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 414.980.000 | | 71.566.903 | | 73.949.170 | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 5,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 2382. | 2.23.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 882.000.000 | | 161.720.000 | | 162.000.000 | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 5,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 2383. | 2.23.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 847.850.000 | | 13.362.960 | | 10.173.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2384. | 2.23.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 162.530.000 | | 11.272.960 | | 9.723.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2385. | 2.23.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | 17.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2386. | 2.23.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 22.320.000 | | 2.090.000 | | 450.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 42 | | 4 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2387. | 2.23.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 297.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2388. | 2.23.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 148.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2389. | 2.23.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 200.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2390.** | **2.23.02** | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | | | **7.051.480.000** | | **1.404.903.969** | | **777.096.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | | Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai) | 81,98 | | 58,29 | | 80,25 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2391. | 2.23.02.2.01 | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.606.664.200 | | 482.542.110 | | 317.682.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi (Layanan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Eksemplar) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2392. | 2.23.02.2.01.0004 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | | | 398.250.000 | | 77.098.905 | | 59.108.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan) | 130 | | 26 | | 26 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2393. | 2.23.02.2.01.0011 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 58.250.000 | | 11.044.896 | | 106.394.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan) | 26 | | 26 | | 26 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2394. | 2.23.02.2.01.0012 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | | | 200.000.000 | | 16.158.009 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi | Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi (Layanan) | 40 | | 30 | | 40 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2395. | 2.23.02.2.01.0013 | Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota | | | 48.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan | Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2396. | 2.23.02.2.01.0016 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 152.500.000 | | 27.175.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang) | 15 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2397. | 2.23.02.2.01.0017 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan | | | 189.904.000 | | 37.889.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen) | 5 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2398. | 2.23.02.2.01.0018 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan | | | 281.000.000 | | 34.561.000 | | 4.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar) | 2325 | | 299 | | 33 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2399. | 2.23.02.2.01.0019 | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | | | 1.194.081.500 | | 261.936.800 | | 148.180.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Eksemplar) | 25 | | 2 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2400. | 2.23.02.2.01.0020 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | | | 84.678.700 | | 16.678.500 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2401. | 2.23.02.2.02 | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 4.444.815.800 | | 922.361.859 | | 459.414.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat | Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Perpustakaan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2402. | 2.23.02.2.02.0006 | Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 325.000.000 | | 14.482.500 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang) | 94 | | 2 | | 15 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2403. | 2.23.02.2.02.0007 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | | | 450.000.000 | | 65.876.000 | | 62.210.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan) | 13 | | 13 | | 13 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2404. | 2.23.02.2.02.0008 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | 499.034.800 | | 214.495.983 | | 37.270.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pembangunan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Perpustakaan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2405. | 2.23.02.2.02.0009 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | | | 1.348.617.000 | | 290.597.576 | | 220.225.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang) | 600 | | 600 | | 600 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2406. | 2.23.02.2.02.0010 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | | | 1.822.164.000 | | 336.909.800 | | 139.709.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus) | 60 | | 60 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2407.** | **2.23.03** | **PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO** | | | **338.270.000** | | **64.014.240** | | **45.404.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | | Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno | Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase) | 100 | | 100 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2408. | 2.23.03.2.01 | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | | | 338.270.000 | | 64.014.240 | | 45.404.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Yang Dimiliki | Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2409. | 2.23.03.2.01.0003 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | | | 250.000.000 | | 49.863.240 | | 500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang) | 5 | | 1 | | 15 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2410. | 2.23.03.2.01.0004 | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | | | 88.270.000 | | 14.151.000 | | 44.904.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan | Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar) | 10 | | 2 | | 20 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **2.24** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | **393.750.000** | | **10.709.000** | | **24.999.600** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | |
| **2411.** | **2.24.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | | | **234.898.000** | | **6.775.000** | | **19.537.500** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | | Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis | Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase) | 57,41 | | 76,55 | | 55,41 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2412. | 2.24.02.2.01 | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | | | 96.520.000 | | 5.028.000 | | 4.683.200 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip | Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan (Lembaga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2413. | 2.24.02.2.01.0004 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis | | | 47.520.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengadaan prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis | Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis (Unit) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2414. | 2.24.02.2.01.0005 | Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | | | 15.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya Pengawasan kearsipan pada OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota | Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan (Lembaga) | 16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip | Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2415. | 2.24.02.2.01.0001 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | | | 7.150.000 | | 3.884.000 | | 903.200 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas) | 4800 | | 5.200 | | 4800 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2416. | 2.24.02.2.01.0002 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | | | 8.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas) | 350 | | 0 | | 980 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2417. | 2.24.02.2.01.0003 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 18.850.000 | | 1.144.000 | | 3.780.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) | 43 | | 15 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2418. | 2.24.02.2.02 | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | | | 60.300.000 | | - | | 3.509.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2419. | 2.24.02.2.02.0004 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | | | 60.300.000 | | - | | 3.509.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip) | 200 | | 0 | | 45 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2420. | 2.24.02.2.03 | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | | | 78.078.000 | | 1.747.000 | | 11.344.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2421. | 2.24.02.2.03.0001 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | | | 60.078.000 | | 1.190.000 | | 3.528.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna) | 34 | | 10 | | 34 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2422. | 2.24.02.2.03.0002 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | | | 18.000.000 | | 557.000 | | 7.816.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) | 43 | | 15 | | 43 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2423.** | **2.24.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | | | **103.362.000** | | **3.934.000** | | **5.462.100** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | | Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK | Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase) | 47,3 | | 16,67 | | 23,97 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2424. | 2.24.03.2.01 | Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | | | 22.400.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pemusnahan Arsip Dengan NSPK | Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan (Berkas) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2425. | 2.24.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun | | | 11.200.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun | Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan (Berkas) | 200 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2426. | 2.24.03.2.01.0004 | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | | | 11.200.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip) | 200 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2427. | 2.24.03.2.02 | Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota | | | 47.362.000 | | 3.934.000 | | 5.462.100 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK | Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Arsip) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Arsip) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2428. | 2.24.03.2.02.0001 | Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana | | | 11.200.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana | Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Arsip) | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2429. | 2.24.03.2.02.0002 | Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana | | | 36.162.000 | | 3.934.000 | | 5.462.100 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencama | Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Arsip) | 20 | | 45 | | 35 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2430. | 2.24.03.2.03 | Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan | | | 11.200.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Daftar) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2431. | 2.24.03.2.03.0001 | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 11.200.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Daftar) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2432. | 2.24.03.2.05 | Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang | | | 22.400.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK | Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan (Arsip) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang (Arsip) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2433. | 2.24.03.2.05.0001 | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang | | | 11.200.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang | Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan (Arsip) | 100 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2434. | 2.24.03.2.05.0002 | Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang | | | 11.200.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang (Arsip) | 15 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2435.** | **2.24.04** | **PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP** | | | **55.490.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup | Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase) | 100 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2436. | 2.24.04.2.01 | Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota | | | 55.490.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK | Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan (SOP) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2437. | 2.24.04.2.01.0003 | Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | | | 55.490.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlasksananya Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan (SOP) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **3.25** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | **43.970.436.560** | | **6.296.372.862** | | **5.248.230.753** | | **1.019.728.357** | **5,95** | **19,43** | | **1.019.728.357** | **2,12** | **2,32** | | |
| **2438.** | **3.25.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **24.290.507.597** | | **4.382.463.623** | | **4.892.230.753** | | **995.609.096** | **7,14** | **20,35** | | **995.609.096** | **2,94** | **4,10** | DINAS PERIKANAN | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 25 | | 25,00 | | 25 | | 25,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2439. | 3.25.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 289.437.000 | | 20.570.000 | | 13.910.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2440. | 3.25.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 27.798.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 3 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2441. | 3.25.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 15.488.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2442. | 3.25.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 14.316.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2443. | 3.25.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 15.744.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2444. | 3.25.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 16.136.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2445. | 3.25.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 169.955.000 | | 20.570.000 | | 13.910.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 5 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2446. | 3.25.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 30.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2447. | 3.25.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 19.916.991.025 | | 4.025.374.283 | | 4.632.557.753 | | 972.576.682 | 0,00 | 20,99 | | 972.576.682 | 0,00 | 4,88 | | |
| | | Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusulan Laporan OPD | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2448. | 3.25.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 19.808.627.025 | | 4.025.374.283 | | 4.632.557.753 | | 972.576.682 | 0,00 | 20,99 | | 972.576.682 | 0,00 | 4,91 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 41 | | 40 | | 40 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2449. | 3.25.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 22.978.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2450. | 3.25.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | 15.950.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2451. | 3.25.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 36.696.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2452. | 3.25.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | 22.900.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2453. | 3.25.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 7.400.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2454. | 3.25.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | 2.440.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2455. | 3.25.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 194.250.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Pelaksanaan peningkatan Disiplin dan Kapasitas sumberdaya aparatur | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2456. | 3.25.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | 20.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2457. | 3.25.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 141.750.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2458. | 3.25.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 10.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2459. | 3.25.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 22.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 41 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2460. | 3.25.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 642.260.172 | | 49.983.252 | | 46.970.000 | | 320.000 | 3,57 | 0,68 | | 320.000 | 3,13 | 0,05 | | |
| | | Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2461. | 3.25.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 16.766.000 | | 1.295.000 | | 496.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2462. | 3.25.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 155.081.800 | | 18.721.564 | | 13.336.300 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 3 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2463. | 3.25.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 16.325.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2464. | 3.25.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 32.210.400 | | 1.791.300 | | 1.288.700 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2465. | 3.25.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 78.910.200 | | 6.700.100 | | 672.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2466. | 3.25.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 23.286.000 | | 1.920.000 | | 2.082.000 | | 320.000 | 25,00 | 15,37 | | 320.000 | 25,00 | 1,37 | | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 2467. | 3.25.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 56.080.000 | | 38.500 | | 975.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2468. | 3.25.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 263.600.772 | | 19.516.788 | | 28.120.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2469. | 3.25.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 410.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2470. | 3.25.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 350.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2471. | 3.25.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 60.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2472. | 3.25.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 869.500.000 | | 123.125.644 | | 113.393.000 | | 15.932.814 | 25,00 | 14,05 | | 15.932.814 | 25,00 | 1,83 | | |
| | | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2473. | 3.25.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 10.200.000 | | 600.000 | | 600.000 | | 100.000 | 25,00 | 16,67 | | 100.000 | 25,00 | 0,98 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 2474. | 3.25.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 244.300.000 | | 32.505.219 | | 40.793.000 | | 4.013.138 | 25,00 | 9,84 | | 4.013.138 | 25,00 | 1,64 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 2475. | 3.25.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 615.000.000 | | 90.020.425 | | 72.000.000 | | 11.819.676 | 25,00 | 16,42 | | 11.819.676 | 25,00 | 1,92 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 2476. | 3.25.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.967.569.400 | | 163.410.444 | | 85.400.000 | | 6.779.600 | 0,00 | 7,94 | | 6.779.600 | 0,00 | 0,34 | | |
| | | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2477. | 3.25.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 1.330.809.400 | | 149.646.444 | | 83.600.000 | | 6.779.600 | 0,00 | 8,11 | | 6.779.600 | 0,00 | 0,51 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 49 | | 49 | | 49 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2478. | 3.25.01.2.09.0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | | | 200.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2479. | 3.25.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 42.960.000 | | 1.270.000 | | 1.800.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 39 | | 39 | | 39 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2480. | 3.25.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 393.800.000 | | 12.494.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2481.** | **3.25.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | | | **3.646.173.051** | | **1.847.069.901** | | **25.000.000** | | **415.000** | **0,00** | **1,66** | | **415.000** | **0,00** | **0,01** | DINAS PERIKANAN | |
| | | Meningkatnya produksi perikanan tangkap | Jumlah produksi tangkap (Ton) (Nilai) | 4.739,74 | | 4.305,64 | | 4314,57 | | 1.088,29 | | 25,22 | | 1.088,29 | | 22,96 | | | |
| 2482. | 3.25.03.2.01 | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | | | 2.455.443.651 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2483. | 3.25.03.2.01.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | | | 657.362.755 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2484. | 3.25.03.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | | | 1.043.903.896 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2485. | 3.25.03.2.01.0004 | Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | | | 754.177.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit) | 2 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2486. | 3.25.03.2.02 | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.190.729.400 | | 1.847.069.901 | | 25.000.000 | | 415.000 | 0,00 | 1,66 | | 415.000 | 0,00 | 0,03 | | |
| | | Cakupan Bina Kelompok | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2487. | 3.25.03.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | | | 781.591.000 | | 1.847.069.901 | | 25.000.000 | | 415.000 | 0,00 | 1,66 | | 415.000 | 0,00 | 0,05 | | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang) | 114 | | 374 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2488. | 3.25.03.2.02.0002 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | | | 409.138.400 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok) | 16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2489.** | **3.25.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | | | **12.132.111.912** | | **66.839.338** | | **271.000.000** | | **21.063.773** | **0,00** | **7,77** | | **21.063.773** | **0,00** | **0,17** | DINAS PERIKANAN | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Meningkatnya produksi perikanan budidaya | Jumlah produksi budidaya (Ton) (Ton) | 46.362,6 | | 38.878,15 | | 40720,2 | | 9.770,95 | | 24,00 | | 9.770,95 | | 21,08 | | | |
| 2490. | 3.25.04.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah izin usaha perikanan | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing (Rekomendasi) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2491. | 3.25.04.2.01.0001 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing (Rekomendasi) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2492. | 3.25.04.2.02 | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | | 4.854.898.280 | | 66.839.338 | | 233.000.000 | | 21.063.773 | 0,00 | 9,04 | | 21.063.773 | 0,00 | 0,43 | | |
| | | Cakupan Bina Kelompok | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2493. | 3.25.04.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | | | 1.576.667.211 | | 66.839.338 | | 100.500.000 | | 8.927.367 | 0,00 | 8,88 | | 8.927.367 | 0,00 | 0,57 | | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok) | 535 | | 10 | | 95 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2494. | 3.25.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | | 1.678.497.670 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok) | 535 | | 0 | | 32 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2495. | 3.25.04.2.02.0003 | Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | | | 255.674.653 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok) | 18 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2496. | 3.25.04.2.02.0004 | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | | | 1.344.058.746 | | - | | 132.500.000 | | 12.136.406 | 0,00 | 9,16 | | 12.136.406 | 0,00 | 0,90 | | |
| | | Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok) | 535 | | 0 | | 30 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2497. | 3.25.04.2.03 | Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 40.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan yang diterbitkan | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Rekomendasi) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Rekomendasi) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2498. | 3.25.04.2.03.0001 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Rekomendasi) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2499. | 3.25.04.2.03.0002 | Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlayaninya Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Rekomendasi) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2500. | 3.25.04.2.04 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | | | 7.217.213.632 | | - | | 38.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2501. | 3.25.04.2.04.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 562.104.546 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2502. | 3.25.04.2.04.0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.747.081.356 | | - | | 38.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit) | 4 | | 0 | | 7 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2503. | 3.25.04.2.04.0004 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 164.749.546 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2504. | 3.25.04.2.04.0009 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.517.657.346 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit) | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2505. | 3.25.04.2.04.0010 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | | | 142.104.546 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat | Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit) | 39 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2506. | 3.25.04.2.04.0011 | Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | | | 284.571.746 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat bagi Pembudidaya Ikan | Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2507. | 3.25.04.2.04.0012 | Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | | | 1.798.944.546 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi | Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| **2508.** | **3.25.05** | **PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | **210.200.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PERIKANAN | |
| | | Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati | Luas kawasan konservasi (Ha) | 4.220,45 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2509. | 3.25.05.2.01 | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | | | 210.200.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Luas Kawasan Konservasi | Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2510. | 3.25.05.2.01.0004 | Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota | | | 105.100.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota | Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha) | 554 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2511. | 3.25.05.2.01.0007 | Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota | | | 105.100.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi | Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha) | 16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2512.** | **3.25.06** | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | | | **3.691.444.000** | | **-** | | **60.000.000** | | **2.640.488** | **25,00** | **4,40** | | **2.640.488** | **6,25** | **0,07** | DINAS PERIKANAN | |
| | | Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat | Jumlah produksi hasil olahan perikanan (ton) (Ton) | 420 | | 395,92 | | 400 | | 104,01 | | 26,00 | | 104,01 | | 24,76 | | | |
| | | | angka konsumsi makan ikan (Kg/KAP/TH) | 43,61 | | 42,03 | | 41,24 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2513. | 3.25.06.2.01 | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | | | 1.962.189.000 | | - | | 60.000.000 | | 2.640.488 | 25,00 | 4,40 | | 2.640.488 | 25,00 | 0,13 | | |
| | | Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2514. | 3.25.06.2.01.0005 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko | | | 1.962.189.000 | | - | | 60.000.000 | | 2.640.488 | 25,00 | 4,40 | | 2.640.488 | 25,00 | 0,13 | | |
| | | Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 2515. | 3.25.06.2.02 | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | | | 535.085.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2516. | 3.25.06.2.02.0002 | Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko | | | 535.085.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha) | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2517. | 3.25.06.2.03 | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | | | 1.194.170.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tingkat Konsumsi Makan Ikan | Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2518. | 3.25.06.2.03.0001 | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 797.085.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton) | 46362.6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2519. | 3.25.06.2.03.0002 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 397.085.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha) | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **3.26** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | **17.235.840.000** | | **254.840.900** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | |
| **2520.** | **3.26.02** | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | | | **9.842.048.000** | | **167.889.900** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | | Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase) | 95 | | 0 | | 15 | | 4 | | 26,67 | | 4 | | 4,21 | | | |
| 2521. | 3.26.02.2.01 | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | | | 1.309.510.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase daya tarik wisata yang dikelola | Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2522. | 3.26.02.2.01.0005 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | | | 1.309.510.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) | Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2523. | 3.26.02.2.03 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | 8.532.538.000 | | 167.889.900 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Persentase daya tarik wisata yang dikelola | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2524. | 3.26.02.2.03.0003 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | 1.469.000.000 | | 167.889.900 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi) | 5 | | 3 | | 6 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2525. | 3.26.02.2.03.0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | 7.063.538.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2526.** | **3.26.03** | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | | | **2.893.792.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | | Meningkatnya Media Pemasaran Pariwisata | Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase) | 20 | | 0 | | 20 | | 5 | | 25,00 | | 5 | | 25,00 | | | |
| 2527. | 3.26.03.2.01 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | 2.893.792.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah event pemasaran pariwisata yang diselenggarakan dan diikuti | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2528. | 3.26.03.2.01.0003 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | | | 360.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2529. | 3.26.03.2.01.0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | | | 2.533.792.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan) | 25 | | 0 | | 8 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2530.** | **3.26.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** | | | **360.000.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | | Meningkatnya Pelaku Wisata Ekonomi Kreatif yang memiliki kekayaan intelektual | Persentase Pelaku Wisata Ekonomi Kreatif yang memiliki kekayaan intelektual (%) | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2531. | 3.26.04.2.02 | Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifÂ | | | 360.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terdata dan aktif | Jumlah Insentif yang Diberikan (Pelaku Usaha) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2532. | 3.26.04.2.02.0011 | Fasilitasi pemberian insentif | | | 360.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya fasilitasi pemberian Insentif | Jumlah Insentif yang Diberikan (Pelaku Usaha) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2533.** | **3.26.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | | | **4.140.000.000** | | **86.951.000** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | | Meningkatnya Pelaku pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang aktif dan tervalidasi | Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase) | 20 | | 0 | | 16 | | 4 | | 25,00 | | 4 | | 20,00 | | | |
| 2534. | 3.26.05.2.01 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | | | 3.352.100.000 | | 25.998.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah SDM pariwisata yang mengikuti pelatihan tingkat dasar | Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2535. | 3.26.05.2.01.0008 | Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI | | | 1.928.100.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Berkembangkan Kapasitas SDM Pariwisata berdasarkan pada SKKNI | Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Orang) | 150 | | 0 | | 30 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2536. | 3.26.05.2.01.0009 | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata | | | 1.424.000.000 | | 25.998.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata | Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang) | 180 | | 10 | | 800 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2537. | 3.26.05.2.02 | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | | | 787.900.000 | | 60.953.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti pelatihan atau pendampingan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2538. | 3.26.05.2.02.0001 | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | | | 787.900.000 | | 60.953.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksanya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang) | 225 | | 0 | | 30 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | **182.755.131.395** | | **26.576.703.879** | | **26.535.207.989** | | **3.332.999.230** | **2,10** | **12,56** | | **3.332.999.230** | **0,74** | **1,82** | | |
| **2539.** | **3.27.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **54.953.776.233** | | **15.177.431.980** | | **15.220.050.544** | | **1.446.227.622** | **1,35** | **9,50** | | **1.446.227.622** | **0,31** | **2,63** | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 25 | | 25,00 | | 12,5 | | 12,50 | | | |
| 2540. | 3.27.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 882.000.000 | | 76.607.700 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2541. | 3.27.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 106.000.000 | | 11.194.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 10 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2542. | 3.27.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 69.000.000 | | 4.468.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2543. | 3.27.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 70.000.000 | | 4.481.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2544. | 3.27.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 20.500.000 | | 3.213.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2545. | 3.27.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 24.000.000 | | 3.585.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2546. | 3.27.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 172.500.000 | | 21.260.700 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 65 | | 14 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2547. | 3.27.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 420.000.000 | | 28.406.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 5 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2548. | 3.27.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 40.814.650.259 | | 14.104.674.174 | | 14.676.101.044 | | 1.380.973.526 | 0,00 | 9,41 | | 1.380.973.526 | 0,00 | 3,38 | | |
| | | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2549. | 3.27.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 40.673.763.897 | | 14.088.482.574 | | 14.676.101.044 | | 1.380.973.526 | 0,00 | 9,41 | | 1.380.973.526 | 0,00 | 3,40 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 173 | | 170 | | 65 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2550. | 3.27.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 72.403.962 | | 11.006.600 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2551. | 3.27.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | 15.854.000 | | 1.780.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2552. | 3.27.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 38.457.700 | | 2.328.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2553. | 3.27.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | 14.170.700 | | 1.077.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2554. | 3.27.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 42.617.002 | | 4.304.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2555. | 3.27.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 12.437.952 | | 815.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2556. | 3.27.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 30.179.050 | | 3.489.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2557. | 3.27.01.2.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | 11.062.500 | | 1.070.000 | | 1.482.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Administrasi Pendapatan Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2558. | 3.27.01.2.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | 11.062.500 | | 1.070.000 | | 1.482.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2559. | 3.27.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 225.386.000 | | 4.900.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2560. | 3.27.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 130.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 216 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2561. | 3.27.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | 54.750.000 | | 2.340.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2562. | 3.27.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | 40.636.000 | | 2.560.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 825 | | 171 | | 175 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2563. | 3.27.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 2.607.512.000 | | 309.738.562 | | 324.317.000 | | 15.722.758 | 5,50 | 4,85 | | 15.722.758 | 0,71 | 0,60 | | |
| | | Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2564. | 3.27.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 60.390.000 | | 11.505.360 | | 12.078.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2565. | 3.27.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 250.300.000 | | 9.617.369 | | 10.300.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2566. | 3.27.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 1.050.010.000 | | 56.088.594 | | 30.060.600 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2567. | 3.27.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 344.812.000 | | 17.691.562 | | 35.991.400 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2568. | 3.27.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 35.000.000 | | 3.928.400 | | 1.680.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2569. | 3.27.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 867.000.000 | | 210.907.277 | | 234.207.000 | | 15.722.758 | 22,00 | 6,71 | | 15.722.758 | 4,23 | 1,81 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 260 | | 31 | | 50 | | 11 | | 22,00 | | 11 | | 4,23 | | | |
| 2570. | 3.27.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 4.077.000.000 | | 20.146.500 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2571. | 3.27.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 1.993.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2572. | 3.27.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 900.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2573. | 3.27.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 1.184.000.000 | | 20.146.500 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 83 | | 3 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2574. | 3.27.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.143.949.472 | | 447.890.744 | | 148.050.000 | | 9.271.338 | 0,00 | 6,26 | | 9.271.338 | 0,00 | 0,29 | | |
| | | Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2575. | 3.27.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 25.000.000 | | 3.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2576. | 3.27.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 730.000.000 | | 70.540.744 | | 83.250.000 | | 9.271.338 | 0,00 | 11,14 | | 9.271.338 | 0,00 | 1,27 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 19 | | 19 | | 19 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2577. | 3.27.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 2.388.949.472 | | 374.350.000 | | 64.800.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 43 | | 47 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2578. | 3.27.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.149.599.000 | | 208.100.300 | | 70.100.000 | | 40.260.000 | 2,14 | 57,43 | | 40.260.000 | 1,95 | 1,28 | | |
| | | Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2579. | 3.27.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 1.432.779.000 | | 169.776.300 | | 70.100.000 | | 40.260.000 | 6,43 | 57,43 | | 40.260.000 | 5,84 | 2,81 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 154 | | 154 | | 140 | | 9 | | 6,43 | | 9 | | 5,84 | | | |
| 2580. | 3.27.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 596.820.000 | | 22.437.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 62 | | 60 | | 62 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2581. | 3.27.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 1.120.000.000 | | 15.887.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 19 | | 19 | | 19 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2582.** | **3.27.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | | | **9.565.052.782** | | **687.927.719** | | **785.307.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | |
| | | Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian | Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura (%) | 2 | | 6,665 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (%) | 2 | | 12,625 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase) | 2 | | 2,768 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2583. | 3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | | | 7.815.052.782 | | 681.557.719 | | 145.307.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Jumlah Pengawasan dan Pendampingan penggunaan sarana pertanian | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji (Gram) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2584. | 3.27.02.2.01.0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | | | 1.952.307.000 | | 677.736.719 | | 120.307.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2585. | 3.27.02.2.01.0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | | 1.138.245.782 | | 3.821.000 | | 25.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2586. | 3.27.02.2.01.0003 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih | | | 1.369.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih | Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton) | 36 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2587. | 3.27.02.2.01.0008 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang | | | 1.620.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Batang | Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang) | 280000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2588. | 3.27.02.2.01.0009 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang | | | 445.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya benih bersertikat Hortikultura Berbentuk Batang | Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang) | 6000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2589. | 3.27.02.2.01.0011 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji | | | 1.290.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Biji | Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji (Gram) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2590. | 3.27.02.2.02 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 1.750.000.000 | | 6.370.000 | | 640.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | jumlah pengelolaan SDG | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB)) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2591. | 3.27.02.2.02.0003 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | | | 1.050.000.000 | | 6.370.000 | | 640.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2592. | 3.27.02.2.02.0004 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman | | | 700.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman | Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB)) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2593.** | **3.27.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | | | **19.962.451.300** | | **615.574.956** | | **180.000.000** | | **13.500.000** | **0,00** | **7,50** | | **13.500.000** | **0,00** | **0,07** | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | |
| | | Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian | Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian yang Berkualitas (%) | 1,2 | | 4,478 | | 1,20 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha) | 17,585 | | 17.585 | | 17,585 | | 16.455,66 | | 93.577,82 | | 16.455,66 | | 93.577,82 | | | |
| 2594. | 3.27.03.2.01 | Pengembangan Prasarana Pertanian | | | 5.332.451.300 | | 377.573.948 | | 180.000.000 | | 13.500.000 | 0,00 | 7,50 | | 13.500.000 | 0,00 | 0,25 | | |
| | | Jumlah dokumen pengembangan prasarana pertanian | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2595. | 3.27.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | | 1.400.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2596. | 3.27.03.2.01.0015 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | | | 1.000.000.000 | | 38.660.244 | | 120.000.000 | | 13.500.000 | 0,00 | 11,25 | | 13.500.000 | 0,00 | 1,35 | | |
| | | Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2597. | 3.27.03.2.01.0017 | Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian | | | 2.932.451.300 | | 338.913.704 | | 60.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian | Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2598. | 3.27.03.2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | | | 14.630.000.000 | | 238.001.008 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun | Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2599. | 3.27.03.2.02.0002 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | | | 2.400.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian | Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit) | 26 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2600. | 3.27.03.2.02.0003 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | | | 4.100.000.000 | | 238.001.008 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit) | 33 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2601. | 3.27.03.2.02.0004 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit | | | 1.400.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit | Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit) | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2602. | 3.27.03.2.02.0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | | | 3.680.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2603. | 3.27.03.2.02.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | | | 3.050.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani | Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit) | 33 | | 4 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2604.** | **3.27.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | | | **2.380.000.000** | | **107.816.000** | | **15.000.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | |
| | | Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase) | 98 | | 23,75 | | 95 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase) | 98 | | 23,75 | | 95 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2605. | 3.27.05.2.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | | | 2.380.000.000 | | 107.816.000 | | 15.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Luas pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2606. | 3.27.05.2.01.0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | 1.575.000.000 | | 103.171.000 | | 10.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha) | 140 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2607. | 3.27.05.2.01.0002 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | 565.000.000 | | 4.645.000 | | 5.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha) | 55 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2608. | 3.27.05.2.01.0006 | Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | | | 240.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tertanggulanginya pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2609.** | **3.27.06** | **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** | | | **183.500.000** | | **4.442.500** | | **10.000.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | |
| | | Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian | Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase) | 100 | | 100 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2610. | 3.27.06.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 183.500.000 | | 4.442.500 | | 10.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten lima puluh kota | Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2611. | 3.27.06.2.01.0002 | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | | | 78.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen) | 13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2612. | 3.27.06.2.01.0005 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian | | | 105.500.000 | | 4.442.500 | | 10.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian | Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan) | 41 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2613.** | **3.27.07** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | | | **8.725.824.000** | | **738.835.500** | | **120.000.000** | | **2.305.000** | **0,00** | **1,92** | | **2.305.000** | **0,00** | **0,03** | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | |
| | | Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian | Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase) | 2 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani (%) | 3 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2614. | 3.27.07.2.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | | | 8.725.824.000 | | 738.835.500 | | 120.000.000 | | 2.305.000 | 0,00 | 1,92 | | 2.305.000 | 0,00 | 0,03 | | |
| | | Jumlah pelaksanaan penyuluhan pertanian | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2615. | 3.27.07.2.01.0001 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | | | 2.388.824.000 | | 573.686.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit) | 13 | | 13 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2616. | 3.27.07.2.01.0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | | | 907.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit) | 100 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2617. | 3.27.07.2.01.0003 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | | | 1.730.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit) | 65 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2618. | 3.27.07.2.01.0005 | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | | | 3.700.000.000 | | 165.149.500 | | 120.000.000 | | 2.305.000 | 0,00 | 1,92 | | 2.305.000 | 0,00 | 0,06 | | |
| | | Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit) | 147 | | 7 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2619.** | **3.27.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **54.681.996.380** | | **9.072.358.078** | | **9.504.850.445** | | **1.870.966.608** | **4,63** | **19,68** | | **1.870.966.608** | **2,36** | **3,42** | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%) | 100 | | 25 | | 100 | | 25 | | 25,00 | | 25 | | 25,00 | | | |
| 2620. | 3.27.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 204.036.818 | | 17.648.800 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2621. | 3.27.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 10.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 21 | | 0 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2622. | 3.27.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 6.450.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 10 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2623. | 3.27.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 4.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 10 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2624. | 3.27.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 4.550.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 10 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2625. | 3.27.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 4.875.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2626. | 3.27.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 150.000.500 | | 17.648.800 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 25 | | 3 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2627. | 3.27.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.400.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2628. | 3.27.01.2.01.0010 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 19.261.318 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2629. | 3.27.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 46.973.862.810 | | 8.701.492.269 | | 9.340.148.345 | | 1.854.374.817 | 12,50 | 19,85 | | 1.854.374.817 | 12,77 | 3,95 | | |
| | | Persentase Tertib Administrasi Keuangan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2630. | 3.27.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 46.942.787.810 | | 8.701.492.269 | | 9.340.148.345 | | 1.854.374.817 | 100,00 | 19,85 | | 1.854.374.817 | 102,13 | 3,95 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 94 | | 384 | | 96 | | 96 | | 100,00 | | 96 | | 102,13 | | | |
| 2631. | 3.27.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 3.200.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 15 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2632. | 3.27.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 3.425.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2633. | 3.27.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | 5.150.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2634. | 3.27.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 5.100.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 5 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2635. | 3.27.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | 3.200.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | 5 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2636. | 3.27.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 5.400.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2637. | 3.27.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | 5.600.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 5 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2638. | 3.27.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 19.286.723 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2639. | 3.27.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | 3.086.723 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2640. | 3.27.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | 2.900.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2641. | 3.27.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 3.050.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2642. | 3.27.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 3.050.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2643. | 3.27.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 3.800.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2644. | 3.27.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | 3.400.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2645. | 3.27.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 96.850.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2646. | 3.27.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 300 | | 0 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2647. | 3.27.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | 6.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2648. | 3.27.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | 2.125.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2649. | 3.27.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 26.350.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 50 | | 0 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2650. | 3.27.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 12.375.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 1 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2651. | 3.27.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.044.244.473 | | 83.463.200 | | 70.580.000 | | 8.114.478 | 4,17 | 11,50 | | 8.114.478 | 0,56 | 0,78 | | |
| | | Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2652. | 3.27.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 218.871.973 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2653. | 3.27.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 16.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 40 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2654. | 3.27.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 357.302.500 | | 33.083.000 | | 35.430.600 | | 8.114.478 | 25,00 | 22,90 | | 8.114.478 | 5,00 | 2,27 | | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 2655. | 3.27.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 75.270.000 | | 17.292.200 | | 12.555.400 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2656. | 3.27.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 3.350.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2657. | 3.27.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | 2.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 200 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2658. | 3.27.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 7.200.000 | | 240.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2659. | 3.27.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 361.000.000 | | 32.848.000 | | 22.594.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2660. | 3.27.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | 3.250.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2661. | 3.27.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.919.914.126 | | 22.120.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2662. | 3.27.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 438.914.126 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2663. | 3.27.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 900.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 90 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2664. | 3.27.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 201.000.000 | | 22.120.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 85 | | 28 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2665. | 3.27.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 250.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2666. | 3.27.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | 130.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) | 13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2667. | 3.27.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 819.010.500 | | 116.030.549 | | 36.902.100 | | 3.711.763 | 8,33 | 10,06 | | 3.711.763 | 1,67 | 0,45 | | |
| | | Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2668. | 3.27.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 4.500.000 | | 500.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2669. | 3.27.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 184.510.500 | | 35.930.549 | | 36.902.100 | | 3.711.763 | 25,00 | 10,06 | | 3.711.763 | 5,00 | 2,01 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 2670. | 3.27.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 630.000.000 | | 79.600.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2671. | 3.27.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.604.790.930 | | 131.603.260 | | 57.220.000 | | 4.765.550 | 8,43 | 8,33 | | 4.765.550 | 0,67 | 0,13 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2672. | 3.27.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 901.995.800 | | 119.488.260 | | 51.900.000 | | 4.765.550 | 16,85 | 9,18 | | 4.765.550 | 3,37 | 0,53 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 445 | | 58 | | 89 | | 15 | | 16,85 | | 15 | | 3,37 | | | |
| 2673. | 3.27.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | 181.360.000 | | 12.115.000 | | 5.320.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 55 | | 30 | | 11 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2674. | 3.27.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 2.172.685.130 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2675. | 3.27.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 196.750.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2676. | 3.27.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 152.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2677.** | **3.27.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | | | **12.032.820.800** | | **108.175.050** | | **540.000.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| | | Meningkatnya distribusi dan kualitas saranan pertanian | Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase) | 7 | | 2 | | 7 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2678. | 3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Dokumen dan laporan pemanfaatan, kualitas dan pelestarian SDG Hewan | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2679. | 3.27.02.2.01.0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | | | 25.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2680. | 3.27.02.2.01.0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | | 25.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2681. | 3.27.02.2.02 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 7.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Dokumen dan laporan pemanfaatan, kualitas dan pelestarian SDG Hewan | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2682. | 3.27.02.2.02.0002 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | | | 2.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2683. | 3.27.02.2.02.0003 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | | | 2.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2684. | 3.27.02.2.02.0005 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan | | | 2.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG hewan | Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (laporan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2685. | 3.27.02.2.03 | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 4.010.000.000 | | 108.175.050 | | 40.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah laporan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah | Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2686. | 3.27.02.2.03.0001 | Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | | | 2.900.000.000 | | 108.175.050 | | 40.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2687. | 3.27.02.2.03.0002 | Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak | | | 1.110.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak | Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan) | 75 | | 0 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2688. | 3.27.02.2.04 | Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer | | | 42.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Jumlah Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer | Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak (Kasus) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2689. | 3.27.02.2.04.0001 | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan | | | 22.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan | Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2690. | 3.27.02.2.04.0002 | Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan | | | 20.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan | Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak (Kasus) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2691. | 3.27.02.2.05 | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 154.680.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak,dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar (Ton) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2692. | 3.27.02.2.05.0002 | Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak | | | 47.380.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak | Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2693. | 3.27.02.2.05.0004 | Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan | | | 2.300.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terjaminnya Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan | Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar (Ton) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2694. | 3.27.02.2.05.0006 | Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan | | | 51.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terawasinya Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan | Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Laporan) | 180 | | 0 | | 36 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2695. | 3.27.02.2.05.0007 | Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak | | | 1.250.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terawasinya peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak | Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat (Laporan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2696. | 3.27.02.2.05.0008 | Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak | | | 1.250.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terjaminnya peredaran benih/bibit ternak | Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laporan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2697. | 3.27.02.2.05.0009 | Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | | | 51.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terkendalinya penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak | Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2698. | 3.27.02.2.06 | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | 7.768.140.800 | | - | | 500.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2699. | 3.27.02.2.06.0002 | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | 515.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2700. | 3.27.02.2.06.0003 | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | 4.314.940.000 | | - | | 300.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain | Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor) | 5 | | 0 | | 1200 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2701. | 3.27.02.2.06.0004 | Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | 2.938.200.800 | | - | | 200.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain | Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis) | 500 | | 0 | | 5000 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2702.** | **3.27.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | | | **16.026.531.600** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| | | Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian | Persentase Penyediaan Prasarana Pertenakan yang Berkualitas (%) | 2 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2703. | 3.27.03.2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | | | 15.969.530.800 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Pembangunan Prasarana pertanian sektor peternakan | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Prasarana untuk UPTD BIB yang dibangun dan direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2704. | 3.27.03.2.02.0003 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | | | 77.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit) | 10 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2705. | 3.27.03.2.02.0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | | | 176.800.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2706. | 3.27.03.2.02.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | | | 72.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani | Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2707. | 3.27.03.2.02.0011 | Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak | | | 1.117.760.800 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbangunnya dan Terehabilitasinya sarana dan prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak | Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2708. | 3.27.03.2.02.0012 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | 850.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbangun, terehabilitasi dan terpeliharanya Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2709. | 3.27.03.2.02.0013 | Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Balai Inseminasi Buatan | | | 813.970.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbangunnya dan Terehabilitasinya sarana dan prasarana UPTD Balai Inseminasi Buatan | Jumlah Prasarana untuk UPTD BIB yang dibangun dan direhabilitasi (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2710. | 3.27.03.2.02.0014 | Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan | | | 933.640.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskeswan | Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2711. | 3.27.03.2.02.0015 | Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan | | | 11.927.860.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan | Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2712. | 3.27.03.2.03 | Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | 5.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah laporan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2713. | 3.27.03.2.03.0001 | Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | | | 3.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan (Laporan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2714. | 3.27.03.2.03.0002 | Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | | | 2.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terawasinya Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Laporan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2715. | 3.27.03.2.04 | Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum | | | 51.500.800 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah lahan penggembalaan umum yang berkembang | Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan (Ha) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola (Ha) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2716. | 3.27.03.2.04.0001 | Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum | | | 15.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Teridentifikasi dan Ditetapkannya Lahan Penggembalaan Umum | Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan (Ha) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2717. | 3.27.03.2.04.0002 | Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum | | | 34.000.800 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Lahan Penggembalaan Umum | Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola (Ha) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2718. | 3.27.03.2.04.0003 | Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum | | | 2.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum (Laporan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2719.** | **3.27.04** | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | | | **2.120.037.700** | | **18.988.000** | | **160.000.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| | | Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase) | 2 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2720. | 3.27.04.2.01 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | | | 226.387.800 | | 18.487.500 | | 100.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah pelaksanaan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kader zoonosis (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan (Kasus) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2721. | 3.27.04.2.01.0003 | Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular | | | 25.400.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tertanggulanginya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular | Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2722. | 3.27.04.2.01.0004 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis | | | 31.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbentuknya kader zoonosis | Jumlah kader zoonosis (Orang) | 395 | | 0 | | 79 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2723. | 3.27.04.2.01.0005 | Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan | | | 24.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan | Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah) | 65 | | 0 | | 13 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2724. | 3.27.04.2.01.0006 | Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan | | | 22.928.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan | Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan (Kasus) | 150 | | 0 | | 30 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2725. | 3.27.04.2.01.0007 | Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis | | | 21.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya manajemen risiko zoonosis sesuai dengan status zoonosis daerah | Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2726. | 3.27.04.2.01.0008 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 101.559.800 | | 18.487.500 | | 100.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2727. | 3.27.04.2.02 | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | | | 133.651.500 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah laporan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2728. | 3.27.04.2.02.0004 | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) | | | 54.149.900 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM | Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2729. | 3.27.04.2.02.0005 | Pengawasan Peredaran Produk Hewan | | | 26.750.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan | Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2730. | 3.27.04.2.02.0006 | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM | | | 26.751.600 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terawasi dan terperiksanya kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM | Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2731. | 3.27.04.2.02.0007 | Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya | | | 26.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkendalinya Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya | Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (Laporan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2732. | 3.27.04.2.03 | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.007.748.400 | | - | | 40.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah laporan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2733. | 3.27.04.2.03.0001 | Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium | | | 505.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium | Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2734. | 3.27.04.2.03.0002 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | | | 502.748.400 | | - | | 40.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan) | 5 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2735. | 3.27.04.2.04 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | 599.500.000 | | 500.500 | | 20.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik (Unit Usaha) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2736. | 3.27.04.2.04.0002 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | | | 481.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2737. | 3.27.04.2.04.0010 | Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan | | | 118.000.000 | | 500.500 | | 20.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan | Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik (Unit Usaha) | 60 | | 12 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2738. | 3.27.04.2.05 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan | | | 152.750.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan | Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani (Kasus) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2739. | 3.27.04.2.05.0002 | Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya | | | 145.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tertanganinya Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya | Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani (Kasus) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2740. | 3.27.04.2.05.0003 | Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha | | | 7.250.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha | Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2741.** | **3.27.06** | **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** | | | **376.906.800** | | **500.000** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| | | Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian | Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2742. | 3.27.06.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 129.060.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan | Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2743. | 3.27.06.2.01.0001 | Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian | | | 80.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian | Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2744. | 3.27.06.2.01.0002 | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | | | 44.310.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2745. | 3.27.06.2.01.0004 | Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budidaya Ternak | | | 1.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | terlaksananya sertifikasi penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik di unit usaha pembibitan/ budidaya ternak | Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik (Unit) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2746. | 3.27.06.2.01.0005 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian | | | 3.750.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian | Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2747. | 3.27.06.2.02 | Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | | | 182.796.800 | | 500.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2748. | 3.27.06.2.02.0001 | Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | | | 17.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2749. | 3.27.06.2.02.0002 | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan | | | 100.296.800 | | 500.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan | Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi (Laporan) | 60 | | 1 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2750. | 3.27.06.2.02.0003 | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan | | | 65.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan | Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi (Laporan) | 80 | | 0 | | 20 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2751. | 3.27.06.2.03 | Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan | | | 65.050.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan | Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2752. | 3.27.06.2.03.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan | | | 5.050.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan | Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2753. | 3.27.06.2.03.0002 | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan | | | 60.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan | Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi (Laporan) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2754.** | **3.27.07** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | | | **1.746.233.800** | | **44.654.096** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
| | | Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian | Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2755. | 3.27.07.2.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | | | 1.746.233.800 | | 44.654.096 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Pelaksanaan penyuluhan pertanian yang dilaksanakan pada kelembagaan petani | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2756. | 3.27.07.2.01.0001 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | | | 339.100.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit) | 150 | | 0 | | 30 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2757. | 3.27.07.2.01.0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | | | 339.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit) | 1250 | | 0 | | 250 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2758. | 3.27.07.2.01.0003 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | | | 336.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2759. | 3.27.07.2.01.0005 | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | | | 546.200.000 | | 1.654.096 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit) | 5 | | 4 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2760. | 3.27.07.2.01.0006 | Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian | | | 32.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian | Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2761. | 3.27.07.2.01.0007 | Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota | | | 32.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota | Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2762. | 3.27.07.2.01.0008 | Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani | | | 88.683.800 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani | Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2763. | 3.27.07.2.01.0009 | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian | | | 31.750.000 | | 43.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian | Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen) | 5 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **3.30** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | **35.852.505.350** | | **67.194.170** | | **122.204.000** | | **1.455.000** | **12,33** | **1,19** | | **1.455.000** | **1,23** | **0,00** | | |
| **2764.** | **3.30.02** | **PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN** | | | **178.468.300** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| | | Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha | Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase) | 70 | | 0 | | 70 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2765. | 3.30.02.2.02 | Penerbitan Tanda Daftar Gudang | | | 178.468.300 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terfasilitasinya penerbitan tanda daftar gudang | Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2766. | 3.30.02.2.02.0001 | Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang | | | 178.468.300 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang | Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen) | 25 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2767.** | **3.30.03** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | | | **27.679.816.250** | | **-** | | **50.000.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| | | Meningkatnya kualitas saranan perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi | Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase) | 100 | | 0 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2768. | 3.30.03.2.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | 26.647.621.250 | | - | | 50.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang (Kegiatan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang (laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2769. | 3.30.03.2.01.0001 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | 24.197.621.250 | | - | | 50.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit) | 9 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2770. | 3.30.03.2.01.0003 | Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota | | | 1.700.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggarannya kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang | Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang (Kegiatan) | 17 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2771. | 3.30.03.2.01.0004 | Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota | | | 750.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya informasi terkait lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang | Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang (laporan) | 16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2772. | 3.30.03.2.02 | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | | | 1.032.195.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2773. | 3.30.03.2.02.0001 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | | | 1.032.195.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2774.** | **3.30.04** | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | | | **1.805.467.750** | | **54.277.670** | | **58.000.000** | | **1.455.000** | **25,00** | **2,51** | | **1.455.000** | **5,00** | **0,08** | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| | | Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase) | 10,12 | | 9,26 | | 10,21 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2775. | 3.30.04.2.01 | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | | | 910.442.750 | | 19.927.000 | | 29.000.000 | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 5,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat Kabupaten | Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2776. | 3.30.04.2.01.0003 | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | | | 910.442.750 | | 19.927.000 | | 29.000.000 | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 5,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan) | 60 | | 238 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 2777. | 3.30.04.2.02 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | | | 895.025.000 | | 34.350.670 | | 29.000.000 | | 1.455.000 | 25,00 | 5,02 | | 1.455.000 | 5,00 | 0,16 | | |
| | | Terkendalinya harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2778. | 3.30.04.2.02.0003 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | 895.025.000 | | 34.350.670 | | 29.000.000 | | 1.455.000 | 25,00 | 5,02 | | 1.455.000 | 5,00 | 0,16 | | |
| | | Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) | 20 | | 2 | | 4 | | 1 | | 25,00 | | 1 | | 5,00 | | | |
| **2779.** | **3.30.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | | | **2.412.815.625** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| | | Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor | Nilai Ekspor Barang (Nilai) | 14,91 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2780. | 3.30.05.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.412.815.625 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2781. | 3.30.05.2.01.0002 | Pameran Dagang Nasional | | | 881.288.125 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha) | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2782. | 3.30.05.2.01.0003 | Pameran Dagang Lokal | | | 468.402.500 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha) | 8 | | 0 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2783. | 3.30.05.2.01.0005 | Peningkatan Citra Produk Ekspor | | | 1.063.125.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Citra Produk Ekspor | Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk) | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2784.** | **3.30.06** | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | | | **1.513.121.800** | | **12.916.500** | | **14.204.000** | | **-** | **24,00** | **0,00** | | **-** | **4,80** | **0,00** | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| | | Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk | Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%) | 14 | | 9,7 | | 10 | | 1,77 | | 17,70 | | 1,77 | | 12,64 | | | |
| 2785. | 3.30.06.2.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | | | 1.513.121.800 | | 12.916.500 | | 14.204.000 | | - | 24,00 | 0,00 | | - | 4,80 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2786. | 3.30.06.2.01.0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | | | 1.513.121.800 | | 12.916.500 | | 14.204.000 | | - | 24,00 | 0,00 | | - | 4,80 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit) | 1000 | | 264 | | 200 | | 48 | | 24,00 | | 48 | | 4,80 | | | |
| **2787.** | **3.30.07** | **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | | | **2.262.815.625** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| | | Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negri | Presentase Produk Lokal yang Difasilitasi / Dilaksanakan (%) | 15 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2788. | 3.30.07.2.01 | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | | | 2.262.815.625 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2789. | 3.30.07.2.01.0005 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | | | 2.262.815.625 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **3.31** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | **32.459.505.423** | | **3.971.380.728** | | **4.138.928.110** | | **981.521.621** | **1,25** | **23,71** | | **981.521.621** | **0,24** | **3,02** | | |
| **2790.** | **3.31.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **23.434.465.623** | | **3.849.570.493** | | **4.043.928.110** | | **970.244.409** | **1,67** | **23,99** | | **970.244.409** | **0,28** | **4,14** | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100,00 | | 100 | | 100,00 | | | |
| 2791. | 3.31.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 119.024.900 | | 1.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2792. | 3.31.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 24.499.900 | | 1.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 16 | | 2 | | 8 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2793. | 3.31.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 15.250.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2794. | 3.31.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 13.257.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2795. | 3.31.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 15.856.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2796. | 3.31.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 8.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2797. | 3.31.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 15.312.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 28 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2798. | 3.31.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 7.350.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 24 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup Perangkat daerah. | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2799. | 3.31.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | 5.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah Berita Acara hasil Forum Perangkat Daerah berdasarkan bidang Urusan yang diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2800. | 3.31.01.2.01.0010 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 14.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2801. | 3.31.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 15.997.907.523 | | 3.654.998.902 | | 3.925.364.710 | | 955.558.817 | 12,50 | 24,34 | | 955.558.817 | 2,08 | 5,97 | | |
| | | Jumlah koordinasi dan pelaksanaan akuntasi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2802. | 3.31.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2803. | 3.31.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 43.005.300 | | 987.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2804. | 3.31.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | 13.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2805. | 3.31.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 17.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran dan laporan analisis prognosis realisasi anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2806. | 3.31.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | 10.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2807. | 3.31.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 15.909.902.223 | | 3.654.011.902 | | 3.925.364.710 | | 955.558.817 | 25,00 | 24,34 | | 955.558.817 | 12,50 | 6,01 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 45 | | 44 | | 45 | | 11,25 | | 25,00 | | 5,625 | | 12,50 | | | |
| 2808. | 3.31.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 187.900.000 | | 992.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2809. | 3.31.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | 33.216.400 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2810. | 3.31.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 40.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2811. | 3.31.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | 6.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2812. | 3.31.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | 21.500.000 | | 992.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2813. | 3.31.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | 16.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2814. | 3.31.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 60.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2815. | 3.31.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 11.183.600 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 308 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2816. | 3.31.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.764.488.000 | | 31.369.600 | | 9.236.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2817. | 3.31.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 140.000.000 | | 3.204.600 | | 1.376.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 49 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2818. | 3.31.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 17.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 57 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2819. | 3.31.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 129.990.000 | | 3.400.000 | | 860.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 49 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2820. | 3.31.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 1.030.998.000 | | 14.953.000 | | 3.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 49 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2821. | 3.31.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | 57.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 17 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2822. | 3.31.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 63.000.000 | | 2.480.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 3 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2823. | 3.31.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 75.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan' | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2824. | 3.31.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 54.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2825. | 3.31.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 197.000.000 | | 7.332.000 | | 3.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 49 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2826. | 3.31.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 2.358.947.000 | | 4.800.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2827. | 3.31.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 585.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2828. | 3.31.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 160.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2829. | 3.31.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 459.947.000 | | 4.800.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 23 | | 1 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2830. | 3.31.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 800.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2831. | 3.31.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 354.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2832. | 3.31.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.564.200.000 | | 125.612.391 | | 85.213.400 | | 14.685.592 | 0,00 | 17,23 | | 14.685.592 | 0,00 | 0,94 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2833. | 3.31.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 25.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2834. | 3.31.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 330.500.000 | | 41.672.703 | | 43.063.400 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 9 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2835. | 3.31.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 1.208.200.000 | | 83.939.688 | | 42.150.000 | | 14.685.592 | 0,00 | 34,84 | | 14.685.592 | 0,00 | 1,22 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2836. | 3.31.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.441.998.200 | | 30.797.600 | | 24.114.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2837. | 3.31.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 779.300.000 | | 25.197.600 | | 22.114.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 88 | | 17 | | 20 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah Mebel yang dipelihara | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2838. | 3.31.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | 48.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 30 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah unit peralatan danm mesin lainnya yang dipelihara | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2839. | 3.31.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 220.000.000 | | 4.850.000 | | 2.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 80 | | 11 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2840. | 3.31.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 206.936.000 | | 750.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2841. | 3.31.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 187.262.200 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2842.** | **3.31.02** | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | | | **6.465.449.800** | | **14.791.292** | | **22.310.400** | | **1.037.000** | **0,00** | **4,65** | | **1.037.000** | **0,00** | **0,02** | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | |
| | | Meningkatnya realisasi pembangunan industri | Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase) | 20 | | 29,69 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2843. | 3.31.02.2.01 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | | | 6.465.449.800 | | 14.791.292 | | 22.310.400 | | 1.037.000 | 0,00 | 4,65 | | 1.037.000 | 0,00 | 0,02 | | |
| | | Jumlah kelompok IKM yang diberi bantuan sarana dan prasarana peralatan produksi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2844. | 3.31.02.2.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | | | 4.170.030.000 | | 731.000 | | 2.154.000 | | 430.000 | 0,00 | 19,96 | | 430.000 | 0,00 | 0,01 | | |
| | | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2845. | 3.31.02.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | | | 625.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2846. | 3.31.02.2.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | 865.000.000 | | 6.902.592 | | 15.156.400 | | 527.000 | 0,00 | 3,48 | | 527.000 | 0,00 | 0,06 | | |
| | | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah dokumen hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2847. | 3.31.02.2.01.0006 | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | | | 333.419.800 | | 7.157.700 | | 5.000.000 | | 80.000 | 0,00 | 1,60 | | 80.000 | 0,00 | 0,02 | | |
| | | Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi dan Jumlah program pengawasan Jaminan Produk Halal yang dapat diimplementasikan | - Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2848. | 3.31.02.2.01.0008 | Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota | | | 322.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota | - Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri | Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2849. | 3.31.02.2.01.0009 | Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri | | | 150.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri | Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2850.** | **3.31.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | | | **2.559.590.000** | | **107.018.943** | | **72.689.600** | | **10.240.212** | **0,00** | **14,09** | | **10.240.212** | **0,00** | **0,40** | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | |
| | | Meningkatnya pemanfaatan informasi industri | Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase) | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100,00 | | 100 | | 100,00 | | | |
| 2851. | 3.31.04.2.01 | Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI | Informasi Industri untuk Kewenangan Kabupaten/Kota | | 2.559.590.000 | | 107.018.943 | | 72.689.600 | | 10.240.212 | 0,00 | 14,09 | | 10.240.212 | 0,00 | 0,40 | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analissi Data Industri, Data Kawasan Industri serta data lain lingkup Kab/Kota melalui SIINas | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2852. | 3.31.04.2.01.0001 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | | | 1.259.590.000 | | 6.151.000 | | 3.932.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah Fasilitasi program/kegiatan terkait promosi dan pemasaran produk IKM | Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2853. | 3.31.04.2.01.0002 | Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas | | | 1.300.000.000 | | 100.867.943 | | 68.757.100 | | 10.240.212 | 0,00 | 14,89 | | 10.240.212 | 0,00 | 0,79 | | |
| | | Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS | Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen) | 51 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **3.32** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI** | | | **1.484.492.500** | | **968.800** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| **2854.** | **3.32.03** | **PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | | | **1.336.000.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | |
| | | Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi | Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase) | 40 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2855. | 3.32.03.2.01 | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.336.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Calon Transmigran dan/atau Tranmigran yang mendapatkan Pelatihan | Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2856. | 3.32.03.2.01.0006 | Pelatihan Transmigrasi | | | 730.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggarakannya Pelatihan Transmigrasi | Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Orang) | 410 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah Tranmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi | Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Lokasi) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2857. | 3.32.03.2.01.0020 | Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi | | | 606.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi | Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Lokasi) | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2858.** | **3.32.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | | | **148.492.500** | | **968.800** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | |
| | | Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi | Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase) | 12 | | 0 | | 8,0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2859. | 3.32.04.2.01 | Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian | | | 148.492.500 | | 968.800 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Calon Transmigran dan/atau Tranmigran yang mendapatkan Pelatihan | Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2860. | 3.32.04.2.01.0001 | Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman | | | 148.492.500 | | 968.800 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terwujudnya Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman | Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga) | 76 | | 2 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | **313.601.631.595** | | **37.531.946.331** | | **40.252.701.943** | | **5.551.224.319** | **10,63** | **13,79** | | **5.551.224.319** | **2,07** | **1,77** | | |
| **2861.** | **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **257.810.261.895** | | **25.993.366.107** | | **28.042.331.643** | | **5.377.410.354** | **10,87** | **19,18** | | **5.377.410.354** | **2,52** | **2,09** | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%) | 100 | | 91,92 | | 100 | | 20,76 | | 20,76 | | 20,76 | | 20,76 | | | |
| 2862. | 4.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 6.783.475.411 | | 235.539.336 | | 54.511.900 | | 6.464.000 | 45,00 | 11,86 | | 6.464.000 | 7,33 | 0,10 | | |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2863. | 4.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 3.695.017.350 | | 162.340.626 | | 16.000.000 | | - | 40,00 | 0,00 | | - | 8,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 25 | | 5 | | 5 | | 2 | | 40,00 | | 2 | | 8,00 | | | |
| 2864. | 4.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 3.088.458.061 | | 73.198.710 | | 38.511.900 | | 6.464.000 | 50,00 | 16,78 | | 6.464.000 | 6,67 | 0,21 | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 30 | | 4 | | 4 | | 2 | | 50,00 | | 2 | | 6,67 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2865. | 4.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 79.243.474.913 | | 14.552.378.972 | | 17.934.359.370 | | 4.114.165.778 | 35,12 | 22,94 | | 4.114.165.778 | 6,93 | 5,19 | | |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2866. | 4.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 76.019.238.233 | | 14.419.985.614 | | 17.703.479.470 | | 4.062.102.202 | 44,64 | 22,95 | | 4.062.102.202 | 6,78 | 5,34 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 830 | | 147 | | 126 | | 56,25 | | 44,64 | | 56,25 | | 6,78 | | | |
| 2867. | 4.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 1.531.475.554 | | 72.526.496 | | 180.880.000 | | 39.579.468 | 13,33 | 21,88 | | 39.579.468 | 4,10 | 2,58 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 390 | | 120 | | 120 | | 16 | | 13,33 | | 16 | | 4,10 | | | |
| 2868. | 4.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 465.688.626 | | 9.727.750 | | 10.007.300 | | 6.655.325 | 100,00 | 66,50 | | 6.655.325 | 20,00 | 1,43 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 2869. | 4.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 866.249.000 | | 47.198.112 | | 39.992.600 | | 5.828.783 | 17,65 | 14,57 | | 5.828.783 | 3,75 | 0,67 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 80 | | 14 | | 17 | | 3 | | 17,65 | | 3 | | 3,75 | | | |
| 2870. | 4.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | 360.823.500 | | 2.941.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2871. | 4.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 762.895.750 | | 19.864.500 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2872. | 4.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | 239.852.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 12 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2873. | 4.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | 239.852.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 12 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2874. | 4.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 283.191.750 | | 19.864.500 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 20 | | 72,11 | | 6 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2875. | 4.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 2.545.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2876. | 4.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 2.545.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 3228 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2877. | 4.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 18.164.606.818 | | 925.184.674 | | 868.233.200 | | 57.004.162 | 7,00 | 6,57 | | 57.004.162 | 1,40 | 0,31 | | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2878. | 4.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 1.755.084.568 | | 104.943.740 | | 86.811.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 10 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2879. | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 361.797.500 | | 60.208.216 | | 40.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2880. | 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 8.826.919.000 | | 427.787.928 | | 293.418.200 | | 39.815.600 | 25,00 | 13,57 | | 39.815.600 | 5,00 | 0,45 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 2881. | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 6.763.808.000 | | 280.398.640 | | 448.004.000 | | 17.188.562 | 0,00 | 3,84 | | 17.188.562 | 0,00 | 0,25 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2882. | 4.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | 456.997.750 | | 51.846.150 | | - | | - | 10,00 | 0,00 | | - | 2,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 50 | | 6 | | 10 | | 1 | | 10,00 | | 1 | | 2,00 | | | |
| 2883. | 4.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 49.241.268.682 | | 877.590.470 | | 1.087.089.000 | | 31.759.000 | 0,00 | 2,92 | | 31.759.000 | 0,00 | 0,06 | | |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2884. | 4.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 1.500.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 2 | | 0 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2885. | 4.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 8.242.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 8 | | 0 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2886. | 4.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 1.844.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 553 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2887. | 4.01.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | 10.500.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2888. | 4.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 22.000.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2889. | 4.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 5.154.768.682 | | 877.590.470 | | 1.087.089.000 | | 31.759.000 | 0,00 | 2,92 | | 31.759.000 | 0,00 | 0,62 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 45 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2890. | 4.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 30.447.014.477 | | 3.125.432.129 | | 2.678.905.200 | | 566.637.178 | 12,50 | 21,15 | | 566.637.178 | 8,75 | 1,86 | | |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2891. | 4.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 1.359.250.000 | | 5.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2892. | 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 6.708.000.000 | | 691.610.104 | | 670.500.000 | | 122.133.078 | 25,00 | 18,22 | | 122.133.078 | 5,00 | 1,82 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 2893. | 4.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 775.520.000 | | 96.527.870 | | 105.741.700 | | 47.904.100 | 25,00 | 45,30 | | 47.904.100 | 30,00 | 6,18 | | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 10 | | 3 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 30,00 | | | |
| 2894. | 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 21.604.244.477 | | 2.332.294.155 | | 1.902.663.500 | | 396.600.000 | 0,00 | 20,84 | | 396.600.000 | 0,00 | 1,84 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 10 | | 12 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2895. | 4.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 37.329.343.607 | | 2.730.401.884 | | 1.732.412.700 | | 170.832.230 | 7,29 | 9,86 | | 170.832.230 | 0,89 | 0,46 | | |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2896. | 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 2.689.625.000 | | 229.342.312 | | 251.350.000 | | 37.564.520 | 16,67 | 14,95 | | 37.564.520 | 3,23 | 1,40 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 31 | | 6 | | 6 | | 1 | | 16,67 | | 1 | | 3,23 | | | |
| 2897. | 4.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 13.053.562.500 | | 1.050.309.623 | | 811.150.000 | | 120.065.900 | 41,67 | 14,80 | | 120.065.900 | 3,92 | 0,92 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 765 | | 10 | | 72 | | 30 | | 41,67 | | 30 | | 3,92 | | | |
| 2898. | 4.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | 320.435.649 | | 17.800.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 5 | | 18 | | 18 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2899. | 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 1.773.106.208 | | 69.498.875 | | 143.380.700 | | 975.000 | 0,00 | 0,68 | | 975.000 | 0,00 | 0,05 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 5 | | 4 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2900. | 4.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 11.668.441.000 | | 269.534.327 | | 526.532.000 | | 12.226.810 | 0,00 | 2,32 | | 12.226.810 | 0,00 | 0,10 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 10 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2901. | 4.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 2.600.247.500 | | 251.342.940 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 17 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2902. | 4.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 5.051.666.000 | | 837.128.607 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 30 | | 30 | | 30 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2903. | 4.01.01.2.09.0012 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | | | 172.259.750 | | 5.445.200 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha) | 31 | | 10 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2904. | 4.01.01.2.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | 4.465.625.080 | | 832.868.335 | | 989.676.473 | | 190.778.750 | 13,75 | 19,28 | | 190.778.750 | 5,00 | 4,27 | | |
| | | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2905. | 4.01.01.2.11.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | 880.262.180 | | 209.530.167 | | 176.673.573 | | 49.787.081 | 25,00 | 28,18 | | 49.787.081 | 5,00 | 5,66 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan) | 10 | | 2 | | 2 | | 0,5 | | 25,00 | | 0,5 | | 5,00 | | | |
| 2906. | 4.01.01.2.11.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | 1.135.360.000 | | 178.112.068 | | 163.000.000 | | 750.000 | 5,00 | 0,46 | | 750.000 | 10,00 | 0,07 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket) | 10 | | 20 | | 20 | | 1 | | 5,00 | | 1 | | 10,00 | | | |
| 2907. | 4.01.01.2.11.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | 450.002.900 | | 34.913.100 | | 50.002.900 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang) | 10 | | 4 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2908. | 4.01.01.2.11.0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | 2.000.000.000 | | 410.313.000 | | 600.000.000 | | 140.241.669 | 25,00 | 23,37 | | 140.241.669 | 5,00 | 7,01 | | |
| | | Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan) | 10 | | 2 | | 2 | | 0,5 | | 25,00 | | 0,5 | | 5,00 | | | |
| 2909. | 4.01.01.2.12 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | | | 14.420.402.808 | | 1.180.454.922 | | 1.266.995.900 | | 101.014.500 | 0,00 | 7,97 | | 101.014.500 | 0,00 | 0,70 | | |
| | | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2910. | 4.01.01.2.12.0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | | | 5.648.893.000 | | 401.826.776 | | 538.999.350 | | 51.626.800 | 0,00 | 9,58 | | 51.626.800 | 0,00 | 0,91 | | |
| | | Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket) | 5 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2911. | 4.01.01.2.12.0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | | | 3.545.552.500 | | 249.280.272 | | 380.997.550 | | 31.132.000 | 0,00 | 8,17 | | 31.132.000 | 0,00 | 0,88 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket) | 5 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2912. | 4.01.01.2.12.0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | | | 5.225.957.308 | | 529.347.874 | | 346.999.000 | | 18.255.700 | 0,00 | 5,26 | | 18.255.700 | 0,00 | 0,35 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket) | 5 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2913. | 4.01.01.2.13 | Penataan Organisasi | | | 1.974.939.649 | | 139.097.680 | | 200.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Penataan Organisasi | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2914. | 4.01.01.2.13.0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | 373.521.361 | | 26.156.940 | | 100.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen) | 20 | | 5 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2915. | 4.01.01.2.13.0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | 354.534.286 | | 27.309.800 | | 25.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2916. | 4.01.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | 431.117.820 | | 24.819.500 | | 30.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2917. | 4.01.01.2.13.0004 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | 503.612.508 | | 37.569.640 | | 20.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2918. | 4.01.01.2.13.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | | | 312.153.674 | | 23.241.800 | | 25.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2919. | 4.01.01.2.14 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | | | 12.431.714.700 | | 1.374.553.205 | | 1.230.147.900 | | 138.754.756 | 8,33 | 11,28 | | 138.754.756 | 1,67 | 1,12 | | |
| | | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2920. | 4.01.01.2.14.0001 | Fasilitasi Keprotokolan | | | 9.924.192.200 | | 1.200.275.759 | | 1.230.147.900 | | 138.754.756 | 25,00 | 11,28 | | 138.754.756 | 5,00 | 1,40 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan) | 1800 | | 360 | | 360 | | 90 | | 25,00 | | 90 | | 5,00 | | | |
| 2921. | 4.01.01.2.14.0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | 1.106.512.500 | | 56.961.500 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan) | 1800 | | 360 | | 360 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2922. | 4.01.01.2.14.0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | | | 1.401.010.000 | | 117.315.946 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan) | 1800 | | 123 | | 360 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| **2923.** | **4.01.02** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | **51.723.092.700** | | **11.055.884.542** | | **11.708.712.800** | | **142.524.064** | **22,35** | **1,22** | | **142.524.064** | **2,33** | **0,28** | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | | Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat | Persentase Terlaksananya Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (%) | 100 | | 103,32 | | 100 | | 1,22 | | 1,22 | | 1,22 | | 1,22 | | | |
| 2924. | 4.01.02.2.01 | Administrasi Tata Pemerintahan | | | 986.289.586 | | 118.056.118 | | 151.378.900 | | 7.544.000 | 13,89 | 4,98 | | 7.544.000 | 2,78 | 0,76 | | |
| | | Administrasi Tata Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2925. | 4.01.02.2.01.0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | | | 201.436.648 | | 25.976.200 | | 25.356.800 | | 1.000.000 | 25,00 | 3,94 | | 1.000.000 | 5,00 | 0,50 | | |
| | | Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen) | 20 | | 4 | | 4 | | 1 | | 25,00 | | 1 | | 5,00 | | | |
| 2926. | 4.01.02.2.01.0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | | | 269.267.711 | | 10.876.000 | | 37.975.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen) | 20 | | 4 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2927. | 4.01.02.2.01.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | 515.585.227 | | 81.203.918 | | 88.046.600 | | 6.544.000 | 16,67 | 7,43 | | 6.544.000 | 3,33 | 1,27 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen) | 30 | | 6 | | 6 | | 1 | | 16,67 | | 1 | | 3,33 | | | |
| 2928. | 4.01.02.2.02 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | | | 48.121.993.349 | | 10.617.165.759 | | 11.290.314.800 | | 99.994.900 | 25,00 | 0,89 | | 99.994.900 | 5,00 | 0,21 | | |
| | | Persentase kegiatan terkait dengan kesejahteraan rakyat yang terkoordinasi | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2929. | 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | 48.121.993.349 | | 10.617.165.759 | | 11.290.314.800 | | 99.994.900 | 25,00 | 0,89 | | 99.994.900 | 5,00 | 0,21 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 2930. | 4.01.02.2.03 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | | | 1.487.005.872 | | 207.746.988 | | 183.398.000 | | 31.885.164 | 43,94 | 17,39 | | 31.885.164 | 1,66 | 2,14 | | |
| | | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2931. | 4.01.02.2.03.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | | | 588.931.212 | | 118.497.410 | | 80.417.000 | | 20.687.005 | 131,82 | 25,72 | | 20.687.005 | 4,97 | 3,51 | | |
| | | Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen) | 1750 | | 334 | | 66 | | 87 | | 131,82 | | 87 | | 4,97 | | | |
| 2932. | 4.01.02.2.03.0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum | | | 831.775.566 | | 80.638.684 | | 94.730.000 | | 11.198.159 | 0,00 | 11,82 | | 11.198.159 | 0,00 | 1,35 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2933. | 4.01.02.2.03.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | | | 66.299.094 | | 8.610.894 | | 8.251.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen) | 340 | | 123 | | 66 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2934. | 4.01.02.2.04 | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | | | 1.127.803.893 | | 112.915.677 | | 83.621.100 | | 3.100.000 | 8,33 | 3,71 | | 3.100.000 | 1,67 | 0,27 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2935. | 4.01.02.2.04.0001 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | | | 561.964.116 | | 94.912.350 | | 66.695.900 | | 2.600.000 | 25,00 | 3,90 | | 2.600.000 | 5,00 | 0,46 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen) | 80 | | 16 | | 16 | | 4 | | 25,00 | | 4 | | 5,00 | | | |
| 2936. | 4.01.02.2.04.0002 | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | | | 344.375.759 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen) | 20 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2937. | 4.01.02.2.04.0003 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | | | 221.464.018 | | 18.003.327 | | 16.925.200 | | 500.000 | 0,00 | 2,95 | | 500.000 | 0,00 | 0,23 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan) | 60 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2938.** | **4.01.03** | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | | | **4.068.277.000** | | **482.695.682** | | **501.657.500** | | **31.289.901** | **0,00** | **6,24** | | **31.289.901** | **0,00** | **0,77** | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | | Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan | Persentase terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang perekonomian (%) | 100 | | 80,97 | | 100 | | 6,24 | | 6,24 | | 6,24 | | 6,24 | | | |
| 2939. | 4.01.03.2.01 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | | | 934.406.188 | | 102.008.000 | | 108.310.500 | | 20.651.601 | 0,00 | 19,07 | | 20.651.601 | 0,00 | 2,21 | | |
| | | Persentase terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang perekonomian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2940. | 4.01.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | | | 173.981.511 | | 22.925.000 | | 16.838.900 | | 3.444.501 | 0,00 | 20,46 | | 3.444.501 | 0,00 | 1,98 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2941. | 4.01.03.2.01.0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | | | 487.955.924 | | 52.221.500 | | 48.586.000 | | 5.105.900 | 0,00 | 10,51 | | 5.105.900 | 0,00 | 1,05 | | |
| | | Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan) | 20 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2942. | 4.01.03.2.01.0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | | | 272.468.753 | | 26.861.500 | | 42.885.600 | | 12.101.200 | 0,00 | 28,22 | | 12.101.200 | 0,00 | 4,44 | | |
| | | Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2943. | 4.01.03.2.02 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | | | 1.110.938.937 | | 154.483.805 | | 163.624.900 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase pelaksanaan pembangunan daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2944. | 4.01.03.2.02.0001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | | | 307.615.054 | | 39.803.555 | | 46.778.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2945. | 4.01.03.2.02.0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | | | 386.275.530 | | 55.477.600 | | 69.093.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2946. | 4.01.03.2.02.0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | | | 417.048.353 | | 59.202.650 | | 47.753.100 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2947. | 4.01.03.2.03 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | 1.240.124.148 | | 152.662.426 | | 170.000.000 | | 5.513.300 | 0,00 | 3,24 | | 5.513.300 | 0,00 | 0,44 | | |
| | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2948. | 4.01.03.2.03.0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | 365.832.973 | | 37.312.294 | | 55.904.000 | | 2.225.000 | 0,00 | 3,98 | | 2.225.000 | 0,00 | 0,61 | | |
| | | Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen) | 15 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2949. | 4.01.03.2.03.0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | 312.633.425 | | 38.892.267 | | 44.396.300 | | 3.288.300 | 0,00 | 7,41 | | 3.288.300 | 0,00 | 1,05 | | |
| | | Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2950. | 4.01.03.2.03.0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | 561.657.750 | | 76.457.865 | | 69.699.700 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang) | 500 | | 52 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2951. | 4.01.03.2.04 | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | | | 782.807.727 | | 73.541.451 | | 59.722.100 | | 5.125.000 | 0,00 | 8,58 | | 5.125.000 | 0,00 | 0,65 | | |
| | | Tersusunnya laporan sebagai penunjang kegiatan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2952. | 4.01.03.2.04.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | | | 416.660.707 | | 51.664.451 | | 33.675.500 | | 5.125.000 | 0,00 | 15,22 | | 5.125.000 | 0,00 | 1,23 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen) | 15 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2953. | 4.01.03.2.04.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | | | 214.996.642 | | 21.877.000 | | 26.046.600 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2954. | 4.01.03.2.04.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | | | 151.150.378 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen) | 4 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **4.02** | **SEKRETARIAT DPRD** | | | **302.388.555.592** | | **34.569.526.578** | | **35.258.556.711** | | **7.303.599.333** | **23,38** | **20,71** | | **7.303.599.333** | **2,21** | **2,42** | | |
| **2955.** | **4.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **205.962.486.692** | | **22.181.600.831** | | **20.601.229.111** | | **4.906.793.361** | **40,70** | **23,82** | | **4.906.793.361** | **3,37** | **2,38** | SEKRETARIAT DPRD | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%) | 100 | | 84,34 | | 100 | | 21,42 | | 21,42 | | 21,42 | | 21,42 | | | |
| 2956. | 4.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.224.034.000 | | 33.150.000 | | 36.837.100 | | 12.924.000 | 42,86 | 35,08 | | 12.924.000 | 8,57 | 1,06 | | |
| | | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2957. | 4.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 174.862.000 | | 4.888.000 | | 5.441.200 | | 4.308.000 | 100,00 | 79,17 | | 4.308.000 | 20,00 | 2,46 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 2958. | 4.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 174.862.000 | | 4.888.000 | | 5.251.900 | | 4.308.000 | 100,00 | 82,03 | | 4.308.000 | 20,00 | 2,46 | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 2959. | 4.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 174.862.000 | | 4.726.000 | | 5.228.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2960. | 4.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 174.862.000 | | 5.144.000 | | 5.228.800 | | 4.308.000 | 100,00 | 82,39 | | 4.308.000 | 20,00 | 2,46 | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 2961. | 4.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 174.862.000 | | 4.726.000 | | 5.228.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2962. | 4.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 174.862.000 | | 4.888.000 | | 5.228.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2963. | 4.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 174.862.000 | | 3.890.000 | | 5.228.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2964. | 4.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 25.919.420.043 | | 3.737.097.959 | | 3.841.086.503 | | 860.239.631 | 72,74 | 22,40 | | 860.239.631 | 3,54 | 3,32 | | |
| | | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2965. | 4.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 17.498.078.323 | | 2.961.727.389 | | 3.800.730.903 | | 855.931.631 | 400,00 | 22,52 | | 855.931.631 | 2,95 | 4,89 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 4200 | | 432 | | 31 | | 124 | | 400,00 | | 124 | | 2,95 | | | |
| 2966. | 4.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 6.605.437.620 | | 716.057.670 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2967. | 4.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 808.528.000 | | 40.509.900 | | 18.754.900 | | - | 9,21 | 0,00 | | - | 1,84 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 24000 | | 17.776 | | 4800 | | 442 | | 9,21 | | 442 | | 1,84 | | | |
| 2968. | 4.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 311.916.000 | | 4.679.000 | | 5.278.300 | | 4.308.000 | 100,00 | 81,62 | | 4.308.000 | 20,00 | 1,38 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 2969. | 4.02.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | 231.574.000 | | 4.888.000 | | 5.045.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | 15 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2970. | 4.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 232.219.500 | | 5.587.000 | | 6.452.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 65 | | 13 | | 13 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2971. | 4.02.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | 231.666.600 | | 3.649.000 | | 4.823.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2972. | 4.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 4.579.266.800 | | 11.805.480 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2973. | 4.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 1.190.680.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2974. | 4.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 1.845.750.800 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 40 | | 0 | | 8 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2975. | 4.02.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 1.542.836.000 | | 11.805.480 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 90 | | 1 | | 18 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2976. | 4.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 29.010.249.819 | | 1.188.436.034 | | 504.839.448 | | 38.067.617 | 50,00 | 7,54 | | 38.067.617 | 3,90 | 0,13 | | |
| | | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2977. | 4.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 18.385.355.719 | | 843.224.950 | | 82.867.048 | | 6.183.500 | 100,00 | 7,46 | | 6.183.500 | 2,86 | 0,03 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 35 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 2,86 | | | |
| 2978. | 4.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 2.976.271.600 | | 32.466.700 | | 32.939.400 | | 4.539.400 | 100,00 | 13,78 | | 4.539.400 | 6,67 | 0,15 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 15 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 6,67 | | | |
| 2979. | 4.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 2.145.700.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 1500 | | 0 | | 30 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2980. | 4.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 2.590.611.000 | | 257.074.076 | | 332.592.000 | | 3.944.000 | 25,00 | 1,19 | | 3.944.000 | 5,00 | 0,15 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 2981. | 4.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 2.912.311.500 | | 55.670.308 | | 56.441.000 | | 23.400.717 | 25,00 | 41,46 | | 23.400.717 | 5,00 | 0,80 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 2982. | 4.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 21.838.519.218 | | 2.351.310.000 | | 101.751.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2983. | 4.02.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 5.691.352.275 | | 2.261.500.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 7 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2984. | 4.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 11.388.341.448 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2985. | 4.02.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 4.758.825.495 | | 89.810.000 | | 101.751.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2986. | 4.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.703.429.000 | | 614.318.550 | | 617.800.000 | | 85.525.990 | 16,67 | 13,84 | | 85.525.990 | 3,33 | 1,11 | | |
| | | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjnag Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2987. | 4.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 805.100.000 | | - | | 1.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2988. | 4.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 1.787.199.000 | | 170.348.551 | | 120.000.000 | | 2.725.990 | 25,00 | 2,27 | | 2.725.990 | 5,00 | 0,15 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 120 | | 24 | | 24 | | 6 | | 25,00 | | 6 | | 5,00 | | | |
| 2989. | 4.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 5.111.130.000 | | 443.969.999 | | 496.800.000 | | 82.800.000 | 25,00 | 16,67 | | 82.800.000 | 5,00 | 1,62 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2990. | 4.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 40.297.592.690 | | 763.586.346 | | 443.942.000 | | 32.715.359 | 3,13 | 7,37 | | 32.715.359 | 1,56 | 0,08 | | |
| | | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2991. | 4.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 5.265.222.200 | | 296.495.717 | | 288.410.000 | | 32.715.359 | 12,50 | 11,34 | | 32.715.359 | 6,25 | 0,62 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 32 | | 8 | | 16 | | 2 | | 12,50 | | 2 | | 6,25 | | | |
| 2992. | 4.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 5.284.795.000 | | 100.816.500 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 70 | | 14 | | 14 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2993. | 4.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 25.911.375.490 | | 356.408.629 | | 145.616.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2994. | 4.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 3.836.200.000 | | 9.865.500 | | 9.916.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2995. | 4.02.01.2.15 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | 69.056.958.364 | | 13.233.755.462 | | 14.929.972.560 | | 3.861.820.764 | 133,33 | 25,87 | | 3.861.820.764 | 1,90 | 5,59 | | |
| | | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2996. | 4.02.01.2.15.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | | | 66.964.458.364 | | 12.910.753.462 | | 14.827.292.560 | | 3.861.820.764 | 400,00 | 26,05 | | 3.861.820.764 | 5,71 | 5,77 | | |
| | | Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan) | 2450 | | 490 | | 35 | | 140 | | 400,00 | | 140 | | 5,71 | | | |
| 2997. | 4.02.01.2.15.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | | | 1.830.000.000 | | 278.152.000 | | 50.180.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket) | 25 | | 4 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2998. | 4.02.01.2.15.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | | | 262.500.000 | | 44.850.000 | | 52.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Medical Check Up DPRD | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang) | 175 | | 35 | | 35 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2999. | 4.02.01.2.16 | Layanan Administrasi DPRD | | | 6.333.016.758 | | 248.141.000 | | 125.000.500 | | 15.500.000 | 6,25 | 12,40 | | 15.500.000 | 1,25 | 0,24 | | |
| | | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Administrasi DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3000. | 4.02.01.2.16.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | | | 1.129.708.000 | | 4.464.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3001. | 4.02.01.2.16.0002 | Fasilitasi Fraksi DPRD | | | 443.206.000 | | 4.796.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3002. | 4.02.01.2.16.0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | | | 2.338.178.000 | | 238.881.000 | | 125.000.500 | | 15.500.000 | 25,00 | 12,40 | | 15.500.000 | 5,00 | 0,66 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 3003. | 4.02.01.2.16.0004 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | | | 2.421.924.758 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket) | 10 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3004.** | **4.02.02** | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | | | **96.426.068.900** | | **12.387.925.747** | | **14.657.327.600** | | **2.396.805.972** | **5,09** | **16,35** | | **2.396.805.972** | **0,99** | **2,49** | SEKRETARIAT DPRD | |
| | | 1. Meningkatnya kualitas persidangan kajian peraturan perundang-undangan, 2. meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan | Persentase terselenggaranya program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (%) | 100 | | 91,77 | | 100 | | 11,99 | | 11,99 | | 11,99 | | 11,99 | | | |
| 3005. | 4.02.02.2.01 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | | | 23.596.113.200 | | 1.484.782.190 | | 1.815.011.900 | | 49.846.860 | 20,00 | 2,75 | | 49.846.860 | 4,00 | 0,21 | | |
| | | Persentase terselenggaranya kegiatan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 3006. | 4.02.02.2.01.0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | | | 67.496.000 | | 467.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3007. | 4.02.02.2.01.0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | | | 22.682.983.200 | | 1.448.195.290 | | 1.800.008.900 | | 48.896.860 | 0,00 | 2,72 | | 48.896.860 | 0,00 | 0,22 | | |
| | | Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen) | 45 | | 3 | | 9 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3008. | 4.02.02.2.01.0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | | | 332.759.000 | | 346.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen) | 25 | | 5 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3009. | 4.02.02.2.01.0004 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | | | 318.825.000 | | 26.942.800 | | 15.003.000 | | 950.000 | 100,00 | 6,33 | | 950.000 | 20,00 | 0,30 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen) | 15 | | 4 | | 3 | | 3 | | 100,00 | | 3 | | 20,00 | | | |
| 3010. | 4.02.02.2.01.0005 | Penyusunan Tata Tertib DPRD | | | 194.050.000 | | 8.831.100 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Tata Tertib DPRD | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3011. | 4.02.02.2.02 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | | | 866.115.300 | | 59.493.500 | | 89.300.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase terselenggaranya kegiatan pembahasan kebijakan anggaran | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3012. | 4.02.02.2.02.0001 | Pembahasan KUA dan PPAS | | | 131.250.000 | | 16.700.000 | | 16.950.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen) | 5 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3013. | 4.02.02.2.02.0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | 147.000.000 | | 11.200.000 | | 16.950.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen) | 5 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3014. | 4.02.02.2.02.0003 | Pembahasan APBD | | | 142.500.000 | | 6.975.000 | | 16.950.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembahasan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3015. | 4.02.02.2.02.0004 | Pembahasan APBD Perubahan | | | 140.000.000 | | 6.975.000 | | 16.950.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 3016. | 4.02.02.2.02.0005 | Pembahasan Laporan Semester | | | 123.500.000 | | 3.425.000 | | 3.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3017. | 4.02.02.2.02.0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | | | 181.865.300 | | 14.218.500 | | 18.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3018. | 4.02.02.2.03 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | | | 594.283.600 | | 28.482.716 | | 1.100.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase terselenggaranya kegiatan pengawasan penyelenggara pemerintah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3019. | 4.02.02.2.03.0001 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | | | 289.153.000 | | 24.831.716 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan) | 15 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3020. | 4.02.02.2.03.0002 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | | | 30.168.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan) | 15 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3021. | 4.02.02.2.03.0003 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | | | 42.776.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan) | 15 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3022. | 4.02.02.2.03.0004 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | | | 43.303.600 | | 595.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan) | 15 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3023. | 4.02.02.2.03.0005 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | | | 42.848.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Laporan) | 15 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3024. | 4.02.02.2.03.0006 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | | | 45.210.000 | | 1.962.000 | | 1.100.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen) | 15 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3025. | 4.02.02.2.03.0007 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | | | 51.792.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen) | 15 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3026. | 4.02.02.2.03.0008 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | | | 49.033.000 | | 1.094.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3027. | 4.02.02.2.04 | Peningkatan Kapasitas DPRD | | | 8.901.972.600 | | 1.171.458.349 | | 1.314.491.400 | | 7.016.978 | 5,56 | 0,53 | | 7.016.978 | 0,95 | 0,08 | | |
| | | Persentase terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3028. | 4.02.02.2.04.0001 | Orientasi DPRD | | | 343.401.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya Orientasi DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3029. | 4.02.02.2.04.0002 | Pendalaman Tugas DPRD | | | 4.289.222.600 | | 698.539.749 | | 980.002.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3030. | 4.02.02.2.04.0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | | | 730.914.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang) | 10 | | 0 | | 24 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3031. | 4.02.02.2.04.0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | | | 1.148.750.000 | | 229.080.600 | | 231.709.400 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang) | 480 | | 96 | | 8 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 3032. | 4.02.02.2.04.0006 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | | | 113.257.600 | | 2.772.000 | | 2.780.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya Hubungan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen) | 15 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3033. | 4.02.02.2.04.0007 | Penyusunan Program Kerja DPRD | | | 65.494.400 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Rencana Kerja DPRD | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3034. | 4.02.02.2.04.0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | | | 2.210.933.000 | | 241.066.000 | | 100.000.000 | | 7.016.978 | 33,33 | 7,02 | | 7.016.978 | 6,67 | 0,32 | | |
| | | Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen) | 15 | | 3 | | 3 | | 1 | | 33,33 | | 1 | | 6,67 | | | |
| 3035. | 4.02.02.2.05 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | | | 5.979.089.000 | | 743.922.900 | | 733.089.300 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase terselenggaranya kegiatan penyerapan dan perhimpunan aspirasi masyarakat | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3036. | 4.02.02.2.05.0001 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | | | 253.730.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3037. | 4.02.02.2.05.0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | | | 233.000.000 | | 18.429.100 | | 33.079.300 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3038. | 4.02.02.2.05.0003 | Pelaksanaan Reses | | | 5.492.359.000 | | 725.493.800 | | 700.010.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Reses | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen) | 15 | | 2 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3039. | 4.02.02.2.06 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | | | 94.487.600 | | 5.012.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase terselenggaranya kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3040. | 4.02.02.2.06.0001 | Penyusunan Kode Etik DPRD | | | 37.487.600 | | 1.796.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3041. | 4.02.02.2.06.0002 | Pengawasan Kode Etik DPRD | | | 57.000.000 | | 3.216.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3042. | 4.02.02.2.07 | Pembahasan Kerja Sama Daerah | | | 194.360.000 | | 13.790.700 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase terselenggaranya kegiatan pembahasan kerjasama daerah | Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3043. | 4.02.02.2.07.0001 | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | | | 98.060.000 | | 8.716.700 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3044. | 4.02.02.2.07.0002 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | | | 96.300.000 | | 5.074.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi | Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3045. | 4.02.02.2.08 | Fasilitasi Tugas DPRD | | | 56.199.647.600 | | 8.880.983.392 | | 10.704.335.000 | | 2.339.942.134 | 12,50 | 21,86 | | 2.339.942.134 | 2,50 | 4,16 | | |
| | | Persentase terselenggaranya kegiatan fasilitasi tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3046. | 4.02.02.2.08.0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | | | 51.079.916.800 | | 7.383.780.857 | | 9.504.287.000 | | 2.151.534.886 | 25,00 | 22,64 | | 2.151.534.886 | 5,00 | 4,21 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 3047. | 4.02.02.2.08.0002 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | | | 54.820.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3048. | 4.02.02.2.08.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | | | 212.640.800 | | 18.072.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen) | 5 | | 1 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3049. | 4.02.02.2.08.0004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | | | 4.852.270.000 | | 1.479.130.535 | | 1.200.048.000 | | 188.407.248 | 25,00 | 15,70 | | 188.407.248 | 5,00 | 3,88 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| | **5.01** | **PERENCANAAN** | | | **44.586.603.994** | | **5.726.086.061** | | **5.154.080.759** | | **1.114.089.527** | **22,13** | **21,62** | | **1.114.089.527** | **6,80** | **2,50** | | |
| **3050.** | **5.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **34.746.111.985** | | **5.407.622.320** | | **5.032.355.260** | | **1.101.732.338** | **21,38** | **21,89** | | **1.101.732.338** | **10,08** | **3,17** | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 11,64 | | 11,64 | | 11,64 | | 11,64 | | | |
| 3051. | 5.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 944.181.000 | | 72.859.478 | | 15.189.000 | | - | 39,29 | 0,00 | | - | 8,57 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3052. | 5.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 106.604.000 | | 12.940.000 | | 2.343.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 12 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3053. | 5.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 81.702.000 | | 4.510.000 | | 2.343.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3054. | 5.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 84.299.000 | | 5.896.000 | | 1.710.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3055. | 5.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 67.324.000 | | 3.212.000 | | 2.343.000 | | - | 100,00 | 0,00 | | - | 20,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 3056. | 5.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 67.581.000 | | 183.000 | | 2.397.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3057. | 5.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 449.942.000 | | 43.258.478 | | 2.343.000 | | - | 75,00 | 0,00 | | - | 30,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 10 | | 5 | | 4 | | 3 | | 75,00 | | 3 | | 30,00 | | | |
| 3058. | 5.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 86.729.000 | | 2.860.000 | | 1.710.000 | | - | 100,00 | 0,00 | | - | 10,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 10 | | 4 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 10,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 3059. | 5.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 21.414.819.347 | | 4.312.642.080 | | 4.445.942.709 | | 1.043.639.173 | 6,25 | 23,47 | | 1.043.639.173 | 0,87 | 4,87 | | |
| | | Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3060. | 5.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 21.114.597.347 | | 4.286.219.458 | | 4.439.546.709 | | 1.041.435.173 | 25,00 | 23,46 | | 1.041.435.173 | 4,34 | 4,93 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 242 | | 42 | | 42 | | 10,5 | | 25,00 | | 10,5 | | 4,34 | | | |
| 3061. | 5.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 103.116.000 | | 9.467.622 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 5 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3062. | 5.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 65.702.000 | | 5.608.000 | | 2.343.000 | | 2.204.000 | 0,00 | 94,07 | | 2.204.000 | 0,00 | 3,35 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3063. | 5.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 65.702.000 | | 5.798.000 | | 2.343.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 80 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3064. | 5.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | 65.702.000 | | 5.549.000 | | 1.710.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3065. | 5.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 102.860.000 | | 12.022.000 | | 1.710.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3066. | 5.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 102.860.000 | | 12.022.000 | | 1.710.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3067. | 5.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 1.752.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3068. | 5.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 305.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3069. | 5.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 1.447.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 166 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3070. | 5.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.068.213.788 | | 221.400.324 | | 97.825.551 | | 5.090.000 | 4,17 | 5,20 | | 5.090.000 | 13,33 | 0,17 | | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3071. | 5.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 102.590.890 | | 10.651.500 | | 3.857.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 30 | | 6 | | 6 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3072. | 5.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 255.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3073. | 5.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 106.030.000 | | 10.575.000 | | 3.721.300 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 6 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3074. | 5.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 452.700.400 | | 37.613.750 | | 6.412.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 25 | | 5 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3075. | 5.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 474.249.134 | | 55.495.884 | | 5.103.451 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3076. | 5.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 80.400.000 | | 4.800.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 5 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3077. | 5.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 296.005.000 | | 20.311.250 | | 4.090.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3078. | 5.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 1.070.508.499 | | 81.952.940 | | 74.641.000 | | 5.090.000 | 25,00 | 6,82 | | 5.090.000 | 120,00 | 0,48 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 5 | | 24 | | 24 | | 6 | | 25,00 | | 6 | | 120,00 | | | |
| 3079. | 5.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | 230.729.865 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3080. | 5.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 2.695.465.000 | | 11.456.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Ketersediaan Barang Milik Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3081. | 5.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 1.096.108.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 19 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3082. | 5.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 674.941.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 29 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3083. | 5.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 924.416.000 | | 11.456.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 30 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3084. | 5.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.241.947.000 | | 310.689.683 | | 227.947.000 | | 28.778.565 | 12,50 | 12,63 | | 28.778.565 | 30,00 | 1,28 | | |
| | | Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3085. | 5.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 468.947.000 | | 68.289.683 | | 83.947.000 | | 16.942.565 | 25,00 | 20,18 | | 16.942.565 | 60,00 | 3,61 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 5 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 60,00 | | | |
| 3086. | 5.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 1.773.000.000 | | 242.400.000 | | 144.000.000 | | 11.836.000 | 0,00 | 8,22 | | 11.836.000 | 0,00 | 0,67 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3087. | 5.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.526.125.850 | | 466.552.755 | | 243.741.000 | | 24.224.600 | 47,22 | 9,94 | | 24.224.600 | 26,04 | 0,96 | | |
| | | Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3088. | 5.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 1.461.700.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 15,63 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 16 | | 0 | | 0 | | 5 | | 0,00 | | 2,5 | | 15,63 | | | |
| 3089. | 5.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | | 225.472.591 | | 236.700.000 | | 23.790.600 | 41,67 | 10,05 | | 23.790.600 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 0 | | 12 | | 12 | | 5 | | 41,67 | | 2,5 | | 0,00 | | | |
| 3090. | 5.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 351.710.000 | | 15.188.110 | | 4.948.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 3 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3091. | 5.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 712.715.850 | | 225.892.054 | | 2.093.000 | | 434.000 | 100,00 | 20,74 | | 434.000 | 62,50 | 0,06 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0.8 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 0,5 | | 62,50 | | | |
| **3092.** | **5.01.02** | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | | | **3.374.909.731** | | **126.892.836** | | **40.786.600** | | **6.235.000** | **50,00** | **15,29** | | **6.235.000** | **3,87** | **0,18** | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase) | 100 | | 25 | | 100 | | 25 | | 25,00 | | 25 | | 25,00 | | | |
| | | | Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase) | 100 | | 25 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3093. | 5.01.02.2.01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | | | 2.187.614.785 | | 115.120.902 | | 40.786.600 | | 6.235.000 | 50,00 | 15,29 | | 6.235.000 | 7,74 | 0,29 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Meningkatnya Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD dan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3094. | 5.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | | | 357.093.915 | | 5.990.000 | | 8.100.000 | | 3.300.000 | 100,00 | 40,74 | | 3.300.000 | 16,67 | 0,92 | | |
| | | Terlaksananya Konsultasi Publik | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara) | 6 | | 2 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 16,67 | | | |
| 3095. | 5.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | | | 356.895.220 | | 15.604.500 | | 8.200.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara) | 6 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3096. | 5.01.02.2.01.0006 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | | | 236.002.200 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan) | 10270 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3097. | 5.01.02.2.01.0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.237.623.450 | | 93.526.402 | | 24.486.600 | | 2.935.000 | 50,00 | 11,99 | | 2.935.000 | 14,29 | 0,24 | | |
| | | Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen) | 7 | | 3 | | 2 | | 1 | | 50,00 | | 1 | | 14,29 | | | |
| 3098. | 5.01.02.2.02 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | | 634.144.976 | | 11.771.934 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Persentase Ketersediaan Data IKU dan IKD | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3099. | 5.01.02.2.02.0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | 260.762.976 | | 11.771.934 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen) | 5 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3100. | 5.01.02.2.02.0002 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | | | 373.382.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang) | 377 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3101. | 5.01.02.2.03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | | 553.149.970 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Meningkatnya Persentase Target Kinerja Kegiatan PD yang Tercapai | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3102. | 5.01.02.2.03.0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | | | 266.243.700 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3103. | 5.01.02.2.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | 286.906.270 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan) | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3104.** | **5.01.03** | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | | | **6.465.582.278** | | **191.570.905** | | **80.938.899** | | **6.122.189** | **0,00** | **7,56** | | **6.122.189** | **0,00** | **0,09** | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Koordinasi Perencanaan | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Lingkup Bidang Koordinasi Perencanaan (%) | 100 | | 25 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3105. | 5.01.03.2.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | | 2.938.000.000 | | 84.986.905 | | 35.559.590 | | 3.040.500 | 0,00 | 8,55 | | 3.040.500 | 0,00 | 0,10 | | |
| | | Terpenuhinya Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3106. | 5.01.03.2.01.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | 625.000.000 | | 19.130.347 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen) | 5 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3107. | 5.01.03.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | | | 653.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3108. | 5.01.03.2.01.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | 545.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3109. | 5.01.03.2.01.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | 1.115.000.000 | | 65.856.558 | | 35.559.590 | | 3.040.500 | 0,00 | 8,55 | | 3.040.500 | 0,00 | 0,27 | | |
| | | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3110. | 5.01.03.2.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | | | 1.655.978.000 | | 52.370.716 | | 16.619.215 | | 544.500 | 0,00 | 3,28 | | 544.500 | 0,00 | 0,03 | | |
| | | Terpenuhinya Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3111. | 5.01.03.2.02.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | 427.978.000 | | 29.401.901 | | 16.619.215 | | 544.500 | 0,00 | 3,28 | | 544.500 | 0,00 | 0,13 | | |
| | | Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3112. | 5.01.03.2.02.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | | | 387.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3113. | 5.01.03.2.02.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | 411.000.000 | | 22.968.815 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen) | 5 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3114. | 5.01.03.2.02.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | | | 430.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3115. | 5.01.03.2.03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | | 1.871.604.278 | | 54.213.284 | | 28.760.094 | | 2.537.189 | 0,00 | 8,82 | | 2.537.189 | 0,00 | 0,14 | | |
| | | Terpenuhinya Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3116. | 5.01.03.2.03.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | 433.302.139 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3117. | 5.01.03.2.03.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | | | 517.500.000 | | 26.725.400 | | 28.760.094 | | 2.537.189 | 0,00 | 8,82 | | 2.537.189 | 0,00 | 0,49 | | |
| | | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3118. | 5.01.03.2.03.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | 413.302.139 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3119. | 5.01.03.2.03.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | | | 507.500.000 | | 27.487.884 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan) | 5 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **5.02** | **KEUANGAN** | | | **1.008.164.528.246** | | **193.661.271.293** | | **311.715.472.360** | | **1.194.253.154** | **14,86** | **0,38** | | **1.194.253.154** | **6,12** | **0,12** | | |
| **3120.** | **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **121.019.244.750** | | **23.807.354.206** | | **19.840.338.787** | | **874.685.122** | **19,44** | **4,41** | | **874.685.122** | **7,54** | **0,72** | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%) | 500 | | 100 | | 100 | | 25 | | 25,00 | | 25 | | 5,00 | | | |
| 3121. | 5.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 952.909.549 | | 95.219.750 | | 56.633.800 | | 11.366.000 | 21,88 | 20,07 | | 11.366.000 | 10,31 | 1,19 | | |
| | | Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3122. | 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 101.692.815 | | 14.062.000 | | 8.235.000 | | 836.000 | 50,00 | 10,15 | | 836.000 | 2,50 | 0,82 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 40 | | 4 | | 2 | | 1 | | 50,00 | | 1 | | 2,50 | | | |
| 3123. | 5.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 97.532.958 | | 12.509.250 | | 8.644.000 | | 7.186.000 | 100,00 | 83,13 | | 7.186.000 | 20,00 | 7,37 | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 3124. | 5.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 102.612.200 | | 15.152.000 | | 7.854.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3125. | 5.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 95.044.243 | | 12.190.000 | | 8.281.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3126. | 5.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 107.981.449 | | 15.383.500 | | 8.434.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3127. | 5.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 77.129.606 | | 6.436.000 | | 6.460.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 10 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3128. | 5.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 113.051.435 | | 19.487.000 | | 8.725.000 | | 3.344.000 | 25,00 | 38,33 | | 3.344.000 | 60,00 | 2,96 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 5 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 60,00 | | | |
| 3129. | 5.02.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | 257.864.842 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3130. | 5.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 101.905.409.972 | | 22.124.870.895 | | 18.661.596.807 | | 720.185.275 | 62,74 | 3,86 | | 720.185.275 | 30,10 | 0,71 | | |
| | | Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3131. | 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 101.694.589.048 | | 22.063.214.895 | | 18.621.148.807 | | 699.281.275 | 0,95 | 3,76 | | 699.281.275 | 79,22 | 0,69 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 77 | | 6.542 | | 6425 | | 61 | | 0,95 | | 61 | | 79,22 | | | |
| 3132. | 5.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 77.129.606 | | 18.637.000 | | 13.433.900 | | 9.004.000 | 100,00 | 67,02 | | 9.004.000 | 20,00 | 11,67 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 3133. | 5.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 77.129.606 | | 35.497.000 | | 13.542.900 | | 9.102.000 | 50,00 | 67,21 | | 9.102.000 | 1,18 | 11,80 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 85 | | 13 | | 2 | | 1 | | 50,00 | | 1 | | 1,18 | | | |
| 3134. | 5.02.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | 56.561.711 | | 7.522.000 | | 13.471.200 | | 2.798.000 | 100,00 | 20,77 | | 2.798.000 | 20,00 | 4,95 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 3135. | 5.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 466.006.798 | | 29.162.200 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3136. | 5.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 325.229.840 | | 22.222.200 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 355 | | 77 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3137. | 5.02.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 71.730.534 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 250 | | 0 | | 105 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3138. | 5.02.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 69.046.424 | | 6.940.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 250 | | 95 | | 95 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3139. | 5.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 2.044.782.995 | | 220.827.191 | | 226.873.200 | | 23.068.153 | 16,25 | 10,17 | | 23.068.153 | 3,75 | 1,13 | | |
| | | Meningkatnya kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3140. | 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 74.342.657 | | 11.826.000 | | 8.770.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 50 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3141. | 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 51.311.756 | | 1.385.200 | | 3.260.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3142. | 5.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 41.135.790 | | 3.850.000 | | 5.700.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3143. | 5.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 267.382.635 | | 51.652.000 | | 25.988.200 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3144. | 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 149.117.239 | | 19.971.500 | | 12.709.000 | | 1.000.000 | 100,00 | 7,87 | | 1.000.000 | 20,00 | 0,67 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 3145. | 5.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 11.415.182 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 50 | | 0 | | 20 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3146. | 5.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 401.073.953 | | 41.026.500 | | 19.500.000 | | 1.185.000 | 25,00 | 6,08 | | 1.185.000 | 5,00 | 0,30 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 3147. | 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 1.049.003.783 | | 91.115.991 | | 150.946.000 | | 20.883.153 | 5,00 | 13,83 | | 20.883.153 | 5,00 | 1,99 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 60 | | 65 | | 60 | | 3 | | 5,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 3148. | 5.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 7.231.954.702 | | 528.233.850 | | 19.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3149. | 5.02.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 3.721.786.316 | | 60.578.300 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 2 | | 3 | | 9 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3150. | 5.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 520.336.893 | | 76.345.800 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 5 | | 25 | | 30 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3151. | 5.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 1.447.239.366 | | 391.309.750 | | 19.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 15 | | 16 | | 7 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3152. | 5.02.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 1.542.592.128 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3153. | 5.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.032.462.766 | | 411.596.331 | | 430.464.980 | | 84.554.300 | 16,67 | 19,64 | | 84.554.300 | 3,33 | 2,10 | | |
| | | Meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3154. | 5.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 41.124.478 | | 3.490.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3155. | 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 802.147.906 | | 124.004.675 | | 153.999.980 | | 28.770.500 | 25,00 | 18,68 | | 28.770.500 | 5,00 | 3,59 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 3156. | 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 3.189.190.382 | | 284.101.656 | | 276.465.000 | | 55.783.800 | 25,00 | 20,18 | | 55.783.800 | 5,00 | 1,75 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 3157. | 5.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.385.717.968 | | 397.443.989 | | 445.770.000 | | 35.511.394 | 11,84 | 7,97 | | 35.511.394 | 2,00 | 0,81 | | |
| | | Meningkatnya kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3158. | 5.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 2.833.613.189 | | 364.711.074 | | 442.750.000 | | 35.211.394 | 32,65 | 7,95 | | 35.211.394 | 5,33 | 1,24 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 300 | | 37 | | 49 | | 16 | | 32,65 | | 16 | | 5,33 | | | |
| 3159. | 5.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 148.345.943 | | 22.080.220 | | 1.200.000 | | 300.000 | 2,86 | 25,00 | | 300.000 | 0,67 | 0,20 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 150 | | 40 | | 35 | | 1 | | 2,86 | | 1 | | 0,67 | | | |
| 3160. | 5.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 1.403.758.836 | | 10.652.695 | | 1.820.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3161.** | **5.02.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | | | **874.983.983.496** | | **168.509.970.282** | | **290.130.001.273** | | **207.568.562** | **13,08** | **0,07** | | **207.568.562** | **4,51** | **0,02** | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya tata kelola anggaran | Persentase Belanja Pegawai diluar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (%) | 167 | | 47 | | 47 | | 14 | | 29,79 | | 14 | | 8,38 | | | |
| | | | Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase) | 182 | | 22 | | 22 | | 5 | | 22,73 | | 5 | | 2,75 | | | |
| | | | Persentase Penurunan SILPA (Persentase) | 1 | | 3,3 | | 2,80 | | 3,2 | | 114,29 | | 3,2 | | 320,00 | | | |
| | | | Persentase penyampaian LKPD tepat waktu dan sesuai SAP (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Persentase Penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3162. | 5.02.02.2.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | | 6.327.205.394 | | 1.098.233.500 | | 1.017.175.500 | | 110.989.500 | 10,83 | 10,91 | | 110.989.500 | 4,75 | 1,75 | | |
| | | Meningkatnya Tata Kelola Anggaran | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dokumen ) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 3163. | 5.02.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | | | 914.242.934 | | 136.803.500 | | 162.310.100 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen ) | 2 | | 4 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3164. | 5.02.02.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | 939.953.317 | | 136.721.000 | | 165.478.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen ) | 2 | | 4 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3165. | 5.02.02.2.01.0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | | | 411.219.067 | | 67.864.000 | | 57.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen ) | 43 | | 4 | | 43 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3166. | 5.02.02.2.01.0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | | | 641.718.325 | | 110.661.000 | | 127.108.000 | | 47.900.000 | 25,00 | 37,68 | | 47.900.000 | 12,50 | 7,46 | | |
| | | Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen ) | 43 | | 43 | | 43 | | 10,75 | | 25,00 | | 5,375 | | 12,50 | | | |
| 3167. | 5.02.02.2.01.0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | | | 397.988.769 | | 66.881.000 | | 56.240.000 | | 47.900.000 | 25,00 | 85,17 | | 47.900.000 | 12,50 | 12,04 | | |
| | | Terlaksananya Verifikasi DPA-SKPD | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen ) | 43 | | 43 | | 43 | | 10,75 | | 25,00 | | 5,375 | | 12,50 | | | |
| 3168. | 5.02.02.2.01.0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | | | 730.201.409 | | 127.748.000 | | 111.400.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen ) | 43 | | 43 | | 43 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3169. | 5.02.02.2.01.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | 874.136.053 | | 191.929.400 | | 137.576.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen ) | 2 | | 6 | | 6 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3170. | 5.02.02.2.01.0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | 1.002.685.397 | | 171.754.800 | | 193.114.100 | | 10.648.000 | 33,33 | 5,51 | | 10.648.000 | 20,00 | 1,06 | | |
| | | Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen ) | 10 | | 6 | | 6 | | 2 | | 33,33 | | 2 | | 20,00 | | | |
| 3171. | 5.02.02.2.01.0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | | 358.498.410 | | 87.870.800 | | 6.448.500 | | 4.541.500 | 25,00 | 70,43 | | 4.541.500 | 2,50 | 1,27 | | |
| | | Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen ) | 40 | | 4 | | 4 | | 1 | | 25,00 | | 1 | | 2,50 | | | |
| 3172. | 5.02.02.2.01.0010 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | | | 56.561.711 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dokumen ) | 2 | | 0 | | 6 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3173. | 5.02.02.2.02 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | | 2.118.688.583 | | 263.625.100 | | 177.220.900 | | 38.571.471 | 19,14 | 21,76 | | 38.571.471 | 7,24 | 1,82 | | |
| | | Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen ) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3174. | 5.02.02.2.02.0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | | | 323.961.315 | | 52.732.000 | | 23.470.300 | | 13.753.700 | 25,00 | 58,60 | | 13.753.700 | 30,00 | 4,25 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen ) | 10 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 30,00 | | | |
| 3175. | 5.02.02.2.02.0003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | | | 113.112.110 | | 8.643.000 | | 4.461.600 | | 3.047.000 | 25,00 | 68,29 | | 3.047.000 | 5,00 | 2,69 | | |
| | | Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen ) | 860 | | 172 | | 172 | | 43 | | 25,00 | | 43 | | 5,00 | | | |
| 3176. | 5.02.02.2.02.0004 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | | | 215.962.384 | | 39.510.000 | | 37.140.000 | | 7.005.000 | 25,00 | 18,86 | | 7.005.000 | 15,00 | 3,24 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen ) | 20 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 15,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 3177. | 5.02.02.2.02.0005 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | | | 144.335.203 | | 7.396.000 | | 11.737.000 | | 7.664.771 | 25,00 | 65,30 | | 7.664.771 | 0,75 | 5,31 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen ) | 400 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 0,75 | | | |
| 3178. | 5.02.02.2.02.0006 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | | | 215.860.058 | | 37.111.000 | | 18.731.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen ) | 3 | | 3 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3179. | 5.02.02.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | | 107.945.455 | | 12.010.000 | | 13.030.000 | | 5.076.000 | 22,22 | 38,96 | | 5.076.000 | 4,44 | 4,70 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan) | 90 | | 18 | | 18 | | 4 | | 22,22 | | 4 | | 4,44 | | | |
| 3180. | 5.02.02.2.02.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | | | 108.007.159 | | 19.570.000 | | 7.431.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen ) | 9 | | 9 | | 9 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3181. | 5.02.02.2.02.0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | | | 323.846.649 | | 48.599.200 | | 28.770.000 | | 2.025.000 | 50,00 | 7,04 | | 2.025.000 | 10,00 | 0,63 | | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen ) | 430 | | 86 | | 86 | | 43 | | 50,00 | | 43 | | 10,00 | | | |
| 3182. | 5.02.02.2.02.0010 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | | | 565.658.249 | | 38.053.900 | | 32.450.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen ) | 4 | | 8 | | 8 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 3183. | 5.02.02.2.03 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | | 2.581.269.798 | | 204.741.612 | | 119.104.400 | | 23.222.580 | 14,21 | 19,50 | | 23.222.580 | 3,17 | 0,90 | | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen ) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3184. | 5.02.02.2.03.0002 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | | | 161.972.173 | | 15.151.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen ) | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3185. | 5.02.02.2.03.0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | | | 411.356.872 | | 13.259.900 | | 7.711.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan) | 4 | | 4 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3186. | 5.02.02.2.03.0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | 221.104.872 | | 39.301.000 | | 63.610.000 | | 17.498.580 | 66,15 | 27,51 | | 17.498.580 | 20,00 | 7,91 | | |
| | | Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan) | 215 | | 65 | | 65 | | 43 | | 66,15 | | 43 | | 20,00 | | | |
| 3187. | 5.02.02.2.03.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | 403.644.940 | | 48.765.800 | | 25.799.600 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen ) | 1 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3188. | 5.02.02.2.03.0006 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | | | 411.357.901 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen ) | 8 | | 0 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3189. | 5.02.02.2.03.0009 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | | | 251.956.714 | | 8.310.000 | | 21.983.000 | | 5.724.000 | 33,33 | 26,04 | | 5.724.000 | 2,20 | 2,27 | | |
| | | Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen ) | 910 | | 60 | | 60 | | 20 | | 33,33 | | 20 | | 2,20 | | | |
| 3190. | 5.02.02.2.03.0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | | | 719.876.326 | | 79.953.912 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang) | 172 | | 50 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3191. | 5.02.02.2.04 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | 862.282.932.434 | | 166.768.871.020 | | 288.809.100.473 | | 34.785.011 | 8,44 | 0,01 | | 34.785.011 | 1,69 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya pengelolaan bantuan keuangan dan dana desa | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3192. | 5.02.02.2.04.0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | | 823.203.931.870 | | 163.446.958.300 | | 139.933.209.200 | | 34.785.011 | 25,32 | 0,02 | | 34.785.011 | 5,06 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan) | 395 | | 316 | | 79 | | 20 | | 25,32 | | 20 | | 5,06 | | | |
| 3193. | 5.02.02.2.04.0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | 8.227.158.013 | | 2.014.831.585 | | 141.289.370.950 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3194. | 5.02.02.2.04.0010 | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | | | 30.851.842.551 | | 1.307.081.135 | | 7.586.520.323 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan) | 79 | | 79 | | 79 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3195. | 5.02.02.2.05 | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | | | 1.673.887.285 | | 174.499.050 | | 7.400.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya pengelolaan data dan implementasi SIPD | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen ) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3196. | 5.02.02.2.05.0002 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | | | 969.827.671 | | 107.482.050 | | 7.400.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen ) | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3197. | 5.02.02.2.05.0003 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | 704.059.615 | | 67.017.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang) | 86 | | 12 | | 129 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3198.** | **5.02.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | | | **3.902.483.800** | | **375.892.189** | | **321.045.000** | | **24.661.000** | **11,36** | **7,68** | | **24.661.000** | **3,64** | **0,63** | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya tata kelola aset milik daerah | Persentase pertambahan Aset Tetap (%) | 437,5 | | 87,5 | | 87,5 | | 20 | | 22,86 | | 20 | | 4,57 | | | |
| 3199. | 5.02.03.2.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | 3.902.483.800 | | 375.892.189 | | 321.045.000 | | 24.661.000 | 11,36 | 7,68 | | 24.661.000 | 3,64 | 0,63 | | |
| | | Meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib administrasi, hukum dan fisik | Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3200. | 5.02.03.2.01.0001 | Penyusunan Standar Harga | | | 370.227.767 | | 59.261.900 | | 21.650.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Standar Harga | Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen ) | 1 | | 55 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3201. | 5.02.03.2.01.0002 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | 154.261.270 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen ) | 1 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3202. | 5.02.03.2.01.0003 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | 241.672.767 | | 29.245.500 | | 15.400.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen ) | 1 | | 55 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3203. | 5.02.03.2.01.0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | 566.182.731 | | 18.355.000 | | 38.707.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3204. | 5.02.03.2.01.0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | | | 128.550.372 | | - | | 50.000.000 | | 3.552.000 | 25,00 | 7,10 | | 3.552.000 | 5,00 | 2,76 | | |
| | | Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 3205. | 5.02.03.2.01.0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah | | | 1.153.513.669 | | 128.643.000 | | 135.013.900 | | 11.485.000 | 25,00 | 8,51 | | 11.485.000 | 5,00 | 1,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan) | 60 | | 45 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 3206. | 5.02.03.2.01.0008 | Penilaian Barang Milik Daerah | | | 154.259.213 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan) | 12 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3207. | 5.02.03.2.01.0009 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | 136.262.305 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan ) | 12 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3208. | 5.02.03.2.01.0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | 102.839.989 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen ) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3209. | 5.02.03.2.01.0011 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | 329.096.604 | | 52.923.789 | | 26.124.000 | | 3.552.000 | 25,00 | 13,60 | | 3.552.000 | 10,00 | 1,08 | | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan) | 10 | | 20 | | 4 | | 1 | | 25,00 | | 1 | | 10,00 | | | |
| 3210. | 5.02.03.2.01.0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | 565.617.113 | | 87.463.000 | | 34.150.100 | | 6.072.000 | 50,00 | 17,78 | | 6.072.000 | 20,00 | 1,07 | | |
| | | Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan) | 5 | | 20 | | 2 | | 1 | | 50,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| **3211.** | **5.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | | | **8.258.816.200** | | **968.054.616** | | **1.424.087.300** | | **87.338.470** | **10,43** | **6,13** | | **87.338.470** | **8,30** | **1,06** | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | 1. Meningkatnya upaya ekstentifikasi dan intensifikasi pendapatan, 2. meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan, 3. Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital | Persentase devisiasi Realisasi Penerimaan PAD terhadap Target PAD (%) | 1,25 | | 0,19 | | 0,21 | | 0,04 | | 19,05 | | 0,04 | | 3,20 | | | |
| | | | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%) | 1,25 | | 0,19 | | 0,21 | | 0,04 | | 19,05 | | 0,04 | | 3,20 | | | |
| | | | Jumlah potensi pendapatan baru yang berhasil diidentifikasi dan dikembangkan (%) | 1,25 | | 0,19 | | 0,21 | | 0,04 | | 19,05 | | 0,04 | | 3,20 | | | |
| 3212. | 5.02.04.2.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | 8.258.816.200 | | 968.054.616 | | 1.424.087.300 | | 87.338.470 | 10,43 | 6,13 | | 87.338.470 | 8,30 | 1,06 | | |
| | | Meningkatnya kualitas pengawasan dan Pelaporan | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3213. | 5.02.04.2.01.0001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | | | 215.962.898 | | 22.693.000 | | 38.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen ) | 2 | | 2 | | 9 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3214. | 5.02.04.2.01.0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | | | 719.876.326 | | 32.171.100 | | 242.638.000 | | 2.750.000 | 0,00 | 1,13 | | 2.750.000 | 0,00 | 0,38 | | |
| | | Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen) | 1 | | 1 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3215. | 5.02.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | 822.715.801 | | 77.063.565 | | 57.300.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan ) | 4 | | 4 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3216. | 5.02.04.2.01.0009 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | 71.987.633 | | 3.750.400 | | 13.015.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan) | 40 | | 40 | | 40 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3217. | 5.02.04.2.01.0010 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | | | 462.780.209 | | 132.378.624 | | 50.000.100 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen ) | 5 | | 5 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3218. | 5.02.04.2.01.0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | | | 493.629.481 | | 28.105.303 | | 135.001.000 | | 7.901.965 | 25,00 | 5,85 | | 7.901.965 | 5,00 | 1,60 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen ) | 40 | | 8 | | 8 | | 2 | | 25,00 | | 2 | | 5,00 | | | |
| 3219. | 5.02.04.2.01.0014 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | | | 185.111.055 | | 16.161.600 | | 74.017.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Meningkatnya penerapan Sistem Informasi keuangan berbasis digital | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3220. | 5.02.04.2.01.0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | | | 1.799.690.815 | | 220.210.900 | | 349.192.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit) | 4 | | 2 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3221. | 5.02.04.2.01.0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | | | 241.673.795 | | 8.356.600 | | 20.000.200 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3222. | 5.02.04.2.01.0015 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | | | 381.280.522 | | 30.104.700 | | 134.900.200 | | 35.487.921 | 20,00 | 26,31 | | 35.487.921 | 10,00 | 9,31 | | |
| | | Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan) | 20 | | 12 | | 10 | | 2 | | 20,00 | | 2 | | 10,00 | | | |
| | | Meningkatnya kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3223. | 5.02.04.2.01.0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | | | 421.642.362 | | 27.084.000 | | 65.020.000 | | 9.681.584 | 25,00 | 14,89 | | 9.681.584 | 0,40 | 2,30 | | |
| | | Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 750 | | 45 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 0,40 | | | |
| 3224. | 5.02.04.2.01.0007 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | | | 848.432.869 | | 128.149.264 | | 50.000.000 | | 15.874.000 | 27,27 | 31,75 | | 15.874.000 | 0,60 | 1,87 | | |
| | | Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak ) | 500 | | 100 | | 11 | | 3 | | 27,27 | | 3 | | 0,60 | | | |
| 3225. | 5.02.04.2.01.0008 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | | | 617.036.851 | | 30.912.000 | | 24.992.000 | | 8.198.000 | 25,00 | 32,80 | | 8.198.000 | 0,24 | 1,33 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen) | 1250 | | 250 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 0,24 | | | |
| 3226. | 5.02.04.2.01.0011 | Penagihan Pajak Daerah | | | 976.995.582 | | 210.913.560 | | 170.010.000 | | 7.445.000 | 13,33 | 4,38 | | 7.445.000 | 100,00 | 0,76 | | |
| | | Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen) | 20 | | 3 | | 150 | | 20 | | 13,33 | | 20 | | 100,00 | | | |
| | **5.03** | **KEPEGAWAIAN** | | | **40.372.440.179** | | **5.532.823.912** | | **5.580.815.429** | | **428.917.928** | **15,57** | **7,69** | | **428.917.928** | **2,62** | **1,06** | | |
| **3227.** | **5.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **35.262.440.179** | | **5.217.348.691** | | **5.441.398.429** | | **428.917.928** | **12,50** | **7,88** | | **428.917.928** | **1,82** | **1,22** | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%) | 500 | | 100 | | 100 | | 25 | | 25,00 | | 25 | | 5,00 | | | |
| 3228. | 5.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 235.000.000 | | - | | 10.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Nilai AKIP dan IKM BKPSDM | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3229. | 5.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 75.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3230. | 5.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 45.000.000 | | - | | 10.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 40 | | 8 | | 8 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3231. | 5.03.01.2.01.0010 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 115.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3232. | 5.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 23.262.383.863 | | 4.870.160.635 | | 5.183.838.129 | | 428.917.928 | 0,00 | 8,27 | | 428.917.928 | 0,00 | 1,84 | | |
| | | Nilai AKIP dan IKM BKPSDM | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3233. | 5.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 23.142.383.863 | | 4.870.160.635 | | 5.183.838.129 | | 428.917.928 | 0,00 | 8,27 | | 428.917.928 | 0,00 | 1,85 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 60 | | 100 | | 60 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3234. | 5.03.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 120.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3235. | 5.03.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 35.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Nilai AKIP dan IKM BKPSDM | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3236. | 5.03.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 35.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3237. | 5.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 100.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Nilai AKIP dan IKM BKPSDM | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3238. | 5.03.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 100.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3239. | 5.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.915.800.179 | | 119.126.973 | | 116.020.300 | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 5,00 | 0,00 | | |
| | | Nilai AKIP dan IKM BKPSDM | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3240. | 5.03.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 85.000.000 | | 7.884.500 | | 6.005.300 | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 5,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 60 | | 20 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 3241. | 5.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 315.000.000 | | 21.200.010 | | 25.000.000 | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 5,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 60 | | 50 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 3242. | 5.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 315.000.000 | | 26.954.826 | | 25.000.000 | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 5,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 60 | | 10 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 3243. | 5.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 65.000.000 | | - | | - | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 5,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 60 | | 0 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 3244. | 5.03.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 210.000.000 | | 18.881.625 | | 15.000.000 | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 5,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 60 | | 4.000 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 3245. | 5.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 925.800.179 | | 44.206.012 | | 45.015.000 | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 5,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 1000 | | 200 | | 200 | | 50 | | 25,00 | | 50 | | 5,00 | | | |
| 3246. | 5.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 7.534.256.137 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Nilai AKIP dan IKM BKPSDM | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3247. | 5.03.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 500.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 11 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3248. | 5.03.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 1.046.651.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 5 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3249. | 5.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 1.487.605.137 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 15 | | 0 | | 15 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3250. | 5.03.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 4.500.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3251. | 5.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 825.000.000 | | 136.077.079 | | 33.800.000 | | - | 16,67 | 0,00 | | - | 3,33 | 0,00 | | |
| | | Nilai AKIP dan IKM BKPSDM | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3252. | 5.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 65.000.000 | | 3.000.000 | | 2.500.000 | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 5,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 60 | | 160 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 3253. | 5.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 110.000.000 | | 25.877.079 | | 2.500.000 | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 5,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 3254. | 5.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 650.000.000 | | 107.200.000 | | 28.800.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 72 | | 28 | | 72 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3255. | 5.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.355.000.000 | | 91.984.004 | | 97.740.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Nilai AKIP dan IKM BKPSDM | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3256. | 5.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 1.200.000.000 | | 91.984.004 | | 87.450.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 23 | | 23 | | 23 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3257. | 5.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 155.000.000 | | - | | 10.290.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 50 | | 92 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3258.** | **5.03.02** | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | | | **5.110.000.000** | | **315.475.221** | | **139.417.000** | | **-** | **18,65** | **0,00** | | **-** | **3,73** | **0,00** | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | | 1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian, 2. Meningkatnya pengembangan potensi ASN , 3. Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN, 4. Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN | Indeks Profesionalitas ASN (Indeks) | 85 | | 75,72 | | 78 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Indeks sistem merit () | 300 | | 234,5 | | 260 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3259. | 5.03.02.2.01 | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | | | 1.235.000.000 | | 19.744.761 | | 26.867.000 | | - | 16,67 | 0,00 | | - | 3,33 | 0,00 | | |
| | | Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Sistem Merit | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3260. | 5.03.02.2.01.0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | | | 125.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen ) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3261. | 5.03.02.2.01.0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | | | 390.000.000 | | 13.106.800 | | 10.365.000 | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 5,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen ) | 50000 | | 10.000 | | 10000 | | 2.500 | | 25,00 | | 2.500 | | 5,00 | | | |
| 3262. | 5.03.02.2.01.0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | | | 225.000.000 | | 6.637.961 | | 6.502.000 | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 5,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen ) | 1000 | | 200 | | 200 | | 50 | | 25,00 | | 50 | | 5,00 | | | |
| 3263. | 5.03.02.2.01.0008 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | | | 215.000.000 | | - | | 10.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3264. | 5.03.02.2.01.0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | 155.000.000 | | - | | - | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 5,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen ) | 35000 | | 6.500 | | 7000 | | 1.750 | | 25,00 | | 1.750 | | 5,00 | | | |
| 3265. | 5.03.02.2.01.0011 | Pengelolaan Data Kepegawaian | | | 125.000.000 | | - | | - | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 5,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Data Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen ) | 35000 | | 12 | | 7000 | | 1.750 | | 25,00 | | 1.750 | | 5,00 | | | |
| 3266. | 5.03.02.2.02 | Mutasi dan Promosi ASN | | | 2.375.000.000 | | 232.335.960 | | 57.501.000 | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 5,00 | 0,00 | | |
| | | Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Sistem Merit | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3267. | 5.03.02.2.02.0001 | Pengelolaan Mutasi ASN | | | 1.950.000.000 | | 1.105.000 | | 50.000.000 | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 5,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen ) | 2500 | | 200 | | 500 | | 125 | | 25,00 | | 125 | | 5,00 | | | |
| 3268. | 5.03.02.2.02.0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | | | 310.000.000 | | 7.606.800 | | 7.501.000 | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 5,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen ) | 7500 | | 1.500 | | 1500 | | 375 | | 25,00 | | 375 | | 5,00 | | | |
| 3269. | 5.03.02.2.02.0003 | Pengelolaan Promosi ASN | | | 115.000.000 | | 223.624.160 | | - | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 5,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen ) | 2000 | | 400 | | 400 | | 100 | | 25,00 | | 100 | | 5,00 | | | |
| 3270. | 5.03.02.2.03 | Pengembangan Kompetensi ASN | | | 680.000.000 | | 53.814.500 | | 45.049.000 | | - | 33,33 | 0,00 | | - | 6,67 | 0,00 | | |
| | | Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Sistem Merit | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3271. | 5.03.02.2.03.0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | | | 680.000.000 | | 53.814.500 | | 45.049.000 | | - | 33,33 | 0,00 | | - | 6,67 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang) | 750 | | 700 | | 150 | | 50 | | 33,33 | | 50 | | 6,67 | | | |
| 3272. | 5.03.02.2.04 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | 820.000.000 | | 9.580.000 | | 10.000.000 | | - | 15,00 | 0,00 | | - | 3,00 | 0,00 | | |
| | | Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Sistem Merit | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3273. | 5.03.02.2.04.0001 | Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | 135.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen ) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3274. | 5.03.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | 155.000.000 | | 4.940.000 | | 5.000.000 | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 5,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen ) | 35000 | | 6.500 | | 7000 | | 1.750 | | 25,00 | | 1.750 | | 5,00 | | | |
| 3275. | 5.03.02.2.04.0005 | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai | | | 115.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN | Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (Orang) | 300 | | 300 | | 300 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3276. | 5.03.02.2.04.0007 | Pembinaan Disiplin ASN | | | 145.000.000 | | 4.640.000 | | 5.000.000 | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 5,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Disiplin ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang) | 35000 | | 24 | | 7000 | | 1.750 | | 25,00 | | 1.750 | | 5,00 | | | |
| 3277. | 5.03.02.2.04.0008 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | | | 155.000.000 | | - | | - | | - | 20,00 | 0,00 | | - | 4,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan) | 250 | | 50 | | 50 | | 10 | | 20,00 | | 10 | | 4,00 | | | |
| 3278. | 5.03.02.2.04.0009 | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai | | | 115.000.000 | | - | | - | | - | 20,00 | 0,00 | | - | 4,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai | Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (Dokumen) | 250 | | 50 | | 50 | | 10 | | 20,00 | | 10 | | 4,00 | | | |
| | **5.04** | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | **14.050.000.000** | | **-** | | **1.078.025.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | |
| **3279.** | **5.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | | | **14.050.000.000** | | **-** | | **1.078.025.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | | 1. Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar , kader, manajerial, dan fungsional, 2. meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi, 3. Meningkatnya layanan penjamin mutu, pengelolaan tugas belajar serta sertifikasi kompetensi, 4. meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis | Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi (Indeks) | 43 | | 26,44 | | 32 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 3280. | 5.04.02.2.02 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | | | 14.050.000.000 | | - | | 1.078.025.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3281. | 5.04.02.2.02.0007 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | 14.050.000.000 | | - | | 1.078.025.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan) | 300 | | 0 | | 272 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **5.05** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | **3.360.485.795** | | **23.929.650** | | **13.973.050** | | **1.551.000** | **0,00** | **11,10** | | **1.551.000** | **0,00** | **0,05** | | |
| **3282.** | **5.05.02** | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | | | **2.851.885.795** | | **23.929.650** | | **13.973.050** | | **1.551.000** | **0,00** | **11,10** | | **1.551.000** | **0,00** | **0,05** | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian/Kajian yang Direkomendasikan sebagai Bahan Masukan Kebijakan Pembangunan Daerah | Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian/Kajian yang Direkomendasikan sebagai Bahan Masukan Kebijakan Pembangunan Daerah (%) | 18 | | 13,21 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3283. | 5.05.02.2.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | | | 561.299.000 | | 23.929.650 | | 13.973.050 | | 1.551.000 | 0,00 | 11,10 | | 1.551.000 | 0,00 | 0,28 | | |
| | | Terpenuhinya Laporan Data Kajian/Penelitian/Kelitbangan yang Terkelola dengan Baik | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3284. | 5.05.02.2.01.0012 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | | | 561.299.000 | | 23.929.650 | | 13.973.050 | | 1.551.000 | 0,00 | 11,10 | | 1.551.000 | 0,00 | 0,28 | | |
| | | Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3285. | 5.05.02.2.02 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | | | 449.300.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpenuhinya Dokumen Hasil Kajian/Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3286. | 5.05.02.2.02.0001 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial | | | 449.300.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3287. | 5.05.02.2.03 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | | | 709.686.795 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpenuhinya Dokumen Hasil Kajian/Penelitian dan Pengambangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3288. | 5.05.02.2.03.0004 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | | | 709.686.795 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 3289. | 5.05.02.2.04 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | | | 1.131.600.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah dan Nagari yang Mengirimkan Inovasinya untuk Penilaian Indeks Inovasi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3290. | 5.05.02.2.04.0003 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | | | 602.300.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3291. | 5.05.02.2.04.0004 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | | | 529.300.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3292.** | **5.05.03** | **PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH** | | | **508.600.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah | Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase) | 30 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3293. | 5.05.03.2.02 | Invensi dan Inovasi | | | 508.600.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Jumlah Inovasi Daerah | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3294. | 5.05.03.2.02.0001 | Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah | | | 254.300.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3295. | 5.05.03.2.02.0021 | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi | | | 254.300.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi | Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **6.01** | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | **97.377.791.885** | | **11.862.048.578** | | **13.096.320.729** | | **2.470.669.532** | **17,53** | **18,87** | | **2.470.669.532** | **14,05** | **2,54** | | |
| **3296.** | **6.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **86.181.980.201** | | **9.927.326.047** | | **10.906.444.104** | | **2.196.817.532** | **11,61** | **20,14** | | **2.196.817.532** | **7,56** | **2,55** | INSPEKTORAT | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%) | 100 | | 85 | | 100 | | 20,14 | | 20,14 | | 20,14 | | 20,14 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 3297. | 6.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.686.561.000 | | 52.937.600 | | 71.412.000 | | 11.056.000 | 25,00 | 15,48 | | 11.056.000 | 25,00 | 0,66 | | |
| | | Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3298. | 6.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 211.014.000 | | 10.817.500 | | 10.996.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3299. | 6.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 166.599.000 | | 602.100 | | 6.599.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3300. | 6.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 206.392.000 | | 6.295.000 | | 6.392.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3301. | 6.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 206.466.000 | | - | | 6.466.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3302. | 6.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 196.000.000 | | 8.091.000 | | 6.000.000 | | 2.640.000 | 25,00 | 44,00 | | 2.640.000 | 25,00 | 1,35 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 4 | | 5 | | 4 | | 1 | | 25,00 | | 1 | | 25,00 | | | |
| 3303. | 6.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 213.214.000 | | 12.190.000 | | 13.214.000 | | 2.640.000 | 100,00 | 19,98 | | 2.640.000 | 100,00 | 1,24 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 100,00 | | | |
| | | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Inspektorat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3304. | 6.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 486.876.000 | | 14.942.000 | | 21.745.000 | | 5.776.000 | 50,00 | 26,56 | | 5.776.000 | 50,00 | 1,19 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 2 | | 2 | | 2 | | 1 | | 50,00 | | 1 | | 50,00 | | | |
| 3305. | 6.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 41.013.900.426 | | 8.250.003.717 | | 8.865.749.559 | | 2.133.078.643 | 0,00 | 24,06 | | 2.133.078.643 | 0,00 | 5,20 | | |
| | | Terlaksanya Penyerapan Anggaran Inspektorat | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3306. | 6.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 40.826.515.426 | | 8.227.319.717 | | 8.828.272.559 | | 2.118.571.643 | 0,00 | 24,00 | | 2.118.571.643 | 0,00 | 5,19 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 89 | | 86 | | 89 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3307. | 6.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 29.990.000 | | 8.624.000 | | 5.998.000 | | 1.840.000 | 0,00 | 30,68 | | 1.840.000 | 0,00 | 6,14 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 100 | | 100 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3308. | 6.01.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | 35.000.000 | | - | | 7.000.000 | | 3.000.000 | 0,00 | 42,86 | | 3.000.000 | 0,00 | 8,57 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3309. | 6.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 39.940.000 | | 2.652.000 | | 7.988.000 | | 7.840.000 | 0,00 | 98,15 | | 7.840.000 | 0,00 | 19,63 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3310. | 6.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | 27.455.000 | | 3.800.000 | | 5.491.000 | | 1.827.000 | 0,00 | 33,27 | | 1.827.000 | 0,00 | 6,65 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3311. | 6.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 25.000.000 | | 7.608.000 | | 5.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 18 | | 18 | | 18 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3312. | 6.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | 30.000.000 | | - | | 6.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 1 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3313. | 6.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 24.726.450.000 | | 378.757.712 | | 846.600.560 | | 4.656.000 | 0,00 | 0,55 | | 4.656.000 | 0,00 | 0,02 | | |
| | | Terlaksananya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3314. | 6.01.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3315. | 6.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 460.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 89 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3316. | 6.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | 426.450.000 | | - | | 26.520.000 | | 4.656.000 | 0,00 | 17,56 | | 4.656.000 | 0,00 | 1,09 | | |
| | | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 1 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3317. | 6.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 8.120.000.000 | | - | | 119.882.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 100 | | 0 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Terpenuhinya APIP yang bersertifikasi dan Mengikuti Pelatihan JP Minimal 120 Jam/Tahun | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3318. | 6.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 7.615.000.000 | | 376.857.712 | | 615.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 89 | | 60 | | 61 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3319. | 6.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 8.085.000.000 | | 1.900.000 | | 85.198.560 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 89 | | 60 | | 60 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3320. | 6.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 4.627.868.375 | | 467.712.440 | | 496.632.375 | | 19.805.900 | 1,04 | 3,99 | | 19.805.900 | 1,04 | 0,43 | | |
| | | Terlaksananya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3321. | 6.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 55.640.000 | | 16.202.100 | | 11.128.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 10 | | 10 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3322. | 6.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 126.525.000 | | 25.306.850 | | 25.305.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3323. | 6.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 647.704.000 | | 164.998.341 | | 187.704.000 | | 16.861.400 | 0,00 | 8,98 | | 16.861.400 | 0,00 | 2,60 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Meningkatnya Kepuasan Internal | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3324. | 6.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 2.690.109.375 | | 192.202.888 | | 190.109.375 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 30 | | 30 | | 30 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3325. | 6.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 304.000.000 | | 4.216.000 | | 4.000.000 | | 470.500 | 0,00 | 11,76 | | 470.500 | 0,00 | 0,15 | | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 25 | | 25 | | 25 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3326. | 6.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 156.890.000 | | 35.984.161 | | 31.386.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 35 | | 35 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 3327. | 6.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 202.000.000 | | - | | 2.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 12 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3328. | 6.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 445.000.000 | | 28.802.100 | | 45.000.000 | | 2.474.000 | 8,33 | 5,50 | | 2.474.000 | 8,33 | 0,56 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 1 | | 8,33 | | 1 | | 8,33 | | | |
| 3329. | 6.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 9.240.000.000 | | 195.679.690 | | 40.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3330. | 6.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 4.000.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3331. | 6.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 800.000.000 | | 154.599.690 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 5 | | 22 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3332. | 6.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 4.000.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3333. | 6.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 440.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3334. | 6.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | 41.080.000 | | 40.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3335. | 6.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.549.520.000 | | 267.361.646 | | 273.348.170 | | 3.000.043 | 0,00 | 1,10 | | 3.000.043 | 0,00 | 0,19 | | |
| | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3336. | 6.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 201.020.000 | | 1.006.000 | | 1.020.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 12 | | 1.800 | | 1800 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3337. | 6.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 172.500.000 | | 41.813.190 | | 37.128.170 | | 3.000.043 | 0,00 | 8,08 | | 3.000.043 | 0,00 | 1,74 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3338. | 6.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 1.176.000.000 | | 224.542.456 | | 235.200.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3339. | 6.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.337.680.400 | | 314.873.242 | | 312.701.440 | | 25.220.946 | 52,88 | 8,07 | | 25.220.946 | 27,88 | 0,76 | | |
| | | Terpenuhinya Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3340. | 6.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 1.567.850.000 | | 161.866.678 | | 217.850.000 | | 24.815.696 | 11,54 | 11,39 | | 24.815.696 | 11,54 | 1,58 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 26 | | 26 | | 26 | | 3 | | 11,54 | | 3 | | 11,54 | | | |
| 3341. | 6.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | 102.822.000 | | - | | 9.531.440 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 1 | | 0 | | 20 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3342. | 6.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 1.028.720.000 | | 145.170.200 | | 78.720.000 | | 70.250 | 100,00 | 0,09 | | 70.250 | 100,00 | 0,01 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 100,00 | | | |
| 3343. | 6.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 638.288.400 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 3344. | 6.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | 7.836.364 | | 6.600.000 | | 335.000 | 100,00 | 5,08 | | 335.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 0,00 | | | |
| **3345.** | **6.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | | | **8.880.011.684** | | **1.710.346.325** | | **1.744.032.125** | | **228.772.000** | **18,21** | **13,12** | | **228.772.000** | **18,21** | **2,58** | INSPEKTORAT | |
| | | Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran atau proses dan kewenangan | Persentase Penyelesaian TLHP Internal (%) | 86 | | 72,71 | | 85,5 | | 72,71 | | 85,04 | | 72,71 | | 84,55 | | | |
| | | | Persentase Penyelesaian TLHP Eksternal (%) | 86 | | 85,09 | | 85,5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai) | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100,00 | | 100 | | 100,00 | | | |
| 3346. | 6.01.02.2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | 7.460.225.744 | | 1.488.781.325 | | 1.539.032.225 | | 203.872.000 | 21,27 | 13,25 | | 203.872.000 | 21,27 | 2,73 | | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Internal | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3347. | 6.01.02.2.01.0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | 805.000.000 | | 63.000.000 | | 300.000.000 | | 6.300.000 | 25,00 | 2,10 | | 6.300.000 | 25,00 | 0,78 | | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan) | 4 | | 4 | | 4 | | 1 | | 25,00 | | 1 | | 25,00 | | | |
| 3348. | 6.01.02.2.01.0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | 1.750.000.000 | | 527.550.000 | | 300.000.000 | | 35.850.000 | 15,00 | 11,95 | | 35.850.000 | 15,00 | 2,05 | | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan) | 20 | | 20 | | 20 | | 3 | | 15,00 | | 3 | | 15,00 | | | |
| 3349. | 6.01.02.2.01.0003 | Reviu Laporan Kinerja | | | 1.508.804.144 | | 379.350.000 | | 334.114.225 | | 43.950.000 | 13,91 | 13,15 | | 43.950.000 | 13,91 | 2,91 | | |
| | | Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan) | 115 | | 115 | | 115 | | 16 | | 13,91 | | 16 | | 13,91 | | | |
| 3350. | 6.01.02.2.01.0004 | Reviu Laporan Keuangan | | | 104.080.600 | | 21.600.000 | | 19.950.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3351. | 6.01.02.2.01.0005 | Pengawasan Desa | | | 1.400.000.000 | | 204.450.000 | | 300.000.000 | | 66.900.000 | 45,00 | 22,30 | | 66.900.000 | 45,00 | 4,78 | | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Desa | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan) | 20 | | 20 | | 20 | | 9 | | 45,00 | | 9 | | 45,00 | | | |
| 3352. | 6.01.02.2.01.0006 | Kerja Sama Pengawasan Internal | | | 1.450.000.000 | | 89.922.425 | | 200.000.000 | | 19.050.000 | 25,00 | 9,53 | | 19.050.000 | 25,00 | 1,31 | | |
| | | Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan) | 4 | | 4 | | 4 | | 1 | | 25,00 | | 1 | | 25,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Penyelesaian TLHP Internal dan Eksternal | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3353. | 6.01.02.2.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | | 442.341.000 | | 202.908.900 | | 84.968.000 | | 31.822.000 | 25,00 | 37,45 | | 31.822.000 | 25,00 | 7,19 | | |
| | | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen ) | 4 | | 4 | | 4 | | 1 | | 25,00 | | 1 | | 25,00 | | | |
| 3354. | 6.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | 1.419.785.940 | | 221.565.000 | | 204.999.900 | | 24.900.000 | 7,50 | 12,15 | | 24.900.000 | 7,50 | 1,75 | | |
| | | Terlaksananya tindak lanjut pengaduan masyarakat | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3355. | 6.01.02.2.02.0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | 910.706.500 | | 221.565.000 | | 174.999.900 | | 24.900.000 | 15,00 | 14,23 | | 24.900.000 | 15,00 | 2,73 | | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan) | 40 | | 40 | | 40 | | 6 | | 15,00 | | 6 | | 15,00 | | | |
| | | Terlaksananya penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3356. | 6.01.02.2.02.0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | | | 509.079.440 | | - | | 30.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan) | 4 | | 0 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3357.** | **6.01.03** | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | | | **2.315.800.000** | | **224.376.206** | | **445.844.500** | | **45.080.000** | **50,00** | **10,11** | | **45.080.000** | **50,00** | **1,95** | INSPEKTORAT | |
| | | Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi | Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level) | 4 | | 2 | | 3 | | 2 | | 66,67 | | 2 | | 50,00 | | | |
| | | | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level) | 4 | | 3 | | 3 | | 2 | | 66,67 | | 2 | | 50,00 | | | |
| 3358. | 6.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | | | 884.688.100 | | 73.950.000 | | 171.002.500 | | 3.680.000 | 50,00 | 2,15 | | 3.680.000 | 50,00 | 0,42 | | |
| | | Meningkatnya Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3359. | 6.01.03.2.01.0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | | | 780.605.500 | | 73.950.000 | | 151.002.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi) | 1 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Meningkatnya Level Kapabilitas APIP | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3360. | 6.01.03.2.01.0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | | | 104.082.600 | | - | | 20.000.000 | | 3.680.000 | 100,00 | 18,40 | | 3.680.000 | 100,00 | 3,54 | | |
| | | Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi) | 1 | | 0 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 100,00 | | | |
| 3361. | 6.01.03.2.02 | Pendampingan dan Asistensi | | | 1.431.111.900 | | 150.426.206 | | 274.842.000 | | 41.400.000 | 50,00 | 15,06 | | 41.400.000 | 50,00 | 2,89 | | |
| | | Meningkatnya Nilai MCP KPK | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 3362. | 6.01.03.2.02.0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | 260.201.400 | | 79.926.206 | | 50.122.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3363. | 6.01.03.2.02.0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | | | 650.505.000 | | 51.150.000 | | 124.950.000 | | 30.900.000 | 100,00 | 24,73 | | 30.900.000 | 100,00 | 4,75 | | |
| | | Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah) | 43 | | 43 | | 43 | | 43 | | 100,00 | | 43 | | 100,00 | | | |
| 3364. | 6.01.03.2.02.0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | 390.305.500 | | 15.300.000 | | 74.870.000 | | 10.500.000 | 100,00 | 14,02 | | 10.500.000 | 100,00 | 2,69 | | |
| | | Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah) | 43 | | 43 | | 43 | | 43 | | 100,00 | | 43 | | 100,00 | | | |
| | | Meningkatnya Nilai hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3365. | 6.01.03.2.02.0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | | 130.100.000 | | 4.050.000 | | 24.900.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | **177.239.463.110** | | **21.155.727.979** | | **22.975.076.891** | | **4.542.835.214** | **9,22** | **19,77** | | **4.542.835.214** | **12,96** | **2,56** | | |
| **3366.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **6.402.968.855** | | **1.107.675.794** | | **1.337.925.668** | | **246.217.026** | **37,50** | **18,40** | | **246.217.026** | **9,77** | **3,85** | KECAMATAN GUNUANG OMEH | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 25 | | 25,00 | | 25 | | 25,00 | | | |
| 3367. | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 12.924.800 | | 1.342.000 | | - | | - | 50,00 | 0,00 | | - | 10,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Penyusunan Laporan OPD | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3368. | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 12.924.800 | | 1.342.000 | | - | | - | 50,00 | 0,00 | | - | 10,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 10 | | 2 | | 2 | | 1 | | 50,00 | | 1 | | 10,00 | | | |
| 3369. | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 5.314.461.555 | | 969.651.201 | | 1.227.016.268 | | 235.247.380 | 25,00 | 19,17 | | 235.247.380 | 25,00 | 4,43 | | |
| | | Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan laporan OPD | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 3370. | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 5.314.461.555 | | 969.651.201 | | 1.227.016.268 | | 235.247.380 | 25,00 | 19,17 | | 235.247.380 | 25,00 | 4,43 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 3371. | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 604.448.000 | | 50.884.684 | | 42.102.400 | | 3.422.500 | 0,00 | 8,13 | | 3.422.500 | 6,60 | 0,57 | | |
| | | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3372. | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 10.211.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 25,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | | 4 | | 0 | | 1 | | 0,00 | | 1 | | 25,00 | | | |
| 3373. | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 140.000.000 | | 11.355.584 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 8,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 25 | | 3 | | 0 | | 2 | | 0,00 | | 2 | | 8,00 | | | |
| 3374. | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 56.700.000 | | 10.412.000 | | 6.727.900 | | 1.887.500 | 0,00 | 28,05 | | 1.887.500 | 0,00 | 3,33 | | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 40 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3375. | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 19.862.000 | | 3.712.100 | | 2.309.500 | | 710.000 | 0,00 | 30,74 | | 710.000 | 0,00 | 3,57 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3376. | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 377.675.000 | | 25.405.000 | | 33.065.000 | | 825.000 | 0,00 | 2,50 | | 825.000 | 0,00 | 0,22 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 5 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3377. | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 105.684.500 | | 20.165.009 | | 3.277.000 | | 597.146 | 0,00 | 18,22 | | 597.146 | 5,00 | 0,57 | | |
| | | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3378. | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 25.000.000 | | 1.925.009 | | 2.574.000 | | 597.146 | 0,00 | 23,20 | | 597.146 | 5,00 | 2,39 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 0 | | 3 | | 0,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 3379. | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 80.684.500 | | 18.240.000 | | 703.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 5,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 0 | | 3 | | 0,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 3380. | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 365.450.000 | | 65.632.900 | | 65.530.000 | | 6.950.000 | 0,00 | 10,61 | | 6.950.000 | 14,72 | 1,90 | | |
| | | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3381. | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 342.450.000 | | 63.282.900 | | 64.350.000 | | 6.950.000 | 0,00 | 10,80 | | 6.950.000 | 4,44 | 2,03 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 45 | | 9 | | 0 | | 2 | | 0,00 | | 2 | | 4,44 | | | |
| 3382. | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 23.000.000 | | 2.350.000 | | 1.180.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 25,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 40 | | 10 | | 0 | | 10 | | 0,00 | | 10 | | 25,00 | | | |
| **3383.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **652.929.744** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN GUNUANG OMEH | |
| | | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); 2. SAKIP | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) | 85 | | 85 | | 81 | | 15 | | 18,52 | | 15 | | 17,65 | | | |
| | | | Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) (Nilai) | 68 | | 68 | | 66 | | 15 | | 22,73 | | 15 | | 22,06 | | | |
| 3384. | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 652.929.744 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3385. | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 652.929.744 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 36 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3386.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **562.082.200** | | **13.500.000** | | **1.125.000** | | **-** | **12,50** | **0,00** | | **-** | **1.250,00** | **0,00** | KECAMATAN GUNUANG OMEH | |
| | | Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari | Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari (Angka) | 78 | | 75 | | 76 | | 16 | | 21,05 | | 16 | | 20,51 | | | |
| 3387. | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | - | | - | | 1.125.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3388. | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | - | | - | | 1.125.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3389. | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 386.757.200 | | 13.500.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Rata-rata Nilai Swadaya Masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3390. | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | 36.657.200 | | 13.500.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3391. | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | 350.100.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3392. | 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | 175.325.000 | | - | | - | | - | 12,50 | 0,00 | | - | 2.500,00 | 0,00 | | |
| | | Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3393. | 7.01.03.2.06.0003 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | 87.000.000 | | - | | - | | - | 12,50 | 0,00 | | - | 5.000,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 5 | | 0 | | 2000 | | 250 | | 12,50 | | 250 | | 5.000,00 | | | |
| 3394. | 7.01.03.2.06.0008 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | | | 88.325.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3395.** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | **567.168.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN GUNUANG OMEH | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tingkat Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan | Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (Angka) | 77 | | 308 | | 0 | | 17 | | 0,00 | | 17 | | 22,08 | | | |
| 3396. | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 567.168.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Peningkatan Koordinasi Trantib | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3397. | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | 283.584.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3398. | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | 283.584.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3399.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | **620.248.000** | | **27.375.000** | | **31.000.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **11,11** | **0,00** | KECAMATAN GUNUANG OMEH | |
| | | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan (Angka) | 80 | | 80 | | 80 | | 15 | | 18,75 | | 15 | | 18,75 | | | |
| 3400. | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | 620.248.000 | | 27.375.000 | | 31.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 11,11 | 0,00 | | |
| | | Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan di Kecamatan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3401. | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | 242.624.000 | | - | | 14.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 10,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 400 | | 200 | | 0 | | 40 | | 0,00 | | 40 | | 10,00 | | | |
| 3402. | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | 242.624.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 10,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang) | 400 | | 160 | | 0 | | 40 | | 0,00 | | 40 | | 10,00 | | | |
| 3403. | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | 135.000.000 | | 27.375.000 | | 16.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 13,33 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 15 | | 3 | | 0 | | 2 | | 0,00 | | 2 | | 13,33 | | | |
| **3404.** | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | **707.944.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **25,00** | **0,00** | KECAMATAN GUNUANG OMEH | |
| | | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari (Angka) | 78 | | 78 | | 0 | | 18 | | 0,00 | | 18 | | 23,08 | | | |
| 3405. | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | 707.944.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 25,00 | 0,00 | | |
| | | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3406. | 7.01.06.2.01.0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | | | 88.493.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 25,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | | 3 | | 0,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 3407. | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | 88.493.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 25,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | | 3 | | 0,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 3408. | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | 88.493.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 25,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | | 3 | | 0,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 3409. | 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | 88.493.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 25,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | | 3 | | 0,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 3410. | 7.01.06.2.01.0007 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | | | 88.493.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 25,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | | 3 | | 0,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 3411. | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | 88.493.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 25,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | | 3 | | 0,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 3412. | 7.01.06.2.01.0010 | Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | | | 88.493.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 25,00 | 0,00 | | |
| | | Ditetapkannya Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | | 3 | | 0,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 3413. | 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | 88.493.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 25,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | | 3 | | 0,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| **3414.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **7.646.458.071** | | **1.412.240.516** | | **1.470.199.869** | | **308.120.219** | **0,00** | **20,96** | | **308.120.219** | **0,00** | **4,03** | KECAMATAN BUKIK BARISAN | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%) | 100 | | 97 | | 100 | | 30 | | 30,00 | | 30 | | 30,00 | | | |
| 3415. | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 79.884.000 | | 16.810.000 | | 5.915.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | dokumen | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3416. | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 12.314.000 | | 3.512.000 | | 1.634.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3417. | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 12.314.000 | | - | | 1.112.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3418. | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 12.314.000 | | 1.180.000 | | 449.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3419. | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 12.314.000 | | 1.970.000 | | 438.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3420. | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 12.314.000 | | 1.940.000 | | 1.130.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3421. | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 12.314.000 | | 8.208.000 | | 1.152.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3422. | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 6.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3423. | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 6.837.699.980 | | 1.301.892.091 | | 1.382.839.869 | | 308.120.219 | 0,00 | 22,28 | | 308.120.219 | 0,00 | 4,51 | | |
| | | dokumen | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3424. | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 6.771.535.980 | | 1.295.192.091 | | 1.382.109.869 | | 308.120.219 | 0,00 | 22,29 | | 308.120.219 | 0,00 | 4,55 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 12 | | 15 | | 15 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3425. | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 49.000.000 | | 6.700.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 1 | | 3 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3426. | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 12.664.000 | | - | | 730.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 1 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3427. | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 4.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3428. | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 49.000.000 | | 6.620.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | dokumen | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3429. | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 49.000.000 | | 6.620.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 1 | | 2 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3430. | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | dokumen | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3431. | 7.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3432. | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 321.900.000 | | 15.394.100 | | 5.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | dokumen | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3433. | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 8.900.000 | | 4.340.100 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3434. | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 12.000.000 | | 3.180.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3435. | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 301.000.000 | | 7.874.000 | | 5.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3436. | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 6.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | dokumen | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3437. | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 6.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3438. | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 13.750.000 | | 2.045.825 | | 3.135.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | dokumen | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3439. | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 13.750.000 | | 2.045.825 | | 3.135.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3440. | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 333.224.091 | | 69.478.500 | | 73.310.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | dokumen | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3441. | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 301.294.091 | | 68.748.500 | | 71.850.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 10 | | 3 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3442. | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 16.930.000 | | 730.000 | | 1.460.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 1 | | 4 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3443. | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 15.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3444.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **644.591.815** | | **36.000.000** | | **29.044.000** | | **-** | **25,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN BUKIK BARISAN | |
| | | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); 2. SAKIP | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) | 93 | | 90,1 | | 91 | | 25 | | 27,47 | | 25 | | 26,88 | | | |
| | | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 68 | | 63 | | 65 | | 15 | | 23,08 | | 15 | | 22,06 | | | |
| 3445. | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | - | | - | | 29.044.000 | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3446. | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | - | | - | | 29.044.000 | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 0 | | 0 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 0,00 | | | |
| 3447. | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 644.591.815 | | 36.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | dokumen | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3448. | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 644.591.815 | | 36.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 1 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3449.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **697.647.800** | | **7.736.000** | | **2.261.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN BUKIK BARISAN | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari | Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari (Angka) | 70 | | 62 | | 60 | | 15 | | 25,00 | | 15 | | 21,43 | | | |
| 3450. | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | 672.647.800 | | 7.736.000 | | 1.011.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | dokumen | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3451. | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | 39.330.900 | | 2.216.000 | | 646.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 1 | | 5 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3452. | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 633.316.900 | | 5.520.000 | | 365.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 1 | | 3 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3453. | 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | 25.000.000 | | - | | 1.250.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | dokumen | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3454. | 7.01.03.2.06.0001 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | | | 25.000.000 | | - | | 1.250.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga) | 1 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3455.** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | **400.000.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN BUKIK BARISAN | |
| | | Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan | Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (Angka) | 90 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3456. | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 400.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | dokumen | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3457. | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | 200.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 90 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3458. | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | 200.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 90 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3459.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | **538.000.000** | | **27.500.000** | | **24.000.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN BUKIK BARISAN | |
| | | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan (Angka) | 70 | | 63 | | 60 | | 15 | | 25,00 | | 15 | | 21,43 | | | |
| 3460. | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | 538.000.000 | | 27.500.000 | | 24.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | dokumen | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3461. | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | 538.000.000 | | 27.500.000 | | 24.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 12 | | 3 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3462.** | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | **510.000.000** | | **5.000.000** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN BUKIK BARISAN | |
| | | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari (Angka) | 75 | | 65 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3463. | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | 510.000.000 | | 5.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | dokumen | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3464. | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | 510.000.000 | | 5.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan) | 75 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3465.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **10.273.567.589** | | **1.631.303.755** | | **1.717.977.438** | | **365.376.254** | **5,80** | **21,27** | | **365.376.254** | **4,81** | **3,56** | KECAMATAN SULIKI | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100,00 | | 100 | | 100,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 3466. | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 320.717.275 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | dokumen/laporan | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3467. | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 51.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3468. | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 43.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3469. | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3470. | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 51.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3471. | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 52.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3472. | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 73.717.275 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3473. | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 5.968.150.314 | | 1.482.568.893 | | 1.637.591.438 | | 354.351.769 | 0,00 | 21,64 | | 354.351.769 | 0,00 | 5,94 | | |
| | | dokumen/laporan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3474. | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 5.786.445.992 | | 1.482.568.893 | | 1.637.591.438 | | 354.351.769 | 0,00 | 21,64 | | 354.351.769 | 0,00 | 6,12 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 70 | | 15 | | 15 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3475. | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 54.704.323 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 70 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3476. | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 52.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3477. | 7.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | 75.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3478. | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 68.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Dokumen | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3479. | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 68.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3480. | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 145.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Dokumen | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 3481. | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 79.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3482. | 7.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | 66.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3483. | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.064.000.000 | | 53.129.500 | | 19.238.400 | | 936.000 | 0,00 | 4,87 | | 936.000 | 10,83 | 0,09 | | |
| | | dokumen/laporan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3484. | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 90.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3485. | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 540.000.000 | | 24.500.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 60 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3486. | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 200.000.000 | | 7.100.000 | | 5.502.400 | | 500.000 | 0,00 | 9,09 | | 500.000 | 5,00 | 0,25 | | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 60 | | 12 | | 0 | | 3 | | 0,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 3487. | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 98.000.000 | | 2.074.500 | | 836.000 | | 436.000 | 0,00 | 52,15 | | 436.000 | 60,00 | 0,44 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 5 | | 12 | | 0 | | 3 | | 0,00 | | 3 | | 60,00 | | | |
| 3488. | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 60.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3489. | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 76.000.000 | | 19.455.000 | | 12.900.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 60 | | 150 | | 1000 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3490. | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 939.700.000 | | 36.272.862 | | 3.832.600 | | 419.485 | 12,50 | 10,95 | | 419.485 | 1,25 | 0,04 | | |
| | | Dokumen | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3491. | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 85.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3492. | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 75.600.000 | | 2.072.862 | | 3.000.000 | | 419.485 | 25,00 | 13,98 | | 419.485 | 5,00 | 0,55 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 3493. | 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 279.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3494. | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 500.100.000 | | 34.200.000 | | 832.600 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3495. | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.768.000.000 | | 59.332.500 | | 57.315.000 | | 9.669.000 | 7,14 | 16,87 | | 9.669.000 | 15,00 | 0,55 | | |
| | | Dokumen | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3496. | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 495.000.000 | | 57.932.500 | | 57.315.000 | | 9.669.000 | 21,43 | 16,87 | | 9.669.000 | 60,00 | 1,95 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 5 | | 44 | | 14 | | 3 | | 21,43 | | 3 | | 60,00 | | | |
| 3497. | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 411.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 3498. | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 181.000.000 | | 1.400.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 12 | | 5 | | 20 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3499. | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 681.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3500.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **832.000.000** | | **-** | | **30.174.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN SULIKI | |
| | | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); 2. SAKIP | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) | 95 | | 0 | | 66 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 68 | | 0 | | 83 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3501. | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 524.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Dokumen | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3502. | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | 286.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3503. | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 238.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3504. | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 308.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Dokumen | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3505. | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 308.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3506. | 7.01.02.2.03 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | | | - | | - | | 30.174.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3507. | 7.01.02.2.03.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | | | - | | - | | 30.174.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3508.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **886.500.000** | | **1.610.000** | | **4.540.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN SULIKI | |
| | | Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari | Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari (Angka) | 67 | | 0 | | 65 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3509. | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | 646.500.000 | | 890.000 | | 3.490.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Dokumen | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3510. | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | 53.000.000 | | - | | 2.080.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 1 | | 0 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3511. | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 593.500.000 | | 890.000 | | 1.410.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | 2 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3512. | 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | 240.000.000 | | 720.000 | | 1.050.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Dokumen | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3513. | 7.01.03.2.06.0005 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | | | 120.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3514. | 7.01.03.2.06.0006 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3515. | 7.01.03.2.06.0007 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | 22.000.000 | | 720.000 | | 1.050.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 12 | | 1 | | 30 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3516. | 7.01.03.2.06.0010 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | | | 78.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3517.** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | **655.000.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN SULIKI | |
| | | Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan | Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (Angka) | 67 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3518. | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 320.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Dokumen | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3519. | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | 320.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3520. | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | 335.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Dokumen | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3521. | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | 335.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3522.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | **850.800.000** | | **38.075.000** | | **9.360.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN SULIKI | |
| | | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan (Angka) | 67 | | 67 | | 65 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3523. | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | 850.800.000 | | 38.075.000 | | 9.360.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Dokumen | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3524. | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | 313.200.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3525. | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | 413.000.000 | | 5.825.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang) | 12 | | 100 | | 200 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3526. | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | 124.600.000 | | 32.250.000 | | 9.360.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3527.** | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | **1.279.500.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN SULIKI | |
| | | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari (Angka) | 67 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3528. | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | 1.279.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Dokumen | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3529. | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | 100.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3530. | 7.01.06.2.01.0004 | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | | | 1.074.778.682 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3531. | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | 104.721.318 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3532.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **10.205.988.664** | | **1.695.294.766** | | **1.692.060.854** | | **417.400.241** | **0,00** | **24,67** | | **417.400.241** | **0,00** | **4,09** | KECAMATAN GUGUAK | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3533. | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 43.378.311 | | 1.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Dokumen /Laporan | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 3534. | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 8.216.651 | | 1.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 3 | | 3 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3535. | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 19.001.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3536. | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 16.160.660 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 2 | | 4 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3537. | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 6.465.884.210 | | 1.554.105.271 | | 1.607.530.854 | | 407.670.795 | 0,00 | 25,36 | | 407.670.795 | 0,00 | 6,30 | | |
| | | Dokumen/persentase | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3538. | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 6.388.884.210 | | 1.554.105.271 | | 1.607.530.854 | | 407.670.795 | 0,00 | 25,36 | | 407.670.795 | 0,00 | 6,38 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 100 | | 14 | | 14 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3539. | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 37.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 1 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3540. | 7.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | 40.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3541. | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 105.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | dokumen | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3542. | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 105.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 1 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3543. | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 30.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | dokumen | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3544. | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 30.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 24 | | 0 | | 14 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 3545. | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 711.490.500 | | 38.265.500 | | 19.220.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | bulan/buah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3546. | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 62.000.000 | | 2.000.000 | | 2.133.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 50 | | 4 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3547. | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 82.400.000 | | 2.400.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3548. | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 126.996.000 | | 6.996.000 | | 7.423.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3549. | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 89.724.500 | | 5.724.500 | | 3.439.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 12 | | 4 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3550. | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 80.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3551. | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 270.370.000 | | 21.145.000 | | 6.225.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | | 6 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3552. | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 810.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | dokumen | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3553. | 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 400.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 3 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 3554. | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 240.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3555. | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 170.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3556. | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 289.355.343 | | 32.495.195 | | 8.080.000 | | 3.629.446 | 0,00 | 44,92 | | 3.629.446 | 0,00 | 1,25 | | |
| | | dokumen/bulan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3557. | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 6.600.000 | | 600.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 12 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3558. | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 57.755.343 | | 1.895.195 | | 2.080.000 | | 629.446 | 0,00 | 30,26 | | 629.446 | 0,00 | 1,09 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 12 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3559. | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 225.000.000 | | 30.000.000 | | 6.000.000 | | 3.000.000 | 0,00 | 50,00 | | 3.000.000 | 0,00 | 1,33 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 12 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3560. | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.750.880.300 | | 69.428.800 | | 57.230.000 | | 6.100.000 | 0,00 | 10,66 | | 6.100.000 | 0,00 | 0,35 | | |
| | | dokumen | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3561. | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 324.500.000 | | 64.778.800 | | 53.350.000 | | 6.100.000 | 0,00 | 11,43 | | 6.100.000 | 0,00 | 1,88 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 9 | | 10 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3562. | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 184.650.000 | | 4.650.000 | | 3.880.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 10 | | 10 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3563. | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 1.241.730.300 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3564.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **782.000.000** | | **1.355.000** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN GUGUAK | |
| | | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); 2. SAKIP | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) | 90 | | 90 | | 90 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 66 | | 89,8 | | 65 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3565. | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 88.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Nagari | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3566. | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | 84.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3567. | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 4.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 0 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3568. | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 119.000.000 | | 1.355.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | dokumen/laporan/bulan | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3569. | 7.01.02.2.02.0001 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | | | 35.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3570. | 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | 64.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3571. | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 20.000.000 | | 1.355.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 0 | | 1 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3572. | 7.01.02.2.03 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | | | 574.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | dokumen/laporan/bulan | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3573. | 7.01.02.2.03.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | | | 290.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3574. | 7.01.02.2.03.0002 | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta | | | 284.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum dengan Melibatkan Pihak Swasta | Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta (Unit) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3575.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **1.441.020.800** | | **6.499.500** | | **2.070.000** | | **1.590.000** | **0,00** | **76,81** | | **1.590.000** | **0,00** | **0,11** | KECAMATAN GUGUAK | |
| | | Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari | Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari (Angka) | 76 | | 66 | | 66 | | 100 | | 151,52 | | 100 | | 131,58 | | | |
| 3576. | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | 88.520.800 | | 2.100.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Nagari | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3577. | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | 56.020.800 | | 2.100.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 5 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3578. | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 32.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3579. | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | - | | - | | 2.070.000 | | 1.590.000 | 0,00 | 76,81 | | 1.590.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | dokumen/laporan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3580. | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | - | | - | | 2.070.000 | | 1.590.000 | 0,00 | 76,81 | | 1.590.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 65 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3581. | 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | 1.352.500.000 | | 4.399.500 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 3582. | 7.01.03.2.06.0001 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | | | 75.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga) | 50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3583. | 7.01.03.2.06.0006 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | 425.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga) | 80 | | 0 | | 20 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3584. | 7.01.03.2.06.0007 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | 200.200.514 | | 4.399.500 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 0 | | 25 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3585. | 7.01.03.2.06.0008 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | | | 180.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga) | 0 | | 0 | | 15 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3586. | 7.01.03.2.06.0009 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | | | 57.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga) | 50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3587. | 7.01.03.2.06.0011 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | | | 414.799.486 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3588.** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | **745.300.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN GUGUAK | |
| | | Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan | Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (Angka) | 70 | | 0 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3589. | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 687.300.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Nagari | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3590. | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | 342.300.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 5 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3591. | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | 345.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3592. | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | 58.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Nagari | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3593. | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | 58.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3594.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | **794.000.000** | | **26.000.000** | | **8.040.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN GUGUAK | |
| | | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan (Angka) | 90 | | 90 | | 90 | | 50 | | 55,56 | | 50 | | 55,56 | | | |
| 3595. | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | 794.000.000 | | 26.000.000 | | 8.040.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | peserta/bulan | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 3596. | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | 409.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang) | 30 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3597. | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | 385.000.000 | | 26.000.000 | | 8.040.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 12 | | 12 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3598.** | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | **1.046.100.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN GUGUAK | |
| | | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari (Angka) | 80 | | 0 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3599. | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | 1.046.100.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Nagari | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3600. | 7.01.06.2.01.0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | | | 248.015.857 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 5 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3601. | 7.01.06.2.01.0004 | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | | | 478.684.143 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3602. | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | 319.400.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3603.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **9.778.306.972** | | **1.285.326.991** | | **1.376.305.134** | | **335.471.901** | **0,00** | **24,37** | | **335.471.901** | **0,00** | **3,43** | KECAMATAN MUNGKA | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 24,37 | | 24,37 | | 24,37 | | 24,37 | | | |
| 3604. | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 324.777.274 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Dokumen | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3605. | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 52.096.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3606. | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 43.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 60 | | 4 | | 6 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3607. | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3608. | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 54.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3609. | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 52.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3610. | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 73.681.274 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3611. | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 5.117.855.398 | | 1.139.848.445 | | 1.290.990.424 | | 322.368.295 | 0,00 | 24,97 | | 322.368.295 | 0,00 | 6,30 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Dokumen | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3612. | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 4.933.173.276 | | 1.139.848.445 | | 1.290.990.424 | | 322.368.295 | 0,00 | 24,97 | | 322.368.295 | 0,00 | 6,53 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 14 | | 14 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3613. | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 57.682.122 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3614. | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 52.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3615. | 7.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | 75.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3616. | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 70.374.600 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Dokumen | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3617. | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 70.374.600 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3618. | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 151.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Dokumen | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3619. | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 85.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 5 | | 0 | | 15 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3620. | 7.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | 66.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3621. | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.070.949.700 | | 38.618.000 | | 13.614.710 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Dokumen | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3622. | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 81.422.000 | | 1.290.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 60 | | 20 | | 36 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3623. | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 548.568.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3624. | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 220.756.200 | | 14.265.000 | | 4.476.300 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 60 | | 24 | | 56 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3625. | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 101.473.500 | | 4.958.000 | | 2.353.410 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 60 | | 24 | | 36 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3626. | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 60.250.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | | 0 | | 48 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3627. | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 58.480.000 | | 18.105.000 | | 6.785.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 60 | | 64 | | 60 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3628. | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 372.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Dokumen | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3629. | 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 225.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3630. | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 47.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3631. | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 100.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3632. | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 973.500.000 | | 39.256.394 | | 11.300.000 | | 2.013.606 | 0,00 | 17,82 | | 2.013.606 | 0,00 | 0,21 | | |
| | | Dokumen | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3633. | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 76.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 60 | | 0 | | 28 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3634. | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 93.000.000 | | 7.670.394 | | 11.300.000 | | 2.013.606 | 0,00 | 17,82 | | 2.013.606 | 0,00 | 2,17 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 24 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3635. | 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 279.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3636. | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 525.000.000 | | 31.586.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 64 | | 60 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3637. | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.697.350.000 | | 67.604.152 | | 60.400.000 | | 11.090.000 | 0,00 | 18,36 | | 11.090.000 | 0,00 | 0,65 | | |
| | | Dokumen | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 3638. | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 503.350.000 | | 67.604.152 | | 60.400.000 | | 11.090.000 | 0,00 | 18,36 | | 11.090.000 | 0,00 | 2,20 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 12 | | 11 | | 8 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3639. | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 411.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3640. | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 180.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 60 | | 0 | | 8 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3641. | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 603.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3642.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **864.000.000** | | **-** | | **8.040.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN MUNGKA | |
| | | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); 2. SAKIP | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) | 92 | | 85 | | 85 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 70 | | 50 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3643. | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 556.000.000 | | - | | 8.040.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Dokumen | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3644. | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | 313.000.000 | | - | | 8.040.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 12 | | 0 | | 24 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3645. | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 243.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 60 | | 0 | | 36 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3646. | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 308.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Dokumen | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3647. | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 308.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3648.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **888.885.000** | | **3.472.500** | | **2.306.000** | | **2.275.000** | **0,00** | **98,66** | | **2.275.000** | **0,00** | **0,26** | KECAMATAN MUNGKA | |
| | | Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari | Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari (Angka) | 75 | | 72 | | 73 | | 98,66 | | 135,15 | | 98,66 | | 131,55 | | | |
| 3649. | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | 644.035.000 | | 3.472.500 | | 2.306.000 | | 2.275.000 | 0,00 | 98,66 | | 2.275.000 | 0,00 | 0,35 | | |
| | | Dokumen | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3650. | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | 51.035.000 | | 3.472.500 | | 2.306.000 | | 2.275.000 | 0,00 | 98,66 | | 2.275.000 | 0,00 | 4,46 | | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 12 | | 12 | | 54 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3651. | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 593.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 5 | | 0 | | 52 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3652. | 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | 244.850.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Dokumen | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3653. | 7.01.03.2.06.0005 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | | | 120.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga) | 9350 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3654. | 7.01.03.2.06.0006 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | 23.980.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga) | 9350 | | 0 | | 1658 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3655. | 7.01.03.2.06.0007 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | 22.870.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 9350 | | 0 | | 1685 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3656. | 7.01.03.2.06.0011 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | | | 78.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga) | 9350 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3657.** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | **646.900.000** | | **20.062.000** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN MUNGKA | |
| | | Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan | Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (Angka) | 75 | | 70 | | 73 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3658. | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 310.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Dokumen | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3659. | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | 310.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 12 | | 0 | | 60 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 3660. | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | 336.900.000 | | 20.062.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Dokumen | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3661. | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | 336.900.000 | | 20.062.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) | 300 | | 64 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3662.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | **823.800.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN MUNGKA | |
| | | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan (Angka) | 70 | | 0 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3663. | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | 823.800.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Dokumen | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3664. | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | 314.200.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 60 | | 0 | | 250 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 3665. | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | 413.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang) | 1250 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3666. | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | 96.600.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 260 | | 0 | | 24 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3667.** | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | **1.288.922.600** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN MUNGKA | |
| | | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari (Angka) | 75 | | 0 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3668. | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | 1.288.922.600 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Dokumen | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3669. | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | 78.808.477 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 300 | | 0 | | 24 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3670. | 7.01.06.2.01.0004 | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | | | 1.125.877.804 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan) | 300 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3671. | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | 84.236.319 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan) | 300 | | 0 | | 60 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3672.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **10.891.204.150** | | **1.427.058.812** | | **1.629.254.780** | | **357.500.448** | **3,07** | **21,94** | | **357.500.448** | **1,10** | **3,28** | KECAMATAN AKABILURU | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%) | 500 | | 100 | | 100 | | 25 | | 25,00 | | 25 | | 5,00 | | | |
| 3673. | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 166.378.000 | | 3.676.000 | | 2.951.000 | | - | 16,67 | 0,00 | | - | 4,29 | 0,00 | | |
| | | Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3674. | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 48.314.000 | | 2.562.000 | | 1.501.000 | | - | 16,67 | 0,00 | | - | 3,33 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 30 | | 7 | | 6 | | 1 | | 16,67 | | 1 | | 3,33 | | | |
| 3675. | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 5.700.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3676. | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 5.700.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3677. | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 5.700.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 20,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 3678. | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 5.700.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3679. | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 48.264.000 | | 1.114.000 | | 1.450.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 6,67 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 30 | | 6 | | 0 | | 2 | | 0,00 | | 2 | | 6,67 | | | |
| 3680. | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 47.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 3681. | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 7.185.224.150 | | 1.277.024.612 | | 1.520.832.780 | | 348.694.784 | 12,50 | 22,93 | | 348.694.784 | 0,83 | 4,85 | | |
| | | Persentase Tertib Administrasi Keuangan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3682. | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 7.078.008.150 | | 1.275.168.612 | | 1.520.832.780 | | 348.694.784 | 0,00 | 22,93 | | 348.694.784 | 0,00 | 4,93 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 15 | | 14 | | 15 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3683. | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 4.316.000 | | 1.856.000 | | - | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 5,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 3684. | 7.01.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | 49.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | 48 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3685. | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 5.700.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 5 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3686. | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 42.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 14 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3687. | 7.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | 5.700.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 5 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 3688. | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 137.060.000 | | 562.000 | | 1.045.000 | | - | 16,67 | 0,00 | | - | 2,22 | 0,00 | | |
| | | Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3689. | 7.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | 39.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3690. | 7.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 42.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3691. | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 56.060.000 | | 562.000 | | 1.045.000 | | - | 16,67 | 0,00 | | - | 6,67 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 15 | | 3 | | 6 | | 1 | | 16,67 | | 1 | | 6,67 | | | |
| 3692. | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 90.986.000 | | 1.130.000 | | 1.150.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3693. | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 36.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 5 | | 0 | | 15 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3694. | 7.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | 29.986.000 | | 1.130.000 | | 1.150.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 90 | | 14 | | 15 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3695. | 7.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | 25.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3696. | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 698.976.000 | | 35.859.000 | | 24.754.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3697. | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 13.780.000 | | 1.280.000 | | 975.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3698. | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 142.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3699. | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 128.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3700. | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 87.649.000 | | 6.564.000 | | 6.604.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3701. | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 53.500.000 | | 4.635.000 | | 4.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3702. | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 10.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3703. | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 263.547.000 | | 23.380.000 | | 12.675.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 15 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3704. | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.075.000.000 | | 19.116.100 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3705. | 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 140.000.000 | | 19.116.100 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 4 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3706. | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 290.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 4 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3707. | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 345.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 22 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3708. | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 150.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3709. | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 150.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3710. | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 209.350.000 | | 23.582.000 | | 9.262.000 | | 805.664 | 0,00 | 8,70 | | 805.664 | 0,00 | 0,38 | | |
| | | Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3711. | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 9.750.000 | | 500.000 | | 500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3712. | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 40.600.000 | | 5.082.000 | | 6.762.000 | | 805.664 | 0,00 | 11,91 | | 805.664 | 0,00 | 1,98 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3713. | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 159.000.000 | | 18.000.000 | | 2.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3714. | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.328.230.000 | | 66.109.100 | | 69.260.000 | | 8.000.000 | 0,00 | 11,55 | | 8.000.000 | 0,00 | 0,60 | | |
| | | Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3715. | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 392.750.000 | | 62.659.100 | | 67.750.000 | | 8.000.000 | 0,00 | 11,81 | | 8.000.000 | 0,00 | 2,04 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 45 | | 8 | | 9 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3716. | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 85.680.000 | | 3.450.000 | | 1.510.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 75 | | 15 | | 15 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3717. | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 669.800.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3718. | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 180.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3719.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **479.524.000** | | **930.000** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN AKABILURU | |
| | | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); 2. SAKIP | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 361,5 | | 71,89 | | 72,10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) | 449 | | 89,37 | | 89,60 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3720. | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 26.564.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3721. | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 26.564.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3722. | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 26.960.000 | | 930.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Laporan Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3723. | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 26.960.000 | | 930.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3724. | 7.01.02.2.03 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | | | 426.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Persentase Dokumen Koordinasi dan Pemeliharaan Prasarana Pelayanan Umum yang Melibatkan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Pihak Swasta di Wilayah Kecamatan | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3725. | 7.01.02.2.03.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | | | 426.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3726.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **583.780.000** | | **16.502.000** | | **5.150.000** | | **2.800.000** | **25,00** | **54,37** | | **2.800.000** | **20,00** | **0,48** | KECAMATAN AKABILURU | |
| | | Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari | Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari (Angka) | 300 | | 87,5 | | 50 | | 10 | | 20,00 | | 10 | | 3,33 | | | |
| 3727. | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | 77.935.000 | | 3.030.000 | | 3.100.000 | | 2.800.000 | 50,00 | 90,32 | | 2.800.000 | 70,00 | 3,59 | | |
| | | Tingkat Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3728. | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | 48.640.000 | | 700.000 | | 3.100.000 | | 2.800.000 | 100,00 | 90,32 | | 2.800.000 | 140,00 | 5,76 | | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 5 | | 1 | | 7 | | 7 | | 100,00 | | 7 | | 140,00 | | | |
| 3729. | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 29.295.000 | | 2.330.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 28 | | 7 | | 7 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3730. | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | 140.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan yang Diberdayakan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3731. | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | | | 140.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan) | 28 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3732. | 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | 365.845.000 | | 13.472.000 | | 2.050.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tingkat Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3733. | 7.01.03.2.06.0003 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | 22.513.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 350 | | 0 | | 70 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3734. | 7.01.03.2.06.0005 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | | | 189.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga) | 560 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3735. | 7.01.03.2.06.0007 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | 14.332.000 | | 13.472.000 | | 2.050.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 350 | | 140 | | 70 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3736. | 7.01.03.2.06.0011 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | | | 140.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga) | 560 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3737.** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | **420.000.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN AKABILURU | |
| | | Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan | Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (Angka) | 250 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3738. | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 420.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tingkat Sinergitas Lintas Sektor dan Harmonisasi Hubungan Sosial Keagamaan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3739. | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | 205.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3740. | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | 215.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3741.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | **728.840.000** | | **34.850.000** | | **8.250.000** | | **6.000.000** | **0,00** | **72,73** | | **6.000.000** | **0,00** | **0,82** | KECAMATAN AKABILURU | |
| | | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan (Angka) | 300 | | 89,37 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3742. | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | 728.840.000 | | 34.850.000 | | 8.250.000 | | 6.000.000 | 0,00 | 72,73 | | 6.000.000 | 0,00 | 0,82 | | |
| | | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3743. | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | 526.660.000 | | 7.100.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang) | 500 | | 100 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3744. | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | 202.180.000 | | 27.750.000 | | 8.250.000 | | 6.000.000 | 0,00 | 72,73 | | 6.000.000 | 0,00 | 2,97 | | |
| | | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3745.** | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | **717.728.000** | | **2.560.000** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN AKABILURU | |
| | | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari (Angka) | 300 | | 87,5 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3746. | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | 717.728.000 | | 2.560.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3747. | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | 26.910.000 | | 930.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 35 | | 7 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3748. | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | 12.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 28 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3749. | 7.01.06.2.01.0004 | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | | | 175.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan) | 28 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3750. | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | 42.900.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen) | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3751. | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | 133.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 28 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3752. | 7.01.06.2.01.0010 | Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | | | 138.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Ditetapkannya Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen) | 28 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3753. | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 13.818.000 | | 1.630.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) | 14 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3754. | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | 176.100.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen) | 28 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3755.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **12.465.765.376** | | **2.124.985.434** | | **2.336.429.281** | | **531.603.521** | **0,00** | **22,75** | | **531.603.521** | **0,00** | **4,26** | KECAMATAN PAYAKUMBUH | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 25 | | 25,00 | | 25 | | 25,00 | | | |
| 3756. | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 39.080.000 | | 5.000.000 | | 2.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Penyusunan laporan OPD | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3757. | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 10.000.000 | | 2.500.000 | | 1.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 2 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3758. | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 4.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3759. | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 4.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3760. | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 3.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 4 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3761. | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 3.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3762. | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 12.080.000 | | 2.500.000 | | 1.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 20 | | 2 | | 6 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3763. | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 3.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3764. | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 9.935.525.976 | | 1.979.362.783 | | 2.152.442.381 | | 522.008.340 | 0,00 | 24,25 | | 522.008.340 | 0,00 | 5,25 | | |
| | | Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan laporan OPD | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3765. | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 9.881.100.276 | | 1.979.362.783 | | 2.152.442.381 | | 522.008.340 | 0,00 | 24,25 | | 522.008.340 | 0,00 | 5,28 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 60 | | 21 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3766. | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 27.175.700 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 3767. | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 11.650.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3768. | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 7.200.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3769. | 7.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | 8.400.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3770. | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 24.650.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Laporan asset semester dan akhir tahun | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3771. | 7.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | 12.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 4 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3772. | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 12.650.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 5 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3773. | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 108.700.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase pelaksanaan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur dan baju dinas ASN dan Non ASN | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3774. | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 47.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 119 | | 0 | | 22 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3775. | 7.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | 21.700.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 110 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3776. | 7.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 40.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 4 | | 0 | | 20 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3777. | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 748.712.400 | | 31.752.000 | | 12.746.300 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase pelaksanaan Administrasi umum | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3778. | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 32.822.000 | | 1.428.000 | | 6.599.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | | 5 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3779. | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 60.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3780. | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 48.750.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 29 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3781. | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 76.016.800 | | 11.728.000 | | 4.551.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 60 | | 3 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3782. | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 13.498.600 | | 2.451.000 | | 546.300 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 48 | | 3 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3783. | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 11.700.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 48 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3784. | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 54.850.000 | | 5.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 60 | | 3 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3785. | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 451.075.000 | | 11.145.000 | | 1.050.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 60 | | 3 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3786. | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 569.563.000 | | - | | 10.437.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase pelaksanaan Administrasi umum | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3787. | 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 85.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 4 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3788. | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 283.000.000 | | - | | 10.437.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 17 | | 0 | | 7 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3789. | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 88.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 8 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3790. | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 113.063.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 4 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3791. | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 345.874.000 | | 42.135.451 | | 50.033.600 | | 795.181 | 0,00 | 1,59 | | 795.181 | 0,00 | 0,23 | | |
| | | Persentase pelaksanaan Administrasi umum | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3792. | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 9.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 900 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3793. | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 51.500.000 | | 3.615.451 | | 6.662.000 | | 795.181 | 0,00 | 11,94 | | 795.181 | 0,00 | 1,54 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 3 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3794. | 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 80.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 48 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3795. | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 205.374.000 | | 38.520.000 | | 43.371.600 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 3 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3796. | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 693.660.000 | | 66.735.200 | | 108.770.000 | | 8.800.000 | 0,00 | 8,09 | | 8.800.000 | 0,00 | 1,27 | | |
| | | Persentase pelaksanaan Administrasi umum | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3797. | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 338.750.000 | | 66.735.200 | | 67.750.000 | | 8.800.000 | 0,00 | 12,99 | | 8.800.000 | 0,00 | 2,60 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 45 | | 3 | | 9 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3798. | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 25.910.000 | | - | | 1.420.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 20 | | 0 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3799. | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 329.000.000 | | - | | 39.600.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 4 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3800.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **475.506.200** | | **5.270.000** | | **1.098.900** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN PAYAKUMBUH | |
| | | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); 2. SAKIP | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) | 84 | | 86 | | 81 | | 20 | | 24,69 | | 20 | | 23,81 | | | |
| | | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 71 | | 73 | | 70 | | 15 | | 21,43 | | 15 | | 21,13 | | | |
| 3801. | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 253.500.000 | | 3.570.000 | | 700.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | - | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3802. | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | 253.500.000 | | 3.570.000 | | 700.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 35 | | 4 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3803. | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 222.006.200 | | 1.700.000 | | 398.900 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | - | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3804. | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 222.006.200 | | 1.700.000 | | 398.900 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 60 | | 3 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3805.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **905.748.500** | | **5.755.000** | | **2.483.500** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN PAYAKUMBUH | |
| | | Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari | Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari (Angka) | 83 | | 90 | | 81 | | 20 | | 24,69 | | 20 | | 24,10 | | | |
| 3806. | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | 448.248.500 | | 2.100.000 | | 1.783.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | - | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3807. | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | 57.250.000 | | 2.100.000 | | 1.400.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 400 | | 0 | | 7 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3808. | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 390.998.500 | | - | | 383.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 400 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3809. | 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | 457.500.000 | | 3.655.000 | | 700.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | - | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3810. | 7.01.03.2.06.0006 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | 200.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga) | 28 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3811. | 7.01.03.2.06.0007 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | 257.500.000 | | 3.655.000 | | 700.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 400 | | 50 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3812.** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | **644.900.000** | | **-** | | **350.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN PAYAKUMBUH | |
| | | Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan | Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (Angka) | 63 | | 65 | | 61 | | 15 | | 24,59 | | 15 | | 23,81 | | | |
| 3813. | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 354.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | - | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3814. | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | 202.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 35 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3815. | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | 152.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 28 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3816. | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | 290.900.000 | | - | | 350.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | - | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3817. | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | 290.900.000 | | - | | 350.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) | 28 | | 0 | | 7 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3818.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | **842.580.000** | | **28.250.000** | | **8.040.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN PAYAKUMBUH | |
| | | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan (Angka) | 67 | | 65 | | 65 | | 15 | | 23,08 | | 15 | | 22,39 | | | |
| 3819. | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | 842.580.000 | | 28.250.000 | | 8.040.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | - | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3820. | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | 230.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang) | 35 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3821. | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | 268.680.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang) | 28 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3822. | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | 343.900.000 | | 28.250.000 | | 8.040.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 35 | | 3 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3823.** | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | **1.281.501.700** | | **1.928.000** | | **386.700** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN PAYAKUMBUH | |
| | | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari (Angka) | 67 | | 65 | | 65 | | 15 | | 23,08 | | 15 | | 22,39 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 3824. | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | 1.281.501.700 | | 1.928.000 | | 386.700 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | - | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3825. | 7.01.06.2.01.0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | | | 203.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 28 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3826. | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | 105.001.700 | | 1.928.000 | | 386.700 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 35 | | 7 | | 7 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3827. | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | 135.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 28 | | 0 | | 7 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3828. | 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | 206.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen) | 21 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3829. | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | 105.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen) | 28 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 3830. | 7.01.06.2.01.0007 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | | | 119.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen) | 28 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3831. | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | 313.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 28 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3832. | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | 94.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan) | 28 | | 0 | | 7 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3833.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **10.285.341.243** | | **1.768.670.402** | | **1.884.599.231** | | **431.422.677** | **10,12** | **22,89** | | **431.422.677** | **16,52** | **4,19** | KECAMATAN LUAK | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%) | 500 | | 100 | | 100 | | 33 | | 33,00 | | 33 | | 6,60 | | | |
| 3834. | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 34.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Dokumen | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3835. | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 10.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3836. | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 8.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3837. | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 8.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3838. | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 8.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3839. | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 7.884.794.818 | | 1.646.995.237 | | 1.800.900.331 | | 419.858.927 | 28,57 | 23,31 | | 419.858.927 | 7,14 | 5,32 | | |
| | | Bulan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3840. | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 7.860.794.818 | | 1.646.995.237 | | 1.800.900.331 | | 419.858.927 | 28,57 | 23,31 | | 419.858.927 | 28,57 | 5,34 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 224 | | 15 | | 224 | | 64 | | 28,57 | | 64 | | 28,57 | | | |
| 3841. | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 8.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3842. | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 8.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3843. | 7.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | 8.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3844. | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 40.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Orang | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3845. | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 40.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 80 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3846. | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 269.510.000 | | 34.182.740 | | 10.418.100 | | 1.137.100 | 6,25 | 10,91 | | 1.137.100 | 50,00 | 0,42 | | |
| | | Bulan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3847. | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 12.422.000 | | 1.117.840 | | 462.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 3 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3848. | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 60.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3849. | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 75.000.000 | | 1.500.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 4 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3850. | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 61.978.000 | | 12.614.000 | | 4.841.100 | | 1.137.100 | 25,00 | 23,49 | | 1.137.100 | 300,00 | 1,83 | | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 300,00 | | | |
| 3851. | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 11.500.000 | | 2.550.900 | | 450.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 5 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3852. | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 48.610.000 | | 16.400.000 | | 4.665.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3853. | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.023.950.157 | | 12.100.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Unit | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3854. | 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 297.313.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 9 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3855. | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 138.468.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 14 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3856. | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 142.208.000 | | 12.100.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 9 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3857. | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 445.961.157 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3858. | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 340.520.000 | | 15.251.842 | | 13.180.800 | | 1.958.662 | 12,50 | 14,86 | | 1.958.662 | 12,50 | 0,58 | | |
| | | Bulan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3859. | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 80.320.000 | | 11.811.842 | | 12.764.000 | | 1.958.662 | 25,00 | 15,35 | | 1.958.662 | 25,00 | 2,44 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 3860. | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 260.200.000 | | 3.440.000 | | 416.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 15 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3861. | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 692.566.268 | | 60.140.583 | | 60.100.000 | | 8.467.988 | 21,43 | 14,09 | | 8.467.988 | 14,29 | 1,22 | | |
| | | Unit | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3862. | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 313.000.000 | | 58.780.583 | | 60.100.000 | | 8.467.988 | 42,86 | 14,09 | | 8.467.988 | 42,86 | 2,71 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 7 | | 7 | | 7 | | 3 | | 42,86 | | 3 | | 42,86 | | | |
| 3863. | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 12.745.000 | | 1.360.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 40 | | 5 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3864. | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 366.821.268 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3865.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **599.118.500** | | **40.188.000** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN LUAK | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); 2. SAKIP | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) | 90 | | 89,43 | | 85 | | 80 | | 94,12 | | 80 | | 88,89 | | | |
| | | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 69 | | 64,99 | | 65 | | 60 | | 92,31 | | 60 | | 86,96 | | | |
| 3866. | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 40.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Dokumen | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3867. | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 40.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3868. | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 75.118.500 | | 40.188.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Dokumen | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3869. | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 75.118.500 | | 40.188.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3870. | 7.01.02.2.03 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | | | 484.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Laporan | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3871. | 7.01.02.2.03.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | | | 484.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen) | 48 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3872.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **456.865.000** | | **-** | | **2.625.000** | | **2.625.000** | **300,00** | **100,00** | | **2.625.000** | **16,67** | **0,57** | KECAMATAN LUAK | |
| | | Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari | Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari (Angka) | 90 | | 85 | | 85 | | 85 | | 100,00 | | 85 | | 94,44 | | | |
| 3873. | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | 9.865.000 | | - | | 2.625.000 | | 2.625.000 | 600,00 | 100,00 | | 2.625.000 | 50,00 | 26,61 | | |
| | | Dokumen | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 3874. | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | 5.865.000 | | - | | 2.625.000 | | 2.625.000 | 600,00 | 100,00 | | 2.625.000 | 100,00 | 44,76 | | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 24 | | 0 | | 4 | | 24 | | 600,00 | | 24 | | 100,00 | | | |
| 3875. | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 4.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3876. | 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | 447.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Dokumen | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3877. | 7.01.03.2.06.0003 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | 9.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 200 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3878. | 7.01.03.2.06.0005 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | | | 276.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga) | 48 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3879. | 7.01.03.2.06.0006 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | 14.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga) | 60 | | 0 | | 20 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 3880. | 7.01.03.2.06.0011 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | | | 148.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga) | 160 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3881.** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | **449.000.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN LUAK | |
| | | Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan | Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (Angka) | 352 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3882. | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 16.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Dokumen | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3883. | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | 16.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 48 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3884. | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | 433.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Dokumen | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3885. | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | 433.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) | 48 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3886.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | **562.255.000** | | **32.380.000** | | **16.500.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN LUAK | |
| | | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan (Angka) | 437 | | 0 | | 85 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3887. | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | 562.255.000 | | 32.380.000 | | 16.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Dokumen | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3888. | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | 214.975.000 | | 5.100.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang) | 20 | | 4 | | 30 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3889. | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | 347.280.000 | | 27.280.000 | | 16.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3890.** | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | **452.000.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN LUAK | |
| | | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari (Angka) | 352 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3891. | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | 452.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Dokumen | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3892. | 7.01.06.2.01.0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | | | 8.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 48 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3893. | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | 8.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 48 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3894. | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | 8.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 48 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3895. | 7.01.06.2.01.0004 | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | | | 116.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan) | 48 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3896. | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | 133.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 48 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3897. | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | 179.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen) | 48 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3898.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **10.107.476.833** | | **1.603.177.352** | | **1.705.370.269** | | **170.073.024** | **13,73** | **9,97** | | **170.073.024** | **14,11** | **1,68** | KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 25 | | 25,00 | | 25 | | 25,00 | | | |
| 3899. | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 85.799.540 | | 6.688.500 | | 3.209.000 | | 1.117.000 | 20,00 | 34,81 | | 1.117.000 | 42,86 | 1,30 | | |
| | | Dokumen | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3900. | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 12.450.000 | | 1.560.000 | | 1.134.000 | | 1.117.000 | 100,00 | 98,50 | | 1.117.000 | 300,00 | 8,97 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 2 | | 3 | | 6 | | 6 | | 100,00 | | 6 | | 300,00 | | | |
| 3901. | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 10.899.540 | | 1.124.000 | | 1.037.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 3902. | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 11.250.000 | | 1.384.000 | | 1.037.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3903. | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 11.500.000 | | 1.601.500 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3904. | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 14.100.000 | | 1.019.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3905. | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 14.150.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3906. | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 11.450.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3907. | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 7.514.400.607 | | 1.436.153.145 | | 1.627.221.355 | | 157.816.312 | 0,00 | 9,70 | | 157.816.312 | 0,00 | 2,10 | | |
| | | Dokumen | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3908. | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 7.444.874.907 | | 1.436.153.145 | | 1.627.221.355 | | 157.816.312 | 0,00 | 9,70 | | 157.816.312 | 0,00 | 2,12 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 196 | | 196 | | 14 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3909. | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 27.175.700 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3910. | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 13.400.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3911. | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 14.200.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 15 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3912. | 7.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | 14.750.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3913. | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 11.750.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Dokumen | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3914. | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 11.750.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3915. | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 108.050.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Dokumen | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3916. | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 87.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 25 | | 0 | | 14 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3917. | 7.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | 21.050.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 18 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3918. | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.170.190.000 | | 65.984.854 | | 25.711.000 | | 4.610.000 | 12,50 | 17,93 | | 4.610.000 | 12,50 | 0,39 | | |
| | | Dokumen | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3919. | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 15.750.000 | | 1.000.000 | | 1.280.000 | | 495.000 | 0,00 | 38,67 | | 495.000 | 0,00 | 3,14 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 30 | | 10 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3920. | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 634.500.000 | | 31.806.854 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 6 | | 1 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3921. | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 36.000.000 | | 2.560.000 | | 1.300.000 | | 685.000 | 50,00 | 52,69 | | 685.000 | 50,00 | 1,90 | | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 12 | | 10 | | 12 | | 6 | | 50,00 | | 6 | | 50,00 | | | |
| 3922. | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 75.140.000 | | 7.138.000 | | 7.926.000 | | 2.015.000 | 0,00 | 25,42 | | 2.015.000 | 0,00 | 2,68 | | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3923. | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 61.550.000 | | 7.130.000 | | 5.400.000 | | 1.415.000 | 25,00 | 26,20 | | 1.415.000 | 25,00 | 2,30 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 3924. | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 347.250.000 | | 16.350.000 | | 9.805.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3925. | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 195.386.958 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Dokumen | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3926. | 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 75.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3927. | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 115.886.958 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3928. | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 4.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3929. | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 416.720.730 | | 46.723.508 | | 4.528.914 | | 603.376 | 8,33 | 13,32 | | 603.376 | 8,33 | 0,14 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Dokumen | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3930. | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 18.750.000 | | 500.000 | | 250.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 50 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3931. | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 45.758.914 | | 2.223.508 | | 4.278.914 | | 603.376 | 25,00 | 14,10 | | 603.376 | 25,00 | 1,32 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 3932. | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 352.211.816 | | 44.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 36 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3933. | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 605.178.998 | | 47.627.345 | | 44.700.000 | | 5.926.336 | 33,33 | 13,26 | | 5.926.336 | 3,03 | 0,98 | | |
| | | Dokumen | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3934. | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 391.250.000 | | 44.639.345 | | 44.700.000 | | 5.926.336 | 33,33 | 13,26 | | 5.926.336 | 9,09 | 1,51 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 11 | | 6 | | 3 | | 1 | | 33,33 | | 1 | | 9,09 | | | |
| 3935. | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 28.000.000 | | 2.988.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 18 | | 8 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3936. | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 185.928.998 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3937.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **764.000.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN | |
| | | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); 2. SAKIP | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) | 92 | | 0 | | 91 | | 91 | | 100,00 | | 91 | | 98,91 | | | |
| | | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 67 | | 0 | | 65 | | 65 | | 100,00 | | 65 | | 97,01 | | | |
| 3938. | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 336.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | - | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3939. | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | 166.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 0 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3940. | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 170.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3941. | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 229.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3942. | 7.01.02.2.02.0001 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | | | 106.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen) | 67 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Fasilitasi Tim Data Terpadu Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3943. | 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | 123.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3944. | 7.01.02.2.03 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | | | 198.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Prasarana dan Sarana Pelayanan | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3945. | 7.01.02.2.03.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | | | 198.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen) | 100 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3946.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **801.000.000** | | **10.440.000** | | **4.790.000** | | **4.790.000** | **25,00** | **100,00** | | **4.790.000** | **133,33** | **0,60** | KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN | |
| | | Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari | Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari (Angka) | 67 | | 67 | | 65 | | 65 | | 100,00 | | 65 | | 97,01 | | | |
| 3947. | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | 206.000.000 | | 2.440.000 | | 4.790.000 | | 4.790.000 | 100,00 | 100,00 | | 4.790.000 | 800,00 | 2,33 | | |
| | | Rata rata nilai swadaya masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3948. | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | 206.000.000 | | 2.440.000 | | 4.790.000 | | 4.790.000 | 100,00 | 100,00 | | 4.790.000 | 800,00 | 2,33 | | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 1 | | 8 | | 8 | | 8 | | 100,00 | | 8 | | 800,00 | | | |
| 3949. | 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | 595.000.000 | | 8.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan Prilaku Hidup Bersih dan sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3950. | 7.01.03.2.06.0006 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | 92.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3951. | 7.01.03.2.06.0007 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | 87.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Persentase Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3952. | 7.01.03.2.06.0001 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | | | 4.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga) | 67 | | 0 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3953. | 7.01.03.2.06.0003 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | 94.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 67 | | 0 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3954. | 7.01.03.2.06.0008 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | | | 101.000.000 | | 8.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga) | 67 | | 50 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3955. | 7.01.03.2.06.0010 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | | | 115.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga) | 67 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 3956. | 7.01.03.2.06.0012 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | | | 101.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga) | 67 | | 0 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3957.** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | **641.900.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN | |
| | | Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan | Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (Angka) | 67 | | 67 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3958. | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 490.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase penurunan kasus kriminal dan pelanggaran Perda di Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3959. | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | 245.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3960. | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | 245.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 0 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3961. | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | 151.900.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | persentase terlaksananya monitoring dan sosialisasi ketentraman umum di kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3962. | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | 151.900.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) | 67 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3963.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | **802.300.000** | | **38.978.571** | | **35.200.000** | | **6.000.000** | **12,50** | **17,05** | | **6.000.000** | **1,00** | **0,75** | KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan (Angka) | 67 | | 67 | | 65 | | 65 | | 100,00 | | 65 | | 97,01 | | | |
| 3964. | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | 802.300.000 | | 38.978.571 | | 35.200.000 | | 6.000.000 | 12,50 | 17,05 | | 6.000.000 | 1,00 | 0,75 | | |
| | | Terlaksananya urusan pemerintahan umum | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3965. | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | 56.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3966. | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | 557.800.000 | | 11.978.571 | | 7.900.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang) | 1 | | 150 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3967. | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | 188.500.000 | | 27.000.000 | | 27.300.000 | | 6.000.000 | 25,00 | 21,98 | | 6.000.000 | 3,00 | 3,18 | | |
| | | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 100 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 3,00 | | | |
| **3968.** | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | **1.279.000.000** | | **2.780.000** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN | |
| | | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari (Angka) | 67 | | 67 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3969. | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | 1.279.000.000 | | 2.780.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Pemerintahan Nagari yang terbina | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3970. | 7.01.06.2.01.0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | | | 207.300.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 67 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3971. | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | 222.300.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 67 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3972. | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | 212.300.000 | | 2.780.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 67 | | 8 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3973. | 7.01.06.2.01.0007 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | | | 212.300.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen) | 67 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3974. | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | 212.300.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen) | 67 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3975. | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | 212.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan) | 67 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3976.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **8.248.780.347** | | **1.334.123.277** | | **1.603.924.829** | | **384.597.449** | **1,65** | **23,98** | | **384.597.449** | **0,16** | **4,66** | KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%) | 500 | | 85 | | 100 | | 25 | | 25,00 | | 25 | | 5,00 | | | |
| 3977. | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 59.641.800 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | tersedinnya dokumen perencanaan, pegangagaran dan evaluasi perangkat Daerah | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3978. | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 7.992.900 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3979. | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 8.678.900 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 8 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3980. | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 8.600.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 10 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3981. | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 8.600.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 10 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3982. | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 19.370.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 25 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3983. | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 6.400.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3984. | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 7.532.121.921 | | 1.257.644.677 | | 1.527.628.729 | | 384.597.449 | 10,71 | 25,18 | | 384.597.449 | 0,83 | 5,11 | | |
| | | tersedianhya gaji dan tunjangan Asn | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3985. | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 7.478.121.921 | | 1.257.644.677 | | 1.527.628.729 | | 384.597.449 | 21,43 | 25,18 | | 384.597.449 | 5,00 | 5,14 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 60 | | 3 | | 14 | | 3 | | 21,43 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 3986. | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 12.400.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 60 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3987. | 7.01.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | 7.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | 60 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3988. | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 7.300.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3989. | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 15.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 120 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3990. | 7.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | 12.300.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3991. | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 85.710.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Keluaran :Pelaksanaan Jasa Penatausahaan Barang Milik Daerah , Penyusunan RKBMD, RKPBMD, Pemanfaatan Asset, Laporan BMD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3992. | 7.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | 54.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3993. | 7.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | 9.010.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3994. | 7.01.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | 7.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) | 20 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3995. | 7.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 8.800.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3996. | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 6.900.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3997. | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 4.400.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | tersedianya Pakaian Dinas harian untuk ASN dan Non ASN | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3998. | 7.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | 4.400.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3999. | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 164.834.000 | | 17.379.000 | | 7.341.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4000. | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 12.400.000 | | 500.000 | | 525.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4001. | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 39.684.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4002. | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 10.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4003. | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 45.000.000 | | 14.881.000 | | 5.277.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4004. | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 27.000.000 | | 1.998.000 | | 1.539.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 60 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4005. | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | 10.750.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 1075 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4006. | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4007. | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 219.892.426 | | - | | 7.034.600 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase pelaksanaan administrasi administras umum | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4008. | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 10.100.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 1075 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4009. | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 49.942.426 | | - | | 6.531.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 48 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4010. | 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 42.250.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 55 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4011. | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 117.600.000 | | - | | 503.600 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4012. | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 182.180.200 | | 59.099.600 | | 61.920.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpeliharanya barang milik daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4013. | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 182.180.200 | | 59.099.600 | | 60.050.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 58 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4014. | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | - | | - | | 1.870.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 1 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **4015.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **610.516.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI | |
| | | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); 2. SAKIP | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) | 400 | | 82 | | 80 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 75 | | 88,5 | | 75 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4016. | 7.01.02.2.03 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | | | 410.260.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4017. | 7.01.02.2.03.0002 | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta | | | 410.260.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum dengan Melibatkan Pihak Swasta | Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta (Unit) | 16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4018. | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | 200.256.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4019. | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | 200.256.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| **4020.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **1.002.673.000** | | **-** | | **5.455.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI | |
| | | Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari | Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari (Angka) | 380 | | 82,24 | | 60 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4021. | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | 76.000.000 | | - | | 5.455.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | jumlah tahapan forum musrenbang di anagari | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4022. | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | 39.000.000 | | - | | 3.015.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 10 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4023. | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | 37.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4024. | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | - | | - | | 2.440.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4025. | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 335.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4026. | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | 335.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4027. | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | 69.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terfasilitasinya lembaga lembaga dikecamatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4028. | 7.01.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | | | 69.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan) | 70 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4029. | 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | 522.673.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | persentase masyarakat miskin yang di berdayakan | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4030. | 7.01.03.2.06.0003 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | 154.233.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 225 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4031. | 7.01.03.2.06.0006 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | 107.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga) | 155 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4032. | 7.01.03.2.06.0008 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | | | 110.260.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga) | 160 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4033. | 7.01.03.2.06.0009 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | | | 151.180.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga) | 217 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **4034.** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | **550.000.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI | |
| | | Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan | Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (Angka) | 320 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4035. | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 463.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | terlaksananya monitoring dan sosialisasi ketentraman | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4036. | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | 231.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4037. | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | 231.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4038. | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | 87.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4039. | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | 87.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) | 16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **4040.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | **617.100.000** | | **-** | | **14.740.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI | |
| | | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan (Angka) | 400 | | 0 | | 80 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 4041. | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | 617.100.000 | | - | | 14.740.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | terlaksananya urusan pemerintahan umum | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4042. | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | 160.325.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang) | 1250 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4043. | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | 132.225.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang) | 625 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4044. | 7.01.05.2.01.0007 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | | | 141.225.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4045. | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | 183.325.000 | | - | | 14.740.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 60 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **4046.** | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | **751.000.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI | |
| | | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari (Angka) | 400 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4047. | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | 751.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | persentase pemerintahan nagari yang terbina | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4048. | 7.01.06.2.01.0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | | | 78.875.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4049. | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | 152.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4050. | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | 91.875.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4051. | 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | 67.875.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen) | 25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4052. | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | 25.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4053. | 7.01.06.2.01.0007 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | | | 94.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen) | 25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4054. | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | 111.375.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4055. | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | 86.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan) | 25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4056. | 7.01.06.2.01.0018 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | | | 44.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **4057.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **11.733.029.571** | | **1.837.083.446** | | **1.884.697.845** | | **171.667.376** | **0,00** | **9,11** | | **171.667.376** | **0,00** | **1,46** | KECAMATAN HARAU | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 25 | | 25,00 | | 25 | | 25,00 | | | |
| 4058. | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 326.588.872 | | 8.055.000 | | 9.415.800 | | 1.186.000 | 0,00 | 12,60 | | 1.186.000 | 0,00 | 0,36 | | |
| | | Persentase Penyusunan Laporan OPD | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4059. | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 48.496.585 | | 3.114.000 | | 1.453.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 4060. | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 36.599.287 | | 1.112.000 | | 1.423.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4061. | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 40.207.000 | | - | | 1.207.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4062. | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 40.996.000 | | 1.576.000 | | 1.596.000 | | 1.186.000 | 0,00 | 74,31 | | 1.186.000 | 0,00 | 2,89 | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4063. | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 42.209.000 | | 1.194.000 | | 1.209.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4064. | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 66.281.000 | | 1.059.000 | | 2.527.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 4 | | 6 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4065. | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 51.800.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4066. | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 8.249.345.313 | | 1.660.731.609 | | 1.777.921.845 | | 155.406.803 | 0,00 | 8,74 | | 155.406.803 | 0,00 | 1,88 | | |
| | | Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4067. | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 8.043.342.713 | | 1.656.724.109 | | 1.775.657.845 | | 155.406.803 | 0,00 | 8,75 | | 155.406.803 | 0,00 | 1,93 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 12 | | 19 | | 19 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4068. | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 32.389.600 | | 957.500 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4069. | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 50.788.000 | | 1.181.000 | | 1.188.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4070. | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 66.349.000 | | 942.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 15 | | 24 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4071. | 7.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | 56.476.000 | | 927.000 | | 1.076.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4072. | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 64.104.000 | | 1.103.000 | | 660.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Laporan Asset semester dan akhir tahun | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4073. | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 64.104.000 | | 1.103.000 | | 660.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 7 | | 6 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4074. | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 128.044.000 | | 1.014.000 | | 1.202.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Pelaksanaan Disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur dan baju dinas ASN dan Non ASN | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4075. | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 102.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4076. | 7.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | 25.544.000 | | 1.014.000 | | 1.202.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 16 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4077. | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 683.954.800 | | 64.861.000 | | 23.796.800 | | 2.822.700 | 0,00 | 11,86 | | 2.822.700 | 0,00 | 0,41 | | |
| | | Persentase pelaksanaan Administrasi Umum | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4078. | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 21.633.000 | | 2.500.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 20 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4079. | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 298.942.000 | | 20.400.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 2 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4080. | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 149.361.200 | | 10.729.000 | | 9.561.200 | | 1.990.200 | 0,00 | 20,82 | | 1.990.200 | 0,00 | 1,33 | | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4081. | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 84.377.600 | | 8.224.500 | | 4.580.600 | | 832.500 | 0,00 | 18,17 | | 832.500 | 0,00 | 0,99 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4082. | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 29.256.000 | | 6.105.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4083. | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 100.385.000 | | 16.902.500 | | 9.655.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4084. | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 723.400.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4085. | 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 313.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4086. | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 190.400.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 2 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4087. | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 220.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4088. | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 544.271.400 | | 38.171.995 | | 9.471.400 | | 1.185.458 | 0,00 | 12,52 | | 1.185.458 | 0,00 | 0,22 | | |
| | | Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4089. | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 4.300.000 | | 500.000 | | 500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 2 | | 1 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4090. | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 71.840.000 | | 5.211.995 | | 5.340.000 | | 1.185.458 | 0,00 | 22,20 | | 1.185.458 | 0,00 | 1,65 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4091. | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 468.131.400 | | 32.460.000 | | 3.631.400 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4092. | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.013.321.186 | | 63.146.842 | | 62.230.000 | | 11.066.415 | 0,00 | 17,78 | | 11.066.415 | 0,00 | 1,09 | | |
| | | Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4093. | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 342.550.000 | | 61.006.842 | | 61.050.000 | | 11.066.415 | 0,00 | 18,13 | | 11.066.415 | 0,00 | 3,23 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 11 | | 8 | | 8 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4094. | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 37.800.000 | | 2.140.000 | | 1.180.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 12 | | 6 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4095. | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 341.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 4096. | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 291.471.186 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **4097.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **834.106.400** | | **1.861.000** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN HARAU | |
| | | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); 2. SAKIP | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) | 96 | | 90,95 | | 95 | | 90,95 | | 95,74 | | 90,95 | | 94,74 | | | |
| | | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 73 | | 64,56 | | 70 | | 70 | | 100,00 | | 70 | | 95,89 | | | |
| 4098. | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 64.691.400 | | 621.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4099. | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 64.691.400 | | 621.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 13 | | 13 | | 11 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4100. | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 1.415.000 | | 1.240.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4101. | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 1.415.000 | | 1.240.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 0 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4102. | 7.01.02.2.03 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | | | 768.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4103. | 7.01.02.2.03.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | | | 768.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen) | 11 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **4104.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **512.376.700** | | **9.882.000** | | **3.860.000** | | **3.860.000** | **0,00** | **100,00** | | **3.860.000** | **0,00** | **0,75** | KECAMATAN HARAU | |
| | | Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari | Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari (Angka) | 77 | | 70 | | 75 | | 75 | | 100,00 | | 75 | | 97,40 | | | |
| 4105. | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | 70.236.700 | | 5.440.000 | | 3.860.000 | | 3.860.000 | 0,00 | 100,00 | | 3.860.000 | 0,00 | 5,50 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Rata-rata Nilai Swadaya Masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4106. | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | 41.160.000 | | 3.750.000 | | 3.860.000 | | 3.860.000 | 0,00 | 100,00 | | 3.860.000 | 0,00 | 9,38 | | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 4 | | 1 | | 11 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4107. | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 29.076.700 | | 1.690.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 13 | | 3 | | 11 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4108. | 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | 442.140.000 | | 4.442.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya keluarga yang menerapkan prilaku hidup sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4109. | 7.01.03.2.06.0005 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | | | 308.100.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga) | 150 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4110. | 7.01.03.2.06.0007 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | 3.740.000 | | 4.442.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 13 | | 30 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 4111. | 7.01.03.2.06.0011 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | | | 130.300.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga) | 130 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **4112.** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | **473.227.000** | | **2.062.000** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN HARAU | |
| | | Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan | Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (Angka) | 77 | | 77 | | 75 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4113. | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 236.405.000 | | 965.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya koordinasi dengan Pemerintahan Nagari | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4114. | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | 236.405.000 | | 965.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 4 | | 2 | | 11 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4115. | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | 236.822.000 | | 1.097.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Pemerintahan Nagari | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4116. | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | 236.822.000 | | 1.097.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) | 3 | | 12 | | 11 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **4117.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | **664.270.000** | | **30.375.000** | | **32.500.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN HARAU | |
| | | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan (Angka) | 77 | | 70 | | 75 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4118. | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | 664.270.000 | | 30.375.000 | | 32.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya urusan pemerintahan umum | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4119. | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | 288.020.000 | | 2.195.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang) | 55 | | 50 | | 33 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4120. | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | 376.250.000 | | 28.180.000 | | 32.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **4121.** | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | **1.365.876.500** | | **6.930.000** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN HARAU | |
| | | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari (Angka) | 77 | | 70 | | 75 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4122. | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | 1.365.876.500 | | 6.930.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Produk Hukum Nagari | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4123. | 7.01.06.2.01.0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | | | 1.580.000 | | 965.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 0 | | 11 | | 11 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4124. | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | 97.350.000 | | 1.115.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 11 | | 3 | | 11 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4125. | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | 1.762.500 | | 1.237.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 0 | | 6 | | 11 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4126. | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | 200.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen) | 11 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4127. | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | 270.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 11 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4128. | 7.01.06.2.01.0010 | Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | | | 402.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Ditetapkannya Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen) | 11 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4129. | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | 389.269.000 | | 1.237.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen) | 11 | | 11 | | 11 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4130. | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | 1.791.000 | | 1.279.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan) | 0 | | 6 | | 11 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4131. | 7.01.06.2.01.0018 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | | | 1.624.000 | | 1.097.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 0 | | 11 | | 11 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **4132.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **11.171.299.295** | | **1.545.187.606** | | **1.723.100.562** | | **338.424.225** | **18,33** | **19,64** | | **338.424.225** | **14,11** | **3,03** | KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 25 | | 25,00 | | 25 | | 25,00 | | | |
| 4133. | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 299.353.000 | | 6.155.000 | | 3.519.000 | | 1.123.000 | 27,78 | 31,91 | | 1.123.000 | 10,71 | 0,38 | | |
| | | Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4134. | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 76.586.000 | | 3.416.000 | | 1.126.000 | | 903.000 | 50,00 | 80,20 | | 903.000 | 50,00 | 1,18 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 2 | | 3 | | 2 | | 1 | | 50,00 | | 1 | | 50,00 | | | |
| 4135. | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 37.801.000 | | 575.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4136. | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 35.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4137. | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 35.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4138. | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 35.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4139. | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 79.966.000 | | 2.164.000 | | 2.393.000 | | 220.000 | 33,33 | 9,19 | | 220.000 | 14,29 | 0,28 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 14 | | 5 | | 6 | | 2 | | 33,33 | | 2 | | 14,29 | | | |
| 4140. | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 7.374.795.623 | | 1.403.567.665 | | 1.618.890.562 | | 321.337.025 | 41,67 | 19,85 | | 321.337.025 | 41,67 | 4,36 | | |
| | | Persentase Tertib Administrasi Keuangan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4141. | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 7.278.557.623 | | 1.397.829.665 | | 1.616.610.562 | | 320.637.025 | 0,00 | 19,83 | | 320.637.025 | 0,00 | 4,41 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 15 | | 14 | | 16 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4142. | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 58.644.000 | | 3.564.000 | | 1.850.000 | | 270.000 | 25,00 | 14,59 | | 270.000 | 25,00 | 0,46 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 4143. | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 37.594.000 | | 2.174.000 | | 430.000 | | 430.000 | 100,00 | 100,00 | | 430.000 | 100,00 | 1,14 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 100,00 | | | |
| 4144. | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 47.515.000 | | 1.210.000 | | 1.150.000 | | 200.000 | 8,33 | 17,39 | | 200.000 | 50,00 | 0,42 | | |
| | | Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4145. | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 47.515.000 | | 1.210.000 | | 1.150.000 | | 200.000 | 8,33 | 17,39 | | 200.000 | 50,00 | 0,42 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 2 | | 2 | | 12 | | 1 | | 8,33 | | 1 | | 50,00 | | | |
| 4146. | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 235.700.000 | | 1.315.000 | | 1.100.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4147. | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 118.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 20 | | 0 | | 16 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4148. | 7.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | 47.700.000 | | 1.315.000 | | 1.100.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 15 | | 15 | | 16 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4149. | 7.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 70.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 15 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4150. | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 830.941.000 | | 47.063.800 | | 27.620.400 | | 1.820.800 | 15,00 | 6,59 | | 1.820.800 | 15,00 | 0,22 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4151. | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 27.300.000 | | 550.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 10 | | 10 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4152. | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 194.585.000 | | 9.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4153. | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 86.760.000 | | 6.212.000 | | 5.206.200 | | 870.800 | 25,00 | 16,73 | | 870.800 | 25,00 | 1,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 4154. | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 62.430.000 | | 4.331.800 | | 3.379.200 | | 300.000 | 25,00 | 8,88 | | 300.000 | 25,00 | 0,48 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 4155. | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 459.866.000 | | 26.970.000 | | 19.035.000 | | 650.000 | 25,00 | 3,41 | | 650.000 | 25,00 | 0,14 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 4156. | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 734.681.000 | | 3.600.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4157. | 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 495.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4158. | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 239.681.000 | | 3.600.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 10 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4159. | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 344.677.672 | | 21.959.779 | | 9.083.600 | | 2.031.400 | 25,00 | 22,36 | | 2.031.400 | 17,50 | 0,59 | | |
| | | Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4160. | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 5.200.000 | | 200.000 | | 150.000 | | 50.000 | 25,00 | 33,33 | | 50.000 | 2,50 | 0,96 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 200 | | 20 | | 20 | | 5 | | 25,00 | | 5 | | 2,50 | | | |
| 4161. | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 78.200.000 | | 6.622.563 | | 7.300.000 | | 1.661.400 | 25,00 | 22,76 | | 1.661.400 | 25,00 | 2,12 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 4162. | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 261.277.672 | | 15.137.216 | | 1.633.600 | | 320.000 | 25,00 | 19,59 | | 320.000 | 25,00 | 0,12 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 4163. | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.303.636.000 | | 60.316.362 | | 61.737.000 | | 11.912.000 | 0,00 | 19,29 | | 11.912.000 | 0,00 | 0,91 | | |
| | | Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4164. | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 402.550.000 | | 58.942.900 | | 60.050.000 | | 11.912.000 | 0,00 | 19,84 | | 11.912.000 | 0,00 | 2,96 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 11 | | 7 | | 7 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4165. | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 51.086.000 | | 1.373.462 | | 1.687.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 20 | | 4 | | 6 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4166. | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 850.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **4167.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **504.750.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU | |
| | | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); 2. SAKIP | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) | 92 | | 90,87 | | 91,3 | | 22 | | 24,10 | | 22 | | 23,91 | | | |
| | | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 70 | | 65,75 | | 67 | | 67 | | 100,00 | | 67 | | 95,71 | | | |
| 4168. | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 250.350.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Laporan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4169. | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | 127.250.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 12 | | 0 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4170. | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 123.100.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4171. | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 125.400.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Laporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4172. | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 125.400.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4173. | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | 129.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4174. | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | 129.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **4175.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **737.134.700** | | **6.740.000** | | **5.170.000** | | **2.125.000** | **6,94** | **41,10** | | **2.125.000** | **5,00** | **0,29** | KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU | |
| | | Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari | Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari (Angka) | 85 | | 80 | | 81 | | 20 | | 24,69 | | 20 | | 23,53 | | | |
| 4176. | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | 402.024.700 | | 3.590.000 | | 3.590.000 | | 2.035.000 | 0,00 | 56,69 | | 2.035.000 | 0,00 | 0,51 | | |
| | | Laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4177. | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | 103.374.700 | | 3.590.000 | | 3.590.000 | | 2.035.000 | 0,00 | 56,69 | | 2.035.000 | 0,00 | 1,97 | | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 6 | | 6 | | 6 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4178. | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 298.650.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 2 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4179. | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | 110.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4180. | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | | | 110.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4181. | 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | 225.110.000 | | 3.150.000 | | 1.580.000 | | 90.000 | 20,83 | 5,70 | | 90.000 | 12,50 | 0,04 | | |
| | | Partisipasi keluarga yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4182. | 7.01.03.2.06.0003 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | 110.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) | 150 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4183. | 7.01.03.2.06.0007 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | 115.110.000 | | 3.150.000 | | 1.580.000 | | 90.000 | 20,83 | 5,70 | | 90.000 | 25,00 | 0,08 | | |
| | | Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 200 | | 200 | | 240 | | 50 | | 20,83 | | 50 | | 25,00 | | | |
| **4184.** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | **470.000.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU | |
| | | Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan | Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (Angka) | 85 | | 0 | | 60 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4185. | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 235.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Laporan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4186. | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | 235.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4187. | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | 235.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terciptanya sinergitas dengan kepolisian dan tentara nasional indonesia di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4188. | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | 235.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **4189.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | **604.050.000** | | **32.250.000** | | **10.500.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU | |
| | | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan (Angka) | 85 | | 50 | | 60 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4190. | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | 604.050.000 | | 32.250.000 | | 10.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya urusan pemerintahan umum secara tertib, terkoordinasi, dan sesuai peraturan perundang-undangan | Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4191. | 7.01.05.2.01.0007 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | | | 325.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4192. | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | 279.050.000 | | 32.250.000 | | 10.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **4193.** | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | **736.150.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari (Angka) | 80 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4194. | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | 736.150.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Laporan Fasilitasi, Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4195. | 7.01.06.2.01.0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | | | 111.150.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4196. | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | 132.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4197. | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4198. | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 110.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4199. | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | 110.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 4200. | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | 111.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4201. | 7.01.06.2.01.0018 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | | | 110.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 24 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **4202.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **11.368.658.985** | | **1.812.328.257** | | **2.268.565.031** | | **448.679.853** | **46,16** | **19,78** | | **448.679.853** | **3,18** | **3,95** | KECAMATAN KAPUR IX | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%) | 500 | | 78,09 | | 100 | | 13,67 | | 13,67 | | 13,67 | | 2,73 | | | |
| 4203. | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 100.000.000 | | 4.574.000 | | 4.093.000 | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 6,43 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4204. | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 32.000.000 | | 2.057.000 | | 1.274.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4205. | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 10.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 25,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 4 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0,00 | | 1 | | 25,00 | | | |
| 4206. | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 10.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 4 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4207. | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 12.000.000 | | 740.000 | | 999.000 | | - | 100,00 | 0,00 | | - | 20,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 4208. | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 11.000.000 | | 1.037.000 | | 870.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4209. | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 11.000.000 | | 740.000 | | 950.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4210. | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 14.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 4 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4211. | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 8.243.399.985 | | 1.689.775.305 | | 2.153.608.032 | | 426.665.663 | 166,67 | 19,81 | | 426.665.663 | 4,89 | 5,18 | | |
| | | Terpenuhinya administrasi keuangan Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4212. | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 8.205.899.985 | | 1.689.775.305 | | 2.151.958.032 | | 426.665.663 | 100,00 | 19,83 | | 426.665.663 | 20,00 | 5,20 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 85 | | 16 | | 17 | | 17 | | 100,00 | | 17 | | 20,00 | | | |
| 4213. | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 4.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 4214. | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 11.000.000 | | - | | 550.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4215. | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 16.000.000 | | - | | 1.100.000 | | - | 400,00 | 0,00 | | - | 4,44 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 90 | | 18 | | 1 | | 4 | | 400,00 | | 4 | | 4,44 | | | |
| 4216. | 7.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | 6.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 4 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4217. | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 31.000.000 | | - | | 860.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4218. | 7.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | 10.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 4 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4219. | 7.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 6.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 8 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4220. | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 15.000.000 | | - | | 860.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4221. | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 209.672.000 | | 520.000 | | 704.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4222. | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 34.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4223. | 7.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | 4.500.000 | | 520.000 | | 704.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4224. | 7.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | 3.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4225. | 7.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 72.672.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 128 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4226. | 7.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 95.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 128 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4227. | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 396.500.000 | | 40.842.575 | | 41.479.431 | | 8.193.000 | 40,00 | 19,75 | | 8.193.000 | 6,67 | 2,07 | | |
| | | Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4228. | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 4.000.000 | | 1.091.000 | | 636.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4229. | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 78.000.000 | | 8.356.875 | | 5.805.400 | | 2.163.000 | 100,00 | 37,26 | | 2.163.000 | 20,00 | 2,77 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 4230. | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 28.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4231. | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 23.000.000 | | 2.725.200 | | 2.988.031 | | 650.000 | 100,00 | 21,75 | | 650.000 | 20,00 | 2,83 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 4232. | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 7.500.000 | | 382.000 | | 450.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4233. | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 256.000.000 | | 28.287.500 | | 31.600.000 | | 5.380.000 | 0,00 | 17,03 | | 5.380.000 | 0,00 | 2,10 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4234. | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.336.265.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengadaan barang milik daerah untuk menunjang urusan pemerintah daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4235. | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 530.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4236. | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 150.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4237. | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 430.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 18 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4238. | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 226.265.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4239. | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 217.300.000 | | 31.170.527 | | 22.380.568 | | 4.160.590 | 0,00 | 18,59 | | 4.160.590 | 0,00 | 1,91 | | |
| | | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4240. | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 70.500.000 | | 5.586.743 | | 10.240.000 | | 1.160.590 | 0,00 | 11,33 | | 1.160.590 | 0,00 | 1,65 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4241. | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 146.800.000 | | 25.583.784 | | 12.140.568 | | 3.000.000 | 0,00 | 24,71 | | 3.000.000 | 0,00 | 2,04 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4242. | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 834.522.000 | | 45.445.850 | | 45.440.000 | | 9.660.600 | 15,48 | 21,26 | | 9.660.600 | 1,25 | 1,16 | | |
| | | Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4243. | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 292.400.000 | | 43.196.850 | | 40.650.000 | | 9.360.600 | 14,29 | 23,03 | | 9.360.600 | 2,50 | 3,20 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 40 | | 8 | | 7 | | 1 | | 14,29 | | 1 | | 2,50 | | | |
| 4244. | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 65.000.000 | | 2.249.000 | | 4.790.000 | | 300.000 | 16,67 | 6,26 | | 300.000 | 2,50 | 0,46 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 40 | | 7 | | 6 | | 1 | | 16,67 | | 1 | | 2,50 | | | |
| 4245. | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 425.122.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4246. | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 52.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **4247.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **550.000.000** | | **13.370.000** | | **1.692.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN KAPUR IX | |
| | | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); 2. SAKIP | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) | 92,5 | | 91,52 | | 90,50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 72 | | 55,35 | | 60 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4248. | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 13.000.000 | | 1.000.000 | | 842.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya koordinasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang efektif | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 4249. | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | 9.000.000 | | 1.000.000 | | 842.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4250. | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 4.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4251. | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 27.000.000 | | 12.370.000 | | 850.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4252. | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 27.000.000 | | 12.370.000 | | 850.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4253. | 7.01.02.2.03 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | | | 510.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang efektif | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4254. | 7.01.02.2.03.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | | | 510.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **4255.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **989.000.000** | | **2.805.000** | | **5.415.000** | | **2.216.000** | **50,00** | **40,92** | | **2.216.000** | **2,50** | **0,22** | KECAMATAN KAPUR IX | |
| | | Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari | Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari (Angka) | 62 | | 60 | | 53 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4256. | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | 107.000.000 | | 2.805.000 | | 5.415.000 | | 2.216.000 | 50,00 | 40,92 | | 2.216.000 | 10,00 | 2,07 | | |
| | | Terlaksannya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/nagari di tingkat kecamatan yang efektif | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4257. | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | 37.000.000 | | 1.805.000 | | 2.750.000 | | 2.216.000 | 100,00 | 80,58 | | 2.216.000 | 20,00 | 5,99 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 35 | | 7 | | 7 | | 7 | | 100,00 | | 7 | | 20,00 | | | |
| 4258. | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 70.000.000 | | 1.000.000 | | 2.665.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4259. | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | 400.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase terlaksannya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan yang efektif | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4260. | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | | | 200.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan) | 28 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4261. | 7.01.03.2.03.0003 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan | | | 200.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit) | 28 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4262. | 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | 482.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan yang efektif | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4263. | 7.01.03.2.06.0005 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | | | 220.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga) | 128 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4264. | 7.01.03.2.06.0006 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga) | 30 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4265. | 7.01.03.2.06.0007 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) | 30 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4266. | 7.01.03.2.06.0010 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | | | 222.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga) | 120 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **4267.** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | **6.500.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN KAPUR IX | |
| | | Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan | Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (Angka) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4268. | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 3.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang efektif | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4269. | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | 3.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4270. | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | 3.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di tingkat kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4271. | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | 3.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **4272.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | **178.000.000** | | **27.000.000** | | **27.000.000** | | **2.000.000** | **0,00** | **7,41** | | **2.000.000** | **0,00** | **1,12** | KECAMATAN KAPUR IX | |
| | | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan (Angka) | 62 | | 60 | | 53 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4273. | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | 178.000.000 | | 27.000.000 | | 27.000.000 | | 2.000.000 | 0,00 | 7,41 | | 2.000.000 | 0,00 | 1,12 | | |
| | | Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di tingkat kecamatan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4274. | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | 30.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 150 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4275. | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | 148.000.000 | | 27.000.000 | | 27.000.000 | | 2.000.000 | 0,00 | 7,41 | | 2.000.000 | 0,00 | 1,35 | | |
| | | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **4276.** | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | **891.000.000** | | **3.000.000** | | **1.500.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN KAPUR IX | |
| | | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari (Angka) | 62 | | 60 | | 53 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4277. | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | 891.000.000 | | 3.000.000 | | 1.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinas pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa di tingkat kecamatan yang efektif | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4278. | 7.01.06.2.01.0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | | | 9.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) | 5 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4279. | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | 13.000.000 | | 1.000.000 | | 750.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4280. | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | 13.000.000 | | 2.000.000 | | 750.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4281. | 7.01.06.2.01.0004 | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | | | 206.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4282. | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | 4.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 4283. | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | 212.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4284. | 7.01.06.2.01.0010 | Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | | | 212.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Ditetapkannya Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4285. | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | 214.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4286. | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | 6.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **8.01** | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | **31.365.741.206** | | **3.091.968.686** | | **5.095.028.026** | | **379.689.641** | **8,78** | **7,45** | | **379.689.641** | **0,86** | **1,21** | | |
| **4287.** | **8.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **21.248.621.982** | | **733.541.676** | | **3.284.877.432** | | **309.877.905** | **13,55** | **9,43** | | **309.877.905** | **1,42** | **1,46** | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%) | 100 | | 95 | | 100 | | 100 | | 100,00 | | 100 | | 100,00 | | | |
| 4288. | 8.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 466.640.950 | | 28.669.000 | | 10.000.001 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4289. | 8.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 108.420.950 | | 28.669.000 | | 10.000.001 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 30 | | 2 | | 6 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4290. | 8.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 47.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4291. | 8.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 47.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4292. | 8.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 46.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4293. | 8.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 46.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4294. | 8.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 61.220.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 90 | | 0 | | 18 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4295. | 8.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 109.600.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4296. | 8.01.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | 500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4297. | 8.01.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | 500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4298. | 8.01.01.2.01.0010 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 400.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4299. | 8.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 16.340.325.673 | | 281.593.852 | | 3.099.466.931 | | 291.975.245 | 37,93 | 9,42 | | 291.975.245 | 2,86 | 1,79 | | |
| | | Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4300. | 8.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 16.109.284.673 | | 281.593.852 | | 3.099.466.931 | | 291.975.245 | 113,79 | 9,42 | | 291.975.245 | 20,00 | 1,81 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 165 | | 28 | | 29 | | 33 | | 113,79 | | 33 | | 20,00 | | | |
| 4301. | 8.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 1.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4302. | 8.01.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | 49.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4303. | 8.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 68.691.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 1 | | 0 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4304. | 8.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | 500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4305. | 8.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 61.850.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 12 | | 0 | | 16 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4306. | 8.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4307. | 8.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 86.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Dokumen dan Laporan barang milik daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4308. | 8.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 86.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4309. | 8.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 76.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Dokumen dan Laporan Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4310. | 8.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 76.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 132 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4311. | 8.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.183.238.509 | | 154.679.329 | | 81.200.000 | | 5.999.100 | 7,64 | 7,39 | | 5.999.100 | 1,94 | 0,51 | | |
| | | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 4312. | 8.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 54.066.000 | | 6.090.000 | | 1.228.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 60 | | 3 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4313. | 8.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 115.366.000 | | 16.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 60 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4314. | 8.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 187.742.100 | | 27.769.500 | | 12.666.000 | | 2.499.500 | 16,67 | 19,73 | | 2.499.500 | 3,33 | 1,33 | | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 60 | | 3 | | 12 | | 2 | | 16,67 | | 2 | | 3,33 | | | |
| 4315. | 8.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 72.853.409 | | 6.852.600 | | 6.000.000 | | 1.000.000 | 16,67 | 16,67 | | 1.000.000 | 3,33 | 1,37 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 60 | | 3 | | 12 | | 2 | | 16,67 | | 2 | | 3,33 | | | |
| 4316. | 8.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 39.010.000 | | 2.010.000 | | 2.306.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 60 | | 25 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4317. | 8.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 714.201.000 | | 95.957.229 | | 59.000.000 | | 2.499.600 | 12,50 | 4,24 | | 2.499.600 | 5,00 | 0,35 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 60 | | 6 | | 24 | | 3 | | 12,50 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 4318. | 8.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 820.603.350 | | 26.700.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4319. | 8.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 200.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4320. | 8.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 273.518.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 4 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4321. | 8.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 149.151.350 | | 7.200.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 19 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4322. | 8.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 196.934.000 | | 19.500.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 18 | | 0 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 4323. | 8.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 1.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4324. | 8.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.025.010.500 | | 120.534.820 | | 13.110.500 | | 3.497.959 | 8,33 | 26,68 | | 3.497.959 | 1,25 | 0,34 | | |
| | | Jumlah laporan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4325. | 8.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 5.500.000 | | 750.000 | | 600.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 60 | | 6 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4326. | 8.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 81.510.500 | | 11.784.820 | | 12.510.500 | | 3.497.959 | 25,00 | 27,96 | | 3.497.959 | 5,00 | 4,29 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 3 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 4327. | 8.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 2.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4328. | 8.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 936.000.000 | | 108.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 30 | | 6 | | 6 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4329. | 8.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.250.803.000 | | 121.364.675 | | 81.100.000 | | 8.405.601 | 33,33 | 10,36 | | 8.405.601 | 4,29 | 0,67 | | |
| | | Jumlah Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4330. | 8.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 214.750.000 | | 114.386.675 | | 81.100.000 | | 8.405.601 | 100,00 | 10,36 | | 8.405.601 | 17,14 | 3,91 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 70 | | 24 | | 12 | | 12 | | 100,00 | | 12 | | 17,14 | | | |
| 4331. | 8.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 700.840.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4332. | 8.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 54.225.000 | | 6.978.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 20 | | 4 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4333. | 8.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 280.988.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 9 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **4334.** | **8.01.02** | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | | | **4.283.191.824** | | **802.882.417** | | **460.000.400** | | **55.236.736** | **6,15** | **12,01** | | **55.236.736** | **0,62** | **1,29** | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | | Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan | Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase) | 90 | | 80 | | 90 | | 90 | | 100,00 | | 90 | | 100,00 | | | |
| 4335. | 8.01.02.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | 4.283.191.824 | | 802.882.417 | | 460.000.400 | | 55.236.736 | 6,15 | 12,01 | | 55.236.736 | 0,62 | 1,29 | | |
| | | Jumlah Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsa | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paskibraka (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4336. | 8.01.02.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | 3.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4337. | 8.01.02.2.01.0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | 3.640.124 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4338. | 8.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | 132.560.496 | | - | | 20.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang) | 750 | | 0 | | 150 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 4339. | 8.01.02.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | 909.936.400 | | 174.099.196 | | 100.000.000 | | 40.420.000 | 30,77 | 40,42 | | 40.420.000 | 6,15 | 4,44 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang) | 3250 | | 2 | | 650 | | 200 | | 30,77 | | 200 | | 6,15 | | | |
| 4340. | 8.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | 5.234.100 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4341. | 8.01.02.2.01.0006 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | | | 116.915.880 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga) | 600 | | 0 | | 120 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4342. | 8.01.02.2.01.0007 | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka | | | 138.540.000 | | - | | 40.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka | Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen) | 270 | | 0 | | 28 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4343. | 8.01.02.2.01.0008 | Pembentukan Paskibraka | | | 2.960.364.824 | | 628.783.221 | | 300.000.400 | | 14.816.736 | 0,00 | 4,94 | | 14.816.736 | 0,00 | 0,50 | | |
| | | Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka | Jumlah Paskibraka (Orang) | 270 | | 28 | | 28 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4344. | 8.01.02.2.01.0009 | Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | | | 6.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen) | 113 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4345. | 8.01.02.2.01.0010 | Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila | | | 7.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila | Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen) | 113 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **4346.** | **8.01.03** | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | | | **862.935.400** | | **1.428.044.593** | | **1.138.257.194** | | **2.325.000** | **0,00** | **0,20** | | **2.325.000** | **0,00** | **0,27** | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | | Meningkatnya etika dan budaya politik | Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase) | 95 | | 75 | | 90 | | 90 | | 100,00 | | 90 | | 94,74 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 4347. | 8.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | | | 862.935.400 | | 1.428.044.593 | | 1.138.257.194 | | 2.325.000 | 0,00 | 0,20 | | 2.325.000 | 0,00 | 0,27 | | |
| | | Jumlah terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka (Kegiatan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4348. | 8.01.03.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | 2.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4349. | 8.01.03.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | 2.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4350. | 8.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | 315.452.000 | | 998.677.313 | | 20.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang) | 1970 | | 0 | | 390 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4351. | 8.01.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | 335.452.000 | | 429.367.280 | | 1.038.257.194 | | 2.325.000 | 0,00 | 0,22 | | 2.325.000 | 0,00 | 0,69 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang) | 950 | | 10 | | 150 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4352. | 8.01.03.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | 46.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan) | 53 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4353. | 8.01.03.2.01.0006 | Pelaksanaan tugas Paskibraka | | | 161.531.400 | | - | | 80.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya penugasan paskibraka | Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka (Kegiatan) | 270 | | 0 | | 54 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **4354.** | **8.01.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | | | **77.659.000** | | **-** | | **25.893.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | | Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase) | 90 | | 0 | | 90 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4355. | 8.01.04.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | | 77.659.000 | | - | | 25.893.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4356. | 8.01.04.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | 250.000 | | - | | 25.893.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen) | 1 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4357. | 8.01.04.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | 73.659.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen) | 50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4358. | 8.01.04.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | 1.250.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4359. | 8.01.04.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | 1.250.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4360. | 8.01.04.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | 1.250.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **4361.** | **8.01.05** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | | | **1.654.998.000** | | **19.050.000** | | **68.500.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | | Meningkatnya ketahanan ekonomi , sosial, dan budaya masyarakat | Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase) | 85 | | 75 | | 85 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4362. | 8.01.05.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | | 1.654.998.000 | | 19.050.000 | | 68.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | jumlah Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4363. | 8.01.05.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | 1.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4364. | 8.01.05.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | 1.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4365. | 8.01.05.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | 762.998.000 | | 19.050.000 | | 24.775.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang) | 300 | | 6 | | 60 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4366. | 8.01.05.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | 665.000.000 | | - | | 43.725.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang) | 1800 | | 0 | | 360 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4367. | 8.01.05.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | 225.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan) | 52 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **4368.** | **8.01.06** | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | | | **3.238.335.000** | | **108.450.000** | | **117.500.000** | | **12.250.000** | **0,28** | **10,43** | | **12.250.000** | **0,03** | **0,38** | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | | Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan | Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase) | 90 | | 75 | | 90 | | 90 | | 100,00 | | 90 | | 100,00 | | | |
| 4369. | 8.01.06.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | | | 3.238.335.000 | | 108.450.000 | | 117.500.000 | | 12.250.000 | 0,28 | 10,43 | | 12.250.000 | 0,03 | 0,38 | | |
| | | Jumlah Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4370. | 8.01.06.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | 1.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4371. | 8.01.06.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | 1.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4372. | 8.01.06.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | 615.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang) | 60 | | 0 | | 142 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4373. | 8.01.06.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | 962.775.000 | | 58.625.000 | | 80.500.000 | | 12.250.000 | 0,83 | 15,22 | | 12.250.000 | 0,17 | 1,27 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang) | 1800 | | 3 | | 360 | | 3 | | 0,83 | | 3 | | 0,17 | | | |
| 4374. | 8.01.06.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | 1.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4375. | 8.01.06.2.01.0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.657.560.000 | | 49.825.000 | | 37.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 70 | | 5 | | 14 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | JUMLAH | | | | 9.851.331.979.909 | | 1.294.828.248.115 | | 1.390.359.966.358 | | 159.984.311.263 | | | | 159.984.311.263 | | | | |
| | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | 9,40 | 11,51 | | | 3,77 | 1,62 | | |
| | Predikat kinerja | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | |

Hasil evaluasi capaian kinerja hingga Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa belum terdapat program, kegiatan, maupun sub kegiatan yang mencapai target 100%. Hal ini disebabkan sebagian besar indikator kinerja baru dapat diukur secara optimal pada periode Triwulan III, setelah pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan berjalan lebih jauh dan output yang dihasilkan dapat teridentifikasi secara jelas. Dengan demikian, capaian hingga saat ini belum mencerminkan hasil akhir dari keseluruhan target yang telah ditetapkan. Selain itu, terdapat pula beberapa program, kegiatan, maupun subkegiatan yang pada tahap perencanaan awal diproyeksikan akan mengalami kendala pencapaian target. Salah satu faktor penyebabnya adalah tidak semua rencana tersebut mendapatkan alokasi anggaran dalam APBD Tahun 2026. Tanpa dukungan pendanaan, pelaksanaan fisik maupun administrasi dari program atau kegiatan tersebut otomatis tidak dapat dimulai sehingga memengaruhi persentase pencapaian.

Namun demikian, kondisi ini belum dapat dijadikan ukuran final untuk menentukan program atau kegiatan mana yang masuk kategori “tidak tercapai” karena pelaksanaan tahun berjalan masih pada tahap pertengahan. Beberapa program membutuhkan waktu lebih lama dalam proses pengadaan, koordinasi lintas pihak, ataupun pencapaian indikator hasil sehingga evaluasi yang lebih akurat baru dapat dilakukan setelah memasuki Triwulan III atau menjelang akhir tahun. Evaluasi hingga Triwulan I ini lebih berfungsi sebagai gambaran sementara terkait progres pelaksanaan, kendala awal yang dihadapi, dan peluang perbaikan yang bisa segera diambil. Dengan informasi ini, perangkat daerah dapat melakukan langkah antisipasi seperti percepatan proses pengadaan, penyesuaian jadwal kegiatan, atau optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia agar target akhir tahun dapat lebih mendekati capaian yang diharapkan.

Ke depan, monitoring secara berkala akan terus dilakukan pada setiap triwulan untuk memastikan bahwa capaian kinerja dapat terukur dengan baik sesuai jadwal. Fokus perhatian akan diarahkan pada kegiatan yang berisiko tidak tercapai, khususnya yang terkendala pada aspek perencanaan dan penganggaran, agar dapat diambil langkah korektif sebelum akhir tahun. Dengan demikian, meskipun hingga pertengahan tahun belum ada capaian 100%, peluang perbaikan dan pencapaian target pada periode berikutnya tetap terbuka lebar.

# BAB III

# KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Dalam proses perencanaan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah merupakan salah satu elemen vital. Keberadaan kerangka ekonomi dan kerangka keuangan yang komprehensif serta akurat dapat merepresentasikan kondisi dan prospek daerah dari perspektif ekonomi. Rancangan kerangka ekonomi daerah yang baik harus melalui tahapan sinkronisasi dan integrasi dengan kerangka ekonomi regional dan nasional. Sinkronisasi ini sangat diperlukan karena daerah akan menikmati eksternalitas positif dan sekaligus turut menanggung derita eksternalitas negatif dari kondisi ekonomi pada level regional maupun nasional.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional dan regional serta kebijakan ekonomi di tingkat nasional dan regional. Rancangan kerangka ekonomi dan kerangka keuangan daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 mendeskripsikan kondisi perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota serta arah kebijakan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Rancangan ini akan memberikan kontribusi dalam upaya memproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah secara akurat. Selain itu rancangan kerangka ekonomi dan keuangan ini juga dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan PPAS-P.

## 3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

### 3.1.1. Kondisi ekonomi Indonesia Triwulan II 2026

Perekonomian Indonesia pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan kinerja yang semakin kuat di tengah dinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian. Perlambatan ekonomi beberapa negara maju, tingginya tensi geopolitik, serta fluktuasi harga komoditas dunia masih menjadi tantangan terhadap prospek pertumbuhan ekonomi dunia. Namun demikian, ekonomi domestik tetap mampu mempertahankan momentum pertumbuhan yang didukung oleh kuatnya permintaan dalam negeri, peningkatan konsumsi masyarakat, percepatan belanja pemerintah, serta membaiknya investasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada Triwulan II Tahun 2026 tumbuh 5,61 persen (year on year). Secara rinci pertumbuhan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Indikator Makro Ekonomi Indonesia Triwulan II Tahun 2026

| Indikator | Triwulan II 2025 | Triwulan II 2026 | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Pertumbuhan Ekonomi (y-on-y) | 4,87% | 5,61% | Meningkat |
| PDB ADHB | Rp5.869,5 triliun | Rp6.187,2 triliun | Meningkat |
| PDB ADHK (2010) | Rp3.264,6 triliun | Rp3.447,7 triliun | Meningkat |

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 data sementara

Berdasarkan Tabel 3.1, kondisi makro ekonomi Indonesia pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Perekonomian nasional tumbuh sebesar 5,61 persen (y-on-y), meningkat dibandingkan Triwulan II Tahun 2025 yang sebesar 4,87 persen. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi domestik tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, dinamika geopolitik, dan volatilitas harga komoditas.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut juga tercermin dari meningkatnya nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga berlaku (ADHB), PDB meningkat dari Rp5.869,5 triliun pada Triwulan II Tahun 2025 menjadi Rp6.187,2 triliun pada Triwulan II Tahun 2026. Sementara itu, PDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 meningkat dari Rp3.264,6 triliun menjadi Rp3.447,7 triliun, yang menunjukkan adanya peningkatan volume aktivitas ekonomi secara riil setelah menghilangkan pengaruh perubahan harga.

Secara umum, perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih berada pada kondisi yang cukup kuat. Meningkatnya aktivitas produksi, konsumsi, dan investasi menjadi faktor utama yang menopang pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga mampu menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan ruang bagi pemerintah untuk terus mendorong pembangunan serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dari sisi pengeluaran (expenditure approach), konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Momentum Ramadan dan Hari Raya Idulfitri mendorong peningkatan aktivitas perdagangan, transportasi, akomodasi, dan konsumsi masyarakat. Selain itu, realisasi belanja pemerintah yang dipercepat pada awal tahun juga memberikan stimulus terhadap perekonomian. Distribusi PDB dan pertumbuhan per komponen pengeluaran dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2 Distribusi dan Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran Triwulan II Tahun 2026

| Komponen Pengeluaran | Distribusi dari PDB (%) | Pertumbuhan (y-on-y) (%) |
|---|---|---|
| Konsumsi Rumah Tangga | 53,88 | 5,52 |
| Konsumsi LNPRT | 1,22 | 6,28 |
| Konsumsi Pemerintah | 6,38 | 21,81 |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) | 28,06 | 5,96 |
| Ekspor Barang dan Jasa | 22,42 | 0,90 |
| Impor Barang dan Jasa* | 11,96 | 7,18 |

Sumber ; Badan Pusat Statistik Tahun 2026

Berdasarkan Tabel 3.2, struktur perekonomian Indonesia pada Triwulan II Tahun 2026 masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga dengan distribusi sebesar 53,88 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas konsumsi masyarakat tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Sejalan dengan itu, konsumsi rumah tangga juga tumbuh sebesar 5,52 persen (y-on-y), didukung oleh meningkatnya aktivitas ekonomi selama Ramadan dan Hari Raya Idulfitri serta terjaganya daya beli masyarakat.

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memiliki distribusi terbesar kedua, yaitu 28,06 persen, dengan pertumbuhan sebesar 5,96 persen. Kondisi tersebut mencerminkan masih terjaganya aktivitas investasi, baik pada pembangunan infrastruktur maupun investasi sektor swasta. Sementara itu, konsumsi pemerintah memberikan distribusi sebesar 6,38 persen terhadap PDB, namun mencatat laju pertumbuhan tertinggi sebesar 21,81 persen, terutama dipengaruhi oleh percepatan realisasi belanja pemerintah pada awal tahun anggaran dan pelaksanaan berbagai program prioritas nasional.

Dari sisi sektor eksternal, ekspor barang dan jasa memiliki distribusi sebesar 22,42 persen terhadap PDB dengan pertumbuhan 0,90 persen, menunjukkan bahwa kinerja ekspor masih tumbuh positif meskipun menghadapi perlambatan permintaan global. Di sisi lain, impor barang dan

jasa tercatat memiliki distribusi sebesar 11,96 persen dan tumbuh 7,18 persen, yang mencerminkan meningkatnya kebutuhan bahan baku, barang modal, dan barang konsumsi untuk mendukung aktivitas produksi dan permintaan domestik. Secara keseluruhan, struktur dan pertumbuhan komponen pengeluaran tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia pada Triwulan II Tahun 2026 masih ditopang oleh kuatnya permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga dan investasi, di tengah dinamika perekonomian global yang masih penuh ketidakpastian.

Kondisi perekonomian Indonesia pada Triwulan II Tahun 2026 yang tumbuh sebesar 5,61 persen (year-on-year) menunjukkan bahwa fundamental ekonomi nasional masih cukup kuat di tengah ketidakpastian perekonomian global. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, percepatan belanja pemerintah, dan meningkatnya investasi, sementara kinerja sektor eksternal masih menghadapi tantangan akibat perlambatan ekonomi dunia serta melemahnya permintaan ekspor dari beberapa negara mitra dagang utama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada awal tahun 2026 masih lebih banyak ditopang oleh permintaan domestik dibandingkan sektor eksternal.

Menyikapi perkembangan tersebut, Pemerintah Indonesia pada Tahun 2026 mengarahkan kebijakan ekonomi pada upaya menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat transformasi ekonomi nasional. Melalui kebijakan fiskal yang ekspansif namun tetap terukur, pemerintah mempercepat realisasi belanja negara untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada awal tahun. Percepatan belanja tersebut tercermin dari tingginya pertumbuhan konsumsi pemerintah pada Triwulan II Tahun 2026, yang antara lain didorong oleh pembayaran gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) aparatur negara, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, pembangunan infrastruktur, penguatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta penyaluran berbagai program perlindungan sosial. Kebijakan ini berperan dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi domestik.

Selain memperkuat sisi permintaan, pemerintah juga melanjutkan kebijakan untuk mendorong investasi sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang. Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 5,96 persen pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan masih terjaganya kepercayaan pelaku usaha terhadap prospek perekonomian nasional. Untuk mempertahankan momentum tersebut, pemerintah terus memperbaiki iklim investasi melalui penyederhanaan regulasi, percepatan implementasi perizinan berusaha berbasis risiko, pembangunan kawasan industri, serta penguatan program hilirisasi sumber daya alam. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah industri nasional, memperluas kesempatan kerja, dan mengurangi ketergantungan terhadap ekspor komoditas mentah.

Di sisi eksternal, perlambatan pertumbuhan ekspor menjadi salah satu tantangan utama pada Triwulan II Tahun 2026. Melemahnya permintaan global, ketidakpastian geopolitik, dan fluktuasi harga komoditas menyebabkan pertumbuhan ekspor relatif terbatas. Oleh karena itu, pemerintah terus memperluas diversifikasi pasar ekspor, mempercepat penyelesaian berbagai perjanjian perdagangan internasional, meningkatkan daya saing industri nasional, serta mendorong peningkatan ekspor produk manufaktur dan produk bernilai tambah tinggi. Strategi tersebut menjadi bagian dari transformasi ekonomi nasional agar struktur ekspor Indonesia tidak lagi bergantung pada komoditas primer.

Dari sisi stabilitas makro ekonomi, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga inflasi tetap terkendali, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah,

serta mempertahankan kepercayaan investor terhadap perekonomian nasional. Sinergi kebijakan tersebut menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah dinamika pasar keuangan global. Stabilitas makroekonomi yang terjaga memberikan ruang bagi dunia usaha untuk terus melakukan ekspansi dan mendukung penciptaan lapangan kerja.

Arah kebijakan ekonomi Tahun 2026 juga selaras dengan prioritas pembangunan nasional yang menitikberatkan pada penguatan ketahanan pangan, ketahanan energi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan hilirisasi industri, transformasi digital, serta pengembangan ekonomi hijau. Berbagai kebijakan tersebut tidak hanya ditujukan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi pertumbuhan ekonomi yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

3.1.2. Kondisi ekonomi Sumatera Barat Triwulan II 2026

Perekonomian Provinsi Sumatera Barat pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan kinerja yang tetap positif di tengah dinamika perekonomian global dan nasional. Meskipun masih dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi dunia yang dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, serta meningkatnya risiko geopolitik, aktivitas ekonomi di Sumatera Barat tetap mampu tumbuh dengan didukung oleh meningkatnya permintaan domestik, membaiknya aktivitas sektor jasa, serta pulihnya kegiatan pariwisata dan perdagangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur perekonomian daerah masih memiliki daya tahan yang cukup baik terhadap berbagai tekanan eksternal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, perekonomian Sumatera Barat pada Triwulan II Tahun 2026 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 92,96 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai Rp53,49 triliun. Secara tahunan (year-on-year), ekonomi Sumatera Barat tumbuh sebesar 5,02 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan beberapa tahun terakhir dan mencerminkan terjaganya aktivitas ekonomi daerah. Secara triwulanan (quarter-to-quarter), ekonomi Sumatera Barat juga mengalami pertumbuhan sebesar 3,15 persen dibandingkan Triwulan IV Tahun 2025, yang mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas ekonomi pada awal tahun.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat didorong oleh meningkatnya aktivitas pada sektor tersier, terutama Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 17,77 persen. Tingginya pertumbuhan sektor ini dipengaruhi oleh meningkatnya mobilitas masyarakat selama Ramadan dan Hari Raya Idulfitri, meningkatnya kunjungan wisatawan, serta pulihnya aktivitas usaha jasa akomodasi, restoran, dan perdagangan. Selain itu, lapangan usaha Jasa Lainnya tumbuh sebesar 9,10 persen, sedangkan Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh sebesar 7,94 persen, yang menunjukkan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi berbasis jasa di Provinsi Sumatera Barat.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi daerah masih ditopang oleh permintaan domestik yang tetap kuat. Meningkatnya konsumsi rumah tangga selama periode Ramadan dan Idulfitri menjadi salah satu faktor utama yang menjaga pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, meningkatnya aktivitas investasi dan belanja pemerintah turut memberikan dorongan terhadap aktivitas ekonomi pada Triwulan II Tahun 2026. Di sisi lain, aktivitas perdagangan luar daerah juga menunjukkan perkembangan yang positif, tercermin dari meningkatnya ekspor barang dan jasa. Namun demikian, peningkatan impor barang dan jasa yang cukup tinggi juga menunjukkan masih besarnya kebutuhan terhadap bahan baku dan barang modal untuk mendukung aktivitas produksi di daerah.

Apabila dibandingkan dengan perkembangan ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 5,61 persen, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sebesar 5,02 persen masih berada sedikit di bawah rata-rata nasional. Meskipun demikian, capaian tersebut tetap menunjukkan bahwa perekonomian daerah berada dalam kondisi yang stabil dan mampu mengikuti tren pemulihan ekonomi nasional. Kontribusi Provinsi Sumatera Barat terhadap perekonomian Pulau Sumatera tercatat sebesar 6,83 persen, sedangkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional mencapai 1,51 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Sumatera Barat tetap memiliki peran yang cukup penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan Sumatera.

Secara keseluruhan, kondisi perekonomian Provinsi Sumatera Barat pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan arah yang positif dengan didukung oleh meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat, pertumbuhan sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata, serta membaiknya investasi. Meskipun demikian, pemerintah daerah masih perlu mengantisipasi berbagai tantangan yang berasal dari perlambatan ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, serta ketidakpastian perdagangan internasional. Oleh karena itu, penguatan sektor-sektor unggulan daerah, peningkatan nilai tambah komoditas, pengembangan pariwisata, pemberdayaan usaha mikro, serta peningkatan investasi menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah pada triwulan-triwulan berikutnya.

Perkembangan perekonomian Provinsi Sumatera Barat pada Triwulan II Tahun 2026 yang tumbuh sebesar 5,02 persen (year-on-year) menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah masih berada pada jalur yang positif. Pertumbuhan tersebut didukung oleh meningkatnya konsumsi masyarakat, membaiknya kinerja sektor perdagangan, transportasi, akomodasi dan makan minum, serta meningkatnya aktivitas investasi. Meskipun demikian, perekonomian Sumatera Barat masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, perubahan iklim yang memengaruhi sektor pertanian, serta perlunya peningkatan daya saing produk daerah. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam merumuskan kebijakan ekonomi Tahun 2026 agar mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan potensi ekonomi daerah. Kebijakan pembangunan daerah diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan, penguatan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah komoditas unggulan, pengembangan industri pengolahan, serta peningkatan daya saing usaha mikro. Di samping itu, pemerintah daerah juga terus mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah guna mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kebijakan ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 diarahkan untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah sekaligus memperkuat transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan, penguatan investasi, pengembangan usaha mikro, peningkatan kualitas infrastruktur, serta pengembangan pariwisata dan industri berbasis potensi lokal. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.

### 3.1.3. Kondisi Ekonomi Daerah Triwulan II 2026

Perkembangan perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota pada Triwulan II Tahun 2026 secara umum menunjukkan kondisi yang relatif stabil sejalan dengan membaiknya perekonomian nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Momentum pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat sebesar 5,02 persen memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi di daerah, terutama melalui peningkatan konsumsi masyarakat, aktivitas perdagangan, mobilitas penduduk, serta meningkatnya permintaan terhadap berbagai komoditas unggulan daerah. Meskipun demikian, perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota masih menghadapi tantangan berupa ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi harga komoditas pertanian, serta perubahan kondisi iklim yang berpengaruh terhadap produktivitas sektor primer.

Struktur perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat sekaligus penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten. Selain sektor pertanian, aktivitas ekonomi juga ditopang oleh sektor perdagangan besar dan eceran, konstruksi, industri pengolahan skala kecil dan menengah, serta jasa-jasa yang berkembang seiring meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah masih sangat dipengaruhi oleh kinerja sektor primer, sehingga stabilitas produksi dan harga komoditas pertanian menjadi faktor penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada Triwulan II Tahun 2026, meningkatnya konsumsi masyarakat selama bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri memberikan dorongan terhadap aktivitas perdagangan, transportasi, usaha mikro, serta sektor jasa lainnya. Peningkatan mobilitas masyarakat turut mendorong berkembangnya kegiatan perdagangan dan usaha kuliner, sementara permintaan terhadap hasil pertanian dan produk olahan lokal juga mengalami peningkatan. Kondisi tersebut memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi masyarakat, khususnya pada sentra-sentra perdagangan dan kawasan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Di sisi lain, sektor pertanian tetap menghadapi tantangan berupa fluktuasi harga komoditas, perubahan pola musim, serta kebutuhan peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani. Oleh karena itu, penguatan sektor pertanian melalui peningkatan kualitas infrastruktur irigasi, penerapan teknologi budidaya, pengembangan hilirisasi hasil pertanian, serta peningkatan akses pemasaran menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pendapatan masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Pengembangan komoditas unggulan seperti padi, jagung, hortikultura, serta peternakan juga menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota.

Selain sektor pertanian, pengembangan sektor pariwisata berbasis alam, budaya, dan geopark, serta penguatan usaha mikro dan ekonomi kreatif, menjadi salah satu peluang yang dapat mendorong diversifikasi struktur ekonomi daerah. Potensi destinasi wisata seperti Lembah Harau, Kelok Sembilan, serta berbagai objek wisata alam dan budaya lainnya memiliki peran strategis dalam meningkatkan kunjungan wisatawan, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat apabila didukung oleh infrastruktur, promosi, dan kualitas pelayanan yang memadai.

Dengan demikian arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Tahun 2026 akan didasarkan kepada optimalisasi potensi yang ada meliputi:

1. Penguatan PLUT sebagai pusat transformasi usaha mikro dan wirausaha baru.
2. Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat, khususnya para pemuda yang merupakan angkatan kerja potensial.
3. Fasilitasi bantuan modal dan akses pendanaan bagi usaha mikro yang sudah terbukti berhasil dan memiliki potensi untuk berkembang.
4. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.
5. Mendorong diversifikasi produk dan pasar.
6. Mendorong pelaku bisnis untuk diversifikasi produk dan pasar ekspor mereka. Ini dapat dilakukan melalui penyediaan insentif atau dukungan finansial bagi perusahaan yang berinovasi dan memperluas keberadaannya di berbagai pasar.
7. Pengembangan database dan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis.
8. Mendukung peningkatan digitalisasi layanan perbankan guna memudahkan nasabah menyimpan dan mengelola dana secara mandiri.
9. Menyusun kebijakan/ regulasi dalam mendukung penjaminan kredit perbankan serta subsidi bunga terutama bagi para pelaku usaha mikro.
10. Integrasi konektivitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensial.
11. Pengembangan kawasan pariwisata sejarah PDRI di Koto Tinggi.
12. Inovasi pengembangan diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara.
13. Penguatan integrasi pengembangan pariwisata halal dengan industri pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan.
14. Peningkatan Produktivitas SDA dan pengembangan industri kreatif serta hilirisasi SDA.
15. Koordinasi untuk penguatan pelaku industri kreatif melalui transfer pengetahuan dan skills dengan melibatkan aktor-aktor hexahelix.
16. Sinkronisasi kebijakan ekonomi kreatif dengan program lintas sektor.

Sehubungan kondisi di atas, berkaitan dengan indikator makro ekonomi sebagai tolok ukur kondisi ekonomi daerah, diproyeksikan sama dengan proyeksi awal di RKPD 2026, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3
Proyeksi Indikator Kinerja Makro pada RPJMD, RKPD 2026
& Perubahan RKPD 2026

| No | Indikator Kinerja Makro | Target | | | Keterangan (Kenaikan/Penurunan Target/Tetap) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | RPJMD | RKPD 2026 | Perubahan RKPD 2026 | |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | 5,68 | 5,68 | 5,68 | Tetap |
| 2 | Tingkat Kemiskinan | 5,88 | 5,88 | 5,88 | Tetap |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka | 3,65 | 3,65 | 3,65 | Tetap |
| 4 | Indeks Pembangunan Manusia | 73,05 | 73,05 | 73,05 | Tetap |

| No | Indikator Kinerja Makro | Target | | | Keterangan (Kenaikan/Penurunan Target/Tetap) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | RPJMD | RKPD 2026 | Perubahan RKPD 2026 | |
| - | Angka Harapan hidup (tahun) | 73,79 | 73,79 | 73,79 | Tetap |
| - | Harapan Lama Sekolah (tahun) | 13,48 | 13,48 | 13,48 | Tetap |
| - | Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) | 8,26 | 8,26 | 8,26 | Tetap |
| - | Pengeluaran Per Kapita (Rp ribu) | 10.972 | 10.972 | 10.972 | Tetap |
| 5 | Gini Ratio | 0,218 | 0,218 | 0,218 | Tetap |

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Lima Puluh Kota Tahun 2026*

Indikator Kinerja Makro pada perubahan RKPD 2026 sama dengan target pada RKPD 2026 karena target tersebut sudah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

## 3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2026 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2025-2029 di tahun kedua, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang tersedia untuk dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN dan sumber-sumber lainnya.

Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) merupakan salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah, yang diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. Kesinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan oleh bagaimana kemandirian dan kemampuan pembiayaan yang tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Perkembangan DOFD Kabupaten Lima Puluh Kota periode tahun 2021-2025, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.4
Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021-2025

| Tahun | Pendapatan Asli Daerah (Rp) | Total Pendapatan Daerah (Rp) | DOFD (%) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 79.852.144.928,96 | 1.260.792.546.305,96 | 6,33 |
| 2022 | 82.986.337.456,64 | 1.225.539.476.814,64 | 6,77 |
| 2023 | 102.021.562.494,68 | 1.262.130.918.657,68 | 8,08 |
| 2024 | 103.887.436.990,99 | 1.311.095.932.506,99 | 7,92 |
| 2025 | 140.241.668.028,44 | 1.320.593.986.932,44 | 10,62 |

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Lima Puluh Kota Tahun 2026*

Dari Tabel 3.4 di atas tampak bahwa DOFD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025 masih di bawah 10 persen. Pada tahun 2025 DOFD meningkat menjadi 10,62 persen. Besaran DOFD ini menunjukkan masih sangat rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi pendapatan daerah. Ini menjadi catatan penting bagi

Kabupaten Lima Puluh Kota untuk terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Keterbatasan fiskal yang dialami Kabupaten Lima Puluh Kota yang ditandai dengan ketergantungan daerah yang sangat besar pada pendanaan dari Pemerintah Pusat, mengharuskan Pemerintah Daerah memberikan perhatian yang besar untuk upaya penguatan fiskal. Tanggung jawab ini tidak hanya diemban oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama atau lintas Perangkat Daerah. Upaya-upaya seperti digitalisasi Pendapatan Asli Daerah seperti QRIS SPPT, pemutakhiran basis pajak dan retribusi daerah, monetisasi aset daerah, optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan pengembangan investasi berbasis potensi daerah harus menjadi bagian kebijakan fiskal daerah yang komprehensif.

Dalam konteks daerah maka penguatan perlu dikaitkan dengan karakter daerah yang tentunya dengan dukungan pengembangan investasi, pemanfaatan lahan yang telah clean and clear, penguatan land bank, perubahan zoning yang mendukung investasi, serta penyusunan usulan proyek-proyek strategis yang dapat diajukan ke kementerian/lembaga agar sebagian kebutuhan pembangunan dapat didorong melalui APBN dan skema kerja sama lainnya.

Di sisi belanja, Pemerintah Daerah harus menggunakan pendekatan pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan penganggaran berbasis kinerja. Pemerinatahh Daerah harus mengalokasikan belanja secara cermat, efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan keterbatasan fiskal yang ada. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang konkrit dan tidak absurd untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Perumusan arah kebijakan keuangan daerah untuk Perubahan RKPD Tahun 2026 ini, juga memperhatikan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 audited, SILPA adalah sebesar Rp. 50.449.554.115,17 sedangkan SILPA yang tertuang pada APBD Tahun 2026 adalah sebesar Rp.92.021.599.185,00 yang diasumsikan sebagai dana bebas, sehingga terdapat perbedaan asumsi SILPA sebesar Rp 41.572.045.069,83. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan, sehingga Tim Anggaran pemerintah Daerah harus melakukan rasionalisasi belanja untuk menutupi kekurangan SILPA riil dari Silpa yang diasumsikan pada APBD awal. Apalagi dari total Silpa riil sebesar Rp 50.449.554.115,17 ternyata tidak saja berasal dari dana bebas tetapi juga dari dana yang diarahkan antara lain dari DAK, BLUD dan BOS yang harus dimanfaatkan kembali sesuai peruntukannya.

Di samping itu arah kebijakan keuangan juga dilakukan menyikapi perubahan alokasi Dana Transfer sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus dan Penyaluran Kurang Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2024 bagi Daerah Tertentu di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat. Keputusan Menteri Keuangan merinci tambahan

Transfer ke Daerah untuk masing-masing daerah di tiga provinsi tersebut di atas sebagai dukungan dana dari pemerintah pusat untuk daerah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera Bagian Utara, dimana untuk Kabupaten Lima Puluh Kota ada penambahan Transfer ke Daerah dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil sebesar Rp 135.634.797.000. Di sisi lain berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 tahun 2026 Tentang Pengelolaan Dana Desa, pagu Dana Desa untuk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 adalah sebesar Rp 27.823.425.000, artinya terdapat pengurangan pagu sebesar Rp 46.346.032.000. Secara total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami kenaikan sebesar Rp 89.288.765.000,00

Untuk Dana Transfer antar Daerah, dengan keluarnya Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/023/PPD-Bapenda/2026 Tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 Tanggal 13 Mei 2026, terdapat kenaikan proyeksi penerimaan Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp 20.077.908.953,00. Di samping itu berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900.1.1/4277/SJ Tanggal 21 Mei 2026 hal Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Terdampak Bencana, Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk daerah penerima Bantuan Keuangan dari Kota Payakumbuh sebesar Rp 1.000.000.000,00 yang dicatat pada pos Pendapatan Bantuan Keuangan. Total penambahan Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah Rp 21.077.908.953,00

Perubahan-perubahan dimaksud di atas juga menyebabkan perubahan dan pergeseran pada belanja daerah. Berikut akan diuraikan perubahan-perubahan yang terjadi secara umum pada penganggaran untuk Perubahan RKPD Tahun 2026.

Tabel 3.5
Rencana Pendapatan dan Belanja Tahun 2026

| No | Uraian | RKPD 2026 | APBD 2026 | Perubahan RKPD 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rencana Pendapatan | 1.360.521.575.144,00 | 1.162.703.570.173,00 | 1.273.070.244.126,00 |
| 2 | Rencana Belanja | 1.360.521.575.144,00 | 1.254.725.169.358,00 | 1.323.519.798.241,17 |

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Lima Puluh Kota Tahun 2026*

Pada RKPD Tahun 2026, total pendapatan direncanakan sebesar Rp. 1.360.521.575.144,00. Sedangkan pada APBD Tahun 2026, target pendapatan turun menjadi sebesar Rp.1.162.703.570.173,00 karena penyesuaian alokasi dana transfer. Pada perubahan RKPD 2026, pendapatan direncanakan sebesar Rp.1.273.070.244.126,00. Target pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp. 110.366.673.953,00 dibandingkan APBD Tahun 2026, sebagai akibat penyesuaian alokasi Pendapatan Transfer berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus dan Penyaluran Kurang Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2024 bagi daerah Tertentu di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat dan penyesuaian pagu Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 tahun 2026 Tentang Pengelolaan Dana Desa sebagimana telah dijelaskan di atas.

Perubahan proyeksi pendapatan juga terjadi pada pos Pendapatan Transfer Antar Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/023/PPD-Bapenda/2026 Tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 Tanggal 13 Mei 2026 serta surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900.1.1/4277/SJ Tanggal 21 Mei 2026 hal Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Terdampak Bencana dimana Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi penerima Bantuan Keuangan dari Kota Payakumbuh sebagaimana ulasan sebelumnya.

Dari sisi belanja pada RKPD Tahun 2026, total belanja direncanakan sebesar Rp. 1.360.521.575.144,00. Pada APBD Tahun 2026, belanja dianggarkan turun menjadi sebesar Rp. 1.254.725.169.358,00, sementara untuk Perubahan RKPD 2026 dianggarkan sebesar Rp. 1.323.519.798.241,17 atau naik sebesar Rp.68.794.628.883,00 sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 dan peraturan-peraturan yang mempengaruhi alokasi pendapatan sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Selanjutnya akan diuraikan lebih lengkap terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan baik kebijakan maupun besaran yang direncanakan untuk perubahan RKPD Tahun 2026, sebagai berikut:

### 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah; 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan dari Pengembalian Hibah.

Perubahan perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2026 dihitung berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai dan sesuai dengan potensi pendapatan senyatanya untuk setiap sumber pendapatan daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli daerah dihitung dengan memperhitungkan potensi pendapatan, realisasi tahun sebelumnya dan perkembangan realisasi terakhir.
2. Dana perimbangan diproyeksi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Perkembangan realisasi pendapatan daerah pada lima tahun tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2021-2025

| Uraian | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Rata-rata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Pertumbuhan |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 79.852.144.928,96 | 82.962.487.456,64 | 102.016.528.328,68 | 103.862.875.680,99 | 140.241.668.028,44 | 15,12 |
| Pajak Daerah | 21.409.261.694,00 | 26.017.229.440,00 | 33.726.801.369,44 | 32.888.641.643,00 | 61.669.681.814,00 | 30,28 |
| Retribusi Daerah | 2.975.121.922,00 | 3.100.697.678,00 | 2.653.763.935,50 | 38.434.136.973,00 | 46.217.129.475,00 | 98,53 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 3.718.416.419 | 4.439.285.064,00 | 4.409.098.147,00 | 4.828.157.875,00 | 4.794.398.220,00 | 6,56 |
| Lain-lain PAD yang Sah | 51.749.344.893,96 | 49.405.275.274,64 | 61.226.864.876,74 | 27.711.939.189,99 | 27.560.458.519,44 | (14,57) |
| PENDAPATAN TARNSFER | 1.110.702.712.333,00 | 1.128.038.625.588,00 | 1.157.029.256.763,00 | 1.207.208.495.516,00 | 1.174.495.981.630,00 | 1,41 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.054.536.792.742,00 | 1.055.370.711.812,00 | 1.099.848.116.525,00 | 1.143.303.052.012,00 | 1.122.455.480.033,00 | 1,57 |
| Pendapatan | 56.165.919.591,00 | 72.667.913.776,00 | 57.181.140.238,00 | 63.905.443.504,00 | 52.040.501.597,00 | (1,89) |

| Uraian | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Rata-rata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Pertumbuhan |
| Transfer Antar Daerah | | | | | | |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | 70.237.689.044,00 | 14.514.513.770,00 | 3.080.099.400,00 | - | 5.856.337.274,00 | (46,26) |
| TOTAL PENDAPATAN | 1.260.792.546.305,96 | 1.225.515.626.814,64 | 1.262.125.884.491,68 | 1.311.071.371.196,99 | 1.320.593.986.932,44 | 1,17 |

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Lima Puluh Kota Tahun 2026*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam lima tahun terakhir pendapatan daerah tumbuh dengan persentase kecil yaitu rata-rata 1,17 persen pertahun. Pendapatan transfer tumbuh dengan persentase sedikit lebih tinggi yaitu 1,41 persen per tahun, namun dua tahun terakhir pendapatan transfer mengalami tren penurunan. Pendapatan Asli Daerah tumbuh cukup bagus yaitu rata-rata 15,12 persen per tahun, namun karena kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah kecil, pertumbuhan PAD tidak begitu berpengaruh terhadap pertumbuhan pendaptan daerah.

Menyikapi tren pendapatan Transfer yang cendrung berkurang, Pemerintah Daerah harus meningkatkan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Permasalahan dalam pengelolaan pendapatan daerah di kabupaten Lima Puluh Kota antara lain, belum tergalinya semua potensi PAD, basis data pajak dan retribusi yang tidak akurat dan masih kuarang kualitas Sumber Daya Manusia. Sementara kendala yang dihadapi di lapangan antara lain masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajibannya.

Untuk memaksimalkan realisasi Pendapatan Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota, dirumuskan arah kebijakan pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan potensi yang ada untuk meningkatkan rasio PAD terhadap total pendapatan.
2. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.
3. Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya.
4. Meningkatkan tata kelola pungutan retribusi, terutama untuk tempat pelelangan ikan dan sinkronisasi kebijakan dengan PNBP agar tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi.
5. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuia kondisi wilayah.
6. Meningkatkan koordinasi secara sinergi dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, PD pemungut serta Pemerintahan Nagari, BPN, PPAT dan pihak lainnya.
7. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
8. Meningkatkan pengelolaan aset daerah melalui penjualan barang milik daerah yang tidak bermanfaat.
9. Melaksanakan pembinaan dan penertiban terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban serta memberikan intervensi terhadap objek pajak berupa pengaturan tarif pajak atau kebijakan lain yang mempengaruhi pemungutan pajak.
10. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
11. Intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
12. Peningkatan pengawasan internal terhadap pelaksanaan pemungutan.
13. Optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD);
14. Peningkatan penerimaan DBH PPh dan PBB;

15. Pengembangan investasi berbasis asset pemerintah daerah;
16. Digitalisasi sistim penerimaan daerah;
17. Peningkatan kualitas SDM dengan pendidikan dan pelatihan.

Menyikapi kebijakan pusat terkait pengalokasian Tambahan Transfer ke Derah dan pengalokasian belanja Bantuan Presiden yang telah diterima pada akhir tahun 2025, Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan empat kali Pergeseran atau Perubahan Penjabaran Peraturan Bupati Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Tahun 2026, sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 11 Tahun 2026 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026. Pergeseran anggaran pertama ini menampung Tambahan Transfer ke Daerah sebesarRp 135.634.797.000,00 dan mengalokasikan pada Belanja Tidak Terduga.
2. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026. Pergeseran kedua ini mengalokasikan Bantuan Presiden ke program dan Kegiatan perangkat daerah.
3. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2026 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026. Pergeseran ketiga ini mengalokasikan Tambahan Transfer ke Daerah dari Belanja Tidak Terduga ke program dan kegiatan Perangkat Daerah.
4. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 22 Tahun 2026 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026. Pergeseran keempat ini mengalokasikan belanja yang bersumber dari SILPA DBH Sawit sampai tahun 2024 dan Bantuan Keuangan dari Kota Payakumbuh.

Perkembangan realisasi, target, dan rencana perubahan pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7.
Realisasi, dan Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2026 (Rupiah)

| NO | Uraian | Realisasi | | RKPD 2026 | APBD 2026 | Rencana Pada RKPD Perubahan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2025 | | | |
| 4 | PENDAPATAN | 1.311.095.932.506,99 | 1.319.466.064.807,00 | 1.360.521.575.144,00 | 1.162.703.570.173,00 | 1.273.070.244.126,00 |
| 4.1 | Pendapatan Asli Daerah | 103.887.436.990,99 | 139.163.745.903,00 | 140.462.790.989,00 | 150.261.601.018,00 | 150.261.601.018,00 |
| 4.1.1 | Pajak Daerah | 32.888.914.143,00 | 61.671.663.207,00 | 62.453.461.306,00 | 70.134.228.233,00 | 70.134.228.233,00 |
| 4.1.2 | Retribusi Daerah | 38.434.136.973,00 | 42.885.587.389,00 | 41.051.601.755,00 | 67.730.234.275,00 | 67.730.234.275,00 |
| 4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 4.828.157.875,00 | 4.794.398.220,00 | 5.513.273.477,00 | 5.513.273.477,00 | 5.513.273.477,00 |
| 4.1.4 | Lain-lain PAD | 27.736.227.999,99 | 29.812.107.087,00 | 31.444.454.451,00 | 6.883.865.033,00 | 6.883.865.033,00 |
| 4.2 | Pendapatan Transfer | 1.207.208.495.516,00 | 1.174.445.981.630,00 | 1.220.058.784.155,00 | 1.012.441.969.155,00 | 1.122.808.643.108,00 |
| 4.2.1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.143.303.052.012,00 | 1.121.078.686.933,00 | 1.176.167.519.000,00 | 968.550.704.000,00 | 1.057.839.469.000,00 |
| | 1. Dana Perimbangan | 1.051.489.428.012,00 | 945.923.166.896,00 | 1.089.537.980.000,00 | 894.381.197.000,00 | 1.030.015.994.000,00 |
| | a) Dana Transfer Umum | 700.950.811.428,00 | 794.989.420.037,00 | 803.610.829.000,00 | 659.829.716.000,00 | 795.464.513.000,00 |
| | 1) DBH | 29.065.598.000,00 | 28.819.074.000,00 | 27.382.245.000,00 | 11.544.117.000,00 | 38.089.390.000,00 |
| | 2) DAU | 754.173.082.348,00 | 766.170.346.037,00 | 776.228.584.000,00 | 648.285.599.000,00 | 757.375.123.000,00- |
| | DAU yang tidak ditentukan penggunaannya | 625.809.097.000,00 | 655.777.595.750,00 | 629.953.136.000,00 | 627.815.193.000,00 | 736.904.717.000,00 |
| | DAU yang ditentukan penggunaannya | 128.363.985.348,00 | 110.392.750.287,00 | 146.275.448.000,00 | 20.470.406.000,00 | 20.470.406.000,00 |
| | b) Dana Transfer Khusus | 268.250.747.664,00 | 244.972.355.468,00 | 285.927.151/000.-. | 234.551.481.000,00 | 234.551.481.000,00 |
| | DAK Fisik | 43.139.289.223,00 | 14.128.857.611,00 | 50.443.326.000,00 | 1.038.118.000,00 | 1.038.118.000,00 |

| NO | Uraian | Realisasi | | RKPD 2026 | APBD 2026 | Rencana Pada RKPD Perubahan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2025 | | | |
| | DAK Non Fisik | 225.111.458.441,00 | 230.843.497.857,00 | 235.482.825.000,00 | 233.513.363.000,00 | 233.513.363.000,00 |
| | 2. Dana Desa | 84.689.970.000,00 | 82.493.704.528,00 | 826.629.539.000,00 | 74.169.507.000,00 | 27.823.475.000,00 |
| | 3. Insentif Fiskal | 7.123.654.000, | | 7.123.654.000,00 | - | - |
| 4.2.2 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 63.905.443.504,00 | 51.990.501.597,00 | 43.891.265.155,00 | 43.891.265.155,00 | 64.969.174.108,00 |
| | Pendapatan Bagi Hasil | 63.905.443.504,00 | 51.595.501.597,00 | 43.891.265.155,00 | 43.891.265.155,00 | 63.969.174.108,00 |
| | Bantuan Keuangan | | 395.000.000,00 | - | | 1.000.000.000,00 |
| 4.3 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | | 5.856.337.274,00 | | | |
| | Hibah | | - | | | - |
| | Dana Darurat | - | 4.000.000.000,00 | - | | - |
| | 3. Pendapatan Atas Pengembalian Hibah | | 1.856.337.274,00 | | | |
| | Jumlah Pendapatan | 1.311.095.932.506,99 | 1.319.466.064.807,00 | 1.360.521.575.144,00 | 1.162.703.570.173,00 | 1.273.070.244.126,00 |

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2026*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan yang cukup signifikan target pendapatan daerah Tahun 2026 dibandingkan dengan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya. Realisasi Pendapatan daerah dua tahun terakhir (2024-2025) memperlihatkan trend meningkat. Sementara pada tahun 2026 terjadi penurunan yang disebabkan oleh penurunan alokasi Transfer ke Daerah. Pada perubahan RKPD diproyeksikan meningakat dari Rp 1.273.070.244.126,00 menjadi Rp 1.346.447.016.702,00 atau naik sebesar Rp 110.366.673.953,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Transfer berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus dan Penyaluran Kurang Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2024 bagi daerah Tertentu di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat meningkat sebesar Rp 135.634.797.000,00
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 tahun 2026 Tentang Pengelolaan Dana Desa, terdapat penyesuaian pagu Dana Desa menjadi 27.823.475.000,00, artinya mengalami penurunan sebesar Rp 46.346.032.000 dari pagu awal.
3. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/023/PPD-Bapenda/2026 Tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 Tanggal 13 Mei 2026 terdapat kenaikan proyeksi penerimaan Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp 20.077.908.953.
4. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900.1.1/4277/SJ Tanggal 21 Mei 2026 hal Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Terdampak Bencana dimana Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi penerima Bantuan Keuangan dari Kota Payakumbuh sebesar Rp 1.000.000.000,-

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah komponen pengeluaran pemerintah daerah, yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Disamping itu juga membiayai penyelenggaraan organisasi perangkat daerah yang bersifat mendukung dan menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan, organisasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi kewilayahan, serta organisasi perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik.

Sebagai salah satu entitas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kebijakan belanja dalam APBD dipengaruhi pula oleh kebijakan yang berskala nasional dari pemerintah pusat dan kebijakan yang masuk dalam prioritas pembangunan provinsi Sumatera Barat. Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian

Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus dan Penyaluran Kurang Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2024 bagi daerah Tertentu di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat, sebagai dukungan dana dari pemerintah pusat untuk daerah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera Bagian Utara, Kabupaten Lima Puluh Kota mendapat tambahan dana Transfer Pemerintah Pusat yang harus digunakan sesuai ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ Tentang Penyesuaian Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026 Dalam APBD Bagi Daerah Terdampak Bencana di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat. Ketentuan dari SE Mendagri ini menjadi bagian dari Kebijakan Belanja Kabupaten Lima Puluh Kota.

Secara lengkap Kebijakan Belanja Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

1. Mengalokasikan belanja untuk pemenuhan belanja wajib yang ditentukan oleh perundang-undangan meliputi:
   a. Alokasi anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari belanja APBD
   b. Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.
   c. Alokasi belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
   d. Alokasi belanja wajib dari penggunaan hasil penerimaan Pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya, meliputi:
      - Hasil penerimaan Opsen PKB, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
      - Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
      - Hasil penerimaan Pajak Rokok bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.
      - Hasil penerimaan Pajak Air Tanah, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi: penanaman pohon; pembuatan lubang atau sumur resapan; pelestarian hutan atau pepohonan; dan pengelolaan limbah.
   e. Alokasi belanja wajib untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa bagi Daerah yang memiliki Desa/Nagari sebesar 10 persen dari Dana Transfer Umum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 (abaikan bila tidak memiliki desa/nagari).
2. Alokasi anggaran yang memadai dan berkelanjutan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada setiap layanan di Perangkat Daerah terkait sesuai peraturan perundang- undangan.
3. Alokasi anggaran yang memadai untuk pengawasan oleh APIP pada Inspektorat sebagaimana amanat Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua KPK dan Kepala BPKP Nomor 11 Tahun 2024, Nomor 700.1/3013/SJ dan Nomor Hk.01.00/SE.3/K/D3/2024 tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

4. Alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah di luar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan
5. Mengalokasikan belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kebutuhan satu tahun.
6. Memprioritaskan alokasi belanja untuk kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas nasional, antara lain :
   a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan
   b. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem
   c. Pengendalian inflasi di daerah
   d. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah
   e. Dukungan swasembada pangan
   f. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi Usaha Mikro
   g. Sekolah rakyat
   h. Koperasi Merah Putih
   i. Makan Bergizi Gratis
7. Mengalokasikan Tambahan Transfer ke Daerah berdasarkan KMK No. 59 Tahun 2026 untuk :
   a. Penyediaan anggaran untuk kebutuhan prabencana.
   b. Penyediaan anggaran untuk tanggap darurat bencana.
   c. Penyediaan anggaran untuk pascabencana.
   d. Penyediaan anggaran untuk menyalurkan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues sebesar Rp 1.000.000.000 sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900.1.1/4277/SJ Tanggal 21 Mei 2026 hal Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Terdampak Bencana.
8. Mengalokasikan belanja yang berasal dari Bantuan Keuangan dari Kota Payakumbuh untuk mitigasi dan rehabilitasi rekonstruksi dalam rangka peningkatan fungsi pelayanan publik.
9. Mengalokasikan belanja untuk pendanaan keikutsertaan Kabupaten Lima Puluh Kota pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 dan untuk mendukung tugas Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai tuan rumah pelaksanaan cabang olahraga Pencak Silat dan Menembak.
10. Mengalokasikan belanja untuk kegiatan-kegiatan penting daerah dan OPD yang belum terakomodir pada APBD Tahun 2026 seperti MTQ Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota.
11. Mengalokasikan belanja Hibah untuk Organisasi Kemasyarakatan.
12. Menganggarkan kembali SiLPA Tahun 2025 yang berasal dari sumber dana yang telah ditentukan penggunaannya.
13. Mengalokasikan belanja untuk mendukung optimalisasi potensi ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota, antara lain dukungan dana untuk kegiatan :
    a. Penguatan PLUT sebagai pusat transformasi usaha mikro dan wirausaha baru.
    b. Pengembangan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat, khususnya para pemuda yang merupakan angkatan kerja potensial.
    c. Fasilitasi bantuan modal dan akses pendanaan bagi usaha mikro
    d. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.

e. Pengembangan database dan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis.
f. Mendukung peningkatan digitalisasi layanan perbankan guna memudahkan nasabah menyimpan dan mengelola dana secara mandiri.
g. Integrasi konektivitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensi dan pengembangan potensi wisata

14. Pengalokasian belanja berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis.
15. Rencana belanja dilakukan secara cermat, rasional, terukur dan sesuai dengan potensi pendapatan daerah senyatanya
16. Mengalokasikan belanja untuk pembayaran utang jangka pendek sesuai dengan laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 pada program dan kegiatan yang berkenaan.

Terkait utang jangka pendek, sebagaimana poin 16 di atas, sesuai dengan LKPD audited dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.8.
Rincian Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2025

| N0. | Jenis utang Belanja | Jumlah | OPD | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Utang belanja gaji dan tunjangan ASN | 13.173.870.315,00 | BPKPD | Utang BPJS, sudah dibayarkan |
| 2. | Utang Belanja Pegawai BLUD | 1.536.712.906,00 | BLUD RSUD dan Puskesmas | Sudah dianggarkan pada RKPD Perubahan |
| 3. | Belanja Jasa | 98.370.824,00 | Utang belanja listrik, telepon, air internet pemakaian bulan Desember 2025 pada 17 OPD | Sudah dianggarkan pada APBD awal |
| 4. | Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD | 2.268.563.819,00 | BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas | Sudah dianggarkan pada RKPD Perubahan |
| 5. | Utang belanja modal jalan, dan jembatan | 251.821.280,70 | Dinas PUPR | Sudah dianggarkan pada RKPD Perubahan |
| 6. | Utang Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Nagari | 1.824.896.121,40 | BPKPD | Sudah dianggarkan pada APBD awal |
| 7. | Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi kepada Nagari | 46.616.241,00 | BPKPD | Sudah dianggarkan pada APBD awal |
| | JUMLAH | 19.200.851.507,10 | | |

Adapun perkembangan realisasi dan rencana perubahan belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.9.
Realisasi dan Rencana Perubahan Belanja Daerah kabupaten LimaPuluh Kota

| Uraian | Realisasi | | RKPD 2026 | APBD 2026 | Rencana Pada RKPD Perubahan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2024 | 2025 | | | |
| BELANJA | 1.297.949.602.220,13 | 1.292.071.011.245,58 | 1.360.521.575.144,00 | 1.254.725.169.358,00 | 1.323.519.798.241,17 |
| a. Belanja Operasi | 1.012.245.957.802,13 | 1.049.163.762.149,58 | 1.023.709.774.427,00 | 1.050.073.550.631,00 | 1.073.893.933.285,17 |
| 1. Belanja Pegawai | 757.173.80 | 795.450.932.865,32 | 807.157.081.490,00 | 798.672.644.349,00 | 784.626.502.772,40 |

| Uraian | Realisasi | | RKPD 2026 | APBD 2026 | Rencana Pada RKPD Perubahan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2024 | 2025 | | | |
| | 6.009,34 | | | | |
| 2. Belanja Barang dan Jasa | 206.209.541.333,79 | 223.927.357.697,26 | 189.552.692.938,00 | 223.743.254.988,00 | 254.809.047.218,77 |
| 3. Belanja Bunga | - | - | - | - | |
| 4. Belanja Hibah | 41.486.034.642,00 | 27.520.146.567,00 | 25.000.000.000,00 | 25.651.676.294,00 | 30.699.968.294,00 |
| 5. Belanja Bantuan Sosial | 7.376.575.817,00 | 2.265.325.020,00 | 2.000.000.000,00 | 2.005.975.000,00 | 3.758.415.000,00 |
| b. Belanja Modal | 116.565.581.127,00 | 75.123.565.43000 | 160.606.482.611,00 | 54.631.889.204,00 | 141.849.552.209,00 |
| Belanja Modal Tanah | 157.817.558,00 | 49.553.000,00 | - | 1.000.000.000,00 | 1.300.000.000,00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 31.338.591.004,00 | 26.025.301.758,00 | 25.000.000.000,00 | 16.785.712.038,00 | 29.022.160.338,00 |
| Belanja Modal Bangunan Gedung | 45.086.271.445,00 | 33.313.632.292,00 | 40.000.000.000,00 | 10.832.768.000,00 | 21.978.100.700,00 |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | 38.019.493.475,00 | 8.889.335.517,00 | 81.817.051.511,00 | 16.315.550.065,00 | 79.786.216.570,00 |
| Belanja Moda Aset Tetap Lainnya | 1.963.407.645,00 | 6.781.362.863,00 | 13.739.431.101,00 | 9.697.859.101,00 | 9.763.074.601,00 |
| Belanja Moda Aset Lainnya | | 64.380.000,00 | 50.000.000 | | |
| c. Belanja Tidak Terduga | 2.402.553.872,00 | 2.040.328.994,00 | 2.500.000.000,00 | 2.500.000.000,00 | 5.602.615.224,00 |
| d. Belanja Transfer | 166.735.509.419,00 | 166.743.354.672,00 | 173.705.318.105,00 | 147.519.729.523,00 | 102.173.697.523,00 |
| 1. Belanja Bagi Hasil | 3.707.411.919,00 | 6.498.573.844,00 | 6.714.696.205,60 | 7.586.520.323,00 | 7.586.520.323,00 |
| 2. Belanja Bantuan Keuangan | 163.028.097.500,00 | 159.244.780.828,00 | 166.990.621.900,00 | 139.933.209.200,00 | 94.587.377.200,00 |

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2026*

Pada tabel 3.9 dapat dilihat bahwa pada RKPD Perubahan tahun 2026 diproyeksikan belanja daerah sebesar Rp.1.323.519.798.241,17 dari semula Rp.1.254.725.169.358,00 pada APBD Tahun 2026, atau naik sebesar sebesar Rp 68.794.628.883,00. Perubahan alokasi belanja ini disebabkan karena penyesuaian SILPA tahun 2025 dan penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 dan peraturan-peraturan yang mempengaruhi alokasi pendapatan sebagaimana dijelaskan sebelumnya serta kenaikan Pendapatan Asli Daerah

### 3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang memuat Ketentuan Umum dinyatakan bahwa Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan itu terdiri dari 2 komponen yaitu komponen penerimaan dan komponen pengeluaran. Dengan demikian, arah kebijakan pembiayaan daerah juga ditinjau dari dua komponen pembiayaan antara lain:

1. Kebijakan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
2. Pencairan dana cadangan.
3. Penerimaan pinjaman daerah,
4. Penerimaan kembali pemberian pinjaman,
5. Penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Sesuai dengan sifatnya, penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran pemerintah daerah atau merupakan suatu penerimaan yang akan dibayar kembali dimana sumbernya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.

Pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Secara umum Kebijakan Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut :

a. Pembiayaan netto digunakan untuk memanfaatkan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

b. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang pelakasanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangakan Kebijakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), diarahkan pada :

a. SILPA merupakan perhitungan antara surplus/defisit dengan pembiayaan neto. Pembiayaan neto merupakan perhitungan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.
b. Pemerintah Daerah Daerah menganggarkan SILPA TA 2026 dalam RKPD, KUA PPAS dan APBD bersaldo nihil.
c. Dalam hal perhitungan penyusunan Perubahan RKPD menghasilkan SILPA tahun berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program, kegiatan dan subkegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, subkegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
d. Dalam hal perhitungan penyusunan Perubahan RKPD menghasilkan SILPA tahun berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan subkegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program, kegiatan dan subkegiatan.

Perkembangan realisasi dan rencana perubahan pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.10
Realisasi dan Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

| Uraian | Realisasi | | RKPD 2026 | APBD 2026 | Rencana pada RKPD Perubahan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2024 | 2025 | | | |
| Penerimaan | 55.365.247.051.,45 | 50.449.554.115,17 | - | 92.021.599.185,00 | 50.449.554.115,17 |
| Pengeluaran | | - | - | - | - |

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026*

Ada perbedaan asumsi SILPA pada APBD awal dengan SiLPA audited setelah pemeriksaan BPK RI, dimana SILPA yang diperkirakan sebesar Rp 92.021.185.000,00, sedangkan SiLPA riil audited pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebesar Rp 50.449.554.115,17. Dengan demikian ada selisih antara proyeksi SILPA di APBD 2026 dengan SiLPA riil sebesar Rp 41.572.045.069,83. Rincian SiLPA sesuai audit BPK RI adalah sebagai berikut :

| | | |
|---|---|---|
| Kas di Kasda | Rp | 43.973.073.424,80 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | | 4.700.000,00 |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | | - |
| Kas di Bendahara BLUD RSUD | | 59.708.016,40 |
| Kas di Bendahara BLUD Puskesmas | | 2.227.446.412,97 |
| Kas di Bendahara BOK Puskesmas | | 1.875.270.284,00 |
| Kas di Bendahara BOS | | 346.730.663,00 |
| Kas Lainnya | | 1.962.625.314,00 |

Sedangkan SiLPA yang terdapat pada Kas Daerah dapat dirinci sebagai berikut :

| | | | |
|---|---|---|---|
| A. | Dana yang ditentukan penggunaannya | | |
| 1. | DAK Non Fisik, terdiri dari : | Rp | 4.074.640.583,00 |
| | e. BOKB | | 1.666.651.829,00 |
| | f. PPA | | 195.181.652,00 |
| | g. BOK Dinas | | 471.078.507,00 |
| | h. POM | | 4.876.878,00 |
| | i. BOP Penyuluh Pertanian | | 11.020.000,00 |
| | j. Perpustakaan Daerah | | 31.433.304,00 |
| | k. TPG | | 1.401.443.413,00 |
| | l. Tamsil | | 292.955.000,00 |
| 2. | DAK Fisik : | | 56.396.001,00 |
| | a. Bidang Kesehatan | | 56.396.001,00 |
| 3. | DAU yang ditentukan penggunaannya | | 9.597.283.135,00 |
| | m. Bidang Pendidikan | | 4.791.475.534,00 |
| | n. Bidang Kesehatan | | 4.805.807.601,00 |
| 4. | DBH Sawit | | 4.099.046.599,00 |
| 5. | DBH CHT | | 59.733.342,00 |
| 6. | Dana Darurat (Penanganan Bencana) | | 4.345.430.940,00 |
| | Total Dana Ditentukan Penggunaannya | | 22.232.530.600,00 |
| B. | Dana yang tidak ditentukan penggunaannya | | |
| | DAU yang tidak ditentukan penggunaannya | | 21.740.542.824,80 |
| | Total Dana yang tidak Ditentukan Penggunaannya | | 21.740.542.824,80 |
| | SiLPA pada Kas Daerah | | 43.973.073.424,80 |

SiLPA yang bersifat Non Kasda akan dianggarkan kembali sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan dari total Silpa yang berasal dari kas di Kas Daerah sebesar Rp 43.973.073.424,80, sebesar Rp 22.232.530.600,00 berasal dari dana yang ditentukan penggunaaanya, juga harus dianggarkan kembali pada program dan kegiatan berkenaan. Selisih antar asumsi SiLPA pada APBD 2026 dan SiLPA riil tahun 2025 akan ditutup dengan rasionalisasi belanja dan peningkatan proyeksi penerimaan Transfer Antar Daerah.

# BAB IV
# SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

## 4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Untuk menjaga konsistensi dan keterkaitan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan hasil evaluasi periode sebelumnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tujuan dan sasaran pembangunan tersebut disusun dengan berpedoman kepada RPJMD periode bersangkutan. Di samping itu juga perlu sinkronisasi antara pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten

Visi Presiden sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 yaitu :

“BERSAMA INDONESIA MAJU, MENUJU INDONESIA EMAS 2045”.

Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan Kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita. Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/Quick Wins. Keseluruhan upaya tersebut di formulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

Misi RPJMN Tahun 2025–2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025–2029. Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025–2029. Untuk pencapaian sasarannya, setiap Prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta). Adapun Misi RPJMN Tahun 2025-2029 yang juga menjadi Prioritas Nasional, yakni sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusi, yang berfokus pada upaya simultan yang ditujukan untuk memperkokoh ideologi pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia.
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, yang bertujuan untuk mengawal keberhasilan proses pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi, yang bertujuan untuk mengawal keberhasilan proses melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan Kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim ndustri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, yang bertujuan untuk mengawal keberhasilan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, yang bertujuan untuk membangun fondasi industrialisasi yang terintegrasi domestik dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri yang berdaya saing global sehingga menjadi pengungkit perekonomian.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan, yang ditujukan untuk pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga berdanpak pada pengentasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, yang dilaksanakan melalui reformasi politik; reformasi hukum; reformasi tata kelola pemerintahan; dan pemberantasan narkoba, judi, dan penyelundupan; serta penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, yang diarahkan untuk memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam rangka menyongsong periode pembangunan jangka menengah tahun 2025– 2029, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan arah pembangunan daerah yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045, maka ditetapkanlah Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029, yaitu: “SUMATERA BARAT MADANI YANG MAJU DAN BERKEADILAN”

Visi ini memuat tiga kata kunci utama yang menjadi dasar pijakan arah pembangunan lima tahun ke depan, yaitu Madani, Maju, dan Berkeadilan. Ketiga kata ini memiliki makna strategis dan nilai filosofis yang kuat sebagai refleksi dari identitas, potensi, dan harapan masyarakat Sumatera Barat di masa depan.

Dalam konteks pembangunan, “madani” mencerminkan masyarakat berperadaban tinggi, menjunjung nilai-nilai etika, moral, dan spiritual,

serta menjaga harmoni sosial, hidup dalam keteraturan, menghargai hak dan kewajiban, dan mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat. Selain itu, madani juga mencerminkan bahwa masyarakat hidup dengan berbasiskan pada kearifan lokal, yakni masyarakat yang memelihara adat dan budaya Minangkabau yang berlandaskan filosofi "Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK)". Madani juga menunjukkan kondisi masyarakat yang maju secara sosial dan spiritual, tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata tetapi juga keseimbangan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. Dengan demikian, Sumatera Barat Madani adalah daerah yang menjadikan nilai-nilai keagamaan dan adat sebagai fondasi kehidupan sosial dan pemerintahan yang adil, beretika, dan bermartabat.

Kata "maju" dalam visi ini dimaknai sebagai kondisi pembangunan daerah yang berdaya saing tinggi, baik dalam skala nasional maupun internasional melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, teknologi, inovasi, dan infrastruktur. Maju juga menunjukkan konsep pembangunan yang berkelanjutan di mana pembangunan ekonomi dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sosial budaya masyarakat. Maju juga mencerminkan modern namun tetap berakar pada nilai tradisional, yang berarti tidak meninggalkan identitas lokal dalam proses pembangunan. Sehingga kemajuan pembangunan diharapkan mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh—pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta kapasitas daya saing daerah di berbagai bidang strategis.

Keadilan dalam konteks pembangunan tidak hanya bermakna persamaan formal, tetapi juga keadilan substantif yang mencakup terjadinya Pemerataan hasil pembangunan antar wilayah, antar kelompok sosial, dan antar sektor, sehingga tidak ada daerah atau kelompok masyarakat yang tertinggal, terjadinya Kesempatan yang setara dalam mengakses pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur serta terwujudnya Pemberdayaan kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat untuk terlibat aktif dalam pembangunan. Berkeadilan juga mencerminkan semangat inklusivitas dan keberpihakan terhadap kelompok marjinal, serta pengambilan kebijakan berbasis data dan prinsip *no one left behind*. Sehingga berdasarkan pemaknaan kata kunci dalam visi "Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan", maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bertekad untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang bermartabat, berdaya saing, dan harmonis dalam balutan nilai-nilai lokal dan keagamaan yang kuat

Untuk mewujudkan visi "Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan", Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyadari pentingnya arah kebijakan pembangunan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diterjemahkan secara operasional ke dalam berbagai strategi dan program yang terukur serta berdanpak nyata bagi masyarakat. Visi tersebut merupakan cerminan dari harapan masyarakat terhadap kondisi ideal masa depan Sumatera Barat, yang memadukan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat (madani), dorongan kemajuan di segala bidang pembangunan (maju), serta jaminan atas perlakuan yang setara dan hasil pembangunan yang merata bagi seluruh warga daerah (berkeadilan). Dalam rangka menjabarkan visi tersebut ke dalam arah kebijakan yang lebih aplikatif dan sistematis, disusunlah 8 (delapan) misi pembangunan. Misi ini menjadi penjabaran operasional dari visi, yang menggambarkan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah untuk menjawab tantangan dan permasalahan

pembangunan daerah, sekaligus menangkap peluang dan potensi strategis yang dimiliki Sumatera Barat. Setiap misi disusun berdasarkan prinsip kesinambungan pembangunan daerah, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah secara berkelanjutan. Selain itu, perumusan misi juga memperhatikan relevansinya dengan prioritas nasional, isu-isu strategis regional dan global, serta nilai-nilai lokal yang menjadi karakter khas masyarakat Minangkabau. Melalui delapan misi inilah arah dan kebijakan pembangunan daerah akan diarahkan selama periode 2025–2029. Masing-masing misi akan menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, hingga pengalokasian anggaran daerah, yang seluruhnya bermuara pada tercapainya visi pembangunan daerah. Adapun 8 (delapan) misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Misi 1. Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas
2. Misi 2. Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan
3. Misi 3. Nagari/Desa sebagai basis Kemajuan
4. Misi 4. Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat
5. Misi 5. Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana
6. Misi 6. Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas
7. Misi 7. Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM
8. Misi 8. Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif

Dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu: “Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”, maka rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2026 juga berpedoman kepada visi misi dan arah pembangunan RPJPD 2005-2025. Tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.1. Pada Tabel 4.1 terlihat bahwa tidak ada perubahan target karena menyesuaikan dengan target yang ada pada RPJMD dan merupakan prioritas daerah yang harus dilaksanakan.

Tabel 4.1
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah
VISI: LIMA PULUH KOTA BERMARTABAT, MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN

| NO | MISI | TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR | TARGET CAPAIAN 2026 | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *7* |
| 1. | Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT " | Tujuan :<br>1. Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara’, Syarak Basandi Kitabullah. | Indeks ABS SBK | 2,14 | Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah |
| | | Sasaran :<br>1.1. Meningkatnya peran masyarakat dan fungsi kelembagaan | Indeks ABS SBK | 2,14 | Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah |

| NO | MISI | TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR | TARGET CAPAIAN 2026 | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *7* |
| | | agama, adat dan budaya | | | |
| | | Tujuan :<br>2. Meningkatkan ketahanan dan kontribusi budaya dalam kehidupan masyarakat | Persentase cagar budaya yang dilestarikan | 100% | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| | | Sasaran :<br>2.1 Persentase cagar budaya yang dilestarikan | Persentase cagar budaya yang dilestarikan | 100% | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| | | Tujuan :<br>3. Meningkatkan pembangunan keluarga yang sejahtera, adil, dan inklusif | Indeks Pembangunan Keluarga | 62,3 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| | | Sasaran :<br>3.1 Meningkatnya keluarga yang berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif | Indeks Pembangunan Keluarga | 62,3 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| | | | | | |
| 2. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | Tujuan :<br>1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 3.12 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah |
| | | Sasaran :<br>1.1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Indeks Reformasi Birokrasi | 72,04 | Bagian Organisasi Sekretariat Daerah |
| | | 1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Pelayanan Publik | 4.29 | Bagian Organisasi Sekretariat Daerah |
| | | 1.3 Meningkatnya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi | Indeks Reformasi Hukum | 72,05 | Bagian Hukum Sekretariat Daerah |
| | | Tujuan :<br>2. Menegakkan keamanan dan ketertiban daerah | Persentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan | 100% | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | Sasaran :<br>2.1 Optimalnya penegakan keadilan, keamanan dan demokrasi substansial | Persentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan | 100% | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | | | |
| 3. | Meningkatkan sumber daya manusia yang | Tujuan :<br>1. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan | Indeks Pembangunan | 73,05 | Badan Perencanaan Pembangunan, |

| NO | MISI | TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR | TARGET CAPAIAN 2026 | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *7* |
| | andal, sehat,produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | dan standar hidup masyarakat secara inklusif | Manusia | | Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| | | Sasaran :<br>1.1 Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah | Rata-rata Lama Sekolah (tahun) | 8,26 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| | | | Harapan Lama Sekolah (tahun) | 13,48 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| | | 2.1 Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat | Usia Harapan Hidup (tahun) | 73.79 | Dinas Kesehatan |
| | | 1.3 Meningkatnya standar hidup masyarakat | Rasio Gini | 0.218 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| | | Tujuan :<br>2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga Kerja | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | Rp 62.871.993 | Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja |
| | | Sasaran :<br>2.1 Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga Kerja secara inklusif | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | Rp 62.871.993 | Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja |
| | | | | | |
| 4. | Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" | Tujuan :<br>1. Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan | Tingkat Pengangguran Terbuka | 3,65 | Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja |
| | | | Pertumbuhan ekonomi | 5,68 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| | | Sasaran :<br>1.1. Penguatan UMK dan Kewirausahaan Lokal | Proporsi jumlah IKM | 3,51% | Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja |
| | | | Rasio Kewirausahaan | 7,23% | Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja |
| | | | Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB | 0,904 % | Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah |
| | | | Tingkat Pengangguran Terbuka | 3,65 | Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja |
| | | | Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) | 39,84 | Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja |
| | | | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) | 69,3% | Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja |
| | | 1.2. Meningkatnya stabilitas | Persentase dan stabilitas dan | 10,21 | Dinas Pangan |

| NO | MISI | TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR | TARGET CAPAIAN 2026 | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *7* |
| | | ekonomi makro yang terintegrasi dengan ekonomi domestik dan regional | jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok | | |
| | | | Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) | 13,84 | Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah |
| | | | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB | 0,22 | Badan Keuangan |
| | | | Rasio PDRB Industri Pengolahan | 4,925 | Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja |
| | | Tujuan :<br>2. Menjadikan pariwisata pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota | Rasio PDRB Akomodasi Mamin | 0,93 | Badan Keuangan |
| | | Sasaran :<br>2.1 Mengembangkan potensi pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota | Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (ribu orang) | 1,5 | Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga |
| | | 2.1 Optimalisasi ekonomi kreatif | Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%) Kabupaten/Kota terhadap PDB Ekonomi Kreatif Provinsi | 1,651% | Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah |
| | | | | | |
| 5. | Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing<br><br>"SAKATO UNGGUL" | Tujuan 1 :<br>Menjadikan komoditas pertanian dan perikanan sebagai unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota | Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan( %) | 33,24% | Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Dan Perkebunan |
| | | Sasaran :<br>1.1. Meningkatnya produksi sektor pertanian dan perikanan sesuai penerapansubsdi ekonomi hijau | Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan( %) | 33,24% | Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Dan Perkebunan |
| 6.. | Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan<br><br>"SAKATO KUAT" | Tujuan 1;<br>Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 76,01 | Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
| | | | Indeks Risiko Bencana Daerah | 117,91 – 116,64 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | Sasaran :<br>1.1 Membangun infrastruktur strategis | RT dengan Akses Sanitasi Aman | 9,33 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |

| NO | MISI | TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR | TARGET CAPAIAN 2026 | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *7* |
| | | | Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Perpipaan | 15,5 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | | Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau | 54,04 | Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
| | | 1.2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks tutupan lahan | 75,46 | Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
| | | | Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) | 36,46 | Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
| | | | Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) | 33,66% | Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
| 7. | Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari<br><br>"SAKATO MANDIRI" | Tujuan 1 :<br>Meningkatkan status nagari | Indeks Desa | Mandiri* | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Nagari |
| | | Sasaran :<br>1.1 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian nagari | Persentase Desa Mandiri (%) | 88,61% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Nagari |

*Sumber: RPJMD kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029*

## 4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2026

Berdasarkan Rancangan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025-2029 maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan tema pembangunan tahun 2026 sebagai berikut :

“Peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur untuk mendukung transformasi sosial ekonomi yang inklusif dan berdaya saing"

Prioritas pembangunan untuk tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Pembinaan agama dan adat serta kerukunan antar umat beragama | Pembinaan agama dan adat serta kerukunan antar umat beragama |
| 2 | Reformasi birokrasi dan optimalisasi pendapatan daerah | Reformasi birokrasi dan optimalisasi pendapatan daerah |
| 3 | Penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | Penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 2026 |
|---|---|---|
| 4 | Peningkatan produktivitas tenaga Kerja dan perlindungan sosial | Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perlindungan sosial |
| 5 | Penguatan koperasi, usaha mikro dan kecil | Penguatan koperasi, usaha mikro dan kecil |
| 6 | Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif | Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif |
| 7 | Penguatan kelembagaan, redistribusi lahan, ketersediaan sarana dan prasarana produksi | Penguatan kelembagaan, redistribusi lahan, ketersediaan sarana dan prasarana produksi |
| 8 | Pemerataan infrastruktur dasar, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana | Pemerataan infrastruktur dasar, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana |
| 9 | Penataan infrastruktur strategis dan terpadu | Penataan infrastruktur strategis dan terpadu |
| 10 | Perwujudan kemandirian Nagari berbasis potensi wilayah | Perwujudan kemandirian Nagari berbasis potensi wilayah |

*Sumber: RPJMD kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029*

Tabel 4.3
Target Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR | TARGET | SATUAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembinaan agama dan adat serta kerukunan antar umat beragama | Indeks ABS-SBK | 2.14 | Indeks |
| 2 | Reformasi birokrasi dan optimalisasi pendapatan daerah | Indeks Reformasi Birokrasi | | |
| | | Indeks Pelayanan Publik | 4,39 | Indeks |
| 3 | Penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | Rata-rata Lama Sekolah (tahun) | 8,26 | Tahun |
| | | Harapan Lama Sekolah (tahun) | 13,48 | Tahun |
| | | Usia Harapan Hidup | 73,79 | Tahun |
| | | Indeks Pembangunan keluarga | 62,3 | Indeks |
| 4 | Peningkatan produktivitas tenaga Kerja dan perlindungan sosial | Tingkat Produktivitas Tenaga kerja | Rp62,871,993 | Rupiah |
| 5 | Penguatan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil | Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB | 0.953% | Persen |
| 6 | Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif | Rasio PDRB Akomodasi Mamin | 0.95 | Rasio |
| | | Jumlah tamu wisatawan mancanegara (ribu orag) | 1,5 | Ribu orang |
| 7 | Penguatan kelembagaan, redistribusi lahan, ketersediaan sarana dan prasarana produksi | Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan( %) | 33.24% | Persen |
| 8 | Pemerataan infrastruktur dasar, pelestarian lingkungan hidup | RT dengan Akses Sanitasi Aman | 9.852 | Persen |
| | | Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Perpipaan | 15.5 | |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR | TARGET | SATUAN |
|---|---|---|---|---|
| | dan penanggulangan bencana | Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau | 48.87 | Persen |
| 9 | Penataan infrastruktur strategis dan terpadu | Indeks tutupan lahan | 75.46 | Indeks |
| | | Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) | 16.83 | Persen |
| 10 | Perwujudan kemandirian Nagari berbasis potensi wilayah | Persentase Desa Mandiri (%) | 88,61% | Persen |

*Sumber: RPJMD kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029*

Sesuai dengan regulasi yang ada, prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 harus disinkronkan untuk mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, serta diselaraskan dengan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Sinkronisasi ini penting dalam rangka memastikan keselarasan arah pembangunan antara pusat, provinsi, dan daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara terpadu dan efektif. Selain itu, program prioritas daerah juga dirumuskan berdasarkan janji-janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota yang bersifat strategis untuk dilaksanakan selama periode pembangunan tahun 2025–2029. Program prioritas ini menjadi instrumen utama dalam pemfokusan kebijakan pembangunan daerah, sebagai bentuk percepatan dalam mewujudkan visi Kabupaten Lima Puluh Kota. Sinkronisasi tersebut mencerminkan keterkaitan antara prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan provinsi, dan prioritas pembangunan daerah yang saling mendukung. Sinkronisasi prioritas pembangunan nasional, provinsi dan daerah tersebut dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.4
Matrik Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Daerah

| NO. | PRIORITAS PEMBANGUNAN RKP NASIONAL | PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD PROVINSI | AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD KABUPATEN |
|---|---|---|---|
| 1 | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah | 1. Pembinaan agama dan adat serta kerukunan antar umat beragama<br>2. Penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| 2 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, konomi hijau, dan ekonomi biru | 1. Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>2. Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomiber basis digital<br>3. Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing | 1. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif<br>2. Penguatan kelembagaan, redistribusi lahan, ketersediaan sarana dan prasarana produksi<br>3. Pemerataan infrastruktur dasar, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana<br>4. Penataan infrastruktur strategis dan terpadu |

| NO. | PRIORITAS PEMBANGUNAN RKP NASIONAL | PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD PROVINSI | AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD KABUPATEN |
|---|---|---|---|
| | | kepariwisataan<br>4. Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan | |
| 3 | Meningkatkan lapangan Kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur | 1. Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>2. Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan<br>3. Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan | 1. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif<br>2. Penguatan kelembagaan, redistribusi lahan, ketersediaan sarana dan prasarana produksi<br>3. Pengembangan kemandirian Nagari berbasis potensi |
| 4 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas | 1. Prioritas 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing<br>2. Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah | 4. Pembinaan agama dan adat serta kerukunan antar umat beragama<br>5. Penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| 5 | Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | 1. Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>2. Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital | 1. Pengembangan pertanian dan perikanan menuju agribisnis<br>2. Pariwisata dan peningkatan ekonomi Masyarakat |
| 6 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan | 1. Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>2. Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital<br>3. Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan | 1. Pengembangan pertanian dan perikanan menuju agribisnis<br>2. Pariwisata dan peningkatan ekonomi Masyarakat<br>3. Peningkatan Pembangunan Infrastuktur Daerah |
| 7 | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba | Prioritas 7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Pengembangan Masyarakat Madani |
| 8 | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil | Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah | Pengembangan Masyarakat Madani |

| NO. | PRIORITAS PEMBANGUNAN RKP NASIONAL | PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD PROVINSI | AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD KABUPATEN |
|---|---|---|---|
| | dan makmur | | |

Sumber: Prioritas pembangunan nasional sesuai Permen PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 2 Tahun 2024

Prioritas pembangunan ini kemudian dijabarkan ke dalam program-program prioritas yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan langsung disinkronkan dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

## 4.3. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN ALOKASI ANGGARAN PENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

Agenda prioritas daerah adalah program utama pembangunan daerah yang bersifat lintas sektoral sebagai penjabaran operasional dari rencana pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk 5 (lima) tahun, dan dilaksanakan setiap tahun selama periode tersebut. Penjabaran program pembangunan daerah pendukung agenda prioritas daerah dapat dilihat pada Tabel 4.5 di bawah.

Tabel 4.5
Program- Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 (Perubahan) dan Prakiraan Maju 2027

| Prioritas Pembangunan/Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/Outcome)* | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2025 | Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 (Perubahan) | | 2027 | | |
| | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| Program Prioritas 1 : Pembinaan Agama dan Adat serta Kerukunan Antar Umat Beragama | | | | | | | |
| Misi 1 Memantapkan kehidupan Masyarakat yang berakhlak dan berbudaya | | | | | | | |
| Tujuan 1 : Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara', Syarak Basandi Kitabull ah | | | | | | | |
| Sasaran 1 : Meningkatnya peran masyarakat dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya | | | | | | | |
| Program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat | Persentase Terlaksananya Koordinasi bidang kesejahteraan rakyat (%) | 100 | 100% | 12.708.712.400 | 100% | 10.265.230.000 | SETDA (Bagian Kesra) |
| Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) | 67,75 % | 68% | 1.725.000.000 | 70% | 46.000.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum (%) | 63% | 65% | 3.097.350.000 | 67% | 27.100.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Program Pembinaan Perpustakaan | Nilai Tingkat kegemaran Membaca Masyarakat | 79,67 | 80,25 | 1.128.096.000 | 80,75 | 1.382.100.000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |

| Prioritas Pembangunan/Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/Outcome)* | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2025 | Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 (Perubahan) | | 2027 | | | |
| | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | | |
| Program Perlindungan Khusus Anak | Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif | 85% | 85,50% | 346.387.000 | 90 | 739.500.000 | Pengendalian Penduduk, Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | Indeks perlindungan khusus anak (ipka) | 81,6 | 81,7 | | 81,8 | | | |
| Tujuan : Meningkatkan ketahanan dan kontribusi budaya dalam kehidupan masyarakat | | | | | | | | |
| Sasaran 2: Persentase cagar budaya yang dilestarikan | | | | | | | | |
| Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | Persentase cagar budaya yang dilestarikan | 100 | 100 | 413.300.000 | 100 | 3.540.617.593 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | Persentase warisan budaya tak benda yang dilestrikan | 100 | 100 | | 100 | | | |
| Program Prioritas 2 : Reformasi Birokrasi dan optimalisasi pendapatan daerah | | | | | | | | |
| Misi 2 : Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih | | | | | | | | |
| Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik | | | | | | | | |
| Sasaran 1: Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | | | | | | | | |
| Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah | Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD | 100% | 100% | 133.529.572 | 100% | 710.178.175 | BAPPELITBANGDA | |
| | Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD | 100% | 100% | | - | | | |

| Prioritas Pembangunan/Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/Outcome)* | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2025 | Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 (Perubahan) | | 2027 | | |
| | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase pertambahan Aset Tetap | 5,45 | 5,75 | 321.045.000 | 6,25 | 749.190.000 | BPKPD |
| Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase Belanja Pegawai di luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD | 47% | 47% | 107.884.588.233 | 30% | 1.324.000.000 | BPKPD |
| | Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik | 22% | 22% | | 40% | | |
| | Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar | 96,7 % | 97,3 % | | 97,8 % | | |
| | Persentase Penurunan SILPA | 3,30% | 2,80% | | 2,20% | | |
| | Persentase Penyampaian LPKD tepat waktu dan sesuai SAP | 100% | 100% | | 100% | | |
| | Persentase Penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu | 100% | 100% | | 100% | | |
| Sasaran2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik | | | | | | | |
| Program Penyelenggaraan Pengawasan | Persentase Penyelesaian TLHP Eksternal | 85 | 85,55 | 1.744.032.125 | 85,75 | 1.786.302.583 | Inspektorat |
| | Persentase Penyelesaian TLHP Internal | 85 | 85,55 | | 85,75 | | |

| Prioritas Pembangunan/Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/Outcome)* | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2025 | Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 (Perubahan) | | 2027 | | |
| | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| | Opini BPK Atas Laporan Keuangan | Wajar Tanpa Pengecualian | Wajar Tanpa Pengecualian | | Wajar Tanpa Pengecualian | | |
| Program penelitian dan pengembangan daerah | Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian/Kajian yang Direkomendasikan sebagai Bahan Masukan Kebijakan Pembangunan Daerah | 8% | 10% | 13.973.050 | 12% | 675.200.000 | BAPPELITBANGDA |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah | 100% | 100% | 27.208.611.515 | 100% | 52.500.000.000 | SETDA |
| | | | | | | | |
| Program Prioritas 3 : Penguatan kualitas pendidikan, Kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | | | | | |
| Misi 3 : Meningkatkan Sumber daya Manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif | | | | | | | |
| Tujuan : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan standar hidup masyarakat secara inklusif | | | | | | | |
| Sasaran 1 : Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah | | | | | | | |
| Program Pengelolaan Pendidikan | Persentase anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar | 88,92 | 89,33 | 76.286.700.747 | 89,73 | 312.591.110.590 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | Persentase anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama | 80,09 | 80,67 | | 81,24 | | |
| | Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | 66,14 | 70,82 | | 75,49 | | |
| | Persentase anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah | 97 | 97,5 | | 98 | | |

| Prioritas Pembangunan/Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/Outcome)* | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2025 | Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 (Perubahan) | | 2027 | | |
| | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| | yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | | | | | | |
| Sasaran 2 :Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | | | | | | | |
| Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat | Persentase Depresi pada usia > 15 Tahun | 1,4% | 1,4% | 67.136.813.746 | 1,4% | 92,547.690.000 | DINAS KESEHATAN |
| | Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat | 22% | 22,5% | | 23% | | |
| | Prevalensi Obesitas > 18 Tahun | 23,4% | 23,4% | | 23,4% | | |
| | Persentase Fasilias Pelayanan Kesehatan sesuai standar | 52,6 | 59,1 | | 65,6 | | |
| | Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan | 83,39 | 83,81 | | 84,23 | | |
| | Persentase Tempat Pengeloalaan Pangan Memenuhi Syarat | 47,99 | 48,5 | | 48,9 | | |
| | Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional | 100 | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna | 59,1 | 63,4 | | 65,7 | | |
| | Persentase Fasilitas Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar | 52,65 | 59,1 | | 65,5 | | |
| | Persentase Lanjut Usia yang Mandiri | 90 | 91 | | 92 | | |

| Prioritas Pembangunan/Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/Outcome)* | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2025 | Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 (Perubahan) | | 2027 | | |
| | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| | Persentase Merokok Penduduk 10-21 Tahun | 12,4 | 11,4 | | 10,4 | | |
| | Cakupan Penemuan Kasus TB | 40% | 45% | | 50% | | |
| | Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 93,33 | 94,00 | | 94,67 | | |
| Program Pembinaan Keluarga Berencana | angka prevalensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mcpr) | 63,81% | 65,82% | 1.050.585.000 | 68,40% | 3.667.545.080 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| | Persentase kebutuhan ber kb yang tidak terpenuhi (unmet need) | 13 | 12 | | 11 | | |
| | Persentase kebutuhan ber kb yang terpenuhi (met need) | 81,60 | 82,50 | | 83,40 | | |
| | Persentase kampung keluarga berkualitas mandiri | 63,20 | 69,60 | | 75,90 | | |
| | Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern | 81,60 | 82,50 | | 83,40 | | |
| | Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) | 14,10 | 13,10 | | 12,30 | | |
| Program Pengendalian Penduduk | Angka kelahiran total(total fertility rate/tfr) | 2,35 | 2,34 | 48.600.000 | 2,33 | 290.210.620 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| | Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) | 14,4 | 13,6 | | 12,9 | | |
| | Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) | 74,2 | 79,8 | | 83,4 | | |

| Prioritas Pembangunan/Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/Outcome)* | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2025 | Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 (Perubahan) | | 2027 | | |
| | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | 90.9% | 91,4% | 485.294.900 | 91,9% | 2.202.450.000 | Dinas Pangan |
| Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) | 67,75 % | 68% | 1.725.000.000 | 70% | 46.000.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum (%) | 63% | 65% | 3.097.350.000 | 67% | 27.100.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Angka Konsumsi Makan Ikan | 40,73 kg/kapita/tahun | 41,24 kg/kapita/tahun | 102.046.500 | 41,82 kg/kapita/tahun | 941.680.000 | Dinas Perikanan |
| | Jumlah produksi hasil olahan perikanan (Ton) | 395 | 400 | | 405 | | |
| Program Perlindungan Khusus Anak | Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif | 85% | 85,50% | 346.387.000 | 90 | 739.500.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| | Indeks perlindungan khusus anak (ipka) | 81,6 | 81,7 | | 81,8 | | |
| | | | | | | | |
| Prioritas 4 : Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perlindungan sosial | | | | | | | |
| Misi 3 : Meningkatkan Sumber daya Manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif | | | | | | | |
| Tujuan 2: Meningkatkan Produktivitas dan daya saing tenaga kerja | | | | | | | |
| Sasaran 1: Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja secara inklusif | | | | | | | |
| Program perencanaan dan pembangunan industri | Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri | 8% | 10% | 22.310.400 | 12% | 1.282.000.000 | Dinas perindustrian tenaga kerja dan |

| Prioritas Pembangunan/Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/Outcome)* | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2025 | Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 (Perubahan) | | 2027 | | |
| | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| | | | | | | | transmigrasi |
| Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Persentase Terlaksananya Koordinasi bidang kesejahteraan rakyat (%) | 100 | 100% | 12.708.712.400 | 100% | 10.265.230.000 | Setda (bagian kesra) |
| Program Rehabilitasi Sosial | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 25% | 25% | 518.650.000 | 25% | 7.000.000.000 | Dinas sosial |
| | Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 25 | 25 | | 25 | | |
| | Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 25 | 25 | | 25 | | |
| | Persentase Gelandangan dan pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 25 | 25 | | 25 | | |
| | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan Napza yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 20 | 20 | | 20 | | |
| Program Pemberdayaan Sosial | Persentase PSKS yang melakukan pelayanan sosial | 0 | 100 | 5.000.000 | 100 | 1.020.400.000 | Dinas Sosial |
| | Persentase PSKS yag melakukan pelayanan sosial bagi PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA | 0 | 100 | | 100 | | |
| | Persentase PSKS yang melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar | 0 | 100 | | 100 | | |
| | Persentase PSKS yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial | 0 | 20 | | 20 | | |

| Prioritas Pembangunan/Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/Outcome)* | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2025 | Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 (Perubahan) | | 2027 | | |
| | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| | Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial | 0 | 20 | | 20 | | |
| Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasara | 0 | 100 | 12.278.000 | 100 | 655.000.000 | Dinas Sosial |
| | Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian sosial ekonomi | 0 | 0,67 | | 0,67 | | |
| | Persentase Kecamatan yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin | 0 | 100 | | 100 | | |
| | Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial tergraduasi dari kemiskinan | 0 | 1,34 | | 1,34 | | |
| Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Persentase anggaran responsif gender (ARG) | 4,48 | 4,78 | 140.000.000 | 5 | 703.800.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | 64,30 | 69,30 | | 71,80 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prioritas 5 : Penguatan koperasi, usaha mikro dan kecil | | | | | | | |
| Misi 4 : Membangun Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata Yang tangguh dan Berkeadilan | | | | | | | |
| Tujuan 1 :Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan | | | | | | | |
| Sasaran 1: Penguatan UMK dan Kewirausahaan Lokal | | | | | | | |
| Program koordinasi Dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Lingkup Bidang Koordinasi Perencanaan | 100% | 100% | 130.938.899 | 100% | 1.324.000.000 | Bappelitbangda |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prioritas 6 : Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi kreatif | | | | | | | |
| Misi 4 : Membangun Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata yang tangguh dan berkeadilan | | | | | | | |
| Tujuan 2 : Menjadikan pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai sektor unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota | | | | | | | |
| Sasaran 1: Mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Lima Puluh Kota | | | | | | | |
| Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata | Persentase Pertumbuhan kunjungan wisatawan | 13% | 15% | 294.457.500 | 17% | 1.828.600.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| Program Prioritas 7: Penguatan kelembagaan, Retribusi lahan, ketersediaan sarana dan prasarana produksi | | | | | | | |
| Misi 5 : Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing | | | | | | | |
| Tujuan 1 :Menjadikan komoditas pertanian dan perikanan sebagai unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota | | | | | | | |
| Sasaran 1 : Meningkatnya produksi sektor pertanian dan perikanan sesuai penerapan ekonomi hijau | | | | | | | |
| Program Penanganan Kerawanan Pangan | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan | 8,86% | 7,59% | 50.000.000 | 6,39% | 20.320.000 | Dinas Pangan |
| Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | 90.9% | 91,4% | 485.294.900 | 91,9% | 2.202.450.000 | Dinas Pangan |
| Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan | 2% | 2% | 785.307.000 | 2% | 2.020.542.000 | Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan |
| | Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura | 2% | 2% | | 2% | | |
| | Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan | 2% | 2% | | 2% | | |
| | Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan | 2% | 7% | 2.240.000.000 | 7% | 4.257.630.000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Persentase Penanganan Bencana Pertanian | 95,00 | 95,00 | 15.000.000 | 96,00 | 420.000.000 | Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan |
| | Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim terhadap pertanian | 95,00 | 95,00 | | 96,00 | | |
| Program Perizinan Usaha Pertanian | Persentase Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan | 100% | 100% | 80.035.000 | 100% | 28.500.000 | Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan |
| Prioritas 8 : Pemerataan Infrastruktur dasar, pelestarian lingkungan hidup dan Penanggulangan Bencana | | | | | | | |
| Misi 6 : Meningkatkan Infrastruktur strategis yang berkelanjutan | | | | | | | |
| Tujuan 1 : Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan | | | | | | | |
| Sasaran 1 : Membangun infrastruktur strategis | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Pengelolaan Sumber daya Air | Persentase peningkatan perlindungan kawasan permikiman rawan banjir | 41% | 41,36% | 9.209.907.000 | 43% | 34.160.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik (%) | 49% | 51% | | 52% | | |
| Program Penataan bangunan gedung | Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik | 77% | 80% | 1.500.000.000 | 82% | 35.400.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Program Penyelenggaraan Jalan | Tingkat Kemantapan Jalan | 57.72% | 59% | 77.894.216.570 | 60% | 90.000.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Program Penyelenggaraan penataan ruang | Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan Ruang di Daerah | 100% | 100% | 450.000.000 | 100% | 4.200.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | | | | |
| Prioritas 9. Penataan Infrastruktur strategis dan terpadu | | | | | | | |
| Misi 6 : Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan | | | | | | | |
| Tujuan 1: Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan | | | | | | | |
| Sasaran 2: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | | | | | | | |
| Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup | Indeks Kualitas Air (IKA) | 62,61 | 64,30 | 179.042.000 | 65,01 | 1.010.530.000 | Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| Program Pengelolaan sampah | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (indeks) | 28,09 | 31,38 | 3.433.816.000 | 34,66 | 1.068.230.000 | Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum | Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum (%) | 63% | 65% | 3.097.350.000 | 67% | 27.100.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air limbah | Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) | 67,75 % | 68% | 1.725.000.000 | 70% | 46.000.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prioritas 10. Pengembangan Kemandirian Nagari Berbasis Potensi | | | | | | | |
| Misi 7 : Meningkatkan Kemajuan dan Kemandirian Nagari | | | | | | | |
| Tujuan : Meningkatkan status nagari | | | | | | | |
| Sasaran : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian nagari | | | | | | | |
| Program administrasi pemerintahan desa | Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkaatkan Kapasitasnya | 80 | 80% | 226.586.400 | 80% | 1.147.507.647 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari |
| | Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa | 0 | 100 | | 100 | | |
| Program Pengelolaan Pendidikan | Persentase anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar | 88,92 | 89,33 | 76.286.700.747 | 89,73 | 321.591.110.590 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | Persentase anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama | 80,09 | 80,67 | | 81,24 | | |
| | Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | 66,14 | 70,82 | | 75,49 | | |
| | Persentase anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 97 | 97,5 | | 98 | | |
| Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase Depresi pada usia > 15 Tahun | 1,4% | 1,4% | 67.136.813.746 | 1,4% | 92.547.690.000 | DINAS KESEHATAN |
| | Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat | 22% | 22,5% | | 23% | | |
| | Prevalensi Obesitas > 18 Tahun | 23,4% | 23,4% | | 23,4% | | |
| | Persentase Fasilias Pelayanan Kesehatan sesuai standar | 52,6 | 59,1 | | 65,6 | | |
| | Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan | 83,39 | 83,81 | | 84,23 | | |
| | Persentase Tempat Pengeloalaan Pangan Memenuhi Syarat | 47,99 | 48,5 | | 48,9 | | |
| | Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional | 100 | 100 | | 100 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna | 59,1 | 63,4 | | 65,7 | | |
| | Persentase Fasilitas Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar | 52,65 | 59,1 | | 65,5 | | |
| | Persentase Lanjut Usia yang Mandiri | 90 | 91 | | 92 | | |
| | Persentase Merokok Penduduk 10-21 Tahun | 12,4 | 11,4 | | 10,4 | | |
| | Cakupan Penemuan Kasus TB | 40% | 45% | | 50% | | |
| | Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 93,33 | 94,00 | | 94,67 | | |
| Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum (%) | 63% | 65% | 3.097.350.000 | 67% | 27.100.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Program Penyelenggaraan Jalan | Tingkat Kemantapan Jalan | 57.72% | 59% | 77.894.216.570 | 60% | 90.000.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Program Kawasan Permukiman | Persentase Berkurangnya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (%) | 0,83 | 1,66 | 56.000.000 | 2,49 | 25.314.160.000 | Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman |

## 4.4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2026

Hubungan strategi, arah kebijakan dengan visi dan misi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.6
Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan

| NO | MISI | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Visi : Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan | | | |
| 1. | Misi 1 : Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya (SAKATO BERMARTABAT) | 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia keagamaan melalui kegiatan Pendidikan TPQ/MDA/TPA, Didikan Subuh dan Pembinaan Remaja Masjid serta pembinaan keagamaan masyarakat guna membentuk generasi yang beriman, berilmu dan berakhlak mulia<br>2. Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi Keagamaan untuk memperkuat nilai moderasi beragama, meningkatkan literasi dan edukasi publik, mendorong riset berbasis nilai keagamaan, membangun kapasitas sumber daya manusia daerah, serta mengadvokasi kebijakan yang adil, setara, dan inklusif<br>3. Optimalisasi pendidikan Al-Qur'an dan peningkatan kapasitas guru agama untuk memperkuat pemahaman keagamaan yang moderat, meningkatkan kualitas pembelajaran agama, serta membangun karakter peserta didik yang berakhlak mulia, toleran, dan berdaya saing<br>4. Peningkatan peran PKBM untuk memperluas akses pendidikan nonformal, meningkatkan kualitas layanan pembelajaran masyarakat, serta mendorong pemberdayaan komunitas dalam menciptakan sumber daya manusia yang mandiri, berdaya saing, dan berwawasan kebangsaan<br>5. Penguatan fungsi masjid dan lembaga keagamaan melalui optimalisasi kelembagaan masjid/ surau/ TPQ, digitalisasi manajemen masjid, serta peningkatan sarana dan prasarana keagamaan<br>6. Pemberdayaan sosial ekonomi | 1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur dan optimalisasi fungsi kelembagaan keagamaan, adat dan budaya serta pengelolaan keuangan sosial<br>2. Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan yang berkelanjutan terhadap cagar budaya melalui penguatan kelembagaan, peningkatan partisipasi publik, serta pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten<br>3. Peningkatan kapasitas individu, pemberdayaan ekonomi, penguatan lingkungan sosial, penguatan kelembagaan, serta perlindungan dan pemenuhan hak seluruh lapisan Masyarakat. |

| NO | MISI | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|---|---|---|---|
| | | dan keagamaan melalui penghimpunan dana sosial keagamaan serta perlindungan sosial ekonomi bagi wanita, anak-anak, dan keluarga miskin<br>7. Penguatan kehidupan bermasyarakat di Nagari melalui optimalisasi peran perantau, ninik mamak, dan imam khatib, peningkatan musyawarah dan gotong royong, pembinaan adat dan budaya, serta penegakan peraturan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan harmonis sesuai dengan nilai ABS-SBK<br>8. Penguatan kelembagaan masyarakat Nagari melalui peningkatan peran Kerapatan Adat Nagari, Bundo Kanduang, organisasi keagamaan dan kepemudaan, serta penguatan regulasi kelembagaan adat dan budaya<br>9. Perlindungan Preventif dan Kuratif melalui inventarisasi, penetapan status oleh tim ahli, pengaturan zonasi perlindungan, serta pemeliharaan dan pemugaran secara ilmiah<br>10. Peningkatan fungsi dan keberlanjutan cagar budaya melalui penelitian, revitalisasi kawasan, dan adaptasi penggunaan tanpa mengurangi nilai budayanya<br>11. Pemanfaatan cagar budaya untuk pendidikan, pariwisata, dan kebudayaan secara bertanggung jawab dan tetap menjaga keasliannya<br>12. Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya dan penyediaan anggaran, regulasi, dan tenaga ahli pelestarian<br>13. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui pendidikan budaya, kampanye pelestarian, dan pelibatan komunitas lokal<br>14. Penjaminan pelestarian melalui pengawasan ketat dan penerapan sanksi pidana bagi tindakan yang merusak atau menyalahgunakan cagar budaya<br>15. Revitalisasi situs purbakala Gua Lida Ajer<br>16. Meningkatkan peran keluarga, | |

| NO | MISI | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|---|---|---|---|
| | | pemuda, perempuan, dan tokoh adat dalam pembangunan sosial<br>17. Menjamin akses kelompok miskin, disabilitas, lansia, perempuan dan anak terhadap layanan dasar dan bantuan sosial dan perbaikan sistem perlindungan sosial yang adaptif, responsif, dan berbasis komunitas | |
| 2. | Misi 2 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (SAKATO BERINTEGRITAS) | 1. Meningkatkan kualitas penataan kelembagaan dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)<br>2. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan SDM pelayan publik<br>3. Penguatan sistem hukum daerah yang transparan, adaptif, dan akuntabel melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta digitalisasi layanan hukum<br>4. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum melalui Penguatan Penegakan Hukum yang Berintegritas, Pemberdayaan Masyarakat dalam Demokrasi dan Hukum, Kolaborasi Strategis Lintas Sektor, serta Keamanan Berbasis Hak Asasi dan Keadilan Sosial. | 1. Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel dan bebas korupsi dengan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas, inovasi berkelanjutan, monitoring dan evaluasi yang kuat, serta penguatan SDM dan kelembagaan berbasis digital untuk percepatan pembangunan daerah<br>2. Penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi strategis lintas sektor untuk mewujudkan keadilan, keamanan, dan demokrasi substansial secara berkelanjutan |
| 3. | Misi 3: Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif (SAKATO ANDAL) | 1. Penguatan Kurikulum Berbasis Karakter<br>2. Peningkatan mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan<br>3. Peningkatan pemenuhan layanan dasar pendidikan serta sarana dan prasarana pendidikan<br>4. Peningkatan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat serta sarana dan prasarana kesehatan<br>5. Peningkatan upaya promosi kesehatan, tindakan preventif serta gerakan hidup bersih dan sehat<br>6. Pemberian bantuan sosial dan subsidi<br>7. Pemberian akses layanan Pendidikan<br>8. Layanan jaminan Kesehatan<br>9. Mengurangi beban pengeluaran Masyarakat miskin dan rentan melalui bantuan sosial dan | 1. Meningkatkan kualitas pendidikan formal dan nonformal melalui penguatan kurikulum berbasis karakter, pelatihan guru, penyediaan sarana-prasarana yang mendukung, penguatan peran keluarga dan masyarakat, serta pengembangan program ekstrakurikuler yang mendidik dan membentuk nilai-nilai moral, sosial, dan kebangsaan.<br>2. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, memperkuat promotif dan preventif, meningkatkan gizi masyarakat, memperluas cakupan jaminan kesehatan, serta memperkuat peran serta masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat.<br>3. Pengurangan beban |

| NO | MISI | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|---|---|---|---|
| | | subsidi<br>10. Penguatan wirausaha dan penciptaan kesempatan Kerja<br>11. Peningkatan kompetensi pekerja melalui pelatihan<br>12. Penambahan volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan Kerja | pengeluaran masyarakat miskin dan rentan.<br>4. Meningkatkan pendapatan Masyarakat.<br>5. Meningkatkan kualitas dan relevansi pelatihan vokasi, memperluas akses pelatihan Kerja bagi kelompok rentan dan marginal, mendorong kemitraan dunia usaha dan industri, serta memperkuat sistem sertifikasi dan penempatan tenaga Kerja berbasis kompetensi |
| 4. | Misi 4: Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan (SAKATO SEJAHTERA) | 1. Penguatan PLUT sebagai pusat transformasi UMKM dan Wirausaha baru;<br>2. Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat, khususnya para pemuda yang merupakan angkatan Kerja potensial.<br>3. Fasilitasi bantuan modal dan akses pendanaan bagi UMKM yang sudah terbukti berhasil dan memiliki potensi untuk berkembang.<br>4. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global<br>5. Mendorong Diversifikasi Produk dan Pasar: Mendorong pelaku bisnis untuk diversifikasi produk dan pasar ekspor mereka. Ini dapat dilakukan melalui penyediaan insentif atau dukungan finansial bagi perusahaan yang berinovasi dan memperluas keberadaannya di berbagai pasar<br>6. Pengembangan database dan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis.<br>7. Mendukung peningkatan digitalisasi Layanan perbankan guna memudahkan nasabah menyimpan dan mengelola dana secara mandiri.<br>8. Menyusun kebijakan/ regulasi dalam mendukung penjaminan kredit perbankan serta subsidi bunga terutama bagi para pelaku UMKM<br>9. Integrasi konektivitas destinasi | 1. Memperkuat peran UMK dalam Upaya pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui pelatihan dan fasilitasi bantuan modal<br>2. Mendorong peningkatan kualitas produk-produk UKM agar dapat menembus pasar global<br>3. Menciptakan kebijakan kemudahan dalam berinvestasi berbasis digital serta terjaganya stabilitas ekonomi makro<br>4. Mendorong pengembangan potensi pariwisata dan peningkatan kontribusi industri pengolahan ekonomi kreatif di Kab. Lima Puluh Kota dengan melibatkan unsur masyarakat, nagari dan pemangku kepentingan.<br>5. Penguatan potensi wisata halal |

| NO | MISI | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|---|---|---|---|
| | | wisata unggulan utama, strategis dan potensial<br>10. Pengembangan kawasan pariwisata sejarah PDRI di Koto tinggi<br>11. Penguatan daerah basis perjuangan PDRI di Kabupaten Lima Puluh Kota<br>12. Inovasi pengembangan diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;<br>13. Penguatan integrasi pengembangan pariwisata halal dengan industri pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan.<br>14. Peningkatan Produktivitas SDA dan pengembangan industri kreatif serta hilirisasi SDA<br>15. Koordinasi untuk penguatan pelaku industri kreatif melalui transfer pengetahuan dan skills dengan melibatkan aktor-aktor Heksaheliks<br>16. Sinkronisasi kebijakan ekonomi kreatif dengan program lintas-sektor | |
| 5 | Misi 5 : Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing (SAKATO UNGGUL) | 1. Menjadikan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai The Center of Agro<br>2. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global;<br>3. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis;<br>4. Perluasan akses Pembiayaan kredit usaha pertanian.<br>5. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global;<br>6. Mendukung Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Dataran Tinggi Minangkabau yang meliputi Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D, I. Batang Sinamar<br>7. Rehabilitasi dan peningkatan | Memperkuat dan mengembangkan sistem pertanian berbasis inovasi IPTEK, ekonomi kerakyatan dan ekonomi hijau berorientasi hilirisasi untuk ketahanan pangan berkelanjutan |

| NO | MISI | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|---|---|---|---|
| | | jaringan irigasi kewenangan Pemerintah daerah<br>8. Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi)<br>9. Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura<br>10. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura<br>11. Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian | |
| 6. | Misi 6 : Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan (SAKATO KUAT | 1. Peningkatan Rumah Tangga dengan sanitasi layak dan aman pada kawasan prioritas penanganan melalui SPALD Setempat dan terpusat.<br>2. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).<br>3. Pembangunan TPST dan TPS3R<br>4. Pembangunan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan Melalui SPAM<br>5. Pembangunan Pasar Ibukota Kabupaten<br>6. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah<br>7. Penataan Jalan Negara / Pembangunan Trotoar dan Drainase<br>8. Pembangunan drainase kawasan IKK<br>9. Pembangunan Jalan lingkar<br>10. Pembangunan Gedung Perkantoran<br>11. Penyusunan RDTR<br>12. Penataan Batang Harau<br>13. Menyediakan rumah layak huni dan relokasi pada kawasan bencana<br>14. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat yang tanggap iklim dan kepedulian terhadap lingkungan/alam.<br>15. Penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta kebijakan yang mendorong perilaku masyarakat untuk melaksanakan aktivitas | 1. Mewujudkan sinergitas dalam pembangunan infrastruktur dasar untuk pemenuhan pelayanan dasar dan terciptanya kawasan permukiman yang layak<br>2. Menciptakan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dalam upaya menjaga kualitas lingkungan hidup<br>3. Memetakan wilayah yang berpotensi bencana dengan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung dan mendorong peran aktif masyarakat dalam Kesiagaan menghadapi dan mengelola risiko bencana |

| NO | MISI | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|---|---|---|---|
| | | kehidupan yang rendah karbon<br>16. Meningkatkan Kesiagaan daerah dalam menghadapi bencana yang meliputi: pemetaan risiko bencana, perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan sistem peringatan dini dan infrastruktur Kesiagaan.<br>17. Memperkuat tata kelola Kesiagaan terhadap bencana yang meliputi: kemampuan tanggap darurat antar berbagai pihak, kepedulian dan Kesiagaan masyarakat, sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan di daerah (RTRW, RPJPD, dan RPJMD) dengan Rencana Penanggulangan Bencana, serta sinkronisasi data kebencanaan daerah dengan data nasional (BNPB) dan K/L terkait.<br>18. Memantapkan ketersediaan infrastruktur kebencanaan dan infrastruktur tahan bencana.<br>19. Revitalisasi dan normalisasi sungai-sungai utama dan rawan bencana | |
| 7. | Misi 7 : Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari (SAKATO MANDIRI) | 1. Perbaikan tata kelola pemerintahan nagari yang transparan dan partisipatif<br>2. Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, serta aksesibilitas antar wilayah nagari secara berkelanjutan dan berbasis kebutuhan masyarakat lokal | Meningkatkan kualitas sektor layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan nagari |

*Sumber: RPJMD kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029*

## 4.5. PROGRAM DAERAH MENDUKUNG MANDATORI NASIONAL

### 4.5.1. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Gerakan PKK

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2017 (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia: Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut dengan Gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya Keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Penyelenggaraan PKK dilakukan melalui Gerakan PKK secara terkoordinasi dan berjenjang sesuai dengan kewenangannya mulai dari tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan bahkan sampai ke tingkat Desa. Gerakan PKK meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi dan pelaporan.

Gerakan PKK dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) program pokok PKK yang meliputi:

1. penghayatan dan pengamalan Pancasila;
2. gotong royong;
3. pangan;
4. sandang;
5. perumahan dan tata laksana rumah tangga;
6. pendidikan dan keterampilan;
7. kesehatan;
8. pengembangan kehidupan berkoperasi;
9. kelestarian lingkungan hidup; dan
10. perencanaan sehat.

Pelaksanaan Gerakan PKK secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga. Pada pasal 39 ayat 2 disampaikan bahwa dalam pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian memberikan dukungan dan berperan secara aktif sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan ·berkoordinasi dengan Menteri.

Selain itu pada pasal 62 disampaikan bahwa Pendanaan 10 (sepuluh) program pokok bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan lain-lain sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat. Terkait dengan hal di atas, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dalam hal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya seperti mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten.

Hal ini juga diperkuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah harus mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah bersama mitra Pemerintah dalam hal ini Lembaga Kemasyarakatan, yaitu TP PKK, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kabupaten dalam rangka menciptakan masyarakat yang sehat, maju, mandiri dan sejahtera, melalui;

a. penanganan stunting melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait penanganan Gizi Buruk;

b. dukungan penguatan kelembagaan, pengelolaan, dan pelaksanaan pada 10 Program Pokok PKK sampai di tingkat Desa khususnya penuntasan dan penyelesaian stunting dan kegiatan lain yang berdanpak langsung pada peningkatan angka kesehatan dan penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan, dan nifas;

c. pembinaan dan penguatan kelembagaan serta program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa meliputi penguatan kapasitas kader serta dukungan alat kesehatan dasar seperti timbangan ibu/anak, oxymeter, tensimeter, insentif kader posyandu dan kegiatan lain yang berdanpak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera;

d. melakukan program penguatan dan pengetahuan ketahanan keluarga kepada masyarakat melalui TP PPK, Kader PKK, dan Posyandu dalam rangka mendukung Pemerintah terhadap pemberantasan bahaya Narkotika;

e. mendorong perekonomian berbasis keluarga melalui pemanfaatan lahan/pekarangan dengan tanaman bernilai ekonomi dan produktif;

f. mendorong semangat kewiraswastaan di bidang industri kerajinan dan program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta memperluas pangsa pasar hasil kerajinan; dan

g. memajukan dan mendorong perekonomian melalui desa wisata dan usaha yang dikelola oleh keluarga.

Mempedomani arah kebijakan di atas, maka untuk tahun 2026 telah dipetakan program, kegiatan dan sub kegiatan pendukungan PKK yang dilaksanakan oleh 6 Perangkat Daerah terkait sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.7

Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Pendukungan PKK Tahun 2026

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|
| 1 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Persentase terlaksananya program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemantapan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan | |
| | Sub Kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan Kesadaran masyarakat akan pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan Bermasyarakat, berbangsa, dan Bernegara | Jumlah Keluarga yang Mengikuti pembentukan dan Penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua Aspek kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | |
| 2 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|
| | Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | |
| | Sub Kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan Kesadaran masyarakat akan pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan Bermasyarakat, berbangsa, dan Bernegara | Pembinaan Karakter keluarga melalui pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta dan kasih sayang dalam keluarga<br>- Pembinaan Kesadaran Bela Negara<br>-Pembinaan Keluarga Sadar Hukum<br>- Pembinaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba<br>- Pembinaan Pencegahan Perdagangan Manusia<br>- Pembinaan Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga | |
| | | | |
| | PROGRAM MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | |
| | Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan | Menggerakkan Keluarga dalam Pemenuhan kebutuhan pangan melalui halaman asri, teratur, Indah dan nyaman | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | |
| | Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | |
| | Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing | Pembinaan Keluarga Tentang wajib belajar dua belas tahun<br>- Menggerakkan keluarga dalam peningkatan keterampilan dan pendidikan<br>- Meningkatkan Kapasitas pelatih dan kader PKK dengan menggunakan Modul pelatihan PKK<br>- | |
| 3 | PRORAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA /NAGARI |
| | Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN , LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | |
| | Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kab/Kota | | |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT/RW/PKK/Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase Fasilitasi Pemberdyaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum Adat<br>- Persentase Lembaga Kemayarakatan Desa/Nagari, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang difasilitasi Pemberdayaannya<br>- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan(RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapasitasnya | |
| 4 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | KECAMATAN GUNUANG OMEH |
| | Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Memberdayakan dan memanfaatkan pekarangan keluarga<br>- Memberdayakan kelompok Dasawisma | |
| | Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat | Peningkatan Pelayanan Posyandu<br>- Memberikan penyuluhan Kesehatan secara berkala kepada Masyarakat dan Lansia<br>- Meningkatkan Pola Hidup sehat dan bersih | |
| 5 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU |
| | Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang terlibat dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | |
| | Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Kelurga yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | |
| 6 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI |
| | Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar-Keluarga, warga, dan kelompok masyarakat | | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan ketahanan pangan Keluarga | | |

4.5.2. Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lima Puluh Kota

Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 21 (ayat 4), mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak didaerah. Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (4) diwujudkan melalui komitmen daerah membangun Kabupaten/Kota Layak Anak.

KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak) merupakan sistem pembangunan Kota/Kabupaten yang mengintergrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha/swasta yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Program ini oleh UNICEF dinyatakan sebagai perwujudan dari Konvensi Hak Anak di tingkat lokal, yang dalam prakteknya diartikan bahwa hak-hak anak tercermin dalam kebijakan, hukum, program dan anggarannya.

Indikator KLA terdiri atas indikator kelembagaan dan 24 indikator substansi yang dikelompokkan ke dalam lima klaster hak anak, yaitu hak sipil dan kebebasan; hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; hak kesehatan dan kesejahteraan dasar pendidikan, hak pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; serta hak perlindungan khusus.

Dalam hal kaitannya dengan pencapaian Visi Misi Kepala daerah Tahun 2025-2029 yang dituangkan ke dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029, maka salah satu Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025 -2029 pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat diukur dengan indikator Indeks Perlindungan Khusus Anak, di mana pada tahun 2026 target capaian yang ditetapkan dalam RPJMD adalah sebesar 81,7.

Indeks Perlindungan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat IPKA adalah indikator yang menggambarkan pencapaian pembangunan perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Perlindungan khusus anak di antaranya adalah perlindungan akan risiko kemiskinan, fenomena pekerja anak, kekerasan, maupun perlindungan terhadap anak dengan disabilitas. Indikator yang termasuk dalam IPKA adalah indikator yang menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak, dan anak terlantar baik secara nasional maupun ditingkat provinsi. Hasil IPKA menjadi indikator yang sangat dibutuhkan sebagai dasar penyusun kebijakan terhadap perlindungan khusus anak dan sebagai indikator yang dapat menilai keberhasilan pembangunan.

Pada tahun 2024 capaian IPKA Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai 86,41. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada ranking ke-10 tertinggi dalam pencapaian IPKA dan capaian IPKA Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 lebih tinggi dari capaian Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 80,31. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, mengamanatkan pencapaian IPKA pada tahun 2026 adalah sebesar 81,7. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan pendukungan KLA dalam RKPD Perubahan tahun 2026 yang telah dipetakan sesuai dengan indikator pada evaluasi KLA, sebagaimana daftar berikut:

Tabel 4.8
Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukungan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

| Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Instansi Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|
| Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan PAUD | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Disdikbud |
| Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan | Disdikbud |
| Pengelolaan Pendidikan | Pengelolalaan pendidikan anak usia Dini | Penyelenggaraan Proses belajar PAUD | Disdikbud |
| Pemenuhan UKP dan UKM | Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil | Dinkes |
| Pemenuhan UKP dan UKM | Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Dinkes |
| Pemenuhan UKP dan UKM | Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Dinkes |
| Pemenuhan UKP dan UKM | Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Dinkes |
| Pemenuhan UKP dan UKM | Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dinkes |
| Pemenuhan UKP dan UKM | Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan | Dinkes |
| Pemenuhan UKP dan UKM | Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Dinkes |
| Pemberdayaan Masyaraat Bidang Kesehatan | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat UKBM TK Daerah/Kab | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat | Dinkes |
| Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | DPUPR |

| Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Instansi Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|
| Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | DPUPR |
| Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | DLHPKP |
| Program Pengelolaan Persampahan | Pengelolaan Sampah | Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan , Pengumpulan, Pengangkutan ,Pengolahan dan Pemprosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | DLHPKP |
| Pencegahan dan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Penyelamatan Kebakaran | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Damkar |
| Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Layanan Rujukan | Dinsos |
| Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Dinsos |
| Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Penyediaan Permakanan | Dinsos |
| Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Dinsos |
| Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | DPMDN |
| Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Dishub |

| Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Instansi Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|
| Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Diskominfo |
| Aplikasi Informatika | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Peemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Diskominfo |
| Pembinaan Perpustakaan | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | Dispusip |
| Pembinaan Perpustakaan | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Dispusip |
| Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Kesra |
| Penanggulangan Bencana | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | BPBD |
| Penanggulangan Bencana | Pelayanan Informasi Rawan Bencana | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota | BPBD |

4.5.3. Pelaksanaan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, bahwa RAD Pelayanan Kepemudaan diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Dan berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 005/124/I/Pem-PM/Bappeda-2023 perihal penyusunan RAD Kepemudaan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diamanatkan untuk melaksanakan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan yang mengacu pada Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan tetap memperhatikan karakteristik kewilayahan dan kearifan lokal.

Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan Kepemudaan; sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan Kepemudaan; dan kajian penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan. Dalam melaksanakan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, Pemerintah Pusat melakukan strategi salah satunya adalah meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan Kepemudaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan Tahun 2024-2026 sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan di daerah. Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024-2026 berisi tentang strategi kebijakan dan program kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu RAD Pelayanan Kepemudaan dan RAD Kabupaten Lima Puluh Kota dan dikoordinasikan oleh Badan, Perencanaan Penelitian dan Pengembangan dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Sebagai salah satu upaya dalam pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga daerah yang berkelanjutan maka diselenggarakan Pekan Olah Raga Provinsi (PORPROV) Sumatera Barat XVI Tahun 2026. PORPROV merupakan ajang pekan olahraga yang terdiri dari beberapa cabang olahraga tingkat provinsi yang menjadi tolak ukur dalam keberhasilan pembinaan atlet di daerah.

Pelaksanaan PORPROV terakhir kali diselenggarakan yaitu pada tahun 2018 di Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Lima Puluh Kota berhasil menduduki peringkat ke 5 dari 19 Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki atlet-atlet berbakat yang berpotensi memiliki prestaasi di tingkat provinsi.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 426/377/2026, Kabupaten Lima Puluh Kota ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan cabang olahraga pencak silat dan menembak pada PORPROV XVI Tahun 2026. Penunjukan ini merupakan bentuk kepercayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap kesiapan, sarana, prasarana, serta kapasitas Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menyelenggarakan even olahraga tingkat provinsi.

### 4.5.4 Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG) di Kabupaten Lima Puluh Kota

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman-pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki (dan orang lanjut usia, anak-anak di bawah umur, orang-orang dengan kebiasaan berbeda/difable, serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi) untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, mengamanatkan kepada seluruh Menteri/ Kepala Lembaga Non Kementerian, Gubernur dan Bupati/ Walikota seluruh Indonesia untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan serta mendorong tersusunnya kelembagaan PUG di daerah, Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

(PD) dan Rencana Kerja PD dan juga tersusunnya Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam RKA-PD.

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki. Hasil analisis gender dijadikan acuan dalam menyusun seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran mulai dari rencana jangka menengah dan tahunan yang tertuang dalam RPJMD, RKPD dan Renja PD, dokumen penganggaran KUA-PPAS dan RKA PD.

Dalam hal kaitannya dengan pencapaian Visi Misi Kepala daerah Tahun 2021-2026 yang dituangkan kedalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, maka salah satu Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2021 -2026 pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dukur dengan indikator Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender pada Belanja Langsung APBD), di mana pada tahun 2024, target ARG sebesar 6,1%, di mana realisasi capaiannya sebesar 4,48%. Target ARG pada tahun 2026 yang ditetapkan dalam RPJMD adalah sebesar 4,78%.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.

Dilihat dari data pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029, ketimpangan gender Kabupaten Lima Puluh Kota sejak tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 ketimpangan gender Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada poin 0,441, lebih rendah dari poin IKG Provinsi Sumatera Barat, hal ini disebabkan oleh adanya penurunan perkembangan dimensi pemberdayaan. Pada Tahun 2021, IKG Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada poin tertinggi yaitu 0,549 jauh di atas poin IKG Provinsi Sumatera Barat yang hanya 0,455. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan gender di Kabupaten Lima Puluh Kota semakin membesar atau dengan kata lain kondisi kesetaraan yang semakin kurang baik. Namun pada tahun 2022 IKG Kabupaten Lima Puluh Kota mulai mengalami penurunan hingga tahun 2024 berada pada poin 0,453. Tiga dimensi pembentuk Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yaitu dimensi kesehatan reproduksi, risiko perempuan dalam kesehatan reproduksi serta dimensi pemberdayaan dan dimensi pasar tenaga kerja.

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, bahwasanya IKG yang harus dicapai pada tahun 2026 adalah sebesar 0,423. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan pendukungan PUG Perubahan tahun 2026 yang telah dipetakan sesuai dengan penyampaian Perangkat Daerah, sebagaimana daftar berikut:

Tabel 4.9
Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukungan Pengarus Utamaan Gender (PUG)
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

| No | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 2 | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 3 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Pelayanan BLUD | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | BLUD RSUD Dr. Achmad Darwis |
| 4 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Dinas Kesehatan |
| 5 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Dinas Kesehatan |
| 6 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dinas Kesehatan |
| 7 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 8 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 9 | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 10 | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Dinas Pangan |
| 11 | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Pencegahan Pencemaran dan/atau | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas | Dinas Lingkungan Hidup, |

| No | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| | | Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Perumahan Dan Kawasan Pemukiman |
| 12 | Program Pengelolaan Persampahan | Pengelolaan Sampah | Penanganan sampah melalui pengangkutan | Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman |
| 13 | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Nagari |
| 14 | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 15 | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 16 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Dinas Perhubungan |
| 17 | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Relasi Media | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 18 | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 19 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 20 | Program Pembinaan Perpustakaan | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| 21 | Program Pengelolaan Arsip | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| 22 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi | Dinas Perikanan |

| No | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| | | | dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | |
| 23 | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko | Dinas Perikanan |
| 24 | Program Penyuluhan Pertanian | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Dinas Tanaman Pangan, Horltikultura Dan Perkebunan |
| 25 | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Sekretariat DPRD |
| 26 | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 27 | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 28 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 29 | Program Kepegawaian Daerah | Mutasi dan Promosi ASN | Pengelolaan Mutasi ASN | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 30 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Inspektorat |
| 31 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kecamatan Gunuang Omeh |
| 32 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kecamatan Bukik Barisan |
| 33 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kecamatan Bukik Barisan |
| 34 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan | Kecamatan Bukik Barisan |

| No | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| | | | Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | |
| 35 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Kecamatan Suliki |
| 36 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Kecamatan Guguak |
| 37 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kecamatan Mungka |
| 38 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kecamatan Akabiluru |
| 39 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kecamatan Payakumbuh |
| 40 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kecamatan Payakumbuh |
| 41 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kecamatan Lareh Sago Halaban |
| 42 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kecamatan Harau |
| 43 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kecamatan Pangkalan Koto Baru |
| 44 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kecamatan Kapur IX |
| 45 | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |

| No | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| | | Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | | |

*Sumber : Perangkat Daerah (SIPD)*

## 4.6. PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG PERUBAHAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

### 4.6.1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing yang nantinya bermuara pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar sehingga SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

SPM harus tercapai karena merupakan urusan pemerintahan wajib yang harus dilakukan pemerintah daerah, dan merupakan urusan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaannya. SPM mempunyai 6 (enam) urusan pelayanan dasar, yaitu :

1. Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
2. Trantibumlinmas dilaksanakan oleh Satpol PP, BPBD, Dankar
3. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup
4. Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial
5. Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan
6. Pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus diprioritaskan dalam pelaksanaannya di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota karena Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan tujuan akhirnya meningkatnya kesejahteraan masyarakat (Pasal 8 Permendagri 59 tahun

2021), Laporan SPM digunakan sebagai dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan insentif atau disinsentif kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara (Pasal 9 Permendagri Nomor 59 Tahun 2021), Laporan Penerapan SPM disampaikan gubernur dan bupati/Walikota dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi serta penerapan SPM dipantau terus dalam tahun berjalan oleh pemerintah pusat dan hasil capaian per triwulannya disampaikan ke daerah (Pasal 24 Permendagri 59 Tahun 2021).

Berikut ini daftar Sub Kegiatan pendukung pencapaian SPM di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2026:

Tabel 4.10
Daftar Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian SPM
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

Urusan Pendidikan

| NO | NAMA LAYANAN SPM | NAMA OPD | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angka Partisipasi Sekolah | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan |
| 2 | Angka Partisipasi Sekolah | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Pembangunan Ruang Kelas Baru |
| 3 | Angka Partisipasi Sekolah | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD |
| 4 | Angka Partisipasi Sekolah | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik |
| 5 | Angka Partisipasi Sekolah | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah |
| 6 | Angka Partisipasi Sekolah | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan |
| 7 | Angka Partisipasi Sekolah | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan |
| 8 | Angka Partisipasi Sekolah | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan |
| 9 | Angka Partisipasi Sekolah | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan |
| 10 | Angka Partisipasi Sekolah | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan |
| 11 | Angka Partisipasi Sekolah | DINAS PENDIDIKAN DAN | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik |

| NO | NAMA LAYANAN SPM | NAMA OPD | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |
|---|---|---|---|---|
| | | KEBUDAYAAN | | |
| 12 | Angka Partisipasi Sekolah | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan |
| 13 | Angka Partisipasi Sekolah | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan |
| 14 | Angka Partisipasi Sekolah | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pembangunan Ruang Kelas Baru |
| 15 | Angka Partisipasi Sekolah | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 16 | Angka Partisipasi Sekolah | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik |
| 17 | Angka Partisipasi Sekolah | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar |
| 18 | Angka Partisipasi Sekolah | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah |
| 19 | Angka Partisipasi Sekolah | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 20 | Angka Partisipasi Sekolah | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan |
| 21 | Angka Partisipasi Sekolah | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pembangunan Ruang Kelas Baru |
| 22 | Angka Partisipasi Sekolah | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 23 | Angka Partisipasi Sekolah | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik |
| 24 | Angka Partisipasi Sekolah | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama |
| 25 | Angka Partisipasi Sekolah | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah |
| 26 | Angka Partisipasi Sekolah | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 27 | Literasi dan Numerasi | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan |

| NO | NAMA LAYANAN SPM | NAMA OPD | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Nonformal/Kesetaraan |
| 28 | Literasi dan Numerasi | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah |
| 29 | Literasi dan Numerasi | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa |
| 30 | Literasi dan Numerasi | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan |
| 31 | Literasi dan Numerasi | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik |
| 32 | Literasi dan Numerasi | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar |
| 33 | Literasi dan Numerasi | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pengembangan konten digital untuk pendidikan |
| 34 | Literasi dan Numerasi | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar |
| 35 | Literasi dan Numerasi | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik |
| 36 | Literasi dan Numerasi | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan |
| 37 | Literasi dan Numerasi | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah |
| 38 | Literasi dan Numerasi | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan |
| 39 | Literasi dan Numerasi | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik |
| 40 | Literasi dan Numerasi | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |
| 41 | Literasi dan Numerasi | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pengembangan konten digital untuk pendidikan |

| NO | NAMA LAYANAN SPM | NAMA OPD | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |
|---|---|---|---|---|
| 42 | Literasi dan Numerasi | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |
| 43 | Literasi dan Numerasi | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik |
| 44 | Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |
| 45 | Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |
| 46 | Kekhususan PAUD | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD |
| 47 | Kekhususan PAUD | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD |
| 48 | Kekhususan PAUD | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD |
| 49 | Kekhususan PAUD | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Pengembangan konten digital untuk pendidikan |
| 50 | Kekhususan PAUD | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan |

*Sumber. Sistem Informasi Pemerintah Daerah*

Urusan Kesehatan

| NO | NAMA LAYANAN SPM | NAMA OPD | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat | DINAS KESEHATAN | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat |
| 2 | Pelayanan Kesehatan Balita | DINAS KESEHATAN | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita |
| 3 | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | DINAS KESEHATAN | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir |
| 4 | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | DINAS KESEHATAN | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin |

| NO | NAMA LAYANAN SPM | NAMA OPD | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | Kabupaten/Kota | |
| 5 | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | DINAS KESEHATAN | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil |
| 6 | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) | DINAS KESEHATAN | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV |
| 7 | Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis | DINAS KESEHATAN | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis |
| 8 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut | DINAS KESEHATAN | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut |
| 9 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | DINAS KESEHATAN | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar |
| 10 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | DINAS KESEHATAN | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif |
| 11 | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | DINAS KESEHATAN | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus |
| 12 | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | DINAS KESEHATAN | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi |

*Sumber. Sistem Informasi Pemerintah Daerah*

## Bidang Urusan Pekerjan Umum

| NO | NAMA LAYANAN SPM | NAMA OPD | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan |
| 2 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) |

| NO | NAMA LAYANAN SPM | NAMA OPD | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman |

*Sumber. Sistem Informasi Pemerintah Daerah*

## Bidang Urusan Perumahan Rakyat

| NO | NAMA LAYANAN SPM | NAMA OPD | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana |
| 2 | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota |
| 3 | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana |

*Sumber. Sistem Informasi Pemerintah Daerah*

## Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

| NO | NAMA LAYANAN SPM | NAMA OPD | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelayananan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS |
| 2 | Pelayananan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum |
| 3 | Pelayananan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional |
| 4 | Pelayananan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 | Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala |

| NO | NAMA LAYANAN SPM | NAMA OPD | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | daerah |
| 5 | Pelayananan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat |
| 6 | Pelayananan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah |
| 7 | Pelayanan informasi rawan bencana | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) |
| 8 | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota |
| 9 | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota |
| 10 | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota |
| 11 | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota |
| 12 | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota |
| 13 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana |
| 14 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota |
| 15 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota |
| 16 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota |

| NO | NAMA LAYANAN SPM | NAMA OPD | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana |
| 18 | Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran |
| 19 | Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat |
| 20 | Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| 21 | Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| 22 | Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| 23 | Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran |
| 24 | Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri |

| NO | NAMA LAYANAN SPM | NAMA OPD | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia | Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi |
| 26 | Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia |

*Sumber. Sistem Informasi Pemerintah Daerah*

## Bidang Urusan Sosial

| NO | NAMA LAYANAN SPM | NAMA OPD | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar |
| 2 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial |
| 3 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Layanan Rujukan |
| 4 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga |
| 5 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Penyediaan Alat Bantu |

| NO | NAMA LAYANAN SPM | NAMA OPD | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Penyediaan Permakanan |
| 7 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | DINAS SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Penyediaan Sandang |
| 8 | Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota | DINAS SOSIAL | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Pelayanan Dukungan Psikososial |
| 9 | Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota | DINAS SOSIAL | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan |
| 10 | Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota | DINAS SOSIAL | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Penyediaan Makanan |
| 11 | Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota | DINAS SOSIAL | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Penyediaan Sandang |

*Sumber. Sistem Informasi Pemerintah Daerah*

### 4.6.2. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim

Kemiskinan merupakan masalah global yaitu keadaan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang

memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Gambaran garis kemiskinan di Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.11
Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi
Tahun 2021 – 2025 (Rupiah/kapita/bulan)

| Wilayah | Garis Kemiskinan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Lima Puluh Kota | 475.123 | 504.670 | 553.068 | 582.794 | 593,402 |
| Sumatera Barat | 568.703 | 610.941 | 667.925 | 708.416 | 729,806 |

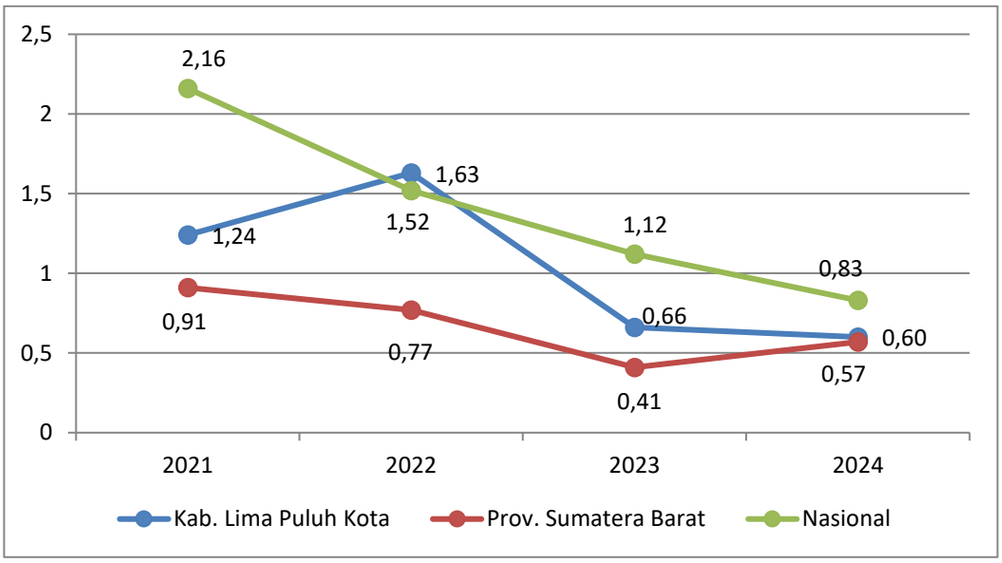
*Sumber: BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025*

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan social (PBB, 1996). Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,99 PPP (Purchasing Power Parity).

Dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, pemerintah pusat telah menetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Berdasarkan Edaran Kementerian

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor B-464/13/D-I/KPS.01.00/02/2024 perihal Pemberitahuan Hasil Perhitungan Estimasi Angka Kemiskinan Ekstrem Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2023, angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami penurunan, hal tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 4.1
Angka Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021-2024 (%)




*Sumber : Satuan Tugas Pengelola Data P3KE*

Dari grafik di atas terlihat bahwa angka kemiskinan ekstrem mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 1,63% dibanding tahun 2021 yang hanya sebesar 1,24%. Namun, setelah dilakukan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan pada tahun 2022, angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Lima Puluh Kota terus mengalami penurunan ke angka 0,60% pada tahun 2024. Angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2021-2024 lebih tinggi dari angka kemiskinan ekstrem Provinsi Sumatera Barat tapi berada diposisi lebih rendah dari kemiskinan ekstrem nasional kecuali pada tahun 2022.

Strategi yang dilaksanakan dalam Penghapusan Kemiskinan Ekstrim ini melalui 3 Strategi sebagai berikut:

1. Menurunkan Beban Pengeluaran Masyarakat, yang dilakukan diantaranya:
    a. Pemberian bantuan pangan pokok berupa beras cadangan pemerintah kabupaten 10 kg/KK.
    b. Pendistribusian bantuan pemerintah pusat terhadap KPM (Keluarga Penerima Manfaat).
    c. Pelaksanaan Bazar Pangan Murah di Nagari-Nagari (Desa).
    d. Bantuan Non Tunai dari Pemerintahan Nagari (Desa).
2. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat, yang dilakukan di antaranya:

a. Bantuan peralatan produksi seperti oven, spinel, pengolahan pupuk serta mesin jahit.
b. Pelatihan keahlian seperti las, otomotif, *Handphone*, menjahit, elektronika, komputer serta dikirimkan ke Balai Besar Latihan Kerja Medan.
c. Penyediaan benih sayuran, rumah benih serta peralatan benih.
d. Bantuan peralatan usaha seperti etalase, kompor gas lengkap, lemari, blender, mixer, dan anglo.
e. Pemberian bantuan ternak sapi, kambing, benih ikan, pakan serta obat-obatan.

3. Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan, yang dilakukan di antaranya:
   a. Pembangunan jalan dan jembatan di daerah terpencil dan terluar serta menuju kawasan potensi pertanian, perikanan dan pariwisata.
   b. Penyediaan air minum berupa pembangunan sambungan rumah.
   c. Pembangunan jamban Rumah Tangga Miskin.

Berikut pemetaan program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung beserta Perangkat Daerah penanggungjawab dalam upaya penanganan kemiskinan seperti yang ditampilkan pada Tabel ..

Tabel 4.12
Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam Penanganan Kemiskinan

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2 | Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 3 | Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Pengelolaan Dana BOP PAUD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 4 | Pengelolaan Pendidikan | | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 5 | Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Non-Formal/Kesetaraan | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 6 | Pengelolaan Pendidikan | | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 7 | Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Penyediaan Permakanan | Dinas Sosial |
| 9 | Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Penyediaan Sandang | Dinas Sosial |
| 10 | Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Dinas Sosial |
| 11 | Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Dinas Sosial |
| 12 | Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dn NAPZA | Dinas Sosial |
| 13 | Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Dinas Sosial |
| 14 | Penanganan Bencana | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Penyediaan Sandang | Dinas Sosial |
| 15 | Pelatihan dan Produktivitas | Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|
| | Tenaga Kerja | Kompetensi | Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | |
| 16 | Penempatan Tenaga Kerja | Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | Perluasan Kesempatan Kerja | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 17 | Pengelolaan Perikanann Tangkap | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | Dinas Perikanan |
| 18 | Pengelolaan Perikanan Budidaya | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil | Dinas Perikanan |
| 19 | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 20 | Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Pelaksanaan Pencapaian Target KOnsumsi PAngan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi | Pemberdayan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal | Dinas Pangan |
| 21 | Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan |
| 22 | Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Pembangunan Prasarana Pertanian | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan |

*Sumber. Sistem Informasi Pemerintah Daerah*

4.6.3. Pelaksanaan Penurunan Prevalensi Stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota

Dalam rangka pengentasan stunting, pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menggandeng dunia usaha untuk ikut berpartisipasi. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, baik melalui perangkat daerah, kecamatan, dan nagari banyak bekerja sama dengan dunia usaha untuk mengadakan acara yang berisi pemberian bantuan terkait stunting. Dukungan CSR dalam pengentasan stunting yaitu berupa pemberian bantuan makanan berupa telur, makanan tambahan, susu, dan vitamin untuk anak dan ibu hamil.

Pemetaan program kegiatan dan alokasi anggaran untuk percepatan penurunan prevalensi stunting tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.13
Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
dalam Penanganan Stunting Tahun 2026

| No | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | BENTUK KEGIATAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Dinas Kesehatan | Workshop Konseling Menyusui bagi Petugas Kesehatan |
| 2 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dinas Kesehatan | BMHP Pemeriksaan Kecacingan |
| 3 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dinas Kesehatan | Pengadaan BMHP Skrining Anemia |
| 4 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dinas Kesehatan | Pelatihan Skrining dan Tatalaksana Balita Stunting Bagi Dokter Puskesmas |
| 5 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dinas Kesehatan | Gebyar Aksi Bergizi |
| 6 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dinas Kesehatan | Orientasi Pencegahan Anemia Pada Remaja |
| 7 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dinas Kesehatan | Workshop SIDDTK dan PMBA Bagi kader |
| 8 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dinas Kesehatan | SUSU PKMK > 1 Th |
| 9 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dinas Kesehatan | SUSU PKMK untuk bayi kurang 1 tahun (400 gr) |
| 10 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | Dinas Kesehatan | Pendampingan Tim Ahli (SpA dan SpOG) ke Puskesmas dan FKTP lainnya dalam pelayanan KIA, Kegawatdaruratan dan Sistem Rujukan Maternal dan Neonatal |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Dinas Kesehatan | |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Dinas Kesehatan | |

| No | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | BENTUK KEGIATAN |
|---|---|---|---|---|
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Dinas Kesehatan | |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Dinas Kesehatan | |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Dinas Kesehatan | |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dinas Kesehatan | |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Dinas Kesehatan | |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dinas Kesehatan | |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dinas Kesehatan | |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan | |
| 11 | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Pemantauan data dan informasi Keluarga Beresiko Stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin, Baduta/Balita | DP2KBP3A | Pemantauan data dan informasi Keluarga Beresiko Stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin, Baduta/Balita |
| 12 | | Pelaksanaan dan pengelolaan program Bangga Kencana di kampung Keluarga Berkualitas | DP2KBP3A | Pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan keluarga Berencana) |

| No | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | BENTUK KEGIATAN |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita) | DP2KBP3A | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita) |
| 14 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Advokasi Program bangga Kencana oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | DP2KBP3A | Pelaksanaan Advokasi program bangga kencana kepada stakeholder dan mitra kerja |
| 15 | | Pengelolaan operasional dan sarana di Balai penyuluhan Bangga Kencana | DP2KBP3A | Pelaksanaan laporan hasil pengelolaan Operasional dan saran di Balai Penyuluhan Bangga Kencana |
| 16 | Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil | Pemberian Pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan | Dinas Perikanan | - Bimtek Budikdamber: 18.135.000,<br>- Demplot Budikdamber (50KK) : 60.400.000 |
| 17 | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko | Dinas Perikanan | - Pengadaan Papan Pengumuman/ Baliho Gemar Ikan Rp. 18.720.000<br>- Sosialisasi Olahan Ikan untuk Ibu Anak Stunting Rp. 11.857.500<br>- Belanja penggantian bahan material imtek Olahan Ikan Untuk Ibu Anak Stunting Rp. 2.810.000<br>- Makan olahan ikan kegiatan pengentasan stunting Rp. 2.000.000 |
| 18 | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | DLHPKP | Pembangunan Baru Rumah Layak Huni sebanyak 17 Unit, 5 Unit untuk anak Stunting dengan rincian 1 Unit balita miskin 2024 dan 4 unit KRS Miskin 2024 (5 unit x Rp.55.000.000,-= Rp.275.000.000,-) |
| 19 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Angka Kecukupan Gizi | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Dinas Pangan | Lomba Pengolahan Pangan Lokal, Bantuan Hibah Rumah Bibit, Bantuan Sosial Kebun B2SA |
| 20 | | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Pangan | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar |

| No | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | BENTUK KEGIATAN |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian data base kependudukan | Pengolahan dan penyajian Data Kependudukan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil |
| 22 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | PUPR | Pembangunan SPAM |
| 23 | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Penyediaan Bibit Ternak |

### 4.6.4. PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar, dan ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Untuk kegiatan penunjang program prioritas dapat di lihat pada tabel

Tabel 4.14
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pengendalian Inflasi di Daerah

| NO | PROGRAM PRIORITAS | BENTUK KEGIATAN | OPD | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengendalian Inflasi di daerah | Pelaksanaan operasi pasar murah | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdanpak dalam 1 (satu) | |
| 2 | Pengendalian Inflasi di daerah | Gerakan Pangan Murah / Operasi Pasar | Dinas Pangan | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | Kegiatan ini bertujuan untuk menghadirkan bahan pangan murah bagi masyarakat yang berdanpak terhadap pengendalian inflasi daerah.<br>Anggaran yang tersedia saat ini hanya untuk 3 kali sementara kebutuhannya bisa lebih dari 15 kali setahun ditambah Gerakan Pangan Murah Keliling ke 79 Nagari |
| 3 | Pengendalian Inflasi di daerah | Fasilitasi Distribusi Pangan | Dinas Pangan | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan subsidi terhadap pengangkutan bahan pangan yang bertujuan untuk menurunkan harga jual bahan pangan dari distributor atau produsen, sehingga harga bahan pangan tidak menaikkan tingkat inflasi daerah |
| 4 | Pengendalian Inflasi di daerah | Toko Pangan Daerah/Toko Pengendalian Inflasi Daerah | Dinas Pangan | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | Toko Pangan Daerah bertujuan untuk menyediakan bahan pangan pokok strategis dengan harga terjangkau, sekaligus memfasilitasi pemasaran produk pertanian langsung dari petani kepada konsumen. Toko Pangan Daerah/TTIC ini berperan untuk memotong rantai pasok, |

| NO | PROGRAM PRIORITAS | BENTUK KEGIATAN | OPD | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | memastikan ketersediaan pangan, dan menjaga stalisasi pasokan dan harga pangan. Kehadiran Toko Pangan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan akses pangan bagi masyarakat sekaligus mendukung kesejahteraan bagi petani dan toko pangan daerah ini juga merupakan upaya untuk mengendalikan inflasi dengan menstabilkan harga bahan pangan |
| 5 | Pengendalian Inflasi di daerah | Monitoring dan Evaluasi SPHP | Dinas Pangan | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasokan pangan tetap stabil, harga terkendali dan masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau |
| 6 | Pengendalian Inflasi di daerah | Sidak Pasar | Dinas Pangan | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa harga yang berlaku di pasar tidak melebihi aturan yang telah ditetapkan seperti tidak melewati Harga Eceran Tertinggi (HET), juga untuk memastikan pasokan pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap stabil, harga terkendali dan masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau. |
| 7 | Pengendalian Inflasi di daerah | Monitoring Stok dan Pasokan Pangan Wilayah Kabupaten | Dinas Pangan | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa ketersediaan dan stok bahan pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah tersedia baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Jangan sampai terjadi kekurangan |

| NO | PROGRAM PRIORITAS | BENTUK KEGIATAN | OPD | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | bahan pangan atau sampai terjadi kelangkaan, karena hal ini akan meningkatkan harga bahan pangan karena pasokan yang tidak terpenuhi. |
| 8 | Pengendalian Inflasi di daerah | Subsidi dan Bantuan Pangan | Dinas Pangan | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin, rentan miskin untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harapan dapat memenuhi pangan mereka dan mencegah terjadinya kelaparan dan malnutrisi. Bantuan pangan ini juga dapat membantu mereka untuk menghemat biaya pengeluaran untuk pangan. |
| 9 | Pengendalian Inflasi di daerah | Monitoring Ketersediaan Pangan Masyarakat | Dinas Pangan | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Kegiatan ini adalah upaya dukungan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan bahan pangan yang dibutuhkan masyarakat |
| 10 | Pengendalian Inflasi di daerah | Penyediaan Bibit Tanaman Pangan | Dinas Pangan | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan bibit tanaman pangan yang dapat meningkatkan ketahanan pangan lokal, mendukung petani, dan mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan, serta meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraan masyarakat sehingga ketergantungan masyarakat terhadap bahan pangan dari luar berkurang dan keadaan ini akan berdanpak terhadap penurunan pengeluaran masyarakat kepada |

| NO | PROGRAM PRIORITAS | BENTUK KEGIATAN | OPD | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | bahan pangan yang berujung kepada terjaganya tingkat inflasi |
| 11 | Pengendalian Inflasi di daerah | Monitoring Ketersediaan Pangan Masyarakat | Dinas Pangan | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah/Kota | Kegiatan bertujuan untuk memastikan pasokan pangan mencukupi, stabil dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat |
| 12 | Pengendalian Inflasi di daerah | Pemberian Bantuan Pangan untuk Balita Stunting/Gizi Buruk/Gizi Kurang | Dinas Pangan | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi kekurangan gizi, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan, serta meningkatkan daya tahan tubuh anak |
| 13 | Pengendalian Inflasi di daerah | Regulasi dan Pengawasan Harga | Dinas Pangan | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota | Kegiatan ini bertujuan untuk menstabilkan harga, mengurangi fluktuasi, melindungi produsen dan konsumen, serta menjamin ketersediaan pangan yang cukup dengan harga wajar sehingga tidak terjadi lonjakan harga yang signifikan atau inflasi. |
| 14 | Pengendalian Inflasi di daerah | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah | Dinas Pangan | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah | Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dapat dipergunakan untuk menjamin ketahanan pangan, mengatasi kekurangan pangan, dan mengendalikan inflasi, terutama saat terjadi bencana atau keadaan darurat, serta melindungi produsen dan konsumen. |

*Sumber. Sistem Informasi Pemerintah Daerah*

Pada tabel di atas dapat kita lihat Program Prioritas Pengendalian Inflasi di Kabupaten Lima Puluh Kota, ada 3 kegiatan mendukung dengan 14 bentuk kegiatan yaitu pelaksanaan operasi pasar murah,Gerakan pangan murah, fasilitasi distribusi pangan, toko pengendalian inflasi daerah, melakukan monitoring dan Evaluasi SPHP, sidak pasar, monitoring stok dan pasokan pangan, subsidi bantuan pangan, monitoring ketersediaan pangan, penyediaan bibit tanaman pangan, pemberian bantuan pangan untuk balita stunting,regulasi dan pengawasan harga serta pengadaan cadangan murah.

### 4.6.5 Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit

Mempedomani PMK Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit maka Pemerintah Daerah yang wilayahnya merupakan penghasil sawit, Provinsi yang bersangkutan dan Kab/Kota yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil, dialokasikan Dana Bago Hasil Perkebunan Sawit yang bersumber dari penerimaan Pengendalian Inflasi di Daerah negara berupa bea keluar dan pungutan ekspor kelapa sawit beserta produk turunannya.

Rencana aksi penggunaan DBH Sawit Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 dan Sub Kegiatan pendukung seperti tanel di bawah ini:

Tabel 4.15
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit Tahun 2026

| No. | Bentuk Kegiatan | Sub Kegiatan Pendukung | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|
| A. | PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN | | |
| 1 | Penanganan Jalan | - Rekonstruksi Jalan<br>- Pemeliharaan Berkala | Dinas PUPR |
| 2 | Penanganan Jembatan | Penggantian Jembatan | Dinas PUPR |
| B. | KEGIATAN LAINNYA | | |
| 1 | Pendataan Perkebunan Sawit Rakyat | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Dinas Pertanian Hortikultura dan Perkebunan |
| 2 | Penilaian Usaha Perkebunan | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Dinas Pertanian Hortikultura dan Perkebunan |
| 3 | Penyusunan, Sosialisasi, dan Monev RAD KSB | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Dinas Pertanian Hortikultura dan Perkebunan |
| 4 | Perlindungan Sosial bagi Anggota Masyarakat yang Ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dengan Prioritas Pekerja Perkebunan Sawit | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | Dinas Perindustrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 5 | Koordinasi Pengelolaan DBH Sawit | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |

### 4.6.6 Prioritas Pembangunan Daerah Lintas Urusan Berbasis Resiliensi Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang tangguh, aman, dan berkelanjutan. Tingginya potensi risiko bencana baik bencana alam, nonalam, maupun sosial menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara terencana dan terpadu. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Tahun 2027, diperlukan penguatan program dan kegiatan penanggulangan bencana yang terintegrasi dalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Arah kebijakan penanggulangan bencana Tahun 2027 difokuskan pada peningkatan ketangguhan daerah melalui penguatan mitigasi bencana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan, penyediaan sarana dan prasarana kebencanaan, penguatan sistem informasi dan peringatan dini, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana. Selain itu, penanganan darurat bencana diarahkan untuk meningkatkan kecepatan respon, koordinasi lintas sektor, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana secara efektif dan tepat sasaran.

Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana, meminimalkan risiko dan dampak kerugian, serta mendukung terwujudnya perlindungan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah. Dengan demikian, penanggulangan bencana tidak hanya berorientasi pada penanganan saat terjadi bencana, tetapi juga pada upaya pengurangan risiko bencana secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan. Usulan program dan kegiatan penanggulangan bencana Tahun 2027 meliputi kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana, penyusunan kajian risiko bencana, sosialisasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat, pelaksanaan simulasi dan pelatihan kesiapsiagaan, pembentukan dan pembinaan desa tangguh bencana, peningkatan kapasitas relawan dan aparatur, pengadaan peralatan serta logistik kebencanaan, pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana, hingga pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sesuai kebutuhan daerah, berikut usulan Rencana Program/Kegiatan Penanggulangan Bencana:

Tabel 4.16
Rencana Program/Kegiatan Penanggulangan Bencana

| No | Sub Kegiatan | Uraian Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|
| 1 | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | Perbaikan TPST Lubuak Batingkok | Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman |

| No | Sub Kegiatan | Uraian Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|
| | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota | Pembuatan FS TPST | Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | Pembuatan Dokumen RISPS | |
| | | Pembuatan Dokumen Lingkungan TPDT | |
| | | Pembuatan DED TPST | |
| | | Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 | |
| | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Pengadaan Kontainer Sampah | Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | Pengadaan Becak Motor Sampah | |
| | | Pengadaan Truk Arm Roll Sampah | |
| | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Pemeliharaan RTH | Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana untuk 23 unit | Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | |
| | | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan | |
| | | Biaya penunjang | |
| | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan | Belanja Jasa Tenaga Ahli UKL-UPL | Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | Belanja Jasa Tenaga Ahli Pertek Limbah | |
| | | Belanja Jasa Tenaga Ahli Amdallalin | |
| | | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | |

| No | Sub Kegiatan | Uraian Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|
| | | Pematangan lahan HUNTAP | |
| | | Biaya penunjang | |
| 2 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Nagari | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari |
| | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Pembinaan Kader Posyandu 6 SPM untuk Nagari Terdampak Bencana | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari |
| | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Workshop pemulihan ekonomi nagari terdampak bencana dengan pemberdayaan Bumnag dan Pelatihan penyusunan laporan pertanggungjawaban bagi Bumnag yang terdampak bencana | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari |
| 3 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Pemeliharaan Kendaraan Operasional Lapangan | BPBD |
| | | PC dan Laptop Bid. KL/Pusdalops | |
| | | Printer Bid. KL/Pusdalops | |
| | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Pusdalops | BPBD |
| | | Pengadaan Peralatan Kebencanaan | |
| | | Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | |
| | | Modal Alat Pendukung Pencarian | |
| | Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota | Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi | BPBD |
| | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | BPBD |
| | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Koordinasi penanganan Pascabencana | BPBD |
| | Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota | Bimbingan Teknis Pasca Bencana | BPBD |

| No | Sub Kegiatan | Uraian Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|
| 4 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Pascabencana | BAPPELITBANGDA |
| 5 | Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana | Pengadaan Peralatan dan Mesin dalam rangka Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Dinding Penahan Tebing | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana | Personal Computer | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | Printer | |
| | | Scanner | |
| 6 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Pengadaan Mobil Damkar 2 Unit | DAMKAR |
| | | Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran | |
| 7 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum | Pengadaan Kendaraan Dalmas Satpol PP | SATPOL PP |
| | | Operasional Dalam Lingkungan Kantor | |
| | | Belanja Perjalanan Dinas | |
| 8 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Biaya Internet Starlink | Dinas KOMINFO |
| | Relasi Media | Biaya Publikasi Media | Dinas KOMINFO |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Pengadaan Peralatan elektronik (TV, PC, Komputer, dll) | Dinas KOMINFO |
| 9 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Belanja Tidak Terduga | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Hutang BPJS Kesehatan | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |

| No | Sub Kegiatan | Uraian Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|
| 10 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Pekerjaan Fisik Rehabilitasi Gedung Kantor DPRD Kab. Lima Puluh Kota (TKD) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor DPRD Kab. Lima Puluh Kota (TKD) | |
| | | Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor DPRD Kab. Lima Puluh Kota (TKD) | |
| | | Biaya Penunjang Kegiatan | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kendaraan Operasional Kantor/Lapangan Roda Dua sebanyak 5 Unit | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | 1 Unit Excavator 13.5 Ton Long Arm | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | 3 Unit Excavator 7.5 Ton sampai 8.0 Ton | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Rehab Gedung Kantor Dinas PUPR (Tambahan TKD) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Perencanaan Rehab Gedung Dinas PUPR (Tambahan TKD) | |
| | | Pengawasan Rehab Kantor Dinas PUPR (Tambahan TKD) | |
| | Normalisasi/Restorasi Sungai | Sungai Batang Sinamar Titik P1 Nagari Koto Tinggi | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Sungai Batang Sinamar Titik P2 Nagari Koto Tinggi | |
| | | Sungai Batang Sinamar Titik P4 Nagari Koto Tinggi | |
| | | Sungai Batang Sinamar Titik P5 Nagari Koto Tinggi | |
| | | Sungai Batang Sinamar Titik P6 Nagari Koto Tinggi | |
| | | Sungai Batang Sinamar Titik P9 Nagari Pandam Gadang | |

| No | Sub Kegiatan | Uraian Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|
| | | Sungai Batang Sinamar Titik P21 Nagari VII koto Talago(jorong koto kociak - Sipingai) | |
| | | Sungai Sarasah Bunta Samping Dinas Perikanan Kab. Lima Puluh Kota | |
| | | Sungai Batang Maek Nagari Gunuang Malintang (Belakang TK Nurul Hidayah) | |
| | | Sungai Batang Kapur Nagari Sialang | |
| | | Sungai Batang Mungo jorong Sei Buluah Kasok | |
| | | Sungai Batang Maek Nagari Gunuang Malintang (Belakang Surau Al-Ubudiyah) | |
| | | Sungai Batang Sinamar Titik P12 dan Titik P13 Nagari Pandam Gadang | |
| | | Belanja Penunjang | |
| | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Rehabilitasi/Peningkatan Irigasi Irigasi Banda Kina | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Rehabilitasi/Peningkatan Irigasi Banda Rumpuik Lunak I, II dan III | |
| | | Rehabilitasi/Peningkatan Irigasi Kampuang Aua | |
| | | Rehabilitasi/Peningkatan Irigasi Banda Bigau | |
| | | Rehabilitasi/Peningkatan Irigasi Banda Polam | |
| | | Rehabilitasi/Peningkatan Irigasi Subaladuang | |
| | | Rehabilitasi/Peningkatan Irigasi Tanjuang Uba | |
| | | Rehabilitasi/Peningkatan Irigasi D.I Batang Mungo | |
| | | Rehabilitasi/Peningkatan Irigasi D.I Namang Simalanggang | |
| | | Rehabilitasi/Peningkatan Irigasi D.I Lakuak Siporam | |
| | | Penunjang Belanja | |
| | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Pamsimas Nagari Sariak Laweh Perluasan Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (TKD) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | SPAM Jorong Simantuang Nagari Situjuah Gadang (TKD) | |

| No | Sub Kegiatan | Uraian Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|
| | | Penunjang Belanja | |
| | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | Drainase di Depan Masjid Jorong Puar Data Nagari Koto Tinggi (TKD) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Drainase Jalan Purwajaya (TKD) | |
| | | Gorong-gorong Jalan Sarilamak (TKD) | |
| | | Penunjang Belanja | |
| | Penggantian Jembatan | Jembatan Gantung Pauh Sangik | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Jembatan Batang Nenan | |
| | | Jembatan Kubang Balambak | |
| | | Plat Decker Puncak KB Jorong Taratak | |
| | | Jembatan Gantung Padang Rantang - Sawah Bandang | |
| | | Konsultan Pengawasan Jembatan Gantung Pauh Sangik | |
| | | Perencanaan Jembatan Gantung Pauah Sangik | |
| | Rekonstruksi Jalan | Ruas Sp. Batu Hampar – Suayan (R-15) , Piladang – Batu Hampar (R-91) , Suayan – Siamang Bunyi (R-107) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Ruas Lampasi – Mungka (R-003) , Koto Baru – Bukik Apik (R-006) , Simalanggang – Koto Baru (R-005) , Balai Rupih – Batang Punik (R-133) , Bukik Apik – Sp. Sugiran (R-68) | |
| | | Ruas Kompi Unit – Lubuak Batingkok (R-57) , Akar Barayun – Harau (R-175) , Jembatan Harau – Solok Bio Bio (R-51) , Sp. Pulutan – Padang Barangan (R-161) , Sei data - Koto Tinggi (R-223) | |
| | | Ruas Sp. Sei Mangkirai – Sei Mangkirai (R-106) , Sp. Andiang – Maek (R-29) | |
| | | Ruas Manggih – Batas Kota Payakumbuh (R-105) , Situjuh Banda Dalam - Ladang Laweh (R-33) , Tanjung Haro - Situjuh Gadang (R-42) , Sibaladuang – Madang Kadok (R-82) | |

| No | Sub Kegiatan | Uraian Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|
| | | Ruas Alang Laweh–Kebun Murbai (R-108) , Sp. Taratak–Sitanang (R-92) , Sp. Sei Ipuah–Ampalu (R-125) , Pakan Sinayan – Pakan Rabaa (R-126) , Aia Randah–Labuah Malintang (R-127) , Pakan Rabaa–Balai Panjang (R-38) , Tanjung Gadang Rumah - Batu kabau (R-250) | |
| | | Ruas Gunuang Malintang-Koto Lamo (R-177) | |
| | | Ruas Talago - Koto Kociak (R-067) , Koto Kociak - Jopang (R-76), Kuranji – Sei Talang Barat (R-137), Kubang Tungkek – Tiakar (R-138), Sp Padang laweh - Sp Balai (R-14) | |
| | | Ruas Tungkar - Simbatak (R-63), Ambacang - Labuah Silang (R-86), Situjuah Ladang Laweh - Bts Kota Tanah Datar (R-228) | |
| | | Ruas Maek - Tanjung Bungo (R-080) | |
| | | Ruas Padang Mungka – Padang Jopang (R-095) | |
| | | Ruas Sp. Balai – Koto Tinggi (R-70) | |
| | | Ruas Muaro – Talang Anau (R-26) | |
| | | Ruas Andaleh - Taram (R-44) | |
| | | Ruas Lubuak Alai - Koto Lamo (R-72) | |
| | | Ruas Koto tinggi - Sp. Sei Dadok (R-22) | |
| | | Ruas Taram - Gantiang (R-97) | |
| | | Ruas Alang Laweh - Mangunai (R-36) | |
| | | Ruas Batang Tabik - Andaleh (R-83) | |
| | | Lanjutan Jalan Lapen Pintu Angin ke Batas Kota (R-246) | |
| | | Ruas Silarak - Batas Kota (R-240) | |
| | | Ruas Bukik Kambuik - Banda Raik (R-101) | |
| | | Ruas Tumpuan - Ampang Gadang (R-141) | |
| | | Ruas Situjuh Batur - Sawah | |

| No | Sub Kegiatan | Uraian Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|
| | | Laweh (R-32) | |
| | | Ruas Andaleh Baliak bukik - Taram (R-230) | |
| | | Ruas Mungo BGS - Pakan Sabtu (R-61) | |
| | | Ruas Pakan Rabaa - Talaweh (R-165) | |
| | | Ruas Bukik Apik - Luak Begak - Talang Anau (R-149) | |
| | | Ruas Suliki - Sp. Sei Dadok (R-27) | |
| | | Ruas Sawah Laweh - Sialang (R-115) | |
| | | Ruas Talang Anau - Kampuang Padang (R-202) | |
| | | Ruas Lakuang - Luak Begak (R-184) | |
| | | Ruas Pinang Baririk - Rogeh (R-64) | |
| | | Jalan Lingkung Durian Tinggi Sialang Kapur IX | |
| | | Jalan Lingkar Jorong Tabek Panjang - Mesjid | |
| | | Jalan PI sampai Pesantren Asabul Yamin, Taram | |
| | | Jalan SMA 1 Piladang | |
| | | Jalan Penghubung Kaludan – Luak Rawang – Anak Kayu – Bukik Apik | |
| | | Jalan Jorong Ke Ludan Nagari Sei. Talang | |
| | | Jalan Boncah – Muaro Batu Balang | |
| | | Jalan Lingkung Koto Harau | |
| | | Jalan Lingkar Kandang Lamo | |
| | | Jalan Lingkung Kapalo Bukik | |
| | | Jalan Simp.Mesjid Nurul Haq – Dalimo | |
| | | Jalan Simpang 3 Tampuniak ke Domang | |
| | | Jalan Koto Kociak Menuju SMPN 3 Kec. Payakumbuh | |
| | | Jalan Lingkar Jorong Penago Nagari Limbanang | |
| | | Jalan Lingkar Kampuang Torondam Nagari Andiang | |
| | | Jalan Botuang Nagari Kurai | |

| No | Sub Kegiatan | Uraian Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|
| | | Jalan Lingkar Samping Kantor Wali Nagari Situjuah Batua | |
| | | Jalan Penghubung Jorong Batang Tabik Menuju Jorong 8,12, Rageh dan Madangkadok | |
| | | Jalan Penghubung Jorong Tabiang Menuju Denzipur / Padang Mangatas | |
| | | Jalan Lurah Batu Kuciang | |
| | | Jalan Jorong Padang Tangah Baruah Gunuang | |
| | | Jalan Jorong Banda Raik | |
| | | Jalan Jorong Sungai Mangkirai | |
| | | Jalan Data Soroman Kubu Kampuang Gaduang Nagari Pandam Gadang | |
| | | Jalan Jorong Sungai Dadok Nagari Koto Tinggi | |
| | | Jalan Pitopang Jorong Kampuang Muaro Nagari Koto Tinggi | |
| | | Simpang Tigo Tanjung Jorong Tigo Balai | |
| | | Jalan Bukik Sikumpa Jorong Balai Pilubang | |
| | | Jalan Pintu koto Bukik limbuku | |
| | | Jalan Mesjid Alhidayah Koto Kociak Nagari Batu Balang | |
| | | Jalan Simpang Beringin Mushola Baruah Anduriang Jorong Koto Kociak Tujuah Koto Talago | |
| | | Jalan Simpang tigo Bendang Jorong koto tangah Lubuak Batingkok | |
| | | Jalan Lingkung Pasar Muaro Paiti | |
| | | Jalan Lingkung Makmur Purwajaya | |
| | | Jalan SD 05 Sarilamak | |
| | | Jalan Depan Dinas Perhubungan Ke Tiga Alua | |
| | | Jalan Baliak Boncah Mesjid Darul Iman Padang Arai Guguak | |
| | | Jalan Sikabu - Tanah Sirah Jorong Situjuah Gadang | |

| No | Sub Kegiatan | Uraian Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|
| | | Jalan Simpang Siamang Guguak - Simpang Jorong Padang Koto Tuo Mungka | |
| | | Jalan Jorong Padang Tarok Harau | |
| | | Ruas Pauah Anok - Lubuak Tabuan (R-143) | |
| | | Jalan Lingkung Tanjung Balik Pangkalan | |
| | | Jalan Padang Laweh Koto Tingga Kecamatan Luak | |
| | | Jalan Jorong Lombah - Ateh Koto | |
| | | Pengawasan Paket 1 TKD | |
| | | Pengawasan Paket 2 TKD | |
| | | Pengawasan Paket 3 TKD | |
| | | Pengawasan Paket 4 TKD | |
| | | Pengawasan Paket 5 TKD | |
| | | Penunjang TKD | |
| | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kota Payakumbuh | Sei Data - Koto Tinggi (R-223) | |
| 11 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya di Kecamatan Bukit Barisan dan Gunuang Omeh | Dinas Perhubungan |
| 12 | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Obat-Obatan Untuk Bantuan Sosial Barang Yang Direncanakan Untuk Individu | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | | Belanja N2 cair | |
| | | Bimtek bansos | |
| | | Bimtek untuk penerima kambing | |
| | | Belanja bantuan ternak kambing | |
| | | Belanja kandang kambing | |
| | | Belanja paket ternak ayam | |
| | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Rehap Unit Puskeswan Limbanang | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | | Jasa konsultansi perencanaan kontruksi | |
| | | Jasa konsultansi pengawasan | |
| 13 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rehab dan pengadaan Peralatan / Perlengkapan BBI | Dinas Perikanan |

| No | Sub Kegiatan | Uraian Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|
| | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | Bimbingan Teknis engelolaan Lubuk Larangan untuk POKMASWAS penerima bantuan Benih dan Pakan | Dinas Perikanan |
| | | Pengadaan Benih dan Pakan Ikan untuk Lubuk Larangan di daerah terdampak Bencana POKMASWAS HULU SINAMAR | |
| | | Pengadaan Benih dan Pakan Ikan untuk Lubuk Larangan di daerah terdampak Bencana POKMASWAS LUBUAK SARUMPUN KOTO | |
| | | Pengadaan Benih dan Pakan Ikan untuk Lubuk Larangan di daerah terdampak Bencana POKMASWAS LUBUK KILANGAN | |
| | | Pengadaan Benih dan Pakan Ikan untuk Lubuk Larangan di daerah terdampak Bencana POKMASWAS SAIYO MUDIAK LIKI | |
| | | Pengadaan Benih dan Pakan Ikan untuk Lubuk Larangan di daerah terdampak Bencana POKMASWAS UMBUIK MUDO | |
| | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | Bimbingan teknis Pembesaran Ikan Gurami dan Ikan Nila | Dinas Perikanan |
| | | Pengadaan Benih dan Pakan Ikan Nila untuk Pokdakan Embun Pagi dan Pokdakan Karya Maju Bersama Nagari Koto Tinggi Kec. Gunuang Omeh | |
| | | Pengadaan Benih dan Pakan Ikan Nila untuk Pokdakan Kayu Cupang, Pokdakan Harapan Jaya, Pokdakan Marongiang Saiyo, Pokdakan Purnama dan Pokdakan Minang Saiyo II Nagari Maek Kec. Bukit Barisan | |
| | | Pengadaan Benih dan Pakan Ikan Nila untuk Pokdakan Harapan Indah Nagari Baruah Gunuang Kec. Bukit Barisan | |
| | | Pengadaan Benih dan Pakan Ikan Gurami untuk Pokdakan Kalumpang dan Pokdakan Saiyo Sakato Nagari Maek Kec. Bukit Barisan | |
| | | Pengadaan Benih dan Pakan Ikan Nila untuk Pokdakan Suka Damai Nagari Sungai Rimbang Kec. Suliki | |

| No | Sub Kegiatan | Uraian Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|
| | | Pengadaan Benih dan Pakan Ikan Gurami untuk Pokdakan Paltob Nagari Andiang Kec. Suliki | |
| | | Pengadaan Benih dan Pakan Ikan Gurami untuk Pokdakan Pondom Bainai Nagari Sungai Rimbang Kec. Suliki | |
| | | Pengadaan Benih dan Pakan Ikan Nila untuk Pokdakan Sinar Batu Putih dan Pokdakan Ngalau Indah I Nagari Pandam Gadang Kec. Gunuang Omeh | |
| | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Bimtek Cara Budidaya Ikan di Kolam Terpal ( 4 Lokasi Penerima Hibah Kolam Terpal) | Dinas Perikanan |
| | | Pengadaan kolam terpal, benih dan pakan (Pokdakan Harapan Maju Nag. Koto Tinggi Kec. Gunung Omeh) | |
| | | Pengadaan kolam terpal, benih, dan pakan (Pokdakan Berkat Benih Nag. Koto Tinggi Kec. Gunung Omeh) | |
| | | Pengadaan Kolam Terpal, Benih dan Pakan (Pokdakan Talang Sarueh, Nagari Sungai Naniang, Kecamatan Bukik Barisan) | |
| | | Pengadaan kolam terpal, benih dan pakan (Pokdakan Hijau Daun Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan) | |
| | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko | Bimbingan Teknis Pengolahan Hasil Perikanan untuk Poklahsar Tunas Muda di Nagari Pandam Gadang | Dinas Perikanan |
| | | Pengadaan Peralatan Pengolahan Poklahsar Tunas Muda Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh | |
| 14 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Pangan Murah | Dinas Pangan |
| | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis | Bantuan Hibah Rumah Bibit Kecamatan Gunuang Omeh | Dinas Pangan |

| No | Sub Kegiatan | Uraian Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|
| | Sumber Daya Lokal | | |
| | | Bantuan Hibah Rumah Bibit Nagari Baruah Gunuang | |
| | | Hibah Kebencanaan dalam rangka Penanganan Pasca Kebencanaan pada Kelompok Wanita Tani Cempaka Nagari Manggilang | |
| | | ibah Kebencanaan dalam rangka Penanganan Pasca Kebencanaan pada KWT Tuah Sakato Nagari Pandam Gadang | |
| | | Bantuan Sosial dalam rangka Kebun B2SA | |
| 15 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Operasional (ATK, Fotocopy, Perjadin) | Distanhortbun |
| | | Desain Pembangunan JUT/Japro | |
| | | Pengawasan Pembangunan JUT/Japro | |
| | | Pembangunan JUT/Japro Keltan Pucuak Mudo | |
| | | Pembangunan JUT/Japro Keltan Harapan Maju | |
| | | Pembangunan JUT/Japro Keltan Amanah Saiyo | |
| | | Pembangunan JUT/Japro Keltan Satampang Baniah | |
| | | Pembangunan JUT/Japro Keltan Hidup Bersama | |
| | | Pembangunan JUT/Japro Keltan Harapan Tani | |
| | | Pembangunan JUT/Japro Gapoktan Lubuak Aua | |
| | | Pembangunan JUT/Japro Keltan Tunggak Lansie | |
| | | Pembangunan JUT/Japro Keltan Venus | |
| | | Pembangunan JUT/Japro Keltan Karya Maju | |
| | | Pembangunan JUT/Japro Keltan Arai Pinang | |
| | | Pembangunan JUT/Japro Keltan Bandar Kubu | |
| | | Pembangunan JUT/Japro Keltan Lubuak Bulan | |
| | | Pembangunan JUT/Japro Keltan Setia Mungka | |
| | | Pembangunan JUT/Japro | |

| No | Sub Kegiatan | Uraian Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|
| | | Keltan Sialang | |
| | | Pembangunan JUT/Japro Keltan Bungo Lado | |
| | | Pembangunan JUT/Japro Keltan Harapan Baru | |
| | | Pembangunan JUT/Japro Keltan Pauh Saiyo | |
| | | Pembangunan JUT/Japro Keltan Tani Harapan | |
| | | Pembangunan JUT/Japro Keltan Harapan Maju | |
| | | Pembangunan JUT/Japro Keltan Sungai Gemuruh | |
| | | Pembangunan JUT/Japro Keltan Panen Raya | |
| | | Pembangunan JUT/Japro Keltan Koto Jaya | |
| | | Pembangunan JUT/Japro Keltan Tangkopu Jaya | |
| | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kota Payakumbuh | Jalan Usaha Tani Aia Malanteh Batu di Tiaka Guguak | |
| 16 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Pembangunan/Revitalisasi Pasar Muara Paiti | Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM |
| | | Pembangunan/Revitalisasi Pasar Daerah Dangung-Dangung | |
| | | Konsultasi Perencanaan Revitalisasi | |
| | | Jasa Pengawasan Revitalisasi Pasar | |
| | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Perbaikan Mobil Tera | Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM |
| 17 | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | Perencanaan Konstruksi (DED) Pembangunan RS IKK Sarilamak | Dinas Kesehatan |
| | Pengembangan Puskesmas | Pembangunan Pagar dan Renovasi Gedung Puskesmas Koto Tinggi | Dinas Kesehatan |
| | | Lanjutan Pembangunan Puskesmas Banja Laweh | |
| | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Pengadaan Alat Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Pemenuhan UHC | Dinas Kesehatan |

| No | Sub Kegiatan | Uraian Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|
| 18 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Pengawasan Rehabilitasi Ruang Guru SDN 03 BATU HAMPAR | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | Perencanaan Rehabilitasi Ruang Guru SDN 03 BATU HAMPAR | |
| | | Rehabilitasi Ruang Guru SDN 03 BATU HAMPAR | |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Pengawasan Rehabilitasi Wc/Toilet SDN 02 SIALANG | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | Pengawasan Rehabilitasi Wc/Toilet SDN 04 KAPUR IX | |
| | | Pengawasan Rehabilitasi Wc/Toilet SDN 11 KOTO TINGGI | |
| | | Perencanaan Rehabilitasi Wc/Toilet SDN 02 SIALANG | |
| | | Perencanaan Rehabilitasi Wc/Toilet SDN 04 KAPUR IX | |
| | | Perencanaan Rehabilitasi Wc/Toilet SDN 11 KOTO TINGGI | |
| | | Rehabilitasi Wc/Toilet SDN 02 SIALANG | |
| | | Rehabilitasi Wc/Toilet SDN 04 KAPUR IX | |
| | | Rehabilitasi Wc/Toilet SDN 11 KOTO TINGGI | |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 02 SARIAK LAWEH | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 02 SIALANG | |
| | | Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 03 BATU HAMPAR | |
| | | PENGAWASAN REHABILITASI RUANG KELAS SDN 03 PANGKALAN | |
| | | Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 11 KOTO TINGGI | |
| | | PENGAWASAN REHAB RUANG KELAS SDN 04 SIALANG | |
| | | Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 02 SARIAK LAWEH | |
| | | Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 02 SIALANG | |
| | | Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 03 BATU HAMPAR | |

| No | Sub Kegiatan | Uraian Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|
| | | PERENCANAAN REHABILITASI RUANG KELAS SDN 03 PANGKALAN | |
| | | Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 11 KOTO TINGGI | |
| | | PERENCANAAN REHAB RUANG KELAS SDN 04 SIALANG | |
| | | Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 02 SARIAK LAWEH | |
| | | Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 02 SIALANG | |
| | | Rehabilitasi ruang kelas SDN 03 Batu Hampar | |
| | | REHABILITASI RUANG KELAS SDN 03 PANGKALAN | |
| | | Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 11 KOTO TINGGI | |
| | | REHAB RUANG KELAS SDN 04 SIALANG | |
| | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kota Payakumbuh | SDN 04 Simpang Kapuak, Kubang Balambak Kecamatan Mungka | |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 4 KAPUR IX | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 4 KAPUR IX | |
| | | Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 4 KAPUR IX | |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | PENGAWASAN REHABILITASI DAM SMPN 2 KEC. BUKIK BARISAN | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | PERENCANAAN REHABILITASI DAM SMPN 2 KEC. BUKIK BARISAN | |
| | | REHABILITASI DAM SMPN 2 KEC. BUKIK BARISAN | |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Belanja Jasa Pengawasan Rehab TK Al Ikhlas Aia Angek | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | Belanja Jasa Perencanaan Rehab TK Al Ikhlas Aia Angek | |
| | | Rehabilitasi Ruang Kelas TK Al Ikhlas Aia Angek | |
| 19 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | Dinas Pariwasata Pemuda dan Olahraga |

| No | Sub Kegiatan | Uraian Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|
| | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Prasarana Taman Bermain Anak Aka Barayun | Dinas Pariwasata Pemuda dan Olahraga |
| | | Pembangunan DAM Irigasi / Tembok Penahan Pengaman Bangunan Taman Anak Aka Barayun | |
| 20 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan Gedung Kantor Bupati, Rudin KDh, WKDh, Sekretaris Daerah dan Rudin Pemda | Setda |

*Sumber:Rancangan Dokumen R3P*

## 4.7. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah pada akhir tahun perencanaan dan menjadi ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan.

Indikator Kinerja Utama Daerah menggambarkan keberhasilan kinerja pemerintah daerah terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan yang ditunjukkan oleh akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Penetapan beberapa indikator makro ekonomi antara lain pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Gini Ratio, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) serta indikator terkait IPM antara lain Usia Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran per kapita berdasarkan analisis hasil evaluasi dan penyesuaian terhadap danpak Covid-19. Sedangkan penetapan indikator lainnya berdasarkan target indikator kinerja yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 pada tahun 2025. Di dalam RPJMD indikator ini dinamakan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah periode sebelumnya, maka seluruh dokumen perencanaan strategis yang berlaku dalam periode tersebut, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021–2026, dinyatakan telah selesai masa berlakunya. IKU tersebut disusun berdasarkan visi, misi, dan program unggulan kepala daerah sebelumnya.

Pada periode perencanaan pembangunan daerah tahun 2025–2029, IKU daerah disusun dengan mengacu pada visi, misi, serta janji politik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Seluruh indikator ini telah dirumuskan secara sistematis dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 yang menjadi acuan utama dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah selama lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, IKU daerah yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 juga mengacu pada IKU Kepala Daerah terpilih sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2025-2029. Hal ini dimaksudkan agar

perencanaan tahunan selaras dengan arah kebijakan strategis kepala daerah yang sedang menjabat, serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur capaian kinerja pemerintah daerah secara lebih terintegrasi dan akuntabel.

Sehubungan hal tersebut, perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.17
Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2026

| NO | INDIKATOR | CAPAIAN 2025 | TARGET CAPAIAN | | Berubah/ Tidak Berubah |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | RKPD 2026 | Perubahan RKPD 2026 | |
| 1. | Indeks ABS-SBK | 2,31 | 2,14 | 2,14 | Tidak Berubah |
| 2. | Persentase cagar budaya yang dilestarikan | 100 | 2 | 100 | Berubah |
| 3. | Indeks Pembangunan Keluarga | 66,4 | 63,4 | 62,3 | Berubah |
| 4. | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 1,6001 | 3,12 | 3,12 | Tidak Berubah |
| 5. | Persentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan | 122 | 100 | 100 | Tidak Berubah |
| 6. | Indeks Reformasi Birokrasi | 71,23 | - | 72,04 | Berubah |
| 7. | Indeks Pelayanan Publik | 4,21 | 4,39 | 4,29 | Berubah |
| 8. | Indeks Reformasi Hukum | 98,24 | 73 | 72,05 | |
| 9. | Indeks Pembangunan Manusia | 73,43 | 72,66 | 73,05 | Berubah |
| 10. | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | Rp.59.671.964 | Rp.62.871.993 | Rp.62.871.993 | Tidak Berubah |
| 11. | Rata-rata Lama Sekolah (tahun) | 8,49 | 8,54 | 8,26 | Berubah |
| 12. | Harapan Lama Sekolah (tahun) | 13,53 | 13,75 | 13,48 | Berubah |
| 13. | Usia Harapan Hidup (tahun) | 73,64 | 73,93 | 73,79 | Berubah |
| 14. | Rasio Gini | 0,218 | 0,202 | 0,218 | Berubah |
| 15. | Tingkat Pengangguran Terbuka | 3,77 | 3,63 | 3,65 | Berubah |
| 16. | Pertumbuhan ekonomi | 3,46 | 5,47 | 5,68 | Berubah |
| 17. | Rasio PDRB Akomodasi Mamin | 0,82 | 0,95 | 0,93 | Berubah |
| 18. | Proporsi jumlah IKM | 99,95 | 3,51 | 3,51 | Tidak Berubah |
| 19. | Rasio Kewirausahaan | 3,55 | 6,92 | 7,23 | Berubah |
| 20. | Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB | 3,4354 | 0,953 | 0,904 | Berubah |

| NO | INDIKATOR | CAPAIAN 2025 | TARGET CAPAIAN | | Berubah/ Tidak Berubah |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | RKPD 2026 | Perubahan RKPD 2026 | |
| 21. | Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) | 47,13 | 40,978 | 39,84 | Berubah |
| 22. | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) | 63,31 | 62,89 | 69,3 | Berubah |
| 23. | Persentase dan stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok | 9,26 | 10,21 | 10,21 | Tidak Berubah |
| 24. | Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) | 10,63 | 13,84 | 13,84 | Tidak Berubah |
| 25. | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB | 0,27 | 0,21 | 0,22 | Berubah |
| 26. | Rasio PDRB Industri Pengolahan | 6,85 | 7,01 | 4,925 | Berubah |
| 27. | Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (ribu orang) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Tidak Berubah |
| 28. | Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%) Kabupaten/Kota terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi | 2,49 | 1,507 | 1,651 | Berubah |
| 29. | Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan( %) | 32,04 | 33,24 | 33,24 | Tidak Berubah |
| 30. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 78,91 | 76,012 | 76,01 | Berubah |
| 31. | RT dengan Akses Sanitasi Aman | 0,46 | 9,852 | 9,33 | Berubah |
| 32. | Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Perpipaan | 17,37 | 15,5 | 15,5 | Tidak Berubah |
| 33. | Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau | 58,66 | 48,87 | 54,04 | Berubah |
| 34. | Indeks tutupan lahan | 75,07 | 75,46 | 75,46 | Tidak Berubah |
| 35. | Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) | 11,23 | 29,08 | 36,48 | Berubah |
| 36. | Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) | 5,13 | 16,83 | 33,66 | Berubah |
| 37. | Indeks Desa | Mandiri | - | Mandiri | Berubah |
| 38. | Persentase Desa Mandiri (%) | 88,60 | 7,93 | 88,61 | Berubah |

Tabel 4.18
Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota

| NO | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian 2025 | TARGET CAPAIAN | | BERUBAH/ TIDAK BERUBAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPD 2026 | PERUBAHAN RKPD 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI | | | | | |
| 1 | Konsumsi Listrik Per Kapita | kWh/Kapita | 337,91 | 372 | 372 | Tidak Berubah |
| 2 | Indeks Ketahanan Pangan | Angka | 82,37 | 83,67 | 83,59 | Berubah |
| 3 | Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%) | % | 6,57 | 5,818 | 5,73 | Berubah |
| 4 | Kapasitas Air Baku (m3/detik) | m3/detik | 0.14808 | 0,04 | 0,036 | Berubah |
| 5 | Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) | % | 17,37 | 78,96 | 15,5 | Berubah |
| 6 | Indeks tutupan lahan | Indeks | 75,07 | 75,46 | 75,46 | Tidak Berubah |
| 7 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | 78,91 | 76,01 | 76,01 | Tidak Berubah |
| 8 | RT dengan Akses Sanitasi Aman | % | 0.46 | 9,85 | 9,33 | Berubah |
| 9 | Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) | % | 11,23 | 29,08 | 36,48 | Berubah |
| 10 | Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) | % | 5,13 | 16,83% | 33,66 | Berubah |
| 11 | Indeks Risiko Bencana Daerah | Indeks | 197,52 | 119,19-118,92 | 117,91 - 116,64 | Berubah |
| 12 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Angka | 78,91 | 76,01 | 76,01 | Tidak Berubah |
| 13 | Jumlah Penduduk | Jiwa | 406,228 | 410.269 | 410,33 | Berubah |
| 14 | Laju Pertumbuhan Penduduk | % | 1,15 | 1,11% | 1,11% | Tidak Berubah |
| 15 | Rasio Penduduk | % | 99,68% | 100,77% | 100,77% | Tidak Berubah |
| 16 | Kepadatan Penduduk | | | 123 | 121,24 | Berubah |
| | | | | | | |
| | ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | Jiwa/Km2 | | | | |
| 1 | Laju Pertumbuhan ekonomi | % | 3.40 | 5,47 | 5,68 | Berubah |
| 2 | Tingkat Kemiskinan (%) | % | 6.10 | 5,01%-5,18% | 5,88 | Berubah |
| 3 | PDRB per kapita ADHB (Rp. Juta) | Rp. Juta | 55,42 | 65,96 | 63,53 | Berubah |
| 4 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 3,77 | 3,63 | 3,65 | Berubah |
| 5 | Rasio Gini | Rasio | 0,218 | 0,202 | 0,218 | Berubah |
| 6 | Indeks Pembangunan Manusia | Indeks | 73,43 | 72,66 | 73,05 | Berubah |
| 7 | Usia Harapan Hidup (tahun) | Tahun | 73,64 | 73,93 | 73,79 | Berubah |
| 8 | Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) | per 100.000 kelahiran hidup | 42,79 | 104 | 83 | Berubah |
| 9 | Prevalansi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) | % | 9,13 | 26,2 | 22,65 | Berubah |
| 10 | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%) | % | 46,65 | 53 | 53 | Tidak Berubah |

| NO | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian 2025 | TARGET CAPAIAN | | BERUBAH/ TIDAK BERUBAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPD 2026 | PERUBAHAN RKPD 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%) | % | 80,3 | 89,50% | 89 | Berubah |
| 12 | Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%) | % | 95,08% | 95,2% | 98,10% | Berubah |
| 13 | Persentase satuan Pendidikan yang mencapai SKM pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca | % | L : 54,29 | L: 62,63% | L: 54,99% | Berubah |
| 14 | Persentase satuan Pendidikan yang mencapai SKM pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi | % | N:37,74 | N: 39,13% | N: 47,49% | Berubah |
| 15 | Rata-rata Lama Sekolah (tahun) | Tahun | 8,49 | 8,54 | 8,26 | Berubah |
| 16 | Harapan Lama Sekolah (tahun) | Tahun | 13,53 | 13,75 | 13,48 | Berubah |
| 17 | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi | % | 10,37 | 9,14 | 12,12 | Berubah |
| 18 | Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) | % | | 65,61% | 70,41 | Berubah |
| 19 | Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) | % | 5,9 | 25,99% | 25,99 | Tidak Berubah |
| 20 | Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%) | % | 1,1 | 2,32% | 2,32 | Tidak Berubah |
| 21 | Persentase cagar budaya yang dilestarikan | % | 100 | 2% | 100 | Berubah |
| 22 | Indeks ABS-SBK | Indeks | 2.31 | 2,14 | 2,14 | Tidak Berubah |
| 23 | Indeks Pembangunan Keluarga | Indeks | 66,4 | 63,4 | 62,3 | Berubah |
| 24 | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | Indeks | 0.401 | 0,48 | 0,423 | Berubah |
| 25 | Indeks perlindungan khusus anak | Indeks | 86,410 | 81,6 | 81,7 | Berubah |
| | | | | | | |
| | ASPEK DAYA SAING DAERAH | | | | | |
| 1 | Rasio PDRB Industri Pengolahan | % | 6,85 | 7,01 | 4,925 | Berubah |
| 2 | Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum | % | 0.82 | 0,95 | 0,93 | Berubah |
| 3 | Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (ribu orang) | Ribu orang | 2 | 1,5 | 1,5 | Tidak Berubah |
| 4 | Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%) terhadap Kabupaten/Kota | % | 2.49 | 1,507% | 1,651 | Berubah |
| 5 | Proporsi jumlah UKM non | % | 98.21 | 98,22% | 98,22% | Tidak |

| NO | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian 2025 | TARGET CAPAIAN | | BERUBAH/ TIDAK BERUBAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPD 2026 | PERUBAHAN RKPD 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | pertanian | | | | | Berubah |
| 6 | Proporsi jumlah industri kecil dan menengah(%) | % | 99,95 | 3,51% | 3,51 | Tidak Berubah |
| 7 | Rasio Kewirausahaan | % | 3,55 | 6,92% | 7,23 | Berubah |
| 8 | Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB | % | 3.4354 | 0,953% | 0,904 | Berubah |
| 9 | ROA BUMD | % | -7,88 | 0,002 | 0,002 | Tidak Berubah |
| 10 | Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) | % | 47,13 | 40,98 | 39,84 | Berubah |
| 11 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) | % | 63,31 | 62.89% | 69,3 | Berubah |
| 12 | Indeks Inovasi Daerah | Indeks | 48.34 | 53.04 | 53,04 | Tidak Berubah |
| 13 | Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%) | % | 32,08 | 33,24% | 33,24% | Tidak Berubah |
| 14 | Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/orang) | Juta/orang | 45.250.643 | 70.006.474 | 70.006.474 | Tidak Berubah |
| 15 | Indeks digital masyarakat Indonesia | Indeks | 39,45 | 51.57 | 51,57 | Tidak Berubah |
| 16 | Persentase dan stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok | % | 9,26 | 10.21 | 10,21 | Tidak Berubah |
| 17 | Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) | % | | 31.35% | 31,35% | Tidak Berubah |
| 18 | Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) | % | 10,63 | 13.84% | 13,84% | Tidak Berubah |
| 19 | Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau | % | 58,66 | 48.87 | 54,04 | Berubah |
| 20 | Persentase Desa Mandiri (%) | % | 88,61% | 7,93% | 88,61% | Berubah |
| 21 | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB | % | 0,27 | 0,21 | 0,22 | Berubah |
| 22 | Total Dana Pihak Ketiga / PDRB | % | 1,07 | 9,79 | 9,79 | Tidak Berubah |
| 23 | Nilai Transaksi Saham Nilai Transaksi Saham per Kapita per Kabupaten / Kota (Rupiah) | Rupiah | 844.442 | 951.242 | 951.242 | Tidak Berubah |
| 24 | Total Kredit/PDRB | % | 11,5 | 11,52 | 11,52 | Tidak Berubah |
| 25 | Rasio PDRB sektor jasa keuangan | % | 1,73 | 2 | 2 | Tidak Berubah |
| 26 | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | Rp | 59.671.964 | Rp62.871.993 | 62.871.993 | Tidak Berubah |
| | | | | | | |
| | ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | | |
| 1 | Indeks Reformasi Hukum | Indeks | | 73 | 72,05 | Berubah |
| 2 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik / Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)* | Indeks | 98,24 | 3.38 | 1,3* | Berubah |
| 3 | Indeks Pelayanan Publik | Indeks | 3,39 | 4,39 | 4,29 | Berubah |
| 4 | Survey penilaian integritas (SPI KPK)(nilai) | Nilai | 65,8 (Rentan) | 71,25 (rentan) | 71,25 (rentan) | Tidak Berubah |

| NO | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian 2025 | TARGET CAPAIAN | | BERUBAH/ TIDAK BERUBAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPD 2026 | PERUBAHAN RKPD 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | Indeks Persepsi Anti Korupsi | Indeks | | 98,464 | - | Berubah |
| 6 | Persentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan | % | 122 | 100% | 100% | Tidak Berubah |
| 7 | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Nilai | 1,6001* | 3,12 | 3,12 | Tidak Berubah |
| 8 | Angka Kriminalitas (per 100.000) | per 100.000 | 121 | 107.4 | 107,4 | Tidak Berubah |
| 9 | Indeks Kinerja Organisasi Masyarakat | Indeks | | 47 | 47 | Tidak Berubah |
| 10 | Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan | % | 43% | 76% | 76% | Tidak Berubah |
| 11 | Penyelesaian gangguan Kamtibmas | % | 72,27% | 77.30% | 77,30% | Tidak Berubah |
| | | | | | | |
| | INDIKATOR KINERJA KUNCI | | | | | |
| a. | PENDIDIKAN | | | | | |
| 1 | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | % | 49,01 | 70,82 | 70,82 | Tidak Berubah |
| 2 | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | % | 86 | 89,33 | 89,33 | Tidak Berubah |
| 3 | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama | % | 75 | 80,67 | 80,67 | Tidak Berubah |
| 4 | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | % | 81,54 | 97,50 | 97,05 | Berubah |
| 5 | Indeks Distribusi Guru | Indeks | 0,7 | - | 0,66 | Berubah |
| 6 | Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik | % | 57,2 | - | 62,75 | Berubah |
| 7 | Rata-Rata Lama Sekolah | Tahun | 8,49 | - | 8,26 | Berubah |
| 8 | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 13,53 | - | 13,48 | Berubah |
| | | | | | | |
| b. | KESEHATAN | | | | | |
| 1 | Persentase penderita hipertensi mendapatkan kesehatan seusai standar | % | 100 | 65 | 100 | Berubah |
| 2 | Usia Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 73.64 | - | 73,79 | Berubah |
| 3 | Jumlah kematian ibu | Orang | 2 | - | 6 | Berubah |
| 4 | Cakupan imunisasi bayi lengkap | Persentase | 28.2 | - | 85 | Berubah |
| 5 | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita | (%) | 9,13 | - | 22,65 | Berubah |
| 6 | Cakupan kepesertaan aktif jkn | % | 74,30 | - | 82 | Berubah |
| 7 | Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%) | % | 80,3 | - | 86 | Berubah |

| NO | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian 2025 | TARGET CAPAIAN | | BERUBAH/ TIDAK BERUBAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPD 2026 | PERUBAHAN RKPD 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | Jumlah kematian balita | Orang | 73 | - | 72 | Berubah |
| 9 | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis | % | 25.89 | - | 46 | Berubah |
| 10 | Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup | % | 45 | - | 66,1 | Berubah |
| 11 | Persentase depresi pada usia > 15 Tahun | % | 1,9 | - | 1,4 | Berubah |
| 12 | Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis masyarakat | % | 21,5% | - | 22,5 | Berubah |
| 13 | Prevalensi Obesitas >18 Tahun (%) | % | 14.45 | - | 23.4 | Berubah |
| 14 | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 9,09 | - | 59,1 | Berubah |
| 15 | Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan | % | 83.6 | - | 83,81 | Berubah |
| 16 | Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat | % | 53,7 | - | 48,5 | Berubah |
| 17 | Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional | % | 100 | - | 100 | Berubah |
| 18 | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna | % | 68.1 | - | 63,4 | Berubah |
| 19 | Persentase fasilitas kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar | % | 9,09 | - | 59,1 | Berubah |
| 20 | Persentase lanjut usia yang mandiri | % | 96,6 | - | 91 | Berubah |
| 21 | Persentase merokok penduduk 10-21 tahun | % | 9,25 | - | 11,4 | Berubah |
| 22 | Cakupan penemuan kasus TB | % | 46,65 | - | 45 | Berubah |
| 23 | Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi | % | 26,52 | - | 100 | Berubah |
| 24 | Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar | % | 81 | - | 100 | Berubah |
| 25 | Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar | % | 100 | - | 100 | Berubah |
| 26 | Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar | % | 59.8 | - | 64 | Berubah |
| 27 | Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu | % | 96 | - | 64 | Berubah |
| 28 | Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan | % | 50 | - | 55 | Berubah |
| 29 | Persentase apotek dan toko obat yang mampu memenuhi persyaratan perizinan | % | 100 | - | 100 | Berubah |
| 30 | Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah | % | 85 | - | 88 | Berubah |
| 31 | Persentase masyarakat | % | 45 | - | 100% | Berubah |

| NO | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian 2025 | TARGET CAPAIAN | | BERUBAH/ TIDAK BERUBAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPD 2026 | PERUBAHAN RKPD 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | bidang kesehatan yang diberdayakan | | | | | |
| | | | | | | |
| c. | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | |
| 1 | Indeks Pembangunan IKK | % | 0 | - | 0,91 | Berubah |
| 2 | Indeks Pembangunan Infrastruktur | % | 60.65 | - | 54,16 | Berubah |
| | | | | | | |
| d. | PERUMAHAN RAKYAT | | | | | |
| 1 | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota | % | 100,00 | 100 | 100 | Tidak Berubah |
| 2 | Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota | % | 100 | 1,66 | 100 | Berubah |
| 3 | Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani | % | 0,66 | 1,66 | 1,66 | Tidak Berubah |
| 4 | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) | % | 16,30 | 23,27 | 18,74 | Berubah |
| 5 | Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU | % | 9,89 | - | 30 | Berubah |
| | | | | | | |
| e. | KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | |
| 1 | Persentase Penanganan Pelanggaran Perda Yang Diselesaikan | % | 122 | - | 100 | Berubah |
| 2 | Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas | % | 100 | - | 100 | Berubah |
| 3 | Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana | % | 100 | - | 100 | Berubah |
| 4 | Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana | % | 100 | - | 100 | Berubah |
| 5 | Persentase Penanganan Pasca Bencana | % | 100 | - | 100 | Berubah |
| 6 | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | % | 95 | - | 96 | Berubah |
| 7 | Waktu Tanggap *(Respone Time)* Penanganan Kebakaran | Menit | 13 menit. 16 detik | - | 15 menit | Berubah |
| | | | | | | |
| f. | SOSIAL | | | | | |
| 1 | Indeks Kesejahteraan Sosial | Nilai | 50.05 | - | 51,50 | Berubah |
| 2 | Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial | % | 78 | - | 80 | Berubah |
| 3 | Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial | % | 100 | - | 100 | Berubah |
| 4 | Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam rangka | % | 95 | - | 95 | Berubah |

| NO | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian 2025 | TARGET CAPAIAN | | BERUBAH/ TIDAK BERUBAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPD 2026 | PERUBAHAN RKPD 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | penyelenggaraan kesejahteraan sosial | | | | | |
| 5 | Persentase PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial | % | 100 | - | 100 | Berubah |
| 6 | Persentase PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial bagi PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA | % | 100 | - | 100 | Berubah |
| 7 | Persentase PSKS yang melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar | % | 100 | - | 100 | Berubah |
| 8 | Persentase PSKS yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial | % | 20 | - | 20 | Berubah |
| 9 | Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial | % | 20 | - | 20 | Berubah |
| 10 | Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | % | 25 | - | 25 | Berubah |
| 11 | Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | % | 30.92 | - | 25 | Berubah |
| 12 | Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | % | 18.84 | - | 25 | Berubah |
| 13 | Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | % | 25 | - | 25 | Berubah |
| 14 | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | % | 22.9 | - | 20 | Berubah |
| 15 | Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar | % | 100 | - | 100 | Berubah |
| 16 | Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi | % | 0,67 | - | 0,67 | Berubah |
| 17 | Persentase Kecamatan yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin | % | 100 | - | 100 | Berubah |
| 18 | Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan | % | 1.39 | - | 1,34 | Berubah |
| 19 | Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana | % | 100 | - | 100 | Berubah |
| 20 | Persentase masyarakat di | % | 100 | - | 100 | Berubah |

| NO | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian 2025 | TARGET CAPAIAN | | BERUBAH/ TIDAK BERUBAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPD 2026 | PERUBAHAN RKPD 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya | | | | | |
| 21 | Persentase korban bencana yang mendapat layanan pemulihan sosial | % | 100 | - | 100 | Berubah |
| 22 | Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik | % | 95 | - | 95 | Berubah |
| | | | | | | |
| g. | TENAGA KERJA | | | | | |
| 1 | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | Rp | 59.671.964 | 65 | 62.871.993 | Tidak Berubah |
| 2 | Proporsi Jumlah IKM | % | 99,95 | - | 3,51 | Berubah |
| 3 | Rasio Kewirausahaan | % | 3,55 | - | 7,23 | Berubah |
| 4 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 3,77 | - | 3,65 | Berubah |
| 5 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | % | 63,31 | - | 69,3 | Berubah |
| 6 | Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal | % | 47,13 | - | 40,98 | Berubah |
| 7 | Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang meningkat Produktifitasnya. | % | 0,95 | - | 60 | Berubah |
| 8 | Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan Di Dalam Negeri | % | 2,5 | - | 60 | Berubah |
| | | | | | | |
| h. | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | |
| 1 | Persentase Anggaran Responsif Gender ARG | % | 22,22% | 6,46 | 4.78% | Tidak Berubah |
| 2 | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | Indeks | 66,4 | - | 62,3 | Berubah |
| 3 | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | Indeks | 0,401 | - | 0,423 | Berubah |
| 4 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Indeks | 94,87 | - | 94,88 | Berubah |
| 5 | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | Indeks | 69,390 | - | 64,7 | Berubah |
| 6 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan | % | 64.30% | - | 69.30% | Berubah |
| 7 | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | % | 85 | - | 85,5 | Berubah |
| 8 | Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang Berspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar | % | 25 | - | 30 | Berubah |
| 9 | Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan | % | 50 | - | 75 | Berubah |
| 10 | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) | % | 65,680 | - | 60,6 | Berubah |
| 11 | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | % | 100 | - | 85,5 | Berubah |
| 12 | Indeks Perlindungan | % | 86,410 | - | 81,7 | Berubah |

| NO | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian 2025 | TARGET CAPAIAN | | BERUBAH/ TIDAK BERUBAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPD 2026 | PERUBAHAN RKPD 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Khusus Anak (IPKA) | | | | | |
| | | | | | | |
| i. | PANGAN | | | | | |
| 1 | Indeks Ketahanan Pangan (IKP) | Indeks | 82,37 | - | 83,59 | Berubah |
| 2 | Persentase Jumlah Cadangan Pangan | % | 109,11 | - | 100 | Berubah |
| 3 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Skor | 92,9 | - | 91,4 | Berubah |
| 4 | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan | % | 1,26 | - | 7,59 | Berubah |
| 5 | Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan | % | 63,64 | - | 89,3 | Berubah |
| | | | | | | |
| j. | PERTANAHAN | | | | | |
| 1 | Persentase konflik pertanahan yang di fasilitasi melalui mediasi | % | 100 | - | 80 | Berubah |
| | | | | | | |
| k. | LINGKUNGAN HIDUP | | | | | |
| 1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota | Indeks | 78,91 | 76,01 | 76,01 | Tidak Berubah |
| 2 | Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota | % | 19,18 | 31,38 | 31,38 | Tidak Berubah |
| 3 | Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota | % | 81,81 | 95 | 95 | Tidak Berubah |
| | | | | | | |
| l. | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan | Indeks | 93,96 | - | 95,96 | Berubah |
| 2 | Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital. | % | 6,88% | - | 10% | Berubah |
| 3 | Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak | % | 69,58% | - | 55% | Berubah |
| 4 | Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan. | % | 100% | - | 100% | Berubah |
| 5 | Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan. | % | 96,93% | - | 96% | Berubah |
| 6 | Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan. | % | 100% | - | 100% | Berubah |
| 7 | Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | % | 100% | - | 100% | Berubah |
| 8 | Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan | % | 100% | - | 100% | Berubah |
| 9 | Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan | % | 100% | - | 100% | Berubah |
| | | | | | | |

| NO | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian 2025 | TARGET CAPAIAN | | BERUBAH/ TIDAK BERUBAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPD 2026 | PERUBAHAN RKPD 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| m. | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | |
| 1 | Persentase Desa Mandiri | % | 88,61% | - | 88,61% | Berubah |
| 2 | Persentase Fasilitasi Penataan Desa | % | 0% | - | 0% | Berubah |
| 3 | Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa | % | 0% | - | 0% | Berubah |
| 4 | Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkaatkan Kapasitasnya | % | 100% | - | 80% | Berubah |
| 5 | Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa | % | 0% | - | 100% | Berubah |
| 6 | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) | % | 100% | - | 90% | Berubah |
| 7 | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat | % | 0% | - | 90% | Berubah |
| | | | | | | |
| n. | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | |
| 1 | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) | % | 2,38 | 2,42 | 2.34 | Berubah |
| 2 | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | % | 15,3% | 24,28 | 12% | Berubah |
| 3 | Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19 ) | % | 14,03 | - | 13.6 | Berubah |
| 4 | Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) | Indeks | 61 | - | 79.8 | Berubah |
| 5 | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (MCPR) | % | 61,4% | - | 65.82% | Berubah |
| 6 | Prpoporsi Kebutuhan KB Yang Terpenuhi Menurut Alat / Cara KB Modern | % | 84,86% | - | 82.50% | Berubah |
| 7 | Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri | % | 96,2% | - | 69.60% | Berubah |
| 8 | Persentase Kahamilan Tidak Direncanakan (KTD) | % | 13,24% | - | 13.1% | Berubah |
| 9 | Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga | % | 21% | - | 70% | Berubah |
| 10 | Indeks Lansia Berdaya | % | 69,15 | - | 62 | Berubah |
| 11 | Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja | % | 82,1 | - | 85.1 | Berubah |
| | | | | | | |
| o. | PERHUBUNGAN | | | | | |
| 1 | Rasio konektivitas | Rasio | 100 | 75 | 50 | Berubah |
| | | | | | | |
| p. | Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika | | | | | |
| 1 | Indeks SPBE (Indeks Pemdi)* | Indeks | 3,39 | - | 1,3* (Indeks Pemdi) | Berubah |

| NO | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian 2025 | TARGET CAPAIAN | | BERUBAH/ TIDAK BERUBAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPD 2026 | PERUBAHAN RKPD 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei) | % | 87,00 | - | 82,80 | Berubah |
| | | | | | | |
| q. | KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | | | | | |
| 1 | Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB | % | 3.4354 | - | 0,953 | Berubah |
| 2 | Persentase dan Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok | % | 9,26 | - | 10,21 | Berubah |
| 3 | Ekspor Barang dan Jasa (%PDRB) | % | 10,63 | - | 13,84 | Berubah |
| 4 | Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB | % | 10,63 | - | 13,84 | Berubah |
| 5 | Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal | % | 13.12 | - | 2,5 | Berubah |
| 6 | Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor | % | 0.11 | - | 1,8 | Berubah |
| 7 | Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi | % | 143,85 | - | 0 | Berubah |
| 8 | Presentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | % | 20,11 | - | 5 | Berubah |
| 9 | Presentase Koperasi Aktif | % | 62,02 | - | 50 | Berubah |
| 10 | Presentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan | % | 22,70 | - | 1 | Berubah |
| 11 | Presentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas | % | 6,48 | - | 16 | Berubah |
| 12 | Pertumbuhan Wirausaha | % | 13.12 | - | 2,5 | Berubah |
| | | | | | | |
| r. | Urusan Wajib Penanaman Modal | | | | | |
| 1 | Persentase peningkatan investasi | % | 89,60 | 38,61 | 12 | Berubah |
| 2 | Indeks Pelayanan Publik | Indeks | 86,91 | - | 87,5 | Berubah |
| 3 | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan | % | 185,6 | - | 96 | Berubah |
| 4 | Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal | % | 185,6 | - | 96 | Berubah |
| 5 | Realisasi Total Terhadap Target Investasi | % | 83 | - | 90 | Berubah |
| 6 | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha | % | 100 | - | 100 | Berubah |
| 7 | Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi | % | 95,60 | - | 15 | Berubah |
| | | | | | | |
| s. | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | |
| 1 | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | % | 0,07 | 0,12 | 0,12 | Tidak Berubah |
| 2 | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi | % | 31,44 | 31,34 | 31,34 | Tidak Berubah |

| NO | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian 2025 | TARGET CAPAIAN | | BERUBAH/ TIDAK BERUBAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPD 2026 | PERUBAHAN RKPD 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | | | | | |
| 3 | Peningkatan prestasi olahraga | Orang | 57 | 53 | 53 | Tidak Berubah |
| 4 | Rasio Wira Usaha Pemuda | % | 0,07 | - | 14 | Berubah |
| 5 | Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas | % | 0 | - | 15 | Berubah |
| 6 | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan | % | 23,8 | - | 14 | Berubah |
| | | | | | | |
| t. | STATISTIK | | | | | |
| 1 | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | Indeks | 2,51 | - | 2,66 | Berubah |
| | | | | | | |
| u. | Urusan Wajib Persandian | | | | | |
| 1 | Indeks KAMI | Indeks | 15,33 | - | 15 | Berubah |
| 2 | Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah | % | 35,71 | - | 38,50 | Berubah |
| | | | | | | |
| v. | KEBUDAYAAN | | | | | |
| 1 | Tingkat Partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan | % | 70,15 | - | 75,35 | Berubah |
| 2 | Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan | % | 72,52 | - | 69,59 | Berubah |
| 3 | Tingkat partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal | % | 0 | - | 0 | Berubah |
| 4 | Persentase cagar budaya yang dilestarikan | % | 100 | - | 100 | Berubah |
| 5 | Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan | % | 100 | - | 100 | Berubah |
| 6 | Persentase kunjungan Wisatawan ke Museum | % | 65,15 | - | 69,25 | Berubah |
| | | | | | | |
| w. | PERPUSTAKAAN | | | | | |
| 1 | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | Nilai | 58,29 | 83,11 | 80,25 | Berubah |
| 2 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Indeks | 19,87 | 91,48 | 90,6 | Berubah |
| 3 | Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki | % | 100 | - | 100 | Berubah |
| | | | | | | |
| x. | KEARSIPAN | | | | | |
| 1 | Tingkat ketersediaan arsip | % | 76,55 | 64,07 | 55,41 | Berubah |
| 2 | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan | % | 16,67 | 30,12 | 23,97 | Berubah |

| NO | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian 2025 | TARGET CAPAIAN | | BERUBAH/ TIDAK BERUBAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPD 2026 | PERUBAHAN RKPD 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | rakyat | | | | | |
| 3 | Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | % | 16,67 | - | 23,97 | Berubah |
| 4 | Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah | Indeks | 56,60 | - | 49,04 | Berubah |
| | | | | | | |
| y. | KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | |
| 1 | Jumlah Produksi Perikanan | Ton | 43.183,36 | 44.944,45 | 45.034,77 | Berubah |
| 2 | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap | Ton | 4.305,19 | - | 45.034,77 | Berubah |
| 3 | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | Ton | 38.878,17 | - | 4.314,57 | Berubah |
| 4 | Luas Kawasan Konservasi | Ha | 0 | - | 40.720,20 | Berubah |
| 5 | Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan | Ton | 42,03 | - | 41,24 | Berubah |
| 7 | Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | % | 32,08 | - | 33,24 | Berubah |
| | | | | | | |
| z. | PARIWISATA | | | | | |
| 1 | Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara | Ribu orang | 1.5 | - | 1,5 | Berubah |
| 2 | Rasio PDRB Ekonomi Kreatif Kabupaten Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Provinsi | % | 2.49 | - | 1,651 | Berubah |
| 3 | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum | % | 0,82 | - | 0,95 | Berubah |
| 4 | Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan | % | 2,9 | - | 15 | Berubah |
| 5 | Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata | % | 1 | - | 20 | Berubah |
| 6 | Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual | % | 4 | - | 0 | Berubah |
| 7 | Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalisasi | % | 16 | - | 16 | Berubah |
| | | | | | | |
| aa. | PERTANIAN | | | | | |
| | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | | | | | |
| 1 | Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | % | 32,08 | - | 33,24 | Berubah |
| 2 | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan | % | -11,07 | - | 2 | Berubah |
| 3 | Peningkatan Produksi Hortikultura | % | -33,425 | - | 2 | Berubah |
| 4 | Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan | % | 70,42 | - | 2 | Berubah |
| 5 | Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B | Ha | 17.585 Ha | - | 17.585 Ha | Berubah |
| 6 | Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian yang Berkualitas | % | NA | - | 1,2 | Berubah |
| 7 | Persentase Penanganan Bencana Pertanian | % | 95,00 | - | 95,00 | Berubah |

| NO | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian 2025 | TARGET CAPAIAN | | BERUBAH/ TIDAK BERUBAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPD 2026 | PERUBAHAN RKPD 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian | % | 95,00 | - | 95,00 | Berubah |
| 9 | Persentase Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan | % | NA | - | 100 | Berubah |
| 10 | Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan | % | NA | - | 2 | Berubah |
| 11 | Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani | % | NA | - | 3 | Berubah |
| | | | | | | |
| | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | | | | | |
| 1 | Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | % | 32,08 | - | 33,24 | Berubah |
| 2 | Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan | % | 7,91 | - | 7 | Berubah |
| 3 | Persentase Penyediaan Prasarana Pertenakan yang Berkualitas | % | 0 | - | 2 | Berubah |
| 4 | Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) | % | 4,2 | - | 2 | Berubah |
| 5 | Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) | % | 0 | - | 2 | Berubah |
| 6 | Persentase Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan | % | 97,6 | - | 2 | Berubah |
| 7 | Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan | % | 71,43 | - | 2 | Berubah |
| 8 | Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang dibentuk dan beroperasi | % | 0 | - | 2 | Berubah |
| | | | | | | |
| ab. | ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | | |
| 1 | Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota | % | 0 | 0 | 0 | Tidak Berubah |
| | | | | | | |
| ac. | PERDAGANGAN | | | | | |
| 1 | Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | % | 9,7 | 17,95 | 10,5 | Berubah |
| 2 | Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi | % | 100 | - | 36 | Berubah |
| 3 | Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya | % | 0 | - | 100 | Berubah |
| 4 | Presentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | % | 9,26 | - | 10,21 | Berubah |
| | | | | | | |
| ad. | PERINDUSTRIAN | | | | | |
| 1 | Tersedianya informasi Industri secara lengkap dan terkini | % | 100 | 100 | 100 | Tidak Berubah |
| 2 | Rasio PDRB Industri Pengelohan | % | 6,85 | - | 7,01 | Berubah |
| 3 | Kontribusi Sektor Industri | % | 6,85 | - | 7,01 | Berubah |

| NO | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian 2025 | TARGET CAPAIAN | | BERUBAH/ TIDAK BERUBAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPD 2026 | PERUBAHAN RKPD 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Terhadap PDRB | | | | | |
| 4 | Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri | % | 29,69 | - | 10 | Berubah |
| | | | | | | |
| ae. | TRANSMIGRASI | | | | | |
| 1 | Persentase Luas Kawasan Tranmigrasi yang Berkembang | % | 0 | 0 | 0 | Tidak Berubah |
| 2 | Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan. | % | 0 | - | 8 | Berubah |
| | | | | | | |
| af. | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | |
| 1 | Persentase Terlaksananya Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | % | 100 | 100 | 100 | Tidak Berubah |
| 2 | Persentase terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang perekonomian | % | 100 | 100 | 100 | Tidak Berubah |
| 3 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Nilai | 62.09 | - | 64,28 | Berubah |
| 4 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah | Nilai | 87,01 | - | 90 | Berubah |
| 5 | Indeks Kepuasan Layanan Pimpinan (IKLP) | Nilai | 95 | - | 95 | Berubah |
| 6 | Persentase Capaian Pengendalian dan pelaporan administrasi pembangunan | % | 85 | - | 81 | Berubah |
| 7 | Persentase Kebijakan Pengelolaan Perekonomian yang difasilitasi | % | 100 | - | 100 | Berubah |
| 8 | Indeks Tata Kelola pengadaan | Nilai | 78,02 | - | 81,5 | Berubah |
| | | | | | | |
| ag. | SEKRETARIAT DPRD | | | | | |
| 1 | Persentase terselenggaranya program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD | % | 100 | 0 | 100 | Berubah |
| 2 | Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD | % | 94,11 | - | 80 | Berubah |
| 3 | Ketepatan Penerapan Perda APBD Tahun N | Nilai | 9 | - | 9 | Berubah |
| 4 | Persentase Penetapan Ranperda Tahun N | % | 29,41 | - | 80 | Berubah |
| 5 | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | % | 100 | - | 100 | Berubah |
| | | | | | | |
| ah. | PERENCANAAN | | | | | |
| 1 | Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD | % | 100 | - | 100 | Berubah |
| 2 | Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD | % | 100 | - | 100 | Berubah |
| 3 | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Koordinasi Perencanaan | % | 100 | - | 100 | Berubah |
| 4 | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah | Indeks | 90.69 | - | 81 | Berubah |

| NO | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian 2025 | TARGET CAPAIAN | | BERUBAH/ TIDAK BERUBAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPD 2026 | PERUBAHAN RKPD 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| ai. | KEUANGAN | | | | | |
| 1 | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB | % | 0,27 | - | 0,21 | Berubah |
| 2 | Opini BPK Atas Laporan Keuangan | Opini | WTP | - | WTP | Berubah |
| 3 | Persentase Belanja Pegawai diluar Tunjangan Guru yang Dialokasikan Melalui TKD | % | 48,25 | - | 47 | Berubah |
| 4 | Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik | % | 26,34 | - | 22 | Berubah |
| 5 | Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar | % | 96,83 | - | 97,3 | Berubah |
| 6 | Persentase Penurunan SILPA | % | 0,41 | - | 2,8 | Berubah |
| 7 | Persentase Penyampaian LKPD Tepat Waktu dan Sesuai SAP | % | 100 | - | 100 | Berubah |
| 8 | Persentase Pertambahan Nilai Aset Tetap | % | 5,65 | - | 5,75 | Berubah |
| 9 | Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah | % | 10,62 | - | 11,65 | Berubah |
| 10 | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan | Nagari | 79 | - | 79 | Berubah |
| 11 | Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital | % | 25 | - | 40 | Berubah |
| | | | | | | |
| aj. | KEPEGAWAIAN | | | | | |
| 1 | Indeks Profesionalitas ASN | Indeks | | - | 78 | Berubah |
| 2 | Indeks Sistem Merit | Indeks | | - | 260 | Berubah |
| | | | | | | |
| ak. | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | | |
| 1 | Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi | Indeks | 75,72 | 32 | 32 | Tidak Berubah |
| | | | | | | |
| al. | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | |
| 1 | Persentase Kebijakan Berbasis Bukti | % | 13.21 | - | 10 | Berubah |
| 2 | Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian/Kajian yang Direkomendasikan sebagai Bahan Masukan Kebijakan Pembangunan Daerah | % | 13.21 | - | 10 | Berubah |
| 3 | Indeks Inovasi Daerah | Angka | 48.34 | - | 53,04 | Berubah |
| | | | | | | |
| am. | PENGAWASAN | | | | | |
| 1 | Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Level | Terdefenisi | - | Terdefenisi | Berubah |
| 2 | Persentase Penyelesaian TLHP Eksternal | % | 79.9 | - | 85,55 | Berubah |
| 3 | Persentase Penyelesaian TLHP Internal | % | 72.71 | - | 85,55 | Berubah |
| 4 | Opini BPK Atas Laporan Keuangan | Opini | Wajar Tanpa Pengecualian | - | Wajar Tanpa Pengecualian | Berubah |
| 5 | Kapabilitas Aparat | Level | Terintegr | - | Terintegrasi | |

| NO | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian 2025 | TARGET CAPAIAN | | BERUBAH/ TIDAK BERUBAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPD 2026 | PERUBAHAN RKPD 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | | asi (Integrated) | | (Integrated) | |
| | | | | | | |
| an. | PENGADAAN | | | | | |
| 1 | Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif | % | 100 | - | 100 | Berubah |
| 2 | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan | % | 9,67 | - | 21,97 | Berubah |
| | | | | | | |
| ao. | TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK | | | | | |
| 1 | Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan | % | 98,90 | - | 98,94 | Berubah |
| 2 | Akses publik terhadap Informasi keuangan daerah | % | 91,66 | - | 75,76 | Berubah |
| | | | | | | |
| ap. | KECAMATAN AKABILURU | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai | 89,37 | 89,60 | 89,6 | Tidak Berubah |
| 2 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Nilai | 71,89 | 72,10 | 72,1 | Tidak Berubah |
| 3 | Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari | % | 87,50 | 50 | 50 | Tidak Berubah |
| 4 | Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan | % | 0 | 50 | 0 | Berubah |
| 5 | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan | % | 100 | 50 | 50 | Tidak Berubah |
| 6 | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari | % | 100 | 50 | 50 | Tidak Berubah |
| | | | | | | |
| aq. | KECAMATAN BUKIK BARISAN | | | | | |
| 1 | Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari | % | 70 | 50 | 60 | Berubah |
| 2 | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan | % | 100 | 60 | 60 | Tidak Berubah |
| 3 | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari | % | 100 | 60 | 0 | Berubah |
| 4 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Nilai | 62,4 | - | 65 | Berubah |
| 5 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 90,04 | - | 91 | Berubah |
| | | | | | | |
| ar. | KECAMATAN GUGUAK | | | | | |
| 1 | Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari | % | 87 | 50 | 66 | Berubah |
| 2 | Tingkat Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum di | % | 0 | 50 | 50 | Tidak Berubah |

| NO | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian 2025 | TARGET CAPAIAN | | BERUBAH/ TIDAK BERUBAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPD 2026 | PERUBAHAN RKPD 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | kecamatan | | | | | |
| 3 | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan | % | 100 | 50 | 90 | Berubah |
| 4 | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari | % | 0 | 50 | 50 | Tidak Berubah |
| 5 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Nilai | 64,25 | - | 65 | Berubah |
| 6 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 89.8 | - | 90 | Berubah |
| | | | | | | |
| as. | KECAMATAN GUNUANG OMEH | | | | | |
| 1 | Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari | Nagari | 100 % | 3 Nagari | 76 | Berubah |
| 2 | Tingkat Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan | Nagari | 0 | 0 | 0 | Tidak Berubah |
| 3 | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan | % | 100 % | 95 | 80 | Berubah |
| 4 | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari | Nagari | 0 | 0 | 0 | Tidak Berubah |
| 5 | Nilai Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai | 89,77 % | - | 81 | Berubah |
| 6 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Indeks | 71,45 % | - | 66 | Berubah |
| | | | | | | |
| at. | KECAMATAN HARAU | | | | | |
| 1 | Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari | % | 100 | 75 | 75 | Tidak Berubah |
| 2 | Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan | % | 100 | 75 | 75 | Tidak Berubah |
| 3 | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan | % | 98,38 | 75 | 75 | Tidak Berubah |
| 4 | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari | % | 100 | 75 | 75 | Tidak Berubah |
| 5 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Nilai | 64,56 | - | 70 | Berubah |
| 6 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 90,95 | - | 95 | Berubah |
| | | | | | | |
| au. | KECAMATAN KAPUR IX | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai | 91,52 | 90.5 | 90,5 | Tidak Berubah |
| 2 | SAKIP | | 55,35 | 60 | 60 | Tidak Berubah |
| 3 | Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari | % | 60 | 53 | 53 | Tidak Berubah |
| 4 | Tingkat Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum di | % | 0 | 50 | 0 | Berubah |

| NO | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian 2025 | TARGET CAPAIAN | | BERUBAH/ TIDAK BERUBAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPD 2026 | PERUBAHAN RKPD 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | kecamatan | | | | | |
| 5 | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan | % | 60 | 53 | 53 | Tidak Berubah |
| 6 | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari | % | 60 | 53 | 53 | Tidak Berubah |
| | | | | | | |
| av. | KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN | | | | | |
| 1 | Nilai IKM | Nilai | 92,14 | 0 | 91 | Berubah |
| 2 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) | Nilai | 63,31 | 0 | 65 | Berubah |
| 3 | Tingkat Pemberdayaan Msyarakat Nagari | % | 87,5 | 65 | 65 | Tdak Berubah |
| 4 | Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan | % | 0 | 0 | 0 | Berubah |
| 5 | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum di Kecamatan | % | 100 | 65 | 65 | Tidak Berubah |
| 6 | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari | % | 100 | 65 | 0 | Berubah |
| | | | | | | |
| aw. | KECAMATAN LUAK | | | | | |
| 1 | Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari | % | 100 | 85 | 85 | Tidak Berubah |
| 2 | Tingkat Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan | % | 0 | 0 | 0 | Tidak Berubah |
| 3 | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan | % | 100 | 85 | 85 | Tidak Berubah |
| 4 | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari | % | 0 | 0 | 0 | Tidak Berubah |
| 5 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Nilai | 62,07 | - | 65 | Berubah |
| 6 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 89,43 | - | 85 | Berubah |
| | | | | | | |
| ax. | KECAMATAN MUNGKA | | | | | |
| 1 | Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari | % | 100 | 73 | 73 | Tidak Berubah |
| 2 | Tingkat Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan | % | 72,79 | 73 | 73 | Tidak Berubah |
| 3 | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan | % | 0 | 50 | 50 | Tidak Berubah |
| 4 | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari | % | 0 | 50 | 50 | Tidak Berubah |
| 5 | Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi | Nilai | 60,4 | - | 50 | Berubah |

| NO | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian 2025 | TARGET CAPAIAN | | BERUBAH/ TIDAK BERUBAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPD 2026 | PERUBAHAN RKPD 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | pemerintah (SAKIP) | | | | | |
| 6 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai | 87 | - | 85 | Berubah |
| | | | | | | |
| ay | KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU | | | | | |
| 1 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Nilai | 65,75 | 67 | 67 | Tidak Berubah |
| 2 | Nilai Indeks Kepausan Masyarakat (IKM) | Nilai | 90,87 | 91,30 | 91,3 | Tidak Berubah |
| 3 | Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari | % | 100 | 81 | 81 | Tidak Berubah |
| 4 | Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan | % | 100 | 0 | 60 | Berubah |
| 5 | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tingkat Kecamatan | % | 100 | 60 | 60 | Tidak Berubah |
| 6 | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari | % | 100 | 0 | 60 | Berubah |
| | | | | | | |
| az | KECAMATAN PAYAKUMBUH | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai | 86,84 | 80 | 81 | Berubah |
| 2 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Nilai | 73,08 | 70 | 70 | Tidak Berubah |
| 3 | Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari | % | 90 | 80 | 81 | Berubah |
| 4 | Tingkat Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan | % | 0 | 80 | 61 | Berubah |
| 5 | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan | % | 85 | 80 | 65 | Berubah |
| 6 | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari | % | 86 | 80 | 65 | Berubah |
| | | | | | | |
| ba. | KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI | | | | | |
| 1 | Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari | % | 100 | 100 | 60 | Berubah |
| 2 | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan | % | 100 | 80 | 80 | Tidak Berubah |
| 3 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Nilai | 66.22 | - | 75 | Berubah |
| 4 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 88.5 | - | 80 | Berubah |
| | | | | | | |
| bb. | KECAMATAN SULIKI | | | | | |

| NO | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian 2025 | TARGET CAPAIAN | | BERUBAH/ TIDAK BERUBAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPD 2026 | PERUBAHAN RKPD 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari | % | 70 | 50 | 65 | Berubah |
| 2 | Tingkat Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan | % | 0 | 0 | 0 | Tidak Berubah |
| 3 | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan | % | 98,06 | 50 | 65 | Berubah |
| 4 | Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari | % | 0 | 0 | 0 | Tidak Berubah |
| 5 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Nilai | 63,52 | | 65 | Berubah |
| 6 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 85 | | 91 | Berubah |
| | | | | | | |
| bc. | PEMERINTAHAN UMUM | | | | | |
| 1 | Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | % | 100 | 90 | 90 | Tidak Berubah |
| 2 | Persentase Pendidikan Politik pada Kader Politik | % | 100 | 90 | 90 | Tidak Berubah |
| 3 | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif | % | 70 | 90 | 90 | Tidak Berubah |
| 4 | Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan | % | 75 | 90 | 85 | Berubah |
| 5 | Persentase Penyelesaian Konflik Sosial yang ditangani | % | 87 | - | 93 | Berubah |
| 6 | Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | % | 90 | - | 55 | Berubah |
| 7 | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada | % | 65,3 | - | 65,3 | Berubah |

# BAB V
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Untuk mewujudkan prioritas dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan, maka masing-masing OPD menjabarkannya kedalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Program, kegiatan dan sub kegiatan ini ditampilkan dalam bentuk matrik rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2026 dan perubahan tahun 2026. Dalam matriks ini juga digambarkan indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, target kinerja, lokasi, kebutuhan dana / pagu indikatif dan sumber dana untuk mendukung program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut.

Program, kegiatan dan sub kegiatan masing-masing OPD diperoleh dari usulan rencana kerja melalui Rancangan Awal Renja OPD yang bersumber dari Renstra OPD, kemudian usulan tersebut dibahas dan dimatangkan oleh tim penyusun yang melibatkan *stakeholders* terkait dalam beberapa tahapan antara lain pada Forum Konsultasi Publik, Forum OPD dan Forum Lintas OPD serta Musrenbang RKPD baik tingkat Kecamatan maupun Kabupaten. Dengan demikian program, kegiatan dan sub kegiatan ini diharapkan telah sinkron antara usulan masyarakat yang disampaikan dalam Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2026 yang dirumuskan.

Disamping mempertimbangkan aspek sinkronisasi antara Renja OPD dengan hasil-hasil musrenbang serta prioritas dan sasaran pembangunan daerah, pematangan rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan juga mempertimbangkan perkembangan kemampuan fiskal daerah. Dalam hal ini, kemampuan fiskal daerah dilihat dari perkembangan selama 5 (lima) tahun terakhir dari proporsi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung pada setiap OPD beserta berbagai jenis pendanaan, seperti DAU, DAK, Bansos, Hibah dan seterusnya. Untuk memprediksi kemampuan fiskal pada tahun 2026, maka dilakukan proyeksi terhadap kondisi *existing* yang diperoleh dari data perkembangan kemampuan fiskal tersebut.

Sebagaimana dijelaskan pada Bab sebelumnya bahwa perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing OPD yang nantinya akan bermuara kepada program dan kegiatan prioritas daerah, juga mempertimbangkan perkembangan proporsi Belanja Langsung pada setiap OPD. Perkembangan alokasi belanja langsung untuk setiap jenis OPD selama 5 (lima) tahun terakhir secara persentase menunjukkan adanya peningkatan pada jenis OPD tertentu dan penurunan pada jenis OPD lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh adanya perubahan prioritas daerah sesuai dengan hasil evaluasi pencapaian visi misi dan berubahnya RPJMD.

Tabel 5.1
Alokasi Anggaran Masing-Masing OPD Tahun 2022 – 2025

| No | Satuan Kerja Perangkat Daerah | Alokasi Anggaran Masing-Masing OPD | | Alokasi Anggaran Masing-Masing OPD | | Alokasi Anggaran Masing-Masing OPD | | Alokasi Anggaran Masing-Masing OPD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | |
| | | (Rp.) | % | (Rp.) | % | (Rp.) | % | (Rp.) | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| A. | Sekretariat Daerah | 43.505.661.014 | 1,93 | 42.650.521.882 | 2,77 | 39.345.533.070 | 2,87 | 40.971.527.809 | 3,03% |
| B. | Sekretariat DPRD | 44.050.852.537 | 1,96 | 39.647.721.600 | 2,58 | 31.658.320.835 | 2,31 | 36.012.344.245 | 2,66% |
| C. | Inspektorat | 15.214.176.549 | 0,68 | 12.507.852.115 | 0,81 | 10.884.823.797 | 0,79 | 12.696.311.155 | 0,94% |
| D. | Dinas Daerah | 1.796.627.983.275 | 79,9 | 1.370.142.839.643 | 71,6 | 968.140.572.998 | 70,52 | 924.542.427.209 | 68,38% |
| 1. | Dinas Kesehatan | 167.634.926.157 | 7,45 | 167.000.895.947 | 10,9 | 201.566.967.253 | 14,68 | 178.305.472.162 | 13,19% |
| 2. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 663.804.967.297 | 29,5 | 493.914.053.192 | 32,1 | 553.601.857.523 | 40,32 | 569.132.295.064 | 42,09% |
| 3. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 547.533.232.632 | 24,3 | 171.747.227.150 | 11,2 | 71.985.187.702 | 5,24 | 28.826.300.204 | 2,13% |
| 4. | Satuan Polisi Pamong Praja | 12.193.185.541 | 0,54 | 7.299.515.275 | 0,47 | 7.884.005.937 | 0,57 | 7.333.657.330 | 0,54% |
| 5. | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 13.709.308.718 | 0,61 | 11.078.719.695 | 0,72 | 9.038.138.392 | 0,66 | 8.589.485.997 | 0,64% |
| 6. | Dinas Sosial | 18.214.276.600 | 0,81 | 8.552.013.305 | 0,56 | 7.502.627.812 | 0,55 | 6.958.325.001 | 0,51% |
| 7. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 8.722.862.088 | 0,39 | 4.558.168.722 | | 4.180.455.700 | 0,3 | 5.229.762.031 | 0,39% |
| 8. | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluraga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 16.799.892.566 | 0,75 | 10.094.904.803 | 0,66 | 10.634.396.130 | 0,77 | 13.516.736.280 | 1,00% |
| 9. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 7.530.578.010 | 0,33 | 5.243.600.084 | 0,34 | 4.617.444.605 | 0,34 | 4.053.802.030 | 0,30% |

| No | Satuan Kerja Perangkat Daerah | Alokasi Anggaran Masing-Masing OPD | | Alokasi Anggaran Masing-Masing OPD | | Alokasi Anggaran Masing-Masing OPD | | Alokasi Anggaran Masing-Masing OPD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | |
| | | (Rp.) | % | (Rp.) | % | (Rp.) | % | (Rp.) | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 10. | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 14.212.041.717 | 0,63 | 11.149.606.583 | 0,72 | 4.443.046.320 | 0,32 | 5.023.233.195 | 0,37% |
| 11. | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | 10.308.098.272 | 0,46 | 8.754.658.837 | 0,57 | 4.451.291.959 | 0,32 | 6.425.934.113 | 0,48% |
| 12. | Dinas Komunikasi dan Informatika | 15.847.763.430 | 0,7 | 13.726.018.432 | 0,89 | 7.964.774.688 | 0,58 | 7.710.245.017 | 0,57% |
| 13. | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga | 38.116.382.326 | 1,69 | 34.857.355.771 | 2,26 | 8.608.910.088 | 0,63 | 10.901.781.138 | 0,81% |
| 14. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari | 16.608.585.477 | 0,74 | 8.857.287.797 | 0,58 | 5.610.350.781 | 0,41 | 6.749.349.762 | 0,50% |
| 15. | Dinas Perhubungan | 61.871.569.709 | 2,75 | 21.809.451.336 | 1,42 | 13.320.998.617 | 0,97 | 15.786.462.349 | 1,17% |
| 16. | Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 92.538.373.277 | 4,11 | 30.088.424.417 | 1,95 | 10.846.776.038 | 0,79 | 7.532.024.857 | 0,56% |
| 17. | Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan | 42.475.750.001 | 1,89 | 39.617.575.407 | 2,57 | 18.550.683.342 | 1,35 | 18.104.996.301 | 1,34% |
| 18. | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 16.001.074.277 | 0,71 | 25.861.730.249 | 1,68 | 10.452.397.777 | 0,76 | 9.714.182.748 | 0,72% |
| 19. | Dinas Perikanan | 12.624.561.002 | 0,56 | 16.968.369.252 | 1,1 | 5.558.255.817 | 0,4 | 6.505.734.496 | 0,48% |
| 20. | Dinas Pangan | 10.374.929.438 | 0,46 | 9.632.802.944 | 0,63 | 3.307.224.768 | 0,24 | 3.060.552.729 | 0,23% |
| 21. | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 9.505.624.740 | 0,42 | 5.055.993.922 | 0,33 | 4.014.781.749 | 0,29 | 5.082.094.405 | 0,38% |
| E. | Badan Daerah | 268.682.127.938 | 11,9 | 264.274.466.523 | 17,2 | 255.091.743.697 | 18,58 | 233.928.407.494 | 17,30% |

| No | Satuan Kerja Perangkat Daerah | Alokasi Anggaran Masing-Masing OPD | | Alokasi Anggaran Masing-Masing OPD | | Alokasi Anggaran Masing-Masing OPD | | Alokasi Anggaran Masing-Masing OPD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | |
| | | (Rp.) | % | (Rp.) | % | (Rp.) | % | (Rp.) | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1. | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 16.543.445.882 | 0,74 | 8.663.390.788 | 0,56 | 7.782.733.820 | 0,57 | 6.034.175.131 | 0,45% |
| 2. | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 14.963.909.148 | 0,67 | 17.048.112.399 | 1,11 | 6.002.413.279 | 0,44 | 5.673.741.464 | 0,42% |
| 3. | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | 204.534.028.654 | 9,09 | 218.532.800.035 | 14,2 | 204.319.420.226 | 14,88 | 208.522.833.284 | 15,42% |
| 4. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 8.574.808.054 | 0,38 | 12.008.035.599 | 0,78 | 31.933.701.689 | 2,33 | 6.986.653.325 | 0,52% |
| 5. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 24.065.936.200 | 1,07 | 8.022.127.702 | 0,52 | 5.053.474.683 | 0,37 | 6.711.004.290 | 0,50% |
| F. | Kecamatan | 35.798.463.285 | 1,59 | 22.146.944.997 | 1,44 | 23.851.610.066 | 1,74 | 22.645.982.363 | 1,67% |
| 1. | Kecamatan Gunuang Omeh | 1.868.855.720 | 0,08 | 1.383.681.417 | 0,09 | 1.659.484.061 | 0,12 | 1.357.328.222 | 0,10% |
| 2. | Kecamatan Bukik Barisan | 2.376.240.476 | 0,11 | 1.464.035.508 | 0,1 | 1.525.513.944 | 0,11 | 1.580.461.739 | 0,12% |
| 3. | Kecamatan Suliki | 2.859.107.900 | 0,13 | 1.719.172.666 | 0,11 | 1.942.606.288 | 0,14 | 1.760.368.606 | 0,13% |
| 4. | Kecamatan Guguak | 2.419.923.600 | 0,11 | 1.614.256.182 | 0,1 | 1.804.538.750 | 0,13 | 1.772.509.061 | 0,13% |
| 5. | Kecamatan Mungka | 3.259.845.606 | 0,14 | 1.502.637.340 | 0,1 | 1.482.183.876 | 0,11 | 1.377.836.872 | 0,10% |
| 6. | Kecamatan Akabiluru | 2.911.698.633 | 0,13 | 1.793.668.446 | 0,12 | 1.961.413.085 | 0,14 | 1.658.442.147 | 0,12% |
| 7. | Kecamatan Payakumbuh | 2.510.224.980 | 0,11 | 1.830.140.148 | 0,12 | 2.618.447.798 | 0,19 | 2.295.525.335 | 0,17% |
| 8. | Kecamatan Luak | 3.193.160.553 | 0,14 | 1.597.728.944 | 0,1 | 1.736.648.823 | 0,13 | 1.913.110.357 | 0,14% |
| 9. | Kecamatan Lareh Sago Halaban | 3.003.229.612 | 0,13 | 1.887.651.590 | 0,12 | 1.633.722.547 | 0,12 | 1.741.544.437 | 0,13% |

| No | Satuan Kerja Perangkat Daerah | Alokasi Anggaran Masing-Masing OPD | | Alokasi Anggaran Masing-Masing OPD | | Alokasi Anggaran Masing-Masing OPD | | Alokasi Anggaran Masing-Masing OPD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | |
| | | (Rp.) | % | (Rp.) | % | (Rp.) | % | (Rp.) | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 10. | Kecamatan Situjuah Limo Nagari | 2.656.057.078 | 0,12 | 1.692.294.102 | 0,11 | 1.676.741.000 | 0,12 | 1.672.449.369 | 0,12% |
| 11. | Kecamatan Harau | 2.639.977.615 | 0,12 | 2.056.784.757 | 0,13 | 2.121.253.812 | 0,15 | 1.934.794.774 | 0,14% |
| 12. | Kecamatan Pangkalan Koto Baru | 2.651.506.681 | 0,12 | 1.501.246.561 | 0,1 | 1.723.001.540 | 0,13 | 1.635.146.049 | 0,12% |
| 13. | Kecamatan Kapur IX | 3.448.634.831 | 0,15 | 2.103.647.336 | 0,14 | 1.966.054.542 | 0,14 | 1.946.465.395 | 0,14% |
| G. | Unit Pelaksana Teknis Dinas | 46.161.675.550 | 2,05 | 52.149.231.961 | 3,39 | 43.923.752.271 | 3,2 | 81.356.997.128 | 6,02% |
| 1. | RSUD Ahmad Darwis | 46.161.675.550 | 2,05 | 52.149.231.961 | 3,39 | 43.923.752.271 | 3,2 | 81.356.997.128 | 6,02% |
| | JUMLAH | 2.250.040.940.148 | 100 | 1.539.245.112.198 | 100 | 1.372.896.356.734 | 100 | 1.352.153.997.403 | 100 |

**Sumber. SIPD RI*

Rekapitulasi kebutuhan dana/pagu indikatif untuk RKPD untuk tahun 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 5-2. Sedangkan matrik program, kegiatan dan subkegiatan masing-masing OPD yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 dan kebutuhan pendanaannya dapat dilihat pada Tabel 5.3 Program, kegiatan dan sub kegiatan serta Pendanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 ditampilkan menurut masing-masing OPD, dimana pada setiap OPD program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut terjabar pula menurut urusan pemerintahan yang diselenggarakan.

Tabel 5.2
Rekapitulasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif RKPD Tahun 2026,
APBD Tahun 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026

| No | Satuan Kerja Perangkat Daerah | Pagu Indikatif | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RKPD 2026 | | APBD 2026 | | PERUBAHAN RKPD 2026* | |
| | | (Rp.) | % | (Rp) | % | (Rp) | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1. | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 558.457.810.870 | 41,05% | 536.963.122.799 | 42,80% | 535.662.637.950 | 40,47% |
| 2. | DINAS KESEHATAN | 172.671.903.489 | 12,69% | 176.033.715.823 | 14,03% | 185.081.195.271 | 13,98% |
| 3. | BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS | 70.281.964.697 | 5,17% | 65.085.454.905 | 5,19% | 64.458.495.627 | 4,87% |
| 4. | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 73.015.079.334 | 5,37% | 35.928.682.218 | 2,86% | 112.690.747.137 | 8,51% |
| 5. | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 8.373.529.226 | 0,62% | 8.901.120.274 | 0,71% | 14.117.896.796 | 1,07% |
| 6. | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 7.570.486.511 | 0,56% | 8.585.322.609 | 0,68% | 9.088.048.116 | 0,69% |
| 7. | DINAS SOSIAL | 7.495.335.832 | 0,55% | 5.373.439.929 | 0,43% | 5.309.235.989 | 0,40% |
| 8. | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 6.855.123.504 | 0,50% | 4.138.928.110 | 0,33% | 4.202.276.234 | 0,32% |
| 9. | DINAS PANGAN | 3.144.918.331 | 0,23% | 2.905.591.766 | 0,23% | 3.159.125.422 | 0,24% |
| 10. | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | 7.967.882.934 | 0,59% | 8.598.973.132 | 0,69% | 14.709.175.928 | 1,11% |
| 11. | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 5.161.227.449 | 0,38% | 4.651.439.563 | 0,37% | 4.669.130.880 | 0,35% |
| 12. | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI | 6.736.278.860 | 0,50% | 6.248.709.611 | 0,50% | 6.165.093.805 | 0,47% |

| No | Satuan Kerja Perangkat Daerah | Pagu Indikatif | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RKPD 2026 | | APBD 2026 | | PERUBAHAN RKPD 2026* | |
| | | (Rp.) | % | (Rp) | % | (Rp) | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 13. | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 13.082.160.728 | 0,96% | 9.184.862.145 | 0,73% | 8.465.946.748 | 0,64% |
| 14. | DINAS PERHUBUNGAN | 16.527.683.989 | 1,21% | 15.792.334.625 | 1,26% | 16.755.969.221 | 1,27% |
| 15. | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 8.014.652.264 | 0,59% | 7.363.997.665 | 0,59% | 7.932.161.663 | 0,60% |
| 16. | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 5.471.888.553 | 0,40% | 5.092.487.739 | 0,41% | 5.052.112.714 | 0,38% |
| 17. | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4.834.101.588 | 0,36% | 3.540.116.072 | 0,28% | 3.291.291.868 | 0,25% |
| 18. | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA | 10.827.636.698 | 0,80% | 6.570.241.927 | 0,52% | 12.439.686.485 | 0,94% |
| 19. | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 5.128.564.039 | 0,38% | 4.526.204.859 | 0,36% | 4.875.791.160 | 0,37% |
| 20. | DINAS PERIKANAN | 7.947.166.344 | 0,58% | 5.248.230.753 | 0,42% | 6.059.990.686 | 0,46% |
| 21. | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 17.698.131.611 | 1,30% | 16.330.357.544 | 1,30% | 13.773.221.367 | 1,04% |
| 22. | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 11.313.929.976 | 0,83% | 10.204.850.445 | 0,81% | 10.725.043.009 | 0,81% |
| 23. | SEKRETARIAT DAERAH | 38.327.341.595 | 2,82% | 40.252.701.943 | 3,21% | 40.418.981.415 | 3,05% |
| 24. | SEKRETARIAT DPRD | 32.167.776.925 | 2,36% | 35.258.556.711 | 2,81% | 34.929.027.766 | 2,64% |
| 25. | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 7.503.194.523 | 0,55% | 5.168.053.809 | 0,41% | 5.298.569.521 | 0,40% |
| 26. | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 200.034.652.450 | 14,70% | 172.926.101.410 | 13,78% | 140.425.367.364 | 10,61% |
| 27. | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 6.122.440.179 | 0,45% | 6.658.840.429 | 0,53% | 6.251.294.270 | 0,47% |
| 28. | INSPEKTORAT | 12.439.115.885 | 0,91% | 13.096.320.729 | 1,04% | 12.827.854.961 | 0,97% |

| No | Satuan Kerja Perangkat Daerah | Pagu Indikatif | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RKPD 2026 | | APBD 2026 | | PERUBAHAN RKPD 2026* | |
| | | (Rp.) | % | (Rp) | % | (Rp) | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 29. | KECAMATAN GUNUANG OMEH | 1.335.833.783 | 0,10% | 1.370.050.668 | 0,11% | 1.163.309.948 | 0,09% |
| 30. | KECAMATAN BUKIK BARISAN | 1.621.415.530 | 0,12% | 1.525.504.869 | 0,12% | 1.480.923.492 | 0,11% |
| 31. | KECAMATAN SULIKI | 1.840.279.889 | 0,14% | 1.762.051.438 | 0,14% | 1.631.202.047 | 0,12% |
| 32. | KECAMATAN GUGUAK | 1.716.209.464 | 0,13% | 1.702.170.854 | 0,14% | 1.710.761.559 | 0,13% |
| 33. | KECAMATAN MUNGKA | 1.366.826.872 | 0,10% | 1.386.651.134 | 0,11% | 1.373.218.083 | 0,10% |
| 34. | KECAMATAN AKABILURU | 1.818.614.830 | 0,13% | 1.642.654.780 | 0,13% | 1.522.751.213 | 0,12% |
| 35. | KECAMATAN PAYAKUMBUH | 2.314.464.076 | 0,17% | 2.348.788.381 | 0,19% | 2.319.590.426 | 0,18% |
| 36. | KECAMATAN LUAK | 1.876.292.043 | 0,14% | 1.903.724.231 | 0,15% | 1.837.637.953 | 0,14% |
| 37. | KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN | 1.842.689.130 | 0,14% | 1.745.360.269 | 0,14% | 1.781.867.333 | 0,13% |
| 38. | KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI | 1.664.974.065 | 0,12% | 1.624.119.829 | 0,13% | 2.034.459.814 | 0,15% |
| 39. | KECAMATAN HARAU | 1.995.198.471 | 0,15% | 1.921.057.845 | 0,15% | 1.783.197.138 | 0,13% |
| 40. | KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU | 1.812.772.828 | 0,13% | 1.738.770.562 | 0,14% | 1.436.738.733 | 0,11% |
| 41. | KECAMATAN KAPUR IX | 2.088.857.730 | 0,15% | 2.304.172.031 | 0,18% | 1.887.754.225 | 0,14% |
| 42. | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 5.307.271.206 | 0,39% | 5.095.028.026 | 0,41% | 4.913.451.426 | 0,37% |
| 43. | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6.747.896.608 | 0,50% | 6.026.304.897 | 0,48% | 7.807.565.478 | 0,59% |
| | JUMLAH | 1.360.521.574.909 | 100,00 | 1.254.725.169.358 | 100,00 | 1.323.519.798.241 | 100 |

*Sumber. SIPD RI*

**TABEL 5.3**
**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. LIMA PULUH KOTA**
**TAHUN 2026**

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** | | | | | | | **558.457.810.870,00** | **536.963.122.799,00** | **535.662.637.950,00** | **-22.795.172.920,00** | | | | | | | **585.216.889.647,40** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **554.652.810.870,00** | **535.123.122.799,00** | **533.822.637.950,00** | **-20.830.172.920,00** | | | | | | | **581.377.904.819,40** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **554.652.810.870,00** | **535.123.122.799,00** | **533.822.637.950,00** | **-20.830.172.920,00** | | | | | | | **581.377.904.819,40** | |
| 1, | **1.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | | | | - | - | **460.572.470.561,00** | **464.712.141.899,00** | **457.473.718.203,00** | **14.052.127.085,00** | | | | | | | **474.624.597.646,00** | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | **460.572.470.561,00** | **464.712.141.899,00** | **457.473.718.203,00** | - | - | - | - | - | - | - | **474.624.597.646,00** | - |
| | 1.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 15.020.000,00 | 15.020.000,00 | 15.020.000,00 | 0,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | | 58.524.400,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5.660.000,00 | 5.660.000,00 | 5.660.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | | 55.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | | 1.762.200,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.010.000,00 | 6.010.000,00 | 6.010.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | | 1.762.200,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 459.816.083.713,00 | 464.244.981.799,00 | 457.006.558.103,00 | -2.809.525.610,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | | 473.735.196.540,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 4300 Orang /bulan | 4300 Orang /bulan | 459.810.099.713,00 | 464.238.985.799,00 | 457.000.562.103,00 | -2.809.537.610,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | | 473.733.550.940,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.984.000,00 | 5.996.000,00 | 5.996.000,00 | 12.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.645.600,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 16.350.000,00 | 16.350.000,00 | 16.350.000,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 17.985.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 16.350.000,00 | 16.350.000,00 | 16.350.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 17.985.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 115.989.000,00 | 0,00 | 0,00 | -115.989.000,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 112.750.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 0 Paket | 0 Paket | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 79.750.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 0 Orang | 0 Orang | 65.989.000,00 | 0,00 | 0,00 | -65.989.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 33.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 174.416.778,00 | 118.935.100,00 | 118.935.100,00 | -55.481.678,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 219.420.806,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 8.814.978,00 | 8.205.000,00 | 8.205.000,00 | -609.978,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 9.696.500,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 130.652.200,00 | 62.601.400,00 | 62.601.400,00 | -68.050.800,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 143.724.306,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 0 Paket | 1 Paket | 0,00 | 1.167.700,00 | 1.167.700,00 | 1.167.700,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 27.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 0 Laporan | 1 Laporan | 34.949.600,00 | 46.961.000,00 | 46.961.000,00 | 12.011.400,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 38.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 191.608.610,00 | 191.905.000,00 | 191.905.000,00 | 296.390,00 | | | - | - | - | | 210.779.800,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 2.750.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 86.991.110,00 | 147.240.000,00 | 147.240.000,00 | 60.248.890,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 95.700.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 102.117.500,00 | 42.165.000,00 | 42.165.000,00 | -59.952.500,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 112.329.800,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 243.002.460,00 | 124.950.000,00 | 124.950.000,00 | -118.052.460,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 269.941.100,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 39.189.960,00 | 45.050.000,00 | 45.050.000,00 | 5.860.040,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 43.109.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 0 Unit | 28 Unit | 154.456.700,00 | 60.650.000,00 | 60.650.000,00 | -93.806.700,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 172.436.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 0 Unit | 15 Unit | 39.084.800,00 | 9.350.000,00 | 9.350.000,00 | -29.734.800,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 43.098.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 0 Unit | 1 Unit | 10.271.000,00 | 9.900.000,00 | 9.900.000,00 | -371.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 11.298.100,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 2, | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah** | | | | - | **89,33 %** | **94.050.558.309,00** | **70.348.761.900,00** | **76.286.700.747,00** | **12.669.986.464,40** | | | | | | | **106.720.544.773,40** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pembangunan perpustakaan sekolah | | | | - | 12 paket 14 paket | 56.145.760.707,00 | 39.507.835.700,00 | 44.593.774.697,00 | -11.551.986.010,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang | - | | 64.390.423.672,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utlilitas Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 39 Unit | 4 Unit | 3.410.400.000,00 | 500.000.000,00 | 750.000.000,00 | -2.660.400.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 1.463.802.780,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0009 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 4 Ruang | 5 Ruang | 210.975.000,00 | 500.000.000,00 | 752.338.997,00 | 541.363.997,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 604.943.900,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0014 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia | | | | 5 Paket | 0 Paket | 2.160.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.160.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 2.372.040.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 373 Peserta Didik | 373 Peserta Didik | 421.870.000,00 | 298.210.000,00 | 298.210.000,00 | -123.660.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 463.271.600,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Persentase Pengelolaan Pendidikan Dasar ]** | - | - | - | - | - | - | **94.050.558.309,00** | **70.348.761.900,00** | **76.286.700.747,00** | - | - | - | - | - | - | - | **106.720.544.773,40** | - |
| | 1.01.02.2.01.0026 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | 1 Orang | 1 Orang | 246.131.600,00 | 226.449.000,00 | 226.449.000,00 | -19.682.600,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 268.707.670,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | - | - | - | - | - | - | - | **94.050.558.309,00** | **70.348.761.900,00** | **76.286.700.747,00** | - | - | - | - | - | - | - | **106.720.544.773,40** | - |
| | 1.01.02.2.01.0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 450 Orang | 450 Orang | 701.271.281,00 | 262.828.000,00 | 262.828.000,00 | -438.443.281,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 702.069.060,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah | | | | 373 Satuan Pendidikan | 373 Satuan Pendidikan | 453.975.000,00 | 299.293.900,00 | 299.293.900,00 | -154.681.100,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 422.375.503,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | | | | 373 Satuan Pendidikan | 373 Satuan Pendidikan | 36.807.661.826,00 | 34.504.350.000,00 | 34.504.350.000,00 | -2.303.311.826,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 40.488.428.009,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0031 | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun | | | | 7 Ruang | 0 Ruang | 1.283.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.283.250.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 220.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0035 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | 373 Orang | 373 Orang | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 60.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0036 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | | | | 2 Konten Digital | 2 Konten Digital | 31.500.000,00 | 31.500.000,00 | 31.500.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0038 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 341.305.000,00 | 198.305.000,00 | 198.305.000,00 | -143.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 373.695.300,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0039 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0043 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 60.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0046 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | | | | 1 Paket | 0 Paket | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 110.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | | | | 8 Ruang | 1 Ruang | 2.426.670.000,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | -2.276.670.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 4.950.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 0 Unit | 7 Unit | 0,00 | 500.000.000,00 | 1.172.000.000,00 | 1.172.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 1.630.600.483,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 373 Satuan Pendidikan | 373 Satuan Pendidikan | 36.900.000,00 | 36.900.000,00 | 36.900.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 35 Ruang | 18 Ruang | 5.501.160.000,00 | 1.999.999.800,00 | 5.761.599.800,00 | 260.439.800,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABU | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 6.312.369.800,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | | 100 Peserta Didik | 0 Peserta Didik | 39.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -39.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 332.419.945,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | | | | 25 Paket | 0 Paket | 1.916.191.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.916.191.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 3.554.699.622,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | - | | | | - | - | 23.139.982.174,00 | 19.099.467.400,00 | 19.827.467.250,00 | -3.312.514.924,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 25.244.036.921,40 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 14 Unit | 4 Unit | 765.600.000,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | -465.600.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 825.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 14 Ruang | 6 Ruang | 1.431.150.000,00 | 1.000.000.000,00 | 1.672.000.000,00 | 240.850.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 2.420.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utlilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 7 Unit | 2 Unit | 870.000.000,00 | 200.000.000,00 | 256.000.000,00 | -614.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 170.948.800,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0025 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | | | | 6 Paket | 0 Paket | 1.988.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.988.800.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 2.200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | | 500 Peserta Didik | 0 Peserta Didik | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 203.610.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 100 Peserta Didik | 100 Peserta Didik | 383.260.000,00 | 179.500.000,00 | 179.500.000,00 | -203.760.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 644.604.510,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Persentase Pengelolaan Pendidikan Dasar ]** | - | - | - | - | - | - | **94.050.558.309,00** | **70.348.761.900,00** | **76.286.700.747,00** | - | - | - | - | - | - | - | **106.720.544.773,40** | - |
| | 1.01.02.2.02.0039 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | 10 Orang | 10 Orang | 28.037.000,00 | 40.014.000,00 | 40.014.000,00 | 11.977.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 32.817.400,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | - | - | - | - | - | - | - | **94.050.558.309,00** | **70.348.761.900,00** | **76.286.700.747,00** | - | - | - | - | - | - | - | **106.720.544.773,40** | - |
| | 1.01.02.2.02.0040 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 250 Orang | 250 Orang | 246.223.000,00 | 131.744.000,00 | 131.744.000,00 | -114.479.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 30.848.620,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan | | | | 61 Satuan Pendidikan | 61 Satuan Pendidikan | 224.680.000,00 | 260.845.400,00 | 260.845.250,00 | 36.165.250,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 248.431.700,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | | | | 61 Satuan Pendidikan | 61 Satuan Pendidikan | 16.835.418.174,00 | 16.691.170.000,00 | 16.691.170.000,00 | -144.248.174,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 18.135.147.991,40 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0048 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | 51 Orang | 51 Orang | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 39.600.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0049 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | | | | 2 Konten Digital | 2 Konten Digital | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0051 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 225.000.000,00 | 161.880.000,00 | 161.880.000,00 | -63.120.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 253.427.900,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0055 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 32.500.000,00 | 32.500.000,00 | 32.500.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 39.600.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0058 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | | | | 61 Satuan Pendidikan | 61 Satuan Pendidikan | 36.814.000,00 | 36.814.000,00 | 36.814.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | - | | | | - | - | 9.017.917.138,00 | 6.530.480.100,00 | 6.654.480.100,00 | -2.363.437.038,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 9.383.116.600,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | | | | 4 Unit | 4 Unit | 109.710.000,00 | 197.484.100,00 | 197.484.100,00 | 87.774.100,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 124.876.400,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0007 | Pengadaan Mebel PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia | | | | 1 Paket | 0 Paket | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 27.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 90 Orang | 90 Orang | 147.398.138,00 | 144.039.000,00 | 144.039.000,00 | -3.359.138,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 177.157.200,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | | | | 90 Satuan Pendidikan | 90 Satuan Pendidikan | 49.190.000,00 | 50.945.000,00 | 50.945.000,00 | 1.755.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 38.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | | | | 296 Satuan Pendidikan | 296 Satuan Pendidikan | 5.437.800.000,00 | 5.133.600.000,00 | 5.133.600.000,00 | -304.200.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 5.980.920.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0019 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | | 65 Orang | 65 Orang | 93.490.000,00 | 85.045.000,00 | 85.045.000,00 | -8.445.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 16.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0022 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | 100 Orang | 100 Orang | 29.700.000,00 | 18.107.500,00 | 18.107.500,00 | -11.592.500,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 16.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0023 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | | | | 2 Konten Digital | 2 Konten Digital | 38.025.000,00 | 16.222.500,00 | 16.222.500,00 | -21.802.500,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0025 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 44.662.000,00 | 44.662.000,00 | 44.662.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 38.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0026 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 55.125.000,00 | 28.732.500,00 | 28.732.500,00 | -26.392.500,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0030 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | | | | 4 Ruang | 4 Ruang | 593.750.000,00 | 217.500.000,00 | 217.500.000,00 | -376.250.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 653.125.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0037 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 87.900.000,00 | 43.235.000,00 | 43.235.000,00 | -44.665.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 27.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0038 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | | | | 1 Ruang | 1 Ruang | 0,00 | 235.000.000,00 | 235.000.000,00 | 235.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 33.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0041 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | | | | 1 Paket | 1 Paket | 109.590.000,00 | 54.590.000,00 | 54.590.000,00 | -55.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 55.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Persentase Pengelolaan Pendidikan Dasar ]** | - | - | - | - | - | - | **94.050.558.309,00** | **70.348.761.900,00** | **76.286.700.747,00** | - | - | - | - | - | - | - | **106.720.544.773,40** | - |
| | 1.01.02.2.03.0046 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia | | | | 2 Paket | 0 Paket | 1.514.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.514.010.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 1.650.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | - | - | - | - | - | - | - | **94.050.558.309,00** | **70.348.761.900,00** | **76.286.700.747,00** | - | - | - | - | - | - | - | **106.720.544.773,40** | - |
| | 1.01.02.2.03.0047 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar | | | | 296 Satuan Pendidikan | 296 Satuan Pendidikan | 362.527.000,00 | 261.317.500,00 | 261.317.500,00 | -101.209.500,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 355.058.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 6 Ruang | 6 Ruang | 195.040.000,00 | 0,00 | 124.000.000,00 | -71.040.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 188.980.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | - | | | | - | - | 5.746.898.290,00 | 5.210.978.700,00 | 5.210.978.700,00 | -535.919.590,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 7.702.967.580,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0010 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | | 900 Peserta Didik | 900 Peserta Didik | 15.138.600,00 | 9.360.000,00 | 9.360.000,00 | -5.778.600,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 1.518.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0015 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 30 Orang | 30 Orang | 39.960.000,00 | 32.707.000,00 | 32.707.000,00 | -7.253.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 60.731.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0016 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | | | | 38 Satuan Pendidikan | 38 Satuan Pendidikan | 167.643.400,00 | 270.236.700,00 | 270.236.700,00 | 102.593.300,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 172.466.580,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | | | | 38 Satuan Pendidikan | 38 Satuan Pendidikan | 5.085.700.490,00 | 4.633.300.000,00 | 4.633.300.000,00 | -452.400.490,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 5.594.270.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0027 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 43.788.000,00 | 22.750.000,00 | 22.750.000,00 | -21.038.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 27.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0028 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **[ Persentase Pengelolaan Pendidikan Dasar ]** | - | - | - | - | - | - | **94.050.558.309,00** | **70.348.761.900,00** | **76.286.700.747,00** | - | - | - | - | - | - | - | **106.720.544.773,40** | - |
| | 1.01.02.2.04.0042 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | | 120 Orang | 120 Orang | 93.465.000,00 | 167.625.000,00 | 167.625.000,00 | 74.160.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 55.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | - | - | - | - | - | - | - | **94.050.558.309,00** | **70.348.761.900,00** | **76.286.700.747,00** | - | - | - | - | - | - | - | **106.720.544.773,40** | - |
| | 1.01.02.2.04.0046 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 50 Peserta Didik | 0 Peserta Didik | 63.002.800,00 | 0,00 | 0,00 | -63.002.800,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia | | | | 2 Paket | 2 Paket | 228.200.000,00 | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | -163.200.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 275.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 3, | **1.01.04** | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | - | | | | - | - | **29.782.000,00** | **62.219.000,00** | **62.219.000,00** | **2.980.400,00** | | | | | | | **32.762.400,00** | |
| | 1.01.04.2.01 | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | - | | | | - | - | 29.782.000,00 | 62.219.000,00 | 62.219.000,00 | 32.437.000,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 32.762.400,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.04.2.01.0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 29.782.000,00 | 62.219.000,00 | 62.219.000,00 | 32.437.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 32.762.400,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **3.805.000.000,00** | **1.840.000.000,00** | **1.840.000.000,00** | **-1.965.000.000,00** | | | | | | | **3.838.984.828,00** | |
| | **2.22** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | **3.805.000.000,00** | **1.840.000.000,00** | **1.840.000.000,00** | **-1.965.000.000,00** | | | | | | | **3.838.984.828,00** | |
| 1, | **2.22.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | - | | | | - | - | **2.947.000.000,00** | **1.426.700.000,00** | **1.426.700.000,00** | **45.539.558,00** | | | | | | | **2.992.539.558,00** | |
| | 2.22.02.2.01 | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 460.000.000,00 | 241.640.000,00 | 241.640.000,00 | -218.360.000,00 | | | - | Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT" Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT" | - | | 461.443.727,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.2.01.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan | | | | 4 Objek | 4 Objek | 460.000.000,00 | 241.640.000,00 | 241.640.000,00 | -218.360.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT" Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT" | | | 461.443.727,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.2.02 | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 1.187.000.000,00 | 695.060.000,00 | 695.060.000,00 | -491.940.000,00 | | | - | - - | - | | 996.925.831,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.2.02.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | | | | 2 Objek | 2 Objek | 710.000.000,00 | 500.358.000,00 | 500.358.000,00 | -209.642.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | - - | | | 825.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.2.02.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 477.000.000,00 | 194.702.000,00 | 194.702.000,00 | -282.298.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | - - | | | 171.925.831,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.2.03 | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 1.300.000.000,00 | 490.000.000,00 | 490.000.000,00 | -810.000.000,00 | | | - | - - | - | | 1.534.170.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.2.03.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina | | | | 220 Orang | 0 Orang | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -800.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | - - | | | 922.020.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.2.03.0003 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi | | | | 4 Unit | 4 Unit | 500.000.000,00 | 490.000.000,00 | 490.000.000,00 | -10.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT" Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT" | | | 612.150.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 2, | **2.22.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | - | | | | - | - | **300.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **49.003.490,00** | | | | | | | **349.003.490,00** | |
| | 2.22.03.2.01 | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000.000,00 | | | - | Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT" Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT" | - | | 349.003.490,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.03.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | 7 Lembaga | 0 Lembaga | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT" Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT" | | | 349.003.490,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 3, | **2.22.05** | **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | - | | | | - | - | **444.000.000,00** | **413.300.000,00** | **413.300.000,00** | **-62.058.220,00** | | | | | | | **381.941.780,00** | |
| | 2.22.05.2.01 | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 202.000.000,00 | 302.000.000,00 | 302.000.000,00 | 100.000.000,00 | | | - | Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT" Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT" | - | | 211.332.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.05.2.01.0001 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan | | | | 20 Objek | 20 Objek | 15.000.000,00 | 115.000.000,00 | 115.000.000,00 | 100.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT" Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT" | | | 44.528.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.05.2.01.0002 | Penetapan Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan | | | | 15 Objek | 15 Objek | 187.000.000,00 | 187.000.000,00 | 187.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | - - | | | 166.804.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.05.2.02 | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 242.000.000,00 | 111.300.000,00 | 111.300.000,00 | -130.700.000,00 | | | - | Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT" Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT" | - | | 170.609.780,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.05.2.02.0001 | Pelindungan Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi | | | | 20 Objek | 0 Objek | 31.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -31.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT" Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT" | | | 38.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.05.2.02.0003 | Pemanfaatan Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan | | | | 2 Objek | 2 Objek | 211.000.000,00 | 111.300.000,00 | 111.300.000,00 | -99.700.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT" Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT" | | | 132.109.780,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 4, | **2.22.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN** | - | | | | - | - | **114.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500.000,00** | | | | | | | **115.500.000,00** | |
| | 2.22.06.2.01 | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | Pembinaan dan peningkatan mutu dan kapasitas sumber daya manusia permuseuman | | | | - | NA kegiatan | 114.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -114.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang | Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT" Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT" | - | | 115.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.06.2.01.0002 | Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya | | | | 40 Orang | 0 Orang | 114.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -114.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang | Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT" Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT" | | | 115.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS** | | | | | | | **70.281.964.697,00** | **65.085.454.905,00** | **64.458.495.627,00** | **-5.823.469.070,00** | | | | | | | **61.361.347.070,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **70.281.964.697,00** | **65.085.454.905,00** | **64.458.495.627,00** | **-5.823.469.070,00** | | | | | | | **61.361.347.070,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **70.281.964.697,00** | **65.085.454.905,00** | **64.458.495.627,00** | **-5.823.469.070,00** | | | | | | | **61.361.347.070,00** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | **100 %** | **100 %** | **63.650.149.697,00** | **63.527.336.905,00** | **62.900.377.627,00** | **-3.426.920.627,00** | | | | | | | **60.223.229.070,00** | |
| | | **[ Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintah ]** | - | - | - | - | - | - | **63.650.149.697,00** | **63.527.336.905,00** | **62.900.377.627,00** | - | - | - | - | - | - | - | **60.223.229.070,00** | - |
| | 1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi Keuangan Rumah Sakit | | | | 100 % | 100 % | 27.665.560.697,00 | 27.925.827.905,00 | 27.298.868.627,00 | -366.692.070,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | RSUD dr. Achmad Darwis | | 24.516.046.070,00 | BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS |
| | 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 300 Orang/ bulan | 360 Orang/ bulan | 27.665.560.697,00 | 27.925.827.905,00 | 27.298.868.627,00 | -366.692.070,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 24.516.046.070,00 | BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi Umum Rumah Sakit | | | | 100 % | 100 % | 123.634.000,00 | 0,00 | 0,00 | -123.634.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota | | 105.674.000,00 | BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS |
| | 1.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PRIORITAS | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | NASIONAL | DAERAH | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 Dokumen | 0 Dokumen | 4.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.170.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki | - | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 0,00 | BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS |
| | 1.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 0 Laporan | 13.790.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.790.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki | - | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 0,00 | BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS |
| | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 105.674.000,00 | 0,00 | 0,00 | -105.674.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki | - | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 105.674.000,00 | BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | **63.650.149.697,00** | **63.527.336.905,00** | **62.900.377.627,00** | - | - | - | - | - | - | - | **60.223.229.070,00** | - |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Rumah Sakit | | | | 100 % | 100 % | 754.805.000,00 | 601.509.000,00 | 601.509.000,00 | -153.296.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota | | 601.509.000,00 | BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 36 Laporan | 741.085.000,00 | 601.509.000,00 | 601.509.000,00 | -139.576.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki | PENDAPATAN BAGI HASIL | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 601.509.000,00 | BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS |
| | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 0 Laporan | 13.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.720.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 0,00 | BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS |
| | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | | | | 100 % | 100 % | 106.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -106.150.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota | | 0,00 | BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS |
| | 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 4 Unit | 0 Unit | 106.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -106.150.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 0,00 | BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | Tersedianya BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan Rumah Sakit | | | | 100 % | 100 % | 35.000.000.000,00 | 35.000.000.000,00 | 35.000.000.000,00 | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota | | 35.000.000.000,00 | BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 35.000.000.000,00 | 35.000.000.000,00 | 35.000.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki | PENDAPATAN DARI BLUD RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 35.000.000.000,00 | BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS |
| 2, | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat** | | | | **70 %** | **94 %** | **6.004.315.000,00** | **1.558.118.000,00** | **1.558.118.000,00** | **-4.966.197.000,00** | | | | | | | **1.038.118.000,00** | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | | | | 70 % | 94 % | 5.679.315.000,00 | 1.138.118.000,00 | 1.138.118.000,00 | -4.541.197.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota | | 1.038.118.000,00 | BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS |
| | 1.02.02.2.01.0003 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun | | | | 2 Unit | 0 Unit | 1.845.813.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.845.813.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki | DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS |
| | 1.02.02.2.01.0008 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit | | | | 3 Unit | 1 Unit | 1.833.502.000,00 | 1.038.118.000,00 | 1.038.118.000,00 | -795.384.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki | DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 1.038.118.000,00 | BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS |
| | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | | | | 3 Unit | 28 Unit | 1.000.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | -900.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.01.0022 | Pengembangan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | | | | 2 Unit | 0 Unit | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki | - | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terpenuhinya Standar Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 75 %<br>84 % | 94 % | 325.000.000,00 | 420.000.000,00 | 420.000.000,00 | 95.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota | | 0,00 | BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS |
| | 1.02.02.2.02.0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | | 12<br>Dokumen | 12<br>Dokumen | 325.000.000,00 | 420.000.000,00 | 420.000.000,00 | 95.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS |
| 3, | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan** | | | | **84 %** | **91 %** | **627.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-527.500.000,00** | | | | | | | **100.000.000,00** | |
| | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terpenuhinya sumber daya dan peningkatan mutu layanan kesehatan | | | | 70 %<br>84 % | 91 % | 627.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -627.500.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota | | 100.000.000,00 | BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS |
| | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | 12<br>Dokumen | 1 Dokumen | 627.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -627.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 100.000.000,00 | BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS |
| | | **DINAS KESEHATAN** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)** | | | | - | **100 %** | **126.349.000.000,00** | **116.771.805.976,00** | **115.571.605.425,00** | **3.214.606.000,00** | | | | | | | **129.563.606.000,00** | |
| | 1.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah | | | | - | 100 % | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000.000,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 33.516.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 33.516.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 97.565.000.000,00 | 88.291.470.976,00 | 86.620.191.918,00 | -10.944.808.082,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 98.110.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 1000 Orang /bulan | 1000 Orang /bulan | 97.500.000.000,00 | 88.226.470.976,00 | 86.555.191.918,00 | -10.944.808.082,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 98.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 1 dokumen Dokumen | 1 dokumen Dokumen | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 65.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 45.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 25.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 25.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 35.000.000,00 | 88.330.000,00 | 88.330.000,00 | 53.330.000,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 45.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 35.000.000,00 | 88.330.000,00 | 88.330.000,00 | 53.330.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN BAGI HASIL | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"<br>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 45.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 85.000.000,00 | 43.589.000,00 | 43.589.000,00 | -41.411.000,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"<br>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 110.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"<br>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 75.000.000,00 | 33.589.000,00 | 33.589.000,00 | -41.411.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"<br>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 375.500.000,00 | 259.800.000,00 | 730.878.507,00 | 355.378.507,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"<br>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 734.750.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 167.500.000,00 | 187.800.000,00 | 187.800.000,00 | 20.300.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"<br>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 200.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | - | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 471.078.507,00 | 471.078.507,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"<br>Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 208.000.000,00 | 72.000.000,00 | 72.000.000,00 | -136.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"<br>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 534.750.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 352.500.000,00 | 177.616.000,00 | 177.616.000,00 | -174.884.000,00 | | | - | - | - | | 514.340.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 4 Unit | 1 Unit | 95.000.000,00 | 39.190.000,00 | 39.190.000,00 | -55.810.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 97.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 2 Unit | 3 Unit | 32.500.000,00 | 76.100.000,00 | 76.100.000,00 | 43.600.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 65.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 10 Unit | 10 Unit | 50.000.000,00 | 9.540.000,00 | 9.540.000,00 | -40.460.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 65.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 80.000.000,00 | 13.596.000,00 | 13.596.000,00 | -66.404.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 190.340.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2, | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | - | | | | - | - | **45.491.616.489,00** | **56.900.806.847,00** | **67.136.813.746,00** | **1.732.613.511,00** | | | | | | | **47.224.230.000,00** | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase sarana prasarana puskesmas yang memenuhi standar sesuai Pemenkes 43 tahun 2019 | | | | 100 % | 100 % | 6.408.644.000,00 | 8.176.426.437,00 | 11.886.056.930,00 | 5.477.412.930,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 26.505.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0001 | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | | | | 1 Unit | 1 Unit | 1.250.000.000,00 | 2.542.789.557,00 | 3.715.675.050,00 | 2.465.675.050,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 17.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0006 | Pengembangan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | | | | 2 Unit | 2 Unit | 50.000.000,00 | 157.372.500,00 | 2.024.340.500,00 | 1.974.340.500,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 65.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0007 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | | | | 2 Unit | 2 Unit | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 750.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas | | | | 2 Unit | 2 Unit | 75.000.000,00 | 300.000.000,00 | 380.709.000,00 | 305.709.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 75.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | 2 Unit | 2 Unit | 175.000.000,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 125.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | | | | 4 Unit | 4 Unit | 112.000.000,00 | 112.000.000,00 | 701.068.000,00 | 589.068.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 250.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | | | | 22 Unit | 22 Unit | 45.000.000,00 | 755.871.000,00 | 755.871.000,00 | 710.871.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 65.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 4.250.000.000,00 | 3.706.749.380,00 | 3.706.749.380,00 | -543.250.620,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 7.500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0026 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan | | | | 22 Paket | 22 Paket | 301.644.000,00 | 301.644.000,00 | 301.644.000,00 | 0,00 | - | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 350.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan sesuai standart | | | | - | 100 % | 38.792.972.489,00 | 48.293.966.410,00 | 54.820.342.816,00 | 16.027.370.327,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 20.159.230.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 615 Orang | 615 Orang | 150.000.000,00 | 248.850.000,00 | 248.850.000,00 | 98.850.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 250.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 612 Orang | 612 Orang | 100.000.000,00 | 64.450.000,00 | 64.450.000,00 | -35.550.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 250.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 573 Orang | 573 Orang | 105.000.000,00 | 969.604.800,00 | 969.604.800,00 | 864.604.800,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 250.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 2694 Orang | 2694 Orang | 95.000.000,00 | 95.000.000,00 | 95.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 250.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 7883 Orang | 7883 Orang | 85.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 15.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 350.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 20978 Orang | 20978 Orang | 300.000.000,00 | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | 50.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 2016 Orang | 2016 Orang | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 3121 Orang | 3121 Orang | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 250.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 418 Orang | 418 Orang | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | | | | 68 Orang | 68 Orang | 95.000.000,00 | 95.000.000,00 | 95.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 1149 Orang | 1149 Orang | 450.000.000,00 | 1.410.470.000,00 | 1.410.470.000,00 | 960.470.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 650.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 730 Orang | 730 Orang | 150.000.000,00 | 275.100.000,00 | 275.100.000,00 | 125.100.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 250.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 235.000.000,00 | 935.000.000,00 | 861.856.000,00 | 626.856.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 15.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 45.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 95.000.000,00 | 543.457.190,00 | 766.906.190,00 | 671.906.190,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 250.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 95.000.000,00 | 94.564.800,00 | 115.104.800,00 | 20.104.800,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 250.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 78.500.000,00 | 78.500.000,00 | 65.000.000,00 | -13.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 102.391 Orang | 102.391 Orang | 142.000.000,00 | 142.000.000,00 | 142.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 175.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0024 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 95.000.000,00 | 95.000.000,00 | 35.760.000,00 | -59.240.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 175.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 702.000.000,00 | 287.696.900,00 | 255.496.900,00 | -446.503.100,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 950.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 22.941.754.489,00 | 30.940.845.600,00 | 37.559.604.106,00 | 14.617.849.617,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan | | | | 10 Paket | 10 Paket | 55.000.000,00 | 319.520.000,00 | 303.690.000,00 | 248.690.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 65.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0029 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 10.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 65.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 250.000.000,00 | 142.410.300,00 | 142.410.300,00 | -107.589.700,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 65.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 95.000.000,00 | 134.317.200,00 | 128.582.200,00 | 33.582.200,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 35.000.000,00 | 42.650.000,00 | 18.850.000,00 | -16.150.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 45.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0038 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | | | | 1 Unit | 1 Unit | 1.100.000.000,00 | 916.526.000,00 | 916.526.000,00 | -183.474.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 1.250.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | | | | 1959 Orang | 1959 Orang | 26.500.000,00 | 56.193.620,00 | 56.193.620,00 | 29.693.620,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 45.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 45.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 45.000.000,00 | 109.750.000,00 | 109.750.000,00 | 64.750.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 65.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Persentase sarana kesehatan yang menyelenggarakan sistem informasi terintegrasi | | | | - | 100 % | 210.000.000,00 | 245.000.000,00 | 245.000.000,00 | 35.000.000,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 210.000.000,00 | 245.000.000,00 | 245.000.000,00 | 35.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase RS kelas C dan D yang memiliki izin | | | | - | 100 % | 80.000.000,00 | 185.414.000,00 | 185.414.000,00 | 105.414.000,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 110.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.04.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 45.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.04.0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan | | | | 22 Unit | 22 Unit | 60.000.000,00 | 165.414.000,00 | 165.414.000,00 | 105.414.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 65.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3, | **1.02.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | - | | | | - | - | **708.500.000,00** | **1.450.622.000,00** | **1.450.222.000,00** | **231.500.000,00** | | | | | | | **940.000.000,00** | |
| | 1.02.03.2.01 | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | Jumlah tenaga kesehatan yang di berikan rekomendasi izin praktek | | | | - | 245 orang | 45.000.000,00 | 28.590.000,00 | 28.590.000,00 | -16.410.000,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 65.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.01.0001 | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 45.000.000,00 | 28.590.000,00 | 28.590.000,00 | -16.410.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 65.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Persentase ketersediaan SDM kesehatan di Fasyankes sesuai Permenkes 43 Tahun 2019 | | | | - | 100 % | 263.500.000,00 | 361.588.000,00 | 361.588.000,00 | 98.088.000,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 425.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.02.0001 | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 75.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.02.0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | | | | 4 Orang | 4 Orang | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 175.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.02.0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 158.500.000,00 | 256.588.000,00 | 256.588.000,00 | 98.088.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 175.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 400.000.000,00 | 1.060.444.000,00 | 1.060.044.000,00 | 660.044.000,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.03.0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | | | | 100 Orang | 100 Orang | 400.000.000,00 | 1.060.444.000,00 | 1.060.044.000,00 | 660.044.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 4, | **1.02.04** | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | **Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan** | | | | - | **100 %** | **522.518.000,00** | **525.525.000,00** | **525.525.000,00** | **97.482.000,00** | | | | | | | **620.000.000,00** | |
| | 1.02.04.2.01 | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah Apotek, Toko obat, Toko ALKES dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin | | | | - | 57 unit | 63.730.000,00 | 122.036.000,00 | 122.036.000,00 | 58.306.000,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 75.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.01.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 63.730.000,00 | 122.036.000,00 | 122.036.000,00 | 58.306.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOK-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 75.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.03 | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah Sertifikat Produksi Pangan IRT-P dan Nomor P-IRT yang di terbitkan | | | | - | 60 Unit | 274.774.000,00 | 320.784.000,00 | 320.784.000,00 | 46.010.000,00 | | | - | - - | - | | 350.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.03.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 137.387.000,00 | 160.392.000,00 | 160.392.000,00 | 23.005.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOK-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN | - | - - | | | 175.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.03.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.04.2.06 | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | Jumlah IRT-P yang di awasi | | | | - | 25 unit | 184.014.000,00 | 82.705.000,00 | 82.705.000,00 | -101.309.000,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | | 195.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.06.0001 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan | | | | 25 Unit | 25 Unit | 184.014.000,00 | 82.705.000,00 | 82.705.000,00 | -101.309.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOK-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 195.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 5, | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan** | | | | **-** | **100 %** | **457.375.000,00** | **1.222.828.000,00** | **1.234.901.100,00** | **611.045.000,00** | | | | | | | **1.068.420.000,00** | |
| | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 235.000.000,00 | 489.645.000,00 | 479.573.000,00 | 244.573.000,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | | 609.120.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 235.000.000,00 | 221.160.000,00 | 127.260.000,00 | -107.740.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.02 | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase PHBS di masyarakat | | | | - | 55 % | 85.000.000,00 | 199.040.000,00 | 199.040.000,00 | 114.040.000,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | | 200.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.02.0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 35.000.000,00 | 118.015.000,00 | 118.015.000,00 | 83.015.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.02.0002 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat | | | | 250 Keluarga | 250 Keluarga | 50.000.000,00 | 81.025.000,00 | 81.025.000,00 | 31.025.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 137.375.000,00 | 534.143.000,00 | 556.288.100,00 | 418.913.100,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | | 259.300.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 78.000.000,00 | 78.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS TARAM** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | - | **100 %** | **126.349.000.000,00** | **116.771.805.976,00** | **115.571.605.425,00** | **3.214.606.000,00** | | | | | | | **129.563.606.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 27.886.000.000,00 | 27.886.000.000,00 | 27.886.000.000,00 | 0,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 29.991.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 1.185.000.000,00 | 1.185.000.000,00 | 1.185.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 1.285.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2, | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | - | | | | - | - | **45.491.616.489,00** | **56.900.806.847,00** | **67.136.813.746,00** | **1.732.613.511,00** | | | | | | | **47.224.230.000,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 38.792.972.489,00 | 48.293.966.410,00 | 54.820.342.816,00 | 16.027.370.327,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 20.159.230.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 17 Orang | 17 Orang | 12.395.000,00 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 22.605.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Bukik Limbuku | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 45.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 242 Orang | 242 Orang | 20.000.000,00 | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 18.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Batu Balang | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 45.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | | | | 2 Orang | 2 Orang | 6.000.000,00 | 4.400.000,00 | 4.200.000,00 | -1.800.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Taram Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Bukik Limbuku Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Batu Balang | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 32 Orang | 32 Orang | 25.000.000,00 | 22.800.000,00 | 22.800.000,00 | -2.200.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Taram<br>Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Bukik Limbuku Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Batu Balang | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"<br>Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 45.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 125.000.000,00 | 105.490.000,00 | 112.690.000,00 | -12.310.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Taram<br>Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Bukik Limbuku Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Batu Balang | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"<br>Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 150.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.650.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Taram<br>Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Bukik Limbuku Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Batu Balang | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"<br>Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.565.000,00 | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 3.935.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Taram<br>Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Bukik Limbuku Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Batu Balang | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"<br>Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.250.000,00 | 6.824.000,00 | 6.824.000,00 | 4.574.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Taram<br>Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Bukik Limbuku Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Batu Balang | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"<br>Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 5.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 193 Orang | 193 Orang | 2.850.000,00 | 7.310.000,00 | 7.510.000,00 | 4.660.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Taram<br>Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Bukik Limbuku Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Batu Balang | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"<br>Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 5.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 35.000.000,00 | 33.600.000,00 | 33.600.000,00 | -1.400.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"<br>Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 45.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 60.000.000,00 | 94.986.000,00 | 84.586.000,00 | 24.586.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Taram<br>Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Bukik Limbuku Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Batu Balang | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"<br>Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 150.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | | | | 93 Orang | 93 Orang | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.500.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | -300.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 2.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | 56.000.000,00 | 56.000.000,00 | 26.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 45.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3, | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan** | | | | - | **100 %** | **457.375.000,00** | **1.222.828.000,00** | **1.234.901.100,00** | **611.045.000,00** | | | | | | | **1.068.420.000,00** | |
| | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 235.000.000,00 | 489.645.000,00 | 479.573.000,00 | 244.573.000,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 609.120.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 9.000.000,00 | 12.200.000,00 | 12.200.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Taram | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 137.375.000,00 | 534.143.000,00 | 556.288.100,00 | 418.913.100,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 259.300.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.500.000,00 | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | 8.900.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 45.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS SULIKI** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | **-** | **100 %** | **126.349.000.000,00** | **116.771.805.976,00** | **115.571.605.425,00** | **3.214.606.000,00** | | | | | | | **129.563.606.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 27.886.000.000,00 | 27.886.000.000,00 | 27.886.000.000,00 | 0,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 29.991.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 1.200.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 1.300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2, | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | - | | | | - | - | **45.491.616.489,00** | **56.900.806.847,00** | **67.136.813.746,00** | **1.732.613.511,00** | | | | | | | **47.224.230.000,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 38.792.972.489,00 | 48.293.966.410,00 | 54.820.342.816,00 | 16.027.370.327,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 20.159.230.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 22 Orang | 22 Orang | 65.000.000,00 | 42.200.000,00 | 42.200.000,00 | -22.800.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 75.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 262 Orang | 262 Orang | 20.000.000,00 | 24.700.000,00 | 24.700.000,00 | 4.700.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 45.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | | | | 2 Orang | 2 Orang | 16.650.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | -13.050.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 17.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 40 Orang | 40 Orang | 5.550.000,00 | 2.200.000,00 | 4.600.000,00 | -950.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 6.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 175.000.000,00 | 137.760.000,00 | 137.760.000,00 | -37.240.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 200.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.050.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 11.700.000,00 | 8.800.000,00 | 9.600.000,00 | -2.100.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 11.250.000,00 | 18.400.000,00 | 20.800.000,00 | 9.550.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 12.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 156 Orang | 156 Orang | 1.800.000,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 1.100.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 2.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | 17.700.000,00 | 14.950.000,00 | -35.050.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 65.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 95.000.000,00 | 76.470.000,00 | 76.470.000,00 | -18.530.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 97.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | | | | 79 Orang | 79 Orang | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | -800.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-AKREDITASI PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 1.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.800.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | 41.200.000,00 | 41.300.000,00 | 11.300.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 35.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3, | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan** | | | | - | **100 %** | **457.375.000,00** | **1.222.828.000,00** | **1.234.901.100,00** | **611.045.000,00** | | | | | | | **1.068.420.000,00** | |
| | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 235.000.000,00 | 489.645.000,00 | 479.573.000,00 | 244.573.000,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 609.120.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 4.125.000,00 | 12.675.000,00 | 12.675.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 4.525.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 137.375.000,00 | 534.143.000,00 | 556.288.100,00 | 418.913.100,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 259.300.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.500.000,00 | 44.745.000,00 | 33.245.000,00 | 26.745.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Sulki, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 7.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS SITUJUH** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | - | **100 %** | **126.349.000.000,00** | **116.771.805.976,00** | **115.571.605.425,00** | **3.214.606.000,00** | | | | | | | **129.563.606.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 27.886.000.000,00 | 27.886.000.000,00 | 27.886.000.000,00 | 0,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 29.991.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 1.450.000.000,00 | 1.450.000.000,00 | 1.450.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 1.550.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2, | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | - | | | | - | - | **45.491.616.489,00** | **56.900.806.847,00** | **67.136.813.746,00** | **1.732.613.511,00** | | | | | | | **47.224.230.000,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 38.792.972.489,00 | 48.293.966.410,00 | 54.820.342.816,00 | 16.027.370.327,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 20.159.230.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 35 Orang | 35 Orang | 45.000.000,00 | 51.600.000,00 | 51.600.000,00 | 6.600.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 55.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 434 Orang | 434 Orang | 35.000.000,00 | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 13.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 45.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | | | | 4 Orang | 4 Orang | 6.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | -3.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 7.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 65 Orang | 65 Orang | 12.600.000,00 | 12.800.000,00 | 12.800.000,00 | 200.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 13.600.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 125.000.000,00 | 119.215.000,00 | 119.215.000,00 | -5.785.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 135.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 14.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | -14.700.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.150.000,00 | 11.000.000,00 | 9.000.000,00 | -3.150.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 13.600.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.500.000,00 | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 3.300.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 5.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 113 Orang | 113 Orang | 3.300.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 3.700.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 4.300.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 45.000.000,00 | 31.450.000,00 | 24.700.000,00 | -20.300.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 55.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 95.000.000,00 | 82.622.000,00 | 82.622.000,00 | -12.378.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | | | | 234 Orang | 234 Orang | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | -450.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 550.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 17.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | -17.550.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 25.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.500.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | -1.300.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 3.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.600.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 13.600.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 55.000.000,00 | 50.600.000,00 | 50.600.000,00 | -4.400.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 65.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3, | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan** | | | | - | **100 %** | **457.375.000,00** | **1.222.828.000,00** | **1.234.901.100,00** | **611.045.000,00** | | | | | | | **1.068.420.000,00** | |
| | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 235.000.000,00 | 489.645.000,00 | 479.573.000,00 | 244.573.000,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 609.120.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 6.400.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 137.375.000,00 | 534.143.000,00 | 556.288.100,00 | 418.913.100,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 259.300.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.500.000,00 | 8.313.000,00 | 17.063.000,00 | 10.563.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 7.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS RIMBO DATA** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | - | **100 %** | **126.349.000.000,00** | **116.771.805.976,00** | **115.571.605.425,00** | **3.214.606.000,00** | | | | | | | **129.563.606.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 27.886.000.000,00 | 27.886.000.000,00 | 27.886.000.000,00 | 0,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 29.991.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 354.000.000,00 | 354.000.000,00 | 354.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2, | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | - | | | | - | - | **45.491.616.489,00** | **56.900.806.847,00** | **67.136.813.746,00** | **1.732.613.511,00** | | | | | | | **47.224.230.000,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 38.792.972.489,00 | 48.293.966.410,00 | 54.820.342.816,00 | 16.027.370.327,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 20.159.230.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 6 Orang | 6 Orang | 25.000.000,00 | 39.200.000,00 | 39.200.000,00 | 14.200.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 35.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 92 Orang | 92 Orang | 5.400.000,00 | 12.000.000,00 | 11.000.000,00 | 5.600.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 6.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | | | | 1 Orang | 1 Orang | 3.600.000,00 | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 2.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 4.300.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 12 Orang | 12 Orang | 14.250.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 750.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | 131.730.000,00 | 143.730.000,00 | -6.270.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 160.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.050.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 5.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.300.000,00 | 5.200.000,00 | 14.800.000,00 | 5.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.800.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | -6.400.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 8.800.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 22 Orang | 22 Orang | 300.000,00 | 1.200.000,00 | 3.200.000,00 | 2.900.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 400.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 45.000.000,00 | 16.600.000,00 | 24.100.000,00 | -20.900.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 55.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 115.000.000,00 | 147.538.000,00 | 104.800.000,00 | -10.200.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 125.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | | | | 45 Orang | 45 Orang | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 250.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 450.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | -250.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 550.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.600.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 13.600.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 22.200.000,00 | 22.300.000,00 | 36.500.000,00 | 14.300.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 23.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3, | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan** | | | | - | **100 %** | **457.375.000,00** | **1.222.828.000,00** | **1.234.901.100,00** | **611.045.000,00** | | | | | | | **1.068.420.000,00** | |
| | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 235.000.000,00 | 489.645.000,00 | 479.573.000,00 | 244.573.000,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 609.120.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | - | 50 Dokumen | 0,00 | 12.000.000,00 | 16.828.000,00 | 16.828.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 137.375.000,00 | 534.143.000,00 | 556.288.100,00 | 418.913.100,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 259.300.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.440.000,00 | 28.032.000,00 | 21.642.000,00 | 17.202.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 5.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS BARUH GUNUANG** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | - | **100 %** | **126.349.000.000,00** | **116.771.805.976,00** | **115.571.605.425,00** | **3.214.606.000,00** | | | | | | | **129.563.606.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 27.886.000.000,00 | 27.886.000.000,00 | 27.886.000.000,00 | 0,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 29.991.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 565.000.000,00 | 565.000.000,00 | 565.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 650.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2, | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | - | | | | - | - | **45.491.616.489,00** | **56.900.806.847,00** | **67.136.813.746,00** | **1.732.613.511,00** | | | | | | | **47.224.230.000,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 38.792.972.489,00 | 48.293.966.410,00 | 54.820.342.816,00 | 16.027.370.327,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 20.159.230.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 9 Orang | 9 Orang | 28.000.000,00 | 29.600.000,00 | 29.600.000,00 | 1.600.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 38.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 94 Orang | 94 Orang | 27.500.000,00 | 23.600.000,00 | 23.600.000,00 | -3.900.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 37.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | | | | 1 Orang | 1 Orang | 14.625.000,00 | 10.400.000,00 | 10.400.000,00 | -4.225.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 17 Orang | 17 Orang | 8.550.000,00 | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | -150.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 9.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 115.000.000,00 | 101.950.000,00 | 101.950.000,00 | -13.050.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 125.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.950.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.650.000,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | -450.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 8.650.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.050.000,00 | 11.400.000,00 | 11.400.000,00 | 7.350.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 5.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 39 Orang | 39 Orang | 9.300.000,00 | 11.100.000,00 | 11.100.000,00 | 1.800.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 58.000.000,00 | 29.400.000,00 | 29.400.000,00 | -28.600.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 65.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 105.000.000,00 | 79.220.000,00 | 79.220.000,00 | -25.780.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 125.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | | | | 80 Orang | 80 Orang | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 26.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -26.600.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.125.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | -525.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 2.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | 29.800.000,00 | 29.800.000,00 | 9.800.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3, | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan** | | | | - | **100 %** | **457.375.000,00** | **1.222.828.000,00** | **1.234.901.100,00** | **611.045.000,00** | | | | | | | **1.068.420.000,00** | |
| | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 235.000.000,00 | 489.645.000,00 | 479.573.000,00 | 244.573.000,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 609.120.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 14.040.000,00 | 14.040.000,00 | 14.040.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 137.375.000,00 | 534.143.000,00 | 556.288.100,00 | 418.913.100,00 | | | - | - - | - | | 259.300.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.719.000,00 | 23.290.000,00 | 23.290.000,00 | 13.571.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 12.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **PUSKESMAS PANGKALAN** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | - | **100 %** | **126.349.000.000,00** | **116.771.805.976,00** | **115.571.605.425,00** | **3.214.606.000,00** | | | | | | | **129.563.606.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 27.886.000.000,00 | 27.886.000.000,00 | 27.886.000.000,00 | 0,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 29.991.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 1.578.000.000,00 | 1.578.000.000,00 | 1.578.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 1.678.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2, | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | - | | | | - | - | **45.491.616.489,00** | **56.900.806.847,00** | **67.136.813.746,00** | **1.732.613.511,00** | | | | | | | **47.224.230.000,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 38.792.972.489,00 | 48.293.966.410,00 | 54.820.342.816,00 | 16.027.370.327,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 20.159.230.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 41 Orang | 41 Orang | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 38.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 498 Orang | 498 Orang | 23.500.000,00 | 17.400.000,00 | 20.400.000,00 | -3.100.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 33.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | | | | 5 Orang | 5 Orang | 20.000.000,00 | 15.200.000,00 | 12.000.000,00 | -8.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 76 Orang | 76 Orang | 18.450.000,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | -2.450.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 125.000.000,00 | 164.930.000,00 | 165.130.000,00 | 40.130.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 135.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.900.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 5.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.100.000,00 | 7.200.000,00 | 3.400.000,00 | -1.700.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 6.100.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.850.000,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | -250.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 4.300.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 206 Orang | 206 Orang | 8.700.000,00 | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | 5.700.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 9.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 65.000.000,00 | 45.000.000,00 | 32.000.000,00 | -33.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 75.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 115.000.000,00 | 132.650.000,00 | 132.470.000,00 | 17.470.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 125.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 22.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | -22.420.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 32.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 600.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | -200.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 1.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 35.000.000,00 | 66.425.000,00 | 70.400.000,00 | 35.400.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 45.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3, | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan** | | | | - | **100 %** | **457.375.000,00** | **1.222.828.000,00** | **1.234.901.100,00** | **611.045.000,00** | | | | | | | **1.068.420.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 137.375.000,00 | 534.143.000,00 | 556.288.100,00 | 418.913.100,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 259.300.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.700.000,00 | 25.795.000,00 | 38.800.000,00 | 37.100.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 2.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS BANJA LOWEH** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | - | **100 %** | **126.349.000.000,00** | **116.771.805.976,00** | **115.571.605.425,00** | **3.214.606.000,00** | | | | | | | **129.563.606.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 27.886.000.000,00 | 27.886.000.000,00 | 27.886.000.000,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 29.991.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 615.000.000,00 | 615.000.000,00 | 615.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | - | | | 715.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2, | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | - | | | | - | - | **45.491.616.489,00** | **56.900.806.847,00** | **67.136.813.746,00** | **1.732.613.511,00** | | | | | | | **47.224.230.000,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 38.792.972.489,00 | 48.293.966.410,00 | 54.820.342.816,00 | 16.027.370.327,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 20.159.230.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 19 Orang | 19 Orang | 25.000.000,00 | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | -1.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 35.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 221 Orang | 221 Orang | 26.000.000,00 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 10.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 36.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | | | | 2 Orang | 2 Orang | 6.300.000,00 | 8.000.000,00 | 6.000.000,00 | -300.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 7.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 35 Orang | 35 Orang | 10.200.000,00 | 15.200.000,00 | 9.600.000,00 | -600.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 115.000.000,00 | 89.876.000,00 | 89.766.000,00 | -25.234.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 125.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.550.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 14.400.000,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | -10.200.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.900.000,00 | 8.434.000,00 | 8.464.000,00 | 4.564.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 4.300.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 66 Orang | 66 Orang | 5.700.000,00 | 5.480.000,00 | 7.590.000,00 | 1.890.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 6.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 45.000.000,00 | 27.000.000,00 | 34.950.000,00 | -10.050.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 55.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 125.000.000,00 | 107.120.000,00 | 107.120.000,00 | -17.880.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 135.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | | | | 32 Orang | 32 Orang | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.950.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | -1.550.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 2.250.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 21.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -21.600.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | 22.000.000,00 | 21.600.000,00 | 1.600.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3, | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan** | | | | - | **100 %** | **457.375.000,00** | **1.222.828.000,00** | **1.234.901.100,00** | **611.045.000,00** | | | | | | | **1.068.420.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 235.000.000,00 | 489.645.000,00 | 479.573.000,00 | 244.573.000,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 609.120.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 20.530.000,00 | 34.880.000,00 | 34.880.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 137.375.000,00 | 534.143.000,00 | 556.288.100,00 | 418.913.100,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 259.300.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.342.000,00 | 51.760.000,00 | 35.430.000,00 | 31.088.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 6.100.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS TANJUNG PATI** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | | | | - | - | **126.349.000.000,00** | **116.771.805.976,00** | **115.571.605.425,00** | **3.214.606.000,00** | | | | | | | **129.563.606.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 27.886.000.000,00 | 27.886.000.000,00 | 27.886.000.000,00 | 0,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 29.991.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 2.250.000.000,00 | 2.250.000.000,00 | 2.250.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 2.350.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2, | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | - | | | | - | - | **45.491.616.489,00** | **56.900.806.847,00** | **67.136.813.746,00** | **1.732.613.511,00** | | | | | | | **47.224.230.000,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 38.792.972.489,00 | 48.293.966.410,00 | 54.820.342.816,00 | 16.027.370.327,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 20.159.230.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 42 Orang | 42 Orang | 65.000.000,00 | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | -23.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 75.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 589 Orang | 589 Orang | 45.000.000,00 | 31.600.000,00 | 31.600.000,00 | -13.400.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 55.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | | | | 5 Orang | 5 Orang | 11.700.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | -2.700.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 12.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 78 Orang | 78 Orang | 11.189.000,00 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 7.811.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 12.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 140.000.000,00 | 161.104.000,00 | 161.104.000,00 | 21.104.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 150.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.750.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 13.500.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | -7.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 14.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.200.000,00 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 13.800.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 8.650.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 388 Orang | 388 Orang | 9.000.000,00 | 13.076.000,00 | 13.076.000,00 | 4.076.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 75.000.000,00 | 27.800.000,00 | 27.800.000,00 | -47.200.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 85.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 120.000.000,00 | 151.620.000,00 | 151.620.000,00 | 31.620.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 135.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | | | | 186 Orang | 186 Orang | 524.000,00 | 0,00 | 0,00 | -524.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 1.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 14.928.000,00 | 0,00 | 0,00 | -14.928.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 16.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.375.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | -1.875.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 5.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.600.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 13.600.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 28.000.000,00 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | -7.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 38.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3, | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan** | | | | - | **100 %** | **457.375.000,00** | **1.222.828.000,00** | **1.234.901.100,00** | **611.045.000,00** | | | | | | | **1.068.420.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 235.000.000,00 | 489.645.000,00 | 479.573.000,00 | 244.573.000,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 609.120.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | - | 7 laporan Dokumen | 0,00 | 25.300.000,00 | 25.300.000,00 | 25.300.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 26.300.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 137.375.000,00 | 534.143.000,00 | 556.288.100,00 | 418.913.100,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 259.300.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.030.000,00 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 16.970.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 6.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS MUNGO** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | | | | - | - | **126.349.000.000,00** | **116.771.805.976,00** | **115.571.605.425,00** | **3.214.606.000,00** | | | | | | | **129.563.606.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 27.886.000.000,00 | 27.886.000.000,00 | 27.886.000.000,00 | 0,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 29.991.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 2.043.000.000,00 | 2.043.000.000,00 | 2.043.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 2.143.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2, | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | - | | | | - | - | **45.491.616.489,00** | **56.900.806.847,00** | **67.136.813.746,00** | **1.732.613.511,00** | | | | | | | **47.224.230.000,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 38.792.972.489,00 | 48.293.966.410,00 | 54.820.342.816,00 | 16.027.370.327,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 20.159.230.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 21 Orang | 21 Orang | 55.000.000,00 | 24.220.000,00 | 24.220.000,00 | -30.780.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 65.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 389 Orang | 389 Orang | 20.000.000,00 | 45.000.000,00 | 46.000.000,00 | 26.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | | | | 2 Orang | 2 Orang | 7.200.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | -3.200.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 8.650.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 40 Orang | 40 Orang | 17.500.000,00 | 13.414.000,00 | 13.414.000,00 | -4.086.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 18.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 135.000.000,00 | 151.009.000,00 | 154.609.000,00 | 19.609.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 145.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 14.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -14.100.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.000.000,00 | 3.600.000,00 | 5.600.000,00 | -3.400.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 14.250.000,00 | 8.200.000,00 | 8.300.000,00 | -5.950.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 295 Orang | 295 Orang | 12.000.000,00 | 13.275.000,00 | 8.600.000,00 | -3.400.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 13.600.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 35.000.000,00 | 33.807.000,00 | 31.706.900,00 | -3.293.100,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 45.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 105.000.000,00 | 108.420.000,00 | 90.870.000,00 | -14.130.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 150.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | | | | 142 Orang | 142 Orang | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | -900.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 1.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.050.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.125.000,00 | 605.000,00 | 680.000,00 | -445.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 2.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 35.000.000,00 | 22.800.000,00 | 22.800.000,00 | -12.200.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 45.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3, | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | - | | | | - | - | **457.375.000,00** | **1.222.828.000,00** | **1.234.901.100,00** | **611.045.000,00** | | | | | | | **1.068.420.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 235.000.000,00 | 489.645.000,00 | 479.573.000,00 | 244.573.000,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 609.120.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 4.150.000,00 | 20.200.000,00 | 20.200.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 137.375.000,00 | 534.143.000,00 | 556.288.100,00 | 418.913.100,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 259.300.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.985.000,00 | 34.500.000,00 | 36.000.100,00 | 27.015.100,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS PAKAN RABAA** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | | | | - | - | **126.349.000.000,00** | **116.771.805.976,00** | **115.571.605.425,00** | **3.214.606.000,00** | | | | | | | **129.563.606.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 27.886.000.000,00 | 27.886.000.000,00 | 27.886.000.000,00 | 0,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 29.991.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 1.685.000.000,00 | 1.685.000.000,00 | 1.685.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 1.785.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2, | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | - | | | | - | - | **45.491.616.489,00** | **56.900.806.847,00** | **67.136.813.746,00** | **1.732.613.511,00** | | | | | | | **47.224.230.000,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 38.792.972.489,00 | 48.293.966.410,00 | 54.820.342.816,00 | 16.027.370.327,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 20.159.230.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 50 Orang | 50 Orang | 30.000.000,00 | 28.000.000,00 | 29.400.000,00 | -600.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 45.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 624 Orang | 624 Orang | 32.500.000,00 | 52.700.000,00 | 50.400.000,00 | 17.900.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 45.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | | | | 5 Orang | 5 Orang | 9.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | -3.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 95 Orang | 95 Orang | 19.800.000,00 | 14.200.000,00 | 14.200.000,00 | -5.600.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 125.000.000,00 | 165.160.000,00 | 165.860.000,00 | 40.860.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 135.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 16.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | -16.350.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.900.000,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 2.100.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 17.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.550.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 6.450.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 3.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 248 Orang | 248 Orang | 4.800.000,00 | 12.800.000,00 | 12.800.000,00 | 8.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 6.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 35.000.000,00 | 21.434.000,00 | 21.434.000,00 | -13.566.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 45.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 95.000.000,00 | 110.315.000,00 | 110.315.000,00 | 15.315.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | | | | 119 Orang | 119 Orang | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | -750.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.100.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 900.000,00 | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 | 1.300.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 1.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.200.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 60.000.000,00 | 48.800.000,00 | 48.800.000,00 | -11.200.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 75.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3, | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | - | | | | - | - | **457.375.000,00** | **1.222.828.000,00** | **1.234.901.100,00** | **611.045.000,00** | | | | | | | **1.068.420.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 235.000.000,00 | 489.645.000,00 | 479.573.000,00 | 244.573.000,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 609.120.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | - | 50 Dokumen | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 137.375.000,00 | 534.143.000,00 | 556.288.100,00 | 418.913.100,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 259.300.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.390.000,00 | 10.540.000,00 | 10.540.000,00 | 6.150.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 6.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS PILADANG** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | | | | - | - | **126.349.000.000,00** | **116.771.805.976,00** | **115.571.605.425,00** | **3.214.606.000,00** | | | | | | | **129.563.606.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 27.886.000.000,00 | 27.886.000.000,00 | 27.886.000.000,00 | 0,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 29.991.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 650.000.000,00 | 650.000.000,00 | 650.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 750.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2, | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | - | | | | - | - | **45.491.616.489,00** | **56.900.806.847,00** | **67.136.813.746,00** | **1.732.613.511,00** | | | | | | | **47.224.230.000,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 38.792.972.489,00 | 48.293.966.410,00 | 54.820.342.816,00 | 16.027.370.327,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 20.159.230.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 7 Orang | 7 Orang | 22.500.000,00 | 23.360.000,00 | 23.360.000,00 | 860.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 35.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 109 Orang | 109 Orang | 25.000.000,00 | 33.200.000,00 | 33.200.000,00 | 8.200.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 35.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | | | | 1 Orang | 1 Orang | 15.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | -7.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 13 Orang | 13 Orang | 13.500.000,00 | 24.800.000,00 | 24.800.000,00 | 11.300.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 105.000.000,00 | 103.075.000,00 | 103.075.000,00 | -1.925.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 150.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.825.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.825.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.500.000,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | -300.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 5.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 750.000,00 | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 | 5.050.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 880.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 111 Orang | 111 Orang | 9.750.000,00 | 3.730.000,00 | 3.730.000,00 | -6.020.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 10.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 55.000.000,00 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | -33.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 65.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 112.000.000,00 | 97.160.000,00 | 98.660.000,00 | -13.340.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 125.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | | | | 54 Orang | 54 Orang | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.960.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 450.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | -50.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 650.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.600.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 28.500.000,00 | 21.200.000,00 | 21.200.000,00 | -7.300.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3, | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | - | | | | - | - | **457.375.000,00** | **1.222.828.000,00** | **1.234.901.100,00** | **611.045.000,00** | | | | | | | **1.068.420.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 235.000.000,00 | 489.645.000,00 | 479.573.000,00 | 244.573.000,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 609.120.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 20.455.000,00 | 48.835.000,00 | 48.835.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 21.455.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 137.375.000,00 | 534.143.000,00 | 556.288.100,00 | 418.913.100,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 259.300.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.980.000,00 | 52.610.000,00 | 22.730.000,00 | 17.750.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 6.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS BATU HAMPAR** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | | | | - | - | **126.349.000.000,00** | **116.771.805.976,00** | **115.571.605.425,00** | **3.214.606.000,00** | | | | | | | **129.563.606.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 27.886.000.000,00 | 27.886.000.000,00 | 27.886.000.000,00 | 0,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 29.991.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 1.385.000.000,00 | 1.385.000.000,00 | 1.385.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 1.438.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2, | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | - | | | | - | - | **45.491.616.489,00** | **56.900.806.847,00** | **67.136.813.746,00** | **1.732.613.511,00** | | | | | | | **47.224.230.000,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 38.792.972.489,00 | 48.293.966.410,00 | 54.820.342.816,00 | 16.027.370.327,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 20.159.230.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 26 Orang | 26 Orang | 35.000.000,00 | 19.600.000,00 | 19.600.000,00 | -15.400.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 45.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 348 Orang | 348 Orang | 22.500.000,00 | 29.600.000,00 | 28.800.000,00 | 6.300.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | | | | 3 Orang | 3 Orang | 13.500.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | -1.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 48 Orang | 48 Orang | 9.000.000,00 | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | -600.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 125.000.000,00 | 151.875.000,00 | 152.475.000,00 | 27.475.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 135.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.700.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 97.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.350.000,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | -3.550.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 8.800.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.650.000,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 2.150.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 2.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 181 Orang | 181 Orang | 4.500.000,00 | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 4.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 5.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 75.000.000,00 | 20.800.000,00 | 20.800.000,00 | -54.200.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 85.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 80.000.000,00 | 98.171.000,00 | 98.171.000,00 | 18.171.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 98.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | | | | 87 Orang | 87 Orang | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 550.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.600.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 13.600.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.500.000,00 | 900.000,00 | 1.100.000,00 | -400.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 2.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 16.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -16.200.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 17.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 42.000.000,00 | 48.600.000,00 | 48.600.000,00 | 6.600.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 52.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3, | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | - | | | | - | - | **457.375.000,00** | **1.222.828.000,00** | **1.234.901.100,00** | **611.045.000,00** | | | | | | | **1.068.420.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 235.000.000,00 | 489.645.000,00 | 479.573.000,00 | 244.573.000,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | | 609.120.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 5.640.000,00 | 5.640.000,00 | 5.640.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | | 5.640.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 137.375.000,00 | 534.143.000,00 | 556.288.100,00 | 418.913.100,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | | 259.300.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.730.000,00 | 5.314.000,00 | 5.314.000,00 | -1.416.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS HALABAN** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | | | | - | - | **126.349.000.000,00** | **116.771.805.976,00** | **115.571.605.425,00** | **3.214.606.000,00** | | | | | | | **129.563.606.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 27.886.000.000,00 | 27.886.000.000,00 | 27.886.000.000,00 | 0,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | | 29.991.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 970.000.000,00 | 970.000.000,00 | 970.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | | 1.070.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2, | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | - | | | | - | - | **45.491.616.489,00** | **56.900.806.847,00** | **67.136.813.746,00** | **1.732.613.511,00** | | | | | | | **47.224.230.000,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 38.792.972.489,00 | 48.293.966.410,00 | 54.820.342.816,00 | 16.027.370.327,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | | 20.159.230.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 28 Orang | 28 Orang | 35.000.000,00 | 33.600.000,00 | 33.600.000,00 | -1.400.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 45.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 343 Orang | 343 Orang | 20.000.000,00 | 36.400.000,00 | 36.400.000,00 | 16.400.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | | | | 3 Orang | 3 Orang | 14.850.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | -6.850.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 51 Orang | 51 Orang | 25.000.000,00 | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | -15.400.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 120.000.000,00 | 117.565.000,00 | 117.565.000,00 | -2.435.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 135.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.250.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 18.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.800.000,00 | -7.200.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 19.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.200.000,00 | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 1.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 6.100.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 156 Orang | 156 Orang | 4.500.000,00 | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 200.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 5.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 55.000.000,00 | 22.200.000,00 | 23.400.000,00 | -31.600.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 65.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 90.000.000,00 | 94.015.000,00 | 94.015.000,00 | 4.015.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | | | | 75 Orang | 75 Orang | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | -450.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.375.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.375.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | -2.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 5.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 35.000.000,00 | 34.200.000,00 | 34.200.000,00 | -800.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 45.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3, | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | - | | | | - | - | **457.375.000,00** | **1.222.828.000,00** | **1.234.901.100,00** | **611.045.000,00** | | | | | | | **1.068.420.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 235.000.000,00 | 489.645.000,00 | 479.573.000,00 | 244.573.000,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 609.120.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 26.800.000,00 | 26.800.000,00 | 26.800.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Halaban | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 27.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 137.375.000,00 | 534.143.000,00 | 556.288.100,00 | 418.913.100,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 259.300.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.350.000,00 | 23.320.000,00 | 21.320.000,00 | 12.970.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS MUARO PAITI** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | | | | - | - | **126.349.000.000,00** | **116.771.805.976,00** | **115.571.605.425,00** | **3.214.606.000,00** | | | | | | | **129.563.606.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 27.886.000.000,00 | 27.886.000.000,00 | 27.886.000.000,00 | 0,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 29.991.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 1.350.000.000,00 | 1.350.000.000,00 | 1.350.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 1.450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2, | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | - | | | | - | - | **45.491.616.489,00** | **56.900.806.847,00** | **67.136.813.746,00** | **1.732.613.511,00** | | | | | | | **47.224.230.000,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 38.792.972.489,00 | 48.293.966.410,00 | 54.820.342.816,00 | 16.027.370.327,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 20.159.230.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 19 Orang | 19 Orang | 45.000.000,00 | 48.960.000,00 | 48.960.000,00 | 3.960.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 55.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 208 Orang | 208 Orang | 40.000.000,00 | 39.700.000,00 | 39.700.000,00 | -300.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | | | | 2 Orang | 2 Orang | 8.100.000,00 | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 1.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 9.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 35 Orang | 35 Orang | 37.200.000,00 | 24.600.000,00 | 24.600.000,00 | -12.600.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing "SAKATO UNGGUL" Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing "SAKATO UNGGUL" | | | 45.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | 115.265.000,00 | 115.265.000,00 | -34.735.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 160.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 23.400.000,00 | 23.400.000,00 | 0,00 | -23.400.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 19.200.000,00 | 19.200.000,00 | 19.200.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 25.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.800.000,00 | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | 5.400.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 8.800.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 181 Orang | 181 Orang | 25.000.000,00 | 12.540.000,00 | 12.540.000,00 | -12.460.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 35.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 55.000.000,00 | 31.200.000,00 | 31.200.000,00 | -23.800.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 65.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 105.000.000,00 | 121.256.000,00 | 121.256.000,00 | 16.256.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 115.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | | | | 87 Orang | 87 Orang | 1.209.000,00 | 1.209.000,00 | 0,00 | -1.209.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 11.140.000,00 | 11.140.000,00 | 0,00 | -11.140.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.440.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | -3.040.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 6.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | 0,00 | -14.400.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | 31.600.000,00 | 31.600.000,00 | 1.600.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 45.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3, | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | - | | | | - | - | **457.375.000,00** | **1.222.828.000,00** | **1.234.901.100,00** | **611.045.000,00** | | | | | | | **1.068.420.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 235.000.000,00 | 489.645.000,00 | 479.573.000,00 | 244.573.000,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 609.120.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 137.375.000,00 | 534.143.000,00 | 556.288.100,00 | 418.913.100,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 259.300.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.910.000,00 | 8.879.000,00 | 8.879.000,00 | 6.969.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 2.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS SIALANG** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | | | | - | - | **126.349.000.000,00** | **116.771.805.976,00** | **115.571.605.425,00** | **3.214.606.000,00** | | | | | | | **129.563.606.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 27.886.000.000,00 | 27.886.000.000,00 | 27.886.000.000,00 | 0,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 29.991.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 985.000.000,00 | 985.000.000,00 | 985.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 1.085.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2, | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | - | | | | - | - | **45.491.616.489,00** | **56.900.806.847,00** | **67.136.813.746,00** | **1.732.613.511,00** | | | | | | | **47.224.230.000,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 38.792.972.489,00 | 48.293.966.410,00 | 54.820.342.816,00 | 16.027.370.327,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 20.159.230.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 49 Orang | 49 Orang | 45.000.000,00 | 28.600.000,00 | 27.000.000,00 | -18.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 55.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 555 Orang | 555 Orang | 50.000.000,00 | 34.400.000,00 | 36.000.000,00 | -14.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 65.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | | | | 5 Orang | 5 Orang | 11.700.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | -6.900.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 12.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 91 Orang | 91 Orang | 41.400.000,00 | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | -34.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 45.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 165.000.000,00 | 188.931.000,00 | 188.931.000,00 | 23.931.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 175.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.100.000,00 | 8.100.000,00 | 0,00 | -8.100.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | -15.400.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 35.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.600.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | -3.800.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 7.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 138 Orang | 138 Orang | 4.500.000,00 | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 1.700.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 5.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 60.000.000,00 | 26.074.000,00 | 26.074.000,00 | -33.926.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 75.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 115.000.000,00 | 127.120.000,00 | 130.720.000,00 | 15.720.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 125.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | | | | 66 Orang | 66 Orang | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | -300.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | -12.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.409.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | -1.209.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 3.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | 0,00 | -14.400.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 32.000.000,00 | 20.600.000,00 | 20.600.000,00 | -11.400.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 45.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3, | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | - | | | | - | - | **457.375.000,00** | **1.222.828.000,00** | **1.234.901.100,00** | **611.045.000,00** | | | | | | | **1.068.420.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 235.000.000,00 | 489.645.000,00 | 479.573.000,00 | 244.573.000,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 609.120.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 42.750.000,00 | 39.150.000,00 | 39.150.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Durian Tinggi Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Sialang Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Galugua | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 137.375.000,00 | 534.143.000,00 | 556.288.100,00 | 418.913.100,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 259.300.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.910.000,00 | 17.025.000,00 | 17.025.000,00 | 14.115.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 3.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS KOTO BARU SMLG** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | | | | - | - | **126.349.000.000,00** | **116.771.805.976,00** | **115.571.605.425,00** | **3.214.606.000,00** | | | | | | | **129.563.606.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 27.886.000.000,00 | 27.886.000.000,00 | 27.886.000.000,00 | 0,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 29.991.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 2.333.000.000,00 | 2.333.000.000,00 | 2.333.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 2.400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2, | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | - | | | | - | - | **45.491.616.489,00** | **56.900.806.847,00** | **67.136.813.746,00** | **1.732.613.511,00** | | | | | | | **47.224.230.000,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 38.792.972.489,00 | 48.293.966.410,00 | 54.820.342.816,00 | 16.027.370.327,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 20.159.230.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 73 Orang | 73 Orang | 45.000.000,00 | 82.600.000,00 | 82.600.000,00 | 37.600.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 55.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 921 Orang | 921 Orang | 35.000.000,00 | 19.400.000,00 | 19.400.000,00 | -15.600.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 45.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | | | | 8 Orang | 8 Orang | 7.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | -6.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 8.650.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 137 Orang | 137 Orang | 8.250.000,00 | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | -2.650.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 9.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 125.000.000,00 | 129.564.000,00 | 129.564.000,00 | 4.564.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 135.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 14.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -14.400.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 16.650.000,00 | 17.000.000,00 | 17.800.000,00 | 1.150.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 17.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.600.000,00 | 9.150.000,00 | 9.150.000,00 | 5.550.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 4.300.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 376 Orang | 376 Orang | 16.800.000,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | -14.200.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 17.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 65.000.000,00 | 41.270.000,00 | 40.650.000,00 | -24.350.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 75.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 95.000.000,00 | 98.691.000,00 | 98.691.000,00 | 3.691.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 125.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 23.175.000,00 | 0,00 | 0,00 | -23.175.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.600.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | -3.400.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 5.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 16.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -16.200.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 17.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 35.000.000,00 | 19.470.000,00 | 19.400.000,00 | -15.600.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 45.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3, | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | - | | | | - | - | **457.375.000,00** | **1.222.828.000,00** | **1.234.901.100,00** | **611.045.000,00** | | | | | | | **1.068.420.000,00** | |
| | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 235.000.000,00 | 489.645.000,00 | 479.573.000,00 | 244.573.000,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 609.120.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 13.390.000,00 | 13.390.000,00 | 13.390.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 137.375.000,00 | 534.143.000,00 | 556.288.100,00 | 418.913.100,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 259.300.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.900.000,00 | 19.865.000,00 | 19.755.000,00 | 15.855.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 5.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS DANGUNG-DANGUNG** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | | | | - | - | **126.349.000.000,00** | **116.771.805.976,00** | **115.571.605.425,00** | **3.214.606.000,00** | | | | | | | **129.563.606.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 27.886.000.000,00 | 27.886.000.000,00 | 27.886.000.000,00 | 0,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 29.991.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 1.895.000.000,00 | 1.895.000.000,00 | 1.895.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 1.995.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2, | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | - | | | | - | - | **45.491.616.489,00** | **56.900.806.847,00** | **67.136.813.746,00** | **1.732.613.511,00** | | | | | | | **47.224.230.000,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 38.792.972.489,00 | 48.293.966.410,00 | 54.820.342.816,00 | 16.027.370.327,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 20.159.230.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 44 Orang | 44 Orang | 30.000.000,00 | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | 7.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 45.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 606 Orang | 606 Orang | 28.000.000,00 | 31.600.000,00 | 31.800.000,00 | 3.800.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | | | | 5 Orang | 5 Orang | 2.700.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 900.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 3.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 83 Orang | 83 Orang | 10.650.000,00 | 12.000.000,00 | 13.000.000,00 | 2.350.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 125.000.000,00 | 139.358.000,00 | 139.858.000,00 | 14.858.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 135.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.750.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 10.750.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 14.850.000,00 | 10.600.000,00 | 10.600.000,00 | -4.250.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 16.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.400.000,00 | 8.300.000,00 | 7.300.000,00 | 4.900.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 3.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 287 Orang | 287 Orang | 7.800.000,00 | 11.860.000,00 | 10.560.000,00 | 2.760.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 8.650.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 60.000.000,00 | 24.600.000,00 | 24.600.000,00 | -35.400.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 70.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 95.000.000,00 | 84.604.000,00 | 85.849.000,00 | -9.151.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 105.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | | | | 138 Orang | 138 Orang | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 2.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.980.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 14.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.750.000,00 | 2.100.000,00 | 2.700.000,00 | -4.050.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 7.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.400.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 6.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 29.700.000,00 | 23.200.000,00 | 23.200.000,00 | -6.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 35.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3, | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | - | | | | - | - | **457.375.000,00** | **1.222.828.000,00** | **1.234.901.100,00** | **611.045.000,00** | | | | | | | **1.068.420.000,00** | |
| | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 235.000.000,00 | 489.645.000,00 | 479.573.000,00 | 244.573.000,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 609.120.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 3.300.000,00 | 7.605.000,00 | 7.605.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 4.300.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 137.375.000,00 | 534.143.000,00 | 556.288.100,00 | 418.913.100,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 259.300.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.700.000,00 | 20.378.000,00 | 14.828.000,00 | 9.128.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 6.700.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS MUNGKA** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | | | | - | - | **126.349.000.000,00** | **116.771.805.976,00** | **115.571.605.425,00** | **3.214.606.000,00** | | | | | | | **129.563.606.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 27.886.000.000,00 | 27.886.000.000,00 | 27.886.000.000,00 | 0,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 29.991.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 1.885.000.000,00 | 1.885.000.000,00 | 1.885.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 1.988.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2, | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | - | | | | - | - | **45.491.616.489,00** | **56.900.806.847,00** | **67.136.813.746,00** | **1.732.613.511,00** | | | | | | | **47.224.230.000,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 38.792.972.489,00 | 48.293.966.410,00 | 54.820.342.816,00 | 16.027.370.327,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 20.159.230.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 51 Orang | 51 Orang | 40.000.000,00 | 61.250.000,00 | 61.250.000,00 | 21.250.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 632 Orang | 632 Orang | 35.000.000,00 | 24.830.000,00 | 24.830.000,00 | -10.170.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 45.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | | | | 5 Orang | 5 Orang | 9.900.000,00 | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | -3.300.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 12.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 97 Orang | 97 Orang | 20.000.000,00 | 20.603.000,00 | 20.613.000,00 | 613.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 130.000.000,00 | 121.750.000,00 | 121.750.000,00 | -8.250.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 140.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.525.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.525.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 17.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | 7.100.000,00 | 6.200.000,00 | -13.800.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.100.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 4.900.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 6.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 291 Orang | 291 Orang | 11.400.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | -3.400.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 12.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 60.000.000,00 | 48.175.000,00 | 49.100.000,00 | -10.900.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 75.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 95.000.000,00 | 88.372.000,00 | 83.872.000,00 | -11.128.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 105.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | | | | 140 Orang | 140 Orang | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.250.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.250.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | -1.050.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 5.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 18.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -18.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | -15.400.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3, | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | - | | | | - | - | **457.375.000,00** | **1.222.828.000,00** | **1.234.901.100,00** | **611.045.000,00** | | | | | | | **1.068.420.000,00** | |
| | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 235.000.000,00 | 489.645.000,00 | 479.573.000,00 | 244.573.000,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 609.120.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 6.000.000,00 | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 137.375.000,00 | 534.143.000,00 | 556.288.100,00 | 418.913.100,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 259.300.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.380.000,00 | 21.520.000,00 | 21.485.000,00 | 12.105.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 12.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS PADANG KANDIS** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | | | | - | - | **126.349.000.000,00** | **116.771.805.976,00** | **115.571.605.425,00** | **3.214.606.000,00** | | | | | | | **129.563.606.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 27.886.000.000,00 | 27.886.000.000,00 | 27.886.000.000,00 | 0,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 29.991.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 590.000.000,00 | 590.000.000,00 | 590.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 690.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2, | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | - | | | | - | - | **45.491.616.489,00** | **56.900.806.847,00** | **67.136.813.746,00** | **1.732.613.511,00** | | | | | | | **47.224.230.000,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 38.792.972.489,00 | 48.293.966.410,00 | 54.820.342.816,00 | 16.027.370.327,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 20.159.230.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 15 Orang | 15 Orang | 19.350.000,00 | 19.600.000,00 | 19.600.000,00 | 250.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 22.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 177 Orang | 177 Orang | 65.000.000,00 | 36.800.000,00 | 28.800.000,00 | -36.200.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 75.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | | | | 2 Orang | 2 Orang | 4.500.000,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 2.700.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 5.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 28 Orang | 28 Orang | 27.600.000,00 | 3.050.000,00 | 3.000.000,00 | -24.600.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 105.000.000,00 | 92.778.000,00 | 92.278.000,00 | -12.722.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 125.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.300.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.725.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 3.275.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 5.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.125.000,00 | 5.300.000,00 | 5.400.000,00 | 4.275.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 1.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 106 Orang | 106 Orang | 5.100.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 1.900.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 6.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 35.000.000,00 | 15.700.000,00 | 14.750.000,00 | -20.250.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 45.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 95.000.000,00 | 120.120.000,00 | 122.070.000,00 | 27.070.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 105.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.200.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.050.000,00 | 1.000.000,00 | 600.000,00 | -450.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 1.550.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.600.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | 26.800.000,00 | 37.200.000,00 | 12.200.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3, | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | - | | | | - | - | **457.375.000,00** | **1.222.828.000,00** | **1.234.901.100,00** | **611.045.000,00** | | | | | | | **1.068.420.000,00** | |
| | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 235.000.000,00 | 489.645.000,00 | 479.573.000,00 | 244.573.000,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 609.120.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | - | 35 Dokumen | 0,00 | 9.775.000,00 | 7.250.000,00 | 7.250.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, VII Koto Talago | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 12.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 137.375.000,00 | 534.143.000,00 | 556.288.100,00 | 418.913.100,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 259.300.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.345.000,00 | 9.877.000,00 | 9.852.000,00 | 2.507.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 8.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS KOTO TINGGI** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | | | | - | - | **126.349.000.000,00** | **116.771.805.976,00** | **115.571.605.425,00** | **3.214.606.000,00** | | | | | | | **129.563.606.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 27.886.000.000,00 | 27.886.000.000,00 | 27.886.000.000,00 | 0,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 29.991.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 920.000.000,00 | 920.000.000,00 | 920.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 970.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2, | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | - | | | | - | - | **45.491.616.489,00** | **56.900.806.847,00** | **67.136.813.746,00** | **1.732.613.511,00** | | | | | | | **47.224.230.000,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 38.792.972.489,00 | 48.293.966.410,00 | 54.820.342.816,00 | 16.027.370.327,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 20.159.230.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 21 Orang | 21 Orang | 45.000.000,00 | 55.200.000,00 | 55.200.000,00 | 10.200.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 290 Orang | 290 Orang | 28.500.000,00 | 28.200.000,00 | 28.200.000,00 | -300.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | | | | 2 Orang | 2 Orang | 9.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | -3.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 38 Orang | 38 Orang | 7.650.000,00 | 10.400.000,00 | 10.400.000,00 | 2.750.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 9.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 115.000.000,00 | 98.056.000,00 | 98.056.000,00 | -16.944.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 125.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.450.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | -1.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.100.000,00 | 11.817.000,00 | 11.817.000,00 | 9.717.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 3.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 144 Orang | 144 Orang | 9.300.000,00 | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | -1.600.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 42.000.000,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | -26.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 105.000.000,00 | 117.857.000,00 | 117.257.000,00 | 12.257.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 115.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | | | | 69 Orang | 69 Orang | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | -750.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.200.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 750.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 50.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 1.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 35.000.000,00 | 46.200.000,00 | 46.200.000,00 | 11.200.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 45.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3, | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | - | | | | - | - | **457.375.000,00** | **1.222.828.000,00** | **1.234.901.100,00** | **611.045.000,00** | | | | | | | **1.068.420.000,00** | |
| | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 235.000.000,00 | 489.645.000,00 | 479.573.000,00 | 244.573.000,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 609.120.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 14.530.000,00 | 14.530.000,00 | 14.530.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 137.375.000,00 | 534.143.000,00 | 556.288.100,00 | 418.913.100,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 259.300.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.545.000,00 | 23.240.000,00 | 23.840.000,00 | 20.295.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 5.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS MAEK** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | | | | - | - | **126.349.000.000,00** | **116.771.805.976,00** | **115.571.605.425,00** | **3.214.606.000,00** | | | | | | | **129.563.606.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 27.886.000.000,00 | 27.886.000.000,00 | 27.886.000.000,00 | 0,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 29.991.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 813.000.000,00 | 813.000.000,00 | 813.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 913.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2, | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | - | | | | - | - | **45.491.616.489,00** | **56.900.806.847,00** | **67.136.813.746,00** | **1.732.613.511,00** | | | | | | | **47.224.230.000,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 38.792.972.489,00 | 48.293.966.410,00 | 54.820.342.816,00 | 16.027.370.327,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 20.159.230.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 4 Orang | 4 Orang | 28.800.000,00 | 31.840.000,00 | 31.840.000,00 | 3.040.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 44 Orang | 44 Orang | 30.000.000,00 | 31.800.000,00 | 30.200.000,00 | 200.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 35.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | | | | 1 Orang | 1 Orang | 21.600.000,00 | 13.800.000,00 | 15.000.000,00 | -6.600.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 25.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 8 Orang | 8 Orang | 21.900.000,00 | 17.800.000,00 | 17.800.000,00 | -4.100.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 25.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 120.000.000,00 | 119.534.000,00 | 119.934.000,00 | -66.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 135.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.700.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.200.000,00 | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | -3.600.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 600.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.200.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 800.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 104 Orang | 104 Orang | 9.900.000,00 | 3.960.000,00 | 3.960.000,00 | -5.940.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 12.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 35.000.000,00 | 26.800.000,00 | 27.100.000,00 | -7.900.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 45.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 120.000.000,00 | 83.266.000,00 | 85.066.000,00 | -34.934.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 125.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | | | | 50 Orang | 50 Orang | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.138.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | -1.938.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 5.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 32.500.000,00 | 27.200.000,00 | 27.200.000,00 | -5.300.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 35.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3, | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | - | | | | - | - | **457.375.000,00** | **1.222.828.000,00** | **1.234.901.100,00** | **611.045.000,00** | | | | | | | **1.068.420.000,00** | |
| | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 235.000.000,00 | 489.645.000,00 | 479.573.000,00 | 244.573.000,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 609.120.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | - | 3 Dokumen | 0,00 | 1.200.000,00 | 4.890.000,00 | 4.890.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 1.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 137.375.000,00 | 534.143.000,00 | 556.288.100,00 | 418.913.100,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 259.300.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.950.000,00 | 19.200.000,00 | 13.410.000,00 | 5.460.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 8.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS GUNUNG MALINTANG** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **173.529.009.489,00** | **176.871.587.823,00** | **185.919.067.271,00** | **12.390.057.782,00** | | | | | | | **179.416.256.000,00** | |
| 1, | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | | | | - | - | **126.349.000.000,00** | **116.771.805.976,00** | **115.571.605.425,00** | **3.214.606.000,00** | | | | | | | **129.563.606.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 27.886.000.000,00 | 27.886.000.000,00 | 27.886.000.000,00 | 0,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 29.991.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 570.000.000,00 | 570.000.000,00 | 570.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 620.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2, | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | - | | | | - | - | **45.491.616.489,00** | **56.900.806.847,00** | **67.136.813.746,00** | **1.732.613.511,00** | | | | | | | **47.224.230.000,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 38.792.972.489,00 | 48.293.966.410,00 | 54.820.342.816,00 | 16.027.370.327,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 20.159.230.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 16 Orang | 16 Orang | 26.400.000,00 | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 1.600.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 205 Orang | 205 Orang | 35.000.000,00 | 45.200.000,00 | 44.800.000,00 | 9.800.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 40.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | | | | 2 Orang | 2 Orang | 18.025.000,00 | 24.000.000,00 | 22.800.000,00 | 4.775.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 30 Orang | 30 Orang | 20.000.000,00 | 15.800.000,00 | 19.600.000,00 | -400.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 25.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 110.300.000,00 | 76.225.000,00 | 73.225.000,00 | -37.075.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 125.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 13.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.800.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.200.000,00 | 11.200.000,00 | 8.000.000,00 | 800.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 9.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 500.000,00 | 6.600.000,00 | 6.700.000,00 | 6.200.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 1.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 76 Orang | 76 Orang | 7.500.000,00 | 1.440.000,00 | 6.060.000,00 | -1.440.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 55.000.000,00 | 32.643.000,00 | 24.743.000,00 | -30.257.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 105.000.000,00 | 94.720.000,00 | 94.720.000,00 | -10.280.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 115.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | | | | 37 Orang | 37 Orang | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 55.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 946.000,00 | 622.000,00 | 602.000,00 | -344.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 1.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 24.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -24.300.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 34.800.000,00 | 39.800.000,00 | 47.000.000,00 | 12.200.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 40.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3, | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | - | | | | - | - | **457.375.000,00** | **1.222.828.000,00** | **1.234.901.100,00** | **611.045.000,00** | | | | | | | **1.068.420.000,00** | |
| | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 235.000.000,00 | 489.645.000,00 | 479.573.000,00 | 244.573.000,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 609.120.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 13.500.000,00 | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Gunuang Malintang | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 137.375.000,00 | 534.143.000,00 | 556.288.100,00 | 418.913.100,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | | 259.300.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.850.000,00 | 26.250.000,00 | 24.150.000,00 | 16.300.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | | 9.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | **74.015.079.334,00** | **35.928.682.218,00** | **113.285.747.137,00** | **39.270.667.803,00** | | | | | | | **97.420.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **73.915.079.334,00** | **35.878.682.218,00** | **113.235.747.137,00** | **39.320.667.803,00** | | | | | | | **97.270.000.000,00** | |
| | **1.03** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | **73.915.079.334,00** | **35.878.682.218,00** | **113.235.747.137,00** | **39.320.667.803,00** | | | | | | | **97.270.000.000,00** | |
| 1, | **1.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | **-** | **100 %** | **12.256.579.334,00** | **13.120.132.153,00** | **16.844.273.567,00** | **-1.086.579.334,00** | | | | | | | **11.170.000.000,00** | |
| | | **[ Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintah ]** | - | - | - | - | - | - | **12.256.579.334,00** | **13.120.132.153,00** | **16.844.273.567,00** | - | - | - | - | - | - | - | **11.170.000.000,00** | - |
| | 1.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | | | | - | 100 % | 20.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | -14.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | Dinas PUPR | | 30.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 10.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | -7.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 15.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | -7.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 15.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan laporan OPD | | | | - | 100 % | 9.733.579.334,00 | 9.630.839.903,00 | 9.136.981.317,00 | -596.598.017,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | Dinas PUPR | | 10.015.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 100 Orang/ bulan | 100 Orang/ bulan | 9.723.579.334,00 | 9.630.839.903,00 | 9.136.981.317,00 | -586.598.017,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 10.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 0 Laporan | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 15.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) | | | | - | 100 % | 153.000.000,00 | 111.000.000,00 | 111.000.000,00 | -42.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | Dinas PUPR | | 255.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | -3.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 0 Paket | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 30.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | -10.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 20.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | -13.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 4 Dokumen | 1 Dokumen | 13.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | -1.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | -10.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50.000.000,00 | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 15.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | - | 100 % | 600.000.000,00 | 750.000.000,00 | 940.435.000,00 | 340.435.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | Din as PU PR | | 100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 3 Unit | 3 Unit | 600.000.000,00 | 750.000.000,00 | 940.435.000,00 | 340.435.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | | | | - | 100 % | 1.040.000.000,00 | 198.000.000,00 | 198.000.000,00 | -842.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | Din as PU PR | | 320.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 1 Laporan | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 80.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | -5.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 40.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 0 Laporan | 945.000.000,00 | 108.000.000,00 | 108.000.000,00 | -837.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | | | | - | 100 % | 710.000.000,00 | 2.424.292.250,00 | 6.451.857.250,00 | 5.741.857.250,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | Dinas PU PR | | 450.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 10 Unit | 20 Unit | 70.000.000,00 | 104.380.000,00 | 104.380.000,00 | 34.380.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09.0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | | | | 9 Unit | 9 Unit | 125.000.000,00 | 2.314.912.250,00 | 6.164.912.250,00 | 6.039.912.250,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 11 Unit | 11 Unit | 75.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | -70.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 440.000.000,00 | 0,00 | 177.565.000,00 | -262.435.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 50.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 2, | **1.03.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | **Persentase peningkatan perlindungan kawasan permikiman rawan banjir Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik** | | | | - | **41,36 51 % %** | **8.300.000.000,00** | **300.000.000,00** | **9.209.907.000,00** | **-8.300.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | **[ Persentase Luas Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik ]** | - | - | - | - | - | - | **8.300.000.000,00** | **300.000.000,00** | **9.209.907.000,00** | - | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 1.03.02.2.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase jaringan irigasi yang terkelola | | | | - | 51 % | 1.881.000.000,00 | 0,00 | 4.267.145.000,00 | 2.386.145.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT" Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT" | Masyarakat | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.01.0093 | Normalisasi/Restorasi Sungai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi | | | | 1 KM | 0,095 KM | 1.500.000.000,00 | 0,00 | 4.267.145.000,00 | 2.767.145.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT" Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT" | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.01.0120 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun | | | | 2 Dokumen | 0 Dokumen | 178.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -178.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.01.0121 | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun | | | | 1 Unit | 0 Unit | 203.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -203.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | - | - | - | - | - | - | - | **8.300.000.000,00** | **300.000.000,00** | **9.209.907.000,00** | - | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 1.03.02.2.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase jaringan irigasi yang terkelola | | | | - | 51 % | 6.419.000.000,00 | 300.000.000,00 | 4.942.762.000,00 | -1.476.238.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | M a s y a - a k a - | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.02.0008 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan | | | | 0.778 KM | 0.778 KM | 1.111.234.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.111.234.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | | | | 3.469 KM | 3.469 KM | 4.293.315.900,00 | 0,00 | 4.642.762.000,00 | 349.446.100,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.02.0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara | | | | 0.367 KM | 0.367 KM | 532.731.000,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | -232.731.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.02.0030 | Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya | | | | 5 Lembaga | 0 Lembaga | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.02.0050 | Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 231.719.100,00 | 0,00 | 0,00 | -231.719.100,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 3, | **1.03.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR** | **Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Akses Air Minum** | | | | - | **65 %** | **2.450.000.000,00** | **2.550.000.000,00** | **3.097.350.000,00** | **1.050.000.000,00** | | | | | | | **3.500.000.000,00** | |
| | 1.03.03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Akses Air Minum | | | | - | 350 KK | 2.450.000.000,00 | 2.550.000.000,00 | 3.097.350.000,00 | 647.350.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | M a s y a r a k a t | | 3.500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.03.2.01.0032 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | 100 SR | 100 SR | 2.450.000.000,00 | 2.550.000.000,00 | 3.097.350.000,00 | 647.350.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 3.500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 4, | **1.03.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL** | **Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST/TPS3R** | | | | - | **3,29 %** | **1.200.000.000,00** | **1.125.000.000,00** | **1.125.000.000,00** | **-1.100.000.000,00** | | | | | | | **100.000.000,00** | |
| | 1.03.04.2.01 | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sampah yang terkelola | | | | - | 200 Ton | 1.200.000.000,00 | 1.125.000.000,00 | 1.125.000.000,00 | -75.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | M a s y a r a k a t | | 100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.04.2.01.0020 | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun | | | | 10 Ton/hari | 10 Ton/hari | 1.200.000.000,00 | 1.125.000.000,00 | 1.125.000.000,00 | -75.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 5, | **1.03.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | **Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)** | | | | - | **68 %** | **5.000.000.000,00** | **1.725.000.000,00** | **1.725.000.000,00** | **-2.000.000.000,00** | | | | | | | **3.000.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.03.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) | | | | - | 6100 KK | 5.000.000.000,00 | 1.725.000.000,00 | 1.725.000.000,00 | -3.275.000.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | Masyarakat | | 3.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.05.2.01.0022 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun | | | | 20 $M^3$/Hari | 20 $M^3$/Hari | 2.500.000.000,00 | 1.725.000.000,00 | 1.725.000.000,00 | -775.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 3.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.05.2.01.0036 | Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun | | | | 1 $M^3$/Hari | 1 $M^3$/Hari | 2.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT" Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT" | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 6, | **1.03.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | **Persentase cakupan Drainase dalam kondisi baik (%)** | | | | - | **45 persen** | **2.000.000.000,00** | **0,00** | **1.190.000.000,00** | **4.000.000.000,00** | | | | | | | **6.000.000.000,00** | |
| | 1.03.06.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Panjang saluran drainase primer yg terbangun | | | | - | 200 m | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 1.190.000.000,00 | -810.000.000,00 | | | - | - - | Masyarakat | | 6.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.06.2.01.0029 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun | | | | 10 Sistem Drainase Perkotaan | 10 Sistem Drainase Perkotaan | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 595.000.000,00 | -405.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 3.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.06.2.01.0029 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7, | **1.03.08** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | **Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik** | | | | - | **80 %** | **1.350.000.000,00** | **1.300.000.000,00** | **1.500.000.000,00** | **1.400.000.000,00** | | | | | | | **2.750.000.000,00** | |
| | 1.03.08.2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Jumlah Bangunan Gedung dalam kondisi baik | | | | - | 34 Unit | 1.350.000.000,00 | 1.300.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 150.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | Masyarakat | | 2.750.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.08.2.01.0021 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.100.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | 100.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 2.500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.08.2.01.0023 | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | | | | 250 Dokumen | 250 Dokumen | 250.000.000,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 50.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 250.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 8, | **1.03.10** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | **Tingkat Kemantapan Jalan** | | | | - | **59 %** | **39.058.500.000,00** | **15.108.550.065,00** | **77.894.216.570,00** | **28.741.500.000,00** | | | | | | | **67.800.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.03.10.2.01 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Mantap | | | | - | 649,71 KM | 39.058.500.000,00 | 15.108.550.065,00 | 77.894.216.570,00 | 38.835.716.570,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 67.800.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0029 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun | | | | 5 Dokumen | 8 Dokumen | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 600.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0051 | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin | | | | 150 KM | 150 KM | 3.000.000.000,00 | 9.436.470.065,00 | 2.336.470.065,00 | -663.529.935,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN PKB | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 3.500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0053 | Pembangunan Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan | | | | 5 KM | 5 KM | 1.500.000.000,00 | 1.290.000.000,00 | 1.290.000.000,00 | -210.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 1.700.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0056 | Pemeliharaan Berkala Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala | | | | 7 KM | 0,6 KM | 14.058.500.000,00 | 0,00 | 1.822.080.000,00 | -12.236.420.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DBH SAWIT DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 18.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0057 | Penggantian Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian | | | | 30 Meter | 30 Meter | 5.000.000.000,00 | 1.570.000.000,00 | 6.870.000.000,00 | 1.870.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 9.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0059 | Rekonstruksi Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Jalan yang Direkonstruksi | | | | 5 KM | 5 KM | 15.000.000.000,00 | 2.312.080.000,00 | 65.075.666.505,00 | 50.075.666.505,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABU PATEN/KOTA | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 35.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 9, | **1.03.11** | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | **Persentase Tanaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil** | | | | - | **7 %** | **400.000.000,00** | **200.000.000,00** | **200.000.000,00** | **-400.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.03.11.2.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah Sertifikat keahlian yang diterbitkan (sertifikat) | | | | - | 75 Sertifikat | 339.037.000,00 | 168.449.000,00 | 168.449.000,00 | -170.588.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | Tenaga Kerja Konstruksi | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.01.0010 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi | | | | 60 Orang | 60 Orang | 289.588.500,00 | 132.039.000,00 | 132.039.000,00 | -157.549.500,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.01.0011 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | 25 Lembaga | 25 Lembaga | 49.448.500,00 | 36.410.000,00 | 36.410.000,00 | -13.038.500,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.03.11.2.04 | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Persentase Monitoring dan evaluasi kegiatan Jasa Konstruksi (%) | | | | - | 50 % | 60.963.000,00 | 31.551.000,00 | 31.551.000,00 | -29.412.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | Proyek Konstruksi | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.04.0004 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan | | | | 15 Paket Pekerjaan | 15 Paket Pekerjaan | 60.963.000,00 | 31.551.000,00 | 31.551.000,00 | -29.412.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 10, | **1.03.12** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | **Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemamfaatan Ruang di Daerah** | | | | - | **100 %** | **1.900.000.000,00** | **450.000.000,00** | **450.000.000,00** | **1.050.000.000,00** | | | | | | | **2.950.000.000,00** | |
| | 1.03.12.2.01 | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | Jumlah Perbup RDTR Yang ditetapkan | | | | - | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | 375.000.000,00 | 375.000.000,00 | 175.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | Masyarakat | | 400.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.01.0006 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | 375.000.000,00 | 375.000.000,00 | 175.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 400.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 1.600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.600.000.000,00 | | | - | - - | - | | 2.400.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.02.0005 | Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1.600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.600.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 2.400.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pemanfaatan tata ruang yang telah sesuai Jumlah perencanaan tata ruang yang telah ada (dokumen) | | | | 20 Lokasi | 20 Lokasi<br>3 Dokumen | 100.000.000,00 | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | -25.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | Masyarakat | | 150.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.03.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100.000.000,00 | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | -25.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 150.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **100.000.000,00** | **50.000.000,00** | **50.000.000,00** | **-50.000.000,00** | | | | | | | **150.000.000,00** | |
| | **2.10** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | | | | **100.000.000,00** | **50.000.000,00** | **50.000.000,00** | **-50.000.000,00** | | | | | | | **150.000.000,00** | |
| 1, | **2.10.04** | **PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN** | **Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi** | | | | - | **10 %** | **100.000.000,00** | **50.000.000,00** | **50.000.000,00** | **50.000.000,00** | | | | | | | **150.000.000,00** | |
| | 2.10.04.2.01 | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Berita acara Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | | | | - | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | -50.000.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | - - | Masyarakat | | 150.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 2.10.04.2.01.0004 | Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | 100.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | -50.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | - - | | | 150.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | **DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN** | | | | | | | **8.373.529.226,00** | **8.901.120.274,00** | **14.117.896.796,00** | **5.744.367.570,00** | | | | | | | **16.472.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **8.373.529.226,00** | **8.901.120.274,00** | **14.117.896.796,00** | **5.744.367.570,00** | | | | | | | **16.472.000.000,00** | |
| | **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN** | | | | | | | **8.373.529.226,00** | **8.901.120.274,00** | **14.117.896.796,00** | **5.744.367.570,00** | | | | | | | **16.472.000.000,00** | |
| 1, | **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | | | | - | - | **5.644.929.226,00** | **8.024.120.274,00** | **7.740.896.796,00** | **3.547.070.774,00** | | | | | | | **9.192.000.000,00** | |
| | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 5.221.429.226,00 | 7.707.220.274,00 | 7.423.996.796,00 | 2.202.567.570,00 | | | - | - - | - | | 8.395.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 69 Orang/b ulan | 69 Orang/b ulan | 5.203.429.226,00 | 7.686.020.274,00 | 7.402.796.796,00 | 2.199.367.570,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 8.300.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 8.000.000,00 | 14.100.000,00 | 14.100.000,00 | 6.100.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 60.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 10.000.000,00 | 7.100.000,00 | 7.100.000,00 | -2.900.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 35.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 105.500.000,00 | 100.400.001,00 | 100.400.001,00 | -5.099.999,00 | | | - | - | - | | 410.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 9 Paket | 9 Paket | 10.000.000,00 | 22.917.001,00 | 22.917.001,00 | 12.917.001,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | - | | 72.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 9 Paket | 9 Paket | 30.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 72.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 9 Paket | 9 Paket | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 72.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 14 Paket | 14 Paket | 20.000.000,00 | 17.064.000,00 | 17.064.000,00 | -2.936.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 70.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 5 Paket | 5 Paket | 6.000.000,00 | 7.501.000,00 | 7.501.000,00 | 1.501.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 35.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 20.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 5 Paket | 5 Paket | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 8.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 36.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 15.000.000,00 | 36.918.000,00 | 36.918.000,00 | 21.918.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 25.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | | | - | - | - | | 55.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 2 Unit | 2 Unit | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 15.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 30.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 10.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 174.000.000,91 | 113.700.000,00 | 113.700.000,00 | -60.300.000,91 | | | - | - | - | | 182.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 4.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 12.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 70.000.000,00 | 69.700.000,00 | 69.700.000,00 | -300.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 70.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 100.000.000,91 | 39.000.000,00 | 39.000.000,00 | -61.000.000,91 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 133.999.999,09 | 102.799.999,00 | 102.799.999,00 | -31.200.000,09 | | | - | - | - | | 150.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 21 Unit | 21 Unit | 115.000.000,00 | 89.800.000,00 | 89.800.000,00 | -25.200.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 115.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 20 Unit | 20 Unit | 12.999.999,09 | 12.999.999,00 | 12.999.999,00 | -0,09 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 20.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 15.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 2, | **1.05.04** | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | - | | | | - | - | **2.728.600.000,00** | **877.000.000,00** | **6.377.000.000,00** | **4.551.400.000,00** | | | | | | | **7.280.000.000,00** | |
| | 1.05.04.2.01 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 2.660.000.000,00 | 785.320.000,00 | 6.285.320.000,00 | 3.625.320.000,00 | | | - | - | - | | 6.135.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.01.0001 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 250.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.01.0002 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.600.000.000,00 | 390.000.000,00 | 390.000.000,00 | -1.210.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.000.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.05.04.2.01.0003 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 110.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.01.0004 | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | -800.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.01.0005 | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 500.000.000,00 | 378.700.000,00 | 378.700.000,00 | -121.300.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 600.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.01.0007 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran | | | | 500 Orang | 500 Orang | 33.000.000,00 | 15.420.000,00 | 15.420.000,00 | -17.580.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 375.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.01.0008 | Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya | | | | 13 Desa/Ke lurahan | 13 Desa/Ke lurahan | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.01.0017 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait | | | | 1 Unit | 1 Unit | 500.000.000,00 | 0,00 | 5.500.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.500.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.01.0019 | Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga | | | | 50 Keluarga | 50 Keluarga | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.02 | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | - | | | | - | - | 4.000.000,00 | 5.050.000,00 | 5.050.000,00 | 1.050.000,00 | | | - | - | - | | 200.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.02.0001 | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | 5.050.000,00 | 5.050.000,00 | 3.050.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.02.0002 | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.03 | Investigasi Kejadian Kebakaran | - | | | | - | - | 4.600.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | -2.200.000,00 | | | - | - | - | | 70.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.03.0001 | Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.600.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | -2.200.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 70.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.04 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | - | | | | - | - | 54.000.000,00 | 82.530.000,00 | 82.530.000,00 | 28.530.000,00 | | | - | - | - | | 650.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.04.0001 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya | | | | 500 Orang | 500 Orang | 50.000.000,00 | 82.530.000,00 | 82.530.000,00 | 32.530.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.04.0002 | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap | | | | 13 Desa/Ke lurahan | 13 Desa/Ke lurahan | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.04.0005 | Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit yang diberikan untuk mendukung Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran | | | | 1 Unit | 1 Unit | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 300.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.05 | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia | - | | | | - | - | 6.000.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | -4.300.000,00 | | | - | - | - | | 225.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.05.0001 | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.000.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | -2.300.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 75.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.05.0004 | Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA** | | | | | | | **7.570.486.511,00** | **8.585.322.609,00** | **9.088.048.116,00** | **1.517.561.605,00** | | | | | | | **15.752.859.967,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **7.570.486.511,00** | **8.585.322.609,00** | **9.088.048.116,00** | **1.517.561.605,00** | | | | | | | **15.752.859.967,00** | |
| | **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN** | | | | | | | **7.570.486.511,00** | **8.585.322.609,00** | **9.088.048.116,00** | **1.517.561.605,00** | | | | | | | **15.752.859.967,00** | |
| 1, | **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai AKIP Satpol PP** | | | | **-** | **77,75 %** | **6.209.845.447,00** | **7.832.267.589,00** | **7.470.173.096,00** | **1.752.304.801,00** | | | | | | | **7.962.150.248,00** | |
| | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 20 % | 100 % | 15.000.000,00 | 14.284.000,00 | 14.284.000,00 | -716.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Perangkat Daerah | | 57.264.747,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 4 Dokumen | 16 Dokumen | 15.000.000,00 | 14.284.000,00 | 14.284.000,00 | -716.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 57.264.747,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | - | 100 % | 5.918.353.247,00 | 7.359.825.589,00 | 6.997.731.096,00 | 1.079.377.849,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Perangkat Daerah | | 6.948.567.987,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 76 Orang/b ulan | 129 Orang/ bulan | 5.912.093.247,00 | 7.353.760.589,00 | 6.991.666.096,00 | 1.079.572.849,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 6.913.587.862,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 18 Laporan | 18 Laporan | 6.260.000,00 | 6.065.000,00 | 6.065.000,00 | -195.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 34.980.125,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase pelayananAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | - | 100 % | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Perangkat Daerah | | 25.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 25.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan barang dan persediaan dan jasa perkantoran | | | | - | 100 % | 135.972.200,00 | 116.601.000,00 | 116.601.000,00 | -19.371.200,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Perangkat Daerah | | 499.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 4 Paket | 1.804.000,00 | 1.995.000,00 | 1.995.000,00 | 191.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 7.500.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 3 Paket | 33.108.000,00 | 0,00 | 0,00 | -33.108.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 47.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 4 Paket | 23.999.700,00 | 15.601.100,00 | 15.601.100,00 | -8.398.600,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 15.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 5 Paket | 5 Paket | 10.558.800,00 | 9.006.600,00 | 9.006.600,00 | -1.552.200,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 13.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.200.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 13.500.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 60 Laporan | 9 Laporan | 62.301.700,00 | 89.998.300,00 | 89.998.300,00 | 27.696.600,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 403.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 12.100.000,00 | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 | -600.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Perangkat Daerah | | 83.700.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 8.700.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 75.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | - | 100 % | 123.420.000,00 | 330.057.000,00 | 330.057.000,00 | 206.637.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Perangkat Daerah | | 348.617.514,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 9 Unit | 9 Unit | 120.450.000,00 | 271.630.000,00 | 271.630.000,00 | 151.180.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 328.817.514,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 6 Unit | 6 Unit | 2.970.000,00 | 58.427.000,00 | 58.427.000,00 | 55.457.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 19.800.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 2, | **1.05.02** | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase penyelenggaraan Trantibumlinmas** | | | | - | **60 77 Orang %** | **1.360.641.064,00** | **753.055.020,00** | **1.617.875.020,00** | **6.430.068.655,00** | | | | | | | **7.790.709.719,00** | |
| | 1.05.02.2.01 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada Jumlah Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas Jumlah standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Persentase Penyelenggaraan Tibumtramas | | | | 100 % | 100 % 1 Dokumen 20 Orang 4 Unit | 1.289.746.564,00 | 533.001.900,00 | 1.397.821.900,00 | 108.075.336,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | Perangkat Daerah | | 6.461.537.656,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | | | | 36 Dokumen | 30 Dokumen | 36.490.000,00 | 52.046.000,00 | 52.046.000,00 | 15.556.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 183.645.656,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0004 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 30 Dokumen | 30 Dokumen | 21.835.500,00 | 52.427.800,00 | 52.427.800,00 | 30.592.300,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 612.152.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0008 | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 32.491.600,00 | 53.512.300,00 | 53.512.300,00 | 21.020.700,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 1.650.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0010 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja | | | | 136 Orang | 136 Orang | 1.086.301.064,00 | 69.101.000,00 | 69.101.000,00 | -1.017.200.064,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 1.800.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0015 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | | | | 22 laporan | 22 laporan | 49.991.100,00 | 103.581.100,00 | 103.581.100,00 | 53.590.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 450.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0016 | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | | | | 22 Laporan | 22 Laporan | 39.995.300,00 | 151.000.000,00 | 151.000.000,00 | 111.004.700,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 450.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0017 | Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani | | | | 30 Laporan | 30 Laporan | 12.655.000,00 | 32.664.600,00 | 32.664.600,00 | 20.009.600,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 115.740.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0018 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia | | | | 10 Unit | 37 Unit | 9.987.000,00 | 18.669.100,00 | 883.489.100,00 | 873.502.100,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 1.200.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.02 | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Persentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan | | | | 100 % | 100 % | 64.166.600,00 | 119.276.060,00 | 119.276.060,00 | 55.109.460,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Perangkat Daerah | | 996.841.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.02.0010 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | 24 Laporan | 12 Laporan | 10.421.300,00 | 39.481.960,00 | 39.481.960,00 | 29.060.660,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 350.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.02.0011 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP | | | | 24 Laporan | 24 Laporan | 43.745.400,00 | 64.364.800,00 | 64.364.800,00 | 20.619.400,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 367.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.02.0012 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | 20 Laporan | 12 Laporan | 9.999.900,00 | 15.429.300,00 | 15.429.300,00 | 5.429.400,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 279.841.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.03 | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | Jumlah pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan. Persentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan | | | | 100 % | 100 %<br>20 Orang | 6.727.900,00 | 100.777.060,00 | 100.777.060,00 | 94.049.160,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Perangkat Daerah | | 332.331.063,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.03.0003 | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah | | | | 7 Dokumen | 5 Dokumen | 0,00 | 16.220.060,00 | 16.220.060,00 | 16.220.060,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 297.331.063,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.03.0006 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 6.727.900,00 | 84.557.000,00 | 84.557.000,00 | 77.829.100,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 35.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | **DINAS SOSIAL** | | | | | | | **7.495.335.832,00** | **5.373.439.929,00** | **5.309.235.989,00** | **-2.186.099.843,00** | | | | | | | **8.244.937.070,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **7.495.335.832,00** | **5.373.439.929,00** | **5.309.235.989,00** | **-2.186.099.843,00** | | | | | | | **8.244.937.070,00** | |
| | **1.06** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | | | | **7.495.335.832,00** | **5.373.439.929,00** | **5.309.235.989,00** | **-2.186.099.843,00** | | | | | | | **8.244.937.070,00** | |
| 1, | **1.06.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | - | **100 %** | **4.488.415.500,00** | **4.306.639.929,00** | **4.242.435.989,00** | **499.945.440,00** | | | | | | | **4.988.360.940,00** | |
| | 1.06.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | - | 100 % | 37.700.000,00 | 6.925.000,00 | 6.925.000,00 | -30.775.000,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 49.470.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 16.700.000,00 | 6.925.000,00 | 6.925.000,00 | -9.775.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 21.670.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 2.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 2.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 2.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 2.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 15 Laporan | 0 Laporan | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 19.800.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan Laporan OPD | | | | - | 100 % | 3.963.300.100,00 | 4.063.039.929,00 | 3.998.835.989,00 | 35.535.889,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 4.407.150.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 38 Orang/b ulan | 59 Orang/b ulan | 3.956.800.100,00 | 4.063.039.929,00 | 3.998.835.989,00 | 42.035.889,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 4.400.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 0 Laporan | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 3.850.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 3.300.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | - | 100 % | 3.479.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.479.000,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 3.850.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 2 Laporan | 0 Laporan | 3.479.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.479.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 3.850.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum | | | | - | 100 % | 142.762.600,00 | 62.315.000,00 | 62.315.000,00 | -80.447.600,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 156.794.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 3.081.000,00 | 2.847.000,00 | 2.847.000,00 | -234.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 3.389.100,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 24.984.900,00 | 14.657.700,00 | 14.657.700,00 | -10.327.200,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 27.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 9.312.700,00 | 8.542.300,00 | 8.542.300,00 | -770.400,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 9.900.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 10.000.000,00 | 4.995.000,00 | 4.995.000,00 | -5.005.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 11.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 95.384.000,00 | 31.273.000,00 | 31.273.000,00 | -64.111.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 105.004.900,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | - | 100 % | 69.058.000,00 | 0,00 | 0,00 | -69.058.000,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 76.026.940,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 14 Unit | 0 Unit | 22.043.000,00 | 0,00 | 0,00 | -22.043.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 24.216.940,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 4 Unit | 0 Unit | 47.015.000,00 | 0,00 | 0,00 | -47.015.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 51.810.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | - | 100 % | 70.892.000,00 | 104.700.000,00 | 104.700.000,00 | 33.808.000,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 73.475.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 6 Laporan | 1.250.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | -750.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 1.125.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 26.442.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | -1.442.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 29.150.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 43.200.000,00 | 79.200.000,00 | 79.200.000,00 | 36.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 43.200.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | - | 100 % | 201.223.800,00 | 69.660.000,00 | 69.660.000,00 | -131.563.800,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 221.595.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 5 Unit | 15 Unit | 92.449.800,00 | 63.650.000,00 | 63.650.000,00 | -28.799.800,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 101.695.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 13 Unit | 9 Unit | 8.850.000,00 | 6.010.000,00 | 6.010.000,00 | -2.840.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 9.900.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 0 Unit | 99.924.000,00 | 0,00 | 0,00 | -99.924.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 110.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 2, | **1.06.02** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | **Persentase PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial Persentase PSKS yang meningkat kompetensinya** | | | | - | **100 20 % %** | **481.062.800,00** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** | **16.937.200,00** | | | | | | | **498.000.000,00** | |
| | 1.06.02.2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial | | | | - | 95 % | 481.062.800,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | -476.062.800,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 498.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.03.0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 12 Lembaga | 12 Lembaga | 100.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | -95.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 110.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.03.0012 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 13 Orang | 0 Orang | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 33.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.03.0014 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya | | | | 93 Orang | 93 Orang | 351.062.800,00 | 0,00 | 0,00 | -351.062.800,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 355.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 3, | **1.06.04** | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | **Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya** | | | | - | **25 20 % %** | **1.635.612.807,00** | **518.650.000,00** | **518.650.000,00** | **165.239.123,00** | | | | | | | **1.800.851.930,00** | |
| | 1.06.04.2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial | | | | - | 100 % | 829.311.407,00 | 496.850.000,00 | 496.850.000,00 | -332.461.407,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 913.919.530,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0001 | Penyediaan Permakanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 20 Orang | 277 Orang | 23.532.300,00 | 290.750.000,00 | 290.750.000,00 | 267.217.700,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 25.885.530,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0002 | Penyediaan Sandang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 40 Orang | 17 Orang | 58.611.875,00 | 56.100.000,00 | 56.100.000,00 | -2.511.875,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 65.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0003 | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 40 Orang | 40 Orang | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 55.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0004 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 60 Orang | 50 Orang | 39.798.232,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | -24.798.232,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 44.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 15 Orang | 4 Orang | 84.185.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | -59.185.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 93.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0008 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 550 Orang | 30 Orang | 537.750.000,00 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | -502.750.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 591.550.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0012 | Pemberian Layanan Rujukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 25 Orang | 15 Orang | 35.434.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | -10.434.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 38.984.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.02 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | | | | - | 100 % | 806.301.400,00 | 21.800.000,00 | 21.800.000,00 | -784.501.400,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 886.932.400,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.02.0007 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 40 Orang | 154 Orang | 238.552.200,00 | 21.800.000,00 | 21.800.000,00 | -216.752.200,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 262.407.400,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.02.0008 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 100 Orang | 100 Orang | 531.229.200,00 | 0,00 | 0,00 | -531.229.200,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 591.525.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.02.0010 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 100 Orang | 0 Orang | 36.520.000,00 | 0,00 | 0,00 | -36.520.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 33.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 4, | **1.06.05** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | **Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan** | | | | - | **0,67 100 1,34 % % %** | **378.315.329,00** | **12.278.000,00** | **12.278.000,00** | **37.831.471,00** | | | | | | | **416.146.800,00** | |
| | 1.06.05.2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial | | | | - | 95 % | 378.315.329,00 | 12.278.000,00 | 12.278.000,00 | -366.037.329,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 416.146.800,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.2.02.0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata | | | | 251846 Orang | 279510 Orang | 85.000.000,00 | 12.278.000,00 | 12.278.000,00 | -72.722.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 93.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.2.02.0006 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 18226 Orang | 0 Orang | 293.315.329,00 | 0,00 | 0,00 | -293.315.329,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 322.646.800,00 | DINAS SOSIAL |
| 5, | **1.06.06** | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | **Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat** | | | | - | **100 %** | **478.561.896,00** | **503.150.000,00** | **503.150.000,00** | **29.015.504,00** | | | | | | | **507.577.400,00** | |
| | 1.06.06.2.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Persentase Korban Bencana yang Tertangani | | | | - | 100 % | 449.861.896,00 | 503.150.000,00 | 503.150.000,00 | 53.288.104,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 476.007.400,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.01.0001 | Penyediaan Makanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 173 Orang | 228 Orang | 209.713.096,00 | 270.850.000,00 | 270.850.000,00 | 61.136.904,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 211.810.200,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.01.0002 | Penyediaan Sandang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 100 Orang | 100 Orang | 149.974.600,00 | 157.300.000,00 | 157.300.000,00 | 7.325.400,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 164.972.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.01.0004 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 9 Orang | 9 Orang | 25.510.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | -510.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 28.061.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.01.0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 50 Orang | 50 Orang | 64.664.200,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | -14.664.200,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 71.164.200,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.02 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 28.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | -28.700.000,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 31.570.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.02.0001 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 20 Kampung | 20 Kampung | 28.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | -28.700.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 31.570.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 6, | **1.06.07** | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | **Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik** | | | | **-** | **95 %** | **33.367.500,00** | **27.722.000,00** | **27.722.000,00** | **632.500,00** | | | | | | | **34.000.000,00** | |
| | 1.06.07.2.01 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Persentase Makam Pahlawan yang Terkelola dengan Baik | | | | - | 95 % | 33.367.500,00 | 27.722.000,00 | 27.722.000,00 | -5.645.500,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 34.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.07.2.01.0001 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 33.367.500,00 | 27.722.000,00 | 27.722.000,00 | -5.645.500,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 34.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | | **DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA** | | | | | | | **6.855.123.504,00** | **4.138.928.110,00** | **4.202.276.234,00** | **-2.652.847.270,00** | | | | | | | **7.703.000.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **354.446.647,00** | **0,00** | **185.640.000,00** | **-168.806.647,00** | | | | | | | **770.000.000,00** | |
| | **2.07** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | | **354.446.647,00** | **0,00** | **185.640.000,00** | **-168.806.647,00** | | | | | | | **770.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1, | **2.07.03** | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | **Persentase peningkatan pelatihan tenaga kerja** | | | | **100 %** | **100 %** | **225.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **175.000.000,00** | | | | | | | **400.000.000,00** | |
| | | **[ Persentase Peningkatan Pelatihan Tenaga Kerja ]** | - | - | - | - | - | - | **225.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | - | - | - | - | - | - | - | **400.000.000,00** | - |
| | 2.07.03.2.01 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Persentase terlaksananya pelatihan berdasarkan kompetensi | | | | 100 % | 100 % | 225.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -225.000.000,00 | | | - | - | - | | 400.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| | 2.07.03.2.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | | | | 32 Orang | 32 Orang | 225.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -225.000.000,00 | - | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 400.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| 2, | **2.07.04** | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | **Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja** | | | | **100 %** | **100 %** | **129.446.647,00** | **0,00** | **0,00** | **-9.446.647,00** | | | | | | | **120.000.000,00** | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | **129.446.647,00** | **0,00** | **0,00** | - | - | - | - | - | - | - | **120.000.000,00** | - |
| | 2.07.04.2.01 | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase peningkatan pelayanan antar kerja di daerah Kab 50 Kota | | | | 100 % | 100 % | 129.446.647,00 | 0,00 | 0,00 | -129.446.647,00 | | | - | - | | | 120.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| | 2.07.04.2.01.0005 | Perluasan Kesempatan Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja | | | | 16 Orang | 16 Orang | 129.446.647,00 | 0,00 | 0,00 | -129.446.647,00 | - | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 120.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| 3, | **2.07.05** | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | - | | | | - | - | **0,00** | **0,00** | **185.640.000,00** | **250.000.000,00** | | | | | | | **250.000.000,00** | |
| | 2.07.05.2.02 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 185.640.000,00 | 185.640.000,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | | 250.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| | 2.07.05.2.02.0005 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | | | | - | 1676 Orang | 0,00 | 0,00 | 185.640.000,00 | 185.640.000,00 | - | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | | 250.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | **6.500.676.857,00** | **4.138.928.110,00** | **4.016.636.234,00** | **-2.484.040.623,00** | | | | | | | **6.933.000.000,00** | |
| | **3.31** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | | **6.439.184.357,00** | **4.138.928.110,00** | **4.016.636.234,00** | **-2.422.548.123,00** | | | | | | | **6.833.000.000,00** | |
| 1, | **2.07.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah** | | | | **100 %** | **100 %** | **4.731.144.557,00** | **4.043.928.110,00** | **3.921.636.234,00** | **101.855.443,00** | | | | | | | **4.833.000.000,00** | |
| | 2.07.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase sinergitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah | | | | 100 % | 100 % | 17.499.900,00 | 0,00 | 0,00 | -17.499.900,00 | | | - | - | - | | 23.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 17.499.900,00 | 0,00 | 0,00 | -17.499.900,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 23.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah | | | | 100 % | 100 % | 3.452.073.657,00 | 3.925.364.710,00 | 3.803.072.834,00 | 350.999.177,00 | | | - | - | - | | 3.365.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN |
| | 2.07.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 45 Orang/b ulan | 45 Orang/b ulan | 3.438.068.357,00 | 3.925.364.710,00 | 3.803.072.834,00 | 365.004.477,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.350.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 14.005.300,00 | 0,00 | 0,00 | -14.005.300,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 15.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah | | | | 100 % | 100 % | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000.000,00 | | | - | - | - | | 15.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 15.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase tersedianya administrasi pelayanan umum perangkat daerah | | | | 100 % | 100 % | 414.988.000,00 | 9.236.000,00 | 9.236.000,00 | -405.752.000,00 | | | - | - | - | | 460.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 30.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 60.000.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | -56.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 70.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 45.000.000,00 | 1.376.000,00 | 1.376.000,00 | -43.624.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 54.990.000,00 | 860.000,00 | 860.000,00 | -54.130.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 60.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 234.998.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | -231.498.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 250.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | | | | 100 % | 100 % | 99.947.000,00 | 0,00 | 0,00 | -99.947.000,00 | | | - | - | - | | 150.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 5 Unit | 5 Unit | 99.947.000,00 | 0,00 | 0,00 | -99.947.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah | | | | 100 % | 100 % | 457.400.000,00 | 85.213.400,00 | 85.213.400,00 | -372.186.600,00 | | | - | - | - | | 500.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 80.000.000,00 | 43.063.400,00 | 43.063.400,00 | -36.936.600,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 377.400.000,00 | 42.150.000,00 | 42.150.000,00 | -335.250.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 400.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 276.236.000,00 | 24.114.000,00 | 24.114.000,00 | -252.122.000,00 | | | - | - | - | | 320.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 20 Unit | 20 Unit | 179.300.000,00 | 22.114.000,00 | 22.114.000,00 | -157.186.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 10 Unit | 10 Unit | 50.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | -48.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 60.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 46.936.000,00 | 0,00 | 0,00 | -46.936.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 60.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| 2, | **3.31.02** | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | **Persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas** | | | | **16.68 %** | **16.68 %** | **1.148.449.800,00** | **22.310.400,00** | **22.310.400,00** | **151.550.200,00** | | | | | | | **1.300.000.000,00** | |
| | 3.31.02.2.01 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Persentase peningkatan penyusunan dan evaluasi pembangunan industri Kab 50 Kota | | | | 100 % | 100 % | 1.148.449.800,00 | 22.310.400,00 | 22.310.400,00 | -1.126.139.400,00 | | | - | - | - | | 1.300.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| | 3.31.02.2.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 890.030.000,00 | 2.154.000,00 | 2.154.000,00 | -887.876.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.000.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| | 3.31.02.2.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | | 0 0 | 1 0 | 225.000.000,00 | 15.156.400,00 | 15.156.400,00 | -209.843.600,00 | - | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 250.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| | 3.31.02.2.01.0006 | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 33.419.800,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | -28.419.800,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| 3, | **3.31.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | **Persentase penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten** | | | | **100 %** | **100 %** | **559.590.000,00** | **72.689.600,00** | **72.689.600,00** | **140.410.000,00** | | | | | | | **700.000.000,00** | |
| | 3.31.04.2.01 | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase peningkatan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI,IPUI,IUKI dan IPKi di Kab 50 Kota | | | | 100 % | 100 % | 559.590.000,00 | 72.689.600,00 | 72.689.600,00 | -486.900.400,00 | | | - | - | - | | 700.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| | 3.31.04.2.01.0001 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 159.590.000,00 | 3.932.500,00 | 3.932.500,00 | -155.657.500,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| | 3.31.04.2.01.0002 | Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 400.000.000,00 | 68.757.100,00 | 68.757.100,00 | -331.242.900,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 500.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| | **3.32** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI** | | | | | | | **61.492.500,00** | **0,00** | **0,00** | **-61.492.500,00** | | | | | | | **100.000.000,00** | |
| 1, | **3.32.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | **Persentase pengembangan satuan permukiman pada tahap Kemandirian** | | | | **100 %** | **100 %** | **61.492.500,00** | **0,00** | **0,00** | **38.507.500,00** | | | | | | | **100.000.000,00** | |
| | 3.32.04.2.01 | Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian | Persentase pengembangan wilayah transmigrasi | | | | 100 % | 100 % | 61.492.500,00 | 0,00 | 0,00 | -61.492.500,00 | | | - | - | - | | 100.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| | 3.32.04.2.01.0001 | Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina | | | | 10 Kepala Keluarga | 10 Kepala Keluarga | 61.492.500,00 | 0,00 | 0,00 | -61.492.500,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| | | **DINAS PANGAN** | | | | | | | **3.144.918.331,00** | **2.905.591.766,00** | **3.159.125.422,00** | **14.207.091,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **3.144.918.331,00** | **2.905.591.766,00** | **3.159.125.422,00** | **14.207.091,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **2.09** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | | **3.144.918.331,00** | **2.905.591.766,00** | **3.159.125.422,00** | **14.207.091,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1, | **2.09.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | **-** | **100 %** | **2.950.242.631,00** | **2.630.591.766,00** | **2.614.125.522,00** | **-2.950.242.631,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | **[ Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintah ]** | - | - | - | - | - | - | **2.950.242.631,00** | **2.630.591.766,00** | **2.614.125.522,00** | - | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 2.09.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya Kinerja Perencanaan Keuangan | | | | - | 100 % | 2.356.264.031,00 | 2.444.081.766,00 | 2.427.615.522,00 | 71.351.491,00 | | | - | - | perangkat daerah | | 0,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 0 0 | 0 0 | 2.356.264.031,00 | 2.444.081.766,00 | 2.427.615.522,00 | 71.351.491,00 | - | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum | | | | - | 100 % | 222.398.600,00 | 51.880.000,00 | 51.880.000,00 | -170.518.600,00 | | | - | - | perangkat daerah | | 0,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 5 Paket | 5 Paket | 85.300.000,00 | 7.758.000,00 | 7.758.000,00 | -77.542.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 19.952.000,00 | 12.997.800,00 | 12.997.800,00 | -6.954.200,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 9.993.600,00 | 7.682.200,00 | 7.682.200,00 | -2.311.400,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 13.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.150.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 94.003.000,00 | 23.442.000,00 | 23.442.000,00 | -70.561.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja | | | | - | 100 % | 80.580.000,00 | 49.910.000,00 | 49.910.000,00 | -30.670.000,00 | | | - | - | perangkat daerah | | 0,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.870.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.710.000,00 | 6.710.000,00 | 6.710.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 72.000.000,00 | 43.200.000,00 | 43.200.000,00 | -28.800.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.09.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah | | | | - | 100 % | 291.000.000,00 | 84.720.000,00 | 84.720.000,00 | -206.280.000,00 | | | - | - | perangkat daerah | | 0,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 9 Unit | 9 Unit | 141.000.000,00 | 79.590.000,00 | 79.590.000,00 | -61.410.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 15 Unit | 15 Unit | 0,00 | 5.130.000,00 | 5.130.000,00 | 5.130.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PANGAN |
| | | - | - | - | - | - | - | - | **2.950.242.631,00** | **2.630.591.766,00** | **2.614.125.522,00** | - | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 2.09.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PANGAN |
| 2, | **2.09.03** | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | **Skor Pola Pangan Harapan** | | | | - | **91,4 skor** | **134.752.000,00** | **265.295.000,00** | **485.294.900,00** | **-134.752.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | **[ Persentase Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan ]** | - | - | - | - | - | - | **134.752.000,00** | **265.295.000,00** | **485.294.900,00** | - | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 2.09.03.2.01 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Meningkatnya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok Masyarakat dalam Menstabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | | | | - | 100 % | 65.000.000,00 | 100.000.200,00 | 150.000.100,00 | 85.000.100,00 | | | - | - | masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota | | 0,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.03.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50.000.000,00 | 100.000.200,00 | 150.000.100,00 | 100.000.100,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.03.2.01.0014 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PANGAN |
| | | - | - | - | - | - | - | - | **134.752.000,00** | **265.295.000,00** | **485.294.900,00** | - | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 2.09.03.2.02 | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Terkelolanya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten | | | | - | 166 Ton | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.03.2.02.0005 | Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota | | | | 48 Ton | 48 Ton | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.03.2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Tercapainya Skor Pola Pangan Harapan (PPh) berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) | | | | - | 91,4 skor | 39.752.000,00 | 165.294.800,00 | 335.294.800,00 | 295.542.800,00 | | | - | - | masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota | | 0,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.03.2.04.0001 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 14.136.000,00 | 0,00 | 0,00 | -14.136.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20.000.000,00 | 75.000.000,00 | 245.000.000,00 | 225.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.03.2.04.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.616.000,00 | 90.294.800,00 | 90.294.800,00 | 84.678.800,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PANGAN |
| 3, | **2.09.04** | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | **Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan** | | | | - | **7,59 %** | **19.924.000,00** | **0,00** | **50.000.000,00** | **-19.924.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | **[ Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan dalam Mewujudkan Kemandirian dan Kedaulatan Pangan Masyarakat ]** | - | - | - | - | - | - | **19.924.000,00** | **0,00** | **50.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 2.09.04.2.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Teratasinya Kerawanan Pangan Daerah | | | | - | 1 laporan | 19.924.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 30.076.000,00 | | | - | - | masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota | | 0,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.04.2.02.0005 | Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 19.924.000,00 | 0,00 | 0,00 | -19.924.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PANGAN |
| 4, | **2.09.05** | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | **Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan** | | | | - | **89,3 %** | **39.999.700,00** | **9.705.000,00** | **9.705.000,00** | **-39.999.700,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | **[ Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam. Bergizi. Seimbang dan Aman ]** | - | - | - | - | - | - | **39.999.700,00** | **9.705.000,00** | **9.705.000,00** | - | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 2.09.05.2.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Terwujudnya Keamanan Pangan Segar yang Dikonsumsi Masyarakat di Kabupaten | | | | - | 89,3 % | 39.999.700,00 | 9.705.000,00 | 9.705.000,00 | -30.294.700,00 | | | - | - | masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota | | 0,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.05.2.01.0004 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen Dokumen | 1 Dokumen Dokumen | 10.530.000,00 | 9.705.000,00 | 9.705.000,00 | -825.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.05.2.01.0006 | Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.440.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.05.2.01.0007 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PANGAN |
| | 2.09.05.2.01.0009 | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.529.700,00 | 0,00 | 0,00 | -15.529.700,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PANGAN |
| | | **DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN** | | | | | | | **7.967.882.934,00** | **8.598.973.132,00** | **14.709.175.928,00** | **6.741.292.994,00** | | | | | | | **8.614.242.934,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **1.016.000.000,00** | **1.610.000.000,00** | **5.120.000.000,00** | **4.104.000.000,00** | | | | | | | **1.166.000.000,00** | |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | **1.016.000.000,00** | **1.610.000.000,00** | **5.120.000.000,00** | **4.104.000.000,00** | | | | | | | **1.166.000.000,00** | |
| 1, | **1.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | **Persentase warga negara korban bencana dan atau relokasi program pemerintah yang memperoleh akses rumah layak huni** | | | | - | **100 persen** | **260.000.000,00** | **300.000.000,00** | **2.272.787.200,00** | **4.000.000,00** | | | | | | | **264.000.000,00** | |
| | | **[ Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota ]** | - | - | - | - | - | - | **260.000.000,00** | **300.000.000,00** | **2.272.787.200,00** | - | - | - | - | - | - | - | **264.000.000,00** | - |
| | 1.04.02.2.01 | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 0,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | masyarakat korban bencana atau relokasi program pemerintah | | 50.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 1.04.02.2.01.0009 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 50.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 1.04.02.2.02 | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana (kali) | | | | - | 3 Kali | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | masyarakat korban bencana atau relokasi program pemerintah | | 24.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 1.04.02.2.02.0001 | Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | 50 Orang | 50 Orang | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 24.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.04.02.2.03 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 190.000.000,00 | 230.000.000,00 | 2.202.787.200,00 | 2.012.787.200,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | Masyarakat korban bencana atau relokasi program pemerintah | | 190.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 1.04.02.2.03.0004 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun | | | | 3 Unit Rumah | 26 Unit Rumah | 190.000.000,00 | 230.000.000,00 | 2.202.787.200,00 | 2.012.787.200,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 190.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| 2, | **1.04.03** | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | **Persentase Berkurangnya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni** | | | | - | **18,74 persen** | **306.000.000,00** | **56.000.000,00** | **56.000.000,00** | **78.000.000,00** | | | | | | | **384.000.000,00** | |
| | | **[ Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni ]** | - | - | - | - | - | - | **306.000.000,00** | **56.000.000,00** | **56.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | - | **384.000.000,00** | - |
| | 1.04.03.2.02 | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | - | | | | - | - | 56.000.000,00 | 56.000.000,00 | 56.000.000,00 | 0,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | kawasan permukiman kumuh | | 84.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 1.04.03.2.02.0008 | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 24.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 1.04.03.2.02.0014 | Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 60.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 1.04.03.2.03 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi dan dibangun pada kawasan permukiman kumuh | | | | - | 264 Unit | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000.000,00 | | | - | - - | - | | 300.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 1.04.03.2.03.0002 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki | | | | 3 Unit Rumah | 3 Unit Rumah | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 100.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 1.04.03.2.03.0009 | Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan | | | | 12 Ha | 12 Ha | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 60.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 1.04.03.2.03.0012 | Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | 3 Unit | 3 Unit | 140.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -140.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 140.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| 3, | **1.04.04** | **PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH** | **Persentase luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani** | | | | - | **2,49 persen** | **250.000.000,00** | **1.054.000.000,00** | **1.054.000.000,00** | **50.000.000,00** | | | | | | | **300.000.000,00** | |
| | | **[ Persentase Areal Kawasan Kumuh ]** | - | - | - | - | - | - | **250.000.000,00** | **1.054.000.000,00** | **1.054.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | - | **300.000.000,00** | - |
| | 1.04.04.2.01 | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 250.000.000,00 | 1.054.000.000,00 | 1.054.000.000,00 | 804.000.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | Pencegahan berkembangnya perumahan dan kawasan permukiman kumuh | | 300.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 1.04.04.2.01.0001 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | | | | 3 Unit Rumah | 3 Unit Rumah | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 100.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 1.04.04.2.01.0004 | Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh | | | | 3 Unit | 15 Unit | 200.000.000,00 | 1.054.000.000,00 | 1.054.000.000,00 | 854.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 200.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4, | **1.04.05** | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | **Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU** | | | | - | **30 persen** | **200.000.000,00** | **200.000.000,00** | **1.737.212.800,00** | **18.000.000,00** | | | | | | | **218.000.000,00** | |
| | | **[ Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana. Sarana dan Utilitas Umum) ]** | - | - | - | - | - | - | **200.000.000,00** | **200.000.000,00** | **1.737.212.800,00** | - | - | - | - | - | - | - | **218.000.000,00** | - |
| | 1.04.05.2.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | - | | | | - | - | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 1.737.212.800,00 | 1.537.212.800,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | PSU Perumahan yang sudah diserahterimakan kepada pemerintah daerah | | 218.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 1.04.05.2.01.0010 | Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 18.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 1.04.05.2.01.0012 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum | | | | 1 Lokasi | 4 Lokasi | 182.000.000,00 | 182.000.000,00 | 1.719.212.800,00 | 1.537.212.800,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 200.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **6.951.882.934,00** | **6.988.973.132,00** | **9.589.175.928,00** | **2.637.292.994,00** | | | | | | | **7.448.242.934,00** | |
| | **2.11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | **6.951.882.934,00** | **6.988.973.132,00** | **9.589.175.928,00** | **2.637.292.994,00** | | | | | | | **7.448.242.934,00** | |
| 1, | **2.11.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | | | | - | - | **5.221.515.934,00** | **5.271.826.132,00** | **5.192.528.928,00** | **-100.835.707,00** | | | | | | | **5.120.680.227,00** | |
| | | **[ Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintah ]** | - | - | - | - | - | - | **5.221.515.934,00** | **5.271.826.132,00** | **5.192.528.928,00** | - | - | - | - | - | - | - | **5.120.680.227,00** | - |
| | 2.11.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen) | | | | - | 65 dokumen | 7.390.000,00 | 7.390.000,00 | 7.390.000,00 | 0,00 | | | - | - - | - | | 7.390.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 2.11.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 7.390.000,00 | 7.390.000,00 | 7.390.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 7.390.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 2.11.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD | | | | - | 100 % | 4.643.470.934,00 | 5.031.205.310,00 | 4.951.908.106,00 | 308.437.172,00 | | | - | - - | - | | 4.567.585.227,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 2.11.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 45 Orang/b ulan | 46 Orang/b ulan | 4.643.470.934,00 | 5.031.205.310,00 | 4.951.908.106,00 | 308.437.172,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 4.567.585.227,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 2.11.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | | | | - | 100 % | 7.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.460.000,00 | | | - | - - | - | | 7.460.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 2.11.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 7.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.460.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 7.460.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 2.11.01.2.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Persentase Adminstrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | | - | 100 % | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | | | - | - - | - | | 17.745.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 2.11.01.2.04.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 17.745.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 2.11.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | - | 100 % | 22.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -22.000.000,00 | | | - | - - | - | | 22.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 2.11.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 44 Paket | 44 Paket | 22.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -22.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 22.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 2.11.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | - | 100 % | 138.445.000,00 | 94.373.000,00 | 94.373.000,00 | -44.072.000,00 | | | - | - | - | | 196.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 2.11.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 6 Paket | 6 Paket | 12.500.000,00 | 2.125.000,00 | 2.125.000,00 | -10.375.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 12.500.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 2.11.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 6 Paket | 6 Paket | 10.000.000,00 | 16.462.000,00 | 16.462.000,00 | 6.462.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 10.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 2.11.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 6 Paket | 6 Paket | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 13.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 2.11.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 6 Paket | 6 Paket | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 13.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 2.11.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 7.500.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 2.11.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 24 Laporan | 24 Laporan | 82.445.000,00 | 42.286.000,00 | 42.286.000,00 | -40.159.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 140.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 2.11.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | - | 100 % | 27.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -27.500.000,00 | | | - | - | - | | 27.500.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 2.11.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 6 Unit | 6 Unit | 27.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -27.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 27.500.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 2.11.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | - | 100 % | 87.250.000,00 | 49.158.822,00 | 49.158.822,00 | -38.091.178,00 | | | - | - | - | | 75.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 2.11.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 2.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 2.11.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 42.250.000,00 | 36.088.822,00 | 36.088.822,00 | -6.161.178,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 40.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 2.11.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 3.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 4.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 3.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 2.11.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 40.000.000,00 | 3.070.000,00 | 3.070.000,00 | -36.930.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 30.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 2.11.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | | | | - | 100 % | 268.000.000,00 | 89.699.000,00 | 89.699.000,00 | -178.301.000,00 | | | - | - | - | | 200.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 2.11.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 12 Unit | 12 Unit | 166.000.000,00 | 89.699.000,00 | 89.699.000,00 | -76.301.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 2.11.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 2 Unit | 102.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -102.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| 2, | **2.11.02** | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti** | | | | - | **100 persen** | **116.450.000,00** | **116.450.000,00** | **116.450.000,00** | **41.652.000,00** | | | | | | | **158.102.000,00** | |
| | | **[ Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup ]** | - | - | - | - | - | - | **116.450.000,00** | **116.450.000,00** | **116.450.000,00** | - | - | - | - | - | - | - | **158.102.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.11.02.2.02 | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 116.450.000,00 | 116.450.000,00 | 116.450.000,00 | 0,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | - | | 158.102.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 2.11.02.2.02.0005 | Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 116.450.000,00 | 116.450.000,00 | 116.450.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 158.102.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| 3, | **2.11.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Indeks kualitas air** | | | | **-** | **64,3 indeks** | **178.800.000,00** | **179.042.000,00** | **179.042.000,00** | **49.560.000,00** | | | | | | | **228.360.000,00** | |
| | | **[ Indeks Kualitas Air (IKA) ]** | - | - | - | - | - | - | **178.800.000,00** | **179.042.000,00** | **179.042.000,00** | - | - | - | - | - | - | - | **228.360.000,00** | - |
| | 2.11.03.2.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 178.800.000,00 | 179.042.000,00 | 179.042.000,00 | 242.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | pengendalian pencemaran pada media air, udara dan tanah | | 228.360.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 2.11.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 12.805.000,00 | 13.047.000,00 | 13.047.000,00 | 242.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 26.400.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 2.11.03.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 15.787.000,00 | 15.787.000,00 | 15.787.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 24.960.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 2.11.03.2.01.0011 | Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 18.808.000,00 | 18.808.000,00 | 18.808.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 42.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 2.11.03.2.01.0012 | Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan | | | | 36 Paket | 36 Paket | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 15.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 2.11.03.2.01.0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan | | | | 24 Dokumen | 24 Dokumen | 116.400.000,00 | 116.400.000,00 | 116.400.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK AIR TANAH | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 120.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| 4, | **2.11.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | **Persentase ruang terbuka hijau (RTH) kawasan perkotaan** | | | | **-** | **0,25 persen** | **269.559.000,00** | **269.559.000,00** | **549.059.000,00** | **93.341.000,00** | | | | | | | **362.900.000,00** | |
| | | **[ Persentase Kawasan Kehati yang Terkelola ]** | - | - | - | - | - | - | **269.559.000,00** | **269.559.000,00** | **549.059.000,00** | - | - | - | - | - | - | - | **362.900.000,00** | - |
| | 2.11.04.2.01 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 269.559.000,00 | 269.559.000,00 | 549.059.000,00 | 279.500.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | keanekaragaman hayati kabupaten/kota | | 362.900.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 2.11.04.2.01.0001 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 32.900.000,00 | 32.900.000,00 | 32.900.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 52.900.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 2.11.04.2.01.0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 7,01 Ha | 7,01 Ha | 236.659.000,00 | 236.659.000,00 | 516.159.000,00 | 279.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 310.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| 5, | **2.11.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | **Persentase limbah B3 yang terkelola** | | | | - | **20 persen** | **12.400.000,00** | **12.400.000,00** | **12.400.000,00** | **24.000.000,00** | | | | | | | **36.400.000,00** | |
| | | **[ Persentase Peningkatan Pengendalian B3. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) ]** | - | - | - | - | - | - | **12.400.000,00** | **12.400.000,00** | **12.400.000,00** | - | - | - | - | - | - | - | **36.400.000,00** | - |
| | 2.11.05.2.02 | Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 12.400.000,00 | 12.400.000,00 | 12.400.000,00 | 0,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | usaha/kegiatan penimbul limbah B3 | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 2.11.05.2.02.0004 | Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina | | | | 12 Usaha | 12 Usaha | 12.400.000,00 | 12.400.000,00 | 12.400.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| 6, | **2.11.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | **Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH** | | | | - | **89,7 persen** | **24.683.000,00** | **24.683.000,00** | **24.683.000,00** | **20.000.000,00** | | | | | | | | |
| | | **[ Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup ]** | - | - | - | - | - | - | **24.683.000,00** | **24.683.000,00** | **24.683.000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2.11.06.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumenizin lingkungan usaha/kegiatanyang layak lingkungan (dokumen) | | | | 220 Dokumen | 220 Dokumen | 24.683.000,00 | 24.683.000,00 | 24.683.000,00 | 0,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT" Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT" | usaha/kegiatan | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 2.11.06.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 12.275.000,00 | 12.275.000,00 | 12.275.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT" Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT" | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 2.11.06.2.01.0009 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | | | | 12 Badan Usaha | 12 Badan Usaha | 12.408.000,00 | 12.408.000,00 | 12.408.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| 7, | **2.11.07** | **PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH** | **Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya** | | | | - | **10 persen** | **12.340.000,00** | **12.340.000,00** | **12.340.000,00** | **39.000.000,00** | | | | | | | | |
| | | **[ Persentase Pendampingan Pengakuan Keberadaan MHA yang Terfasilitasi ]** | - | - | - | - | - | - | **12.340.000,00** | **12.340.000,00** | **12.340.000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2.11.07.2.01 | Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH | Jumlah Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH | | | | - | 1 dokumen | 12.340.000,00 | 12.340.000,00 | 12.340.000,00 | 0,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | masyarakat hukum adat dan kearifan lokal | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 2.11.07.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.340.000,00 | 12.340.000,00 | 12.340.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| 8, | **2.11.08** | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | **Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya** | | | | - | **35,78 persen** | **36.580.000,00** | **36.580.000,00** | **36.580.000,00** | **10.100.000,00** | | | | | | | | |
| | | **[ Persentase Cakupan Pendidikan Pelatihan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat ]** | - | - | - | - | - | - | **36.580.000,00** | **36.580.000,00** | **36.580.000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2.11.08.2.01 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | - | 1 dokumen | 36.580.000,00 | 36.580.000,00 | 36.580.000,00 | 0,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | masyarakat peduli lingkungan | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 2.11.08.2.01.0002 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 21.580.000,00 | 21.580.000,00 | 21.580.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 2.11.08.2.01.0003 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat | | | | 60 Orang | 60 Orang | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| 9, | **2.11.09** | **PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | **Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup** | | | | - | **10 persen** | **10.102.000,00** | **10.102.000,00** | **10.102.000,00** | **4.898.000,00** | | | | | | | **15.000.000,00** | |
| | | **[ Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Melaksanakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ]** | - | - | - | - | - | - | **10.102.000,00** | **10.102.000,00** | **10.102.000,00** | - | - | - | - | - | - | - | **15.000.000,00** | - |
| | 2.11.09.2.01 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 0,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | kelompok peduli lingkungan | | 15.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 2.11.09.2.01.0001 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | | | | 12 Entitas | 12 Entitas | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 15.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| 10, | **2.11.10** | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Persentase Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkungan hidup** | | | | - | **100 persen** | **22.175.000,00** | **22.175.000,00** | **22.175.000,00** | **21.200.000,00** | | | | | | | **43.375.000,00** | |
| | | **[ Persentase Pengaduan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti ]** | - | - | - | - | - | - | **22.175.000,00** | **22.175.000,00** | **22.175.000,00** | - | - | - | - | - | - | - | **43.375.000,00** | - |
| | 2.11.10.2.01 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 22.175.000,00 | 22.175.000,00 | 22.175.000,00 | 0,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | usaha/kegiatan | | 43.375.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 2.11.10.2.01.0009 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola | | | | 12 Pengaduan | 12 Pengaduan | 9.545.000,00 | 9.545.000,00 | 9.545.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 17.745.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 2.11.10.2.01.0010 | Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota | | | | 12 Sanksi | 12 Sanksi | 12.630.000,00 | 12.630.000,00 | 12.630.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 25.630.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| 11, | **2.11.11** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | **Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah** | | | | - | **31,38 indeks** | **1.047.278.000,00** | **1.033.816.000,00** | **3.433.816.000,00** | **293.444.707,00** | | | | | | | **1.340.722.707,00** | |
| | | **[ Persentase Pengurangan Sampah dan Persentase Penanganan Sampah ]** | - | - | - | - | - | - | **1.047.278.000,00** | **1.033.816.000,00** | **3.433.816.000,00** | - | - | - | - | - | - | - | **1.340.722.707,00** | - |
| | 2.11.11.2.01 | Pengelolaan Sampah | - | | | | - | - | 1.047.278.000,00 | 1.033.816.000,00 | 3.433.816.000,00 | 2.386.538.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | Pengelolaan Sampah IKK Sarilamak | | 1.340.722.707,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 2.11.11.2.01.0004 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat | | | | 24 Kelompok | 24 Kelompok | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 35.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 2.11.11.2.01.0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | | | | 1 Unit | 5 Unit | 56.105.000,00 | 50.000.000,00 | 1.231.000.000,00 | 1.174.895.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 57.105.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 2.11.11.2.01.0008 | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 66.104.000,00 | 54.435.584,00 | 999.435.584,00 | 933.331.584,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 66.104.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 2.11.11.2.01.0012 | Penanganan sampah melalui pengangkutan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan | | | | 7482,5 Ton | 7482,5 Ton | 808.000.000,00 | 808.000.000,00 | 808.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 1.000.444.573,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 2.11.11.2.01.0016 | Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Persentase luas layanan pengumpulan sampah | | | | 10,39 Persentase | 10,39 Persentase | 38.000.000,00 | 77.311.416,00 | 77.311.416,00 | 39.311.416,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 38.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 2.11.11.2.01.0017 | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan | | | | 1825 Ton | 1825 Ton | 44.069.000,00 | 44.069.000,00 | 318.069.000,00 | 274.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 144.069.134,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | | **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | **9.144.232.998,00** | **9.158.575.124,00** | **9.193.957.758,00** | **49.724.760,00** | | | | | | | **11.693.742.068,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **9.144.232.998,00** | **9.158.575.124,00** | **9.193.957.758,00** | **49.724.760,00** | | | | | | | **11.693.742.068,00** | |
| | **2.12** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | **9.144.232.998,00** | **9.158.575.124,00** | **9.193.957.758,00** | **49.724.760,00** | | | | | | | **11.693.742.068,00** | |
| 1, | **2.12.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | | | | - | - | **8.423.181.298,00** | **8.739.025.124,00** | **8.774.407.758,00** | **1.516.560.770,00** | | | | | | | **9.939.742.068,00** | |
| | | **[ Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintah ]** | - | - | - | - | - | - | **8.423.181.298,00** | **8.739.025.124,00** | **8.774.407.758,00** | - | - | - | - | - | - | - | **9.939.742.068,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.12.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 11.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.120.000,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 18.300.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.060.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 5.300.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 3.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.030.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 8.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.030.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 5.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | | - | - | - | - | - | - | - | **8.423.181.298,00** | **8.739.025.124,00** | **8.774.407.758,00** | - | - | - | - | - | - | - | **9.939.742.068,00** | - |
| | 2.12.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | - | 100 % | 7.598.363.698,00 | 8.495.597.126,00 | 8.530.979.760,00 | 932.616.062,00 | | | - | - - | - | | 8.358.200.068,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 0 Orang/bul an | 64 Orang/b ulan | 3.799.181.849,00 | 4.247.798.563,00 | 4.265.489.880,00 | 466.308.031,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 4.179.100.034,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.12.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 32.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -32.000.000,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 40.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 32.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -32.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 40.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | - | 100 % | 233.711.600,00 | 72.643.600,00 | 72.643.600,00 | -161.068.000,00 | | | - | - - | - | | 527.242.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 7 Paket | 7 Paket | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 2.121.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.12.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 7 Paket | 7 Paket | 166.724.500,00 | 34.081.500,00 | 34.081.500,00 | -132.643.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 455.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 5.000.100,00 | 5.000.100,00 | 5.000.100,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 5.500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 2.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 4.440.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | -2.940.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 5.500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 30 Laporan | 30 Laporan | 52.507.000,00 | 28.022.000,00 | 28.022.000,00 | -24.485.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 55.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000.000,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 500.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 2 Unit | 2 Unit | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 500.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | - | 100 % | 172.406.000,00 | 72.766.000,00 | 72.766.000,00 | -99.640.000,00 | | | - | - - | - | | 183.500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.500.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | -300.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 1.750.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.12.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 72.206.000,00 | 55.966.000,00 | 55.966.000,00 | -16.240.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 75.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 97.200.000,00 | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | -82.800.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 105.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | - | 100 % | 305.580.000,00 | 98.018.398,00 | 98.018.398,00 | -207.561.602,00 | | | - | - | - | | 312.500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 18 Unit | 18 Unit | 134.250.000,00 | 46.341.998,00 | 46.341.998,00 | -87.908.002,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 137.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.12.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 20 Unit | 20 Unit | 7.080.000,00 | 5.334.402,00 | 5.334.402,00 | -1.745.598,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 8.500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 30.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2, | **2.12.02** | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | - | | | | - | - | **271.111.900,00** | **410.550.000,00** | **410.550.000,00** | **1.073.888.100,00** | | | | | | | **1.345.000.000,00** | |
| | 2.12.02.2.01 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | - | | | | - | - | 179.004.500,00 | 0,00 | 0,00 | -179.004.500,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 305.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.01.0001 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | | | | 60 Dokumen | 60 Dokumen | 5.915.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.915.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 110.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.01.0002 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | | | | 50.000 Dokumen | 50.000 Dokumen | 173.089.500,00 | 0,00 | 0,00 | -173.089.500,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 195.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.02 | Penataan Pendaftaran Penduduk | Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk | | | | - | 92 % | 92.107.400,00 | 396.550.000,00 | 396.550.000,00 | 304.442.600,00 | | | - | - | - | | 1.000.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.12.02.2.02.0002 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia | | | | 22000 Dokumen | 22000 Dokumen | 46.053.700,00 | 198.275.000,00 | 198.275.000,00 | 152.221.300,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 500.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.02.0002 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.12.02.2.04 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | | | | - | 92 % | 0,00 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | | | - | - | - | | 40.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.04.0001 | Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 20.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.04.0001 | Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3, | **2.12.03** | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | - | | | | - | - | **235.000.000,00** | **9.000.000,00** | **9.000.000,00** | **-1.000.000,00** | | | | | | | **234.000.000,00** | |
| | 2.12.03.2.01 | Pelayanan Pencatatan Sipil | - | | | | - | - | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000.000,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 78.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.01.0001 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | | | | 2.550 Dokumen | 2.550 Dokumen | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 78.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.02 | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | - | | | | - | - | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 19.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.02.0001 | Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 19.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.03 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | | | | - | 92 % | 100.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | -91.000.000,00 | | | - | - | - | | 137.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.03.0001 | Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil | | | | 7600 Dokumen | 7600 Dokumen | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 16.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.03.0001 | Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.12.03.2.03.0004 | Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 105.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 4, | **2.12.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | - | | | | - | - | **158.940.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-15.940.000,00** | | | | | | | **143.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.12.04.2.01 | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | - | | | | - | - | 158.940.000,00 | 0,00 | 0,00 | -158.940.000,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | | 143.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.01.0001 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan | | | | 180 Dokumen | 180 Dokumen | 158.940.000,00 | 0,00 | 0,00 | -158.940.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | | 143.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 5, | **2.12.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | - | | | | - | - | **55.999.800,00** | **0,00** | **0,00** | **-23.999.800,00** | | | | | | | **32.000.000,00** | |
| | 2.12.05.2.01 | Penyusunan Profil Kependudukan | - | | | | - | - | 55.999.800,00 | 0,00 | 0,00 | -55.999.800,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | | 32.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.05.2.01.0002 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun | | | | 0 0 | 0 0 | 55.999.800,00 | 0,00 | 0,00 | -55.999.800,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | | 32.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | | **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI** | | | | | | | **11.704.331.820,00** | **11.679.469.623,00** | **11.359.704.611,00** | **-344.627.209,00** | | | | | | | **14.877.000.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **11.704.331.820,00** | **11.679.469.623,00** | **11.359.704.611,00** | **-344.627.209,00** | | | | | | | **14.877.000.000,00** | |
| | **2.13** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | **11.704.331.820,00** | **11.679.469.623,00** | **11.359.704.611,00** | **-344.627.209,00** | | | | | | | **14.877.000.000,00** | |
| 1, | **2.13.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | - | **100 %** | **10.226.303.020,00** | **10.939.253.283,00** | **10.466.954.871,00** | **-429.303.020,00** | | | | | | | **9.797.000.000,00** | |
| | | **[ Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintah ]** | - | - | - | - | - | - | **10.226.303.020,00** | **10.939.253.283,00** | **10.466.954.871,00** | - | - | - | - | - | - | - | **9.797.000.000,00** | - |
| | 2.13.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase tertib administrasi keuangan | | | | - | 100 % | 9.783.459.520,00 | 10.786.422.024,00 | 10.314.123.612,00 | 530.664.092,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | - - | ASN | | 9.000.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI |
| | 2.13.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 34/12 Oran g/bulan | 40/12 Oran g/bulan | 9.783.459.520,00 | 10.786.422.024,00 | 10.314.123.612,00 | 530.664.092,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | - - | | | 9.000.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.13.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah | | | | - | 100 % | 166.177.000,00 | 50.091.800,00 | 50.091.800,00 | -116.085.200,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | - - | ASN | | 496.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI |
| | 2.13.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 5.287.000,00 | 1.396.000,00 | 1.396.000,00 | -3.891.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | - - | | | 5.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI |
| | 2.13.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 26.263.000,00 | 11.352.500,00 | 11.352.500,00 | -14.910.500,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | - - | | | 40.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI |
| | 2.13.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 14.089.000,00 | 5.373.300,00 | 5.373.300,00 | -8.715.700,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | - - | | | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI |
| | 2.13.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 240 Dokumen | 240 Dokumen | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | - - | | | 6.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI |
| | 2.13.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 7.950.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | -6.450.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | - - | | | 20.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI |
| | 2.13.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 215 Laporan | 215 Laporan | 110.788.000,00 | 30.470.000,00 | 30.470.000,00 | -80.318.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | - - | | | 400.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.13.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase ketersediaan barang milik daeah sesuai perencanaan | | | | - | 100 % | 13.462.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.462.000,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 15.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI |
| | 2.13.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 2 Unit | 13.462.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.462.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 15.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI |
| | 2.13.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Ketersediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | - | 100 % | 65.004.500,00 | 26.064.660,00 | 26.064.660,00 | -38.939.840,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | - - | ASN | | 126.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI |
| | 2.13.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 3.000.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | -2.100.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | - - | | | 2.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI |
| | 2.13.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 12.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | - - | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI |
| | 2.13.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | - | 12 Laporan | 0,00 | 11.890.000,00 | 11.890.000,00 | 11.890.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 14.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI |
| | 2.13.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 49.504.500,00 | 13.274.660,00 | 13.274.660,00 | -36.229.840,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | - - | | | 110.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI |
| | 2.13.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terlaksanannya pemeliharaan BMD | | | | - | 100 % | 198.200.000,00 | 76.674.799,00 | 76.674.799,00 | -121.525.201,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan | - - | BMD | | 160.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI |
| | 2.13.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 13 Unit | 13 Unit | 165.800.000,00 | 61.674.799,00 | 61.674.799,00 | -104.125.201,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI |
| | 2.13.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 14 Unit | 14 Unit | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan | - | | | 20.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI |
| | 2.13.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 26.400.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | -11.400.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan | - | | | 40.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI |
| 2, | **2.13.02** | **PROGRAM PENATAAN DESA** | **Meningkatnya kualitas penataan desa** | | | | - | **25 %** | **0,00** | **75.098.000,00** | **75.098.000,00** | **640.000.000,00** | | | | | | | **640.000.000,00** | |
| | | **[ Persentase Nagari yang Difasilitasi dalam Penataan Nagari ]** | - | - | - | - | - | - | **0,00** | **75.098.000,00** | **75.098.000,00** | - | - | - | - | - | - | - | **640.000.000,00** | - |
| | 2.13.02.2.01 | Penyelenggaraan Penataan Desa | Persentase Desa/Nagari yang difasilitasi dalam Penataan Desa | | | | - | 12.5 % | 0,00 | 75.098.000,00 | 75.098.000,00 | 75.098.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | Nagari | | 640.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI |
| | 2.13.02.2.01.0001 | Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | | | | 4 Desa | 2 Desa | 0,00 | 75.098.000,00 | 75.098.000,00 | 75.098.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo<br>Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Maek | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | | | 640.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI |
| 3, | **2.13.04** | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | **Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa** | | | | - | **80 %** | **160.164.000,00** | **165.260.000,00** | **226.586.400,00** | **1.329.836.000,00** | | | | | | | **1.490.000.000,00** | |
| | | **[ Persentase Nagari yang Dibina dan Diawasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ]** | - | - | - | - | - | - | **160.164.000,00** | **165.260.000,00** | **226.586.400,00** | - | - | - | - | - | - | - | **1.490.000.000,00** | - |
| | 2.13.04.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)<br>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)<br>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)<br>Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintahan Desa | | | | - | 68 %<br>85<br>Dokumen 85 Orang<br>90<br>Dokumen | 160.164.000,00 | 165.260.000,00 | 226.586.400,00 | 66.422.400,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | Nagari | | 1.490.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI |
| | 2.13.04.2.01.0002 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | | | | 79<br>Dokumen | 79<br>Dokumen | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | | | 440.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI |
| | 2.13.04.2.01.0004 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | | | | 79<br>Dokumen | 79<br>Dokumen | 76.664.000,00 | 105.819.000,00 | 105.819.000,00 | 29.155.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | | | 350.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI |
| | | - | - | - | - | - | - | - | **160.164.000,00** | **165.260.000,00** | **226.586.400,00** | - | - | - | - | - | - | - | **1.490.000.000,00** | - |
| | 2.13.04.2.01.0005 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | | | | 79 Orang | 79 Orang | 73.000.000,00 | 59.441.000,00 | 59.441.000,00 | -13.559.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 200.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI |
| | | **[ Persentase Nagari yang Dibina dan Diawasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ]** | - | - | - | - | - | - | **160.164.000,00** | **165.260.000,00** | **226.586.400,00** | - | - | - | - | - | - | - | **1.490.000.000,00** | - |
| | 2.13.04.2.01.0015 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa | | | | 79 Desa | 79 Desa | 0,00 | 0,00 | 61.326.400,00 | 61.326.400,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 500.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI |
| 4, | **2.13.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | **Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan** | | | | - | **90 %** | **1.317.864.800,00** | **499.858.340,00** | **591.065.340,00** | **1.632.135.200,00** | | | | | | | **2.950.000.000,00** | |
| | 2.13.05.2.01 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Nagari yang difasilitasi Pemberdayaannya | | | | - | 75 % | 1.317.864.800,00 | 499.858.340,00 | 591.065.340,00 | -726.799.460,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | Nagari | | 2.950.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI |
| | 2.13.05.2.01.0002 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | 79 Dokumen | 79 Dokumen | 142.146.400,00 | 0,00 | 0,00 | -142.146.400,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 1.600.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI |
| | 2.13.05.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | 79 Lembaga | 79 Lembaga | 973.469.400,00 | 0,00 | 37.047.000,00 | -936.422.400,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 550.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI |
| | 2.13.05.2.01.0005 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | | | | 79 Dokumen | 79 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 54.160.000,00 | 54.160.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI |
| | 2.13.05.2.01.0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 78.067.000,00 | 0,00 | 0,00 | -78.067.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 100.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI |
| | 2.13.05.2.01.0007 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | | | | 79 Laporan | 79 Laporan | 100.002.000,00 | 99.858.340,00 | 99.858.340,00 | -143.660,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 200.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI |
| | 2.13.05.2.01.0009 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | | | | 93 Dokumen | 93 Dokumen | 24.180.000,00 | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 375.820.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 500.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI |
| | | **DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | **13.127.160.728,00** | **9.184.862.145,00** | **8.465.946.748,00** | **-4.661.213.980,00** | | | | | | | **14.470.735.250,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **13.127.160.728,00** | **9.184.862.145,00** | **8.465.946.748,00** | **-4.661.213.980,00** | | | | | | | **14.470.735.250,00** | |
| | **2.08** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | **2.200.659.878,00** | **673.000.000,00** | **673.000.000,00** | **-1.527.659.878,00** | | | | | | | **3.257.000.000,00** | |
| 1, | **2.08.02** | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN** | **Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan** | | | | - | **4,78 69,3 % %** | **680.000.000,00** | **140.000.000,00** | **140.000.000,00** | **-80.000.000,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| | | **[ Indeks Pembangunan Gender (IPG) ]** | - | - | - | - | - | - | **680.000.000,00** | **140.000.000,00** | **140.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | - | **600.000.000,00** | - |
| | 2.08.02.2.01 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan PUG | | | | - | 100 % | 130.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | -110.000.000,00 | | | - | - | - | | 150.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.08.02.2.01.0013 | Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) | | | | 43 Lembaga | 43 Lembaga | 130.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | -110.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | | - | - | - | - | - | - | - | **680.000.000,00** | **140.000.000,00** | **140.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | - | **600.000.000,00** | - |
| | 2.08.02.2.02 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 370.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -370.000.000,00 | | | - | - | - | | 300.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.08.02.2.02.0008 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi | | | | 50 orang | 0 orang | 130.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -130.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.08.02.2.02.0009 | Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan | | | | 100 Orang | 0 Orang | 240.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -240.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.02.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan pemberdayaan perempuan | | | | - | 100 % | 180.000.000,00 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | -60.000.000,00 | | | - | - | - | | 150.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.08.02.2.03.0007 | pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan | | | | 30 Lembaga | 30 Lembaga | 180.000.000,00 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | -60.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| 2, | **2.08.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | **Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif** | | | | - | **85,50 %** | **295.659.878,00** | **111.884.300,00** | **111.884.300,00** | **245.340.122,00** | | | | | | | **541.000.000,00** | |
| | 2.08.03.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga/lintas sektor yang melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan | | | | - | 20 Organisasi | 150.519.878,00 | 55.044.300,00 | 55.044.300,00 | -95.475.578,00 | | | - | - | - | | 275.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.08.03.2.01.0004 | Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 12 Dokumen | 0 Dokumen | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.08.03.2.01.0006 | Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota | | | | 25 Lembaga | 25 Lembaga | 145.519.878,00 | 55.044.300,00 | 55.044.300,00 | -90.475.578,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | - | - | | | 175.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.03.2.02 | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan komprehensif | | | | - | 85,50 % | 80.140.000,00 | 36.640.000,00 | 36.640.000,00 | -43.500.000,00 | | | - | - | - | | 91.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.08.03.2.02.0003 | &layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota& | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota | | | | 4 orang Orang | 4 orang Orang | 15.000.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | -7.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | - | - | | | 18.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.03.2.02.0004 | layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkatataen/Kota | | | | 1 kegiatan Orang | 1 kegiatan Orang | 6.000.000,00 | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 | -2.750.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Tarantang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | - | - | | | 8.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.03.2.02.0005 | layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota | | | | 15 orang orang | 17 orang | 9.250.000,00 | 4.350.000,00 | 4.350.000,00 | -4.900.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | - | - | | | 10.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.03.2.02.0006 | layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | | 4 orang Orang | 2 Orang | 24.620.000,00 | 7.600.000,00 | 7.600.000,00 | -17.020.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | - | - | | | 25.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.03.2.02.0007 | layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota | | | | 10 orang orang | 10 orang orang | 4.400.000,00 | 2.325.000,00 | 2.325.000,00 | -2.075.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | - | - | | | 5.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.03.2.02.0008 | Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota | | | | 15 orang orang | 14 orang | 9.500.000,00 | 6.615.000,00 | 6.615.000,00 | -2.885.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | - | - | | | 10.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.03.2.02.0009 | Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota | | | | 15 orang orang | 18 orang | 11.370.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | -6.370.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | - | - | | | 15.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.03.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase lembaga layanan yang terlatih bagi perempuan | | | | - | 100 % | 65.000.000,00 | 20.200.000,00 | 20.200.000,00 | -44.800.000,00 | | | - | - | - | | 175.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.08.03.2.03.0008 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek | | | | 200 orang | 100 orang | 60.000.000,00 | 20.200.000,00 | 20.200.000,00 | -39.800.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.08.03.2.03.0009 | Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan | | | | 12 Dokumen | 0 Dokumen | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | - | | | 75.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| 3, | **2.08.04** | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | - | | | | - | - | **120.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000.000,00** | | | | | | | **150.000.000,00** | |
| | 2.08.04.2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000.000,00 | | | - | - | - | | 150.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.04.2.02.0005 | pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan | | | | 50 Lembaga | 0 Lembaga | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 4, | **2.08.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK** | - | | | | - | - | **100.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **175.000.000,00** | | | | | | | **275.000.000,00** | |
| | 2.08.05.2.01 | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000.000,00 | | | - | - | - | | 275.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.08.05.2.01.0003 | Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia | | | | 14 Dokumen | 0 Dokumen | 95.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -95.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | - | | | 125.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.08.05.2.01.0004 | Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak | | | | 14 Lembaga | 0 Lembaga | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| 5, | **2.08.06** | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | **Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)** | | | | - | **60,6 Indeks** | **280.000.000,00** | **74.728.700,00** | **74.728.700,00** | **320.000.000,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| | 2.08.06.2.01 | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah PD/Lembaga/Organisasi yang memahami PHA | | | | - | 20 Organisasi | 270.000.000,00 | 74.728.700,00 | 74.728.700,00 | -195.271.300,00 | | | - | - | - | | 350.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.08.06.2.01.0003 | Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 25 Lembaga | 25 Lembaga | 265.000.000,00 | 74.728.700,00 | 74.728.700,00 | -190.271.300,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 250.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.06.2.01.0005 | Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 12 Lembaga | 0 Lembaga | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.06.2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | | | - | - | - | | 250.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.08.06.2.02.0005 | Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek | | | | 325 Orang | 0 Orang | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG | - | - | | | 125.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.08.06.2.02.0007 | Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) | | | | 14 Lembaga | 0 Lembaga | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | - | | | 125.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 6, | **2.08.07** | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | **Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif** | | | | - | **81,7 85,50 Indeks %** | **725.000.000,00** | **346.387.000,00** | **346.387.000,00** | **366.000.000,00** | | | | | | | **1.091.000.000,00** | |
| | 2.08.07.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga/lintas sektor yang melakukan pencegahan kekerasan terhadap Anak | | | | - | 20 Lembaga | 260.000.000,00 | 97.227.000,00 | 97.227.000,00 | -162.773.000,00 | | | - | - | - | | 225.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.08.07.2.01.0007 | Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota | | | | 8 Kegiatan | 8 Kegiatan | 260.000.000,00 | 97.227.000,00 | 97.227.000,00 | -162.773.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | - | - | | | 225.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.07.2.02 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan komprehensif | | | | - | 85,50 % | 400.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | -200.000.000,00 | | | - | - | - | | 416.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.08.07.2.02.0008 | Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota | | | | 70 orang 0 | 50 0 | 91.035.000,00 | 62.435.000,00 | 62.435.000,00 | -28.600.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | - | - | | | 80.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.07.2.02.0009 | layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota | | | | 70 orang Orang | 95 Orang | 71.575.000,00 | 35.775.000,00 | 35.775.000,00 | -35.800.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | - | - | | | 75.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.07.2.02.0010 | layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota | | | | 90 Layanan Orang | 90 Layanan Orang | 18.675.000,00 | 18.750.000,00 | 18.750.000,00 | 75.000,00 | - | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | - | - | | | 19.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.07.2.02.0011 | layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | | 1 kegiatan Orang | 1 kegiatan Orang | 6.000.000,00 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | -2.700.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Tarantang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | - | - | | | 7.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.07.2.02.0012 | layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | | 10 orang 0 | 8 0 | 51.580.000,00 | 14.740.000,00 | 14.740.000,00 | -36.840.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | - | - | | | 60.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.07.2.02.0013 | Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota | | | | 70 orang Orang | 90 Orang | 116.135.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | -76.135.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | - | - | | | 120.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.07.2.02.0014 | layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 8 orang Orang | 7 Orang | 30.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | -15.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | - | - | | | 35.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.07.2.02.0015 | layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota | | | | 15 orang Orang | 8 Orang | 15.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | -5.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | - | - | | | 20.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.07.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase lembaga layanan yang terlatih bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus | | | | - | 100 % | 65.000.000,00 | 49.160.000,00 | 49.160.000,00 | -15.840.000,00 | | | - | - | - | | 450.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.08.07.2.03.0007 | Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah KIE Perlindungan khusus anak | | | | 8 Dokumen | 0 Dokumen | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG | | - | | | 75.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.08.07.2.03.0009 | koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota | | | | 10 Dokumen | 0 Dokumen | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | - | | | 125.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENDIDIKAN ANAK |
| | 2.08.07.2.03.0012 | penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 8 Dokumen | 0 Dokumen | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG | - | - | | | 125.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.08.07.2.03.0013 | Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek | | | | 100 Orang | 100 Orang | 50.000.000,00 | 49.160.000,00 | 49.160.000,00 | -840.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK-PER LINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | - | - | | | 125.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | **2.14** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | **10.926.500.850,00** | **8.511.862.145,00** | **7.792.946.748,00** | **-3.133.554.102,00** | | | | | | | **11.213.735.250,00** | |
| 1, | **2.14.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah** | | | | - | **100 %** | **5.426.865.150,00** | **5.782.477.145,00** | **5.063.561.748,00** | **224.903.700,00** | | | | | | | **5.651.768.850,00** | |
| | | **[ Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintah ]** | - | - | - | - | - | - | **5.426.865.150,00** | **5.782.477.145,00** | **5.063.561.748,00** | - | - | - | - | - | - | - | **5.651.768.850,00** | - |
| | 2.14.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 8.292.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.292.000,00 | | | - | - | - | | 14.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.14.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 0 Dokumen | 2.292.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.292.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 4.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.14.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 2 Dokumen | 0 Dokumen | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.500.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.14.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 2 Dokumen | 0 Dokumen | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.500.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.14.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 2 Dokumen | 0 Dokumen | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.500.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.14.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 2 Dokumen | 0 Dokumen | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.500.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.14.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 24 Laporan | 0 Laporan | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 4.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.14.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Tertib Administrasi Keuangan | | | | - | 100 % | 4.790.775.150,00 | 5.527.156.745,00 | 4.808.241.348,00 | 17.466.198,00 | | | - | - | - | | 4.792.768.850,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.14.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 50 Orang/b ulan | 65 Orang/b ulan | 4.788.775.150,00 | 5.527.156.745,00 | 4.808.241.348,00 | 19.466.198,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 4.788.768.850,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.14.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 2 Laporan | 0 Laporan | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 4.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | | - | - | - | - | - | - | - | **5.426.865.150,00** | **5.782.477.145,00** | **5.063.561.748,00** | - | - | - | - | - | - | - | **5.651.768.850,00** | - |
| | 2.14.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | - | 100 % | 91.800.000,00 | 34.010.000,00 | 34.010.000,00 | -57.790.000,00 | | | - | - | - | | 117.800.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.14.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 3.000.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | -1.200.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 4.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.14.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 15.000.000,00 | 9.719.000,00 | 9.719.000,00 | -5.281.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 20.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.14.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 12.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | -8.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 15.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.14.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.800.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.14.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 10.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | -7.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 12.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.14.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 50.000.000,00 | 15.491.000,00 | 15.491.000,00 | -34.509.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 65.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.14.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 180.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -180.000.000,00 | | | - | - | - | | 205.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.14.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 1 Unit | 0 Unit | 36.759.000,00 | 0,00 | 0,00 | -36.759.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 55.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.14.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 20 Unit | 0 Unit | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.14.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 10 Unit | 0 Unit | 93.241.000,00 | 0,00 | 0,00 | -93.241.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.14.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | - | 100 % | 151.200.000,00 | 128.420.400,00 | 128.420.400,00 | -22.779.600,00 | | | - | - | - | | 157.200.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.14.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.14.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 35.000.000,00 | 48.220.400,00 | 48.220.400,00 | 13.220.400,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 40.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.14.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 115.200.000,00 | 79.200.000,00 | 79.200.000,00 | -36.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 115.200.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.14.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik | | | | - | 100 % | 204.798.000,00 | 92.890.000,00 | 92.890.000,00 | -111.908.000,00 | | | - | - | - | | 365.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.14.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 15 Unit | 15 Unit | 183.090.000,00 | 86.590.000,00 | 86.590.000,00 | -96.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 300.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.14.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 25 Unit | 25 Unit | 10.000.000,00 | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | -3.700.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 20.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.14.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 0 Unit | 11.708.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.708.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 45.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| 2, | **2.14.02** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | **Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan** | | | | - | **13,6<br>2,34<br>79,8 -<br>-<br>Indeks** | **201.481.000,00** | **48.600.000,00** | **48.600.000,00** | **200,00** | | | | | | | **201.481.200,00** | |
| | 2.14.02.2.01 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | - | | | | - | - | 60.862.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.862.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 60.862.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.14.02.2.01.0016 | Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan | | | | 13 Kegiatan | 0 Kegiatan | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | -<br>- | | | 15.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.14.02.2.01.0016 | Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.14.02.2.01.0023 | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | | | | 13 Kegiatan | 0 Kegiatan | 15.862.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.862.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 15.862.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.14.02.2.01.0027 | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal | | | | 13 Satuan Pendidikan | 0 Satuan Pendidikan | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 15.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.14.02.2.02 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Jumlah Penduduk Sebagai Sasaran Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | - | 56 % | 140.619.000,00 | 48.600.000,00 | 48.600.000,00 | -92.019.000,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 140.619.200,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.14.02.2.02.0012 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | | | | 26 Laporan | 26 Laporan | 48.600.000,00 | 48.600.000,00 | 48.600.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 48.600.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.14.02.2.02.0013 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | | | | 156 Dokumen | 0 Dokumen | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 60.000.200,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.14.02.2.02.0018 | Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana | | | | 13 Laporan | 0 Laporan | 32.019.000,00 | 0,00 | 0,00 | -32.019.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 32.019.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 3, | **2.14.03** | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | **Persentase Kebutuhan Ber KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)**<br>**Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern**<br>**Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri**<br>**Angka Prevalensi Kontrasesi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)** | | | | - | **12**<br>**13,1**<br>**82,5**<br>**69,60**<br>**65,82 %**<br>**%**<br>**%**<br>**%**<br>**%** | **3.398.554.000,00** | **1.057.185.000,00** | **1.050.585.000,00** | **-111.275.800,00** | | | | | | | **3.287.278.200,00** | |
| | 2.14.03.2.01 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Persentase Kecamatan yang Mendapatkan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | | - | 100 % | 1.502.800.000,00 | 238.300.000,00 | 235.000.000,00 | -1.267.800.000,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 1.502.800.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.14.03.2.01.0010 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | | | | 156<br>Laporan | 156<br>Laporan | 917.800.000,00 | 195.000.000,00 | 195.000.000,00 | -722.800.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 917.800.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.14.03.2.01.0011 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | | | | 130<br>Laporan | 0 Laporan | 260.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -260.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 260.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.14.03.2.01.0012 | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | | | | 12<br>Dokumen | 0 Dokumen | 125.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -125.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 125.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.14.03.2.01.0014 | Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | | | | 40<br>Organisasi | 40<br>Organisasi | 200.000.000,00 | 43.300.000,00 | 40.000.000,00 | -160.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 200.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.14.03.2.02 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang didayagunakan untuk mendukung program bangga kencana | | | | - | 100 % | 638.312.000,00 | 60.750.000,00 | 60.750.000,00 | -577.562.000,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 638.312.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.14.03.2.02.0004 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | | | | 719 Orang | 719 Orang | 601.200.000,00 | 60.750.000,00 | 60.750.000,00 | -540.450.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 601.200.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.14.03.2.02.0007 | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | | | | 13 Laporan | 0 Laporan | 37.112.000,00 | 0,00 | 0,00 | -37.112.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 37.112.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.14.03.2.03 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | | | | - | 28 % | 903.642.000,00 | 627.335.000,00 | 627.335.000,00 | -276.307.000,00 | | | - | - | - | | 958.666.200,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.14.03.2.03.0001 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | | 26 Fasyankes Laporan | 26 Fasyankes Laporan | 53.400.000,00 | 23.400.000,00 | 23.400.000,00 | -30.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA | - | - | | | 23.400.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.14.03.2.03.0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | | | | 1743 Orang | 1409 Orang | 699.242.000,00 | 603.935.000,00 | 603.935.000,00 | -95.307.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA | - | - | | | 769.166.200,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.14.03.2.03.0005 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 121.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -121.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-KEL UARGA BERENCANA | - | - | | | 133.100.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.14.03.2.03.0008 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | | 26 Laporan | 0 Laporan | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | - | - | | | 33.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.14.03.2.04 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Persentase Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten yang berperan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | | | | - | 65 % | 353.800.000,00 | 130.800.000,00 | 127.500.000,00 | -226.300.000,00 | | | - | - | - | | 187.500.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.14.03.2.04.0006 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | | | | 58 Kampung KB Kampung | 17 Kampung | 324.800.000,00 | 127.500.000,00 | 127.500.000,00 | -197.300.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, | DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA | - | - | | | 127.500.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.14.03.2.04.0007 | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | | | | 12 Dokumen | 0 Dokumen | 29.000.000,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | -29.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA | - | - | | | 60.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| 4, | **2.14.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | **Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga Indeks Lansia Berdaya Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja** | | | | - | **70 62 85, 1 % Indeks Indeks** | **1.899.600.700,00** | **1.623.600.000,00** | **1.630.200.000,00** | **173.606.300,00** | | | | | | | **2.073.207.000,00** | |
| | 2.14.04.2.01 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | - | | | | - | - | 276.000.700,00 | 0,00 | 0,00 | -276.000.700,00 | | | - | - | - | | 446.007.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.14.04.2.01.0014 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | | | | 60 Keluarga | 0 Keluarga | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 30.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| | 2.14.04.2.01.0014 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.14.04.2.01.0017 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | | | | 13 Laporan | 0 Laporan | 85.000.700,00 | 0,00 | 0,00 | -85.000.700,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 85.007.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.14.04.2.01.0018 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia | | | | 13 Unit | 0 Unit | 130.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -130.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 300.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.14.04.2.01.0020 | Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) | | | | 4345 Orang | 0 Orang | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 1.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.14.04.2.02 | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Persentase Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kabupaten yang Berperan dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | | - | 100 % | 1.623.600.000,00 | 1.623.600.000,00 | 1.630.200.000,00 | 6.600.000,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 1.627.200.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.14.04.2.02.0005 | Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | | | | 130 laporan | 130 laporan | 738.000.000,00 | 369.000.000,00 | 370.500.000,00 | -367.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 738.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.14.04.2.02.0006 | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan | | | | 130 laporan | 130 laporan | 885.600.000,00 | 1.254.600.000,00 | 1.259.700.000,00 | 374.100.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 889.200.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | | **DINAS PERHUBUNGAN** | | | | | | | **16.527.683.989,00** | **15.792.334.625,00** | **16.755.969.221,00** | **228.285.232,00** | | | | | | | **21.437.807.821,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **16.527.683.989,00** | **15.792.334.625,00** | **16.755.969.221,00** | **228.285.232,00** | | | | | | | **21.437.807.821,00** | |
| | **2.15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | | **16.527.683.989,00** | **15.792.334.625,00** | **16.755.969.221,00** | **228.285.232,00** | | | | | | | **21.437.807.821,00** | |
| 1, | **2.15.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | **100 %** | **100 %** | **15.647.720.989,00** | **7.868.416.415,00** | **8.054.263.011,00** | **3.146.712.832,00** | | | | | | | **18.794.433.821,00** | |
| | | **[ Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintah ]** | - | - | - | - | - | - | **15.647.720.989,00** | **7.868.416.415,00** | **8.054.263.011,00** | - | - | - | - | - | - | - | **18.794.433.821,00** | - |
| | 2.15.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 5.811.247.832,00 | 7.550.662.415,00 | 7.736.509.011,00 | 1.925.261.179,00 | | | - | - - | Pegawai Dinas Perhubungan | | 7.035.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 77 Orang/b ulan | 163 Orang/ bulan | 5.788.072.232,00 | 7.545.334.415,00 | 7.731.181.011,00 | 1.943.108.779,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 7.000.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 15.000.000,00 | 5.328.000,00 | 5.328.000,00 | -9.672.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 20.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 0 Laporan | 8.175.600,00 | 0,00 | 0,00 | -8.175.600,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 15.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | **15.647.720.989,00** | **7.868.416.415,00** | **8.054.263.011,00** | - | - | - | - | - | - | - | **18.794.433.821,00** | - |
| | 2.15.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatnya Pelayanan Umum Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 233.218.000,00 | 53.402.000,00 | 53.402.000,00 | -179.816.000,00 | | | - | - | ASN Dinas Perhubungan | | 300.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 2 Paket | 8.530.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | -6.330.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 10.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 2 Paket | 13.123.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | -8.123.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 15.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 2 Paket | 54.865.000,00 | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | -40.465.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 60.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Paket | 6 Paket | 35.985.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | -23.985.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 40.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 0 Laporan | 20.583.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.583.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 25.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 100.132.000,00 | 19.802.000,00 | 19.802.000,00 | -80.330.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>OPSEN PKB | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Meningkatnya Ketersediaan Barang Milik Daerah | | | | 100 % | 0 % | 190.448.000,00 | 0,00 | 0,00 | -190.448.000,00 | | | - | - | Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan | | 529.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 94 Unit | 0 Unit | 35.530.000,00 | 0,00 | 0,00 | -35.530.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 250.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 30 Unit | 0 Unit | 154.918.000,00 | 0,00 | 0,00 | -154.918.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 279.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | **[ Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintah ]** | - | - | - | - | - | - | **15.647.720.989,00** | **7.868.416.415,00** | **8.054.263.011,00** | - | - | - | - | - | - | - | **18.794.433.821,00** | - |
| | 2.15.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 % | 100 % | 8.713.000.000,00 | 156.562.000,00 | 156.562.000,00 | -8.556.438.000,00 | | | - | - | Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan | | 10.097.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 2.500.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | -500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 3.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 7.903.570.000,00 | 117.142.000,00 | 117.142.000,00 | -7.786.428.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 8.500.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 2 Laporan | 8.930.000,00 | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | -7.510.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 10.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 7 Laporan | 12 Laporan | 798.000.000,00 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | -762.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PKB | - | - | | | 1.584.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | - | - | - | - | - | - | - | **15.647.720.989,00** | **7.868.416.415,00** | **8.054.263.011,00** | - | - | - | - | - | - | - | **18.794.433.821,00** | - |
| | 2.15.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah | | | | 100 % | 100 % | 699.807.157,00 | 107.790.000,00 | 107.790.000,00 | -592.017.157,00 | | | - | - | Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan | | 833.433.821,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 19 Unit | 21 Unit | 533.307.157,00 | 107.790.000,00 | 107.790.000,00 | -425.517.157,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 533.433.821,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 0 Unit | 166.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -166.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 300.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2, | **2.15.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | **Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal** | | | | **0.50 Indeks** | **11 53 Indeks (%)** | **879.963.000,00** | **7.923.918.210,00** | **8.701.706.210,00** | **1.763.411.000,00** | | | | | | | **2.643.374.000,00** | |
| | 2.15.02.2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Meningkatnya Persentase Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana Perlengkapan Jalan | | | | 75 % | 75 % | 200.080.000,00 | 7.548.297.210,00 | 8.326.085.210,00 | 8.126.005.210,00 | | | - | - | Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan | | 750.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | | | | 0 Unit | 44 Unit | 0,00 | 0,00 | 777.788.000,00 | 777.788.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 350.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.02.0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | | | | 500 Unit | 600 Unit | 200.080.000,00 | 7.548.297.210,00 | 7.548.297.210,00 | 7.348.217.210,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER | - | - | | | 400.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | **[ Indeks Kelancaran Lalu Lintas dan Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000** | - | - | - | - | - | - | **879.963.000,00** | **7.923.918.210,00** | **8.701.706.210,00** | - | - | - | - | - | - | - | **2.643.374.000,00** | - |
| | 2.15.02.2.04 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | Meningkatnya Persentase Capaian Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | | | | 100 % | 0 % | 49.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | -49.920.000,00 | | | - | - | Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan | | 100.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.04.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 49.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | -49.920.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | - | - | - | - | - | - | - | **879.963.000,00** | **7.923.918.210,00** | **8.701.706.210,00** | - | - | - | - | - | - | - | **2.643.374.000,00** | - |
| | 2.15.02.2.05 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Persentase Angkutan Umum dan Barang Yang Laik Jalan | | | | 95 % | 95 % | 250.000.000,00 | 257.621.000,00 | 257.621.000,00 | 7.621.000,00 | | | - | - | Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan | | 490.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05.0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia | | | | 0 Unit | 5000 Unit | 0,00 | 121.824.000,00 | 121.824.000,00 | 121.824.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PKB | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | 2 Orang | 2 Orang | 20.436.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.436.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 40.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05.0004 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | 5000 Dokumen | 5000 Dokumen | 137.731.900,00 | 0,00 | 0,00 | -137.731.900,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05.0007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | | | | 9 Unit | 9 Unit | 43.926.100,00 | 135.797.000,00 | 135.797.000,00 | 91.870.900,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PKB | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05.0008 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 47.906.000,00 | 0,00 | 0,00 | -47.906.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | **[ Indeks Kelancaran Lalu Lintas dan Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000** | - | - | - | - | - | - | **879.963.000,00** | **7.923.918.210,00** | **8.701.706.210,00** | - | - | - | - | - | - | - | **2.643.374.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.15.02.2.06 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Optimalnya Persentase Tercapainya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota | | | | 100 % | 100 % | 184.642.000,00 | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | -94.642.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan | - - | Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan | | 781.297.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.06.0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 32.224.000,00 | 0,00 | 0,00 | -32.224.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan | - - | | | 120.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.06.0017 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 152.418.000,00 | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | -62.418.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan | - - | | | 661.297.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | - | - | - | - | - | - | - | **879.963.000,00** | **7.923.918.210,00** | **8.701.706.210,00** | - | - | - | - | - | - | - | **2.643.374.000,00** | - |
| | 2.15.02.2.07 | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | Meningkatnya Persentase tercapainya Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | | | | 100 % | 100 % | 77.859.500,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | -75.859.500,00 | | | - | - - | Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan | | 253.623.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.07.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 60.581.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.581.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 129.438.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.07.0006 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi | | | | 12 Laporan | 1 Laporan | 17.278.500,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | -15.278.500,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 124.185.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.08 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | Meningkatnya Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ | | | | 100 % | 100 % | 72.140.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | -66.140.000,00 | | | - | - - | Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan | | 226.380.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.08.0004 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | | | | 8 Laporan | 1 Laporan | 41.950.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | -35.950.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 110.430.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.08.0007 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 30.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.190.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 115.950.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.14 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya Persentase tertibnya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota | | | | 100 % | 100 % | 45.321.500,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | -25.321.500,00 | | | - | - - | Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan | | 42.074.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.14.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 45.321.500,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | -25.321.500,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 42.074.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | **8.014.652.264,00** | **7.363.997.665,00** | **7.932.161.663,00** | **-82.490.601,00** | | | | | | | **8.710.978.649,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **8.014.652.264,00** | **7.363.997.665,00** | **7.932.161.663,00** | **-82.490.601,00** | | | | | | | **8.710.978.649,00** | |
| | **2.16** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | **7.724.654.864,00** | **7.138.037.665,00** | **7.706.201.663,00** | **-18.453.201,00** | | | | | | | **8.386.477.109,00** | |
| 1, | **2.16.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | **75 %** | **100 %** | **5.455.707.864,00** | **5.051.101.665,00** | **5.469.265.663,00** | **434.771.015,00** | | | | | | | **5.890.478.879,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.16.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah | | | | 12 Bulan | 100 % | 14.153.000,00 | 0,00 | 0,00 | -14.153.000,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 15.579.184,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | - Dokumen | 5.595.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.595.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 6.163.184,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | - Dokumen | 4.279.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.279.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 4.708.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | - Dokumen | 4.279.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.279.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 4.708.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | | **[ Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah ]** | - | - | - | - | - | - | **5.455.707.864,00** | **5.051.101.665,00** | **5.469.265.663,00** | - | - | - | - | - | - | - | **5.890.478.879,00** | - |
| | 2.16.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Tertib Administrasi Keuangan | | | | 12 bulan | 100 % | 4.881.926.145,00 | 4.696.319.035,00 | 4.771.859.849,00 | -110.066.296,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 5.370.119.860,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 52 Orang/b ulan | 59 Orang/b ulan | 4.877.647.145,00 | 4.696.319.035,00 | 4.771.859.849,00 | -105.787.296,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 5.365.411.860,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | - Laporan | 4.279.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.279.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 4.708.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 12 Bulan | 100 % | 129.804.600,00 | 34.937.817,00 | 475.137.817,00 | 345.333.217,00 | | | - | - | - | | 142.791.627,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 1.300.000,00 | 1.488.000,00 | 1.488.000,00 | 188.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.430.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | - Paket | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 3.300.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 44.422.800,00 | 9.932.000,00 | 450.132.000,00 | 405.709.200,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 48.870.694,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 11.999.800,00 | 11.917.817,00 | 11.917.817,00 | -81.983,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 13.200.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.550.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | -1.050.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 2.805.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 66.532.000,00 | 10.100.000,00 | 10.100.000,00 | -56.432.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 73.185.933,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase terselenggaranya pengadaan barang milik daerah | | | | 100 % | 100 % | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 55.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 1 Unit | - Unit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 11.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | - Unit | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 44.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 12 Bulan | 100 % | 274.624.119,00 | 284.127.847,00 | 186.551.031,00 | -88.073.088,00 | | | - | - - | - | | 191.268.208,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.570.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | -1.070.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 1.732.500,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 133.031.119,00 | 132.868.399,00 | 142.668.399,00 | 9.637.280,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 146.153.076,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 140.023.000,00 | 150.759.448,00 | 43.382.632,00 | -96.640.368,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 43.382.632,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik | | | | 80 % | 100 % | 105.200.000,00 | 35.716.966,00 | 35.716.966,00 | -69.483.034,00 | | | - | - - | - | | 115.720.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 6 Unit | 6 Unit | 97.200.000,00 | 33.636.966,00 | 33.636.966,00 | -63.563.034,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 106.920.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 20 Unit | 20 Unit | 8.000.000,00 | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 | -5.920.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 8.800.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2, | **2.16.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | **Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)** | | | | **75 %** | **82,8 %** | **404.873.000,00** | **260.000.000,00** | **410.000.000,00** | **40.636.130,00** | | | | | | | **445.509.130,00** | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | **404.873.000,00** | **260.000.000,00** | **410.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | - | **445.509.130,00** | - |
| | 2.16.02.2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota | | | | 75 % | 100 % | 404.873.000,00 | 260.000.000,00 | 410.000.000,00 | 5.127.000,00 | | | - | - | - | | 445.509.130,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.2.01.0014 | Relasi Media | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 351.085.000,00 | 253.000.000,00 | 403.000.000,00 | 51.915.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 386.203.730,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.2.01.0017 | Pelayanan Informasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan | | | | 2 Permoho nan | 2 Permoho nan | 10.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | -3.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 11.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.2.01.0019 | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah | | | | 12 Rekome ndasi | - Rekomen dasi | 21.888.000,00 | 0,00 | 0,00 | -21.888.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 24.105.400,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.2.01.0021 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis | | | | 63 Media | - Media | 21.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | -21.900.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 24.200.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 3, | **2.16.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | **Indeks SPBE ( Indeks Pemerintah Digital/Indeks Pemdi*)** | | | | **90 %** | **1,3* Indeks** | **1.864.074.000,00** | **1.826.936.000,00** | **1.826.936.000,00** | **186.415.100,00** | | | | | | | **2.050.489.100,00** | |
| | 2.16.03.2.02 | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pengelolaan E-government di lingkup Pemerintah Kabupaten /Kota | | | | 74 % | 100 % | 1.864.074.000,00 | 1.826.936.000,00 | 1.826.936.000,00 | -37.138.000,00 | | | - | - | - | | 2.050.489.100,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.02.0019 | Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.044.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | -1.344.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 4.448.400,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | | **[ Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) ]** | - | - | - | - | - | - | **1.864.074.000,00** | **1.826.936.000,00** | **1.826.936.000,00** | - | - | - | - | - | - | - | **2.050.489.100,00** | - |
| | 2.16.03.2.02.0024 | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | | | | 43 Perangkat Daerah | 43 Perangkat Daerah | 1.812.494.000,00 | 1.809.001.000,00 | 1.809.001.000,00 | -3.493.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.993.751.100,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | | - | - | - | - | - | - | - | **1.864.074.000,00** | **1.826.936.000,00** | **1.826.936.000,00** | - | - | - | - | - | - | - | **2.050.489.100,00** | - |
| | 2.16.03.2.02.0032 | Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE | | | | 1 Aplikasi | 1 Aplikasi | 55.000,00 | 1.765.000,00 | 1.765.000,00 | 1.710.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 60.500,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.02.0033 | Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 46.281.000,00 | 12.870.000,00 | 12.870.000,00 | -33.411.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.909.100,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.02.0038 | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.200.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | -600.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.320.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | **2.20** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | | | | **39.997.400,00** | **5.960.000,00** | **5.960.000,00** | **-34.037.400,00** | | | | | | | **43.997.140,00** | |
| 1, | **2.20.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | **Indeks Pembangunan Statistik (IPS)** | | | | **87 %** | **2,66 Indeks** | **39.997.400,00** | **5.960.000,00** | **5.960.000,00** | **3.999.740,00** | | | | | | | **43.997.140,00** | |
| | 2.20.02.2.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan daerah kabupaten/ kota | | | | 87 % | 100 % | 39.997.400,00 | 5.960.000,00 | 5.960.000,00 | -34.037.400,00 | | | - | - | - | | 43.997.140,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.20.02.2.01.0018 | Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk | | | | 100 % | 100 % | 9.042.500,00 | 843.000,00 | 843.000,00 | -8.199.500,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 9.946.750,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.20.02.2.01.0019 | Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. | | | | 3 0 | 3 0 | 22.280.000,00 | 5.117.000,00 | 5.117.000,00 | -17.163.000,00 | - | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 24.508.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.20.02.2.01.0020 | Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik | | | | 1 Orang | - Orang | 8.674.900,00 | 0,00 | 0,00 | -8.674.900,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 9.542.390,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | **2.21** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | | | | **250.000.000,00** | **220.000.000,00** | **220.000.000,00** | **-30.000.000,00** | | | | | | | **280.504.400,00** | |
| 1, | **2.21.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | **Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah** | | | | **47,48 %** | **38,5 %** | **250.000.000,00** | **220.000.000,00** | **220.000.000,00** | **30.504.400,00** | | | | | | | **280.504.400,00** | |
| | 2.21.02.2.01 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota | | | | 47,48 % | 100 % | 250.000.000,00 | 220.000.000,00 | 220.000.000,00 | -30.000.000,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | | | 280.504.400,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.21.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | | | | 1 Laporan | - Laporan | 19.956.000,00 | 0,00 | 0,00 | -19.956.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.21.02.2.01.0006 | Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan | | | | 1 Laporan | - Laporan | 25.004.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.004.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 27.504.400,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | | **[ Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah ]** | - | - | - | - | - | - | **250.000.000,00** | **220.000.000,00** | **220.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | - | **280.504.400,00** | - |
| | 2.21.02.2.01.0007 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian | | | | 43 Perangkat Daerah | 43 Perangkat Daerah | 205.040.000,00 | 220.000.000,00 | 220.000.000,00 | 14.960.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 253.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | | **DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH** | | | | | | | **5.471.888.553,00** | **5.092.487.739,00** | **5.052.112.714,00** | **-419.775.839,00** | | | | | | | **5.743.082.980,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **5.286.388.753,00** | **4.970.283.739,00** | **4.629.908.714,00** | **-656.480.039,00** | | | | | | | **5.548.307.980,00** | |
| | **2.17** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | | **5.286.388.753,00** | **4.970.283.739,00** | **4.629.908.714,00** | **-656.480.039,00** | | | | | | | **5.548.307.980,00** | |
| 1, | **2.17.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | **100 %** | **100 %** | **5.064.391.153,00** | **4.870.283.739,00** | **4.529.908.714,00** | **263.416.827,00** | | | | | | | **5.327.807.980,00** | |
| | | **[ Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah ]** | - | - | - | - | - | - | **5.064.391.153,00** | **4.870.283.739,00** | **4.529.908.714,00** | - | - | - | - | - | - | - | **5.327.807.980,00** | - |
| | 2.17.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 6 Dok | 80 % | 8.954.500,00 | 0,00 | 0,00 | -8.954.500,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | ASN | | 5.775.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 6.169.300,00 | 0,00 | 0,00 | -6.169.300,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 4.200.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 2.785.200,00 | 0,00 | 0,00 | -2.785.200,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 1.575.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Tertib Administrasi Keuangan | | | | 100 % | 100 % | 4.466.962.153,00 | 4.707.477.739,00 | 4.367.102.714,00 | -99.859.439,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | ASN | | 4.686.610.480,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 44 Orang/b ulan | 44 Orang/b ulan | 4.458.938.653,00 | 4.707.477.739,00 | 4.367.102.714,00 | -91.835.939,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 4.681.885.480,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 8.023.500,00 | 0,00 | 0,00 | -8.023.500,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 12 Bulan | 100 % | 111.524.500,00 | 30.770.000,00 | 30.770.000,00 | -80.754.500,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | ASN | | | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 1.548.000,00 | 1.228.000,00 | 1.228.000,00 | -320.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 24.172.700,00 | 12.495.000,00 | 12.495.000,00 | -11.677.700,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 13.271.800,00 | 8.997.000,00 | 8.997.000,00 | -4.274.800,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 3.100.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | -2.650.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 69.432.000,00 | 7.600.000,00 | 7.600.000,00 | -61.832.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor untuk PLUT dan Rumah digital | | | | 100 % | 100 % | 37.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -37.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | ASN | | | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 20 Unit | 20 Unit | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 4.305.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 14.595.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan | | | | 100 % | 100 % | 243.000.000,00 | 83.230.000,00 | 83.230.000,00 | -159.770.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | ASN | | 376.994.100,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | -500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 966.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 77.000.000,00 | 82.730.000,00 | 82.730.000,00 | 5.730.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 80.797.500,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 165.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -165.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 295.230.600,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik | | | | 100 % | 100 % | 196.950.000,00 | 48.806.000,00 | 48.806.000,00 | -148.144.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | ASN | | 152.977.650,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 29 Unit | 29 Unit | 151.800.000,00 | 46.500.000,00 | 46.500.000,00 | -105.300.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 118.579.650,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 15 Unit | 15 Unit | 10.150.000,00 | 2.306.000,00 | 2.306.000,00 | -7.844.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 0,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 34.398.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2, | **2.17.03** | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | **Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi** | | | | **-** | **5 %** | **30.000.000,00** | **45.400.000,00** | **45.400.000,00** | **1.500.000,00** | | | | | | | **31.500.000,00** | |
| | | **[ Persentase Peningkatan Koperasi yang Telah Diawasi ]** | - | - | - | - | - | - | **30.000.000,00** | **45.400.000,00** | **45.400.000,00** | - | - | - | - | - | - | - | **31.500.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.17.03.2.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Terlaksananya Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang anggotanya kewenangan Kabupaten | | | | 80 Koperasi | 80 Koperasi | 30.000.000,00 | 45.400.000,00 | 45.400.000,00 | 15.400.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" | Koperasi | | 31.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan | | | | 60 Unit Usaha | 79 Unit Usaha | 30.000.000,00 | 45.400.000,00 | 45.400.000,00 | 15.400.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" | | | 31.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 3, | **2.17.04** | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | - | | | | - | - | **10.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | | | | | | | **10.500.000,00** | |
| | | **[ Persentase Peningkatan KSP/USP yang Sehat ]** | - | - | - | - | - | - | **10.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | - | - | - | - | - | - | - | **10.500.000,00** | - |
| | 2.17.04.2.01 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya jumlah KSP/USP yang sehat | | | | 120 KSP/USP | 120 KSP/USP | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" | Koperasi | | 10.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.04.2.01.0001 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan | | | | 10 Unit Usaha | 10 Unit Usaha | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" | | | 10.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 4, | **2.17.05** | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | **Presentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan** | | | | - | **1 %** | **35.000.000,00** | **54.600.000,00** | **54.600.000,00** | **1.750.000,00** | | | | | | | **36.750.000,00** | |
| | | **[ Persentase Peningkatan Anggota Koperasi yang Mengikuti Pelatihan ]** | - | - | - | - | - | - | **35.000.000,00** | **54.600.000,00** | **54.600.000,00** | - | - | - | - | - | - | - | **36.750.000,00** | - |
| | 2.17.05.2.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten | | | | - | 50 Koperasi | 35.000.000,00 | 54.600.000,00 | 54.600.000,00 | 19.600.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" | Koperasi | | 36.750.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.05.2.01.0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | | | | 8 Orang | 316 Orang | 35.000.000,00 | 54.600.000,00 | 54.600.000,00 | 19.600.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" | | | 36.750.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 5, | **2.17.06** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | - | | | | - | - | **15.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **750.000,00** | | | | | | | **15.750.000,00** | |
| | | **[ Persentase Peningkatan Skala Usahanya ]** | - | - | - | - | - | - | **15.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | - | - | - | - | - | - | - | **15.750.000,00** | - |
| | 2.17.06.2.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya jumlah koperasi yang diberdayakan dan dilindungi | | | | 15 koperasi | 15 koperasi | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" | Koperasi | | 15.750.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.06.2.01.0002 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | | | | 30 Keluarga | 30 Keluarga | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" | | | 15.750.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 6, | **2.17.07** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | **Persentase usaha mikro dan kecil yang diberdayakan** | | | | **35 %** | **35 %** | **105.996.500,00** | **0,00** | **0,00** | **-5.196.500,00** | | | | | | | **100.800.000,00** | |
| | | **[ Persentase Usaha mikro dan Kecil yang Diberdayakan ]** | - | - | - | - | - | - | **105.996.500,00** | **0,00** | **0,00** | - | - | - | - | - | - | - | **100.800.000,00** | - |
| | 2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Terberdayakan, dan Terfasilitasinya pelaku usaha mikro. | | | | 4 kegiatan | 4 kegiatan | 105.996.500,00 | 0,00 | 0,00 | -105.996.500,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" | UKM | | 100.800.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.07.2.01.0002 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro | | | | 80 Unit Usaha | 80 Unit Usaha | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" | | | 0,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.07.2.01.0003 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan | | | | 60 Unit Usaha | 60 Unit Usaha | 2.000.200,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.200,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" | | | 0,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.07.2.01.0009 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi | | | | 10 Unit Usaha | 10 Unit Usaha | 1.999.400,00 | 0,00 | 0,00 | -1.999.400,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" | | | 0,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.07.2.01.0011 | Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | | | | 20 Unit Usaha | 20 Unit Usaha | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" | | | 0,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.07.2.01.0013 | Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | | | | 20 Unit Usaha | 20 Unit Usaha | 1.998.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.998.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" | | | 0,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.07.2.01.0014 | Penyusunan Basis Data Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata | | | | 80 Unit Usaha | 80 Unit Usaha | 60.998.800,00 | 0,00 | 0,00 | -60.998.800,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" | | | 64.050.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.07.2.01.0015 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan | | | | 60 Orang | 60 Orang | 35.000.100,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000.100,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" | | | 36.750.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 7, | **2.17.08** | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | - | | | | - | - | **26.001.100,00** | **0,00** | **0,00** | **-801.100,00** | | | | | | | **25.200.000,00** | |
| | | **[ Persentase Pelaku Usaha yang Dikembangkan ]** | - | - | - | - | - | - | **26.001.100,00** | **0,00** | **0,00** | - | - | - | - | - | - | - | **25.200.000,00** | - |
| | 2.17.08.2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Terlaksananya pengembangan jaringan infrastruktur UKM | | | | 10 kegiatan | 10 kegiatan | 26.001.100,00 | 0,00 | 0,00 | -26.001.100,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" | UKM | | 25.200.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.08.2.01.0002 | Pengembangan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | | | | 60 Unit Usaha | 60 Unit Usaha | 24.000.500,00 | 0,00 | 0,00 | -24.000.500,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" | | | 25.200.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.08.2.01.0006 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi | | | | 3 Unit Usaha | 3 Unit Usaha | 2.000.600,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.600,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" | | | 0,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | **185.499.800,00** | **122.204.000,00** | **422.204.000,00** | **236.704.200,00** | | | | | | | **194.775.000,00** | |
| | **3.30** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | | **185.499.800,00** | **122.204.000,00** | **422.204.000,00** | **236.704.200,00** | | | | | | | **194.775.000,00** | |
| 1, | **3.30.02** | **PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN** | - | | | | - | - | **10.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | | | | | | | **10.500.000,00** | |
| | | **[ Persentase Peningkatan Perusahaan yang Dikeluarkan Izin ]** | - | - | - | - | - | - | **10.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | - | - | - | - | - | - | - | **10.500.000,00** | - |
| | 3.30.02.2.02 | Penerbitan Tanda Daftar Gudang | Terlaksananya pengawasan dan peningkatan kesadaran usaha dalam mengurus perizinan | | | | 13 Kecamatan | 13 Kecamatan | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" | Pelaku Usaha | | 10.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.02.2.02.0001 | Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PRIORITAS | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | NASIONAL | DAERAH | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" | | | 10.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2, | **3.30.03** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | **Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya** | | | | **-** | **100 %** | **77.500.000,00** | **50.000.000,00** | **315.900.000,00** | **3.875.000,00** | | | | | | | **81.375.000,00** | |
| | | **[ Persentase Peningkatan Pasar Nagari yang Direvitalisasi ]** | - | - | - | - | - | - | **77.500.000,00** | **50.000.000,00** | **315.900.000,00** | - | - | - | - | - | - | - | **81.375.000,00** | - |
| | 3.30.03.2.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi | | | | 6 Unit | 100 % | 77.500.000,00 | 50.000.000,00 | 315.900.000,00 | 238.400.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" | Pasar Rakyat | | 81.375.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.03.2.01.0001 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | | | | 2 Unit | 2 Unit | 77.500.000,00 | 50.000.000,00 | 315.900.000,00 | 238.400.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" | | | 81.375.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 3, | **3.30.04** | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | **Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting** | | | | **-** | **10,21 %** | **58.000.000,00** | **58.000.000,00** | **58.000.000,00** | **2.900.000,00** | | | | | | | **60.900.000,00** | |
| | | **[ Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ]** | - | - | - | - | - | - | **58.000.000,00** | **58.000.000,00** | **58.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | - | **60.900.000,00** | - |
| | 3.30.04.2.01 | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Tersedianya Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Kabupaten | | | | 9 Jenis Sembako | 9 Jenis sembako | 25.000.000,00 | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | 4.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" | Agen dan distributor barang | | 26.250.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.04.2.01.0003 | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 25.000.000,00 | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | 4.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" | | | 26.250.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 3.30.04.2.02 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Terkendalinya harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Pasar Kabupaten | | | | 4 Kali | 4 kali | 33.000.000,00 | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | -4.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" | Masyarakat | | 34.650.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.04.2.02.0003 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 33.000.000,00 | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | -4.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" | | | 34.650.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 4, | **3.30.06** | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | **Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang** | | | | - | **10,5 %** | **39.999.800,00** | **14.204.000,00** | **48.304.000,00** | **2.000.200,00** | | | | | | | **42.000.000,00** | |
| | | **[ Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan ]** | - | - | - | - | - | - | **39.999.800,00** | **14.204.000,00** | **48.304.000,00** | - | - | - | - | - | - | - | **42.000.000,00** | - |
| | 3.30.06.2.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Terlaksananya metrologi legal berupa tera, tera ulang dan Pengawasan | | | | 13 Pasar | 13 Kecamatan | 39.999.800,00 | 14.204.000,00 | 48.304.000,00 | 8.304.200,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" | Pelaku Usaha | | 42.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.06.2.01.0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | | | | 200 Unit | 200 Unit | 39.999.800,00 | 14.204.000,00 | 48.304.000,00 | 8.304.200,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" | | | 42.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | | **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** | | | | | | | **4.864.108.588,00** | **3.540.116.072,00** | **3.291.291.868,00** | **-1.572.816.720,00** | | | | | | | **6.792.500.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **4.864.108.588,00** | **3.540.116.072,00** | **3.291.291.868,00** | **-1.572.816.720,00** | | | | | | | **6.792.500.000,00** | |
| | **2.18** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | | | **4.864.108.588,00** | **3.540.116.072,00** | **3.291.291.868,00** | **-1.572.816.720,00** | | | | | | | **6.792.500.000,00** | |
| 1, | **2.18.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah** | | | | - | **17 Dokumen** | **4.049.094.488,00** | **3.540.116.072,00** | **3.291.291.868,00** | **1.883.405.512,00** | | | | | | | **5.932.500.000,00** | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | **4.049.094.488,00** | **3.540.116.072,00** | **3.291.291.868,00** | - | - | - | - | - | - | - | **5.932.500.000,00** | - |
| | 2.18.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah | | | | - | 17 dokumen | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000.000,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 50.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.18.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 13.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.900.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 30.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 11.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.100.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 20.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Tersedianya Adminitrasi Keuangan daerah | | | | - | 12 bulan | 3.337.482.098,00 | 3.403.482.071,00 | 3.154.657.867,00 | -182.824.231,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 5.030.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 30 Orang/b ulan | 30 Orang/b ulan | 3.312.482.098,00 | 3.403.482.071,00 | 3.154.657.867,00 | -157.824.231,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 5.000.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 10.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD | | | | 19 Laporan | 19 Laporan | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 10.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 10.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Tersedianya Administrasi Pelayanan Umum Perangkat Daerah | | | | - | 12 bulan | 200.356.390,00 | 56.450.001,00 | 56.450.001,00 | -143.906.389,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 272.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 5.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 22.000.000,00 | 22.791.749,00 | 22.791.749,00 | 791.749,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 40.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 40.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 22.720.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | -16.720.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 7.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 18.000.000,00 | 12.001.252,00 | 12.001.252,00 | -5.998.748,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 20.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | -9.700.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 10.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 104.636.390,00 | 10.357.000,00 | 10.357.000,00 | -94.279.390,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 150.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | - | 12 Bulan | 77.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -77.500.000,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 100.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 5 Unit | 5 Unit | 19.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -19.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 50.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 8 Unit | 8 Unit | 58.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -58.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 50.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah | | | | - | 12 bulan | 246.988.000,00 | 23.234.000,00 | 23.234.000,00 | -223.754.000,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 320.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 500.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | -220.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 58.000.000,00 | 22.954.000,00 | 22.954.000,00 | -35.046.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 70.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 188.488.000,00 | 0,00 | 0,00 | -188.488.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 250.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Terlaksananya Administrasi Kepgawaian Daerah | | | | - | 12 bulan | 161.768.000,00 | 56.950.000,00 | 56.950.000,00 | -104.818.000,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 160.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 20 Unit | 20 Unit | 138.800.000,00 | 46.950.000,00 | 46.950.000,00 | -91.850.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 150.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 19 Unit | 19 Unit | 22.968.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | -12.968.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 10.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2, | **2.18.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | **Realisasi total terhadap target investasi** | | | | - | **90 %** | **350.000.100,00** | **0,00** | **0,00** | **-75.000.100,00** | | | | | | | **275.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.18.02.2.01 | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Terksananya Pembentukan Kebijakan dan Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal | | | | - | 20 % | 180.000.100,00 | 0,00 | 0,00 | -180.000.100,00 | | | - | Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" | - | | 150.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.02.2.01.0001 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" | | | 100.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.02.2.01.0003 | Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.000.100,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000.100,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" | | | 50.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.02.2.02 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Tesedianya Peta potensi Investasi | | | | - | 2 dokumen | 170.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -170.000.000,00 | | | - | Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" | - | | 125.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.02.2.02.0003 | Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi | | | | 1 Daerah | 1 Daerah | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" | | | 25.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.02.2.02.0004 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" | | | 100.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 3, | **2.18.03** | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | **Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi** | | | | - | **10 %** | **75.014.000,00** | **0,00** | **0,00** | **34.986.000,00** | | | | | | | **110.000.000,00** | |
| | 2.18.03.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal | | | | - | 20 % | 75.014.000,00 | 0,00 | 0,00 | -75.014.000,00 | | | - | - - | - | | 110.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.03.2.01.0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 30.007.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.007.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 50.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.03.2.01.0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.18.03.2.01.0003 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" | | | 10.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 4, | **2.18.04** | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | **Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan** | | | | - | **10 %** | **90.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **35.000.000,00** | | | | | | | **125.000.000,00** | |
| | 2.18.04.2.01 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Terlakananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal | | | | - | 20 % | 90.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000.000,00 | | | - | Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" | - | | 125.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.2.01.0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | | 1100 Pelaku Usaha | 1100 Pelaku Usaha | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" | | | 50.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.2.01.0007 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | | 50 Pelaku Usaha | 50 Pelaku Usaha | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" | | | 25.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.2.01.0008 | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha | | | | 100 Kegiatan Usaha | 100 Kegiatan Usaha | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" | | | 50.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 5, | **2.18.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | **Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam membuka Usaha** | | | | - | **12 %** | **250.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000.000,00** | | | | | | | **300.000.000,00** | |
| | 2.18.05.2.01 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksanya Pembinaan,Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal | | | | - | 20 % | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000.000,00 | | | - | Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" | - | | 300.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.05.2.01.0004 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | | | | 10 Kegiatan Usaha. | 10 Kegiatan Usaha. | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" | | | 100.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.05.2.01.0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | | | | 550 Pelaku Usaha | 550 Pelaku Usaha | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" | | | 100.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.05.2.01.0006 | Pengawasan Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | | | | 125 Kegiatan Usaha | 125 Kegiatan Usaha | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" | | | 100.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 6, | **2.18.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN** | **Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal** | | | | - | **19 Laporan** | **50.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | **50.000.000,00** | |
| | 2.18.06.2.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah Dikaji dan Dimanfaatkan | | | | - | 19 Laporan | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | | | - | Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" | - | | 50.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.06.2.01.0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | | | | 19 Dokumen | 19 Dokumen | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA" | | | 50.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | **DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA** | | | | | | | **11.777.636.698,00** | **7.970.241.927,00** | **17.739.686.485,00** | **5.962.049.787,00** | | | | | | | **13.747.000.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **10.065.636.698,00** | **7.970.241.927,00** | **17.445.228.985,00** | **7.379.592.287,00** | | | | | | | **10.447.000.000,00** | |
| | **2.19** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | | **10.065.636.698,00** | **7.970.241.927,00** | **17.445.228.985,00** | **7.379.592.287,00** | | | | | | | **10.447.000.000,00** | |
| 1, | **2.19.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah** | | | | - | **100 %** | **6.525.636.698,00** | **5.120.241.927,00** | **5.295.228.985,00** | **-568.636.698,00** | | | | | | | **5.957.000.000,00** | |
| | | **[ Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah ]** | - | - | - | - | - | - | **6.525.636.698,00** | **5.120.241.927,00** | **5.295.228.985,00** | - | - | - | - | - | - | - | **5.957.000.000,00** | - |
| | 2.19.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Persentase sinergitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah | | | | - | 12 dokumen 20 % | 71.718.000,00 | 16.016.000,00 | 16.016.000,00 | -55.702.000,00 | | | - | - - | Dokumen perencanaan dan pelaporan | | 72.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 14.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | -9.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 15.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 15.718.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.718.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 14.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 12.000.000,00 | 3.894.000,00 | 3.894.000,00 | -8.106.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 13.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.000.000,00 | 2.062.000,00 | 2.062.000,00 | -3.938.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 6.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 15.000.000,00 | 5.060.000,00 | 5.060.000,00 | -9.940.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 15.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 9.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Presentase tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah | | | | - | 100 % | 5.201.636.698,00 | 4.981.141.927,00 | 4.750.994.660,00 | -450.642.038,00 | | | - | - | ASN Disparpora | | 5.200.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 40 Orang/b ulan | 40 Orang/b ulan | 5.201.636.698,00 | 4.981.141.927,00 | 4.750.994.660,00 | -450.642.038,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 5.200.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -14.000.000,00 | | | - | - | - | | 15.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 7.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 8.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 63.090.000,00 | 0,00 | 0,00 | -63.090.000,00 | | | - | - | - | | 50.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 70 Paket | 70 Paket | 63.090.000,00 | 0,00 | 0,00 | -63.090.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase tersedianya administrasi pelayanan umum perangkat daerah | | | | - | 20 % | 190.636.000,00 | 44.433.200,00 | 44.433.200,00 | -146.202.800,00 | | | - | - | Administrasi Kantor | | 216.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5.914.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.914.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 6.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 18.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | -10.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 18.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5.728.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.728.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 6.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5.996.200,00 | 5.996.200,00 | 5.996.200,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 6.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 17.999.800,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | -9.999.800,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 18.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 12.000.000,00 | 3.990.000,00 | 3.990.000,00 | -8.010.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 12.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 124.998.000,00 | 18.447.000,00 | 18.447.000,00 | -106.551.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.19.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 477.556.000,00 | 0,00 | 0,00 | -477.556.000,00 | | | - | - | - | | 80.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 401.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | -401.040.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 4 Unit | 4 Unit | 30.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.960.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 40.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 2 Unit | 45.556.000,00 | 0,00 | 0,00 | -45.556.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 40.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah Daerah | | | | - | 20 % | 173.600.000,00 | 27.800.000,00 | 27.800.000,00 | -145.800.000,00 | | | - | - | peralatan penunjang urusan kantor | | 182.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | -1.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 2.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 3 Laporan | 2 Laporan | 60.000.000,00 | 27.300.000,00 | 27.300.000,00 | -32.700.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 60.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 111.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -111.600.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 120.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | | - | - | - | - | - | - | - | **6.525.636.698,00** | **5.120.241.927,00** | **5.295.228.985,00** | - | - | - | - | - | - | - | **5.957.000.000,00** | - |
| | 2.19.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah | | | | - | 20 % | 333.400.000,00 | 50.850.800,00 | 455.985.125,00 | 122.585.125,00 | | | - | - | Aset dan inventaris Kantor | | 142.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 26 Unit | 26 Unit | 130.000.000,00 | 48.150.000,00 | 48.150.000,00 | -81.850.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 130.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | | **[ Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah ]** | - | - | - | - | - | - | **6.525.636.698,00** | **5.120.241.927,00** | **5.295.228.985,00** | - | - | - | - | - | - | - | **5.957.000.000,00** | - |
| | 2.19.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 20 Unit | 20 Unit | 14.400.000,00 | 2.700.800,00 | 2.700.800,00 | -11.699.200,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 12.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | | - | - | - | - | - | - | - | **6.525.636.698,00** | **5.120.241.927,00** | **5.295.228.985,00** | - | - | - | - | - | - | - | **5.957.000.000,00** | - |
| | 2.19.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 189.000.000,00 | 0,00 | 405.134.325,00 | 216.134.325,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 2, | **2.19.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | - | | | | - | - | **820.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-260.000.000,00** | | | | | | | **560.000.000,00** | |
| | | **[ Persentase Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Pemuda ]** | - | - | - | - | - | - | **820.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | - | - | - | - | - | - | - | **560.000.000,00** | - |
| | 2.19.02.2.01 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 620.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -620.000.000,00 | | | - | - | - | | 480.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.2.01.0011 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda | | | | 40 Orang | 40 Orang | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.2.01.0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.2.01.0014 | Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi | | | | 60 Orang | 60 Orang | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.2.01.0015 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda | | | | 30 Orang | 30 Orang | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | - | | | 80.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.19.02.2.02 | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000.000,00 | | | - | - | - | | 80.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.2.02.0003 | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya | | | | 1 Organisasi | 1 Organisasi | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | - | | | 80.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 3, | **2.19.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | **persentase atlet yang masuk Pelatnas** | | | | **-** | **1 orang** | **2.670.000.000,00** | **2.850.000.000,00** | **12.150.000.000,00** | **1.110.000.000,00** | | | | | | | **3.780.000.000,00** | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | **2.670.000.000,00** | **2.850.000.000,00** | **12.150.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | - | **3.780.000.000,00** | - |
| | 2.19.03.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana olahraga | | | | - | 20 % | 1.300.000.000,00 | 2.800.000.000,00 | 2.800.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang | - | Gedung Olahraga | | 2.000.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.01.0005 | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia | | | | 1 Unit | 1 Unit | 1.300.000.000,00 | 2.800.000.000,00 | 2.800.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang | - | | | 2.000.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.02 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | - | 1 kegiatan | 670.000.000,00 | 0,00 | 7.800.000.000,00 | 7.130.000.000,00 | | | - | - | Atlet | | 950.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.02.0004 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | | | | 6 Kegiatan | 1 Kegiatan | 600.000.000,00 | 0,00 | 7.800.000.000,00 | 7.200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 800.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.02.0005 | Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota | | | | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.03 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah | - | | | | - | - | 260.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -260.000.000,00 | | | - | - | - | | 310.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.03.0008 | Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) | | | | 1 Pelatda | 1 Pelatda | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.03.0009 | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan | | | | 30 Orang | 30 Orang | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.03.0010 | pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | - | | | 60.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.04 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | Persentase peningkatan aktifnya Induk Organisasi Keolahragaan | | | | - | 20 % | 200.000.000,00 | 50.000.000,00 | 1.550.000.000,00 | 1.350.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang | - | Organisasi Olahraga | | 300.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.04.0006 | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | 50.000.000,00 | 1.550.000.000,00 | 1.350.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang | - | | | 300.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.05 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | - | | | | - | - | 240.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -240.000.000,00 | | | - | - | - | | 220.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.05.0006 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | - | | | 60.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.05.0007 | Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.05.0008 | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | - | | | 60.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 4, | **2.19.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | **Meningkatnya kualitas kepramukaan** | | | | **-** | **10 %** | **50.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000.000,00** | | | | | | | **150.000.000,00** | |
| | | **[ Persentase Fasilitasi Pengembangan Pramuka ]** | - | - | - | - | - | - | **50.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | - | - | - | - | - | - | - | **150.000.000,00** | - |
| | 2.19.04.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | | | | - | 1 kegiatan | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang | - | Organisasi Pramuka Kab Lima Puluh Kota | | 150.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.04.2.01.0005 | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | **1.712.000.000,00** | **0,00** | **294.457.500,00** | **-1.417.542.500,00** | | | | | | | **3.300.000.000,00** | |
| | **3.26** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | | | | **1.712.000.000,00** | **0,00** | **294.457.500,00** | **-1.417.542.500,00** | | | | | | | **3.300.000.000,00** | |
| 1, | **3.26.02** | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | **Persentase Pertumbuhan kunjungan wisatawan** | | | | **-** | **25 %** | **1.022.000.000,00** | **0,00** | **294.457.500,00** | **1.078.000.000,00** | | | | | | | **2.100.000.000,00** | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | **1.022.000.000,00** | **0,00** | **294.457.500,00** | - | - | - | - | - | - | - | **2.100.000.000,00** | - |
| | 3.26.02.2.01 | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | TerlaksananyaPeningkatan Kapasitas Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | | | | - | 1 kegiatan | 200.000.000,00 | 0,00 | 294.457.500,00 | 94.457.500,00 | | | - | - | Destinasi wisata | | 1.500.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.02.2.01.0005 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) | | | | 1 Lokasi | 1 Lokasi | 200.000.000,00 | 0,00 | 294.457.500,00 | 94.457.500,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.500.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.02.2.03 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 822.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -822.000.000,00 | | | - | - | - | | 600.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.02.2.03.0003 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) | | | | 6 Lokasi | 6 Lokasi | 172.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -172.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.02.2.03.0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara | | | | 0 0 | 0 0 | 650.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -650.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 400.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 2, | **3.26.03** | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | - | | | | - | - | **320.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **180.000.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 3.26.03.2.01 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 320.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -320.000.000,00 | | | - | - | - | | 500.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.03.2.01.0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | 8 Kegiatan | 8 Kegiatan | 320.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -320.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 500.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 3, | **3.26.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | - | | | | - | - | **370.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **330.000.000,00** | | | | | | | **700.000.000,00** | |
| | 3.26.05.2.01 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | - | | | | - | - | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000.000,00 | | | - | - | - | | 550.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.05.2.01.0008 | Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI | | | | 30 Orang | 30 Orang | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.05.2.01.0009 | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata | | | | 800 Orang | 800 Orang | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 350.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.05.2.02 | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | - | | | | - | - | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000.000,00 | | | - | - | - | | 150.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.05.2.02.0001 | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | | | | 30 Orang | 30 Orang | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | | **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN** | | | | | | | **5.128.564.039,00** | **4.526.204.859,00** | **4.875.791.160,00** | **-252.772.879,00** | | | | | | | **6.502.840.621,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **5.128.564.039,00** | **4.526.204.859,00** | **4.875.791.160,00** | **-252.772.879,00** | | | | | | | **6.502.840.621,00** | |
| | **2.23** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | | | **5.063.564.039,00** | **4.501.205.259,00** | **4.750.791.560,00** | **-312.772.479,00** | | | | | | | **6.092.840.621,00** | |
| 1, | **2.23.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | **100 %** | **100 %** | **3.643.564.039,00** | **3.678.705.259,00** | **3.577.291.560,00** | **961.276.582,00** | | | | | | | **4.604.840.621,00** | |
| | 2.23.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 12.419.000,00 | 1.139.000,00 | 1.139.000,00 | -11.280.000,00 | | | - | - | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota | | 18.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 5.807.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | -5.007.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 6.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.612.000,00 | 339.000,00 | 339.000,00 | -6.273.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 12.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Tertib Administrasi Keuangan | | | | 100 % | 100 % | 3.327.952.039,00 | 3.422.628.689,00 | 3.321.214.990,00 | -6.737.049,00 | | | - | - | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota | | 3.928.640.621,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 448 Orang/ bulan | 435 Orang/ bulan | 3.323.752.039,00 | 3.421.555.689,00 | 3.320.141.990,00 | -3.610.049,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.919.940.621,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 4.200.000,00 | 1.073.000,00 | 1.073.000,00 | -3.127.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 8.700.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah | | | | 100 % | 100 % | 1.823.000,00 | 388.000,00 | 388.000,00 | -1.435.000,00 | | | - | - | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota | | 5.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.823.000,00 | 388.000,00 | 388.000,00 | -1.435.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 5.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 650.000,00 | 454.000,00 | 454.000,00 | -196.000,00 | | | - | - | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota | | 5.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 650.000,00 | 454.000,00 | 454.000,00 | -196.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 5.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 33.100.000,00 | 7.813.400,00 | 7.813.400,00 | -25.286.600,00 | | | - | - | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota | | 120.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 12.000.000,00 | 6.140.400,00 | 6.140.400,00 | -5.859.600,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 15.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 3.600.000,00 | 1.153.000,00 | 1.153.000,00 | -2.447.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 12.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 0 Laporan | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 10.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 0 Laporan | 14.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -14.200.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 75.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.800.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | -1.280.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 7.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 % | 100 % | 240.350.000,00 | 236.109.170,00 | 236.109.170,00 | -4.240.830,00 | | | - | - | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota | | 343.200.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 500.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | -340.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.200.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 77.850.000,00 | 73.949.170,00 | 73.949.170,00 | -3.900.830,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 90.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 252.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik | | | | 100 % | 100 % | 27.270.000,00 | 10.173.000,00 | 10.173.000,00 | -17.097.000,00 | | | - | - | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota | | 185.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 12 Unit | 12 Unit | 24.340.000,00 | 9.723.000,00 | 9.723.000,00 | -14.617.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 160.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 5 Unit | 1 Unit | 2.930.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | -2.480.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 25.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2, | **2.23.02** | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | **Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat** | | | | **7,49 %** | **58,29 Nilai** | **1.355.000.000,00** | **777.096.000,00** | **1.128.096.000,00** | **45.000.000,00** | | | | | | | **1.400.000.000,00** | |
| | 2.23.02.2.01 | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | | | | 11.071/ 26.624 judul/ eksemplar 11 orang 26 Perpust akaan | 19,87 Indeks | 495.199.000,00 | 317.682.000,00 | 317.682.000,00 | -177.517.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | Masyarakat, pelajar dan mahasiswa | | 490.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0004 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | | | | 26 Perpust akaan | 26 Perpust akaan | 79.650.000,00 | 59.108.000,00 | 59.108.000,00 | -20.542.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 125.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0011 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya | | | | 26 Perpust akaan | 26 Perpust akaan | 11.650.000,00 | 106.394.000,00 | 106.394.000,00 | 94.744.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 40.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0012 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi | | | | 40 Layanan | 0 Layanan | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 45.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0016 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 3 Orang | 0 Orang | 30.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 85.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0017 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data dan informasi Perpustakaan | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 37.904.000,00 | 0,00 | 0,00 | -37.904.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 38.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | | **[ Persentase Perpustakaan yang Dikelola, Ditata dan Dibina ]** | - | - | - | - | - | - | **1.355.000.000,00** | **777.096.000,00** | **1.128.096.000,00** | - | - | - | - | - | - | - | **1.400.000.000,00** | - |
| | 2.23.02.2.01.0018 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | | | | 350 Eksemplar | 33 Eksemplar | 40.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | -36.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 120.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0019 | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan | | | | 102 Eksemplar | 50 Eksemplar | 238.816.300,00 | 148.180.000,00 | 148.180.000,00 | -90.636.300,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 20.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | | - | - | - | - | - | - | - | **1.355.000.000,00** | **777.096.000,00** | **1.128.096.000,00** | - | - | - | - | - | - | - | **1.400.000.000,00** | - |
| | 2.23.02.2.01.0020 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK | | | | 1 Perpusta kaan | 0 Perpusta kaan | 16.678.700,00 | 0,00 | 0,00 | -16.678.700,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 17.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | | **[ Persentase Perpustakaan yang Dikelola, Ditata dan Dibina ]** | - | - | - | - | - | - | **1.355.000.000,00** | **777.096.000,00** | **1.128.096.000,00** | - | - | - | - | - | - | - | **1.400.000.000,00** | - |
| | 2.23.02.2.02 | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat | | | | 11.000 orang 79,67 % | 58,29 Nilai | 859.801.000,00 | 459.414.000,00 | 810.414.000,00 | -49.387.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sekolah, masyarakat di Kab.Lima Puluh Kota | | 910.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.02.0006 | Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya | | | | 15 Orang | 0 Orang | 65.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -65.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 80.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.02.0007 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan | | | | 13 Perpust akaan | 13 Perpust akaan | 130.000.000,00 | 62.210.000,00 | 62.210.000,00 | -67.790.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 130.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.02.0008 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1 Perpusta kaan | 1 Perpusta kaan | 34.020.000,00 | 37.270.000,00 | 388.270.000,00 | 354.250.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 80.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.02.0009 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota | | | | 600 Orang | 600 Orang | 268.617.000,00 | 220.225.000,00 | 220.225.000,00 | -48.392.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 300.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | **1.355.000.000,00** | **777.096.000,00** | **1.128.096.000,00** | - | - | - | - | - | - | - | **1.400.000.000,00** | - |
| | 2.23.02.2.02.0010 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | | | | 60 Lokus | 50 Lokus | 362.164.000,00 | 139.709.000,00 | 139.709.000,00 | -222.455.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 320.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 3, | **2.23.03** | **PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO** | **Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Yang Dimiliki** | | | | **100 %** | **100 %** | **65.000.000,00** | **45.404.000,00** | **45.404.000,00** | **23.000.000,00** | | | | | | | **88.000.000,00** | |
| | | **[ Persentase Naskah Kuno Milik Daerah yang Dilestarikan ]** | - | - | - | - | - | - | **65.000.000,00** | **45.404.000,00** | **45.404.000,00** | - | - | - | - | - | - | - | **88.000.000,00** | - |
| | 2.23.03.2.01 | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Yang Dimiliki | | | | 100 % | 100 % | 65.000.000,00 | 45.404.000,00 | 45.404.000,00 | -19.596.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | Kabupaten Lima Puluh Kota | | 88.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.03.2.01.0003 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno | | | | 1 Orang | 5 Orang | 50.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | -49.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 36.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.03.2.01.0004 | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan | | | | 30 Eksemplar | 20 Eksemplar | 15.000.000,00 | 44.904.000,00 | 44.904.000,00 | 29.904.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 52.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | **2.24** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | | | | **65.000.000,00** | **24.999.600,00** | **124.999.600,00** | **59.999.600,00** | | | | | | | **410.000.000,00** | |
| 1, | **2.24.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | **Tingkat Ketersediaan Arsip** | | | | **45,08 %** | **55,41 %** | **45.138.000,00** | **19.537.500,00** | **19.537.500,00** | **294.862.000,00** | | | | | | | **340.000.000,00** | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | **45.138.000,00** | **19.537.500,00** | **19.537.500,00** | - | - | - | - | - | - | - | **340.000.000,00** | - |
| | 2.24.02.2.01 | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip | | | | 6 unit | 100 % 11,63 % | 3.000.000,00 | 4.683.200,00 | 4.683.200,00 | 1.683.200,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | OPD/Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota | | 90.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.01.0001 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan | | | | 4800 Berkas | 800 Berkas | 1.150.000,00 | 903.200,00 | 903.200,00 | -246.800,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 55.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.01.0003 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 50 Laporan | 15 Laporan | 1.850.000,00 | 3.780.000,00 | 3.780.000,00 | 1.930.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 35.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.02 | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik | | | | 2 unit | 100 % | 20.060.000,00 | 3.509.500,00 | 3.509.500,00 | -16.550.500,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | OPD/Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota | | 50.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.02.0004 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis | | | | 45 Arsip | 45 Arsip | 20.060.000,00 | 3.509.500,00 | 3.509.500,00 | -16.550.500,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 50.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.03 | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN | | | | 1 Instansi | 10 % | 22.078.000,00 | 11.344.800,00 | 11.344.800,00 | -10.733.200,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | OPD/Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota | | 200.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.03.0001 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | | | | 34 Pengguna | 34 Pengguna | 20.078.000,00 | 3.528.000,00 | 3.528.000,00 | -16.550.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 150.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.03.0002 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 43 Laporan | 2 Laporan | 2.000.000,00 | 7.816.800,00 | 7.816.800,00 | 5.816.800,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 50.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2, | **2.24.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | **Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip** | | | | **100 %** | **23,97 %** | **19.862.000,00** | **5.462.100,00** | **105.462.100,00** | **50.138.000,00** | | | | | | | **70.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.24.03.2.02 | Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota | Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK | | | | 8 Instansi | 66,67 % | 19.862.000,00 | 5.462.100,00 | 105.462.100,00 | 85.600.100,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | OPD/Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota | | 70.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.02.0002 | Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana | | | | 35 Arsip | 4000 Arsip | 19.862.000,00 | 5.462.100,00 | 105.462.100,00 | 85.600.100,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 70.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | | **DINAS PERIKANAN** | | | | | | | **7.947.166.344,00** | **5.248.230.753,00** | **6.059.990.686,00** | **-1.887.175.658,00** | | | | | | | **6.258.052.886,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | **7.947.166.344,00** | **5.248.230.753,00** | **6.059.990.686,00** | **-1.887.175.658,00** | | | | | | | **6.258.052.886,00** | |
| | **3.25** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | **7.947.166.344,00** | **5.248.230.753,00** | **6.059.990.686,00** | **-1.887.175.658,00** | | | | | | | **6.258.052.886,00** | |
| 1, | **3.25.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | **100 %** | **100 %** | **5.047.246.480,00** | **4.892.230.753,00** | **4.387.596.186,00** | **-663.141.960,00** | | | | | | | **4.384.104.520,00** | |
| | 3.25.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah | | | | 100 % | 100 % | 55.953.000,00 | 13.910.000,00 | 13.910.000,00 | -42.043.000,00 | | | - | - | Dinas Perikanan | | 49.880.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 15.878.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.878.000,00 | - | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 11.120.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 0 0 | 0 0 | 40.075.000,00 | 13.910.000,00 | 13.910.000,00 | -26.165.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 38.760.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Serta Penyusunan Laporan OPD | | | | 100 % | 100 % | 4.194.134.580,00 | 4.632.557.753,00 | 4.127.923.186,00 | -66.211.394,00 | | | - | - | Pegawai Dinas Perikanan | | 3.831.761.352,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 39 Orang/b ulan | 40 Orang/b ulan | 4.194.134.580,00 | 4.632.557.753,00 | 4.127.923.186,00 | -66.211.394,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.831.761.352,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 128.813.900,00 | 46.970.000,00 | 46.970.000,00 | -81.843.900,00 | | | - | - | Dinas Perikanan | | 99.741.168,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2.766.000,00 | 496.000,00 | 496.000,00 | -2.270.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 27.081.800,00 | 13.336.300,00 | 13.336.300,00 | -13.745.500,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 23.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2.202.400,00 | 1.288.700,00 | 1.288.700,00 | -913.700,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 7.502.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 18.910.200,00 | 672.000,00 | 672.000,00 | -18.238.200,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 10.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 2.286.000,00 | 2.082.000,00 | 2.082.000,00 | -204.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 6.580.000,00 | 975.000,00 | 975.000,00 | -5.605.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 12.375.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 68.987.500,00 | 28.120.000,00 | 28.120.000,00 | -40.867.500,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 41.864.168,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pelaksanaan Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 % | 100 % | 231.060.000,00 | 113.393.000,00 | 113.393.000,00 | -117.667.000,00 | | | - | - | Dinas Perikanan | | 158.860.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.200.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | -1.600.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 48.860.000,00 | 40.793.000,00 | 40.793.000,00 | -8.067.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 48.860.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 180.000.000,00 | 72.000.000,00 | 72.000.000,00 | -108.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 108.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 % | 100 % | 437.285.000,00 | 85.400.000,00 | 85.400.000,00 | -351.885.000,00 | | | - | - | - | | 243.862.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 49 Unit | 49 Unit | 303.025.000,00 | 83.600.000,00 | 83.600.000,00 | -219.425.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 180.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 39 Unit | 39 Unit | 15.460.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | -13.660.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 0 Unit | 118.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -118.800.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 61.862.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| 2, | **3.25.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | **Persentase Peningkatan Produksi Tangkap** | | | | **2,13 %/Tahun** | **2,13 %/Tahun** | **196.976.000,00** | **25.000.000,00** | **284.200.000,00** | **5.914.000,00** | | | | | | | **202.890.000,00** | |
| | 3.25.03.2.01 | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Terlaksananya Pembinaan bagi KUB<br>Terlaksananya Pengadaan Perahu dan Sarana Penangkap Ikanuntuk KUB | | | | 12 Unit<br>16 Dokume ntasi | 12 Unit<br>16 Dokume ntasi | 71.385.000,00 | 0,00 | 0,00 | -71.385.000,00 | | | - | - | - | | 73.530.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.03.2.01.0004 | Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia | | | | 12 Unit | 12 Unit | 71.385.000,00 | 0,00 | 0,00 | -71.385.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 73.530.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.03.2.02 | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Sumber Daya Ikan untuk POKMASWAS<br>Terlaksananya Pembinaan bagi POKMASWAS dan KUB<br>Terlaksananya pengadaan benih dan pakan untuk Pokmaswas | | | | 24 Dokume ntasi<br>3 Dokumen<br>3 Paket | 30 Dokume ntasi<br>6 Kali<br>6 Paket | 125.591.000,00 | 25.000.000,00 | 284.200.000,00 | 158.609.000,00 | | | - | - | KUB dan Pokmaswas | | 129.360.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.03.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya | | | | 74 Orang | 100 Orang | 125.591.000,00 | 25.000.000,00 | 284.200.000,00 | 158.609.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG | - | - | | | 129.360.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| 3, | **3.25.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | **Jumlah produksi budidaya** | | | | **3,06 %/Tahun** | **40720,2 Ton** | **2.269.919.864,00** | **271.000.000,00** | **1.286.148.000,00** | **-1.009.046.498,00** | | | | | | | **1.260.873.366,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 3.25.04.2.02 | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti bimbingan teknis<br>Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang mendapatkan demplot pembenihan ikan, bantuan benih dan pakan ikan, kolam terpal serta penyediaan bahan promosi ikan gurami sago<br>Jumlah obat-obatan ikan dan pengujian sampel ikan<br>Terlaksananya bantuan sosial Budikdamber beserta bimtek<br>Terlaksananya penilaian kelas, pembinaan dan penumbuhan kelompok perikanan<br>Terlaksananya rakor dan training petugas dan penyuluh perikanan<br>Terlaksananya sosialisasi penumbuhan kelembagaan perikanan dan kegiatan ketahanan pangan | | | | 13<br>Kecamatan 150 KK<br>15<br>Kelompok 1 Paket<br>3 Kegiatan | 13<br>Kecamatan 20<br>Kelompok 25 Paket<br>2 Kali<br>2 Paket<br>50 KK<br>8 Kali | 2.113.651.064,00 | 233.000.000,00 | 792.301.500,00 | -1.321.349.564,00 | | | - | -<br>- | Kelompok Usaha Perikanan | | 619.569.093,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.04.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas | | | | 85<br>Kelompok | 95<br>Kelompok | 672.946.064,00 | 100.500.000,00 | 390.145.500,00 | -282.800.564,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | -<br>- | | | 237.047.270,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan | | | | 32<br>Kelompok | 32<br>Kelompok | 610.709.000,00 | 0,00 | 0,00 | -610.709.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"<br>Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 268.530.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.04.2.02.0004 | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | | | | 206<br>Kelompok | 30<br>Kelompok | 829.996.000,00 | 132.500.000,00 | 402.156.000,00 | -427.840.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | -<br>- | | | 113.991.823,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.04.2.04 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Jumlah sarana dan prasarana Balai Benih Ikan | | | | 13<br>Kecamatan 7 Unit | 7 Unit | 156.268.800,00 | 38.000.000,00 | 493.846.500,00 | 337.577.700,00 | | | - | -<br>- | Pokdakan dan Balai Benih Ikan | | 641.304.273,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.04.2.04.0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 18 Unit | 7 Unit | 156.268.800,00 | 38.000.000,00 | 493.846.500,00 | 337.577.700,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 641.304.273,00 | DINAS PERIKANAN |
| 4, | **3.25.06** | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | **Jumlah produksi hasil olahan perikanan Konsumsi Ikan Masyarakat** | | | | **1,27<br>41,24<br>40 %<br>Kg/Kapita/ Tahun<br>Kg/Kapita/ Tahun dan 5%/Tahun** | **400<br>22 Ton Kg/Kapita/ Tahun** | **433.024.000,00** | **60.000.000,00** | **102.046.500,00** | **-22.839.000,00** | | | | | | | **410.185.000,00** | |
| | 3.25.06.2.01 | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | Sosialisasi Pengolahan Ikan Untuk Ibuk Anak Stunting<br>Terlaksananya Bimbingan Teknis pengolahan hasil perikanan untuk Poklahsar<br>Terlaksananya Pembinaan bagi Pokhlasar dan Terdatanya Harga Ikan Konsumsi<br>Terlaksananya Rehab Billboard Gemarikan | | | | 13<br>Dokumen 1 Kegiatan<br>280 Meter<br>2 Dokumen<br>2 Kegiatan<br>3 Kegiatan | 12<br>Dokumen 1 Kali<br>1 Paket<br>312 Meter | 433.024.000,00 | 60.000.000,00 | 102.046.500,00 | -330.977.500,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"<br>Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 410.185.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.06.2.01.0005 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko | | | | 12<br>Dokumen | 12<br>Dokumen | 433.024.000,00 | 60.000.000,00 | 102.046.500,00 | -330.977.500,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"<br>Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 410.185.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | | **DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN** | | | | | | | **17.698.131.611,00** | **16.330.357.544,00** | **13.773.221.367,00** | **-3.924.910.244,00** | | | | | | | **19.648.104.000,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | **17.698.131.611,00** | **16.330.357.544,00** | **13.773.221.367,00** | **-3.924.910.244,00** | | | | | | | **19.648.104.000,00** | |
| | **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | **17.698.131.611,00** | **16.330.357.544,00** | **13.773.221.367,00** | **-3.924.910.244,00** | | | | | | | **19.648.104.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1, | **3.27.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | | | | - | - | **15.546.758.176,00** | **15.220.050.544,00** | **8.078.786.367,00** | **526.345.824,00** | | | | | | | **16.073.104.000,00** | |
| | | **[ Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah ]** | - | - | - | - | - | - | **15.546.758.176,00** | **15.220.050.544,00** | **8.078.786.367,00** | - | - | - | - | - | - | - | **16.073.104.000,00** | - |
| | 3.27.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 140.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -140.500.000,00 | | | - | - | - | | 161.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 0 Dokumen | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 20.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | - | - | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000.000,00 | - | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 10.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 12.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 4.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000.000,00 | - | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 5.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 14 Laporan | 0 Laporan | 23.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -23.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 25.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 1 Laporan | 0 Laporan | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 85.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | **15.546.758.176,00** | **15.220.050.544,00** | **8.078.786.367,00** | - | - | - | - | - | - | - | **16.073.104.000,00** | - |
| | 3.27.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 14.384.519.674,00 | 14.676.101.044,00 | 7.431.146.867,00 | -6.953.372.807,00 | | | - | - | - | | 15.019.900.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 173 Orang/ bulan | 65 Orang/b ulan | 14.366.633.312,00 | 14.676.101.044,00 | 7.431.146.867,00 | -6.935.486.445,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 15.000.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 12.403.962,00 | 0,00 | 0,00 | -12.403.962,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 13.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.854.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.854.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.900.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.457.700,00 | 0,00 | 0,00 | -2.457.700,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1.170.700,00 | 0,00 | 0,00 | -1.170.700,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 3.27.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 6.617.002,00 | 0,00 | 0,00 | -6.617.002,00 | | | - | - | - | | 6.500.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.437.952,00 | 0,00 | 0,00 | -2.437.952,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.179.050,00 | 0,00 | 0,00 | -4.179.050,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 4.500.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 2.212.500,00 | 1.482.500,00 | 1.482.500,00 | -730.000,00 | | | - | - | - | | 2.500.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.212.500,00 | 1.482.500,00 | 1.482.500,00 | -730.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 2.500.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 10.180.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.180.000,00 | | | - | - | - | | 10.699.500,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.940.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.940.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 5.197.500,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 175 Dokumen | 175 Dokumen | 5.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.240.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 5.502.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 271.200.000,00 | 324.317.000,00 | 428.007.000,00 | 156.807.000,00 | | | - | - | - | | 277.549.500,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 12.078.000,00 | 12.078.000,00 | 12.078.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 12.681.900,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 0 0 | 0 0 | 10.300.000,00 | 10.300.000,00 | 10.300.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 10.815.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | - | 0 0 | 80.010.000,00 | 30.060.600,00 | 30.060.600,00 | -49.949.400,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 84.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 24.812.000,00 | 35.991.400,00 | 35.991.400,00 | 11.179.400,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 26.052.600,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 7.000.000,00 | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | -5.320.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 7.500.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 50 Laporan | 50 Laporan | 137.000.000,00 | 234.207.000,00 | 337.897.000,00 | 200.897.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT | - | - | | | 136.500.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -24.000.000,00 | | | - | - | - | | 25.200.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 2 Unit | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -24.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 25.200.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 459.400.000,00 | 148.050.000,00 | 148.050.000,00 | -311.350.000,00 | | | - | - | - | | 439.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 5.300.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 19 Laporan | 19 Laporan | 146.000.000,00 | 83.250.000,00 | 83.250.000,00 | -62.750.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 153.300.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 43 Laporan | 2 Laporan | 308.400.000,00 | 64.800.000,00 | 64.800.000,00 | -243.600.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 280.400.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 248.129.000,00 | 70.100.000,00 | 70.100.000,00 | -178.029.000,00 | | | - | - | - | | 130.755.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 140 Unit | 140 Unit | 150.029.000,00 | 70.100.000,00 | 70.100.000,00 | -79.929.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | | | 25.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 62 Unit | 62 Unit | 48.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -48.100.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.505.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 19 Unit | 19 Unit | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 55.250.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| 2, | **3.27.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **Peningkatan Produksi Tanaman Pangan** | | | | - | **2 %** | **338.922.135,00** | **785.307.000,00** | **785.307.000,00** | **51.077.865,00** | | | | | | | **390.000.000,00** | |
| | | **[ Persentase Peningkatan Sarana Pertanian yang Berkualitas ]** | - | - | - | - | - | - | **338.922.135,00** | **785.307.000,00** | **785.307.000,00** | - | - | - | - | - | - | - | **390.000.000,00** | - |
| | 3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Jumlah Pengawasan dan Pendampingan Penggunaan Sarana Pertanian | | | | - | 2 Laporan | 238.922.135,00 | 145.307.000,00 | 145.307.000,00 | -93.615.135,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan | - | Kelompok Tani | | 265.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.02.2.01.0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 160.307.000,00 | 120.307.000,00 | 120.307.000,00 | -40.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan | - | | | 185.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.02.2.01.0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 78.615.135,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | -53.615.135,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing "SAKATO UNGGUL" Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing "SAKATO UNGGUL" | | | 80.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | | - | - | - | - | - | - | - | **338.922.135,00** | **785.307.000,00** | **785.307.000,00** | - | - | - | - | - | - | - | **390.000.000,00** | - |
| | 3.27.02.2.02 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 100.000.000,00 | 640.000.000,00 | 640.000.000,00 | 540.000.000,00 | | | - | - | - | | 125.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.02.2.02.0003 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | 640.000.000,00 | 640.000.000,00 | 540.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 125.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| 3, | **3.27.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | - | | | | - | - | **1.232.451.300,00** | **180.000.000,00** | **4.694.093.000,00** | **567.548.700,00** | | | | | | | **1.800.000.000,00** | |
| | | **[ Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian yang Berkualitas ]** | - | - | - | - | - | - | **1.232.451.300,00** | **180.000.000,00** | **4.694.093.000,00** | - | - | - | - | - | - | - | **1.800.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 3.27.03.2.01 | Pengembangan Prasarana Pertanian | - | | | | - | - | 632.451.300,00 | 180.000.000,00 | 594.093.000,00 | -38.358.300,00 | | | - | Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing "SAKATO UNGGUL" Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing "SAKATO UNGGUL" | - | | 1.100.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | | | - | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 225.996.000,00 | 225.996.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA DBH SAWIT | - | Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing "SAKATO UNGGUL" Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing "SAKATO UNGGUL" | | | 350.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.03.2.01.0015 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 300.000.000,00 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | -180.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 400.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.03.2.01.0017 | Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 332.451.300,00 | 60.000.000,00 | 248.097.000,00 | -84.354.300,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DBH SAWIT | - | - | | | 350.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.03.2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | - | | | | - | - | 600.000.000,00 | 0,00 | 4.100.000.000,00 | 3.500.000.000,00 | | | - | - | - | | 700.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.03.2.02.0003 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | | | | 4 Unit | 25 Unit | 400.000.000,00 | 0,00 | 4.100.000.000,00 | 3.700.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABU PATEN/KOTA | - | - | | | 450.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.03.2.02.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi | | | | 2 Unit | 0 Unit | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 250.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| 4, | **3.27.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | - | | | | - | - | **155.000.000,00** | **15.000.000,00** | **15.000.000,00** | **345.000.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | | **[ Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Berkualitas ]** | - | - | - | - | - | - | **155.000.000,00** | **15.000.000,00** | **15.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | - | **500.000.000,00** | - |
| | 3.27.05.2.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 155.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | -140.000.000,00 | | | - | - | - | | 500.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.05.2.01.0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | | | | 4 Ha | 1 Ha | 125.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | -115.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 150.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.05.2.01.0002 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang | | | | 3 Ha | 1 Ha | 30.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | -25.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 350.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| 5, | **3.27.06** | **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** | - | | | | - | - | **25.000.000,00** | **10.000.000,00** | **80.035.000,00** | **355.000.000,00** | | | | | | | **380.000.000,00** | |
| | | **[ Persentase Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian ]** | - | - | - | - | - | - | **25.000.000,00** | **10.000.000,00** | **80.035.000,00** | - | - | - | - | - | - | - | **380.000.000,00** | - |
| | 3.27.06.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 25.000.000,00 | 10.000.000,00 | 80.035.000,00 | 55.035.000,00 | | | - | - | - | | 380.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.06.2.01.0002 | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | | | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 70.035.000,00 | 70.035.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SAWIT | - | - | | | 350.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.06.2.01.0005 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 25.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | -15.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 30.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| 6, | **3.27.07** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | - | | | | - | - | **400.000.000,00** | **120.000.000,00** | **120.000.000,00** | **105.000.000,00** | | | | | | | **505.000.000,00** | |
| | | **[ Peningkatan Kelas Kelompok Tani ]** | - | - | - | - | - | - | **400.000.000,00** | **120.000.000,00** | **120.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | - | **505.000.000,00** | - |
| | 3.27.07.2.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | - | | | | - | - | 400.000.000,00 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | -280.000.000,00 | | | - | - | - | | 505.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.07.2.01.0001 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | 13 Unit | 0 Unit | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 55.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.07.2.01.0003 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | | | | 13 Unit | 0 Unit | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN | - | - | | | 200.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.07.2.01.0005 | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi | | | | 6 Unit | 5 Unit | 200.000.000,00 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | -80.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | - | - | | | 250.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| | | **DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN** | | | | | | | **11.332.829.976,00** | **10.204.850.445,00** | **10.725.043.009,00** | **-607.786.967,00** | | | | | | | **12.467.762.974,00** | |
| | | **3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | **11.332.829.976,00** | **10.204.850.445,00** | **10.725.043.009,00** | **-607.786.967,00** | | | | | | | **12.467.762.974,00** | |
| | | **3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | **11.332.829.976,00** | **10.204.850.445,00** | **10.725.043.009,00** | **-607.786.967,00** | | | | | | | **12.467.762.974,00** | |
| 1, | **3.27.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan penunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah** | | | | - | **100 %** | **10.659.399.276,00** | **9.504.850.445,00** | **8.075.043.009,00** | **1.067.819.993,00** | | | | | | | **11.727.219.269,00** | |
| | | **[ Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintah ]** | - | - | - | - | - | - | **10.659.399.276,00** | **9.504.850.445,00** | **8.075.043.009,00** | - | - | - | - | - | - | - | **11.727.219.269,00** | - |
| | 3.27.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 36.775.100,00 | 0,00 | 0,00 | -36.775.100,00 | | | - | - | - | | 40.452.610,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 4.400.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | -450.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 495.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 550.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | -550.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 605.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 875.000,00 | 0,00 | 0,00 | -875.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 962.500,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 30.000.100,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000.100,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 33.000.110,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 440.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Tertib Administrasi Keuangan | | | | - | 100 % | 9.942.274.385,00 | 9.340.148.345,00 | 7.910.340.909,00 | -2.031.933.476,00 | | | - | - | - | | 10.936.501.824,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 96 Orang/b ulan | 96 Orang/b ulan | 9.939.324.385,00 | 9.340.148.345,00 | 7.910.340.909,00 | -2.028.983.476,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 10.933.256.824,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 440.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 475.000,00 | 0,00 | 0,00 | -475.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 522.500,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | -325.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 357.500,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 330.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | -450.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 495.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | -450.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 495.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | -550.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 605.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 1.762.241,00 | 0,00 | 0,00 | -1.762.241,00 | | | - | - | - | | 1.938.465,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 362.241,00 | 0,00 | 0,00 | -362.241,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 398.465,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 330.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 385.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 385.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 440.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 51.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -51.150.000,00 | | | - | - | - | | 56.265.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 100 Paket | 100 Paket | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 55.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 425.000,00 | 0,00 | 0,00 | -425.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 467.500,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 4 Orang | 4 Orang | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 385.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | | - | - | - | - | - | - | - | **10.659.399.276,00** | **9.504.850.445,00** | **8.075.043.009,00** | - | - | - | - | - | - | - | **11.727.219.269,00** | - |
| | 3.27.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 12 Orang | 12 Orang | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | -375.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 412.500,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | | **[ Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintah ]** | - | - | - | - | - | - | **10.659.399.276,00** | **9.504.850.445,00** | **8.075.043.009,00** | - | - | - | - | - | - | - | **11.727.219.269,00** | - |
| | 3.27.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | - | 100 % | 154.196.500,00 | 70.580.000,00 | 70.580.000,00 | -83.616.500,00 | | | - | - | - | | 196.451.530,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 495.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 62.052.500,00 | 35.430.600,00 | 35.430.600,00 | -26.621.900,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 85.396.300,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 15.054.000,00 | 12.555.400,00 | 12.555.400,00 | -2.498.600,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 22.515.130,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | -450.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 495.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.440.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.584.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 72.200.000,00 | 22.594.000,00 | 22.594.000,00 | -49.606.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 85.966.100,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000.000,00 | | | - | - | - | | 88.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 0 Unit | 0 Unit | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 55.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | | | | 0 Unit | 0 Unit | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 33.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | - | 100 % | 164.902.100,00 | 36.902.100,00 | 36.902.100,00 | -128.000.000,00 | | | - | - | - | | 184.692.310,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 5.500.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 36.902.100,00 | 36.902.100,00 | 36.902.100,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 40.592.310,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 126.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -126.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 138.600.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik | | | | - | 100 % | 228.338.950,00 | 57.220.000,00 | 57.220.000,00 | -171.118.950,00 | | | - | - | - | | 222.917.530,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 89 Unit | 89 Unit | 175.498.950,00 | 51.900.000,00 | 51.900.000,00 | -123.598.950,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 180.950.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | | | | 11 Unit | 11 Unit | 32.840.000,00 | 5.320.000,00 | 5.320.000,00 | -27.520.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 19.967.530,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 0 Unit | 0 Unit | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 22.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| 2, | **3.27.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan** | | | | - | **7 %** | **442.500.000,00** | **540.000.000,00** | **2.240.000.000,00** | **44.250.000,00** | | | | | | | **486.750.000,00** | |
| | | **[ Persentase Peningkatan Sarana Peternakan yang Berkualitas ]** | - | - | - | - | - | - | **442.500.000,00** | **540.000.000,00** | **2.240.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | - | **486.750.000,00** | - |
| | 3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Peningkatan Produksi Peternakan | | | | - | 12 Laporan | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000.000,00 | | | - | - | - | | 19.800.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.02.2.01.0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 14.300.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.02.2.01.0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 5.500.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.02.2.03 | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah | | | | - | 12 Laporan | 235.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | -195.000.000,00 | | | - | - | - | | 258.500.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.02.2.03.0001 | Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 200.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | -160.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 220.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.02.2.03.0002 | Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar | | | | 50 Laporan | 50 Laporan | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 38.500.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.02.2.04 | Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer | - | | | | - | - | 9.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.500.000,00 | | | - | - | - | | 10.450.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.02.2.04.0001 | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 5.500.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.02.2.04.0002 | Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak | | | | 0 Kasus | 0 Kasus | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 4.950.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.02.2.05 | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | | | - | - | - | | 22.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.02.2.05.0002 | Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 7.150.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.02.2.05.0006 | Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan | | | | 36 Laporan | 36 Laporan | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 7.700.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.02.2.05.0009 | Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 7.150.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.02.2.06 | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten | | | | - | 1 Tahun | 160.000.000,00 | 500.000.000,00 | 2.200.000.000,00 | 2.040.000.000,00 | | | - | - | - | | 176.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.02.2.06.0002 | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | | 0 Ton | 0 Ton | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 4.950.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.02.2.06.0003 | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain | | | | 0 Ekor | 3.052 Ekor | 5.500.000,00 | 300.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 1.994.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 6.050.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.02.2.06.0004 | Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain | | | | 0 Dosis | 5000 Dosis | 150.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 50.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 165.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| 3, | **3.27.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | **Persentase Penyediaan Prasarana Pertenakan yang Berkualitas** | | | | - | **2 %** | **30.200.000,00** | **0,00** | **250.000.000,00** | **3.020.000,00** | | | | | | | **33.220.000,00** | |
| | | **[ Persentase Penyediaan Prasarana Pertenakan yang Berkualitas ]** | - | - | - | - | - | - | **30.200.000,00** | **0,00** | **250.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | - | **33.220.000,00** | - |
| | 3.27.03.2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | - | | | | - | - | 19.700.000,00 | 0,00 | 250.000.000,00 | 230.300.000,00 | | | - | - | - | | 21.670.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.03.2.02.0003 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | | | | 2 Unit | 2 Unit | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 7.150.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.03.2.02.0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | | | | 1 Unit | 1 Unit | 7.700.000,00 | 0,00 | 250.000.000,00 | 242.300.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 8.470.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.03.2.02.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi | | | | 0 Unit | 0 Unit | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 6.050.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.03.2.04 | Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum | - | | | | - | - | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.500.000,00 | | | - | - | - | | 11.550.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.03.2.04.0001 | Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan | | | | 1 Ha | 1 Ha | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 6.600.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.03.2.04.0002 | Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola | | | | 1 Ha | 1 Ha | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 4.950.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| 4, | **3.27.04** | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | **Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)** | | | | - | **2 % 2 %** | **126.437.700,00** | **160.000.000,00** | **160.000.000,00** | **12.687.770,00** | | | | | | | **139.125.470,00** | |
| | | **[ Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterin ]** | - | - | - | - | - | - | **126.437.700,00** | **160.000.000,00** | **160.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | - | **139.125.470,00** | - |
| | 3.27.04.2.01 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan pelaksanaan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten | | | | - | 12 Laporan | 55.787.800,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 44.212.200,00 | | | - | - | - | | 61.410.580,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.04.2.01.0003 | Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 6.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.800.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 7.480.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.04.2.01.0004 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kader zoonosis | | | | 79 Orang | 79 Orang | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 4.950.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.04.2.01.0005 | Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan | | | | 13 Wilayah | 13 Wilayah | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 4.400.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 3.27.04.2.01.0006 | Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan | | | | 30 Kasus | 30 Kasus | 3.928.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.928.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 4.320.800,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.04.2.01.0007 | Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 6.600.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.04.2.01.0008 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 30.559.800,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 69.440.200,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 33.659.780,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.04.2.02 | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 16.649.900,00 | 0,00 | 0,00 | -16.649.900,00 | | | - | - | - | | | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.04.2.02.0004 | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM | | | | 0 laporan | 0 laporan | 6.149.900,00 | 0,00 | 0,00 | -6.149.900,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.04.2.02.0006 | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.04.2.02.0007 | Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.04.2.03 | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten | | | | - | 12 Laporan | 9.500.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 30.500.000,00 | | | - | - | - | | | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.04.2.03.0001 | Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.04.2.03.0002 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner | | | | 0 Laporan | 12 Laporan | 3.500.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 36.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.04.2.04 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | Jumlah laporan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | | - | 12 Laporan | 44.500.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | -24.500.000,00 | | | - | - | - | | | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.04.2.04.0002 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.04.2.04.0010 | Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik | | | | 0 Unit Usaha | 10 Unit Usaha | 40.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | -20.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| 5, | **3.27.06** | **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** | **Persentase Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan** | | | | - | **2 %** | **28.059.200,00** | **0,00** | **0,00** | **2.805.920,00** | | | | | | | | |
| | | **[ Persentase Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Peternakan ]** | - | - | - | - | - | - | **28.059.200,00** | **0,00** | **0,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3.27.06.2.02 | Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | - | | | | - | - | 26.059.200,00 | 0,00 | 0,00 | -26.059.200,00 | | | - | - | - | | | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.06.2.02.0001 | Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 3.27.06.2.02.0002 | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 20.059.200,00 | 0,00 | 0,00 | -20.059.200,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.06.2.02.0003 | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi | | | | 20 Laporan | 20 Laporan | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.06.2.03 | Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan | - | | | | - | - | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | | | - | - | - | | | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.06.2.03.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| 6, | **3.27.07** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | **Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan<br>Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang dibentuk dan beroperasi** | | | | - | **2<br>2 %<br>%** | **46.233.800,00** | **0,00** | **0,00** | **4.349.315,00** | | | | | | | | |
| | | **[ Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Penyuluhan ]** | - | - | - | - | - | - | **46.233.800,00** | **0,00** | **0,00** | - | - | - | - | - | - | - | **50.583.115,00** | - |
| | 3.27.07.2.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | - | | | | - | - | 46.233.800,00 | 0,00 | 0,00 | -46.233.800,00 | | | - | - | - | | 50.583.115,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.07.2.01.0001 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | 30 Unit | 30 Unit | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 9.900.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.07.2.01.0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | 250 Unit | 250 Unit | 9.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.100.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 10.010.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.07.2.01.0003 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | | | | 0 Unit | 0 Unit | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 9.900.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.07.2.01.0005 | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi | | | | 0 Unit | 0 Unit | 9.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.200.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 10.120.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.07.2.01.0008 | Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk | | | | 0 Unit | 0 Unit | 9.683.800,00 | 0,00 | 0,00 | -9.683.800,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 10.653.115,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.07.2.01.0009 | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"<br>Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI" | | | 0,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | **38.327.341.595,00** | **40.252.701.943,00** | **40.418.981.415,00** | **2.091.639.820,00** | | | | | | | **36.520.173.533,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **38.327.341.595,00** | **40.252.701.943,00** | **40.418.981.415,00** | **2.091.639.820,00** | | | | | | | **36.520.173.533,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | **38.327.341.595,00** | **40.252.701.943,00** | **40.418.981.415,00** | **2.091.639.820,00** | | | | | | | **36.520.173.533,00** | |
| 1, | **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pelaksanaan urusan pemerintah daerah** | | | | **100 %** | **100 %** | **28.310.261.895,00** | **28.042.331.643,00** | **27.208.611.515,00** | **-3.143.440.930,00** | | | | | | | **25.166.820.965,00** | |
| | | **[ Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah ]** | - | - | - | - | - | - | **28.310.261.895,00** | **28.042.331.643,00** | **27.208.611.515,00** | - | - | - | - | - | - | - | **25.166.820.965,00** | - |
| | 4.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan perangkat daerah | | | | 100 % | 100 % | 381.050.100,00 | 54.511.900,00 | 54.511.900,00 | -326.538.200,00 | | | - | - | - | | 302.389.290,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 204.188.300,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | -188.188.300,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 164.953.845,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 176.861.800,00 | 38.511.900,00 | 38.511.900,00 | -138.349.900,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 137.435.445,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 4.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan laporan OPD | | | | 100 % | 100 % | 16.393.448.559,00 | 17.934.359.370,00 | 16.600.685.242,00 | 207.236.683,00 | | | - | - | - | | 12.679.547.722,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 126 Orang/ bulan | 126 Orang/ bulan | 16.195.579.059,00 | 17.703.479.470,00 | 16.369.804.942,00 | 174.225.883,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 12.322.828.333,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 120 Dokumen | 120 Dokumen | 84.352.100,00 | 180.880.000,00 | 180.880.000,00 | 96.527.900,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 155.005.988,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20.848.400,00 | 10.007.300,00 | 7.451.900,00 | -13.396.500,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 82.595.993,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 17 Laporan | 17 Laporan | 62.099.600,00 | 39.992.600,00 | 42.548.400,00 | -19.551.200,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 119.117.408,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 30.569.400,00 | 0,00 | 0,00 | -30.569.400,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 26.596.700,00 | 0,00 | 0,00 | -26.596.700,00 | | | - | - | - | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 6 Laporan | 0 Laporan | 26.596.700,00 | 0,00 | 0,00 | -26.596.700,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah | | | | 100 % | 100 % | 1.125.333.700,00 | 868.233.200,00 | 868.233.200,00 | -257.100.500,00 | | | - | - | - | | 1.588.475.604,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 3 Paket | 78.280.000,00 | 86.811.000,00 | 86.811.000,00 | 8.531.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 85.645.507,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 30.479.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 9.521.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 44.805.820,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 674.767.600,00 | 293.418.200,00 | 293.418.200,00 | -381.349.400,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 988.942.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 301.808.000,00 | 448.004.000,00 | 448.004.000,00 | 146.196.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 469.081.777,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 10 Dokumen | 0 Dokumen | 39.999.100,00 | 0,00 | 0,00 | -39.999.100,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 4.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan | | | | 100 % | 100 % | 673.648.000,00 | 1.087.089.000,00 | 1.087.089.000,00 | 413.441.000,00 | | | - | - | - | | 866.231.163,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 4 Unit | 0 Unit | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 3 Unit | 3 Unit | 657.648.000,00 | 1.087.089.000,00 | 1.087.089.000,00 | 429.441.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 866.231.163,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase ketersediaan jasa penunjang pemerintah daerah | | | | 100 % | 100 % | 3.342.952.900,00 | 2.678.905.200,00 | 2.678.905.200,00 | -664.047.700,00 | | | - | - | - | | 1.958.144.462,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 0 Laporan | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 768.000.000,00 | 670.500.000,00 | 670.500.000,00 | -97.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 771.750.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 70.808.000,00 | 105.741.700,00 | 105.741.700,00 | 34.933.700,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 749.958.536,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.499.144.900,00 | 1.902.663.500,00 | 1.902.663.500,00 | -596.481.400,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 436.435.926,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase barang milik daerah dan berkondisi baik | | | | 100 % | 100 % | 3.055.915.900,00 | 1.732.412.700,00 | 2.232.366.700,00 | -823.549.200,00 | | | - | - | - | | 2.882.642.805,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 6 Unit | 6 Unit | 251.850.000,00 | 251.350.000,00 | 251.350.000,00 | -500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 644.532.525,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 72 Unit | 72 Unit | 1.101.425.000,00 | 811.150.000,00 | 811.150.000,00 | -290.275.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.061.823.262,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 18 Unit | 0 Unit | 16.231.000,00 | 0,00 | 0,00 | -16.231.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 4 Unit | 4 Unit | 89.813.000,00 | 143.380.700,00 | 143.380.700,00 | 53.567.700,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 35.533.575,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 3 Unit | 3 Unit | 488.441.000,00 | 526.532.000,00 | 1.026.486.000,00 | 538.045.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.140.753.443,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 3 Unit | 0 Unit | 216.099.000,00 | 0,00 | 0,00 | -216.099.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 30 Unit | 0 Unit | 880.833.000,00 | 0,00 | 0,00 | -880.833.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0012 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi | | | | 10 Ha | 0 Ha | 11.223.900,00 | 0,00 | 0,00 | -11.223.900,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase terlakananya administrasi keuangan dan operasional KDH | | | | 100 % | 100 % | 821.175.336,00 | 989.676.473,00 | 989.676.473,00 | 168.501.137,00 | | | - | - | - | | 935.878.830,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 2 Orang/Bu lan | 2 Orang/Bu lan | 176.052.436,00 | 176.673.573,00 | 176.673.573,00 | 621.137,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 185.501.834,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | | | | 20 Paket | 20 Paket | 195.120.000,00 | 163.000.000,00 | 163.000.000,00 | -32.120.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 182.044.800,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 4 Orang | 4 Orang | 50.002.900,00 | 50.002.900,00 | 50.002.900,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG | - | - | | | 105.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11.0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 2 Orang/Bu lan | 2 Orang/Bu lan | 400.000.000,00 | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 200.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 463.332.196,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.12 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Persentase terpenuhinya fasilitasi kerumahtanggan KDH, Wakil KDH dan SEKDA | | | | 100 % | 100 % | 1.305.199.200,00 | 1.266.995.900,00 | 1.266.995.900,00 | -38.203.300,00 | | | - | - | - | | 2.075.501.012,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.12.0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | | | | 3 Paket | 3 Paket | 515.557.200,00 | 538.999.350,00 | 538.999.350,00 | 23.442.150,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 756.680.810,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.12.0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 284.621.000,00 | 380.997.550,00 | 380.997.550,00 | 96.376.550,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 460.799.577,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.12.0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 505.021.000,00 | 346.999.000,00 | 346.999.000,00 | -158.022.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 858.020.625,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13 | Penataan Organisasi | OPD yang memiliki dokumen analisis jabatan persentase OPD yang sesuai tugas pokok dan fungsi | | | | 100 % | 100 % | 152.340.300,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 47.659.700,00 | | | - | - | - | | 278.070.897,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 28.812.200,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 71.187.800,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 55.277.145,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 27.347.600,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | -2.347.600,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 55.277.145,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 33.255.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | -3.255.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 59.178.893,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0004 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 38.847.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | -18.847.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 63.704.655,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 24.078.500,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 921.500,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 44.633.059,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Terfasilitasi dan terlayaninya kegiatan KDH/WKDH | | | | - | 100 % | 1.032.601.200,00 | 1.230.147.900,00 | 1.230.147.900,00 | 197.546.700,00 | | | - | - | - | | 1.599.939.180,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14.0001 | Fasilitasi Keprotokolan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | | | | 360 Laporan | 360 Laporan | 789.192.200,00 | 1.230.147.900,00 | 1.230.147.900,00 | 440.955.700,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.599.939.180,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14.0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | | 360 Laporan | 0 Laporan | 105.005.000,00 | 0,00 | 0,00 | -105.005.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14.0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | | | | 360 Laporan | 0 Laporan | 138.404.000,00 | 0,00 | 0,00 | -138.404.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 2, | **4.01.02** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | **Persentase Terlaksananya Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat** | | | | **100 %** | **100 %** | **9.413.852.700,00** | **11.708.712.800,00** | **12.708.712.400,00** | **1.153.292.485,00** | | | | | | | **10.567.145.185,00** | |
| | | **[ Persentase Terlaksananya Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat ]** | - | - | - | - | - | - | **9.413.852.700,00** | **11.708.712.800,00** | **12.708.712.400,00** | - | - | - | - | - | - | - | **10.567.145.185,00** | - |
| | 4.01.02.2.01 | Administrasi Tata Pemerintahan | Persentase Terlaksananya koordinasi Bidang Pemerintahan | | | | 100 % | 100 % | 163.313.000,00 | 151.378.900,00 | 146.068.500,00 | -17.244.500,00 | | | - | - | - | | 215.823.745,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.01.0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 30.777.000,00 | 25.356.800,00 | 31.356.800,00 | 579.800,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 44.755.105,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.01.0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 45.847.000,00 | 37.975.500,00 | 19.585.500,00 | -26.261.500,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 58.591.260,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.01.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 86.689.000,00 | 88.046.600,00 | 95.126.200,00 | 8.437.200,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 112.477.380,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.02 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Persentase kegiatan terkait dengan kesejahteraan rakyat yang terkoordinasi | | | | 100 % | 100 % | 8.837.350.100,00 | 11.290.314.800,00 | 12.290.314.800,00 | 3.452.964.700,00 | | | - | - | - | | 9.770.291.055,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 8.837.350.100,00 | 11.290.314.800,00 | 12.290.314.800,00 | 3.452.964.700,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 9.770.291.055,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 4.01.02.2.03 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Persentase Terlaksananya koordinasi Bidang Pemerintahan | | | | 100 % | 100 % | 249.286.000,00 | 183.398.000,00 | 183.398.000,00 | -65.888.000,00 | | | - | - | - | | 345.643.879,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.03.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | | | | 66 Dokumen | 66 Dokumen | 89.033.000,00 | 80.417.000,00 | 80.417.000,00 | -8.616.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 128.253.422,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.03.0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | | | | 1 Kasus | 1 Kasus | 151.595.500,00 | 94.730.000,00 | 94.730.000,00 | -56.865.500,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 181.249.405,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.03.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | | | | 66 Dokumen | 66 Dokumen | 8.657.500,00 | 8.251.000,00 | 8.251.000,00 | -406.500,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 36.141.052,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.04 | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | Persentase pelaksanaan fasilitasi kerjasama daerah | | | | 100 % | 100 % | 163.903.600,00 | 83.621.100,00 | 88.931.100,00 | -74.972.500,00 | | | - | - | - | | 235.386.506,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.04.0001 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | | | | 16 Dokumen | 16 Dokumen | 141.560.100,00 | 66.695.900,00 | 72.005.900,00 | -69.554.200,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 195.210.855,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.04.0003 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 22.343.500,00 | 16.925.200,00 | 16.925.200,00 | -5.418.300,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 40.175.651,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 3, | **4.01.03** | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | **Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Perekonomian** | | | | **100 %** | **100 %** | **603.227.000,00** | **501.657.500,00** | **501.657.500,00** | **182.980.383,00** | | | | | | | **786.207.383,00** | |
| | | | **[ Persentase Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Bidang Perekonomian ]** | - | - | - | - | - | **603.227.000,00** | **501.657.500,00** | **501.657.500,00** | - | - | - | - | - | - | - | **786.207.383,00** | - |
| | 4.01.03.2.01 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Persentase terlaksananya koordinasi dan Fasilitasi bidang perekonomian | | | | 100 % | 100 % | 140.972.000,00 | 108.310.500,00 | 108.310.500,00 | -32.661.500,00 | | | - | - | - | | 163.279.036,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 24.319.000,00 | 16.838.900,00 | 16.838.900,00 | -7.480.100,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 42.761.454,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.01.0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 75.743.200,00 | 48.586.000,00 | 48.586.000,00 | -27.157.200,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 114.292.316,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.01.0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 40.909.800,00 | 42.885.600,00 | 42.885.600,00 | 1.975.800,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 6.225.266,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.02 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Persentase pelaksanaan pembangunan daerah | | | | 100 % | 100 % | 183.967.000,00 | 163.624.900,00 | 163.624.900,00 | -20.342.100,00 | | | - | - | - | | 243.478.608,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.02.0001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.748.200,00 | 46.778.000,00 | 46.778.000,00 | -3.970.200,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 73.967.250,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.02.0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 63.087.000,00 | 69.093.800,00 | 69.093.800,00 | 6.006.800,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 84.755.679,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.02.0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 70.131.800,00 | 47.753.100,00 | 47.753.100,00 | -22.378.700,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 84.755.679,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.03 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase pengadaan barang jasa melalui aplikasi SPSE sesuai dengan peraturan perundang-undangan | | | | 100 % | 100 % | 186.421.000,00 | 170.000.000,00 | 170.000.000,00 | -16.421.000,00 | | | - | - | - | | 276.331.261,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.03.0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 55.690.000,00 | 55.904.000,00 | 55.904.000,00 | 214.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 81.334.291,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.03.0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 45.391.000,00 | 44.396.300,00 | 44.396.300,00 | -994.700,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 70.083.720,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.03.0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 100 Orang | 100 Orang | 85.340.000,00 | 69.699.700,00 | 69.699.700,00 | -15.640.300,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 124.913.250,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.04 | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | | | | 100 % | 100 % | 91.867.000,00 | 59.722.100,00 | 59.722.100,00 | -32.144.900,00 | | | - | - | - | | 103.118.478,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.04.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 56.202.100,00 | 33.675.500,00 | 33.675.500,00 | -22.526.600,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 90.021.330,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.04.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Koninfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 35.664.900,00 | 26.046.600,00 | 26.046.600,00 | -9.618.300,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 13.097.148,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | **32.181.227.925,00** | **35.263.997.911,00** | **34.934.468.966,00** | **2.753.241.041,00** | | | | | | | **44.900.103.221,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **32.181.227.925,00** | **35.263.997.911,00** | **34.934.468.966,00** | **2.753.241.041,00** | | | | | | | **44.900.103.221,00** | |
| | **4.02** | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | **32.181.227.925,00** | **35.263.997.911,00** | **34.934.468.966,00** | **2.753.241.041,00** | | | | | | | **44.900.103.221,00** | |
| 1, | **4.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | - | **100 %** | **21.751.160.025,00** | **20.606.670.311,00** | **20.277.141.366,00** | **6.125.689.696,00** | | | | | | | **27.876.849.721,00** | |
| | | **[ Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah ]** | - | - | - | - | - | - | **21.751.160.025,00** | **20.606.670.311,00** | **20.277.141.366,00** | - | - | - | - | - | - | **-** | **27.876.849.721,00** | - |
| | 4.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | - | 100 % | 75.616.000,00 | 42.278.300,00 | 42.278.300,00 | -33.337.700,00 | | | - | - | - | | 206.193.400,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 18.904.000,00 | 10.882.400,00 | 10.882.400,00 | -8.021.600,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 71.696.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.726.000,00 | 5.251.900,00 | 5.251.900,00 | 525.900,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 28.009.500,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.452.000,00 | 5.228.800,00 | 5.228.800,00 | -4.223.200,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 25.052.500,00 | SEKRETARIAT DPRD |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 4.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 18.904.000,00 | 5.228.800,00 | 5.228.800,00 | -13.675.200,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 35.252.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.726.000,00 | 5.228.800,00 | 5.228.800,00 | 502.800,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 21.388.400,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 9.452.000,00 | 5.228.800,00 | 5.228.800,00 | -4.223.200,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 12.764.900,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 9.452.000,00 | 5.228.800,00 | 5.228.800,00 | -4.223.200,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 12.030.100,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | - | 100 % | 3.826.800.284,00 | 3.841.086.503,00 | 3.511.557.558,00 | -315.242.726,00 | | | - | - | - | | 5.411.169.421,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 31 Orang/b ulan | 31 Orang/b ulan | 2.908.886.028,00 | 3.800.730.903,00 | 3.471.201.958,00 | 562.315.930,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 4.245.429.321,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 841.950.256,00 | 0,00 | 0,00 | -841.950.256,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.042.368.500,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 4800 Dokumen | 4800 Dokumen | 47.608.000,00 | 18.754.900,00 | 18.754.900,00 | -28.853.100,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 71.573.500,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 9.452.000,00 | 5.278.300,00 | 5.278.300,00 | -4.173.700,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 13.674.100,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 4.726.000,00 | 5.045.800,00 | 5.045.800,00 | 319.800,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 12.633.800,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD | | | | 13 Laporan | 13 Laporan | 9.452.000,00 | 6.452.800,00 | 6.452.800,00 | -2.999.200,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 12.745.100,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.726.000,00 | 4.823.800,00 | 4.823.800,00 | 97.800,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 12.745.100,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat | | | | - | 100 % | 145.274.800,00 | 0,00 | 0,00 | -145.274.800,00 | | | - | - | - | | 402.300.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 146.200.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 8 Orang | 8 Orang | 15.274.800,00 | 0,00 | 0,00 | -15.274.800,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 76.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 18 Orang | 18 Orang | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 180.100.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 4.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | - | 100 % | 953.348.000,00 | 504.839.448,00 | 504.839.448,00 | -448.508.552,00 | | | - | - | - | | 2.172.657.400,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 349.804.500,00 | 82.867.048,00 | 82.867.048,00 | -266.937.452,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.492.915.900,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 87.133.500,00 | 32.939.400,00 | 32.939.400,00 | -54.194.100,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 92.944.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 30 Dokumen | 30 Dokumen | 10.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.700.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 23.525.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 381.679.000,00 | 332.592.000,00 | 332.592.000,00 | -49.087.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 322.360.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 124.031.000,00 | 56.441.000,00 | 56.441.000,00 | -67.590.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 240.912.500,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah | | | | - | 100 % | 1.294.011.900,00 | 101.751.000,00 | 101.751.000,00 | -1.192.260.900,00 | | | - | - | - | | 3.161.968.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | | 3 Unit | 3 Unit | 1.190.567.900,00 | 0,00 | 0,00 | -1.190.567.900,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.058.559.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 2 Unit | 103.444.000,00 | 101.751.000,00 | 101.751.000,00 | -1.693.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 103.409.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjnag Urusan Pemerintah Daerah | | | | - | 100 % | 503.000.000,00 | 617.800.000,00 | 617.800.000,00 | 114.800.000,00 | | | - | - | - | | 759.515.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 5.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | -4.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 5.500.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 24 Laporan | 24 Laporan | 192.000.000,00 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | -72.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 209.200.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 306.000.000,00 | 496.800.000,00 | 496.800.000,00 | 190.800.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 544.815.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | - | 100 % | 2.531.725.100,00 | 443.942.000,00 | 443.942.000,00 | -2.087.783.100,00 | | | - | - | - | | 3.104.701.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 16 Unit | 16 Unit | 405.017.100,00 | 288.410.000,00 | 288.410.000,00 | -116.607.100,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 482.800.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 14 Unit | 14 Unit | 109.385.000,00 | 0,00 | 0,00 | -109.385.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 230.300.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 2 Unit | 1.972.530.000,00 | 145.616.000,00 | 145.616.000,00 | -1.826.914.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.081.431.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 2 Unit | 44.793.000,00 | 9.916.000,00 | 9.916.000,00 | -34.877.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 310.170.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.15 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | | - | 100 % | 12.162.449.441,00 | 14.929.972.560,00 | 14.929.972.560,00 | 2.767.523.119,00 | | | - | - | - | | 12.052.572.500,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.15.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | | | | 35 Orang/B ulan | 35 Orang/B ulan | 11.882.204.641,00 | 14.827.292.560,00 | 14.827.292.560,00 | 2.945.087.919,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 11.680.947.500,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.15.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan | | | | 3 Paket | 3 Paket | 227.744.800,00 | 50.180.000,00 | 50.180.000,00 | -177.564.800,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 319.125.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.15.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | | | | 35 Orang | 35 Orang | 52.500.000,00 | 52.500.000,00 | 52.500.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 52.500.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.16 | Layanan Administrasi DPRD | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Administrasi DPRD | | | | - | 100 % | 258.934.500,00 | 125.000.500,00 | 125.000.500,00 | -133.934.000,00 | | | - | - | - | | 605.773.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.16.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 9.102.600,00 | 0,00 | 0,00 | -9.102.600,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 9.500.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.16.0002 | Fasilitasi Fraksi DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 10.809.900,00 | 0,00 | 0,00 | -10.809.900,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 13.256.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.16.0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 215.462.000,00 | 125.000.500,00 | 125.000.500,00 | -90.461.500,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 279.385.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.16.0004 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 23.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | -23.560.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 303.632.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| 2, | **4.02.02** | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | **Meningkatnya kualitas persidangan kajian peraturan perundang-unda ngan,meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan** | | | | - | **100 %** | **10.430.067.900,00** | **14.657.327.600,00** | **14.657.327.600,00** | **6.593.185.600,00** | | | | | | | **17.023.253.500,00** | |
| | | **[ Persentase Terselenggaranya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD ]** | - | - | - | - | - | - | **10.430.067.900,00** | **14.657.327.600,00** | **14.657.327.600,00** | - | - | - | - | - | - | - | **17.023.253.500,00** | - |
| | 4.02.02.2.01 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Persentase terselenggaranya kegiatan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD | | | | - | 100 % | 1.623.083.800,00 | 1.815.011.900,00 | 1.815.011.900,00 | 191.928.100,00 | | | - | - | - | | 4.488.367.900,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.01.0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.998.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.998.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 15.806.800,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | - | - | - | - | - | - | - | **10.430.067.900,00** | **14.657.327.600,00** | **14.657.327.600,00** | - | - | - | - | - | - | - | **17.023.253.500,00** | - |
| | 4.02.02.2.01.0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 1.498.030.800,00 | 1.800.008.900,00 | 1.800.008.900,00 | 301.978.100,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 4.343.857.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | **[ Persentase Terselenggaranya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD ]** | - | - | - | - | - | - | **10.430.067.900,00** | **14.657.327.600,00** | **14.657.327.600,00** | - | - | - | - | - | - | - | **17.023.253.500,00** | - |
| | 4.02.02.2.01.0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 9.103.500,00 | 0,00 | 0,00 | -9.103.500,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 30.245.600,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.01.0004 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 63.141.500,00 | 15.003.000,00 | 15.003.000,00 | -48.138.500,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 63.036.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.01.0005 | Penyusunan Tata Tertib DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 44.810.000,00 | 0,00 | 0,00 | -44.810.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 35.422.500,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | Persentase terselenggaranya kegiatan pembahasan kebijakan anggaran | | | | - | 100 % | 130.647.800,00 | 89.300.000,00 | 89.300.000,00 | -41.347.800,00 | | | - | - | - | | 198.732.900,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0001 | Pembahasan KUA dan PPAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 11.250.000,00 | 16.950.000,00 | 16.950.000,00 | 5.700.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 35.530.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 27.000.000,00 | 16.950.000,00 | 16.950.000,00 | -10.050.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 35.530.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0003 | Pembahasan APBD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 22.500.000,00 | 16.950.000,00 | 16.950.000,00 | -5.550.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 32.650.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | - | - | - | - | - | - | - | **10.430.067.900,00** | **14.657.327.600,00** | **14.657.327.600,00** | - | | | - | - | - | - | **17.023.253.500,00** | - |
| | 4.02.02.2.02.0004 | Pembahasan APBD Perubahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 27.147.800,00 | 16.950.000,00 | 16.950.000,00 | -10.197.800,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 30.522.900,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | **[ Persentase Terselenggaranya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD ]** | - | - | - | - | - | - | **10.430.067.900,00** | **14.657.327.600,00** | **14.657.327.600,00** | - | - | - | - | - | - | - | **17.023.253.500,00** | - |
| | 4.02.02.2.02.0005 | Pembahasan Laporan Semester | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 19.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | -16.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 19.500.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 23.250.000,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | -5.250.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 45.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | - | - | - | - | - | - | - | **10.430.067.900,00** | **14.657.327.600,00** | **14.657.327.600,00** | - | - | - | - | - | - | - | **17.023.253.500,00** | - |
| | 4.02.02.2.03 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase terselenggaranya kegiatan pengawasan penyelenggara pemerintah | | | | - | 100 % | 72.976.700,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | -71.876.700,00 | | | - | - | - | | 297.268.700,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0001 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 41.724.800,00 | 0,00 | 0,00 | -41.724.800,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 129.050.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0002 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 3.667.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.667.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 14.325.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0003 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 4.569.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.569.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 35.080.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0004 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 4.176.900,00 | 0,00 | 0,00 | -4.176.900,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 11.392.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0005 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 3.837.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.837.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 35.840.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | **[ Persentase Terselenggaranya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD ]** | - | - | - | - | - | - | **10.430.067.900,00** | **14.657.327.600,00** | **14.657.327.600,00** | - | - | - | - | - | - | - | **17.023.253.500,00** | - |
| | 4.02.02.2.03.0006 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 4.623.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | -3.523.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 4.718.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0007 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 6.573.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.573.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 55.110.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0008 | Pembahasan Laporan Keterangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.806.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.806.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 11.753.700,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04 | Peningkatan Kapasitas DPRD | Persentase terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas DPRD | | | | - | 100 % | 1.335.053.500,00 | 1.314.491.400,00 | 1.314.491.400,00 | -20.562.100,00 | | | - | - | - | | 2.912.244.100,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0002 | Pendalaman Tugas DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 513.284.000,00 | 980.002.000,00 | 980.002.000,00 | 466.718.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.152.979.600,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | - | - | - | - | - | - | - | **10.430.067.900,00** | **14.657.327.600,00** | **14.657.327.600,00** | - | - | - | - | - | - | - | **17.023.253.500,00** | - |
| | 4.02.02.2.04.0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | | | | 24 Orang | 24 Orang | 132.353.500,00 | 0,00 | 0,00 | -132.353.500,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 132.354.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | **[ Persentase Terselenggaranya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD ]** | - | - | - | - | - | - | **10.430.067.900,00** | **14.657.327.600,00** | **14.657.327.600,00** | - | - | - | - | - | - | - | **17.023.253.500,00** | - |
| | 4.02.02.2.04.0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | | | | 8 Orang | 8 Orang | 229.750.000,00 | 231.709.400,00 | 231.709.400,00 | 1.959.400,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 253.200.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0006 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 17.717.400,00 | 2.780.000,00 | 2.780.000,00 | -14.937.400,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 77.500.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0007 | Penyusunan Program Kerja DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.998.600,00 | 0,00 | 0,00 | -4.998.600,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 17.946.500,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 436.950.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | -336.950.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.278.264.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.05 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Persentase terselenggaranya kegiatan penyerapan dan perhimpunan aspirasi masyarakat | | | | - | 100 % | 789.966.000,00 | 733.089.300,00 | 733.089.300,00 | -56.876.700,00 | | | - | - | - | | 1.279.195.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.05.0001 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 29.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | -29.960.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 436.830.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.05.0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 21.625.000,00 | 33.079.300,00 | 33.079.300,00 | 11.454.300,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 103.980.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.05.0003 | Pelaksanaan Reses | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 738.381.000,00 | 700.010.000,00 | 700.010.000,00 | -38.371.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 738.385.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.06 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | Persentase terselenggaranya kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD | | | | - | 100 % | 11.371.900,00 | 0,00 | 0,00 | -11.371.900,00 | | | - | - | - | | 62.640.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.06.0001 | Penyusunan Kode Etik DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.996.900,00 | 0,00 | 0,00 | -4.996.900,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 42.640.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.06.0002 | Pengawasan Kode Etik DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.375.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.375.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 20.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.07 | Pembahasan Kerja Sama Daerah | Persentase terselenggaranya kegiatan pembahasan kerjasama daerah | | | | - | 100 % | 29.840.000,00 | 0,00 | 0,00 | -29.840.000,00 | | | - | - | - | | 75.271.400,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.07.0001 | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 18.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | -18.140.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 59.800.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.07.0002 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 11.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.700.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 15.471.400,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.08 | Fasilitasi Tugas DPRD | Persentase terselenggaranya kegiatan fasilitasi tugas DPRD | | | | - | 100 % | 6.437.128.200,00 | 10.704.335.000,00 | 10.704.335.000,00 | 4.267.206.800,00 | | | - | - | - | | 7.709.533.500,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.08.0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 5.454.119.300,00 | 9.504.287.000,00 | 9.504.287.000,00 | 4.050.167.700,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 6.430.738.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.08.0002 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.830.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.830.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 14.325.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.08.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 32.539.500,00 | 0,00 | 0,00 | -32.539.500,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 34.473.500,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.08.0004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 945.639.400,00 | 1.200.048.000,00 | 1.200.048.000,00 | 254.408.600,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.229.997.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | | | | | | | **7.503.194.523,00** | **5.168.053.809,00** | **5.298.569.521,00** | **-2.204.625.002,00** | | | | | | | **7.609.794.690,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **7.503.194.523,00** | **5.168.053.809,00** | **5.298.569.521,00** | **-2.204.625.002,00** | | | | | | | **7.609.794.690,00** | |
| | **5.01** | **PERENCANAAN** | | | | | | | **7.387.288.323,00** | **5.154.080.759,00** | **5.284.596.471,00** | **-2.102.691.852,00** | | | | | | | **7.509.092.773,00** | |
| 1, | **5.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | **100 %** | **100 %** | **6.194.279.769,00** | **5.032.355.260,00** | **5.020.128.000,00** | **193.437.881,00** | | | | | | | **6.387.717.650,00** | |
| | | **[ Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah ]** | - | - | - | - | - | - | **6.194.279.769,00** | **5.032.355.260,00** | **5.020.128.000,00** | - | - | - | - | - | - | - | **6.387.717.650,00** | - |
| | 5.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 102.581.000,00 | 15.189.000,00 | 15.189.000,00 | -87.392.000,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | Kabupaten Lima Puluh Kota | | | 102.581.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 11.604.000,00 | 2.343.000,00 | 2.343.000,00 | -9.261.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | | 11.604.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.802.000,00 | 2.343.000,00 | 2.343.000,00 | -3.459.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | | 5.802.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.599.000,00 | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 | -4.889.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | | 6.599.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.324.000,00 | 2.343.000,00 | 2.343.000,00 | 19.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | | 2.324.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.581.000,00 | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | -184.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | | 2.581.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 66.942.000,00 | 2.343.000,00 | 2.343.000,00 | -64.599.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | | 66.942.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.729.000,00 | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 | -5.019.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 6.729.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | **6.194.279.769,00** | **5.032.355.260,00** | **5.020.128.000,00** | - | - | - | - | - | - | - | **6.387.717.650,00** | - |
| | 5.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Tertib Administrasi Keuangan | | | | 100 % | 100 % | 4.500.798.235,00 | 4.445.942.709,00 | 4.433.715.449,00 | -67.082.786,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | Kabupaten Lima Puluh Kota | | 4.724.327.576,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 42 Orang/b ulan | 42 Orang/b ulan | 4.470.651.235,00 | 4.439.546.709,00 | 4.427.319.449,00 | -43.331.786,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 4.694.180.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 12.741.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.741.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 12.741.576,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.802.000,00 | 2.343.000,00 | 2.343.000,00 | -3.459.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 5.802.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 5.802.000,00 | 2.343.000,00 | 2.343.000,00 | -3.459.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 5.802.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.802.000,00 | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 | -4.092.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 5.802.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah | | | | 100 % | 100 % | 12.860.000,00 | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 | -11.150.000,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | Kabupaten Lima Puluh Kota | | 12.860.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 12.860.000,00 | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 | -11.150.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 12.860.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 100 % | 0 % | 55.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000.000,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | Kabupaten Lima Puluh Kota | | 90.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 70 Paket | 0 Paket | 55.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 90.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 381.290.534,00 | 97.825.551,00 | 97.825.551,00 | -283.464.983,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | Kabupaten Lima Puluh Kota | | 378.092.074,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 6 Paket | 6 Paket | 10.660.000,00 | 3.857.000,00 | 3.857.000,00 | -6.803.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 10.660.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 11.030.000,00 | 3.721.300,00 | 3.721.300,00 | -7.308.700,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 11.030.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 5 Paket | 5 Paket | 52.700.400,00 | 6.412.800,00 | 6.412.800,00 | -46.287.600,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 52.700.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 85.249.134,00 | 5.103.451,00 | 5.103.451,00 | -80.145.683,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 82.051.074,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 11.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.400.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 11.400.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 25.005.000,00 | 4.090.000,00 | 4.090.000,00 | -20.915.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 25.005.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 24 Laporan | 24 Laporan | 185.246.000,00 | 74.641.000,00 | 74.641.000,00 | -110.605.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 185.246.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan | | | | 100 % | 0 % | 416.393.000,00 | 0,00 | 0,00 | -416.393.000,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | Kabupaten Lima Puluh Kota | | 419.500.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | | 5 Unit | 0 Unit | 147.036.000,00 | 0,00 | 0,00 | -147.036.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 150.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 21 Unit | 0 Unit | 99.941.000,00 | 0,00 | 0,00 | -99.941.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 100.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 0 Unit | 169.416.000,00 | 0,00 | 0,00 | -169.416.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 169.500.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 % | 100 % | 371.947.000,00 | 227.947.000,00 | 227.947.000,00 | -144.000.000,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | Kabupaten Lima Puluh Kota | | 371.947.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 83.947.000,00 | 83.947.000,00 | 83.947.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 83.947.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 288.000.000,00 | 144.000.000,00 | 144.000.000,00 | -144.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 288.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik | | | | - | 100 % | 353.410.000,00 | 243.741.000,00 | 243.741.000,00 | -109.669.000,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | Kabupaten Lima Puluh Kota | | 288.410.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 12 Unit | 12 Unit | 236.700.000,00 | 236.700.000,00 | 236.700.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 236.700.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 3 Unit | 3 Unit | 51.710.000,00 | 4.948.000,00 | 4.948.000,00 | -46.762.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 51.710.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 65.000.000,00 | 2.093.000,00 | 2.093.000,00 | -62.907.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 2, | **5.01.02** | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | **1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD 2. Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD** | | | | **85 Indeks** | **100 100 %** | **414.426.276,00** | **40.786.600,00** | **133.529.572,00** | **86.498.847,00** | | | | | | | **500.925.123,00** | |
| | 5.01.02.2.01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Persentase Kegiatan yang Ditampung dalam APBD | | | | 85 % | 86 % | 296.647.300,00 | 40.786.600,00 | 40.786.600,00 | -255.860.700,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | Kabupaten Lima Puluh Kota | | 326.323.250,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | | | | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | 36.869.000,00 | 8.100.000,00 | 7.660.000,00 | -29.209.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 40.555.900,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | | | | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | 40.052.000,00 | 8.200.000,00 | 5.771.000,00 | -34.281.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 44.068.200,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.01.0006 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan | | | | 790 Usulan | 0 Usulan | 15.620.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.620.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 17.182.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.01.0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 204.106.300,00 | 24.486.600,00 | 27.355.600,00 | -176.750.700,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 224.517.150,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.02 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Ketersediaan Data IKU dan IKD | | | | 85 % | 0 % | 70.144.976,00 | 0,00 | 0,00 | -70.144.976,00 | | | - | - - | Kabupaten Lima Puluh Kota | | 117.159.473,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.02.2.02.0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 23.762.976,00 | 0,00 | 0,00 | -23.762.976,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 40.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.02.0002 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi | | | | 43 Orang | 00 Orang | 46.382.000,00 | 0,00 | 0,00 | -46.382.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 77.159.473,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Target Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah yang Tercapai | | | | 85 % | 86 % | 47.634.000,00 | 0,00 | 92.742.972,00 | 45.108.972,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | Kabupaten Lima Puluh Kota | | 57.442.400,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.03.0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.045.000,00 | 0,00 | 57.742.972,00 | 47.697.972,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 15.045.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | | | | 2 Laporan | 1 Laporan | 37.589.000,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | -2.589.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 42.397.400,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 3, | **5.01.03** | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | **Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Koordinasi Perencanaan** | | | | **85 Indeks** | **100 %** | **778.582.278,00** | **80.938.899,00** | **130.938.899,00** | **-158.132.278,00** | | | | | | | **620.450.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.01.03.2.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | | | 85 % | 100 % | 348.000.000,00 | 35.559.590,00 | 35.559.590,00 | -312.440.410,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | Kabupaten Lima Puluh Kota | | 262.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 44.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | | | | 1 Laporan | 0 Laporan | 78.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -78.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 53.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 55.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 150.000.000,00 | 35.559.590,00 | 35.559.590,00 | -114.440.410,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 110.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | | | | 85 % | 100 % | 168.978.000,00 | 16.619.215,00 | 16.619.215,00 | -152.358.785,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | Kabupaten Lima Puluh Kota | | 198.450.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 92.978.000,00 | 16.619.215,00 | 16.619.215,00 | -76.358.785,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 97.650.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 76.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -76.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 100.800.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | | | 85 % | 100 % | 261.604.278,00 | 28.760.094,00 | 78.760.094,00 | -182.844.184,00 | | | - | - | Kabupaten Lima Puluh Kota | | 160.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.03.2.03.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 58.302.139,00 | 0,00 | 0,00 | -58.302.139,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.03.2.03.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 72.500.000,00 | 28.760.094,00 | 78.760.094,00 | 6.260.094,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 80.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 58.302.139,00 | 0,00 | 0,00 | -58.302.139,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.01.03.2.03.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | | | | 1 Laporan | 0 Laporan | 72.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -72.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 80.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | **5.05** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | **115.906.200,00** | **13.973.050,00** | **13.973.050,00** | **-101.933.150,00** | | | | | | | **100.701.917,00** | |
| 1, | **5.05.02** | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | **Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian/Kajian yang Direkomendasikan sebagai Bahan Masukan Kebijakan Pembangunan Daerah** | | | | - | **10 %** | **115.906.200,00** | **13.973.050,00** | **13.973.050,00** | **-15.204.283,00** | | | | | | | **100.701.917,00** | |
| | 5.05.02.2.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Jumlah Laporan Data Kelitbangan Kab. Lima Puluh Kota | | | | - | 1 Laporan | 63.999.000,00 | 13.973.050,00 | 13.973.050,00 | -50.025.950,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | Kabupaten Lima Puluh Kota | | 100.701.917,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.01.0012 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 63.999.000,00 | 13.973.050,00 | 13.973.050,00 | -50.025.950,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 100.701.917,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.03 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | - | | | | - | - | 51.907.200,00 | 0,00 | 0,00 | -51.907.200,00 | | | - | - | - | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.02.2.03.0004 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 51.907.200,00 | 0,00 | 0,00 | -51.907.200,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | | **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH** | | | | | | | **384.313.539.312,00** | **331.705.174.517,00** | **264.813.716.515,00** | **-119.499.822.797,00** | | | | | | | **405.107.340.896,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **384.313.539.312,00** | **331.705.174.517,00** | **264.813.716.515,00** | **-119.499.822.797,00** | | | | | | | **405.107.340.896,00** | |
| | **5.02** | **KEUANGAN** | | | | | | | **384.313.539.312,00** | **331.705.174.517,00** | **264.813.716.515,00** | **-119.499.822.797,00** | | | | | | | **405.107.340.896,00** | |
| 1, | **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Skor IKM Badan Keuangan** | | | | - | **85 -** | **44.683.715.412,00** | **38.478.492.594,00** | **60.389.108.682,00** | **20.349.316.534,00** | | | | | | | **65.033.031.946,00** | |
| | 5.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Skor IKM Badan Keuangan | | | | - | 85 . | 205.096.800,00 | 64.868.800,00 | 64.868.800,00 | -140.228.000,00 | | | - | - | - | | 215.775.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 19.777.000,00 | 8.235.000,00 | 8.235.000,00 | -11.542.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 21.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 18.968.000,00 | 8.644.000,00 | 8.644.000,00 | -10.324.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 19.950.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 19.955.800,00 | 7.854.800,00 | 7.854.800,00 | -12.101.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 21.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 18.484.000,00 | 8.281.000,00 | 8.281.000,00 | -10.203.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 19.425.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 21.000.000,00 | 8.434.000,00 | 8.434.000,00 | -12.566.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 22.050.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 15.000.000,00 | 6.460.000,00 | 6.460.000,00 | -8.540.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 15.750.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 21.986.000,00 | 8.725.000,00 | 8.725.000,00 | -13.261.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 23.100.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.149.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.149.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 52.500.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Skor IKM Badan Keuangan | | | | - | 85 . | 40.932.262.924,00 | 37.282.745.614,00 | 59.193.361.702,00 | 18.261.098.778,00 | | | - | - - | - | | 61.353.882.346,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 6425 Orang /bulan | 6425 Orang /bulan | 20.445.631.462,00 | 18.621.148.807,00 | 29.576.456.851,00 | 9.130.825.389,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 30.655.416.173,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.000.000,00 | 13.433.900,00 | 13.433.900,00 | -1.566.100,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 15.750.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 15.000.000,00 | 13.542.900,00 | 13.542.900,00 | -1.457.100,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 15.750.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 11.000.000,00 | 13.471.200,00 | 13.471.200,00 | 2.471.200,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 11.550.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Skor IKM Badan Keuangan | | | | - | 85 . | 90.628.000,00 | 0,00 | 0,00 | -90.628.000,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 95.025.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 100 Paket | 100 Paket | 63.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -63.250.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 66.150.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 105 Orang | 105 Orang | 13.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.950.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 14.700.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 95 Orang | 95 Orang | 13.428.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.428.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 14.175.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Skor IKM Badan Keuangan | | | | - | 85 . | 412.123.000,00 | 235.643.200,00 | 235.643.200,00 | -176.479.800,00 | | | - | - | - | | 434.964.600,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 14.458.000,00 | 8.770.000,00 | 8.770.000,00 | -5.688.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 16.291.800,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 9.979.000,00 | 3.260.000,00 | 3.260.000,00 | -6.719.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 10.500.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 8.000.000,00 | 5.700.000,00 | 5.700.000,00 | -2.300.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 8.400.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 52.000.000,00 | 25.988.200,00 | 25.988.200,00 | -26.011.800,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 54.600.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 29.000.000,00 | 12.709.000,00 | 12.709.000,00 | -16.291.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 30.450.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 2.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.220.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 2.331.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 78.000.000,00 | 19.500.000,00 | 19.500.000,00 | -58.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 81.900.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 60 Laporan | 60 Laporan | 204.008.000,00 | 150.946.000,00 | 150.946.000,00 | -53.062.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 214.200.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Skor IKM Badan Keuangan | | | | - | 85 -<br>85 . | 1.406.455.000,00 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | -1.387.455.000,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 1.347.675.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | | 9 Unit | 9 Unit | 723.805.000,00 | 0,00 | 0,00 | -723.805.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 840.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 30 Unit | 30 Unit | 101.194.000,00 | 0,00 | 0,00 | -101.194.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 105.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 7 Unit | 7 Unit | 281.456.000,00 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | -262.456.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 87.675.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 2 0 | 2 0 | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 315.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Skor IKM Badan Keuangan | | | | - | WTP - | 784.224.688,00 | 430.464.980,00 | 430.464.980,00 | -353.759.708,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 661.500.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 7.997.800,00 | 0,00 | 0,00 | -7.997.800,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 8.400.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 156.000.000,00 | 153.999.980,00 | 153.999.980,00 | -2.000.020,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 163.800.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 620.226.888,00 | 276.465.000,00 | 276.465.000,00 | -343.761.888,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 489.300.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Skor IKM Badan Keuangan | | | | - | 85 - | 852.925.000,00 | 445.770.000,00 | 445.770.000,00 | -407.155.000,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 924.210.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 49 Unit | 49 Unit | 551.075.000,00 | 442.750.000,00 | 442.750.000,00 | -108.325.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 578.760.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 35 Unit | 35 Unit | 28.850.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | -27.650.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 30.450.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 273.000.000,00 | 1.820.000,00 | 1.820.000,00 | -271.180.000,00 | - | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 315.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| 2, | **5.02.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | **Opini BPK** | | | | - | **1 Dokumen** | **337.186.203.900,00** | **291.443.549.623,00** | **202.641.475.533,00** | **558.580.050,00** | | | | | | | **337.744.783.950,00** | |
| | | **[ Opini BPK ]** | - | - | - | - | - | - | **337.186.203.900,00** | **291.443.549.623,00** | **202.641.475.533,00** | - | - | - | - | - | - | - | **337.744.783.950,00** | - |
| | 5.02.02.2.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Opini Opini BPK Terhadap LKPD | | | | - | WTP . | 1.408.301.300,00 | 1.179.485.600,00 | 1.179.485.600,00 | -228.815.700,00 | | | - | - - | - | | 1.405.950.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 177.800.000,00 | 162.310.100,00 | 162.310.100,00 | -15.489.900,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 178.500.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.02.02.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 182.800.100,00 | 165.478.000,00 | 165.478.000,00 | -17.322.100,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 183.750.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | | | | 43 Dokumen | 43 Dokumen | 79.973.000,00 | 57.500.000,00 | 57.500.000,00 | -22.473.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 78.750.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | | | | 43 Dokumen | 43 Dokumen | 124.800.000,00 | 127.108.000,00 | 127.108.000,00 | 2.308.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 121.800.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi | | | | 43 Dokumen | 43 Dokumen | 77.400.000,00 | 56.240.000,00 | 56.240.000,00 | -21.160.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 76.650.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi | | | | 43 Dokumen | 43 Dokumen | 142.008.000,00 | 111.400.000,00 | 111.400.000,00 | -30.608.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 129.150.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 170.000.100,00 | 137.576.800,00 | 137.576.800,00 | -32.423.300,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 178.500.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 195.000.100,00 | 193.114.100,00 | 193.114.100,00 | -1.886.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 204.750.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 69.720.000,00 | 6.448.500,00 | 6.448.500,00 | -63.271.500,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 64.050.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0010 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 11.550.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | **337.186.203.900,00** | **291.443.549.623,00** | **202.641.475.533,00** | - | - | - | - | - | - | - | **337.744.783.950,00** | - |
| | 5.02.02.2.02 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun Opini BPK terhadap LKPD | | | | - | 2 Dokumen WTP . | 412.038.000,00 | 177.220.900,00 | 177.220.900,00 | -234.817.100,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 432.600.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 63.003.300,00 | 23.470.300,00 | 23.470.300,00 | -39.533.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 66.150.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | | | | 172 Dokumen | 172 Dokumen | 21.997.800,00 | 4.461.600,00 | 4.461.600,00 | -17.536.200,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 23.100.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0004 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 41.999.900,00 | 37.140.000,00 | 37.140.000,00 | -4.859.900,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 44.100.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0005 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 28.070.000,00 | 11.737.000,00 | 11.737.000,00 | -16.333.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 29.400.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0006 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 41.980.000,00 | 18.731.000,00 | 18.731.000,00 | -23.249.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 44.100.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | | | 18 Laporan | 18 Laporan | 20.993.000,00 | 13.030.000,00 | 13.030.000,00 | -7.963.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 22.050.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 21.005.000,00 | 7.431.000,00 | 7.431.000,00 | -13.574.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 22.050.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | | | | 86 Dokumen | 86 Dokumen | 62.981.000,00 | 28.770.000,00 | 28.770.000,00 | -34.211.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 66.150.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0010 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 110.008.000,00 | 32.450.000,00 | 32.450.000,00 | -77.558.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 115.500.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.02.02.2.03 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Opini BPK terhadap LKPD | | | | - | WTP . | 533.499.800,00 | 119.104.400,00 | 119.104.400,00 | -414.395.400,00 | | | - | - | - | | 1.883.175.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0002 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 31.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -31.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 33.075.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0002 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.02.02.2.03.0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 79.999.800,00 | 7.711.800,00 | 7.711.800,00 | -72.288.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 84.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | | | | 65 Laporan | 65 Laporan | 43.000.000,00 | 63.610.000,00 | 63.610.000,00 | 20.610.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 45.150.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 78.500.000,00 | 25.799.600,00 | 25.799.600,00 | -52.700.400,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 82.425.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0006 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 84.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0009 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | | | | 60 Dokumen | 60 Dokumen | 49.000.000,00 | 21.983.000,00 | 21.983.000,00 | -27.017.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 51.450.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | 50 Orang | 50 Orang | 140.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -140.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 1.470.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.04 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Opini BPK terhadap LKPD | | | | - | WTP - | 334.318.220.800,00 | 289.952.938.723,00 | 201.150.864.633,00 | -133.167.356.167,00 | | | - | - | - | | 333.480.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.04.0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | | | 79 Laporan | 79 Laporan | 163.359.110.400,00 | 139.933.209.200,00 | 94.587.177.200,00 | -68.771.933.200,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA DESA | - | - | | | 162.750.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.04.0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.02.02.2.04.0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.600.000.000,00 | 2.500.000.000,00 | 4.389.989.910,00 | 2.789.989.910,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 1.680.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.04.0010 | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | | | | 79 Laporan | 79 Laporan | 6.000.000.000,00 | 7.586.520.323,00 | 7.586.520.323,00 | 1.586.520.323,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI" Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI" | | | 6.300.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.05 | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | Opini BPK terhadap LKPD | | | | - | WTP WTP | 514.144.000,00 | 14.800.000,00 | 14.800.000,00 | -499.344.000,00 | | | - | - - | - | | 543.058.950,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.05.0002 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 188.610.000,00 | 7.400.000,00 | 7.400.000,00 | -181.210.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 198.047.850,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.05.0002 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.02.02.2.05.0003 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | 129 Orang | 129 Orang | 136.924.000,00 | 0,00 | 0,00 | -136.924.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 146.963.250,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| 3, | **5.02.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | **Opini BPK** | | | | **-** | **WTP WTP** | **814.613.800,00** | **321.045.000,00** | **321.045.000,00** | **-42.088.800,00** | | | | | | | **772.525.000,00** | |
| | 5.02.03.2.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Opini BPK terhadap LKPD | | | | - | WTP WTP | 814.613.800,00 | 321.045.000,00 | 321.045.000,00 | -493.568.800,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 772.525.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0001 | Penyusunan Standar Harga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Standar Harga yang Disusun | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 72.001.100,00 | 21.650.000,00 | 21.650.000,00 | -50.351.100,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 75.600.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0002 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 30.000.400,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000.400,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 31.500.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0003 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 47.000.000,00 | 15.400.000,00 | 15.400.000,00 | -31.600.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 49.350.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 110.110.000,00 | 38.707.000,00 | 38.707.000,00 | -71.403.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 31.500.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 25.000.200,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 24.999.800,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 26.250.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 280.000.000,00 | 135.013.900,00 | 135.013.900,00 | -144.986.100,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 294.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0008 | Penilaian Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 31.500.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0009 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 26.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -26.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 27.825.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.000.100,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.100,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 21.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0011 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 64.002.000,00 | 26.124.000,00 | 26.124.000,00 | -37.878.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 69.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 110.000.000,00 | 34.150.100,00 | 34.150.100,00 | -75.849.900,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 115.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| 4, | **5.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | **Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah** | | | | - | **11,04 %** | **1.629.006.200,00** | **1.462.087.300,00** | **1.462.087.300,00** | **-72.006.200,00** | | | | | | | **1.557.000.000,00** | |
| | | **[ Persentase PAD terhadap Pendapatan ]** | - | - | - | - | - | - | **1.629.006.200,00** | **1.462.087.300,00** | **1.462.087.300,00** | - | - | - | - | - | - | - | **1.557.000.000,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.02.04.2.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah | | | | - | 1:0,1104 | 1.629.006.200,00 | 1.462.087.300,00 | 1.462.087.300,00 | -166.918.900,00 | | | - | - | - | | 1.557.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 42.000.000,00 | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | -4.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 45.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.02.04.2.01.0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 140.000.000,00 | 242.638.000,00 | 242.638.000,00 | 102.638.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 145.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 160.000.000,00 | 57.300.500,00 | 57.300.500,00 | -102.699.500,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 170.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | | | | 12 Unit | 12 Unit | 350.000.000,00 | 349.192.000,00 | 349.192.000,00 | -808.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 375.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 82.000.100,00 | 65.020.000,00 | 65.020.000,00 | -16.980.100,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 86.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | | | | 0 0 | 0 0 | 47.000.200,00 | 20.000.200,00 | 20.000.200,00 | -27.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 50.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0007 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya | | | | 11 Obyek Pajak | 11 Obyek Pajak | 165.001.400,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | -115.001.400,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 0,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0008 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 120.000.000,00 | 24.992.000,00 | 24.992.000,00 | -95.008.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 130.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0009 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 40 Layanan | 40 Layanan | 14.000.000,00 | 13.015.800,00 | 13.015.800,00 | -984.200,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 16.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0010 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi | | | | 50 Dokumen | 50 Dokumen | 90.000.500,00 | 50.000.100,00 | 50.000.100,00 | -40.000.400,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 95.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0011 | Penagihan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah | | | | 150 Dokumen | 150 Dokumen | 190.004.000,00 | 170.010.000,00 | 170.010.000,00 | -19.994.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 200.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 96.000.000,00 | 135.001.000,00 | 135.001.000,00 | 39.001.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 100.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0014 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 36.000.000,00 | 74.017.500,00 | 74.017.500,00 | 38.017.500,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 40.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0015 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | | | | 10 Laporan | 10 Laporan | 55.000.000,00 | 134.900.200,00 | 134.900.200,00 | 79.900.200,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 60.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | | **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | | | | | | | **6.122.440.179,00** | **6.658.840.429,00** | **6.251.294.270,00** | **128.854.091,00** | | | | | | | **9.525.000.000,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **6.122.440.179,00** | **6.658.840.429,00** | **6.251.294.270,00** | **128.854.091,00** | | | | | | | **9.525.000.000,00** | |
| | **5.03** | **KEPEGAWAIAN** | | | | | | | **6.022.440.179,00** | **5.580.815.429,00** | **5.173.269.270,00** | **-849.170.909,00** | | | | | | | **7.875.000.000,00** | |
| 1, | **5.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja BKPSDM Indeks Kepuasan Masyarakat** | | | | **90 85 Nilai Nilai** | **100 85 90 % Nilai Nilai** | **4.862.440.179,00** | **5.441.398.429,00** | **5.033.852.270,00** | **1.402.559.821,00** | | | | | | | **6.265.000.000,00** | |
| | | **[ Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah ]** | - | - | - | - | - | - | **4.862.440.179,00** | **5.441.398.429,00** | **5.033.852.270,00** | - | - | - | - | - | - | - | **6.265.000.000,00** | - |
| | 5.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 % | 100 % 83 Indeks | 25.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | -15.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | BKPSDM | | 30.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 8 Laporan | 8 Laporan | 25.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | -15.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 30.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 100 % | 100 % | 3.732.440.179,00 | 5.183.838.129,00 | 4.776.291.970,00 | 1.043.851.791,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | ASN | | 5.000.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 60 Orang/b ulan | 60 Orang/b ulan | 3.732.440.179,00 | 5.183.838.129,00 | 4.776.291.970,00 | 1.043.851.791,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 5.000.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhi Administrasi BMD BKPSDM | | | | 100 % | 100 % | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | BKPSDM | | 5.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 5.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai AKIP BKPSDM<br>Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 % | 100 %<br>68 Nilai<br>83 Indeks | 320.000.000,00 | 116.020.300,00 | 116.020.300,00 | -203.979.700,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | BKPSDM | | 445.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 10.000.000,00 | 6.005.300,00 | 6.005.300,00 | -3.994.700,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 15.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 50.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | -25.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 60.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 50.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | -25.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 60.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 10.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 50.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | -35.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 50.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 200 Laporan | 200 Laporan | 150.000.000,00 | 45.015.000,00 | 45.015.000,00 | -104.985.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 250.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 % | 100 % | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | BKPSDM | | 400.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 5 Unit | 5 Unit | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 150.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 15 Unit | 15 Unit | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 250.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Nilai AKIP BKPSDM<br>Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 % | 100 %<br>68 Nilai | 105.000.000,00 | 33.800.000,00 | 33.800.000,00 | -71.200.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | BKPSDM | | 105.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | -2.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 5.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 50.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | -47.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 50.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 72 Laporan | 72 Laporan | 50.000.000,00 | 28.800.000,00 | 28.800.000,00 | -21.200.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 50.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat<br>Nilai AKIP BKPSDM | | | | 100 % | 68 Nilai<br>83 Indeks | 275.000.000,00 | 97.740.000,00 | 97.740.000,00 | -177.260.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | BKPSDM | | 280.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 23 Unit | 23 Unit | 250.000.000,00 | 87.450.000,00 | 87.450.000,00 | -162.550.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 250.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 50 Unit | 50 Unit | 25.000.000,00 | 10.290.000,00 | 10.290.000,00 | -14.710.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 30.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 2, | **5.03.02** | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | **Indeks Sistem Merit<br>Indeks Profesionalitas ASN** | | | | **85<br>325<br>100 Indeks Indeks %** | **260<br>78 Indeks Indeks** | **1.160.000.000,00** | **139.417.000,00** | **139.417.000,00** | **450.000.000,00** | | | | | | | **1.610.000.000,00** | |
| | | **[ Tingkat Akurasi Data Kepegawaian, Indeks Sistem Merit, Indeks Profesionalitas ASN ]** | - | - | - | - | - | - | **1.160.000.000,00** | **139.417.000,00** | **139.417.000,00** | - | - | - | - | - | - | - | **1.610.000.000,00** | - |
| | 5.03.02.2.01 | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Indeks Profesionalitas ASN<br>Indeks Sistem Merit | | | | 100 %<br>325 Indeks<br>85 Indeks | 260 Indeks<br>78 Indeks | 290.000.000,00 | 26.867.000,00 | 26.867.000,00 | -263.133.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | ASN dan Kelompok Pencari Kerja | | 460.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.01.0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 35.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.01.0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | | | | 10000<br>Dokumen | 10000<br>Dokumen | 150.000.000,00 | 10.365.000,00 | 10.365.000,00 | -139.635.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 300.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.01.0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | | | | 200<br>Dokumen | 200<br>Dokumen | 50.000.000,00 | 6.502.000,00 | 6.502.000,00 | -43.498.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 50.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.01.0008 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi | | | | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 25.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | -15.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 25.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.01.0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | 7000<br>Dokumen | 7000<br>Dokumen | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 25.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.01.0011 | Pengelolaan Data Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian | | | | 7000<br>Dokumen | 7000<br>Dokumen | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 25.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.03.02.2.02 | Mutasi dan Promosi ASN | Indeks Profesionalitas ASN<br>Indeks Sistem Merit<br>Persentase Kenaikan Nilai Indeks Profesionalitas ASN<br>Persentase Kenaikan Nilai Indeks Sistem Merit Tingkat Akurasi Data Kepegawaian | | | | 100 %<br>325 Indeks<br>85 Indeks | 100 %<br>260 Indeks<br>325 Indeks<br>78 Indeks<br>85 Indeks | 450.000.000,00 | 57.501.000,00 | 57.501.000,00 | -392.499.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | ASN | | 600.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.02.0001 | Pengelolaan Mutasi ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | | | | 500<br>Dokumen | 500<br>Dokumen | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 50.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.02.0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | | | | 1500<br>Dokumen | 1500<br>Dokumen | 50.000.000,00 | 7.501.000,00 | 7.501.000,00 | -42.499.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 50.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.02.0003 | Pengelolaan Promosi ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | | | | 400<br>Dokumen | 400<br>Dokumen | 350.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 500.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.03 | Pengembangan Kompetensi ASN | Indeks Profesionalitas ASN<br>Persentase Kenaikan Nilai Indeks Profesionalitas ASN<br>Persentase Kenaikan Nilai Indeks Sistem Merit Tingkat Akurasi Data Kepegawaian | | | | 100 %<br>325 Indeks<br>85 Indeks | 100 %<br>325 Indeks<br>78 Indeks<br>85 Indeks | 300.000.000,00 | 45.049.000,00 | 45.049.000,00 | -254.951.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | ASN | | 400.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.03.0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan | | | | 150 Orang | 150 Orang | 100.000.000,00 | 45.049.000,00 | 45.049.000,00 | -54.951.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 100.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | - | - | - | - | - | - | - | **1.160.000.000,00** | **139.417.000,00** | **139.417.000,00** | - | - | - | - | - | - | - | **1.610.000.000,00** | - |
| | 5.03.02.2.03.0005 | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat | | | | 259<br>Dokumen | 259<br>Dokumen | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 150.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.03.0006 | Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan | | | | 60 Orang | 60 Orang | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 150.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | **[ Tingkat Akurasi Data Kepegawaian, Indeks Sistem Merit, Indeks Profesionalitas ASN ]** | - | - | - | - | - | - | **1.160.000.000,00** | **139.417.000,00** | **139.417.000,00** | - | - | - | - | - | - | - | **1.610.000.000,00** | - |
| | 5.03.02.2.04 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Indeks Profesionalitas ASN<br>Indeks Sistem Merit<br>Persentase Kenaikan Nilai Indeks Profesionalitas ASN<br>Persentase Kenaikan Nilai Indeks Sistem Merit Tingkat Akurasi Data Kepegawaian | | | | 100 %<br>325 Indeks<br>85 Indeks | 100 %<br>260 Indeks<br>325 Indeks<br>78 Indeks<br>85 Indeks | 120.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | -110.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | ASN | | 150.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04.0001 | Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 25.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.03.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | 7000 Dokumen | 7000 Dokumen | 20.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | -15.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 25.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04.0005 | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa | | | | 300 Orang | 300 Orang | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 25.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04.0007 | Pembinaan Disiplin ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | | | | 7000 Orang | 7000 Orang | 20.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | -15.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 25.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04.0008 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | | | | 50 Laporan | 50 Laporan | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 25.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04.0009 | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani | | | | 50 Dokumen | 50 Dokumen | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 25.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | **5.04** | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | | **100.000.000,00** | **1.078.025.000,00** | **1.078.025.000,00** | **978.025.000,00** | | | | | | | **1.650.000.000,00** | |
| 1, | **5.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | **Nilai Indeks Profesionalitas ASN Nilai Indeks Sistem Merit** | | | | **325 85 Indeks Indeks** | **85 325 Indeks Indeks** | **100.000.000,00** | **1.078.025.000,00** | **1.078.025.000,00** | **1.550.000.000,00** | | | | | | | **1.650.000.000,00** | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | **100.000.000,00** | **1.078.025.000,00** | **1.078.025.000,00** | - | - | - | - | - | - | - | **1.650.000.000,00** | - |
| | 5.04.02.2.01 | Pengembangan Kompetensi Teknis | Persentase Kenaikan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Persentase Kenaikan Nilai Indeks Sistem Merit | | | | 325 Indeks 85 Indeks | 325 Indeks 85 Indeks | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | ASN | | 150.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.02.2.01.0003 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi | | | | 350 Orang | 350 Orang | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 150.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | **[ Indeks Sistem Merit, Indeks Profesionalitas ASN ]** | - | - | - | - | - | - | **100.000.000,00** | **1.078.025.000,00** | **1.078.025.000,00** | - | - | - | - | - | - | - | **1.650.000.000,00** | - |
| | 5.04.02.2.02 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | - | | | | - | - | 0,00 | 1.078.025.000,00 | 1.078.025.000,00 | 1.078.025.000,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | ASN | | 1.500.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.02.2.02.0007 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | | - | 272 Laporan | 0,00 | 1.078.025.000,00 | 1.078.025.000,00 | 1.078.025.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 1.500.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | **INSPEKTORAT** | | | | | | | **12.439.115.885,00** | **13.096.320.729,00** | **12.827.854.961,00** | **388.739.076,00** | | | | | | | **23.167.620.258,50** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | **6** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **12.439.115.885,00** | **13.096.320.729,00** | **12.827.854.961,00** | **388.739.076,00** | | | | | | | **23.167.620.258,50** | |
| | **6.01** | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | | **12.439.115.885,00** | **13.096.320.729,00** | **12.827.854.961,00** | **388.739.076,00** | | | | | | | **23.167.620.258,50** | |
| 1, | **6.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | - | **100 %** | **10.720.311.741,00** | **10.906.444.104,00** | **10.637.978.336,00** | **5.754.046.937,60** | | | | | | | **16.474.358.678,60** | |
| | | **[ Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah ]** | - | - | - | - | - | - | **10.720.311.741,00** | **10.906.444.104,00** | **10.637.978.336,00** | - | - | - | - | - | - | - | **16.474.358.678,60** | - |
| | 6.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Indeks Kualitas Perencanaan Inspektorat Daerah Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah | | | | - | 95 % | 71.561.000,00 | 71.412.000,00 | 71.412.000,00 | -149.000,00 | | | - | - | - | | 333.832.062,50 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen Dokumen | 2 Dokumen Dokumen | 21.876.000,00 | 21.745.000,00 | 21.745.000,00 | -131.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 79.845.937,50 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 11.014.000,00 | 10.996.000,00 | 10.996.000,00 | -18.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 47.907.562,50 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.599.000,00 | 6.599.000,00 | 6.599.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 39.922.968,75 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.392.000,00 | 6.392.000,00 | 6.392.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 47.907.562,50 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.466.000,00 | 6.466.000,00 | 6.466.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 30.417.500,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 47.907.562,50 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 13.214.000,00 | 13.214.000,00 | 13.214.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 39.922.968,75 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Beserta Penyusunan Laporan OPD Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan Inspektorat Terlaksanya Penyerapan Anggaran Inspektorat | | | | - | 95 % | 8.681.786.366,00 | 8.865.749.559,00 | 8.597.283.791,00 | -84.502.575,00 | | | - | - | - | | 10.149.376.807,50 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 61 Orang/b ulan | 89 Orang/b ulan | 8.644.309.366,00 | 8.828.272.559,00 | 8.559.806.791,00 | -84.502.575,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 9.774.100.901,25 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 100 Dokumen | 100 Dokumen | 5.998.000,00 | 5.998.000,00 | 5.998.000,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 87.830.531,25 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 71.861.343,75 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 7.988.000,00 | 7.988.000,00 | 7.988.000,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 63.876.750,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.491.000,00 | 5.491.000,00 | 5.491.000,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 47.907.562,50 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD | | | | 18 Laporan | 18 Laporan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 47.907.562,50 | INSPEKTORAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 6.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 55.892.156,25 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase APIP yang bersertifikasi dan Mengikuti Pelatihan JP Minimal 120Jam/Tahun<br>Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah | | | | - | 95 % | 846.450.000,00 | 846.600.560,00 | 846.600.560,00 | 150.560,00 | | | - | - | - | | 3.412.841.021,10 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 26.450.000,00 | 26.520.000,00 | 26.520.000,00 | 70.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 27.772.500,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 61 Orang | 61 Orang | 615.000.000,00 | 615.000.000,00 | 615.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.820.066.906,70 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 100 Orang | 100 Orang | 120.000.000,00 | 119.882.000,00 | 119.882.000,00 | -118.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 586.867.641,15 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 60 Orang | 60 Orang | 85.000.000,00 | 85.198.560,00 | 85.198.560,00 | 198.560,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 978.133.973,25 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Internal<br>Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | - | 95 % | 496.624.375,00 | 496.632.375,00 | 496.632.375,00 | 8.000,00 | | | - | - | - | | 1.740.641.437,50 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 10 Paket | 10 Paket | 11.128.000,00 | 11.128.000,00 | 11.128.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 119.768.906,25 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 30 Paket | 30 Paket | 190.109.375,00 | 190.109.375,00 | 190.109.375,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 199.614.843,75 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 25 Paket | 25 Paket | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 103.799.718,75 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 31.378.000,00 | 31.386.000,00 | 31.386.000,00 | 8.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 127.753.500,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 25.305.000,00 | 25.305.000,00 | 25.305.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 103.799.718,75 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 55.892.156,25 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 199.614.843,75 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 187.704.000,00 | 187.704.000,00 | 187.704.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 830.397.750,00 | INSPEKTORAT |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | **10.720.311.741,00** | **10.906.444.104,00** | **10.637.978.336,00** | - | - | - | - | - | - | - | **16.474.358.678,60** | - |
| | 6.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | - | 95 % | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 105.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 105.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | | **[ Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah ]** | - | - | - | - | - | - | **10.720.311.741,00** | **10.906.444.104,00** | **10.637.978.336,00** | - | - | - | - | - | - | - | **16.474.358.678,60** | - |
| | 6.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | - | 95 %<br>Jenis | 270.720.000,00 | 273.348.170,00 | 273.348.170,00 | 2.628.170,00 | | | - | - | - | | 431.168.062,50 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1800 Laporan | 1800 Laporan | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 15.969.187,50 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 34.500.000,00 | 37.128.170,00 | 37.128.170,00 | 2.628.170,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 127.753.500,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 235.200.000,00 | 235.200.000,00 | 235.200.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 287.445.375,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik | | | | - | 95 % unit | 313.170.000,00 | 312.701.440,00 | 312.701.440,00 | -468.560,00 | | | - | - | - | | 301.499.287,50 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 26 Unit | 26 Unit | 217.850.000,00 | 217.850.000,00 | 217.850.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 43.915.256,25 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 20 Unit | 20 Unit | 10.000.000,00 | 9.531.440,00 | 9.531.440,00 | -468.560,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 42.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 78.720.000,00 | 78.720.000,00 | 78.720.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 127.753.500,00 | INSPEKTORAT |
| | | - | - | - | - | - | - | - | **10.720.311.741,00** | **10.906.444.104,00** | **10.637.978.336,00** | - | - | - | - | - | - | - | **16.474.358.678,60** | - |
| | 6.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 87.830.531,25 | INSPEKTORAT |
| 2, | **6.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | **Persentase Penyelesaian TLHP Internal Opini BPK Atas Laporan Keuangan** | | | | - | **85,5 WTP % Nilai** | **1.273.804.144,00** | **1.744.032.125,00** | **1.744.032.125,00** | **3.950.292.185,90** | | | | | | | **5.224.096.329,90** | |
| | | **[ Persentase OPD yang Memiliki Nilai Evaluasi AKIP BB ]** | - | - | - | - | - | - | **1.273.804.144,00** | **1.744.032.125,00** | **1.744.032.125,00** | - | - | - | - | - | - | - | **5.224.096.329,90** | - |
| | 6.01.02.2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Persentase terlaksananya Pengawasan Internal | | | | - | 4 Dokumen 80 % | 1.068.804.144,00 | 1.539.032.225,00 | 1.539.032.225,00 | 470.228.081,00 | | | - | - | - | | 4.103.475.954,90 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.01.0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 55.000.000,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 245.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 798.459.375,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.01.0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | 20 Laporan | 20 Laporan | 250.000.000,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 50.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 798.459.375,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.01.0003 | Reviu Laporan Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | | | | 115 Laporan | 115 Laporan | 308.804.144,00 | 334.114.225,00 | 334.114.225,00 | 25.310.081,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 853.746.298,65 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.01.0004 | Reviu Laporan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20.000.000,00 | 19.950.000,00 | 19.950.000,00 | -50.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 55.892.156,25 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.01.0005 | Pengawasan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | | | | 20 Laporan | 20 Laporan | 150.000.000,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 150.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 638.767.500,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.01.0006 | Kerja Sama Pengawasan Internal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | | | | 4 Kesepaka tan | 4 Kesepaka tan | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 239.537.812,50 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 85.000.000,00 | 84.968.000,00 | 84.968.000,00 | -32.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 718.613.437,50 | INSPEKTORAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 6.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani<br>Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu<br>Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat | | | | - | 95 % | 205.000.000,00 | 204.999.900,00 | 204.999.900,00 | -100,00 | | | - | - | - | | 1.120.620.375,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.02.0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 287.445.375,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.02.0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | | | | 40 Laporan | 40 Laporan | 175.000.000,00 | 174.999.900,00 | 174.999.900,00 | -100,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 833.175.000,00 | INSPEKTORAT |
| 3, | **6.01.03** | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | **Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern** | | | | - | **Terintegra si Terdefinisi Level Level** | **445.000.000,00** | **445.844.500,00** | **445.844.500,00** | **1.024.165.250,00** | | | | | | | **1.469.165.250,00** | |
| | | **[ Level Kapabilitas APIP ]** | - | - | - | - | - | - | **445.000.000,00** | **445.844.500,00** | **445.844.500,00** | - | - | - | - | - | - | - | **1.469.165.250,00** | - |
| | 6.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Presentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | | | | - | 95 %<br>Terdefinisi Level<br>Terintegrasi Level | 170.000.000,00 | 171.002.500,00 | 171.002.500,00 | 1.002.500,00 | | | - | - | - | | 399.229.687,50 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.01.0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | | | | 1 Rekomen dasi | 1 Rekomen dasi | 150.000.000,00 | 151.002.500,00 | 151.002.500,00 | 1.002.500,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 207.599.437,50 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.01.0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | | | | 1 Rekomen dasi | 1 Rekomen dasi | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 191.630.250,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.02 | Pendampingan dan Asistensi | Nilai hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK Nilai MCP KPK<br>Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi<br>Persentase terlaksananya kegiatan Pendamping dan Asistensi | | | | - | 43<br>perangkat daerah 80,6 Nilai<br>80,7 Nilai<br>95 % | 275.000.000,00 | 274.842.000,00 | 274.842.000,00 | -158.000,00 | | | - | - | - | | 1.069.935.562,50 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.02.0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 43<br>perangkat daerah | 43<br>perangkat daerah | 125.000.000,00 | 124.950.000,00 | 124.950.000,00 | -50.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 199.614.843,75 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.02.0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | | 43<br>perangkat daerah | 43<br>perangkat daerah | 75.000.000,00 | 74.870.000,00 | 74.870.000,00 | -130.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 367.291.312,50 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.02.0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 50.000.000,00 | 50.122.000,00 | 50.122.000,00 | 122.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 215.584.031,25 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.02.0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | | | 1 perangkat daerah | 1 perangkat daerah | 25.000.000,00 | 24.900.000,00 | 24.900.000,00 | -100.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 287.445.375,00 | INSPEKTORAT |
| | | **KECAMATAN GUNUANG OMEH** | | | | | | | **2.461.074.066,00** | **2.597.066.936,00** | **2.133.585.496,00** | **-327.488.570,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.461.074.066,00** | **2.597.066.936,00** | **2.133.585.496,00** | **-327.488.570,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.461.074.066,00** | **2.597.066.936,00** | **2.133.585.496,00** | **-327.488.570,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1, | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | | | | - | - | **2.381.499.066,00** | **2.564.941.936,00** | **2.051.460.496,00** | **-2.381.499.066,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | **2.381.499.066,00** | **2.564.941.936,00** | **2.051.460.496,00** | - | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 1.291.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.291.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN GUNUANG OMEH |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1.291.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.291.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN GUNUANG OMEH |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 2.250.480.566,00 | 2.454.032.536,00 | 1.940.551.096,00 | -309.929.470,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN GUNUANG OMEH |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 0 Orang/bul an | 12 Orang/b ulan | 1.125.240.283,00 | 1.227.016.268,00 | 970.275.548,00 | -154.964.735,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN GUNUANG OMEH |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum | | | | - | 20 % | 51.693.000,00 | 42.102.400,00 | 42.102.400,00 | -9.590.600,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN GUNUANG OMEH |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 0 Paket | 0 Paket | 711.000,00 | 0,00 | 0,00 | -711.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN GUNUANG OMEH |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 0 Paket | 0 Paket | 10.600.000,00 | 6.727.900,00 | 6.727.900,00 | -3.872.100,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN GUNUANG OMEH |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 0 Paket | 0 Paket | 2.707.000,00 | 2.309.500,00 | 2.309.500,00 | -397.500,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN GUNUANG OMEH |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 37.675.000,00 | 33.065.000,00 | 33.065.000,00 | -4.610.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN GUNUANG OMEH |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 13.684.500,00 | 3.277.000,00 | 3.277.000,00 | -10.407.500,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 0,00 | KECAMATAN GUNUANG OMEH |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 2.574.000,00 | 2.574.000,00 | 2.574.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 0,00 | KECAMATAN GUNUANG OMEH |
| | **7** | **NON URUSAN** | | | | | | | **2.461.074.066,00** | **2.597.066.936,00** | **2.133.585.496,00** | **-327.488.570,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **2.461.074.066,00** | **2.597.066.936,00** | **2.133.585.496,00** | **-327.488.570,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.461.074.066,00** | **2.597.066.936,00** | **2.133.585.496,00** | **-327.488.570,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.461.074.066,00** | **2.597.066.936,00** | **2.133.585.496,00** | **-327.488.570,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 703.000,00 | 703.000,00 | 703.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT" Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT" | | | 0,00 | KECAMATAN GUNUANG OMEH |
| | **7** | **NON URUSAN** | | | | | | | **2.461.074.066,00** | **2.597.066.936,00** | **2.133.585.496,00** | **-327.488.570,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **2.461.074.066,00** | **2.597.066.936,00** | **2.133.585.496,00** | **-327.488.570,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.461.074.066,00** | **2.597.066.936,00** | **2.133.585.496,00** | **-327.488.570,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.461.074.066,00** | **2.597.066.936,00** | **2.133.585.496,00** | **-327.488.570,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 64.350.000,00 | 65.530.000,00 | 65.530.000,00 | 1.180.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN GUNUANG OMEH |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 0 Unit | 0 Unit | 64.350.000,00 | 64.350.000,00 | 64.350.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN GUNUANG OMEH |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN GUNUANG OMEH |
| 1, | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Tingka pemberdayaan masyarakat nagari** | | | | - | **76.00 angka** | **52.575.000,00** | **1.125.000,00** | **51.125.000,00** | **-52.575.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 47.250.000,00 | 1.125.000,00 | 51.125.000,00 | 3.875.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN GUNUANG OMEH |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 0 Lembaga Kemasyarakatan | 0 Lembaga Kemasyarakatan | 1.750.000,00 | 1.125.000,00 | 1.125.000,00 | -625.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN GUNUANG OMEH |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 45.500.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 4.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN GUNUANG OMEH |
| | 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan | - | | | | - | - | 5.325.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.325.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN GUNUANG OMEH |
| | 7.01.03.2.06.0003 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | | 2000 Keluarga | 2000 Keluarga | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN GUNUANG OMEH |
| | 7.01.03.2.06.0007 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | 2000 Keluarga | 2000 Keluarga | 3.325.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.325.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN GUNUANG OMEH |
| 2, | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan (Angka)** | | | | - | **80.00 angka** | **27.000.000,00** | **31.000.000,00** | **31.000.000,00** | **-27.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 27.000.000,00 | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 4.000.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN GUNUANG OMEH |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik | | | | - | 0 Orang | 0,00 | 14.500.000,00 | 14.500.000,00 | 14.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN GUNUANG OMEH |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 27.000.000,00 | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | -10.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN GUNUANG OMEH |
| | | **KECAMATAN BUKIK BARISAN** | | | | | | | **1.621.415.530,00** | **1.525.504.869,00** | **1.480.923.492,00** | **-140.492.038,00** | | | | | | | **1.621.415.530,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **1.621.415.530,00** | **1.525.504.869,00** | **1.480.923.492,00** | **-140.492.038,00** | | | | | | | **1.621.415.530,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **1.621.415.530,00** | **1.525.504.869,00** | **1.480.923.492,00** | **-140.492.038,00** | | | | | | | **1.621.415.530,00** | |
| 1, | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | | | | - | - | **1.487.066.530,00** | **1.470.199.869,00** | **1.375.618.492,00** | **-27.309.715,00** | | | | | | | **1.459.756.815,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Penyusunan Laporan Dokumen OPD | | | | - | 20 % | 4.701.000,00 | 5.915.000,00 | 5.915.000,00 | 1.214.000,00 | | | - | - | - | | 12.942.000,00 | KECAMATAN BUKIK BARISAN |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.634.000,00 | 1.634.000,00 | 1.634.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.157.000,00 | KECAMATAN BUKIK BARISAN |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.112.000,00 | 1.112.000,00 | 1.112.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.157.000,00 | KECAMATAN BUKIK BARISAN |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 365.000,00 | 449.000,00 | 449.000,00 | 84.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.157.000,00 | KECAMATAN BUKIK BARISAN |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.157.000,00 | KECAMATAN BUKIK BARISAN |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 2.157.000,00 | KECAMATAN BUKIK BARISAN |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.152.000,00 | 1.152.000,00 | 1.152.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.157.000,00 | KECAMATAN BUKIK BARISAN |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan Keuangan OPD | | | | - | 20 % | 1.368.385.530,00 | 1.382.839.869,00 | 1.288.258.492,00 | -80.127.038,00 | | | - | - | - | | 1.317.737.000,00 | KECAMATAN BUKIK BARISAN |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 15 Orang/b ulan | 15 Orang/b ulan | 1.359.615.530,00 | 1.382.109.869,00 | 1.287.528.492,00 | -72.087.038,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.305.780.000,00 | KECAMATAN BUKIK BARISAN |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 8.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.040.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 9.800.000,00 | KECAMATAN BUKIK BARISAN |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 730.000,00 | 730.000,00 | 730.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.157.000,00 | KECAMATAN BUKIK BARISAN |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Terlaksana Laporan Aset Semester dan AKhir Tahun | | | | - | 1 dokumen | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000.000,00 | | | - | - | - | | 9.800.000,00 | KECAMATAN BUKIK BARISAN |
| | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 9.800.000,00 | KECAMATAN BUKIK BARISAN |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Adminsitrasi Umum | | | | - | 20 % | 38.500.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | -33.500.000,00 | | | - | - | - | | 68.000.000,00 | KECAMATAN BUKIK BARISAN |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 38.500.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | -33.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 68.000.000,00 | KECAMATAN BUKIK BARISAN |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 3.135.000,00 | 3.135.000,00 | 3.135.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN BUKIK BARISAN |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | - | 12 Laporan | 0,00 | 3.135.000,00 | 3.135.000,00 | 3.135.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN BUKIK BARISAN |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah | | | | - | 20 % | 69.480.000,00 | 73.310.000,00 | 73.310.000,00 | 3.830.000,00 | | | - | - | - | | 51.277.815,00 | KECAMATAN BUKIK BARISAN |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 10 Unit | 10 Unit | 68.750.000,00 | 71.850.000,00 | 71.850.000,00 | 3.100.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.547.815,00 | KECAMATAN BUKIK BARISAN |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 1 Unit | 730.000,00 | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 730.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 730.000,00 | KECAMATAN BUKIK BARISAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2, | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | - | | | | - | - | **50.044.000,00** | **29.044.000,00** | **29.044.000,00** | **503.815,00** | | | | | | | **50.547.815,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | | | | - | 90 % | 50.044.000,00 | 29.044.000,00 | 29.044.000,00 | -21.000.000,00 | | | - | - | - | | 50.547.815,00 | KECAMATAN BUKIK BARISAN |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 50.044.000,00 | 29.044.000,00 | 29.044.000,00 | -21.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.547.815,00 | KECAMATAN BUKIK BARISAN |
| 3, | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | - | | | | - | - | **57.305.000,00** | **2.261.000,00** | **52.261.000,00** | **26.805.900,00** | | | | | | | **84.110.900,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persetase Rata-Rata Nilai Swadaya Masyarakat Rata-Rata Nilai Swadaya Kepuasan Masyarakat Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari | | | | - | 20 %<br>60 % | 52.305.000,00 | 1.011.000,00 | 51.011.000,00 | -1.294.000,00 | | | - | - | - | | 79.110.900,00 | KECAMATAN BUKIK BARISAN |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 5 Lembaga Kemasyara katan | 5 Lembaga Kemasyara katan | 4.305.000,00 | 646.000,00 | 646.000,00 | -3.659.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 5.819.000,00 | KECAMATAN BUKIK BARISAN |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 48.000.000,00 | 365.000,00 | 50.365.000,00 | 2.365.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 73.291.900,00 | KECAMATAN BUKIK BARISAN |
| | 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan | Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari | | | | - | 60 % | 5.000.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | -3.750.000,00 | | | - | - | - | | 5.000.000,00 | KECAMATAN BUKIK BARISAN |
| | 7.01.03.2.06.0001 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan | | | | 5 Keluarga | 5 Keluarga | 5.000.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | -3.750.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN BUKIK BARISAN |
| 4, | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | - | | | | - | - | **27.000.000,00** | **24.000.000,00** | **24.000.000,00** | **0,00** | | | | | | | **27.000.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Perentase Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan di Kecamatan | | | | - | 20 % | 27.000.000,00 | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | -3.000.000,00 | | | - | - | - | | 27.000.000,00 | KECAMATAN BUKIK BARISAN |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 27.000.000,00 | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | -3.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 27.000.000,00 | KECAMATAN BUKIK BARISAN |
| | | **KECAMATAN SULIKI** | | | | | | | **1.840.279.889,00** | **1.762.051.438,00** | **1.631.202.047,00** | **-209.077.842,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | **7 UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **1.840.279.889,00** | **1.762.051.438,00** | **1.631.202.047,00** | **-209.077.842,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | **7.01 KECAMATAN** | | | | | | | **1.840.279.889,00** | **1.762.051.438,00** | **1.631.202.047,00** | **-209.077.842,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1, | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | | | | - | - | **1.792.279.889,00** | **1.717.977.438,00** | **1.537.128.047,00** | **-1.792.279.889,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 1.604.579.889,00 | 1.637.591.438,00 | 1.456.742.047,00 | -147.837.842,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SULIKI |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 15 orang O rang/bulan | 15 orang O rang/bulan | 1.604.579.889,00 | 1.637.591.438,00 | 1.456.742.047,00 | -147.837.842,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SULIKI |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 52.000.000,00 | 19.238.400,00 | 19.238.400,00 | -32.761.600,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SULIKI |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1Unit Paket | 1Unit Paket | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SULIKI |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | paket Paket | paket Paket | 5.000.000,00 | 5.502.400,00 | 5.502.400,00 | 502.400,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SULIKI |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | berkas Paket | berkas Paket | 2.000.000,00 | 836.000,00 | 836.000,00 | -1.164.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SULIKI |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1000 Laporan | 1000 Laporan | 30.000.000,00 | 12.900.000,00 | 12.900.000,00 | -17.100.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SULIKI |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 14.700.000,00 | 3.832.600,00 | 3.832.600,00 | -10.867.400,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SULIKI |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 laporan Laporan | 12 laporan Laporan | 3.600.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | -600.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SULIKI |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 laporan Laporan | 12 laporan Laporan | 11.100.000,00 | 832.600,00 | 832.600,00 | -10.267.400,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SULIKI |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 121.000.000,00 | 57.315.000,00 | 57.315.000,00 | -63.685.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SULIKI |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 14 unit Unit | 14 unit Unit | 45.000.000,00 | 57.315.000,00 | 57.315.000,00 | 12.315.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SULIKI |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 20 unit Unit | 20 unit Unit | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SULIKI |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 paket Unit | 1 paket Unit | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SULIKI |
| 2, | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | - | | | | - | - | **0,00** | **30.174.000,00** | **30.174.000,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.02.2.03 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | - | | | | - | - | 0,00 | 30.174.000,00 | 30.174.000,00 | 30.174.000,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 0,00 | KECAMATAN SULIKI |
| | 7.01.02.2.03.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | | | | - | 0 Dokumen | 0,00 | 30.174.000,00 | 30.174.000,00 | 30.174.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 0,00 | KECAMATAN SULIKI |
| 3, | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | - | | | | - | - | **11.000.000,00** | **4.540.000,00** | **54.540.000,00** | **-11.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 9.000.000,00 | 3.490.000,00 | 53.490.000,00 | 44.490.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SULIKI |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 4 lembaga kemasyara k Lembaga Kemasyara katan | 4 lembaga kemasyara k Lembaga Kemasyara katan | 5.000.000,00 | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 | -2.920.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SULIKI |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 4 laporan Laporan | 4 laporan Laporan | 4.000.000,00 | 1.410.000,00 | 51.410.000,00 | 47.410.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SULIKI |
| | 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan | - | | | | - | - | 2.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | -950.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SULIKI |
| | 7.01.03.2.06.0007 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | 30 keluarga Keluarga | 30 keluarga Keluarga | 2.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | -950.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SULIKI |
| 4, | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | - | | | | - | - | **37.000.000,00** | **9.360.000,00** | **9.360.000,00** | **-37.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Nilai Indeks Kepuasan MAsyarakat (IKM) | | | | - | 80 % | 37.000.000,00 | 9.360.000,00 | 9.360.000,00 | -27.640.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SULIKI |
| | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | | 200 orang Orang | 200 orang Orang | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SULIKI |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | 12 dokumen Dokumen | 12 dokumen Dokumen | 33.000.000,00 | 9.360.000,00 | 9.360.000,00 | -23.640.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SULIKI |
| | | **KECAMATAN GUGUAK** | | | | | | | **1.725.117.464,00** | **1.702.170.854,00** | **1.760.761.559,00** | **35.644.095,00** | | | | | | | **2.373.665.237,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **1.725.117.464,00** | **1.702.170.854,00** | **1.760.761.559,00** | **35.644.095,00** | | | | | | | **2.373.665.237,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **1.725.117.464,00** | **1.702.170.854,00** | **1.760.761.559,00** | **35.644.095,00** | | | | | | | **2.373.665.237,00** | |
| 1, | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | **-** | **0 0** | **1.619.188.664,00** | **1.692.060.854,00** | **1.650.651.559,00** | **430.376.573,00** | | | | | | | **2.049.565.237,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | - | - | 6.848.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.848.000,00 | | | - | - | - | | 8.000.000,00 | KECAMATAN GUGUAK |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1.745.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.745.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 2.000.000,00 | KECAMATAN GUGUAK |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1.095.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.095.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.000.000,00 | KECAMATAN GUGUAK |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.012.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.012.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.000.000,00 | KECAMATAN GUGUAK |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 1.996.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.996.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.000.000,00 | KECAMATAN GUGUAK |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terpemenuhinnya Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah | | | | - | 12 bulan | 1.352.735.864,00 | 1.607.530.854,00 | 1.566.121.559,00 | 213.385.695,00 | | | - | - | ASN | | 1.823.665.237,00 | KECAMATAN GUGUAK |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 14 Orang/b ulan | 14 Orang/b ulan | 1.352.735.864,00 | 1.607.530.854,00 | 1.566.121.559,00 | 213.385.695,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.823.665.237,00 | KECAMATAN GUGUAK |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 10.992.500,00 | 0,00 | 0,00 | -10.992.500,00 | | | - | - | - | | 15.500.000,00 | KECAMATAN GUGUAK |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 14 Paket | 14 Paket | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 12.000.000,00 | KECAMATAN GUGUAK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 2.992.500,00 | 0,00 | 0,00 | -2.992.500,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.500.000,00 | KECAMATAN GUGUAK |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pelaksanaan administrasi umum | | | | - | 100 persen | 57.378.300,00 | 19.220.000,00 | 19.220.000,00 | -38.158.300,00 | | | - | - | Kantor Camat Guguak | | 59.500.000,00 | KECAMATAN GUGUAK |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 0 Paket | 0 Paket | 4.977.000,00 | 2.133.000,00 | 2.133.000,00 | -2.844.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 5.500.000,00 | KECAMATAN GUGUAK |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 0 Paket | 0 Paket | 5.031.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.031.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN GUGUAK |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 0 Paket | 0 Paket | 12.000.000,00 | 7.423.000,00 | 7.423.000,00 | -4.577.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 13.000.000,00 | KECAMATAN GUGUAK |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 0 Paket | 0 Paket | 5.370.300,00 | 3.439.000,00 | 3.439.000,00 | -1.931.300,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 6.000.000,00 | KECAMATAN GUGUAK |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 30.000.000,00 | 6.225.000,00 | 6.225.000,00 | -23.775.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN GUGUAK |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 57.241.000,00 | 0,00 | 0,00 | -57.241.000,00 | | | - | - | - | | 35.000.000,00 | KECAMATAN GUGUAK |
| | 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 36.759.000,00 | 0,00 | 0,00 | -36.759.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN GUGUAK |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 20.482.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.482.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN GUGUAK |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pelaksanaan administrasi umum | | | | - | 100 persen | 36.913.000,00 | 8.080.000,00 | 8.080.000,00 | -28.833.000,00 | | | - | - | Kantor Camat Guguak | | 38.000.000,00 | KECAMATAN GUGUAK |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 3.000.000,00 | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 | -920.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN GUGUAK |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 33.913.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | -27.913.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 35.000.000,00 | KECAMATAN GUGUAK |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum | | | | - | 100 persen | 97.080.000,00 | 57.230.000,00 | 57.230.000,00 | -39.850.000,00 | | | - | - | Kantor Camat Guguak | | 69.900.000,00 | KECAMATAN GUGUAK |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 0 Unit | 0 Unit | 68.750.000,00 | 53.350.000,00 | 53.350.000,00 | -15.400.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 64.900.000,00 | KECAMATAN GUGUAK |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 0 Unit | 0 Unit | 4.780.000,00 | 3.880.000,00 | 3.880.000,00 | -900.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN GUGUAK |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 0 Unit | 0 Unit | 23.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | -23.550.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN GUGUAK |
| 2, | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan** | | | | - | **0 0** | **20.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000.000,00** | | | | | | | **30.000.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | - | 0 0 | 10.000.500,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.500,00 | | | - | - | - | | 15.000.000,00 | KECAMATAN GUGUAK |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 10.000.500,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.500,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN GUGUAK |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | - | 0 0 | 9.999.500,00 | 0,00 | 0,00 | -9.999.500,00 | | | - | - | - | | 15.000.000,00 | KECAMATAN GUGUAK |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 9.999.500,00 | 0,00 | 0,00 | -9.999.500,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN GUGUAK |
| 3, | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari** | | | | - | **66 persen** | **33.928.800,00** | **2.070.000,00** | **102.070.000,00** | **174.571.200,00** | | | | | | | **208.500.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Pemberdayaan Kelembaga Masyarakat Kecamatan | | | | - | 66 persen | 17.816.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 82.184.000,00 | | | - | - | - | | 160.000.000,00 | KECAMATAN GUGUAK |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 17.816.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 82.184.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 160.000.000,00 | KECAMATAN GUGUAK |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | - | 5 nagari | 7.070.000,00 | 2.070.000,00 | 2.070.000,00 | -5.000.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | Nagari | | 8.500.000,00 | KECAMATAN GUGUAK |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 7.070.000,00 | 2.070.000,00 | 2.070.000,00 | -5.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | | | 8.500.000,00 | KECAMATAN GUGUAK |
| | 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan | - | | | | - | - | 9.042.800,00 | 0,00 | 0,00 | -9.042.800,00 | | | - | - | - | | 40.000.000,00 | KECAMATAN GUGUAK |
| | 7.01.03.2.06.0006 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | | 20 Keluarga | 20 Keluarga | 5.999.800,00 | 0,00 | 0,00 | -5.999.800,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN GUGUAK |
| | 7.01.03.2.06.0007 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | 0 Keluarga | 0 Keluarga | 3.043.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.043.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN GUGUAK |
| 4, | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | - | | | | - | - | **5.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000.000,00** | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | | | | - | - | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | | | - | - | - | | 20.000.000,00 | KECAMATAN GUGUAK |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN GUGUAK |
| 5, | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **JTingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | | **-** | **6 bulan** | **27.000.000,00** | **8.040.000,00** | **8.040.000,00** | **3.000.000,00** | | | | | | | **30.000.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | - | 6 bulan | 27.000.000,00 | 8.040.000,00 | 8.040.000,00 | -18.960.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | - | Nagari | | 30.000.000,00 | KECAMATAN GUGUAK |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 27.000.000,00 | 8.040.000,00 | 8.040.000,00 | -18.960.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | - | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN GUGUAK |
| 6, | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | - | | | | - | - | **20.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.600.000,00** | | | | | | | **35.600.000,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | | | | - | - | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | | | - | - | - | | 35.600.000,00 | KECAMATAN GUGUAK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.06.2.01.0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN GUGUAK |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN GUGUAK |
| | 7.01.06.2.01.0007 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 5.600.000,00 | KECAMATAN GUGUAK |
| | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN GUGUAK |
| | | **KECAMATAN MUNGKA** | | | | | | | **1.366.826.872,00** | **1.386.651.134,00** | **1.373.218.083,00** | **6.391.211,00** | | | | | | | **2.317.500.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **1.366.826.872,00** | **1.386.651.134,00** | **1.373.218.083,00** | **6.391.211,00** | | | | | | | **2.317.500.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **1.366.826.872,00** | **1.386.651.134,00** | **1.373.218.083,00** | **6.391.211,00** | | | | | | | **2.317.500.000,00** | |
| 1, | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | | | | - | - | **1.297.019.272,00** | **1.376.305.134,00** | **1.312.872.083,00** | **690.480.728,00** | | | | | | | **1.987.500.000,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 1.096.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.096.000,00 | | | - | - | - | | 3.500.000,00 | KECAMATAN MUNGKA |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | - | - | 1.096.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.096.000,00 | - | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.500.000,00 | KECAMATAN MUNGKA |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 1.126.248.972,00 | 1.290.990.424,00 | 1.227.557.373,00 | 101.308.401,00 | | | - | - | - | | 1.503.500.000,00 | KECAMATAN MUNGKA |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | - | 0 0 | 1.123.271.172,00 | 1.290.990.424,00 | 1.227.557.373,00 | 104.286.201,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.500.000.000,00 | KECAMATAN MUNGKA |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 2.977.800,00 | 0,00 | 0,00 | -2.977.800,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.500.000,00 | KECAMATAN MUNGKA |
| | **7** | **NON URUSAN** | | | | | | | **1.366.826.872,00** | **1.386.651.134,00** | **1.373.218.083,00** | **6.391.211,00** | | | | | | | **2.317.500.000,00** | |
| | **7.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **1.366.826.872,00** | **1.386.651.134,00** | **1.373.218.083,00** | **6.391.211,00** | | | | | | | **2.317.500.000,00** | |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 2.374.600,00 | 0,00 | 0,00 | -2.374.600,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN MUNGKA |
| | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.374.600,00 | 0,00 | 0,00 | -2.374.600,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN MUNGKA |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **1.366.826.872,00** | **1.386.651.134,00** | **1.373.218.083,00** | **6.391.211,00** | | | | | | | **2.317.500.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **1.366.826.872,00** | **1.386.651.134,00** | **1.373.218.083,00** | **6.391.211,00** | | | | | | | **2.317.500.000,00** | |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.500.000,00 | | | - | - | - | | 65.000.000,00 | KECAMATAN MUNGKA |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 15 Paket | 15 Paket | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 65.000.000,00 | KECAMATAN MUNGKA |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 58.949.700,00 | 13.614.710,00 | 13.614.710,00 | -45.334.990,00 | | | - | - | - | | 203.500.000,00 | KECAMATAN MUNGKA |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 36 Paket | 36 Paket | 1.422.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.422.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.500.000,00 | KECAMATAN MUNGKA |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | - | - | 23.568.000,00 | 0,00 | 0,00 | -23.568.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 85.000.000,00 | KECAMATAN MUNGKA |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 56 Paket | 56 Paket | 10.756.200,00 | 4.476.300,00 | 4.476.300,00 | -6.279.900,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN MUNGKA |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 36 Paket | 36 Paket | 3.473.500,00 | 2.353.410,00 | 2.353.410,00 | -1.120.090,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN MUNGKA |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 48 Laporan | 48 Laporan | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.250.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 18.000.000,00 | KECAMATAN MUNGKA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 60 Laporan | 60 Laporan | 17.480.000,00 | 6.785.000,00 | 6.785.000,00 | -10.695.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 62.000.000,00 | KECAMATAN MUNGKA |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 48.500.000,00 | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 | -37.200.000,00 | | | - | - | - | | 117.000.000,00 | KECAMATAN MUNGKA |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 28 Laporan | 28 Laporan | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN MUNGKA |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 11.000.000,00 | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 | 300.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 16.000.000,00 | KECAMATAN MUNGKA |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 60 Laporan | 60 Laporan | 36.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -36.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 98.000.000,00 | KECAMATAN MUNGKA |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 53.350.000,00 | 60.400.000,00 | 60.400.000,00 | 7.050.000,00 | | | - | - | - | | 95.000.000,00 | KECAMATAN MUNGKA |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 8 Unit | 8 Unit | 53.350.000,00 | 60.400.000,00 | 60.400.000,00 | 7.050.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 95.000.000,00 | KECAMATAN MUNGKA |
| 1, | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | - | | | | - | - | **32.000.000,00** | **8.040.000,00** | **8.040.000,00** | **49.000.000,00** | | | | | | | **81.000.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 32.000.000,00 | 8.040.000,00 | 8.040.000,00 | -23.960.000,00 | | | - | - | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Kecamatan Mungka | | 81.000.000,00 | KECAMATAN MUNGKA |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | 24 Laporan | 24 Laporan | 27.000.000,00 | 8.040.000,00 | 8.040.000,00 | -18.960.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 27.000.000,00 | KECAMATAN MUNGKA |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 36 Dokumen | 36 Dokumen | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 54.000.000,00 | KECAMATAN MUNGKA |
| 2, | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | - | | | | - | - | **13.385.000,00** | **2.306.000,00** | **52.306.000,00** | **137.615.000,00** | | | | | | | **151.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 6.535.000,00 | 2.306.000,00 | 52.306.000,00 | 45.771.000,00 | | | - | - | - | | 108.000.000,00 | KECAMATAN MUNGKA |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 54 Lembaga K emasyarakatan | 54 Lembaga K emasyarakatan | 3.035.000,00 | 2.306.000,00 | 2.306.000,00 | -729.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 8.000.000,00 | KECAMATAN MUNGKA |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 52 Laporan | 52 Laporan | 3.500.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 46.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN MUNGKA |
| | 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan | - | | | | - | - | 6.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.850.000,00 | | | - | - | - | | 43.000.000,00 | KECAMATAN MUNGKA |
| | 7.01.03.2.06.0006 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | | 1658 Keluarga | 1658 Keluarga | 3.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.980.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 18.000.000,00 | KECAMATAN MUNGKA |
| | 7.01.03.2.06.0007 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | 1685 Keluarga | 1685 Keluarga | 2.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.870.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 25.000.000,00 | KECAMATAN MUNGKA |
| 3, | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | - | | | | - | - | **5.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **11.000.000,00** | | | | | | | **16.000.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | | | | - | - | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | | | - | - | - | | 16.000.000,00 | KECAMATAN MUNGKA |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | 60 Laporan | 60 Laporan | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 16.000.000,00 | KECAMATAN MUNGKA |
| 4, | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | - | | | | - | - | **10.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000.000,00** | | | | | | | **50.000.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | | | - | - | - | | 50.000.000,00 | KECAMATAN MUNGKA |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik | | | | 250 Orang | 250 Orang | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN MUNGKA |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | 24 Dokumen | 24 Dokumen | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 40.000.000,00 | KECAMATAN MUNGKA |
| 5, | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | - | | | | - | - | **9.422.600,00** | **0,00** | **0,00** | **22.577.400,00** | | | | | | | **32.000.000,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | | | | - | - | 9.422.600,00 | 0,00 | 0,00 | -9.422.600,00 | | | - | - | - | | 32.000.000,00 | KECAMATAN MUNGKA |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | 24 Dokumen | 24 Dokumen | 4.407.600,00 | 0,00 | 0,00 | -4.407.600,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 18.000.000,00 | KECAMATAN MUNGKA |
| | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | 60 Laporan | 60 Laporan | 5.015.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.015.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 14.000.000,00 | KECAMATAN MUNGKA |
| | | **KECAMATAN AKABILURU** | | | | | | | **1.845.141.830,00** | **1.648.300.780,00** | **1.528.397.213,00** | **-316.744.617,00** | | | | | | | **1.995.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **1.845.141.830,00** | **1.648.300.780,00** | **1.528.397.213,00** | **-316.744.617,00** | | | | | | | **1.995.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **1.845.141.830,00** | **1.648.300.780,00** | **1.528.397.213,00** | **-316.744.617,00** | | | | | | | **1.995.000.000,00** | |
| 1, | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | | | | - | - | **1.708.116.830,00** | **1.631.800.780,00** | **1.461.897.213,00** | **155.883.170,00** | | | | | | | **1.864.000.000,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Penyusunan Laporan OPD | | | | - | 20 % | 15.892.000,00 | 4.452.000,00 | 4.452.000,00 | -11.440.000,00 | | | - | - | - | | 34.500.000,00 | KECAMATAN AKABILURU |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 10.628.000,00 | 3.002.000,00 | 3.002.000,00 | -7.626.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 27.000.000,00 | KECAMATAN AKABILURU |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | - | 0 0 | 5.264.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | -3.814.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 7.500.000,00 | KECAMATAN AKABILURU |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD | | | | - | 20 % | 1.502.961.830,00 | 1.520.832.780,00 | 1.350.929.213,00 | -152.032.617,00 | | | - | - | - | | 1.605.000.000,00 | KECAMATAN AKABILURU |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 15 Orang/b ulan | 15 Orang/b ulan | 1.498.645.830,00 | 1.520.832.780,00 | 1.350.929.213,00 | -147.716.617,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.600.000.000,00 | KECAMATAN AKABILURU |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 4.316.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.316.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN AKABILURU |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Laporan Aset, Semester dan Akhir Tahun | | | | - | 20 % | 8.120.000,00 | 2.090.000,00 | 2.090.000,00 | -6.030.000,00 | | | - | - | - | | 10.000.000,00 | KECAMATAN AKABILURU |
| | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 8.120.000,00 | 2.090.000,00 | 2.090.000,00 | -6.030.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN AKABILURU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Baju Dinas ASN dan Non ASN | | | | - | 20 % | 12.486.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | -11.336.000,00 | | | - | - | - | | 15.000.000,00 | KECAMATAN AKABILURU |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 15 Paket | 15 Paket | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN AKABILURU |
| | 7.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 4.986.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | -3.836.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN AKABILURU |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum | | | | - | 20 % | 51.327.000,00 | 24.754.000,00 | 24.754.000,00 | -26.573.000,00 | | | - | - | - | | 92.000.000,00 | KECAMATAN AKABILURU |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 1.280.000,00 | 975.000,00 | 975.000,00 | -305.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.000.000,00 | KECAMATAN AKABILURU |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 12.000.000,00 | 6.604.000,00 | 6.604.000,00 | -5.396.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN AKABILURU |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 7.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | -3.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN AKABILURU |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 30.547.000,00 | 12.675.000,00 | 12.675.000,00 | -17.872.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 60.000.000,00 | KECAMATAN AKABILURU |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum | | | | - | 20 % | 21.600.000,00 | 9.262.000,00 | 9.262.000,00 | -12.338.000,00 | | | - | - | - | | 23.500.000,00 | KECAMATAN AKABILURU |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | -500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | | KECAMATAN AKABILURU |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.600.000,00 | 6.762.000,00 | 6.762.000,00 | 162.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | | KECAMATAN AKABILURU |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 14.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | -12.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | | KECAMATAN AKABILURU |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum | | | | - | 20 % | 95.730.000,00 | 69.260.000,00 | 69.260.000,00 | -26.470.000,00 | | | - | - | - | | | KECAMATAN AKABILURU |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 9 Unit | 9 Unit | 67.750.000,00 | 67.750.000,00 | 67.750.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | | KECAMATAN AKABILURU |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 15 Unit | 15 Unit | 8.180.000,00 | 1.510.000,00 | 1.510.000,00 | -6.670.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | | KECAMATAN AKABILURU |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 19.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -19.800.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | | KECAMATAN AKABILURU |
| 2, | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | - | | | | - | - | **13.524.000,00** | **0,00** | **0,00** | **476.000,00** | | | | | | | | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat | | | | - | 20 % | 6.564.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.564.000,00 | | | - | - | - | | | KECAMATAN AKABILURU |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.564.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.564.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | | KECAMATAN AKABILURU |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat | | | | - | 20 % | 6.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.960.000,00 | | | - | - | - | | | KECAMATAN AKABILURU |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.960.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | | KECAMATAN AKABILURU |
| 3, | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari** | | | | - | **50 %** | **45.933.000,00** | **8.250.000,00** | **58.250.000,00** | **5.067.000,00** | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Penyusunan Laporan OPD | | | | - | 20 % | 24.575.000,00 | 6.200.000,00 | 56.200.000,00 | 31.625.000,00 | | | - | - | - | | | KECAMATAN AKABILURU |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 7 Lembaga Kemasyara katan | 7 Lembaga Kemasyara katan | 17.280.000,00 | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | -11.080.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | | KECAMATAN AKABILURU |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 7 Laporan | 1 Laporan | 7.295.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 42.705.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | | KECAMATAN AKABILURU |
| | 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan | - | | | | - | - | 21.358.000,00 | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | -19.308.000,00 | | | - | - | - | | | KECAMATAN AKABILURU |
| | 7.01.03.2.06.0003 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | | 70 Keluarga | 70 Keluarga | 17.026.000,00 | 0,00 | 0,00 | -17.026.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | | KECAMATAN AKABILURU |
| | 7.01.03.2.06.0007 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | 70 Keluarga | 70 Keluarga | 4.332.000,00 | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | -2.282.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | | | KECAMATAN AKABILURU |
| 4, | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | - | | | | - | - | **63.840.000,00** | **8.250.000,00** | **8.250.000,00** | **-11.840.000,00** | | | | | | | | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Urusan Pemerintahan Umum | | | | - | 20 % | 63.840.000,00 | 8.250.000,00 | 8.250.000,00 | -55.590.000,00 | | | - | - | - | | | KECAMATAN AKABILURU |
| | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | 1 Orang | 1 Orang | 35.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | -35.160.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 7.000.000,00 | KECAMATAN AKABILURU |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 28.680.000,00 | 8.250.000,00 | 8.250.000,00 | -20.430.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 45.000.000,00 | KECAMATAN AKABILURU |
| 5, | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | - | | | | - | - | **13.728.000,00** | **0,00** | **0,00** | **272.000,00** | | | | | | | **14.000.000,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Produk Hukum Nagari | | | | - | 20 % | 13.728.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.728.000,00 | | | - | - | - | | 14.000.000,00 | KECAMATAN AKABILURU |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.910.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.910.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 7.000.000,00 | KECAMATAN AKABILURU |
| | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.818.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.818.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 7.000.000,00 | KECAMATAN AKABILURU |
| | | **KECAMATAN PAYAKUMBUH** | | | | | | | **2.314.464.076,00** | **2.348.788.381,00** | **2.319.590.426,00** | **5.126.350,00** | | | | | | | **2.512.337.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.314.464.076,00** | **2.348.788.381,00** | **2.319.590.426,00** | **5.126.350,00** | | | | | | | **2.512.337.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.314.464.076,00** | **2.348.788.381,00** | **2.319.590.426,00** | **5.126.350,00** | | | | | | | **2.512.337.000,00** | |
| 1, | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | - | **2 Dokumen** | **2.245.927.676,00** | **2.336.429.281,00** | **2.257.231.326,00** | **213.909.324,00** | | | | | | | **2.459.837.000,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | - | 2 dokumen | 5.600.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | -3.600.000,00 | | | - | - | - | | 6.500.000,00 | KECAMATAN PAYAKUMBUH |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 2.800.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | -1.800.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN PAYAKUMBUH |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.500.000,00 | KECAMATAN PAYAKUMBUH |
| | **7** | **NON URUSAN** | | | | | | | **2.314.464.076,00** | **2.348.788.381,00** | **2.319.590.426,00** | **5.126.350,00** | | | | | | | **2.512.337.000,00** | |
| | **7.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **2.314.464.076,00** | **2.348.788.381,00** | **2.319.590.426,00** | **5.126.350,00** | | | | | | | **2.512.337.000,00** | |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.314.464.076,00** | **2.348.788.381,00** | **2.319.590.426,00** | **5.126.350,00** | | | | | | | **2.512.337.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.314.464.076,00** | **2.348.788.381,00** | **2.319.590.426,00** | **5.126.350,00** | | | | | | | **2.512.337.000,00** | |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD | | | | - | 20 persen | 2.042.795.076,00 | 2.152.442.381,00 | 2.073.244.426,00 | 30.449.350,00 | | | - | - | - | | 2.200.000.000,00 | KECAMATAN PAYAKUMBUH |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 0 0 | 0 0 | 2.042.795.076,00 | 2.152.442.381,00 | 2.073.244.426,00 | 30.449.350,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.200.000.000,00 | KECAMATAN PAYAKUMBUH |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000.000,00 | | | - | - | - | | 15.000.000,00 | KECAMATAN PAYAKUMBUH |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 22 Paket | 22 Paket | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN PAYAKUMBUH |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 33.035.600,00 | 12.746.300,00 | 12.746.300,00 | -20.289.300,00 | | | - | - | - | | 40.500.000,00 | KECAMATAN PAYAKUMBUH |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 12 Paket | 1.422.000,00 | 6.599.000,00 | 6.599.000,00 | 5.177.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN PAYAKUMBUH |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 5 Paket | 5 Paket | 3.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.750.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.500.000,00 | KECAMATAN PAYAKUMBUH |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 5.990.000,00 | 4.551.000,00 | 4.551.000,00 | -1.439.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 7.000.000,00 | KECAMATAN PAYAKUMBUH |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 1.798.600,00 | 546.300,00 | 546.300,00 | -1.252.300,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN PAYAKUMBUH |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN PAYAKUMBUH |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 13.575.000,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | -12.525.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN PAYAKUMBUH |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 10.437.000,00 | 10.437.000,00 | 10.437.000,00 | | | - | - | - | | 20.000.000,00 | KECAMATAN PAYAKUMBUH |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 1 Unit | 7 Unit | 0,00 | 10.437.000,00 | 10.437.000,00 | 10.437.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN PAYAKUMBUH |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 61.837.000,00 | 50.033.600,00 | 50.033.600,00 | -11.803.400,00 | | | - | - | - | | 44.837.000,00 | KECAMATAN PAYAKUMBUH |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 7.000.000,00 | 6.662.000,00 | 6.662.000,00 | -338.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 8.000.000,00 | KECAMATAN PAYAKUMBUH |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 7 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 43.371.600,00 | 43.371.600,00 | 43.371.600,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 36.837.000,00 | KECAMATAN PAYAKUMBUH |
| | **7** | **NON URUSAN** | | | | | | | **2.314.464.076,00** | **2.348.788.381,00** | **2.319.590.426,00** | **5.126.350,00** | | | | | | | **2.512.337.000,00** | |
| | **7.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **2.314.464.076,00** | **2.348.788.381,00** | **2.319.590.426,00** | **5.126.350,00** | | | | | | | **2.512.337.000,00** | |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.314.464.076,00** | **2.348.788.381,00** | **2.319.590.426,00** | **5.126.350,00** | | | | | | | **2.512.337.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.314.464.076,00** | **2.348.788.381,00** | **2.319.590.426,00** | **5.126.350,00** | | | | | | | **2.512.337.000,00** | |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 91.660.000,00 | 108.770.000,00 | 108.770.000,00 | 17.110.000,00 | | | - | - | - | | 133.000.000,00 | KECAMATAN PAYAKUMBUH |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 9 Unit | 9 Unit | 67.750.000,00 | 67.750.000,00 | 67.750.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 75.000.000,00 | KECAMATAN PAYAKUMBUH |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 4 Unit | 4 Unit | 3.910.000,00 | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | -2.490.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 4.000.000,00 | KECAMATAN PAYAKUMBUH |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 20.000.000,00 | 39.600.000,00 | 39.600.000,00 | 19.600.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 54.000.000,00 | KECAMATAN PAYAKUMBUH |
| 1, | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Indek Kepuasan Masyarakat** | | | | **-** | **7 Nagari** | **5.506.200,00** | **1.098.900,00** | **1.098.900,00** | **-6.200,00** | | | | | | | **5.500.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Payakumbuh | | | | - | 7 Nagari | 3.500.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | -2.800.000,00 | | | - | - | - | | 2.500.000,00 | KECAMATAN PAYAKUMBUH |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.500.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | -2.800.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.500.000,00 | KECAMATAN PAYAKUMBUH |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Payakumbuh | | | | - | 7 undefined | 2.006.200,00 | 398.900,00 | 398.900,00 | -1.607.300,00 | | | - | - | - | | 3.000.000,00 | KECAMATAN PAYAKUMBUH |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.006.200,00 | 398.900,00 | 398.900,00 | -1.607.300,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN PAYAKUMBUH |
| 2, | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari** | | | | **-** | **7 Nagari** | **30.248.500,00** | **2.483.500,00** | **52.483.500,00** | **-18.748.500,00** | | | | | | | **11.500.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Nagari | | | | - | 7 Nagari | 26.748.500,00 | 1.783.500,00 | 51.783.500,00 | 25.035.000,00 | | | - | - | - | | 7.500.000,00 | KECAMATAN PAYAKUMBUH |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 7 Lembaga Kemasyarakatan | 7 Lembaga Kemasyarakatan | 3.250.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | -1.850.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 4.000.000,00 | KECAMATAN PAYAKUMBUH |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 0 Laporan | 2 Laporan | 23.498.500,00 | 383.500,00 | 50.383.500,00 | 26.885.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.500.000,00 | KECAMATAN PAYAKUMBUH |
| | 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Nagari | | | | - | 7 Nagari | 3.500.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | -2.800.000,00 | | | - | - | - | | 4.000.000,00 | KECAMATAN PAYAKUMBUH |
| | 7.01.03.2.06.0007 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | 50 Keluarga | 50 Keluarga | 3.500.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | -2.800.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 4.000.000,00 | KECAMATAN PAYAKUMBUH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 3, | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Tingkat Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan** | | | | - | **7 Nagari** | **2.000.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **1.000.000,00** | | | | | | | **3.000.000,00** | |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan | | | | - | 7 Nagari | 2.000.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | -1.650.000,00 | | | - | - | - | | 3.000.000,00 | KECAMATAN PAYAKUMBUH |
| | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | 7 Laporan | 7 Laporan | 2.000.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | -1.650.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN PAYAKUMBUH |
| 4, | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan** | | | | - | **7 Nagari** | **28.780.000,00** | **8.040.000,00** | **8.040.000,00** | **1.220.000,00** | | | | | | | **30.000.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Terselenggaranya urusan pemerintahan umum secara tertib, terkoordinasi, | | | | - | 7 Nagari | 28.780.000,00 | 8.040.000,00 | 8.040.000,00 | -20.740.000,00 | | | - | - | - | | 30.000.000,00 | KECAMATAN PAYAKUMBUH |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 28.780.000,00 | 8.040.000,00 | 8.040.000,00 | -20.740.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN PAYAKUMBUH |
| 5, | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari** | | | | - | **7 Nagari** | **2.001.700,00** | **386.700,00** | **386.700,00** | **498.300,00** | | | | | | | **2.500.000,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa melalui pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan dan terstruktur | | | | - | 7 Nagari | 2.001.700,00 | 386.700,00 | 386.700,00 | -1.615.000,00 | | | - | - | - | | 2.500.000,00 | KECAMATAN PAYAKUMBUH |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 2.001.700,00 | 386.700,00 | 386.700,00 | -1.615.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.500.000,00 | KECAMATAN PAYAKUMBUH |
| | | **KECAMATAN LUAK** | | | | | | | **1.876.292.043,00** | **1.903.724.231,00** | **1.837.637.953,00** | **-38.654.090,00** | | | | | | | **2.123.113.143,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **1.876.292.043,00** | **1.903.724.231,00** | **1.837.637.953,00** | **-38.654.090,00** | | | | | | | **2.123.113.143,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **1.876.292.043,00** | **1.903.724.231,00** | **1.837.637.953,00** | **-38.654.090,00** | | | | | | | **2.123.113.143,00** | |
| 1, | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | | | | - | - | **1.804.053.543,00** | **1.884.599.231,00** | **1.768.512.953,00** | **151.059.600,00** | | | | | | | **1.955.113.143,00** | |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 1.658.599.543,00 | 1.800.900.331,00 | 1.684.814.053,00 | 26.214.510,00 | | | - | - | - | | 1.750.613.143,00 | KECAMATAN LUAK |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 224 Orang/ bulan | 224 Orang/ bulan | 1.658.599.543,00 | 1.800.900.331,00 | 1.684.814.053,00 | 26.214.510,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.750.613.143,00 | KECAMATAN LUAK |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 16.510.000,00 | 10.418.100,00 | 10.418.100,00 | -6.091.900,00 | | | - | - | - | | 43.000.000,00 | KECAMATAN LUAK |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 1.422.000,00 | 462.000,00 | 462.000,00 | -960.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN LUAK |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 4.978.000,00 | 4.841.100,00 | 4.841.100,00 | -136.900,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 12.000.000,00 | KECAMATAN LUAK |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 1.500.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | -1.050.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN LUAK |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 8.610.000,00 | 4.665.000,00 | 4.665.000,00 | -3.945.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 25.000.000,00 | KECAMATAN LUAK |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 60.435.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.435.000,00 | | | - | - | - | | 65.000.000,00 | KECAMATAN LUAK |
| | 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 36.759.000,00 | 0,00 | 0,00 | -36.759.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN LUAK |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 13.468.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.468.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN LUAK |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.208.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.208.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN LUAK |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 9.064.000,00 | 13.180.800,00 | 13.180.800,00 | 4.116.800,00 | | | - | - | - | | 24.000.000,00 | KECAMATAN LUAK |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 8.864.000,00 | 12.764.000,00 | 12.764.000,00 | 3.900.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 12.000.000,00 | KECAMATAN LUAK |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 200.000,00 | 416.800,00 | 416.800,00 | 216.800,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 12.000.000,00 | KECAMATAN LUAK |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 59.445.000,00 | 60.100.000,00 | 60.100.000,00 | 655.000,00 | | | - | - | - | | 72.500.000,00 | KECAMATAN LUAK |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 7 Unit | 7 Unit | 57.200.000,00 | 60.100.000,00 | 60.100.000,00 | 2.900.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 70.000.000,00 | KECAMATAN LUAK |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 4 Unit | 4 Unit | 2.245.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.245.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.500.000,00 | KECAMATAN LUAK |
| 2, | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | - | | | | - | - | **35.118.500,00** | **0,00** | **0,00** | **38.881.500,00** | | | | | | | **74.000.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | | | - | - | - | | 50.000.000,00 | KECAMATAN LUAK |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | KECAMATAN LUAK |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | | | | - | - | 15.118.500,00 | 0,00 | 0,00 | -15.118.500,00 | | | - | - | - | | 24.000.000,00 | KECAMATAN LUAK |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 15.118.500,00 | 0,00 | 0,00 | -15.118.500,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 24.000.000,00 | KECAMATAN LUAK |
| 3, | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | - | | | | - | - | **4.865.000,00** | **2.625.000,00** | **52.625.000,00** | **53.135.000,00** | | | | | | | **58.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 1.865.000,00 | 2.625.000,00 | 52.625.000,00 | 50.760.000,00 | | | - | - | - | | 53.000.000,00 | KECAMATAN LUAK |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 4 Lembaga Kemasyarakatan | 4 Lembaga Kemasyarakatan | 1.865.000,00 | 2.625.000,00 | 2.625.000,00 | 760.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN LUAK |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | - | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 50.000.000,00 | KECAMATAN LUAK |
| | 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan | - | | | | - | - | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000.000,00 | | | - | - | - | | 5.000.000,00 | KECAMATAN LUAK |
| | 7.01.03.2.06.0003 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | | 0 Keluarga | 0 Keluarga | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN LUAK |
| | 7.01.03.2.06.0006 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | | 20 Keluarga | 20 Keluarga | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN LUAK |
| 4, | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | - | | | | - | - | **32.255.000,00** | **16.500.000,00** | **16.500.000,00** | **3.745.000,00** | | | | | | | **36.000.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 32.255.000,00 | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | -15.755.000,00 | | | - | - | - | | 36.000.000,00 | KECAMATAN LUAK |
| | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | | 30 Orang | 30 Orang | 4.975.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.975.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 6.000.000,00 | KECAMATAN LUAK |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 27.280.000,00 | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | -10.780.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN LUAK |
| | | **KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN** | | | | | | | **1.842.689.130,00** | **1.745.360.269,00** | **1.781.867.333,00** | **-60.821.797,00** | | | | | | | **1.915.500.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **1.842.689.130,00** | **1.745.360.269,00** | **1.781.867.333,00** | **-60.821.797,00** | | | | | | | **1.915.500.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **1.842.689.130,00** | **1.745.360.269,00** | **1.781.867.333,00** | **-60.821.797,00** | | | | | | | **1.915.500.000,00** | |
| 1, | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah** | | | | **100 %** | **100 %** | **1.773.689.130,00** | **1.705.370.269,00** | **1.691.877.333,00** | **56.310.870,00** | | | | | | | **1.830.000.000,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai AKIP | | | | 20 % | 20 % | 8.649.540,00 | 3.209.000,00 | 3.209.000,00 | -5.440.540,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Instansi | | 10.500.000,00 | KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 1.600.000,00 | 1.134.000,00 | 1.134.000,00 | -466.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 2.500.000,00 | KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.549.540,00 | 1.037.500,00 | 1.037.500,00 | -512.040,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 2.000.000,00 | KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.500.000,00 | 1.037.500,00 | 1.037.500,00 | -462.500,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 2.000.000,00 | KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | - | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 2.000.000,00 | KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | - | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 2.000.000,00 | KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Nilai AKIP | | | | 20 Persen | 20 Persen | 1.588.190.676,00 | 1.627.221.355,00 | 1.613.728.419,00 | 25.537.743,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Instansi | | 1.600.000.000,00 | KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 14 Orang/b ulan | 14 Orang/b ulan | 1.588.190.676,00 | 1.627.221.355,00 | 1.613.728.419,00 | 25.537.743,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 1.600.000.000,00 | KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 79.390.000,00 | 25.711.000,00 | 25.711.000,00 | -53.679.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Instansi | | 83.000.000,00 | KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 1.000.000,00 | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 | 280.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 2.000.000,00 | KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 4 Paket | 29.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -29.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | - | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 3.500.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | -2.200.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 4.000.000,00 | KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 9.140.000,00 | 7.926.000,00 | 7.926.000,00 | -1.214.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 9.000.000,00 | KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 7.000.000,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | -1.600.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 8.000.000,00 | KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 29.250.000,00 | 9.805.000,00 | 9.805.000,00 | -19.445.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Nilai AKIP | | | | 20 % | 20 % | 41.208.914,00 | 4.528.914,00 | 4.528.914,00 | -36.680.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Instansi | | | KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 1.000.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | -750.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | | KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 4.208.914,00 | 4.278.914,00 | 4.278.914,00 | 70.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | | KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 36.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -36.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | - | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | | KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Nilai AKIP | | | | 20 % | 65 % | 56.250.000,00 | 44.700.000,00 | 44.700.000,00 | -11.550.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang | - - | Instansi | | | KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 6 Unit | 3 Unit | 56.250.000,00 | 44.700.000,00 | 44.700.000,00 | -11.550.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang | - - | | | | KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN |
| 2, | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Indeks Kepuasan Masyarakat** | | | | **-** | **91 Persen** | **12.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000.000,00** | | | | | | | | |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Nilai IKM | | | | 12 bulan | 12 bulan | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | Masyarakat | | | KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | - | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | | KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN |
| 3, | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase peningkatan fasilitasi musrenbang Nagari dan Kecamatan serta Dana Desa** | | | | **80 %** | **80 %** | **18.000.000,00** | **4.790.000,00** | **54.790.000,00** | **9.500.000,00** | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah nagari yang berstatus maju | | | | 20 % | 20 % | 6.000.000,00 | 4.790.000,00 | 54.790.000,00 | 48.790.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | Masyarakat dan Lembaga Nagari | | | KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 8 Lembaga Kemasyarakatan | 8 Lembaga Kemasyarakatan | 6.000.000,00 | 4.790.000,00 | 4.790.000,00 | -1.210.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 5.500.000,00 | KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | - | 5 Laporan | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT" Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT" | | | 0,00 | KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | - | | | | - | - | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | Masyarakat | | 22.000.000,00 | KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN |
| | 7.01.03.2.06.0001 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | | | | 50 Keluarga | 50 Keluarga | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | - | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 6.000.000,00 | KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN |
| | 7.01.03.2.06.0003 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | | 50 Keluarga | 50 Keluarga | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | - | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing "SAKATO UNGGUL" Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing "SAKATO UNGGUL" | | | 6.000.000,00 | KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN |
| | 7.01.03.2.06.0012 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | | | | 50 Keluarga | 50 Keluarga | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | - | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN |
| 4, | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan, konflik sosial dan koordinasi Forkompinca** | | | | **80 %** | **80 %** | **39.000.000,00** | **35.200.000,00** | **35.200.000,00** | **4.000.000,00** | | | | | | | **43.000.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Nilai IKM | | | | 8 Nagari | 8 Nagari | 39.000.000,00 | 35.200.000,00 | 35.200.000,00 | -3.800.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | Masyarakat | | 43.000.000,00 | KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN |
| | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | | 100 Orang | 100 Orang | 12.000.000,00 | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | -4.100.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | | | 13.000.000,00 | KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 27.000.000,00 | 27.300.000,00 | 27.300.000,00 | 300.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN |
| | | **KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI** | | | | | | | **1.664.974.065,00** | **1.624.119.829,00** | **2.034.459.814,00** | **369.485.749,00** | | | | | | | **1.782.500.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **1.664.974.065,00** | **1.624.119.829,00** | **2.034.459.814,00** | **369.485.749,00** | | | | | | | **1.782.500.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **1.664.974.065,00** | **1.624.119.829,00** | **2.034.459.814,00** | **369.485.749,00** | | | | | | | **1.782.500.000,00** | |
| 1, | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | - | **12 bulan** | **1.604.205.065,00** | **1.603.924.829,00** | **1.514.258.814,00** | **122.794.935,00** | | | | | | | **1.727.000.000,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | undefined | | | | - | undefined undefined | 4.113.700,00 | 0,00 | 0,00 | -4.113.700,00 | | | - | -<br>- | - | | 5.350.000,00 | KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.092.900,00 | 0,00 | 0,00 | -1.092.900,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 1.300.000,00 | KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.278.900,00 | 0,00 | 0,00 | -1.278.900,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 1.350.000,00 | KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | -820.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 1.400.000,00 | KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 921.900,00 | 0,00 | 0,00 | -921.900,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 1.300.000,00 | KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari | | | | - | 12 bulan | 1.383.073.065,00 | 1.527.628.729,00 | 1.437.962.714,00 | 54.889.649,00 | | | - | - | - | | 1.471.300.000,00 | KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 14 Orang/b ulan | 14 Orang/b ulan | 1.381.873.065,00 | 1.527.628.729,00 | 1.437.962.714,00 | 56.089.649,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.470.000.000,00 | KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 1.300.000,00 | KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | tersedianya Pakaian Dinas harian untuk ASN dan Non ASN | | | | - | 16 ASN | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000.000,00 | | | - | - | - | | 7.500.000,00 | KECAMATAN SITUJUAH LIMO |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 16 Paket | 16 Paket | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 7.500.000,00 | KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari | | | | - | 12 Bulan | 43.650.500,00 | 7.341.500,00 | 7.341.500,00 | -36.309.000,00 | | | - | - | - | | 52.250.000,00 | KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 525.000,00 | 525.000,00 | 525.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 750.000,00 | KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 0 0 | 0 0 | 10.145.500,00 | 5.277.000,00 | 5.277.000,00 | -4.868.500,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 9.000.000,00 | KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2.791.000,00 | 1.539.500,00 | 1.539.500,00 | -1.251.500,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 2.500.000,00 | KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 30.189.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.189.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 40.000.000,00 | KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 47.532.000,00 | 0,00 | 0,00 | -47.532.000,00 | | | - | - | - | | 65.000.000,00 | KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 21.725.000,00 | 0,00 | 0,00 | -21.725.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 4 Unit | 4 Unit | 25.807.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.807.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 35.000.000,00 | KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pelaksanaan administrasi administras umum | | | | - | 12 Bulan | 43.045.800,00 | 7.034.600,00 | 7.034.600,00 | -36.011.200,00 | | | - | - | - | | 47.600.000,00 | KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 7.500.000,00 | 6.531.000,00 | 6.531.000,00 | -969.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 7.600.000,00 | KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 35.545.800,00 | 503.600,00 | 503.600,00 | -35.042.200,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 40.000.000,00 | KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya barang milik daerah | | | | - | 10 Kendaraan | 74.790.000,00 | 61.920.000,00 | 61.920.000,00 | -12.870.000,00 | | | - | - | - | | 78.000.000,00 | KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 10 Unit | 10 Unit | 60.050.000,00 | 60.050.000,00 | 60.050.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 65.000.000,00 | KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI |
| | 7.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 1 Unit | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 2.500.000,00 | KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 10 Unit | 10 Unit | 3.740.000,00 | 1.870.000,00 | 1.870.000,00 | -1.870.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 3.500.000,00 | KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 3 Unit | 3 Unit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 7.000.000,00 | KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI |
| 2, | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik** | | | | - | **undefined undefined** | **1.996.000,00** | **0,00** | **0,00** | **504.000,00** | | | | | | | **2.500.000,00** | |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Meningkatkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik | | | | - | undefined undefined | 1.996.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.996.000,00 | | | - | - | - | | 2.500.000,00 | KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI |
| | 7.01.02.2.02.0001 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.996.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.996.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 2.500.000,00 | KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI |
| 3, | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari** | | | | - | **5 NAGARI** | **31.673.000,00** | **5.455.000,00** | **505.461.000,00** | **-11.673.000,00** | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Rata-Rata Nilai Swadaya Masyrakat | | | | - | 5 Nagari | 26.650.000,00 | 5.455.000,00 | 505.461.000,00 | 478.811.000,00 | | | - | - | - | | 13.000.000,00 | KECAMATAN SITUJUAH LIMO |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 12 Lembaga K emasyarakatan | 12 Lembaga K emasyarakatan | 4.250.000,00 | 3.015.000,00 | 3.015.000,00 | -1.235.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 6.000.000,00 | KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 22.400.000,00 | 2.440.000,00 | 502.446.000,00 | 480.046.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 7.000.000,00 | KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI |
| | 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Meningkatkan Rata2 Nilai swadaya masyarakat | | | | - | 5 NAGARI | 5.023.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.023.000,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 7.000.000,00 | KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI |
| | 7.01.03.2.06.0007 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | 50 Keluarga | 50 Keluarga | 5.023.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.023.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 7.000.000,00 | KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI |
| 4, | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan** | | | | - | **5 NAGARI** | **27.100.000,00** | **14.740.000,00** | **14.740.000,00** | **5.900.000,00** | | | | | | | **33.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan | | | | - | 5 NAGARI | 27.100.000,00 | 14.740.000,00 | 14.740.000,00 | -12.360.000,00 | | | - | - | - | | 33.000.000,00 | KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 27.100.000,00 | 14.740.000,00 | 14.740.000,00 | -12.360.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 33.000.000,00 | KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI |
| | | **KECAMATAN HARAU** | | | | | | | **1.995.198.471,00** | **1.921.057.845,00** | **1.783.197.138,00** | **-212.001.333,00** | | | | | | | **2.134.271.500,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **1.995.198.471,00** | **1.921.057.845,00** | **1.783.197.138,00** | **-212.001.333,00** | | | | | | | **2.134.271.500,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **1.995.198.471,00** | **1.921.057.845,00** | **1.783.197.138,00** | **-212.001.333,00** | | | | | | | **2.134.271.500,00** | |
| 1, | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | | | | - | - | **1.921.841.871,00** | **1.884.697.845,00** | **1.696.837.138,00** | **123.429.629,00** | | | | | | | **2.045.271.500,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 7.969.000,00 | 9.415.800,00 | 9.415.800,00 | 1.446.800,00 | | | - | - | - | | 9.922.000,00 | KECAMATAN HARAU |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1.453.000,00 | 1.453.000,00 | 1.453.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 1.651.000,00 | KECAMATAN HARAU |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.423.000,00 | 1.423.000,00 | 1.423.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 1.610.000,00 | KECAMATAN HARAU |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.207.000,00 | 1.207.000,00 | 1.207.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 1.305.000,00 | KECAMATAN HARAU |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.596.000,00 | 1.596.000,00 | 1.596.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 1.794.000,00 | KECAMATAN HARAU |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.209.000,00 | 1.209.000,00 | 1.209.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 1.501.000,00 | KECAMATAN HARAU |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 2 Dokumen Laporan | 2 Dokumen Laporan | 1.081.000,00 | 2.527.800,00 | 2.527.800,00 | 1.446.800,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 2.061.000,00 | KECAMATAN HARAU |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 1.708.298.671,00 | 1.777.921.845,00 | 1.590.061.138,00 | -118.237.533,00 | | | - | - | - | | 1.810.049.500,00 | KECAMATAN HARAU |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 19 Orang/b ulan | 19 Orang/b ulan | 1.703.038.871,00 | 1.775.657.845,00 | 1.587.797.138,00 | -115.241.733,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.803.000.000,00 | KECAMATAN HARAU |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.446.800,00 | 0,00 | 0,00 | -1.446.800,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 1.849.500,00 | KECAMATAN HARAU |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.188.000,00 | 1.188.000,00 | 1.188.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 1.500.000,00 | KECAMATAN HARAU |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.549.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.549.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 2.200.000,00 | KECAMATAN HARAU |
| | 7.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.076.000,00 | 1.076.000,00 | 1.076.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 1.500.000,00 | KECAMATAN HARAU |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 1.104.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 | -444.000,00 | | | - | - | - | | 1.500.000,00 | KECAMATAN HARAU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 1.104.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 | -444.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 1.500.000,00 | KECAMATAN HARAU |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 1.744.000,00 | 1.202.000,00 | 1.202.000,00 | -542.000,00 | | | - | - | - | | 4.000.000,00 | KECAMATAN HARAU |
| | 7.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.744.000,00 | 1.202.000,00 | 1.202.000,00 | -542.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 4.000.000,00 | KECAMATAN HARAU |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 72.604.800,00 | 23.796.800,00 | 23.796.800,00 | -48.808.000,00 | | | - | - | - | | 85.500.000,00 | KECAMATAN HARAU |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 2.133.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.133.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN HARAU |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 3 Paket | 21.442.000,00 | 0,00 | 0,00 | -21.442.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 25.000.000,00 | KECAMATAN HARAU |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 9.561.200,00 | 9.561.200,00 | 9.561.200,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN HARAU |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 6.827.600,00 | 4.580.600,00 | 4.580.600,00 | -2.247.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 8.000.000,00 | KECAMATAN HARAU |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 4.256.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.256.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 4.500.000,00 | KECAMATAN HARAU |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 28.385.000,00 | 9.655.000,00 | 9.655.000,00 | -18.730.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 35.000.000,00 | KECAMATAN HARAU |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 66.471.400,00 | 9.471.400,00 | 9.471.400,00 | -57.000.000,00 | | | - | - | - | | 66.100.000,00 | KECAMATAN HARAU |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 50 lembar Laporan | 50 lembar Laporan | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 600.000,00 | KECAMATAN HARAU |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 bulan Laporan | 12 bulan Laporan | 8.340.000,00 | 5.340.000,00 | 5.340.000,00 | -3.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 9.500.000,00 | KECAMATAN HARAU |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan Laporan | 12 bulan Laporan | 57.631.400,00 | 3.631.400,00 | 3.631.400,00 | -54.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 56.000.000,00 | KECAMATAN HARAU |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 63.650.000,00 | 62.230.000,00 | 62.230.000,00 | -1.420.000,00 | | | - | - | - | | 68.200.000,00 | KECAMATAN HARAU |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 8 Unit | 8 Unit | 61.050.000,00 | 61.050.000,00 | 61.050.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 65.000.000,00 | KECAMATAN HARAU |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 4 Unit | 4 Unit | 2.600.000,00 | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | -1.420.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 3.200.000,00 | KECAMATAN HARAU |
| 2, | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | - | | | | - | - | **2.106.400,00** | **0,00** | **0,00** | **1.893.600,00** | | | | | | | **4.000.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 691.400,00 | 0,00 | 0,00 | -691.400,00 | | | - | - | - | | 1.500.000,00 | KECAMATAN HARAU |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 691.400,00 | 0,00 | 0,00 | -691.400,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 1.500.000,00 | KECAMATAN HARAU |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | | | | - | - | 1.415.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.415.000,00 | | | - | - | - | | 2.500.000,00 | KECAMATAN HARAU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 12 bulan Laporan | 12 bulan Laporan | 1.415.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.415.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 2.500.000,00 | KECAMATAN HARAU |
| 3, | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | - | | | | - | - | **13.376.700,00** | **3.860.000,00** | **53.860.000,00** | **2.623.300,00** | | | | | | | **16.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 9.636.700,00 | 3.860.000,00 | 53.860.000,00 | 44.223.300,00 | | | - | - | - | | 11.000.000,00 | KECAMATAN HARAU |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 11 Lembaga K emasyarakatan | 11 Lembaga K emasyarakatan | 7.960.000,00 | 3.860.000,00 | 3.860.000,00 | -4.100.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | | KECAMATAN HARAU |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 11 Laporan | 11 Laporan | 1.676.700,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 48.323.300,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | | KECAMATAN HARAU |
| | 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan | - | | | | - | - | 3.740.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.740.000,00 | | | - | - | - | | | KECAMATAN HARAU |
| | 7.01.03.2.06.0007 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | 12 bulan Keluarga | 12 bulan Keluarga | 3.740.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.740.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | | KECAMATAN HARAU |
| 4, | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | - | | | | - | - | **3.227.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.773.000,00** | | | | | | | | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | | | | - | - | 1.405.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.405.000,00 | | | - | - | - | | | KECAMATAN HARAU |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | 11 Laporan | 11 Laporan | 1.405.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.405.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | | KECAMATAN HARAU |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 1.822.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.822.000,00 | | | - | - | - | | | KECAMATAN HARAU |
| | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | 11 Laporan | 11 Laporan | 1.822.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.822.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | | | | KECAMATAN HARAU |
| 5, | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | - | | | | - | - | **44.770.000,00** | **32.500.000,00** | **32.500.000,00** | **4.730.000,00** | | | | | | | | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 44.770.000,00 | 32.500.000,00 | 32.500.000,00 | -12.270.000,00 | | | - | - | - | | | KECAMATAN HARAU |
| | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | 33 Orang | 33 Orang | 3.520.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.520.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | | | | KECAMATAN HARAU |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 41.250.000,00 | 32.500.000,00 | 32.500.000,00 | -8.750.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | | KECAMATAN HARAU |
| 6, | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | - | | | | - | - | **9.876.500,00** | **0,00** | **0,00** | **4.623.500,00** | | | | | | | | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | | | | - | - | 9.876.500,00 | 0,00 | 0,00 | -9.876.500,00 | | | - | - | - | | | KECAMATAN HARAU |
| | 7.01.06.2.01.0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | | | | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 1.580.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.580.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | | | | KECAMATAN HARAU |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.350.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | | | | KECAMATAN HARAU |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 1.762.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.762.500,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | | | | KECAMATAN HARAU |
| | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 1.769.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.769.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | | | | KECAMATAN HARAU |
| | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | 11 Laporan | 11 Laporan | 1.791.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.791.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | | | 2.500.000,00 | KECAMATAN HARAU |
| | 7.01.06.2.01.0018 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | | | | 11 Laporan | 11 Laporan | 1.624.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.624.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - | | | 2.500.000,00 | KECAMATAN HARAU |
| | | **KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU** | | | | | | | **1.856.082.828,00** | **1.750.850.562,00** | **1.448.818.733,00** | **-407.264.095,00** | | | | | | | **2.105.286.099,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **1.856.082.828,00** | **1.750.850.562,00** | **1.448.818.733,00** | **-407.264.095,00** | | | | | | | **2.105.286.099,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **1.856.082.828,00** | **1.750.850.562,00** | **1.448.818.733,00** | **-407.264.095,00** | | | | | | | **2.105.286.099,00** | |
| 1, | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | - | | | | - | - | **1.741.402.828,00** | **1.723.100.562,00** | **1.371.068.733,00** | **191.898.271,00** | | | | | | | **1.933.301.099,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Penyusunan laporan OPD | | | | - | 20 % | 7.782.000,00 | 3.519.000,00 | 3.519.000,00 | -4.263.000,00 | | | - | - | - | | 12.124.000,00 | KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1.586.000,00 | 1.126.000,00 | 1.126.000,00 | -460.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 4.741.000,00 | KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.230.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 2.054.000,00 | KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 4.966.000,00 | 2.393.000,00 | 2.393.000,00 | -2.573.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 5.329.000,00 | KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan laporan OPD | | | | - | 20 % | 1.547.320.156,00 | 1.618.890.562,00 | 1.266.858.733,00 | -280.461.423,00 | | | - | - | - | | 1.670.289.691,00 | KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 16 Orang/b ulan | 16 Orang/b ulan | 1.541.082.156,00 | 1.616.610.562,00 | 1.264.578.733,00 | -276.503.423,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.662.133.191,00 | KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3.644.000,00 | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | -1.794.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 4.774.000,00 | KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.594.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | -2.164.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.382.500,00 | KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Laporan asset semester dan akhir tahun | | | | - | 1 Dokumen | 2.515.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | -1.365.000,00 | | | - | - | - | | 4.035.000,00 | KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU |
| | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.515.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | -1.365.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 4.035.000,00 | KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase pelaksanaan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur dan baju dinas ASN dan Non ASN | | | | - | 20 % | 10.700.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | -9.600.000,00 | | | - | - | - | | 13.460.000,00 | KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 16 Paket | 16 Paket | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU |
| | 7.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 16 Dokumen | 16 Dokumen | 2.700.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | -1.600.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.460.000,00 | KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pelaksanaan Administrasi Umum | | | | - | 20 % | 75.591.000,00 | 27.620.400,00 | 27.620.400,00 | -47.970.600,00 | | | - | - | - | | 107.182.000,00 | KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 10 Paket | 10 Paket | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | -550.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 1.000.000,00 | KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 14.585.000,00 | 0,00 | 0,00 | -14.585.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 6.260.000,00 | 5.206.200,00 | 5.206.200,00 | -1.053.800,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 9.845.000,00 | KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 4.330.000,00 | 3.379.200,00 | 3.379.200,00 | -950.800,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 4.971.000,00 | KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 49.866.000,00 | 19.035.000,00 | 19.035.000,00 | -30.831.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 61.366.000,00 | KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pelaksanaan Administrasi Umum | | | | - | 20 % | 4.681.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.681.000,00 | | | - | - | - | | 25.000.000,00 | KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 4.681.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.681.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 25.000.000,00 | KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pelaksanaan Administrasi Umum | | | | - | 20 % | 30.177.672,00 | 9.083.600,00 | 9.083.600,00 | -21.094.072,00 | | | - | - | - | | 33.650.408,00 | KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 20 Laporan | 20 Laporan | 200.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | -50.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 250.000,00 | KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 8.700.000,00 | 7.300.000,00 | 7.300.000,00 | -1.400.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 12.000.000,00 | KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 21.277.672,00 | 1.633.600,00 | 1.633.600,00 | -19.644.072,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 21.400.408,00 | KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pelaksanaan Administrasi Umum | | | | - | 20 % | 62.636.000,00 | 61.737.000,00 | 61.737.000,00 | -899.000,00 | | | - | - | - | | 67.560.000,00 | KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 7 Unit | 7 Unit | 60.050.000,00 | 60.050.000,00 | 60.050.000,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 63.500.000,00 | KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 6 Unit | 6 Unit | 2.586.000,00 | 1.687.000,00 | 1.687.000,00 | -899.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 4.060.000,00 | KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU |
| 2, | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | - | | | | - | - | **8.300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-8.300.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat | | | | - | 800 Dokumen | 8.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.300.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 4.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.150.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3, | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | - | | | | - | - | **38.280.000,00** | **6.750.000,00** | **56.750.000,00** | **63.505.000,00** | | | | | | | **101.785.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Rata-rata Nilai Swadaya Masyarakat | | | | - | 20 % | 28.060.000,00 | 3.590.000,00 | 53.590.000,00 | 25.530.000,00 | | | - | - | - | | 85.385.000,00 | KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 6 Lembaga Kemasyarakatan | 6 Lembaga Kemasyarakatan | 4.410.000,00 | 3.590.000,00 | 3.590.000,00 | -820.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 5.385.000,00 | KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 2 Laporan | 1 Laporan | 23.650.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 26.350.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 80.000.000,00 | KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU |
| | 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan | - | | | | - | - | 10.220.000,00 | 3.160.000,00 | 3.160.000,00 | -7.060.000,00 | | | - | - | - | | 16.400.000,00 | KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU |
| | 7.01.03.2.06.0007 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | 240 Keluarga | 240 Keluarga | 10.220.000,00 | 3.160.000,00 | 3.160.000,00 | -7.060.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 16.400.000,00 | KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU |
| 4, | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | - | | | | - | - | **68.100.000,00** | **21.000.000,00** | **21.000.000,00** | **2.100.000,00** | | | | | | | **70.200.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan di Kecamatan | | | | - | 6 Nagari | 68.100.000,00 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | -47.100.000,00 | | | - | - | - | | 70.200.000,00 | KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 68.100.000,00 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | -47.100.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 70.200.000,00 | KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU |
| | | **KECAMATAN KAPUR IX** | | | | | | | **2.088.857.730,00** | **2.304.172.031,00** | **1.887.754.225,00** | **-201.103.505,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.088.857.730,00** | **2.304.172.031,00** | **1.887.754.225,00** | **-201.103.505,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.088.857.730,00** | **2.304.172.031,00** | **1.887.754.225,00** | **-201.103.505,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1, | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten pada Perangkat Daerah** | | | | **80 %** | **80 %** | **2.002.857.730,00** | **2.268.565.031,00** | **1.802.147.225,00** | **-2.002.857.730,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | **[ Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintah ]** | - | - | - | - | - | - | **2.002.857.730,00** | **2.268.565.031,00** | **1.802.147.225,00** | - | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu | | | | 100 % | 100 % | 7.000.000,00 | 4.093.000,00 | 4.093.000,00 | -2.907.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN KAPUR IX |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 3.000.000,00 | 1.274.000,00 | 1.274.000,00 | -1.726.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN KAPUR IX |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | 999.000,00 | 999.000,00 | -1.001.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN KAPUR IX |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | 870.000,00 | 870.000,00 | -130.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN KAPUR IX |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.000.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | -50.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN KAPUR IX |
| | | - | - | - | - | - | - | - | **2.002.857.730,00** | **2.268.565.031,00** | **1.802.147.225,00** | - | - | - | - | - | - | - | **0,00** | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terpenuhinya administrasi keuangan Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu | | | | 100 % | 100 % | 1.785.983.730,00 | 2.153.608.032,00 | 1.687.190.226,00 | -98.793.504,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN KAPUR IX |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 17 Orang/b ulan | 17 Orang/b ulan | 1.781.983.730,00 | 2.151.958.032,00 | 1.685.540.226,00 | -96.443.504,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN KAPUR IX |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN KAPUR IX |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.000.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | -450.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN KAPUR IX |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | -900.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN KAPUR IX |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu | | | | 100 % | 100 % | 1.000.000,00 | 860.000,00 | 860.000,00 | -140.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN KAPUR IX |
| | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.000.000,00 | 860.000,00 | 860.000,00 | -140.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN KAPUR IX |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu | | | | 100 % | 100 % | 1.000.000,00 | 704.000,00 | 704.000,00 | -296.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN KAPUR IX |
| | 7.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | 704.000,00 | 704.000,00 | -296.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN KAPUR IX |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 63.500.000,00 | 41.479.431,00 | 41.479.431,00 | -22.020.569,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN KAPUR IX |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 1.000.000,00 | 636.000,00 | 636.000,00 | -364.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN KAPUR IX |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 5.805.400,00 | 5.805.400,00 | -4.194.600,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN KAPUR IX |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 3.000.000,00 | 2.988.031,00 | 2.988.031,00 | -11.969,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN KAPUR IX |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.500.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | -1.050.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN KAPUR IX |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 48.000.000,00 | 31.600.000,00 | 31.600.000,00 | -16.400.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN KAPUR IX |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah untuk menunjang urusan pemerintah daerah pada Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN KAPUR IX |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 0 Unit | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN KAPUR IX |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 37.300.000,00 | 22.380.568,00 | 22.380.568,00 | -14.919.432,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN KAPUR IX |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.500.000,00 | 10.240.000,00 | 10.240.000,00 | -260.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN KAPUR IX |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 26.800.000,00 | 12.140.568,00 | 12.140.568,00 | -14.659.432,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN KAPUR IX |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Perangkat Daerah | | | | 80 % | 80 % | 77.074.000,00 | 45.440.000,00 | 45.440.000,00 | -31.634.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN KAPUR IX |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 7 Unit | 7 Unit | 52.800.000,00 | 40.650.000,00 | 40.650.000,00 | -12.150.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN KAPUR IX |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 6 Unit | 6 Unit | 12.000.000,00 | 4.790.000,00 | 4.790.000,00 | -7.210.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN KAPUR IX |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 0 Unit | 12.274.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.274.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN KAPUR IX |
| 2, | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Nilai AKIP** | | | | **80 %** | **60 nilai** | **22.000.000,00** | **1.692.000,00** | **1.692.000,00** | **-22.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase pelaksanaan koordinasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang efektif | | | | 80 % | 80 % | 2.000.000,00 | 842.000,00 | 842.000,00 | -1.158.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN KAPUR IX |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.000.000,00 | 842.000,00 | 842.000,00 | -1.158.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN KAPUR IX |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan | | | | 80 % | 80 % | 20.000.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | -19.150.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN KAPUR IX |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20.000.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | -19.150.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN KAPUR IX |
| 3, | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari** | | | | - | **60 %** | **28.000.000,00** | **5.415.000,00** | **55.415.000,00** | **-28.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase terlaksannya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/nagari di tingkat kecamatan yang efektif | | | | - | 80 % | 28.000.000,00 | 5.415.000,00 | 55.415.000,00 | 27.415.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN KAPUR IX |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 7 Lembaga Kemasyara katan | 7 Lembaga Kemasyara katan | 8.000.000,00 | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | -5.250.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN KAPUR IX |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20.000.000,00 | 2.665.000,00 | 52.665.000,00 | 32.665.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN KAPUR IX |
| 4, | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan** | | | | **80 %** | **53 %** | **28.000.000,00** | **27.000.000,00** | **27.000.000,00** | **-28.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di tingkat kecamatan | | | | 80 % | 80 % | 28.000.000,00 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | -1.000.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN KAPUR IX |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 28.000.000,00 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | -1.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN KAPUR IX |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 5, | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari** | | | | **80 %** | **53 %** | **8.000.000,00** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **-8.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinas pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa di tingkat kecamatan yang efektif | | | | 80 % | 80 % | 8.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | -6.500.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN KAPUR IX |
| | 7.01.06.2.01.0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN KAPUR IX |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | -2.250.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN KAPUR IX |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | -2.250.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN KAPUR IX |
| | | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | **5.307.271.206,00** | **5.095.028.026,00** | **4.913.451.426,00** | **-393.819.780,00** | | | | | | | **10.080.740.645,00** | |
| | **8** | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | **5.307.271.206,00** | **5.095.028.026,00** | **4.913.451.426,00** | **-393.819.780,00** | | | | | | | **10.080.740.645,00** | |
| | **8.01** | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | **5.307.271.206,00** | **5.095.028.026,00** | **4.913.451.426,00** | **-393.819.780,00** | | | | | | | **10.080.740.645,00** | |
| 1, | **8.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | **100 %** | **100 %** | **3.753.011.982,00** | **3.284.877.432,00** | **3.103.300.832,00** | **97.054.945,00** | | | | | | | **3.850.066.927,00** | |
| | 8.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 % | 100 % | 35.373.300,00 | 10.000.001,00 | 10.000.001,00 | -25.373.299,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 26.641.965,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 20.153.300,00 | 10.000.001,00 | 10.000.001,00 | -10.153.299,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 13.810.965,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 18 Laporan | 18 Laporan | 15.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.220.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 12.831.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 % | 100 % | 3.064.225.673,00 | 3.099.466.931,00 | 2.917.890.331,00 | -146.335.342,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 3.138.701.273,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 29 Orang/b ulan | 29 Orang/b ulan | 3.033.184.673,00 | 3.099.466.931,00 | 2.917.890.331,00 | -115.294.342,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 3.105.660.273,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 19.191.000,00 | 0,00 | 0,00 | -19.191.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 20.191.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD | | | | 16 Laporan | 16 Laporan | 11.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.850.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 12.850.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 % | 100 % | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 11.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 11.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 % | 100 % | 186.038.509,00 | 81.200.000,00 | 81.200.000,00 | -104.838.509,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 195.428.689,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 8.066.000,00 | 1.228.000,00 | 1.228.000,00 | -6.838.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 12.100.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 3.366.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.366.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 20.725.280,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 35.742.100,00 | 12.666.000,00 | 12.666.000,00 | -23.076.100,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 36.740.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 13.853.409,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | -7.853.409,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 14.853.409,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 5.010.000,00 | 2.306.000,00 | 2.306.000,00 | -2.704.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 6.010.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 24 Laporan | 24 Laporan | 120.001.000,00 | 59.000.000,00 | 59.000.000,00 | -61.001.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 105.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 % | 100 % | 90.859.000,00 | 0,00 | 0,00 | -90.859.000,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 145.670.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 73.518.000,00 | 0,00 | 0,00 | -73.518.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 38.500.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 3 Unit | 3 Unit | 14.407.000,00 | 0,00 | 0,00 | -14.407.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 46.718.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 4 Unit | 4 Unit | 2.934.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.934.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 60.452.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 % | 100 % | 157.510.500,00 | 13.110.500,00 | 13.110.500,00 | -144.400.000,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 123.710.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.000.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | -400.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 1.200.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 12.510.500,00 | 12.510.500,00 | 12.510.500,00 | 0,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 13.510.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 144.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -144.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 109.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 % | 100 % | 209.005.000,00 | 81.100.000,00 | 81.100.000,00 | -127.905.000,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 208.915.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 12 Unit | 12 Unit | 179.990.000,00 | 81.100.000,00 | 81.100.000,00 | -98.890.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 179.900.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 4 Unit | 4 Unit | 12.015.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.015.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 12.015.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -17.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 17.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 2, | **8.01.02** | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | **Persentase terlaksananya Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | | | | **90 %** | **90 %** | **831.131.824,00** | **460.000.400,00** | **460.000.400,00** | **1.236.068.628,00** | | | | | | | **2.067.200.452,00** | |
| | 8.01.02.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemantapan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | | 90 % | 90 % | 831.131.824,00 | 460.000.400,00 | 460.000.400,00 | -371.131.424,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 2.067.200.452,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | 150 Orang | 150 Orang | 24.640.124,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | -4.640.124,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 137.313.225,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | 650 Orang | 650 Orang | 182.234.100,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | -82.234.100,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 241.500.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.2.01.0006 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | | | | 120 Keluarga | 120 Keluarga | 22.185.000,00 | 0,00 | 0,00 | -22.185.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 44.294.250,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.2.01.0007 | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka | | | | 28 Dokumen | 28 Dokumen | 10.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 30.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 40.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.2.01.0008 | Pembentukan Paskibraka | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paskibraka | | | | 28 Orang | 28 Orang | 592.072.600,00 | 300.000.400,00 | 300.000.400,00 | -292.072.200,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 1.604.092.977,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 3, | **8.01.03** | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA** | **Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik** | | | | **90 %** | **90 %** | **165.855.400,00** | **1.138.257.194,00** | **1.138.257.194,00** | **3.028.499.316,00** | | | | | | | **3.194.354.716,00** | |
| | 8.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta | Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik | | | | 90 % | 90 % | 165.855.400,00 | 1.138.257.194,00 | 1.138.257.194,00 | 972.401.794,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 3.194.354.716,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | 390 Orang | 390 Orang | 63.090.400,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | -43.090.400,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 569.509.500,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | 150 Orang | 150 Orang | 93.465.000,00 | 1.038.257.194,00 | 1.038.257.194,00 | 944.792.194,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 1.091.288.303,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.03.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 9.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.300.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 442.268.610,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.03.2.01.0006 | Pelaksanaan tugas Paskibraka | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka | | | | - | 54 Kegiatan | 0,00 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 1.091.288.303,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 4, | **8.01.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | **Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas** | | | | **90 %** | **90 %** | **13.939.000,00** | **25.893.000,00** | **25.893.000,00** | **6.635.750,00** | | | | | | | **20.574.750,00** | |
| | 8.01.04.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas | | | | 90 % | 90 % | 13.939.000,00 | 25.893.000,00 | 25.893.000,00 | 11.954.000,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 20.574.750,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.04.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 13.939.000,00 | 25.893.000,00 | 25.893.000,00 | 11.954.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 20.574.750,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 5, | **8.01.05** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | **Persentase Meningkatnya Kerukunan Umat beragama dan Pengawasan terhadap aliran atau Paham Keagamaan di Masyarakat** | | | | **85 %** | **85 %** | **79.998.000,00** | **68.500.000,00** | **68.500.000,00** | **135.420.000,00** | | | | | | | **215.418.000,00** | |
| | 8.01.05.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Persentase Meningkatnya Kerukunan Umat beragama dan Pengawasan terhadap aliran atau Paham Keagamaan di Masyarakat | | | | 85 % | 85 % | 79.998.000,00 | 68.500.000,00 | 68.500.000,00 | -11.498.000,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 215.418.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.05.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | 60 Orang | 60 Orang | 39.998.000,00 | 24.775.000,00 | 24.775.000,00 | -15.223.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 89.418.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.05.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | 360 Orang | 360 Orang | 40.000.000,00 | 43.725.000,00 | 43.725.000,00 | 3.725.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 126.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 6, | **8.01.06** | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK** | **Persentase Meningkatnya Kamtibmas demi terjaganya Stabilitas Nasional di Daerah** | | | | **90 %** | **90 %** | **463.335.000,00** | **117.500.000,00** | **117.500.000,00** | **269.790.800,00** | | | | | | | **733.125.800,00** | |
| | 8.01.06.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Persentase Meningkatnya Kamtibmas demi terjaganya Stabilitas Nasional di Daerah | | | | 90 % | 90 % | 463.335.000,00 | 117.500.000,00 | 117.500.000,00 | -345.835.000,00 | | | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | - | | 733.125.800,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta | | | | 142 Orang | 142 Orang | 15.000.000,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 50.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | 360 Orang | 360 Orang | 90.775.000,00 | 80.500.000,00 | 80.500.000,00 | -10.275.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 209.690.250,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.2.01.0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 357.560.000,00 | 37.000.000,00 | 37.000.000,00 | -320.560.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS" | | | 473.435.550,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** | | | | | | | **6.777.578.608,00** | **6.029.304.897,00** | **7.810.565.478,00** | **1.032.986.870,00** | | | | | | | **7.388.156.910,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **6.372.236.808,00** | **6.029.304.897,00** | **7.810.565.478,00** | **1.438.328.670,00** | | | | | | | **7.388.156.910,00** | |
| | **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN** | | | | | | | **6.372.236.808,00** | **6.029.304.897,00** | **7.810.565.478,00** | **1.438.328.670,00** | | | | | | | **7.388.156.910,00** | |
| 1, | **1.05.03** | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | **Persentase pemenuhan terhadap pelaksanaan Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah** | | | | - | **100 persen** | **2.481.965.344,00** | **399.942.000,00** | **2.485.368.200,00** | **644.917.196,00** | | | | | | | **3.126.882.540,00** | |
| | 1.05.03.2.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | - | 100 persen | 49.988.000,00 | 65.763.000,00 | 65.763.000,00 | 15.775.000,00 | | | - | - - | - | | 100.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.01.0007 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun | | | | 100 Orang | 100 Orang | 49.988.000,00 | 65.763.000,00 | 65.763.000,00 | 15.775.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 100.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | | **[ Penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Lima Puluh Kota ]** | - | - | - | - | - | - | **2.481.965.344,00** | **399.942.000,00** | **2.485.368.200,00** | - | - | - | - | - | - | - | **3.126.882.540,00** | - |
| | 1.05.03.2.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | | - | 100 persen | 1.800.560.344,00 | 325.575.000,00 | 1.775.117.300,00 | -25.443.044,00 | | | - | - - | - | | 2.239.850.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0013 | Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani | | | | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 49.999.900,00 | 0,00 | 0,00 | -49.999.900,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 119.850.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0015 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat | | | | 10 Unit | 10 Unit | 30.000.000,00 | 41.534.000,00 | 766.693.000,00 | 736.693.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 100.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0018 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota | | | | 150 Orang | 150 Orang | 99.965.000,00 | 39.035.000,00 | 39.035.000,00 | -60.930.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 100.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0019 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | | | | 50 Keluarga | 50 Keluarga | 29.999.900,00 | 0,00 | 0,00 | -29.999.900,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 35.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0021 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana | | | | 50 Orang | 50 Orang | 55.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 55.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0022 | Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 350.001.000,00 | 0,00 | 440.190.000,00 | 90.189.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 350.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0026 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya | | | | 5 laporan | 5 laporan | 380.000.000,00 | 199.866.000,00 | 384.056.000,00 | 4.056.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 480.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0028 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana | | | | 13 Kawasan | 13 Kawasan | 805.594.544,00 | 45.140.000,00 | 145.143.300,00 | -660.451.244,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 1.000.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | - | | | | - | - | 377.000.000,00 | 8.604.000,00 | 8.604.000,00 | -368.396.000,00 | | | - | - | - | | 477.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03.0002 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 20.000.000,00 | 2.964.000,00 | 2.964.000,00 | -17.036.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03.0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | | | | 50 Orang | 50 Orang | 20.000.000,00 | 5.640.000,00 | 5.640.000,00 | -14.360.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03.0008 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis | | | | 89 Orang | 89 Orang | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 75.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03.0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | | 200 Orang | 200 Orang | 252.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -252.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 252.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03.0012 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | 50.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | - | | | | - | - | 254.417.000,00 | 0,00 | 635.883.900,00 | 381.466.900,00 | | | - | - | - | | 310.032.540,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04.0004 | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 65.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -65.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 100.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04.0008 | Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) | | | | 30 Orang | 30 Orang | 39.999.800,00 | 0,00 | 69.380.600,00 | 29.380.800,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 50.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04.0010 | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan | | | | 5 Kegiatan | 5 Kegiatan | 149.417.200,00 | 0,00 | 566.503.300,00 | 417.086.100,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 160.032.540,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| 2, | **8.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan terhadap pelaksanaan Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah** | | | | - | **100 persen** | **4.295.613.264,00** | **5.629.362.897,00** | **5.325.197.278,00** | **-34.338.894,00** | | | | | | | **4.261.274.370,00** | |
| | | | | - | - | - | - | - | **4.295.613.264,00** | **5.629.362.897,00** | **5.325.197.278,00** | - | - | - | - | - | - | - | **4.261.274.370,00** | - |
| | 8.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 79.061.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | -73.061.000,00 | | | - | - | - | | 59.369.880,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 8.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 59.364.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | -53.364.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 59.369.880,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 8.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 3.570.578.964,00 | 5.364.241.897,00 | 5.060.076.278,00 | 1.489.497.314,00 | | | - | - | - | | 3.561.365.723,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 8.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 12 Orang/b ulan | 12 Orang/b ulan | 3.519.074.964,00 | 5.346.124.897,00 | 5.041.959.278,00 | 1.522.884.314,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 3.519.022.723,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 8.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 35.520.000,00 | 15.120.000,00 | 15.120.000,00 | -20.400.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 25.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 8.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 7.984.000,00 | 2.997.000,00 | 2.997.000,00 | -4.987.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 5.133.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 8.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 12.210.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 8.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 34.090.000,00 | 3.008.000,00 | 3.008.000,00 | -31.082.000,00 | | | - | - | - | | 30.084.860,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 8.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 19.976.000,00 | 3.008.000,00 | 3.008.000,00 | -16.968.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 25.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 8.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 2 Orang | 2 Orang | 14.114.000,00 | 0,00 | 0,00 | -14.114.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 5.084.860,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 8.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 257.290.800,00 | 68.321.500,00 | 68.321.500,00 | -188.969.300,00 | | | - | - | - | | 382.817.107,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 8.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 4.991.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | -4.501.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 5.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 8.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 5 Paket | 5 Paket | 74.727.000,00 | 0,00 | 0,00 | -74.727.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 50.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 8.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 5 Paket | 5 Paket | 0,00 | 23.475.500,00 | 23.475.500,00 | 23.475.500,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 41.107.107,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 8.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 5 Paket | 5 Paket | 31.560.000,00 | 14.018.000,00 | 14.018.000,00 | -17.542.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 31.560.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 8.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 5.150.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | -4.400.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 5.150.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 8.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 24 Laporan | 24 Laporan | 0,00 | 29.588.000,00 | 29.588.000,00 | 29.588.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 250.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 8.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | - | 100 % | 79.419.000,00 | 0,00 | 0,00 | -79.419.000,00 | | | - | - | - | | 50.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 8.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 3 Unit | 3 Unit | 15.153.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.153.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | - | | | 50.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 8.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 96.000.000,00 | 99.480.000,00 | 99.480.000,00 | 3.480.000,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 78.280.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 8.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 1.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 8.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 62.980.000,00 | 62.980.000,00 | 62.980.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 41.280.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 8.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 0,00 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 36.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 8.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 179.173.500,00 | 88.311.500,00 | 88.311.500,00 | -90.862.000,00 | | | - | - - | - | | 99.356.800,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 8.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 5 Unit | 5 Unit | 94.657.500,00 | 82.017.500,00 | 82.017.500,00 | -12.640.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 92.386.800,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 8.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 5.250.000,00 | 5.250.000,00 | 5.250.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 5.970.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 8.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 1.044.000,00 | 1.044.000,00 | 1.044.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 1.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | **8** | | | | | | | | **405.341.800,00** | **0,00** | **0,00** | **-405.341.800,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **8.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **405.341.800,00** | **0,00** | **0,00** | **-405.341.800,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 8.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 79.061.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | -73.061.000,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 59.369.880,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 8.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 19.697.000,00 | 0,00 | 0,00 | -19.697.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 8.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 257.290.800,00 | 68.321.500,00 | 68.321.500,00 | -188.969.300,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 382.817.107,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 8.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 5 Paket | 5 Paket | 41.040.800,00 | 0,00 | 0,00 | -41.040.800,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 8.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 24 Laporan | 24 Laporan | 99.822.000,00 | 0,00 | 0,00 | -99.822.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 8.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | - | 100 % | 79.419.000,00 | 0,00 | 0,00 | -79.419.000,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 50.000.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 8.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 10 Unit | 10 Unit | 64.266.000,00 | 0,00 | 0,00 | -64.266.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 8.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 96.000.000,00 | 99.480.000,00 | 99.480.000,00 | 3.480.000,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 78.280.000,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 8.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 8.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 59.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -59.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 8.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 36.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -36.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 8.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 179.173.500,00 | 88.311.500,00 | 88.311.500,00 | -90.862.000,00 | | | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | - | | 99.356.800,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 8.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2026 | APBD 2026 | RKPD PERUBAHAN 2026 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 2 Unit | 2 Unit | 9.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.540.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | 8.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 2 Unit | 74.976.000,00 | 0,00 | 0,00 | -74.976.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL" | | | 0,00 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | **J U M L A H** | | | | | | | | **1.360.521.574.909,00** | **1.254.725.169.358,00** | **1.323.519.798.241,00** | **-37.001.776.668,00** | | | | | | | **1.556.416.955.582,60** | |

# BAB VI
# PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 adalah rencana kerja tahun awal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029, di mana program dan kegiatan yang dituangkan di dalam RKPD merupakan penggalan dari RPJMD dan Renstra OPD untuk tahun 2026. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RKPD dimaksud dapat dilakukan perubahan di tahun berjalan berdasarkan ketentuan perubahan dokumen RKPD yang telah diatur di dalam Permendagri tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka Perubahan RKPD Tahun 2026 selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026, pedoman bagi perencanaan penganggaran daerah dalam bentuk Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026, serta pedoman bagi *stakeholder* lainnya dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan pada tahun 2026.

Berkaitan dengan hal di atas serta untuk menjamin terlaksananya program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan pada tahun 2026 dengan baik, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 dilaksanakan dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah yang sepenuhnya dijalankan secara bersama dan diarahkan oleh Bupati (Kepala Daerah) dalam kewajiban menyelenggarakan pemerintahan daerah.
2. Perubahan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 dilaksanakan di bawah koordinasi Sekretaris Daerah, sebagai pelaksana harian penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Perubahan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 merupakan pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.
4. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026, Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Lima Puluh Kota berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi terhadap penjabaran Perubahan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 ke dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026.
5. Seluruh OPD dan *stakeholders* dan/atau pelaku pembangunan lainnya berkewajiban melaksanakan program-program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 secara terintegrasi dan dengan mewujudkan sinergitas antar *stakeholder* terkait.

6. Perubahan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026.
7. Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, setiap OPD berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta jika diperlukan melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan, dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Evaluasi pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 dilakukan pada akhir tahun pelaksanaan RKPD terhadap indikator kinerja sasaran yang sudah ditetapkan dengan menggunakan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang dilakukan oleh Bappelitbangda bersama dengan seluruh OPD yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Di samping beberapa kaidah yang dirumuskan di atas, maka untuk kesuksesan pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Lima puluh Kota Tahun 2026, maka diperlukan dukungan dan komitmen semua pihak dalam pelaksanaannya, termasuk dukungan dari lembaga legislatif, Pemerintah Nagari dan masyarakat, serta seluruh *stakeholders* yang merasa berkepentingan dan memiliki Kabupaten Lima Puluh Kota.

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFNI


50
LIMA PULUH KOTA